BUKU II

BUKU LAPORAN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 660 / 0600/DLH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erzaldi Rosman
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

dengan ini menerangkan bahwa:

Penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal.
2. Alih Fungsi Lahan.
3. Banjir.
4. Degradasi Kualitas Air.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, 27 Juli 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Faximilie (0717) 439320 Pangkalpinang 33148 Email : Setdaprovbabel@babelprov.go.id

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas berkat limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62, mengamanatkan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan Dokumen IKPLHD ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup. Selain sebagai sarana untuk menyajikan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan di daerah, IKPLHD juga berguna sebagai bahan untuk melakukan penilaian dan menentukan prioritas masalah, serta membuat rekomendasi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun oleh Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Penyusunan dilaksanakan melalui proses identifikasi dan inventarisasi data, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah pusat, analisis dengan metode Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response (DPSIR), perumusan isu prioritas dengan

metode *Analytical Hierarchy Process (AHP),* dan perumusan rekomendasi didukung dengan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan bersama Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen.

Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berisi data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan di Kepulauan Bangka Belitung, di antaranya adalah kondisi dan kualitas lingkungan, tekanan-tekanan yang dialami antara lain terhadap tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, perkotaan serta tata kelola. Dokumen ini juga berisi gambaran aktivitas perekonomian penduduk dan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan ataupun direncanakan akan dilaksanakan. Informasi yang tersaji dalam Dokumen IKPLHD ini dilengkapi dengan grafik dan peta yang diharapkan bisa memperjelas penyajian informasi.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Dokumen IKPLHD ini. Kami berharap dokumen ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana sebagai referensi dalam perencanaan program pembangunan ataupun untuk keperluan positif lainnya dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang 27 Juli 2020

Gubernur kepulauan Bangka Belitung,

ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Kepala Daerah i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi..... iv
Daftar Tabel..... vi
Daftar Gambar..... xi
Bab I Pendahuluan..... I-1
I.1. Latar Belakang..... I-1
I.2. Profil Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung I-4
I.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung..... I-20
I.4. Maksud dan Tujuan I-23
I.5. Ruang Lingkup Penulisan I-24
Bab II Analisis Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response Isu Lingkungan Hidup Daerah II-1
II.1. Tata Guna Lahan II-5
II.2. Kualitas Air II-75
II.3. Kualitas Udara II-122
II.4. Risiko Bencana II-133
II.5. Perkotaan II-154
II.6. Tata Kelola II-210
Bab III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah III-1
III.1. Isu Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung III-1
III.2. Proses Perumusan Isu Prioritas III-2
III.3. Penetapan Isu Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung III-11
III.4. Analisis Isu Prioritas III-12

Bab IV Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup IV-1
IV.1. Konsep Dasar Inovasi IV-1
IV.2. Inovasi Pengelolaan Lahan IV-3
IV.3. Inovasi Persampahan IV-13
IV.4. Inovasi Pengelolaan Habitat Pesisir dan Laut IV-24
IV.5. Inovasi Pelestarian Flora dan Fauna IV-27
IV.6. Penghargaan Lingkungan Hidup IV-29
IV.7. Dokumen Lingkungan IV-36
IV.8. Pengawasan dan Penegakan Hukum IV-55
Bab V Penutup V-1
V.1. DPSIR dan Isu Lingkungan V-2
V.2. Rekomendasi Tindak Lanjut V-5
Daftar Pustaka
Lampiran
Lampiran I Tabel Pendukung DIKPLHD-2019
Lampiran II SK GUBERNUR Pokja DIKPLHD
Lampiran III Tahapan Penyusunan DIKPLHD
Lampiran IV Berita Acara Isu Prioritas DIKPLHD
Lampiran V Peta-Peta Tematik
Lampiran VI Dokumentasi DIKPLHD 2019
Lampiran V Biodata Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Pulau-pulau Bernama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-6
Tabel I.2.	Luas Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung	I-7
Tabel I.3	Karakteristik Bentang Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-10
Tabel I.4.	Perkembangan Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-12
Tabel I.5.	Jumlah Nelayan dan Nilai Produksinya	I-14
Tabel I.6.	Potensi Bahan Mineral dan Batuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-17
Tabel II.1.	Jumlah Penduduk dan Kepadatannya	II-9
Tabel II.2.	Luas kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Penutup Lahannya	II-13
Tabel II.3	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian	II-18
Tabel II.4.	Jumlah Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018	II-21
Tabel II.5.	Luasan Perubahan Penutup Lahan Tahun 2018-2019	II-24
Tabel II.6.	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-26
Tabel II.7.	Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034	II-28
Tabel II.8	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama	II-31
Tabel II.9.	Evaluasi Kerusakan Lahan Kering untuk Produksi Biomassa	II-37
Tabel II.10.	Perbandingan tingkat kekritisan lahan tahun 2018-2019	II-38
Tabel II.11.	Kerusakan Padang Lamun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-45
Tabel II.12.	Jenis Penyakit Utama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-56

Tabel II.13.	Kegiatan Fisik Instansi Lainnya Di bidang Reboisasi/Penghijauan	II-61
Tabel II.14.	Reklamasi Bekas Eksplorasi Tambang	II-63
Tabel II.15.	Realisasi Reklamasi Laut Pada tahun 2016 - 2019	II-63
Tabel II.16.	Penangkaran Satwa	II-64
Tabel II.17.	Ketersediaan Air Permukaan dari Situ/Danau/Waduk/Kolong Berdasarkan Wilayah Administratif	II-78
Tabel II.18.	Distribusi Daya Dukung Penyediaan Air 1996-2016	II-81
Tabel II.19.	Data Kualitas Sungai	II-86
Tabel II.20.	Lokasi Pemantauan Sungai	II-88
Tabel II.21.	Lokasi Pemantauan Air Kolong	II-96
Tabel II.22.	Kualitas Air Sumur	II-97
Tabel II.23.	Titik koordinat Pengambilan Sampel Air Laut	II-101
Tabel II.24.	Nilai TSS Hasil Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	II-111
Tabel II.25.	Nilai COD Hasil Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	II-112
Tabel II.26.	Program dan Kegiatan Pengendalian Kualitas Air	II-114
Tabel II.27.	Standar EU Directive	II-125
Tabel II.28.	Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-133
Tabel II.29.	Kajian Risiko Bencana Kepulauan Bangka Belitung	II-135
Tabel II.30.	Kejadian Bencana Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-137
Tabel II.31.	Luasan penutupan lahan tahun 2018 - 2019	II-141
Tabel II.32.	Informasi resiko Luas wilayah dan jumlah jiwa terpapar bencana banjir tahun 2019	II-149
Tabel II.33.	Identifikasi analisis DPSIR perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-157
Tabel II.34.	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-158
Tabel II.35.	Hasil Perhitungan DTBP Parameter BOD Sungai Rangkui	II-166

Tabel II.36.	Hasil Perhitungan DTBP Parameter COD Sungai Rangkui	II-166
Tabel II.37.	Hasil Perhitungan DTBP Parameter TSS Sungai Rangkui	II-167
Tabel II.38.	Kejadian Bencana Alam Banjir dan Genangan Air Kota Pangkalpinang Bulan Desember 2019	II-169
Tabel II.39.	Kebijakan Daerah sebagai Response Masalah Lingkungan Perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-172
Tabel II.40.	Pencapaian Indikator Program Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Tahun 2019	II-175
Tabel II.41.	Aksi Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Tahun 2019	II-178
Tabel II.42.	Kabupaten/kota yang mendapat Piala Adipura	II-181
Tabel II.43.	Faktor-faktor yang mempengaruhi laju timbulan sampah perkotaan	II-183
Tabel II.44.	Identifikasi Kerangka DPSIR Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-184
Tabel II.45.	Perkiraan Jumlah Sampah Per Hari di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-185
Tabel II.46.	Rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-186
Tabel II.47.	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-187
Tabel II.48.	Rasio Ketergantungan Umur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2035	II-187
Tabel II.49.	Produksi Sampah Per Kapita dan Total Sampah Dihasilkan pada Tahun 2017	II-191
Tabel II.50.	Jumlah Timbulan Sampah dan Sampah Masuk TPA Tahun 2017	II-194
Tabel II.51.	Komposisi Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-195
Tabel II.52.	TPA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-196

Tabel II.53.	Masalah pada beberapa saluran drainase Kota Pangkalpinang	II-198
Tabel II.54.	Rasio Biaya Pengelolaan Sampah Kota Pangkalpinang terhadap PDRB	II-200
Tabel II.55.	Kebijakan Daerah sebagai Response Masalah Persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-201
Tabel II.56.	Jumlah Bank Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-204
Tabel II.57.	Kegiatan Literasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2019	II-207
Tabel II.58.	Klasifikasi Peringkat IKLH	II-211
Tabel II.59.	Kearifan Lokal Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-217
Tabel II.60.	Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola LB3	II-221
Tabel II.61.	Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup yang Bersumber dari APBN, 2019	II-225
Tabel II.62.	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-226
Tabel II.63.	Pengaduan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	II-227
Tabel II.64.	Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-233
Tabel II.65.	Produk Hukum sebagai Response Pencapaian Target IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020	II-236
Tabel II.66.	Beberapa Program dan Kegiatan yang Diinisiasi Oleh Masyarakat	II-237
Tabel II.67.	Keadaan Flora dan Fauna Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-238
Tabel II.68.	Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-239
Tabel III.1.	Susunan Hirarki Hasil Dekomposisi Masalah	III-5
Tabel III.2.	Matriks Pairwise Comparison Pembobotan Kriteria	III-6

Tabel III.3.	Hasil Perhitungan untuk Perumusan *Eigenvector* yang Pertama	III-8
Tabel III.4.	Hasil Perumusan Peringkat Kriteria dengan *Eigenvector*	III-9
Tabel III.5.	Penentuan Hirarki I Isu Prioritas	III-10
Tabel III.6.	Peringkat Alternatif Isu Berdasarkan Bobotnya	III-11
Tabel III.7.	Sifat Morfologi Tanah Bekas Penambangan	III-29
Tabel III.8.	Rata-rata dan Kisaran Beberapa Sifat Tanah Bekas Tambang di Bangka Belitung	III-29
Tabel IV.1.	Kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga	IV-17
Tabel IV.2.	Sekolah Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi	IV-18
Tabel IV.3.	Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019 di Kepulauan Bangka Belitung	IV-20
Tabel IV.4.	Dokumen Lingkungan yang Dinilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2019	IV-37
Tabel IV.5.	Pengawasan Izin Lingkungan Tahun 2018	IV-57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-5
Gambar 1.2.	Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-8
Gambar 1.3	Jumlah Penduduk Per Kabupaten Kota	I-8
Gambar 1.4.	Peta Bentang Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-9
Gambar 1.5.	Luas Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	I-12
Gambar 1.6.	Jumlah Perikanan Tangkap Per Kabupaten/Kota	I-15
Gambar 1.7.	Nilai Perikanan Tangkap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	I-15
Gambar 1.8.	Distribusi Sumber Daya Mineral dan Batuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-16
Gambar 1.9.	Peluang Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	I-18
Gambar 1.10.	Peta Sebaran Pariwisata Unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	I-20
Gambar 2.1.	Visualisasi Skematik Konsep Umum DPSIR	II-4
Gambar 2.2.	Visualisasi Skematik DPSIR Tata Guna Lahan	II-6
Gambar 2.3.	Ilustrasi Perkembangan Lahan Terbangun di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019	II-7
Gambar 2.5.	Persentase Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2019	II-11
Gambar 2.6.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	II-12
Gambar 2.7.	Lokasi Penambangan PT. Timah Tbk, Pemali – Kabupaten Bangka	II-17
Gambar 2.8.	Produksi Mineral Timah Tahun 2013-2017	II-20
Gambar 2.9.	Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar di Kabupaten Bangka	II-21
Gambar 2.10.	Jumlah Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Tahun 2014-2018	II-19

Gambar 2.11.	Perubahan Penutup Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 – 2019	II-23
Gambar 2.12.	Perbandingan Luas Penutup Lahan Tahun 2018-2019	II-25
Gambar 2.13.	Persentase Luasan Tutupan Lahan Tahun 2018 yang Terkonversi menjadi Tutupan Lahan Lainnya di Tahun 2019	II-25
Gambar 2.14.	Persentase Luas Kawasan Berdasarkan Pola Ruangnya	II-29
Gambar 2.15.	Persentase Penutup Lahan Utama di Kawasan Lindung	II-30
Gambar 2.16.	Peta Penutup Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	II-32
Gambar 2.17.	Hutan Berdasarkan Fungsi dan Statusnya	II-33
Gambar 2.18.	Luasan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	II-33
Gambar 2.19.	Lahan Kritis Penambangan di Kabupaten Bangka Barat	II-34
Gambar 2.20.	Persentase Lahan Kritis dan Sangat kritis ditinjau dari Luasan Lahan Terkategori Kritis	II-35
Gambar 2.21.	Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kabupaten/Kota	II-36
Gambar 2.22.	Persebaran Lahan Gambut di Prov. Kep. Bangka Belitung	II-39
Gambar 2.23.	Perbandingan Luasan Gambut di Kabupaten/Kota	II-39
Gambar 2.24.	Tingkat Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-41
Gambar 2.25.	Habitat Mangrove Jenis *Rhizopora sp* di salah satu wilayah pesisir Pulau Bangka	II-42
Gambar 2.26.	Kerapatan Mangrove di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-43
Gambar 2.27.	Spot terumbu karang di Pulau Celagen, Kabupaten Bangka Selatan	II-47
Gambar 2.28.	Persentase jumlah lokasi sampling terumbu karang beserta kondisinya	II-48
Gambar 2.29.	Nilai IKTL Sepanjang Tahun 2015 – 2019	II-49

Gambar 2.30.	Kebun Lada di Kabupaten Bangka	II-51
Gambar 2.31.	Produktivitas Lada Sepanjang Tahun 2014 – 2018	II-52
Gambar 2.32.	Terumbu Karang Tertutup Sedimen Penambangan Laut di Pulau Pemuja – Kabupaten Bangka Barat	II-53
Gambar 2.33.	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2018	II-53
Gambar 2.34.	Jumlah RT Perikanan Tangkap Tahun 2014 – 2018	II-54
Gambar 2.35.	Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	II-56
Gambar 2.36.	Kejadian Banjir Pada Tanggal 27 Februari di Parittiga – Kabupaten Bangka Barat	II-57
Gambar 2.37.	Luasan Areal Terdampak Kebakaran Hutan Tahun 2019	II-58
Gambar 2.38.	Kebakaran Lahan Gambut di Lintas Timur Kabupaten Bangka, 11 September 2019	II-59
Gambar 2.39.	Target dan Realisasi Kegiatan RHL Tahun 2019	II-60
Gambar 2.40.	Kegiatan Penanaman Pohon Produktif yang dipimpin oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung di Pantai Takari, Bangka 30 Nov 2019	II-62
Gambar 2.41.	Salah satu Lahan Reklamasi PT Timah, Tbk	II-62
Gambar 2.42.	Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Bangka Selatan	II-66
Gambar 2.43.	Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Bangka Barat	II-66
Gambar 2.44.	Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Belitung	II-67
Gambar 2.45.	Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Belitung Timur	II-67
Gambar 2.46.	Penertiban Timah Inkonvensional – Geopark Belitung 3 November 2019	II-69
Gambar 2.47.	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019	II-74

Gambar 2.48.	Peta Danau/Kolong/Rawa/Situ dan Sungai	II-76
Gambar 2.49.	Peta Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-77
Gambar 2.50.	Peta Indikatif Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 1996	II-79
Gambar 2.51.	Peta Indikatif Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 2006	II-80
Gambar 2.52.	Peta Indikatif Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 2016	II-80
Gambar 2.53.	Distribusi Daya Dukung Penyediaan Pangan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-81
Gambar 2.54.	Visualisasi Skematik DPSIR Kualitas Air	II-82
Gambar 2.55.	PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-83
Gambar 2.56.	Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-85
Gambar 2.57.	Profil Parameter TSS Pada Sungai Kabupaten/Kota	II-89
Gambar 2.58.	Profil Parameter BOD Pada Sungai Kabupaten/Kota	II-91
Gambar 2.59.	Profil Parameter COD Pada Sungai Kabupaten/Kota	II-92
Gambar 2.60.	Profil Parameter TSS Pada Sungai Baturusa dan Sungai Buding	II-93
Gambar 2.61.	Profil Parameter BOD Pada Sungai Baturusa dan Sungai Buding	II-94
Gambar 2.62.	Profil Parameter COD Pada Sungai Baturusa dan Sungai Buding	II-94
Gambar 2.63.	Profil Kualitas Kolong	II-96
Gambar 2.64.	Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum	II-97
Gambar 2.65.	Kondisi Eksisting TSS Di Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-100
Gambar 2.66.	Pemodelan TSS Di Perairan Bangka Belitung	II-101
Gambar 2.67.	Indeks Kualitas Air Laut	II-102
Gambar 2.68.	Curah Hujan Rata-Rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-103
Gambar 2.69.	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air minum	II-103
Gambar 2.70.	Tahapan Perhitungan Beban Pencemaran	II-106
Gambar 2.71.	Peta Segmentasi Sungai Baturusa	II-107

Gambar 2.72.	Segmentasi Sungai Buding	II-108
Gambar 2.73.	Alur Rekomendasi Kebijakan	II-109
Gambar 2.74.	Perhitungan beban pencemaran sungai dan pengambilan sampel air sungai	II-110
Gambar 2.75.	Peta Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Titik Sampling	II-110
Gambar 2.76.	Segmentasi Sungai Utama Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran	II-111
Gambar 2.77.	Kegiatan Sampling Air Sungai	II-115
Gambar 2.78.	Target IKA (P3KLL, KLHK)	II-116
Gambar 2.79.	Tingkat Ketaatan Perusahaan Pada Pengawasan Lingkungan Hidup	II-117
Gambar 2.80.	Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan Hidup	II-118
Gambar 2.81.	SK Gubernur No.32 Tahun 2020 Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha atau /Kegiatan Tambak Udang	II-120
Gambar 2.82.	Perda No. 3 Tahun 2020 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-120
Gambar 2.83.	Contoh Pengecekan Spasial Dinas Lingkungan Hidup Terhadap usaha Tambak Udang	II-120
Gambar 2.84.	Tim pengecekan Spasial Dinas Lingkungan Hidup Terhadap usaha Tambak Udang	II-121
Gambar 2.85.	Analisis DPSIR Kualitas Udara	II-122
Gambar 2.86.	Jumlah Pelanggan Listrik (BPS, 2020)	II-124
Gambar 2.87.	Profil Nilai IKU per Kab/Kota	II-126
Gambar 2.88.	Kegiatan Sampling Udara Ambien	II-129
Gambar 2.89.	Visualisasi titik pengambilan sampel kualitas udara	II-130
Gambar 2.91.	Target IKU (P3KLL, KLHK)	II-130
Gambar 2.92.	Kegiatan Sampling Emisi Industri	II-132

Gambar 2.93.	Tren Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10 Tahun Terakhir	II-133
Gambar 2.94.	Peta Risiko Bencana	II-136
Gambar 2.95.	Foto-foto kejadian banjir di Muntok, Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018	II-137
Gambar 2.96.	Jumlah Kejadian Bencana di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018	II-139
Gambar 2.97.	Kondisi penutupan lahan di hulu	II-142
Gambar 2.98.	Kondisi Penutupan Lahan Di Tahura, Mangkol	II-142
Gambar 2.99.	Kondisi kebun sahang di lahan dengan kelerengan curam	II-143
Gambar 2.100.	Kondisi Lahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-144
Gambar 2.101.	Peta Geologi DAS Cerucuk	II-145
Gambar 2.102.	Tampilan Peta Indikatif DDDT Jasa Pencegahan Bencana Banjir Tahun 2016	II-146
Gambar 2.103.	Tampilan Peta Indikatif DDDT Jasa Pencegahan Bencana Longsor	II-146
Gambar 2.104.	Peta Indikatif DDDT Jasa Pencegahan Bencana Kebakaran Tahun 2016	II-147
Gambar 2.105.	Deklarasi Babel Siaga Bencana Tanggal 26 April 2019 oleh Seluruh OPD Dipimpin oleh Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-153
Gambar 2.106.	Struktur Kerangka DPSIR Masalah Lingkungan Perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-157
Gambar 2.107.	Persentase Penduduk Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi hingga Tahun 2035	II-159
Gambar 2.108.	Struktur PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019	II-160
Gambar 2.109.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-160
Gambar 2.110.	Disparitas Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-161
Gambar 2.111.	Kontribusi sektor dalam beban pencemaran BOD pada sumber air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-164

Gambar 2.112.	Kontribusi sektor dalam beban pencemaran COD pada sumber air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-164
Gambar 2.113.	Kontribusi sektor dalam beban pencemaran TSS pada sumber air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-165
Gambar 2.114.	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per Tahun dalam Ton/Tahun	II-168
Gambar 2.115.	Jumlah lokasi banjir per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	II-168
Gambar 2.116.	Curah hujan per bulan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dalam mm	II-170
Gambar 2.117.	Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-170
Gambar 2.118.	Jumlah penderita (orang) dan penyakit utama yang diderita masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-171
Gambar 2.119.	Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah melaksanakan STBM (sudah pemicuan)	II-174
Gambar 2.120.	Progres Desa/kelurahan ODF Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2019	II-174
Gambar 2.121.	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019	II-175
Gambar 2.122.	Penanaman Pohon di Kawasan Biodiversity	II-177
Gambar 2.123.	Wilhelmina Park Kota Pangkalpinang	II-179
Gambar 2.124.	Kerangka DPSIR Pengelolaan Persampahan Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-183
Gambar 2.125.	Hubungan antara populasi perkotaan dan timbulan sampah dari penelitian di beberapa negara, studi antara Tahun 2001-2007	II-185
Gambar 2.126.	PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2019	II-187
Gambar 2.127.	Sumber sampah yang dihasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-188
Gambar 2.128.	Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-189

Gambar 2.129.	Pengaruh tingginya IPM terhadap jumlah sampah yang ditimbun di TPA	II-190
Gambar 2.130.	Komposisi asal produksi sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-191
Gambar 2.131.	Perbandingan sampah perkotaan dan total sampah yang dihasilkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-192
Gambar 2.132.	Hasil perhitungan dan proyeksi timbulan sampah Tahun 2018 s.d Tahun 2025 per kabupaten/kota dalam Ton/Tahun	II-193
Gambar 2.133.	Komposisi Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-195
Gambar 2.134.	Emisi Sektor Limbah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ($GgCO_2$)	II-199
Gambar 2.135.	Proyeksi perbandingan volume sampah di Kota Malang sebelum dan setelah optimalisasi Bank Sampah Malang	II-203
Gambar 2.136.	Nilai IKLH, IKA, IKU dan IKTL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-210
Gambar 2.137.	Target IKLH berikut IKU, IKA dan IKTL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-211
Gambar 2.138.	Kerangka DPSIR Penerapan Tata Kelola Lingkungan yang Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-215
Gambar 2.139.	Luas Izin Pemanfaatan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-220
Gambar 2.140.	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Tahun 2019	II-220
Gambar 2.141.	Persentase Anggaran Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-224
Gambar 2.142.	Jumlah personil pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-232
Gambar 2.143.	Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Tahun 2018 dan Tahun 2019	II-234
Gambar 2.144.	Persentase Hasil Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II-235

Gambar 2.145.	Penanaman pohon diinisiasi oleh Bangka Flora Society bersama PT. PLN Bangka Belitung pada Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia tanggal 24 November 2019	II-241
Gambar 3.1.	FGD Perumusan Isu Prioritas	III-3
Gambar 3.2.	Dekomposisi Masalah Menjadi Struktur Hirarki	III-5
Gambar 3.3.	Tingkat Kepentingan	III-7
Gambar 3.4.	Penyampaian Isu Prioritas Kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan penandatanganan Pernyataan Isu DIKPLHD	III-12
Gambar 3.5.	Visualisasi Skematik DPSIR Persampahan dan Limbah Domestik	III-13
Gambar 3.6.	Kapasitas TPA dan Eksistingnya	III-13
Gambar 3.7.	Timbulan Sampah Kabupaten/Kota	III-14
Gambar 3.8.	Skema DPSIR Isu Alih Fungsi Lahan	III-15
Gambar 3.9.	Aktivitas Penambangan Timah Ilegal melalui Citra Satelit	III-17
Gambar 3.10.	Penutup Lahan Tahun 2018 yang beralih fungsi menjadi Lahan Penambangan di tahun 2019	III-18
Gambar 3.11.	Luasan Penutup Lahan yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Pertambangan	III-19
Gambar 3.12.	Kenampakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung melalui citra satelit	III-19
Gambar 3.13.	Alih fungsi lahan menjadi perkebunan	III-20
Gambar 3.14.	Kelas Penutup Lahan yang beralih fungsi menjadi Perkebunan	III-21
Gambar 3.15.	Alih Fungsi Lahan Menjadi Permukiman	III-22
Gambar 3.16.	Perbandingan Luasan Alih Fungsi Lahan Menjadi Permukiman	III-23
Gambar 3.17.	Luasan Penutup Lahan Tahun 2019	III-24
Gambar 3.18.	Luasan Perubahan Penutup Lahan Hutan Tahun 2018-2019	III-25
Gambar 3.19.	Persentase Perubahan Penutup Lahan Hutan yang Mengalami Alih Fungsi Lahan	III-26
Gambar 3.20.	Luasan Hutan yang Beralih Fungsi Menjadi Pertambangan	III-27

Gambar 3.21.	Perubahan Luasan Mangrove Tahun 2017-2019	III-28
Gambar 3.22.	Ilustrasi LST di Kabupaten Bangka melalui Citra Satelit	III-33
Gambar 3.23.	Penyerahan Simbolis Bibit Reboisasi Hutan dan Lahan	III-35
Gambar 3.24.	Kerjasama Pembibitan Tanaman Asam Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PT. Refined Bangka Tin	III-35
Gambar 3.25.	Kegiatan Penanaman Pohon dan Menuju Bapak Penggerak Reklamasi Nasional	III-36
Gambar 3.26.	Penertiban Timah Ilegal di Kota Kapur Kabupaten Bangka	III-36
Gambar 3.27.	Penertiban Timah Ilegal di Bukit Menumbing	III-37
Gambar 3.28.	Kegiatan Penanaman Bibit Mangrove di Kabupaten Bangka Tengah	III-37
Gambar 3.29.	Konsultasi Publik Penetapan Kawasan Ekonomi Esensial	III-38
Gambar 3.30.	Penyerahan Simbolis Bibit Lada di Kecamatan Air Gegas oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	III-38
Gambar 3.31.	Rapat Pembahasan Pengembangan Alur Sungai Kurau Untuk Antisipasi Banjir	III-39
Gambar 3.32.	Kegiatan Pelatihan Petugas Pramuka Peduli Bencana	III-40
Gambar 3.33.	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Bhabinkabtibmas	III-40
Gambar 3.34.	Kegiatan Monitoring Terhadap Penanganan Konflik Sosial	III-41
Gambar 3.35.	Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria	III-41
Gambar 4.1.	Visualisasi Skematik Inovasi	IV-1
Gambar 4.2.	Visualisasi Skematik Inovasi Pengelolaan Lahan	IV-2
Gambar 4.3.	Gubernur Menyerahkan Penghargaan Program Pemerhati Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV-5
Gambar 4.4.	Penandatanganan Kerjasama antara PT. RBT dengan pihak sekolah di Kabupaten Bangka	IV-6
Gambar 4.5.	Penyerahan bibit tanaman asam kepada PT. SMM di Kabupaten Belitung Timur	IV-6
Gambar 4.6.	Proses Penandatanganan MOU Literasi Lingkungan	IV-7
Gambar 4.7.	Briket Kompos Babel	IV-8

Gambar 4.8.	Proses Pembuatan Kompos Babel	IV-8
Gambar 4.9.	Kegiatan Sedekah Pohon	IV-10
Gambar 4.10.	Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berkomitmen dalam Keberhasilan Reklamasi Pasca Tambang	IV-11
Gambar 4.11.	Budidaya Tanaman Pertanian, Peternakan dan Perkebunan di Lokasi Air Jangkang Kabupaten Bangka	IV-12
Gambar 4.12.	Reklamasi dengan Konsep Eduwisata	IV-12
Gambar 4.13.	Visualisasi Skematik Inovasi Persampahan	IV-13
Gambar 4.14.	Jejaring Inovasi Pellet Sampah	IV-13
Gambar 4.15.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam MOU antara PLN dengan Pemprov Babel Tahun 2019	IV-14
Gambar 4.16.	Proses Pembuatan Pellet Sampah	IV-15
Gambar 4.17.	Serah terima bahan perlengkapan pelatihan pembuatan pellet sampah di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka	IV-15
Gambar 4.18.	Komposter yang digunakan dalam pelatihan	IV-16
Gambar 4.19.	Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyerahkan ADIWIYATA Tingkat Provinsi	IV-19
Gambar 4.20.	Sosialisasi Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	IV-20
Gambar 4.21.	Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV-22
Gambar 4.22.	Kegiatan Pembersihan Sampah di Kabupaten/Kota	IV-23
Gambar 4.23.	Bimbingan Transplantasi Terumbu Karang di Dusun Tuing	IV-25
Gambar 4.24.	Bimbingan Transplantasi Terumbu Karang di Desa Semujur	IV-26
Gambar 4.25.	Nyatoh dan Mentilin	IV-28
Gambar 4.26.	Kegiatan Pengawasan Penaatan LH	IV-56

BAB I
PENDAHULUAN

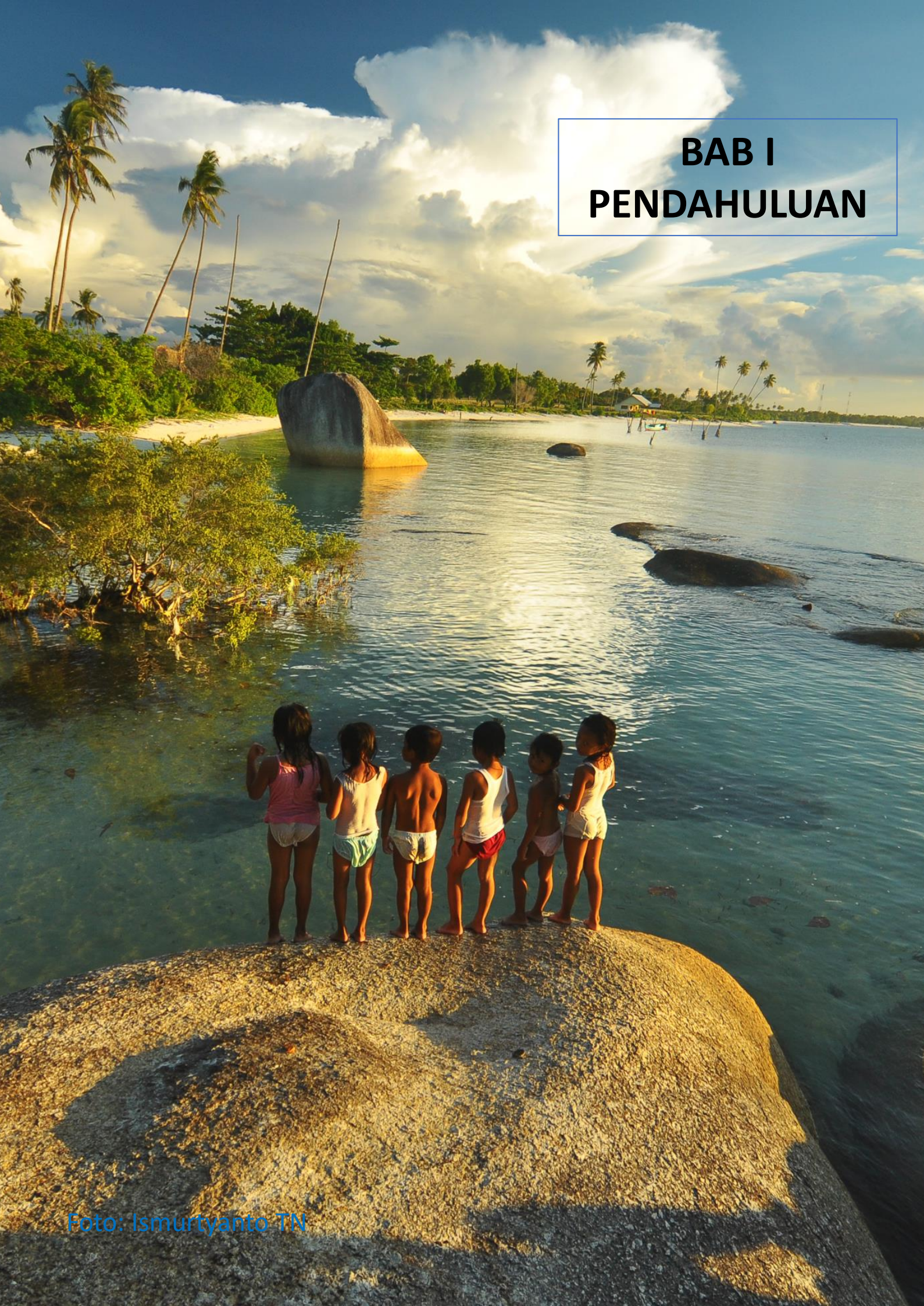

Foto: Ismurtyanto TN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki baik kekayaan sumber daya alam pesisir, pertanian dan perkebunan serta berbagai potensi mineral tambang terutama timah dan berbagai mineral ikutannya. Sebagai provinsi yang memiliki berbagai potensi sumber daya alam tentunya terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan lingkungan. Keberhasilan pembangunan sering diukur dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi namun tetap harus memperhatikan lingkungan sebagai daya dukung dan faktor pembanguan berkelanjutan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang aspek keberlanjutan pembangunan menjadi fokus dan tantangan yang harus di persiapkan sehingga prinsif pembangunan berkelanjutan menjadi arah pembangunan yang tidak hanya fokus terhadap peningkatan prekonomian daerah namun tetap menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial masyarakat.

Jika dilihat struktur perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sektor primer seperti sektor pertanian dan pertambangan serta sektor sekunder seperti industri pengolahan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 disebutkan bahwa visi provinsi adalah ***Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi***. Dalam rangka mencapai visi tersebut, salah satunya dicapai dengan misi pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah.

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak sumber daya alam yang beragam, baik yang ada di darat maupun di laut. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diprioritaskan untuk mensejahterakan masyarakatnya dengan tetap memperhatikan prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam, namun juga harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan. Proses perencanaan yang tepat sangat diperlukan dalam kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan agar lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya tetap lestari. Informasi-informasi lingkungan hidup sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan tersebut. Peranan data-data untuk mendukung pengambilan kebijakan sangat dibutuhkan, sehingga arah kebijakan tepat sasaran dan efektif.

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 62 Ayat 1

disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada ayat selanjutnya disebutkan juga bahwa sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Bumi yang menjadi tempat tinggal dan tempat berpopulasinya manusia beserta seluruh aktifitas pembangunan dan penggunaan sumber daya alam yang dituntut untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia memberi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup ini pada umumnya menyangkut aspek yang sangat luas, karena berada pada lintas ruang, lintas pelaku, dan lintas generasi. Dimensi lintas ruang adalah suatu kondisi permasalahan lingkungan hidup yang melewati batas wilayah administrasi. Sebagai contoh pada musim kemarau adanya kebakaran hutan yang polusi asapnya hingga melintasi wilayah daerah tertentu. Oleh karena itu pengembangan informasi yang berhubungan dengan masalah kebakaran atau hotspot memerlukan suatu jaringan informasi lingkungan hidup antar wilayah administrasi. Dimensi kedua yaitu lintas pelaku, permasalahan lingkungan hidup selalu berkaitan dengan lintas pelaku.

Salah satu contoh adalah alih fungsi lahan bukan hanya oleh satu sektor saja tetapi oleh berbagai sektor misalnya sektor penambangan, perkebunan, pertanian maupun permukiman. Dimensi ketiga yaitu pada lintas generasi, permasalahan lingkungan hidup yang dapat kita lihat dari hasil kegiatan pembangunan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat seperti pembangunan perumahan atau alih fungsi lahan pada daerah resapan air dapat menyebabkan banjir terus menerus di musim hujan yang akan dirasakan terus oleh generasi yang akan datang. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus dikelola untuk generasi sekarang dan masa datang.

Permasalahan lingkungan yang dihadapi sekarang dan akan datang tidak bisa diselesaikan dengan tinjauan teknis semata, namun juga dibutuhkan tinjauan kondisi sosial masyarakat karenanya kajian tentang lingkungan hidup dan arah kebijakan yang diambil merupakan kajian interdisipliner karena fenomena lingkungan berkaitan dengan kondisi geografis, biologis, teknologi, politik dan social budaya sehingga peranan data- data tersebut sangat dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang penting dan mempunyai kewajiban menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, isu lingkungan yang sedang *booming*, penyebab dan dampak permasalahannya serta respon pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkung hidup tersebut.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang pada tahap selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengedepankan lingkungan pada setiap pembangunannya yang bermuara pada pembangunan berkelanjutan.

I.2. Profil Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1.2.1 Karakteristik Wilayah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat

ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota dengan peta wilayah administrasinya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

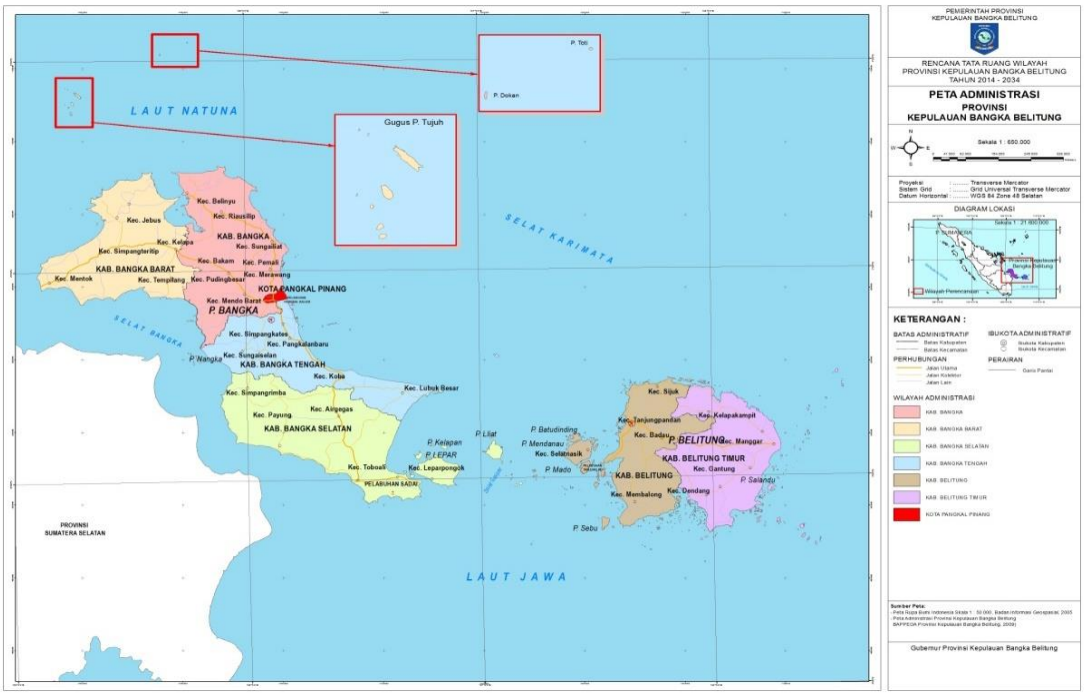

Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104º50’ sampai 109º30’ Bujur Timur dan 0º50’ sampai 4º10’ Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Selat Bangka di sebelah barat, Selat Karimata di sebelah timur, Laut Natuna di sebelah utara, dan Laut Jawa di Sebelah Selatan.

Tabel I.1. Pulau-pulau Bernama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten	Jumlah	Keterangan
Bangka	78	**Tersebar di Kecamatan Mendobarat, Sungailiat, Riau Silip, Belinyu dan Kecamatan Merawang.**
Bangka Barat	94	**Tersebar di Kecamatan Jebus dan Tempilang.**
Bangka Tengah	24	**Terdapat di Kecamatan Koba, Lubuk Besar, Pangkalan Baru dan Kecamatan Sungai Selan.**
Bangka Selatan	62	**Tersebar di Kecamatan Toboali, Pulau Besar dan Simpang Rimba.**
Belitung	165	**Tersebar di Kecamatan Tanjung Pandan, Sijuk, Badau dan Membalong.**
Belitung Timur	152	**Tersebar di Kecamatan Dendang, Gantung, Manggar, dan Kecamatan Kelapa Kampit.**
Total	**575**	

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017
Bangka Belitung dalam Provinsi Bangka Belitung dalam angka 2020

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas mencapai 81.725,23 km^2, Luas daratan lebih kurang 16.424,23 km^2 atau 20,1% dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km^2 atau 79,9% dari luas total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut ini disajikan tabel tentang pembagian wilayah administrasi dan ketinggian permukaan daratan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.2. Luas Wilayah Daratan dan Persebaran Penduduk di Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km^2)	Ketinggian Di Atas Permukaan Laut (m)
Bangka	2.950,69	25
Belitung	2.293,69	10
Bangka Barat	2.860,61	50
Bangka Tengah	2.126,36	25
Bangka Selatan	3.607,08	25
Belitung Timur	2.507,00	7
Pangkalpinang	118,8	25
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16.424,23	

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Kondisi iklim di Kepulauan Bangka Belitung sama seperti kondisi iklim di sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu beriklim tropis. Iklim di Kepulauan Bangka Belitung dipengaruhi oleh angin musim yang mengalami bulan basah selama tujuh bulan sepanjang tahun dan bulan kering selama lima bulan terus menerus. Keadaan topografi di Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan dataran rendah, lembah, dan sebagian kecil pegunungan dan perbukitan. Profil wilayah pada umumnya beragam mulai dari daratan, bergelombang berbukit, hingga bergunung, dengan komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19%, bergelombang 41,08% dan 12,37% sisanya merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan air laut, sedangkan ketinggian pegunungannya beragam, seperti Pegunungan Maras yang mencapai ketinggian 699 meter di atas permukaan air laut dan Pegunungan Tajam yang ketinggiannya kurang dari 500 meter di atas permukaan air laut. Untuk ketinggian perbukitan, seperti Bukit Menumbing ketinggiannya mencapai sekitar 455 meter, sedangkan Bukit Mangkol mencapai sekitar 395 meter di atas permukaan air laut.

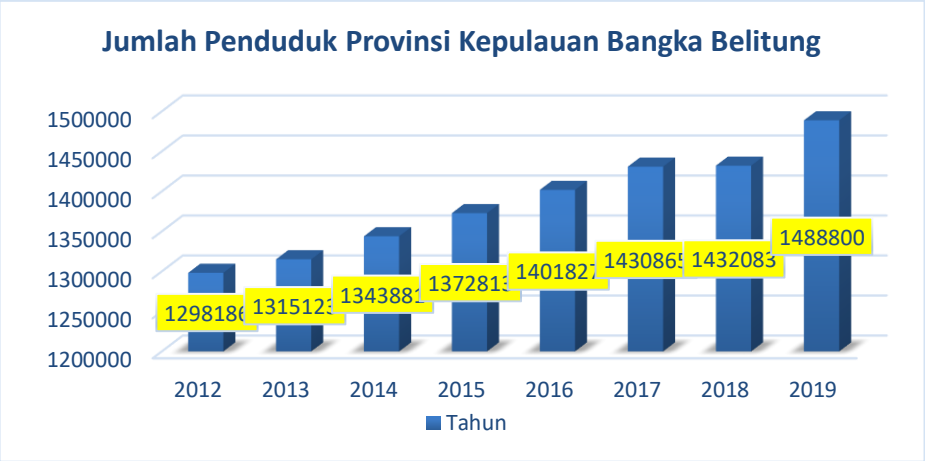

Gambar. 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 berjumlah 1.488.800 jiwa berdasarkan data mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan penduduk sekitar 0,21 % /tahun. Jika dilihat persebaran jumlah penduduk kabupaten Bangka Mempunyai jumlah penduduk yang paling besar 337.300 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 129.600 jiwa.

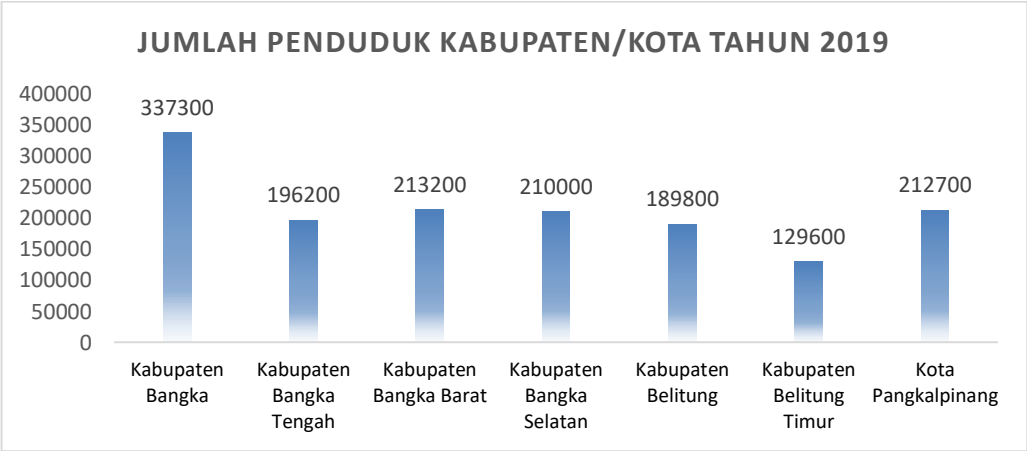

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Per Kabupaten/Kota

Menurut data dari BPS, sebagian besar penduduk di Kepulauan Bangka Belitung bekerja di sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Hal ini sesuai dengan kondisi geologi di Kepulauan Bangka Belitung yang cukup potensial sebagai kawasan pengembangan sektor-

sektor tersebut. Hampir di seluruh wilayah provinsi ini memiliki kandungan material timah, kaolin, kuarsa dan bilitonite. Aktivitas perekonomian penduduk ini mempengaruhi keadaan ekologi di Kepulauan Bangka Belitung, baik di daratan maupun di lautan yang telah mengalami kerusakan di banyak wilayah.

1.2.2. Karakteristik Bentang Lahan

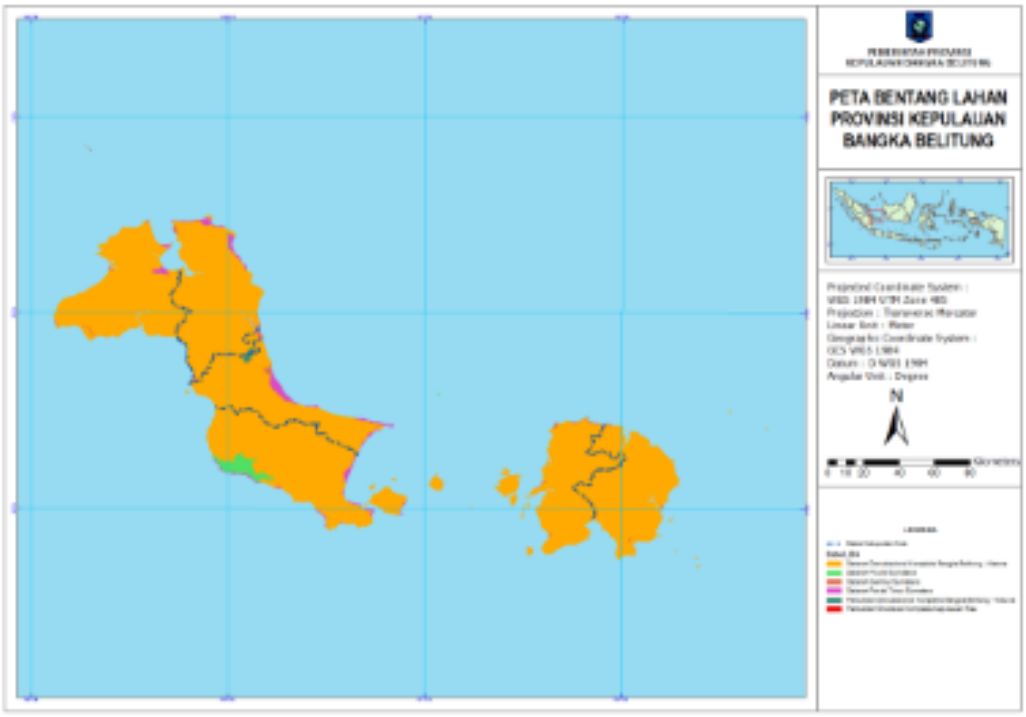

Gambar 1.4 Peta Bentang Lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kondisi fisik lingkungan salah satunya dipengaruhi oleh faktor bentang lahan atau bentuk lahan. Dilihat dari peta diatas, secara umum wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar didominasi oleh jenis bentuk lahan denudasional. Adapun jenis bentuk lahan ini terjadi karena proses eksogen seperti erosi dan tanah longsor. Pada skala yang lebih detil, bentuk lahan denudasional secara umum akan menurunkan satuan bentuk lahan bukit sisa, *peneplain* serta lembah sungai serta perbukitan terkikis.

Hasil tumpang susun antara peta bentuk lahan dengan peta wilayah administrasi menggambarkan pembagian satuan bentuk lahan beserta

luasannya di setiap Kabupaten/ Kota seperti yang ditunjukkan ada Tabel I.3 berikut.

Tabel I. 3 Karakteristik Bentang Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bentang Lahan	Bangka	Bangka Barat	Bangka Selatan	Bangka Tengah	Belitung	Belitung Timur	Pangkalpinang	Jumlah
Dataran Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	294.778	277.434	326.896	201.296	212.961	243.597	3.479	1.560.440
Dataran Fluvial Sumatera	-	-	20.523	123	-	-	-	20.646
Dataran Gambut Sumatera	1.890	1.485	-	1.615	2.798	1.070	1.272	10.131
Dataran Pantai timur Sumatera	7.497	3.263	8.492	12.028	-	-	-	31.280
Perbukitan Denudasional Kompleks Bangka Belitung-Natuna	623	-	-	2.243	-	-	-	2.866
Perbukitan Struktural Kompleks	-	35	-	-	-	-	-	35
Jumlah	309.105	287.463	362.501	220.754	227.738	263.492	4.787	1.675.840

1.2.3. Potensi Unggulan Daerah

2. Potensi Pertanian

Potensi sektor pertanian yang dapat dikembangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah durian, jeruk, nanas, cempedak, manggis, duku, salak, rambutan, dan pisang. Dari sektor perkebunan, potensi perkebunan yang dapat dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain lada, kelapa sawit, karet, cengkeh, dan coklat. Luas lahan sawah dan lahan ladang yang berpotensi ditanami padi hanya berkisar 25.058 ha dan 27.435 ha. Sementara itu, luas lahan sawah yang telah memiliki irigasi hanya 4.234 ha. Potensi pertanian juga dapat terlihat dari andil subsektor peternakan dan subsektor kelautan dan perikanan. Pada tahun 2017 produksi penangkapan ikan mengalami kenaikan dibanding tahun 2016, yaitu sebanyak 208.019,70 ton.

Potensi lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih sangat besar untuk pengembangan kawasan pertanian, sebagai contoh terdapat lahan yang tidak diusahakan sebesar 6% dari potensi yang ada dan masih terdapat lahan lainnya yang juga belum dimanfaatkan sebesar 23%. Gambaran tersebut berarti bahwa upaya pengembangan pembangunan sektor pertanian masih sangat dimungkinkan melalui perluasan areal tanam dengan penambahan bahan baku lahan dan optimalisasi lahan yang ada.

3. Potensi Kehutanan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.357/Menhut-II/2004 tanggal 01 Oktober 2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah seluas 657.510 hektar, di mana luas hutan di Pulau Bangka seluas 480.089 hektar dan hutan di Pulau Belitung seluas 177.421 hektar. Hutan tersebut dikelompokkan ke dalam dua kategori hutan, yaitu hutan produksi dan hutan lindung. Luas hutan produksi adalah 466.090 hektar yang tersebar di Pulau Bangka seluas 378.224 hektar dan di Pulau Belitung seluas 87.866 hektar serta kelompok hutan lindung seluas 156.730 hektar yang tersebar di Pulau Bangka seluas 69.766 hektar dan di Pulau Belitung seluas 86.964 hektar. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat perubahan luas kawasan hutan karena adanya beberapa kebijakan perubahan penggunaan lahan. Tabel I.3 menyajikan luas kawasan hutan berdasarkan beberapa penetapan.

Berdasarkan data dari BPKH Wilayah XIII berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8093/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 serta berdasarkan data penutupan lahan hasil interpretasi citra satelit Landsat tahun 2019, luas konservasi seluas 31.253,15 Ha , hutan lindung seluas 187.078,49 Hektar, hutan produksi tetap dan hutan produksi konservasi seperti yang

tertera di bawah ini, secara umum perubahan Kawasan hutan tidak signifikan.

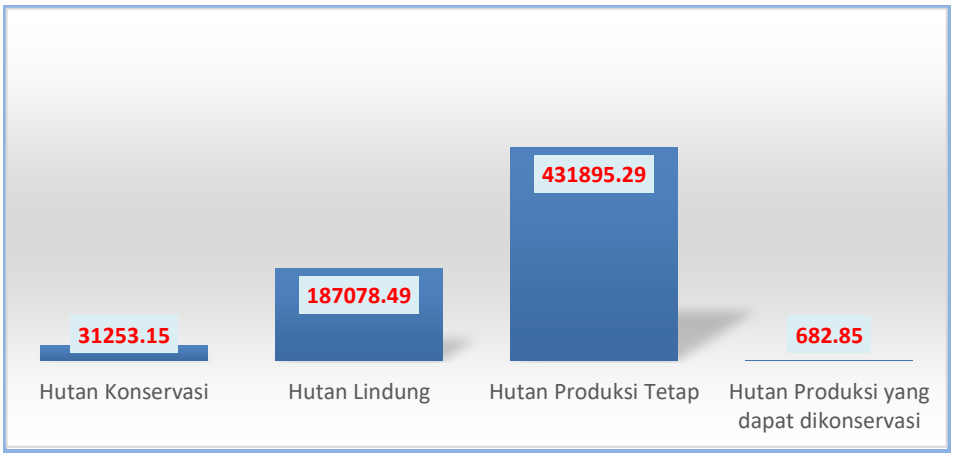

Gambar.1.5. Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kep. Bangka Belitung 2019

Sumber: BPKH wilayah XIII Pangkalpinang

Tabel I.4. Perkembangan Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dasar	Tanggal	Fungsi Kawasan Hutan					Jumlah (Ha)
		KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	
SK. No: 357/Menhut-II/2004	1 Oktober 2004	34.690	156.730	-	466.090	-	**657.510**
SK. No: 798/Menhut-II/2012	27 Desember 2012	35.454	185.531	-	432.884	693	**654.562**
SK. No : 1940/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017	3 April 2017	36.000	190.572	-	432.228	709	**659.509**
Perkembangan tata batas dan penetapan	-	35.760,84	184.276,95	-	436.647.89	692,58	**657.378,26**
SK.8093/MENLHK-PTKL/ KUH/ PLA.2/II/2018	23 November 2018	31253,15	187.078,49		431.895,29	682,85	**650.909,8**

Keterangan:
KSA/KPA : Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam
HL : Hutan Lindung
HPT : Hutan Produksi Terbatas
HP : Hutan Produksi
HPK : Hutan Produksi Konversi
Sumber : BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang

Hutan produksi difokuskan untuk menghasilkan beberapa jenis komoditas kehutanan, yaitu berupa kayu dan produk turunannya. Hutan produksi yang ada di Pulau Bangka dan Pulau Belitung menghasilkan beberapa jenis produk yang meliputi kayu persegi (*wood block*), moulding, kayu glondongan (*logs*), kayu tiang poles (*wood production*), kayu junjung (*climbing pole*), kayu bakar (*fire wood*), serta arang (*charcoal*). Kegiatan reboisasi hutan yang ada di Pulau Bangka dan Belitung berdasarkan data statistik juga telah dilakukan. Sejak tahun 2000 kegiatan penanaman kembali kawasan hutan telah dilakukan. Pada tahun tersebut pengadaan bibit reboisasi direncanakan untuk lahan kawasan seluas 1.710 hektar dimana 260 hektar di Pulau Bangka dan 1.350 hektar di Pulau Belitung.

4. Potensi Pesisir, Kelautan dan Perikanan

Wilayah Kepulauan Bangka Belitung menyimpan dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup besar, baik perikanan pantai maupun perikanan laut. Kondisi desa-desa pantai di wilayah ini di sepanjang pantainya merupakan alam yang memiliki karakteristik pantai berpasir, pantai berlumpur, pantai berbatu, mangrove, hutan pantai, semak belukar dan permukiman.

Pantai berpasir umumnya dikembangkan sebagai daerah wisata terutama disebabkan keindahan alam yang diselingi oleh batu granit. Desa pantai berlumpur terutama yang berada di muara dan disebabkan oleh buangan limbah pertambangan dan perkebunan. Sedangkan desa pantai yang dihiasi oleh hutan mangrove merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya ikan, udang, kepiting dan berbagai biota laut lainnya.

Berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang potensinya mencapai 1.059.000 ton/tahun (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.45/MEN/2011 tentang

Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan pada Masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia).

Potensi pengelolaan sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berfokus pada pengembangan perikanan laut, payau, maupun tawar. Kegiatan produksi pada sektor yang dapat dikembangkan adalah kegiatan penangkapan dan budidaya. Potensi sumber daya wilayah perikanan tangkap di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai luas 65.301 km². dengan jenis ikan yang dominan antara lain Tenggiri, Tongkol, Kembung, Layur, Selar, Tamban, Kakap, Kerapu, Bawal Hitam, Bawal Putih, Kerisi, Ekor Kuning, Udang Windu, dan Udang Putih. Sebagai contoh, berikut ini disajikan data jumlah nelayan dan produksinya pada tahun 2016.

Tabel I.5. Jumlah Nelayan dan Nilai Produksinya

Kabupaten/Kota	Produksi Ikan (ton)	Nilai Produksi (Rp.1000)	Jumlah Nelayan	Jumlah Perahu/ Kapal
Bangka	4.463,6	98.571.650	7.822	2.063
Belitung	65.169,5	815.289.003	13.111	2.488
Pangkalpinang	2.088,5	61.209.914	2.248	627
Bangka Barat	12.960,1	239.308.723	8.267	2.582
Bangka Tengah	22.988,1	505.415.259	6.536	1.766
Bangka Selatan	41.309,6	633.568.570	7.797	1.608
Belitung Timur	39.593,2	1.913.544.882	725	272
Total	**188.572,6**	4.266.908.000	46.506	11.406

Sumber : KPDA Statistik Tangkap (2016)

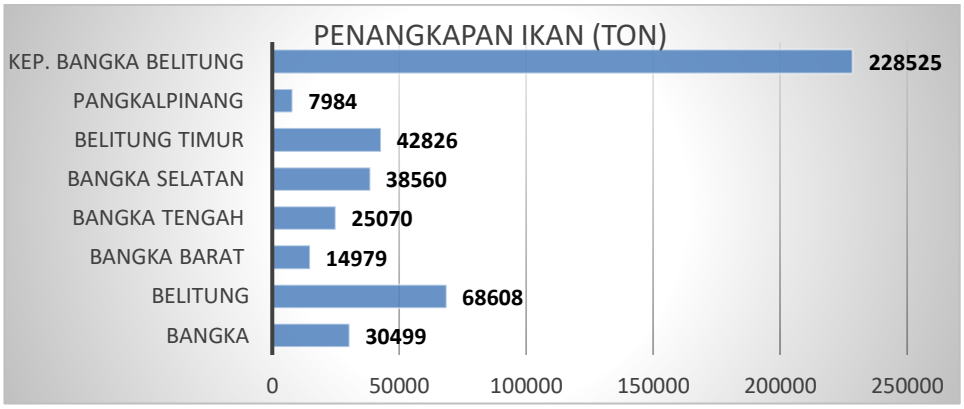

Gambar 1.6 Jumlah Perikanan Tangkap per Kabupaten/Kota

Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka ,2020

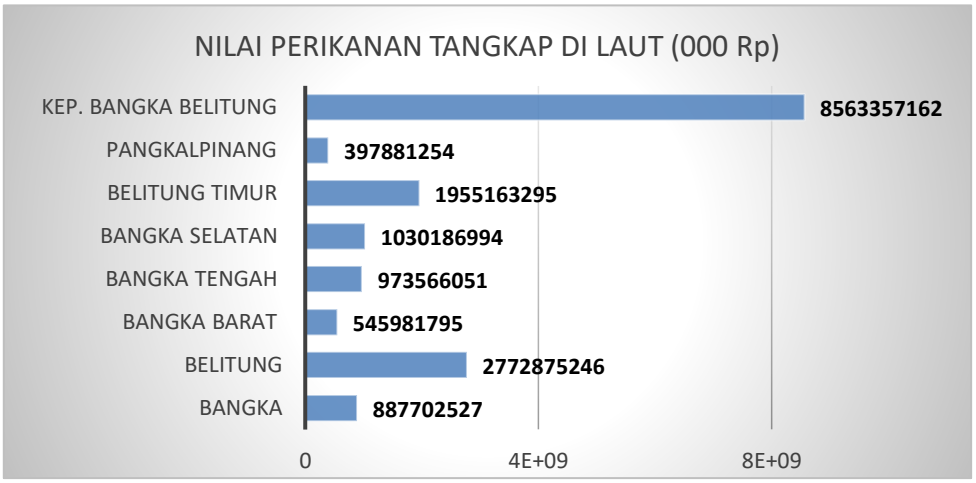

Gambar. 1.7 Nilai Perikanan Tangkap Bangka Belitung 2018

Sumber : Bangka Belitung dalam angka ,2020

Berdasarkan data diatas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi cukup besar dari sumber daya pesisir terutama dari perikanan tangkap. Selain berpotensi dalam pengembangan sumber daya perikanan tangkap, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan wilayah yang cocok untuk usaha budidaya laut seperti ikan kerapu, teripang, rumput laut, dan kerang-kerangan. Luas areal untuk budidaya laut adalah 120.000 Ha dengan potensi produksi 1.200.000 ton/tahun dengan komoditas unggulan rumput laut dan kerapu.

5. Potensi Pertambangan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi bahan tambang yang cukup besar berupa timah dan merupakan penghasil utama timah di Indonesia. Potensi pertambangan lainnya adalah bahan tambang galian golongan C antara lain pasir kwarsa, pasir bangunan, kaolin, dan sebagainya, serta diperkirakan juga terdapat cadangan minyak dan gas bumi di sekitar utara Pulau Bangka. Secara terperinci, mineral yang dominan terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel I.5.

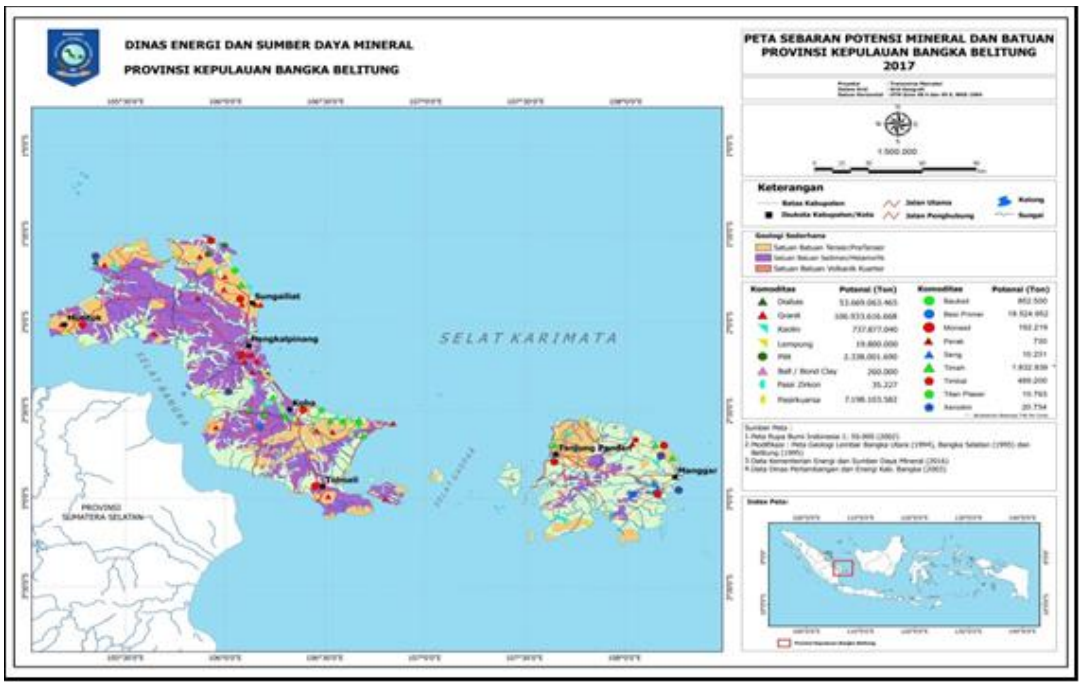

Gambar 1.8. Distribusi Sumber Daya Mineral dan Batuan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tabel I.6. Potensi Bahan Mineral dan Batuan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Mineral Logam (ton)		Bukan Logam (ton)	
Kasiterit	1.832.839	Granit	106.933.616.668
Bauksit	852.500	Diabas	53.669.063.465
Monasit	192.219	Kaolin	737.877.040
Besi (Primer)	18.524.952	Pasir Kuarsa	7.198.103.582
Xenotim	20.734	Zirkon	35.227
Titan Placer	10.793	Filit	2.338.001.690
Seng	10.231	Lempung	19.800.000
Perak	730	Ball/Bond Clay	260.000
Timbal	489.200		

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

6. Potensi Perindustrian dan Perdagangan

Secara umum industri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini masih didominasi oleh industri dengan skala rumah tangga. Industri yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah industri kerajinan yang dapat menunjang sektor pariwisata seperti kerajinan pewter, akar bahar, batu satam, renda, kopiah resam, dan rotan. Saat ini, industri menengah yang dikelola antara lain industri kaolin, batu granit, pembuatan batu bata yang berasal dari bahan galian golongan C. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan karet, kelapa sawit, pengolahan kayu dan pendukung usaha perikanan, yaitu pabrik es. Peluang pengembangan industri berbasis hasil perkebunan sangat berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

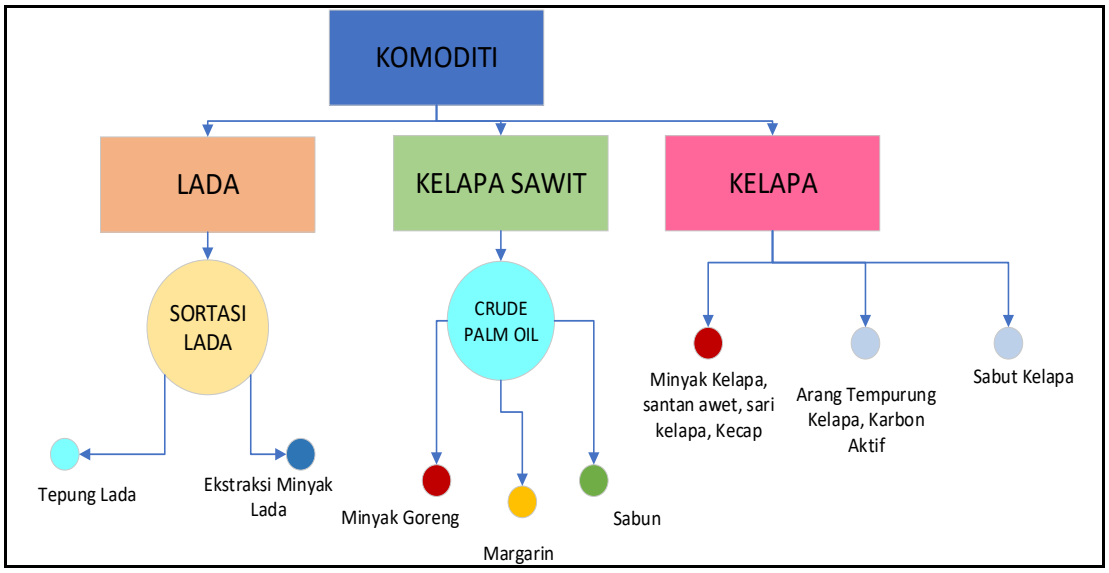

Gambar 1.8 Peluang Pengembangan Industri Berbasis Hasil Perkebunan

7. Potensi Pariwisata

Pariwisata menjadi sektor unggulan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupak sektor yang diharapkan dapat menggantikan sektor pertambangan. Sektor pariwisata diharapkan menjadi *multiplayer Effect* bagi sektor-sektor lainnya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi pariwisata yang besar diantaranya daya Tarik wisata alam, budaya, maupun sejarah menjadikan provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai destinasi unggulan nasional setelah balidan Lombok.

Dalam Konteks kepariwisataan regional dan nasional, potensi bahari dan geowisata kepulauan Bangka Belitung merupakan daya Tarik yang dapat dikembangkan untuk menjadikan provinsi Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata unggulan. Kekayaan sosial dan budaya masyarakat pesisir yang sangat terkait dengan bahari dan geowisatadan ssumber daya alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dikembangkan secara terintegrasi sebagai desa wisata dapat menjadikan daya Tarik wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Potensi di bidang kepariwisataan yang sangat dominan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wisata pantai. Hal ini dikarenakan

wilayah Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan dan memiliki garis pantai yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 1.200 km dengan hamparan pantai pasir putih, panorama yang indah, air yang jernih, dan di beberapa tempat dihiasi berbagai formasi batuan beraneka ragam bentuk yang sangat menarik untuk dikembangkan.

Potensi wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata budaya seperti upacara-upacara Rebo Kasan, Buang Jong, Ceriak Nerang, Perang Ketupat, Sepintu Sedulang, dan Sembahyang Kubur. Wisata sejarah juga dapat menjadi objek wisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Batu Balai, Wisma Ranggam, Vihara Dewi Kwan In, Phak Kak Liam dan Klenteng China Jebus. Secara terperinci, jumlah jenis objek wisata yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- Wisata Alam : 56 Objek
- Wisata Budaya : 45 Objek
- Wisata Sejarah : 8 Objek
- Agro Wisata : 20 Objek

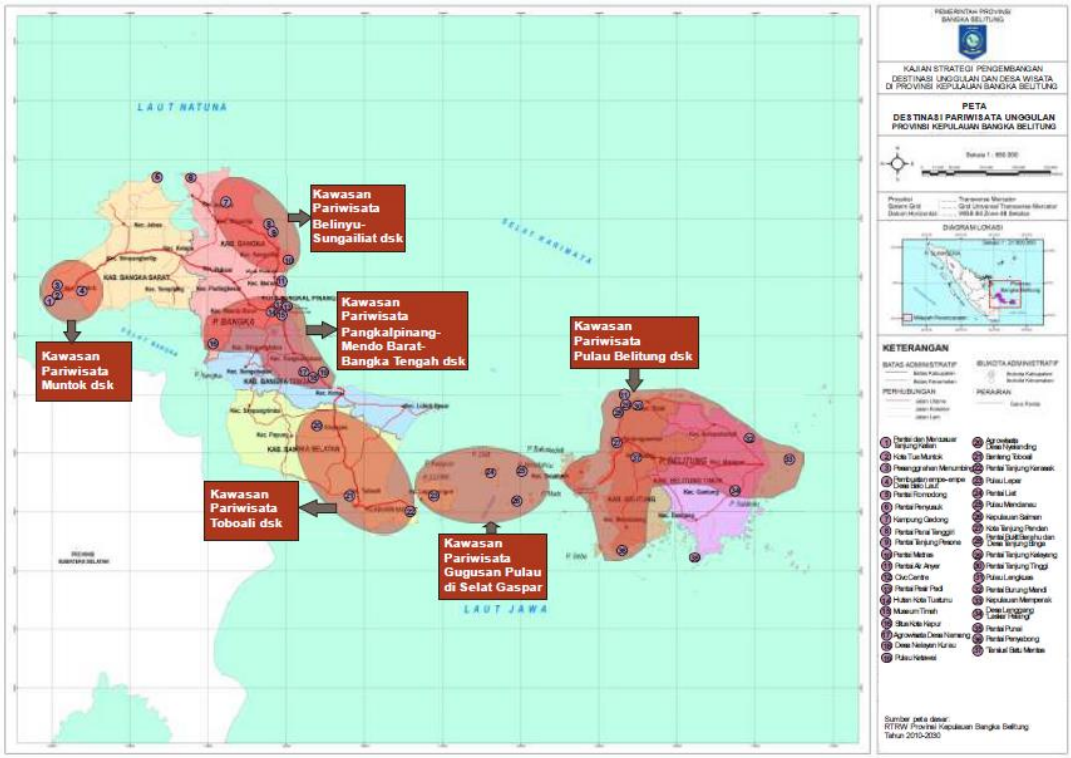

Gambar. 1.10 Peta Sebaran Pariwisata Unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

I.3. Proses Perumusan Isu Prioritas dan Penyusunan Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dimulai dengan pembentukan Tim Kelompok Kerja yang susunannya terdiri dari perwakilan beberapa perangkat daerah terkait, perwakilan perguruan tinggi, dan perwakilan dari lembaga masyarakat, serta pembentukan Tim Penyusun Dokumen yang susunan keanggotaannya berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen ini dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Tugas Tim Kelompok Kerja di antaranya adalah menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah, menginventarisasi data terbaru dari *stakeholder* terkait yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah Tahun 2019, mendiskusikan hasil tahapan penyusunan yang dilakukan Tim Penyusun dalam sebuah *focus group discussion*. Adapun tugas Tim Penyusun meliputi kegiatan menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)*, mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Tim Kelompok Kerja.

Tahapan yang dilalui dalam Penyusunan DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 dapat disebutkan sebagai berikut.

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun DIKPLHD yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/123F/DLH/2020;
2. Pelaksanaan *workshop* dan Sosialisasi Penyusunan DIKPLHD yang diikuti oleh Tim Kelompok Kerja Penyusun DIKPLHD provinsi dan Perwakilan dari kabupaten/kota;
3. Identifikasi data-data yang diperlukan untuk penyusunan DIKPLHD sesuai pedoman penyusunan yang terbaru;
4. Pelaksanaan FGD ke-1 untuk melakukan analisis cepat terhadap data-data yang telah ada dengan metode DPSIR secara singkat, dilanjutkan dengan identifikasi dan penyaringan isu;
5. Pengelompokan isu dan pengolahan isu dengan metode AHP dalam tim internal di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. FGD ke-2 untuk membahas analisis dengan metode DPSIR;
7. Pendokumentasian dan penulisan dokumen IKPLHD;
8. Pengiriman dokumen IKPLHD;

9. Penginputan data ke dalam sistem informasi lingkungan hidup di aplikasi data alam;
10. FGD ke-3 untuk menyampaikan hasil penyusunan dokumen IKPLHD kepada Tim Kelompok Kerja, dan mempublikasikan dokumen IKPLHD Tahun 2019 yang telah tersusun.

Perumusan isu prioritas dilakukan dengan melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* yang melibatkan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen. Perumusan Isu Prioritas dimulai dengan menyajikan data-data terkait yang telah dikumpulkan kepada Tim Kelompok Kerja serta melakukan analisis cepat terhadap data-data tersebut dengan metode *Driving Force – Pressure – State – Impact – Response.* Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis cepat tersebut peserta FGD mengidentifikasi isu-isu lingkungan, ekonomi, dan sosial yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, kemudian dilakukan diskusi dan pengelompokan isu-isu tersebut. Hasil pengelompokan isu diolah dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan matriks *pairwise comparison* untuk mendapatkan isu prioritas yang akan dijadikan isu utama dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2019.

Hasil pengolahan data isu dengan metode AHP dan pembobotan, maka dihasilkan peringkat isu dengan urutan sebagai berikut.

1. Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal
2. Alih fungsi lahan
3. Banjir
4. Degradasi Kualitas Air
5. Paparan bahan radioaktif penambangan timah
6. Regulasi terkait pola/tata ruang wilayah yang belum optimal
7. Penurunan pertumbuhan ekonomi karena melemahnya sektor pertambangan
8. Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maksimal

9. Harga komoditas pertanian dan perkebunantidak stabil
10. Kebakaran hutan dan lahan
11. Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar.
12. Konflik sosial perebutan lahan

Berdasarkan kesepakatan bersama Tim Kelompok Kerja, maka ditetapkan empat isu dengan peringkat tertinggi menjadi isu prioritas. Keempat jenis isu prioritas yang ditetapkan tersebut adalah :

1. Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal
2. Alih fungsi lahan
3. Banjir
4. Degradasi Kualitas Air

Pembahasan lebih lanjut mengenai perumusan isu prioritas tercantum dalam Bab III.

I.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menyediakan informasi lingkungan hidup. Tujuan dilaksanakannya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menyediakan data dan informasi mengenai status lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbaru dan bisa diakses publik atau pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bentuk akuntabilitas publik;
2. Menyediakan informasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup;

3. Menyediakan data dan informasi lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan yang telah rusak.

I.5. Ruang Lingkup Penulisan

Lingkup penulisan dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini dibatasi pada data dan informasi lingkungan hidup yang terkait dengan status lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung, serta informasi terkait yang menggambarkan kinerja daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup DIKPLHD dengan metode analisis DPSIR meliputi :

1. Faktor-faktor pendorong *(driving forces)* yang memotivasi aktivitas yang merubah kondisi lingkungan, baik unsur ekonomi maupun sosial beserta analisisnya;
2. Faktor-faktor penekan *(pressure)* yang memicu aktivitas-aktivitas yang menyebabkan perubahan kondisi lingkungan;
3. Keadaan atau status kondisi lingkungan *(state)*;
4. Dampak *(impact)* yang timbul akibat perubahan kondisi lingkungan;
5. Tanggapan *(respons)* dan inovasi yang dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk mencegah, menanggulangi, atau mengurangi dampak negatif yang muncul;
6. Rekomendasi-rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen IKPLHD terdiri dari dua buku, yaitu Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Utama IKPLHD. Buku Utama Dokumen IKPLHD terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut.

1. Bagian Awal, terdiri dari :
    1) Halaman Judul.

2) Halaman Surat Pernyataan.
3) Kata Pengantar.
4) Daftar Isi.
5) Daftar Tabel.
6) Daftar Gambar.
7) Daftar Lampiran.

2. Bagian Utama, terdiri dari :
   1) Bab I Pendahuluan
   2) Bab II Analisis dengan DPSIR
   3) Bab III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah
   4) Bab IV Inovasi Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
   5) Bab V Penutup
3. Bagian Akhir, terdiri dari :
   1) Daftar Pustaka
   2) Lampiran

BAB II
ANALISIS DPSIR
DRIVING FORCE-PRESSURE-STATE-IMPACT-RESPONS

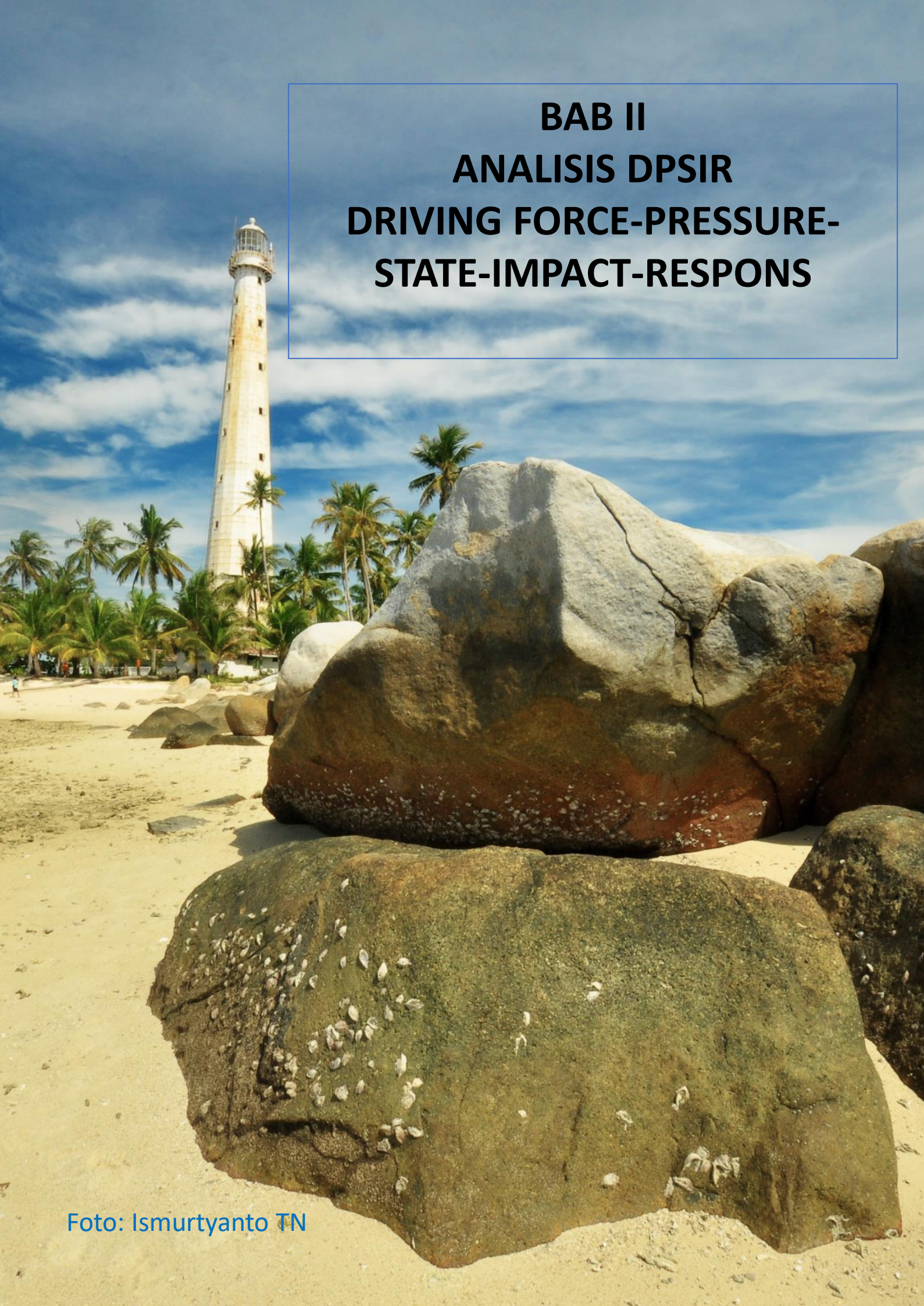

Foto: Ismurtyanto TN

BAB II
ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT,* DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Permasalahan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas waktu bersifat sangat kompleks sehingga seringkali tidak dapat diatasi hanya dengan penelitian dan keputusan ilmiah, maupun keputusan pemangku kepentingan. Pendekatan cara berpikir yang digunakan harus menggunakan pendekatan suatu sistem yang bisa menghubungkan antar masalah yang luas dan mengambil keputusan dengan cara yang terstruktur. Salah satu cara penyelesaian masalah yang menggunakan pendekatan sistem adalah metode kerangka kerja *Driving force – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR)* yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar isu lingkungan yang kompleks.

DPSIR adalah sistem kerangka kerja yang mengasumsikan hubungan sebab-akibat antar komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan. Metode DPSIR telah banyak diaplikasikan untuk pemecahan berbagai macam persoalan, terutama masalah lingkungan. *Driving force* adalah faktor-faktor yang menjadi motivasi dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Driving force* memiliki distribusi secara spasial dengan luasan dan intensitas yang berbeda-beda, bisa secara global, regional, ataupun lokal. *Driving force* menggambarkan perkembangan sosial, demografi, dan ekonomi dalam masyarakat. *Driving force* ekonomi mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti pangan, tempat tinggal, air, kesehatan, keamanan, budaya, bahan baku, dan infrastruktur. Beberapa jenis *driving force* di bidang ekonomi, di antaranya adalah:

1. Sektor yang memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku, seperti pertanian, perkebunan, budidaya perairan, perikanan, dan pertambangan;
2. Sektor yang memenuhi kebutuhan air, seperti pasokan air minum (perusahaan air minum, industri rumahan isi ulang air minum, dll.) dan irigasi;
3. Sektor yang memenuhi kebutuhan pakaian dan tempat tinggal, seperti perumahan (konstruksi, real estate, dll.), tekstil dan pakaian jadi;
4. Sektor yang memenuhi kebutuhan kesehatan, seperti *health care*, rumah sakit, farmasi, kosmetik, dan pengolahan limbah;
5. Sektor yang memenuhi kebutuhan budaya, seperti pariwisata, pendidikan, informasi, dan organisasi sosial;
6. Sektor yang memenuhi kebutuhan keamanan, seperti pertahanan dan keamanan nasional, dan administrasi publik;
7. Sektor yang memenuhi kebutuhan infrastruktur, seperti manufaktur, perdagangan, konstruksi, keuangan, asuransi, dan utilitas.

Driving force sosial mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhan hubungan sosial, kesejahteraan sosial, pemerintahan, dan identitas budaya. *Driving force* sosial secara umum meliputi rangkaian sosial, komunitas, dan karakteristik politik yang mempengaruhi struktur dan fungsi sektor ekonomi, serta bertindak sebagai penentu utama kesehatan manusia. Misalnya, kurangnya keadilan atau pemerintahan yang represif dapat mempengaruhi kemampuan sektor ekonomi untuk berfungsi dengan baik atau bahkan bisa membatasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Beberapa jenis *driving force* di bidang sosial, di antaranya adalah:

1. Hubungan sosial, seperti hubungan antar agama, organisasi kemasyarakatan, dan hubungan pernikahan;
2. Kesejahteraan sosial, seperti akses untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan;

3. Pemerintahan, seperti bentuk pemerintahan, pola pemungutan suara dalam pemilihan umum, dan regulasi-regulasi dalam pemerintahan;
4. Identitas budaya, seperti etnik budaya, keyakinan/kepercayaan yang dianut, dan hukum-hukum adat atau kearifan lokal yang ada di wilayah tertentu.

Pressure didefinisikan sebagai aktivitas manusia yang timbul akibat *driving force* sosial dan ekonomi yang mendorong perubahan lingkungan atau perilaku manusia yang bisa mempengaruhi lingkungan. *Pressure* bisa digolongkan menjadi *environmental pressure* dan *human behavior pressure*. Beberapa hal yang bisa menjadi *environmental pressure* di antaranya adalah perubahan tutupan lahan atau penggunaan lahan, emisi limbah dan polutan, dan aktivitas-aktivitas manusia yang merubah atau memanipulasi kondisi lingkungan, seperti pengerukan, penambangan, pergerakan kapal, penangkapan ikan, dan deforestasi. Beberapa hal yang bisa menjadi *human behavior pressure* di antaranya adalah karakter dan tindakan manusia yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan, gaya hidup, serta mobilitas penduduk.

State menggambarkan kondisi lingkungan, baik lingkungan yang alami maupun lingkungan buatan (misalnya kuantitas dan kualitas komponen fisik, kimia, dan biologis) dan kondisi manusia (misalnya kepadatan penduduk, persebaran penduduk, status ekonomi, kesehatan masyarakat, dan karakteristik individu). Proses kimia, fisik, dan biologis, serta aktivitas/tindakan manusia saling berinteraksi memberikan tekanan dan mempengaruhi berbagai komponen lingkungan hidup yang dapat diukur kondisinya melalui parameter-parameter yang berkaitan.

Impact didefinisikan sebagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan kondisi lingkungan hidup. Perubahan kualitas maupun kuantitas lingkungan ini berdampak pada kesejahteraan manusia, termasuk berdampak juga pada kemampuan layanan jasa lingkungan untuk

memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa jenis *impact* terhadap lingkungan, di antaranya adalah penurunan kemampuan layanan jasa penyediaan (air, pangan, serat), jasa pengaturan (iklim, kualitas air, pengolahan limbah, dll.), jasa estetika dan budaya, jasa pendukung (produksi primer, unsur hara, dll.). Beberapa jenis *impact* terhadap kesejahteraan manusia, di antaranya berpengaruh terhadap produktivitas, pendapatan, biaya kesehatan, keamanan, serta kebahagiaan.

Response adalah tindakan yang diambil oleh suatu kelompok atau individu dalam masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengganti rugi, memperbaiki atau beradaptasi dengan perubahan keadaan lingkungan, serta untuk memodifikasi perilaku manusia yang berkontribusi terhadap munculnya dampak atau resiko. Di dalam metode DPSIR, *response* bisa berupa upaya untuk mengontrol atau mengendalikan *driving force*, *pressure*, *state*, ataupun *impact*. Contohnya, penerapan beberapa kebijakan dan teknologi pendukung, manajemen sumber daya alam dan lahan, monitoring kualitas lingkungan, valuasi lingkungan, dan kompensasi terhadap kerugian yang timbul.

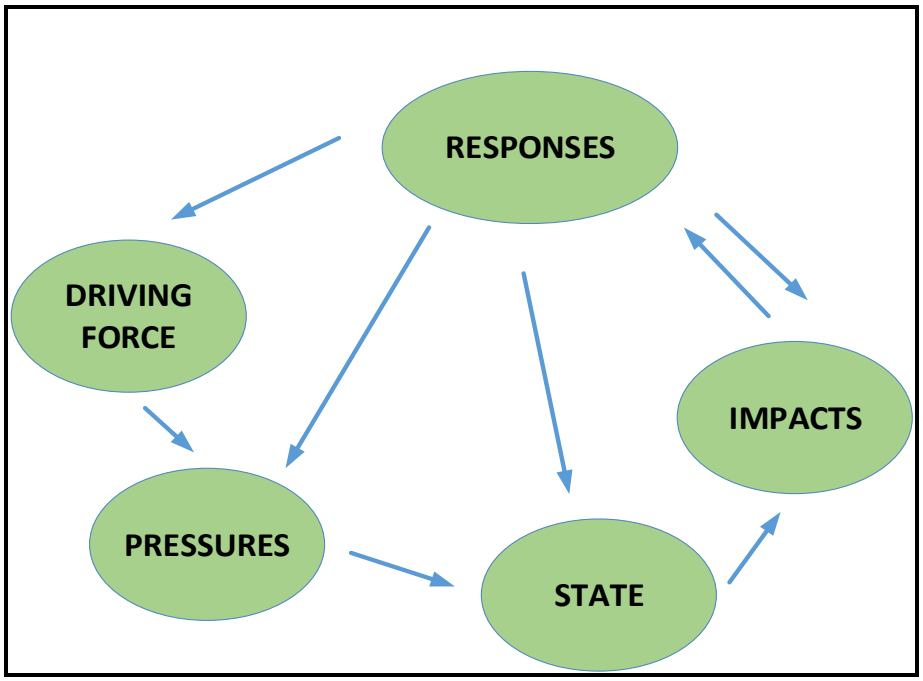

Gambar 2.1. Visualisasi Skematik Konsep Umum DPSIR

II.1. Tata Guna Lahan

Secara definisi lahan dapat diartikan sebagai penutup biofisik di permukaan bumi yang dapat diamati dinamikanya (BSN, 2014). Lahan bersifat dinamik artinya cenderung untuk mengalami perubahan baik yang disebabkan oleh aktivitas alam maupun antropogenik. Lahan mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan pembangunan di suatu wilayah untuk itulah diperlukan upaya merencanakan penggunaan lahan tersebut agar sesuai dengan peruntukan atau fungsi-fungsi tertentu melalui kaidah tata guna lahan. Kebijakan terkait peruntukan lahan atau penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 8 Tahun 2013 sebagai Acuan Peta Rencana Tata Ruang.

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alokasi pemanfaatan lahan terbaru diatur dalam Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang RTRW Prov Kep Babel tahun 2014-2034. Dalam implementasinya, ada banyak permasalahan yang terjadi dalam tata guna lahan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang akan dianalisis mulai dari faktor pemicunya hingga kebijakan yang harus diambil dalam menyikapi permasalahan tersebut. Adapun tabel utama dalam analisis ini merupakan tabel ke 1 hingga 17 tabel data alam serta didukung oleh data penunjang terkait lainnya.

Gambar 2.2. Visualisasi Skematik DPSIR Tata Guna Lahan

II.1.1. *Driving Force*

II.1.1.1 Meningkatnya Kebutuhan Penggunaan Lahan Tertentu

a. Pengembangan wilayah

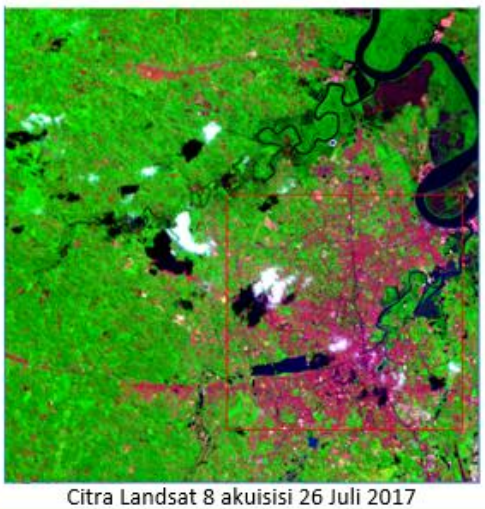

Citra Landsat 8 akuisisi 26 Juli 2017

Citra Landsat 8 akuisisi 2 September 2019

Keterangan : Citra Landsat diatas menggunakan komposit 752 dimana warna merah muda keunguan diinterpretasikan sebagai lahan terbangun

Gambar 2.3. Ilustrasi Perkembangan Lahan Terbangun di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019

(Sumber: Interpretasi visual citra Landsat 8 OLI 752, USGS perekaman tahun 2019)

Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kepulauan Bangka Belitung saat ini menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang cukup signifikan sejak awal berdirinya pada tahun 2000. Otonomi daerah jelas mengatur bahwa segala potensi dan pengembangan suatu daerah dengan berciri khas suatu daerah tersebut dapat disesuaikan dengan daerah tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Berdasarkan Perda nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penataan ruang di wilayah ini bertujuan untuk mewujudkan tata ruang provinsi yang terpadu, berimbang dan berkeadilan berbasis agro-bahari untuk menunjang pariwisata serta pengendalian wilayah pertambangan untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan suatu wilayah maka ada dua hal yang secara umum akan terjadi yaitu *spreading* atau pemekaran wilayah dan atau *changes* yaitu perubahan wilayah itu sendiri dalam hal ini alih fungsi lahan. Jika dikaitkan dengan konsep penataan ruang dalam RTRW Provinsi maka *spreading* atau *changes* akan bernilai positif jika pemanfaatannya sesuai dengan pola ruangnya dan sebaliknya akan menjadi negatif bila tidak sesuai dengan peruntukan lahannya. Hal terakhir inilah yang menjadi salah satu *driving force* atau faktor pemicu masalah yang terkait dengan tata guna lahan.

b. Pertambahan Jumlah Penduduk

Dalam kondisi normal jumlah penduduk bersifat dinamis artinya selalu mengalami penambahan setiap waktu. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar 1.432.083 jiwa dengan kepadatan rata-rata 87 jiwa/km^2 sementara pada tahun 2019 jumlah penduduk meningkat menjadi 1.488.800 jiwa dengan kepadatan rata-rata 91 jiwa/km^2. Hal ini berarti dalam rentang waktu satu tahun terjadi pertambahan jumlah penduduk sebesar 56.717 orang. Secara persentase laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 – 2019 yaitu 21,7 % atau sekitar 2,41% pertahun.

Tabel II.1. Jumlah Penduduk dan Kepadatannya

No.	Kabupaten /Kota	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)*	Kepadatan Penduduk /Km^2	Kepadatan Penduduk (%)
1	Kabupaten Bangka	2950.69	337.300	21.7	114	5.03
2	Kabupaten Bangka Tengah	2126.36	196.200	21.7	92	4.06
3	Kabupaten Bangka Barat	2820.61	213.200	21.7	76	3.35
4	Kabupaten Bangka Selatan	3607.08	210.000	21.7	58	2.61
5	Kabupaten Belitung	2293.69	189.800	21.7	83	3.7
6	Kabupaten Belitung Timur	2507.00	129.600	21.7	52	2.3
7	Kota Pangkalpinang	118.8	212.700	21.7	1.791	79.03
Keterangan : *Laju pertumbuhan penduduk per tahun pada tahun 2010-2019						
Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka, 2020						

Berdasarkan batas administrasinya, pada tahun 2019 jumlah penduduk tertinggi berada di kota Pangkalpinang yaitu sebanyak 212.700 jiwa dengan luasan wilayah sebesar 118,8 km^2 sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Belitung Timur yaitu sebanyak 129.600 jiwa yang tersebar pada wilayah dengan luasan 2.507 km^2. Tingginya angka jumlah penduduk di Kota Pangkalpinang merupakan bentuk nyata dimana persebaran penduduk merata di daerah yang berperan sebagai ibukota provinsi sementara wilayah Kabupaten Belitung Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Belitung sehingga pertumbuhan penduduk sebelumnya telah berpusat di Tanjung Pandan. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor luasan wilayah serta aksesibilitas terhadap pusat pemerintahan turut berpengaruh dalam persebaran penduduk.

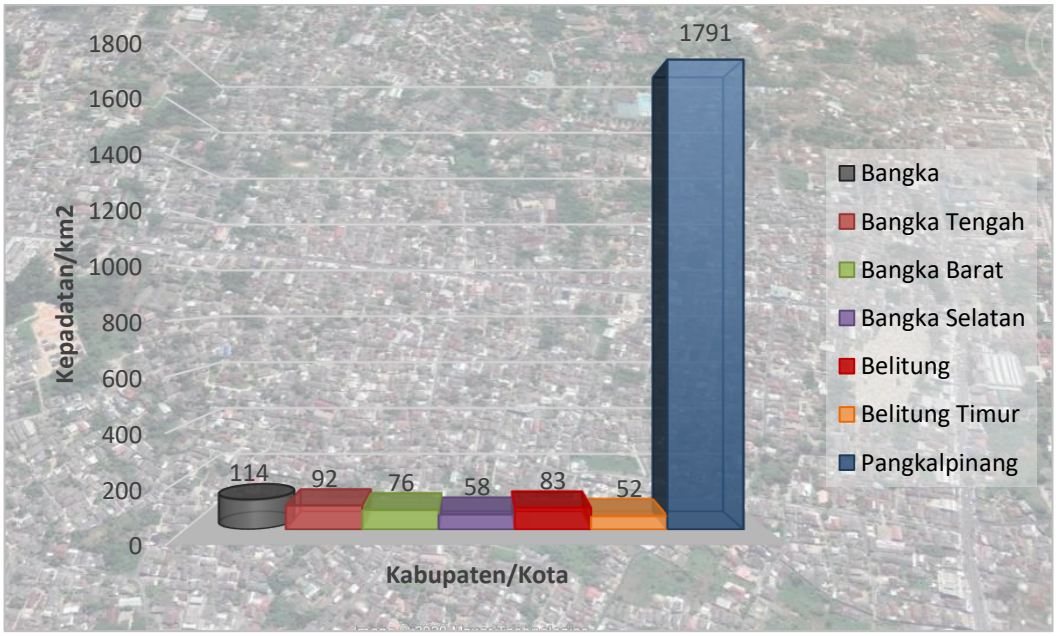

Gambar 2.4. Kepadatan Penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (Sumber : Bangka Belitung dalam Angka, 2020)

Jika mengabaikan faktor bencana yang berperan langsung dalam kelangsungan hidup manusia maka dipastikan bahwa kurva jumlah penduduk akan terus mengalami kenaikan atau trend positif. Kenaikan ini akan berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan penggunaan lahan terutama untuk permukiman maupun sebagai tempat aktivitas manusia sementara di sisi lain jumlah lahan yang tersedia untuk peruntukan-peruntukan tersebut cenderung tetap dalam jangka waktu tertentu. Ketidakseimbangan antara kedua variabel inilah yang pada akhirnya menimbulkan tekanan pada tata guna lahan yang telah ada.

c. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan di suatu wilayah serta pertambahan laju penduduk bersinergi lurus dengan tingkat perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan (Siregar & Wahyuniarti, 2007) dimana kenaikan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Gambar 2.5. Persentase Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2019
(Sumber : Bangka Belitung dalam Angka, 2020)

Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam rentang waktu tahun 2017 hingga 2018 persentase kemiskinan menurun secara signifikan sebesar 0.53 % sementara pada rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 terjadi penurunan sebesar 0.27%. Tingkat pertumbuhan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari angka produk domestik regional bruto (PDRB) yang merupakan cerminan dari keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap aktivitas produksi dalam perekonomian (Susanti et al, 2003).

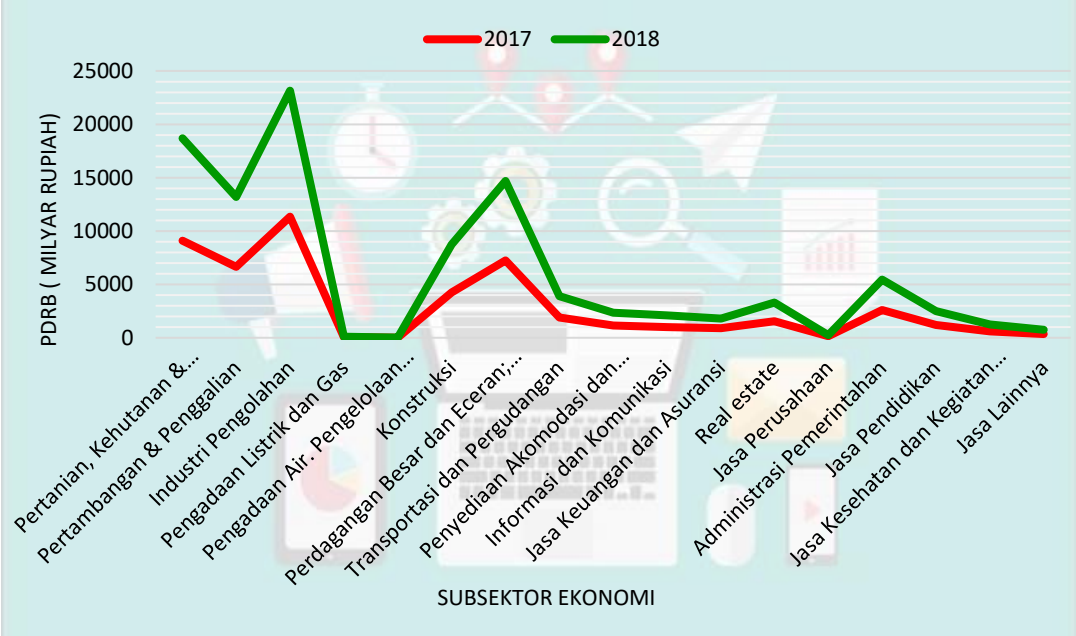

Gambar 2.6. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(Sumber : Bangka Belitung dalam Angka, 2020)

Walaupun Kepulauan Bangka Belitung terkenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia namun dari grafik diatas terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir pertumbuhan ekonomi tertinggi disokong oleh subsektor industri manufaktur dan selanjutnya disusul oleh subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Subsektor pertambangan dan penggalian berada di urutan keempat dan cenderung mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2017 – 2018 sebesar 1,082 % dimana salah satu faktor penyebabnya yaitu kebijakan penangguhan ekspor timah terutama dari smelter yang tidak terdaftar.

Dengan kecenderungan berbagai subsektor perekonomian diatas yang didominasi oleh trend kearah kenaikan maka akan berpengaruh langsung terhadap tata guna lahan dimana dalam kondisi idealnya kenaikan ini diikuti pula oleh perluasan penggunaan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas tersebut. Namun pada praktiknya faktor keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan dimana banyak terjadi aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan itu sendiri yang tentu saja menjadi masalah krusial dalam tata guna lahan.

II.1.1.2 Lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap tata ruang

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 , ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya sedangkan penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel II.2. Luas kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Penutup Lahannya

Nama Kawasan		Luas (ha)	Vegetasi	Lahan Terbangun	Lahan Terbuka	Tubuh Air
Kawasan Lindung	Hutan lindung	183.652,58	154,501.06	1,251.41	26,484.39	1,387.54
	kawasan lindung terhadap kawasan dibawahnya	55.920,08	42.631,46	1.270,41	11.112,89	451,07
	kawasan perlindungan setempat	23750,36	14904.85	600.04	2879.79	1195.65
	kawasan suaka alam, pelestarian alam	59364.49	32997.44	302.44	1994.08	71.95
	kawasan rawan bencana	14049.26	13778.95	37.09	82.11	151.12
Kawasan Budidaya		1363.888	1139137	35419.57	175871.6	12419.99

Sumber : Peta Pola Ruang RTRW Prov Kep Babel 2014-2034 & Peta Penutup Lahan Tahun 2019, BPKH wilayah XIII Pangkalpinang (Data diolah)

Dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kawasan Lindung menempati ruang sebesar 20,2% dari keseluruhan luasan pola ruangnya dimana kawasan lindung dengan persentase terbesar adalah kawasan hutan lindung dan kawasan lindung terhadap kawasan dibawahnya yaitu sebesar 71,99 %. Kawasan ini sendiri terdiri atas kawasan hutan lindung

dengan luasan mencapai 183.652,58 ha serta kawasan resapan air seluas 55.920,08 ha. Sementara itu kawasan rawan bencana memiliki persentase terkecil dari pola ruang kawasan lindung yaitu sebesar 4,23 %.

Data aspasial pada tabel diatas merupakan hasil tumpang susun antara pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan penutupan lahan tahun 2019 (BPKH wilayah XIII Pangkalpinang) yang memperlihatkan secara umum terjadinya salah satu masalah dalam tata guna lahan yaitu alih fungsi lahan. Lahan kawasan lindung seluas 3.461,39 ha atau setara dengan 1,04 % yang telah mengalami konversi menjadi lahan terbangun. Selanjutnya kawasan lindung yang telah mengalami konversi menjadi lahan terbuka yaitu seluas 42.553, 26 ha atau setara dengan 12,81 %. Alih fungsi lahan kawasan hutan lindung menjadi lahan terbuka sebagian besar disebabkan oleh adanya aktivitas penambangan timah yang cukup massif yang mengubah tutupan lahan yang sebelumnya bervegetasi menjadi lahan terbuka tak bervegetasi , padahal keberadaan hutan lindung sangat penting dalam keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Sejatinya pada pasal 61 UU nomor 26 tahun 2007 telah disebutkan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan, selanjutnya memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan diatas menandakan bahwa penggunaan dan pemanfaatan ruang terhadap RTRW belum konsisten dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dimana masih dijumpai adanya pelanggaran terhadap RTRW yang telah ditetapkan.

Suatu daerah bisa saja telah memiliki perencanaan tata ruang yang baik namun demikian jika tidak memperhatikan aspek pengendalian dan pengawasan maka tetap saja akan menimbulkan banyak persoalan salah satunya terkait permasalahan ketidaksesuaian peruntukan lahan yang

disebutkan pada tabel diatas. Aspek pengendalian dan pengawasan ini adalah tahapan yang bersifat krusial dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pada pasal 147 PP nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan tata ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya penataan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Lemahnya pengendalian dan pengawasan ini menjadi salah satu *driving force* dalam tata guna lahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.1.1.3 Belum disahkannya kebijakan RZWP3K

Sesuai dengan namanya, Kepulauan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan wilayah dari sekitar 470 pulau sehingga tidak dapat dilepaskan dari aktivitas yang berlangsung di sepanjang pesisir. Sumberdaya pesisir dan kelautan yang dimiliki oleh provinsi kepulauan bangka belitung sangat beragam baik itu ditinjau dari jenis maupun potensinya mulai dari potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti perikanan tangkap, kawasan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan energi gelombang serta potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*) seperti cadangan mineral timah.

Secara umum ditinjau dari perspektif pembangunan berkelanjutan *(sustainable development*), pembangunan di suatu wilayah dapat berlangsung secara kontinuitas jika permintaan terhadap sumber daya alam tersebut tidak melampaui ketersediaannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya permasalahan lingkungan akan muncul apabila yang terjadi adalah kebalikannya. Hal ini pula yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung dimana saat ini kondisi lingkungan pesisirnya mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun fungsi. Aktivitas penambangan merupakan salah satu masalah yang awalnya massif berlangsung di daratan dan saat ini telah merambah hingga ke wilayah pesisir tanpa mempertimbangkan peruntukan lahannya. Akibatnya terjadi efek domino

berupa serangkaian degradasi yang mengancam keberlangsungan sumberdaya alam di wilayah pesisir pulau.

Penanganan terhadap permasalahan dalam pengelolaan pesisir dan wilayah laut merupakan aspek penting dalam kaitan dengan pengaturan terhadap batas-batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada wilayah laut yang sampai saat ini belum secara keseluruhan memiliki kepastian hukum akibat belum disahkannya kebijakan daerah terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP3K. Perda tersebut merupakan instrumen yang penting dalam penentuan izin lokasi pemanfaatan ruang serta pengelolaan untuk investasi pembangunan. Dengan belum diterbitkannya peraturan tersebut menjadi salah satu *driving force* terhadap permasalahan terkait tata guna lahan di sepanjang pesisir Kepulauan Bangka Belitung.

II.1.2. Pressure

II.1.2.1 Eksploitasi Lahan secara berlebihan

Tekanan yang terjadi pada tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar berasal dari aktivitas antropogenik. Hal ini ditunjang pula oleh potensi sumber daya alam yang melimpah khususnya mineral. Sisi negatif yang ditimbulkan oleh beberapa faktor pemicu tersebut memberikan tekanan kepada lingkungan dalam bentuk eksploitasi lahan secara berlebihan dan atau secara terus menerus.

a. Pertambangan

Gambar 2.7. Lokasi Penambangan PT. Timah Tbk, Pemali – Kabupaten Bangka

(Sumber: CSRT – Google Earth, perekaman Tahun 2018)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak lama telah dikenal sebagai salah satu produsen timah terbesar di dunia dengan potensi cadangan timah alluvial yang tersebar di hampir seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota. Disamping timah, terdapat pula potensi mineral bahan galian non logam lainnya yang sebagian besar didominasi oleh pasir bangunan, pasir kuarsa, granit serta tanah liat (Tabel II.3)

Tabel II.3. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Pasir Bangunan	CV. Harapan Rezeki Bungsu	83,5	180.000
		PT. Prima Bundiarta Nusa	123,1	444.000
		PT. Jabel Tri Bersaudara	151,64	440.000
		CV. Irpau Hero	35,40	114.227
		Cv. Irpau Hero	91,59	122.247
		Cv. Dhika Yogatama	152,7	228.000
		PT. Dago Pasir Alam	80,3	408.000
		CV. Alfindo	114,7	180.000
		CV. Bumi Pasundan	98,7	240.000
		PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	165,2	300.000
2	Pasir Kuarsa	PT. Sriyudi Alam Perkasa	39,2	120.000
		PT. Sriyudi Alam Perkasa	23,65	300.000
		PT. Prima Bundiarta Nusa	49,64	240.000
		PT. Mitra Pasir Berlian	30,6	180.000
		CV. Harapan Rejeki Bungsu	83,5	480.000
		PT. Kurnia Mandiri Adiperkasa	190	331.500
		PT.Sumber Alam Antarnusa	164,1	180.000
		PT. Karya Cipta Lahanindo	132,4	360.000
		PT. Belitung Sand Mining	177,9	200.000
		PT. Belitung Sand Mining	192	400.000
		PT. Belitung Sand Mining	71,3	200.000
		PT. Hamparan Mineralindo Abadi	198	277.500
		PT. Sejahtera Utama Mitra Jaya	190	300.000
		PT. Facific Dipta Karya	197	92.000

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
		PT. Hero Progres Internasional	198	101.728
		PT. Hero Progres Internasional	180	89.229
		PD. Duta Lestari	1,3	1.300
		PT. Mitra Persada Resouces	82,31	71.001
		PT.Cinta Mapur Indonesia	137	172.872
		CV. Dersan Silica Indonesia	40,00	371.250
		PT. Mitra Persada Resources	32,84	135.000
		PT. Mitra Persada Resources	71	127.008
		PT. Walie Tampas Citratama	150,4	149.940
		PT. Walie Tampas Citratama	46,2	780.000
		PT. Mutiara Terang Resources	170	100.000
3.	Granit	PT. Anugerah Kreatif Mandiri	105,261	23.750
		PT. Ludai Gede Bilitonite	138,00	86.262
		PT. Aditya Buana Inter	12,86	180.000
		PT. Mandiri Karya Makmur	150	360.000
		PT. Bumiwarna Agung Perkasa	150	480.000
4.	Tanah Liat	PT. Sriyudi Alam Perkasa	88,89	48.000
		PT. Prima Budiarta Nusa	106	160.000
		CV. Sriyudi Lita Jaya	500	15.000
		CV. Harapan Aldi Sejahtera	150,00	86.632
		CV. Irpau Hero	28,3	110.000
		PT. Jabel Tri Bersaudara	92	80.000
		PT. Hero Ceramas	195,00	81.473
		PT. Setia Maju Pratama	196,00	96.000
		PT. Hero Ceramas	195,00	81.473

Sumber : Dinas ESDM Prov Kep. Bangka Belitung, 2020

Selama kurun waktu 2013 hingga 2017 produksi timah sebagai mineral utama terus mengalami kenaikan (Gambar 2.8). Hal ini merepresentasikan besarnya potensi mineral ini dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Namun demikian, nilai ekonomi yang menjanjikan dari kegiatan ini harus dibayar mahal dengan tidak terkendalinya aksi eksploitasi penambangan yang terus terjadi khususnya yang bersifat illegal bahkan di wilayah lahan eks tambang PT Timah Tbk yang telah dilakukan reklamasi.

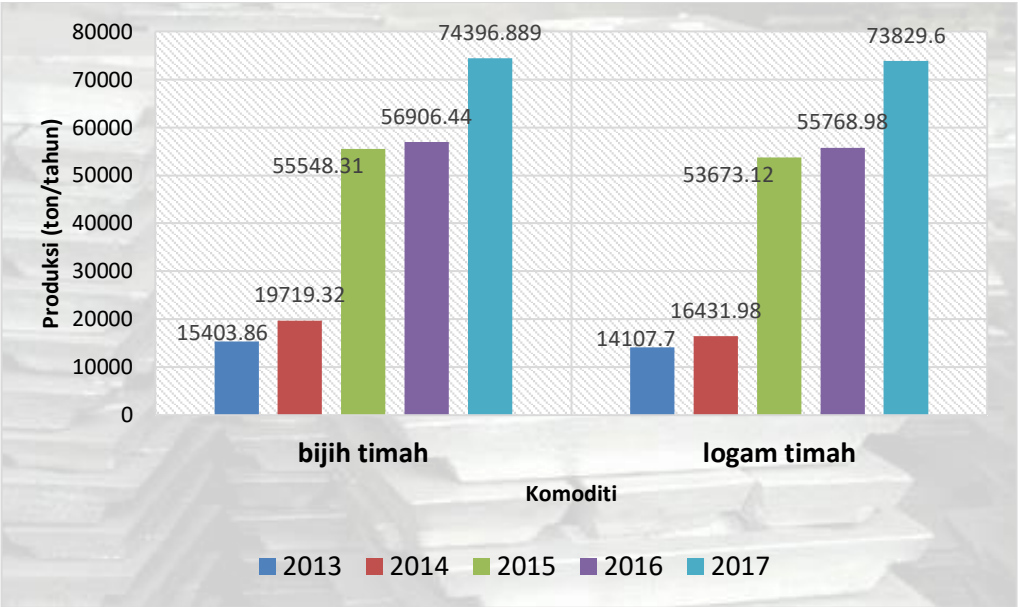

Gambar 2.8. Produksi Mineral Timah Tahun 2013-2017
(Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019)

b. Perkebunan Kelapa Sawit.

Kegiatan usaha di bidang perkebunan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung semakin menunjukkan trend yang positif. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah perkebunan kelapa sawit skala besar yang ada.

Gambar 2.9. Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar di Kabupaten Bangka

(Sumber: DLH Prov. Kep Babel, 2019)

Dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang merupakan satu-satunya wilayah administrasi yang tidak memiliki areal perkebunan kelapa sawit skala besar. Adapun rincian terkait data tersbut dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini.

Tabel II.4. Jumlah Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kabupaten/Kota Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Bangka	8	9	8	8	13
Belitung	8	8	8	9	11
Bangka Barat	6	6	6	6	6
Bangka Tengah	8	7	8	10	11
Bangka Selatan	6	6	6	6	6
Belitung Timur	10	10	10	10	10
Pangkalpinang	-	-	-	-	-

Sumber: Bangka Belitung dalam Angka, 2019

Secara umum terlihat bahwa dalam rentang tahun 2014 hingga 2017 kondisi jumlah usaha perkebunan kelapa sawit terbilang *flat* dimana hampir

tidak ada penambahan usaha yang berarti. Namun pada rentang waktu tahun 2017 hingga 2018 mulai terlihat kenaikan pesat usaha kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bangka dimana terdapat penambahan 5 usaha perkebunan dalam satu tahun. Selanjutnya diikuti oleh Kabupaten Belitung dengan penambahan sebanyak 2 perkebunan baru serta disusul oleh Kabupaten Bangka Tengah namun tidak secara signifikan, yaitu hanya penambahan 1 perusahaan perkebunan saja. Sementara itu di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan serta Belitung Timur sama sekali tidak ada penambahan satu usaha perkebunan sama sekali. Secara keseluruhan dari tahun 2014 hingga 2018 terjadi penambahan sebesar 19,3 % yaitu total 57 perkebunan (Gambar 2.10).

Dengan positifnya angka pertumbuhan yang diperlihatkan oleh kegiatan perkebunan ini maka akan menimbulkan sisi negatif yaitu eksploitasi lahan secara berlebihan sehingga dapat berdampak pada kesuburan tanah maupun terjadinya alih fungsi lahan.

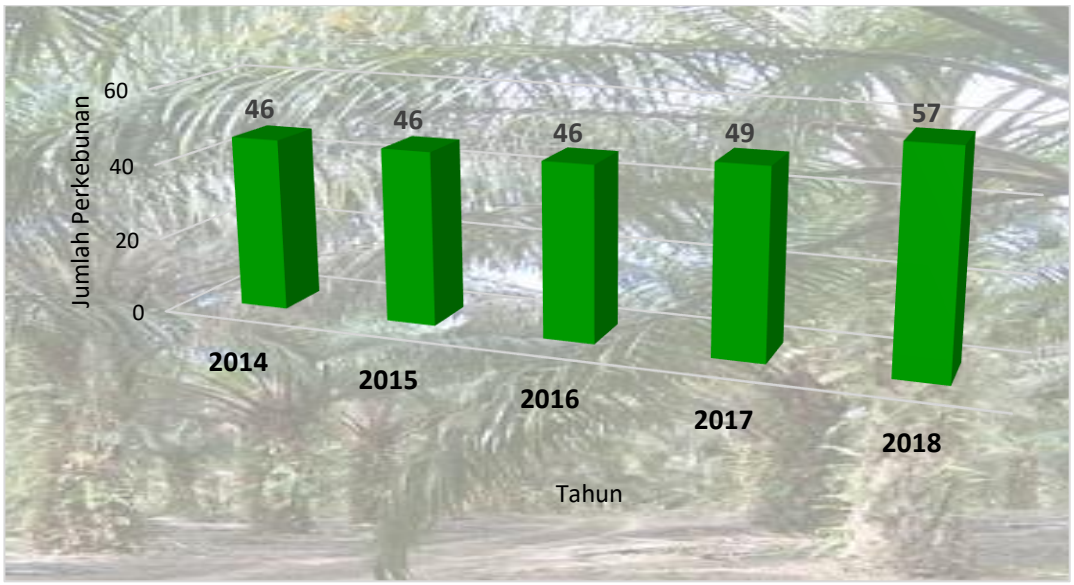

Gambar 2.10. Jumlah Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Tahun 2014-2018
(Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019)

II.1.2.2. Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan adalah salah satu bentuk tekanan terhadap tata guna lahan yang paling banyak terjadi di berbagai wilayah khususnya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini menunjukkan ketatnya kompetisi pemanfaatan lahan di masa sekarang dan yang akan datang (Danoedoro, 2008). Dengan berbagai faktor pemicu seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka perubahan penutup/penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata gunanya menjadi hal yang tidak dapat dihindari.

a. Perubahan penutup lahan tahun 2018 dan 2019

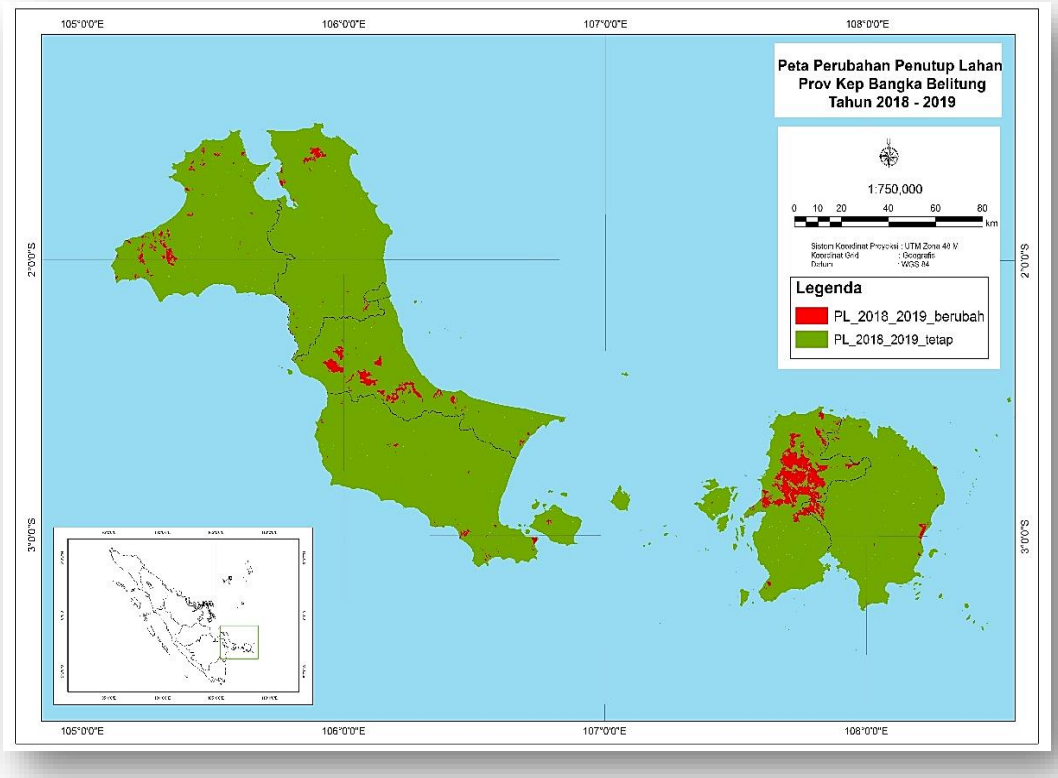

Gambar 2.11. Perubahan Penutup Lahan di Prov. Kep.Bangka Belitung Tahun 2018 – 2019
(Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, Data diolah)

Hasil tumpang susun antara peta penutup lahan tahun 2018 dan 2019 yang bersumber dari KLHK melalui aplikasi sistem informasi geografis memperlihatkan secara umum terjadinya perubahan penutup lahan pada rentang kedua tahun ini dimana seluas 60.884,016 ha lahan mengalami perubahan menjadi penutup lahan lainnya sementara lahan yang tidak

mengalami perubahan yaitu sebesar 1.610.708,83 ha. Jika dibandingkan dengan luasan totalnya maka persentase lahan yang mengalami perubahan atau alih fungsi dengan lahan yang tetap yaitu masing –masing sebesar 3,64% dan 96,36%. Dari peta perubahan penutup lahan diatas secara spasial terlihat bahwa alih fungsi lahan banyak terjadi di wilayah administratif Kabupaten Belitung. Secara rinci luasan perubahan penutup lahan tersebut diperlihatkan pada Tabel II.6 berikut.

Tabel II.5. Luasan Perubahan Penutup Lahan Tahun 2018-2019

Kelas Tutupan Lahan	Luasan Pada Tahun (ha)	
	2018	2019
Hutan Primer	600,38	531,44
Hutan sekunder	113.6935,84	101.828,41
Hutan mangrove primer	33.797,41	33.647,09
Hutan rawa primer	596,05	550,92
Belukar	295.434,88	298.425,98
Perkebunan	194.548,81	234.031,00
Permukiman	33.174,72	35.462,04
Lahan Terbuka	75.630,75	75.368,09
Savana	7.080,022	7.055,60
Air	5.598,81	5.652,41
Hutan Mangrove sekunder	33.391,82	32.403,31
Hutan rawa sekunder	44.621,88	44.539,89
Belukar rawa	58.005,27	54.421,47
Pertanian Lahan Kering	58.111,87	54.938,62
Pertanian Lahan Kering campur semak	556.362,38	530.689,02
Sawah	1.762,78	1.762,78
Tambak	628,38	628,38
Bandara	146,08	257,27
Transmigrasi	2.416,80	2.416,80
Pertambangan	144.783,81	146.426,21
Rawa	10.964,11	10.556,12
Total Luasan	**1.671.592,85**	**1.671.592,85**

(Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, data diolah)

Terjadinya kenaikan maupun penurunan luasan pada masing-masing tutupan lahan secara umum dalam rentang tahun 2018-2019 mengindikasikan adanya peralihan fungsi penggunaan lahan satu sama lain yang tentunya akan menimbukan tekanan pada tata guna lahan. Dari hasil

pengolahan data spasial penutupan lahan tahun 2018-2019 berbasis sistem informasi geografis diperoleh informasi perubahan penutupan lahan antara kedua tahun tersebut.

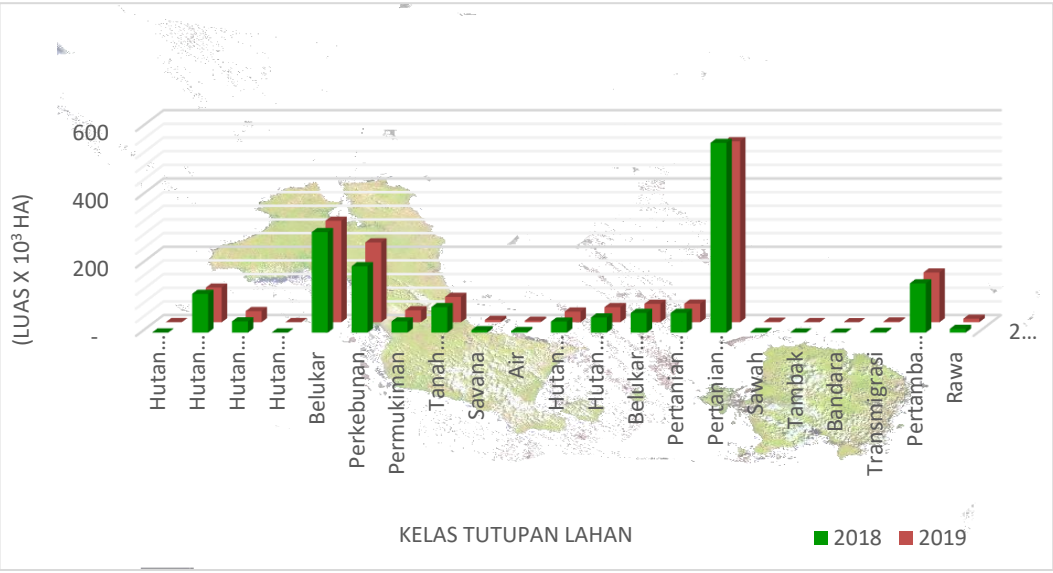

Gambar 2.12. Perbandingan Luas Penutup Lahan Tahun 2018-2019
(Sumber: Peta Penutup Lahan BKPH Wilayah XIII, Data diolah)

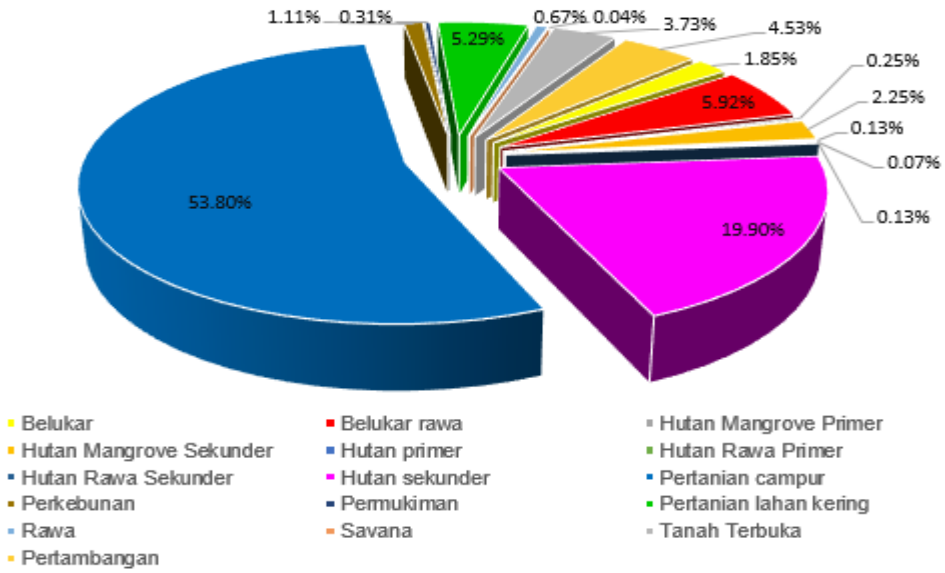

Gambar 2.13. Persentase Luasan Tutupan Lahan Tahun 2018 yang Terkonversi menjadi Tutupan Lahan Lainnya di Tahun 2019

(Sumber: Peta Penutup Lahan BKPH Wilayah XIII, Data diolah)

Penutup lahan yang paling banyak mengalami konversi menjadi tutupan lahan lain yaitu pertanian lahan kering campur semak seluas

32.764,40 ha, kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 12.107,43 ha serta belukar seluas 1.130,17 ha. Sementara itu jenis tutupan lahan yang tidak mengalami perubahan luasan sama sekali yaitu kelas tubuh air; bandara; sawah; tambak; serta areal transmigrasi. Gambar 2.12 menyajikan persentase luasan perubahan lahan tersebut

Secara umum, lahan pertanian di Bangka Belitung terdiri atas lahan pertanian basah /sawah, lahan pertanian kering serta lahan pertanian kering campur semak. Luasan lahan pertanian yang mengalami alih fungsi lahan menjadi penutup/penggunaan lahan lainnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.7 berikut.

Tabell II.6. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Penggunaan Lahan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
1.	Permukiman	33.174,72	34.933,43
2.	Industri	-	-
3.	Tanah kering	-	-
4.	Perkebunan	194.548,81	227.674,29
5.	Semak belukar	295.434,88	295.616,42
6.	Tanah kosong	-	-
7.	Perairan/kolam	5.598,81	5.598,81
8.	Bandara	146,08	257,27
9	Lahan Terbuka	75.630,75	75.673,93
10	Pertambangan	144.783,81	145.546,56

Sumber: Peta Penutup Lahan BPKH Wilayah XIII thn 2018-2019

Pertanian lahan kering merupakan kelas yang paling banyak terjadi alih fungsi lahan dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 sementara lahan pertanian basah cenderung tetap. Alih fungsi lahan pertanian lahan kering terbesar yaitu konversi menjadi perkebunan dengan luasan perubahan mencapai 33.125,48 ha atau setara dengan 92,06 % dari

perubahan yang terjadi. Selanjutnya disusul oleh pemukiman yang mengalami peningkatan luasan sebesar 1.758,71 ha atau setara dengan 4,89 % kemudian lahan terbuka penambangan turut mengalami perluasan kegiatan sebesar 762,75 ha atau setara dengan 2,12 % dari luasan perubahan yang terjadi.

2.1.3. State

2.1.3.1 Wilayah Menurut Pola ruangnya

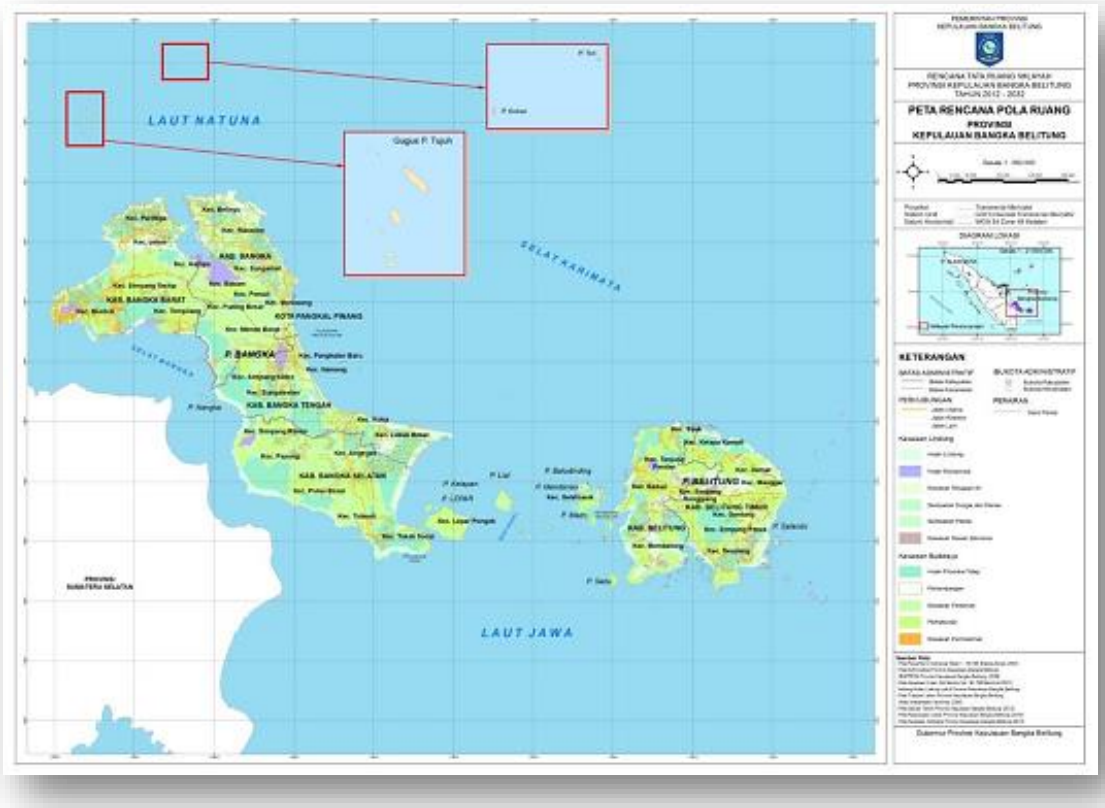

Gambar 2.14. Peta Pola Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

(Sumber: Bapedda Prov Kep Bangka Belitung)

Dalam pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2034, kawasan budidaya menempati lahan seluas 1.363.888 ha (79,8 %) sementara kawasan lindung mempunyai luasan sebesar 344.635,34 ha (20,2 %). Pada kawasan lindung, porsi lahan terbesar yaitu hutan lindung dengan luasan 183.652,58 ha atau setara dengan 53,28% dari luas kawasan lindung atau setara dengan 10,75% dari luasan

keseluruhan wilayah daratan. Sementara itu pada kawasan budidaya, kawasan peruntukan pertanian merupakan pola ruang terbesar dengan luasan 491.590,01 ha atau 28,77 % dari total luas wilayah. Rincian luasan pola ruang ditunjukkan pada Tabel II.8.berikut.

Tabel II.7. Pola Ruang RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034

Nama Kawasan		Luas
Kawasan Lindung	Hutan Konservasi	36.505,86
	Hutan Lindung	183.652,58
	Kawasan Lindung Darat	30.756,67
	Kawasan Lindung Serapan Air	55.920,08
	Kawasan Rawan Erosi dan Tanah Longsor	14.049,26
	Sempadan Pantai	17.660,52
	Sempadan Sungai	6.090,36
	Kawasan Lindung Total	**344.635,34**
Kawasan Budidaya	Hutan Produksi	463.117,91
	Kawasan Permukiman	25.012,68
	Kawasan Pertanian	491.590,01
	Perikanan	46,14
	Perkebunan	384.121,73
	Kawasan Budidaya Total	**1.363.888,47**

Sumber: Peta Pola Ruang RTRW Prov Kep. Bangka Belitung

Jika dibandingkan dengan luasan kawasan budidaya keseluruhan, persentase perbedaan luasan kawasan pertanian dan hutan produksi terlihat tidak signifikan yaitu 36,04 % dan 33,96 % sedangkan pola ruang perkebunan berada di urutan selanjutnya dengan luasan 384.121,73 ha atau setara dengan 28,16 % dari luas total kawasan budidaya. Untuk kawasan peruntukan permukiman luasannya adalah 25.012,68 ha atau 1,47% dari total luas daratan (Gambar 2.14). Dilihat dari pola ruangnya maka kawasan pertanian menjadi peruntukan utama di Bangka Belitung. Namun jika dibandingkan dengan keadaan sekarang maka tutupan lahan

perkebunan mengalami peningkatan luasan dengan mengkonversi lahan pertanian kering. Kondisi lahan di lapangan saat ini merupakan refleksi dari ketidaksesuaian pemanfaatan dengan peruntukan lahannya.

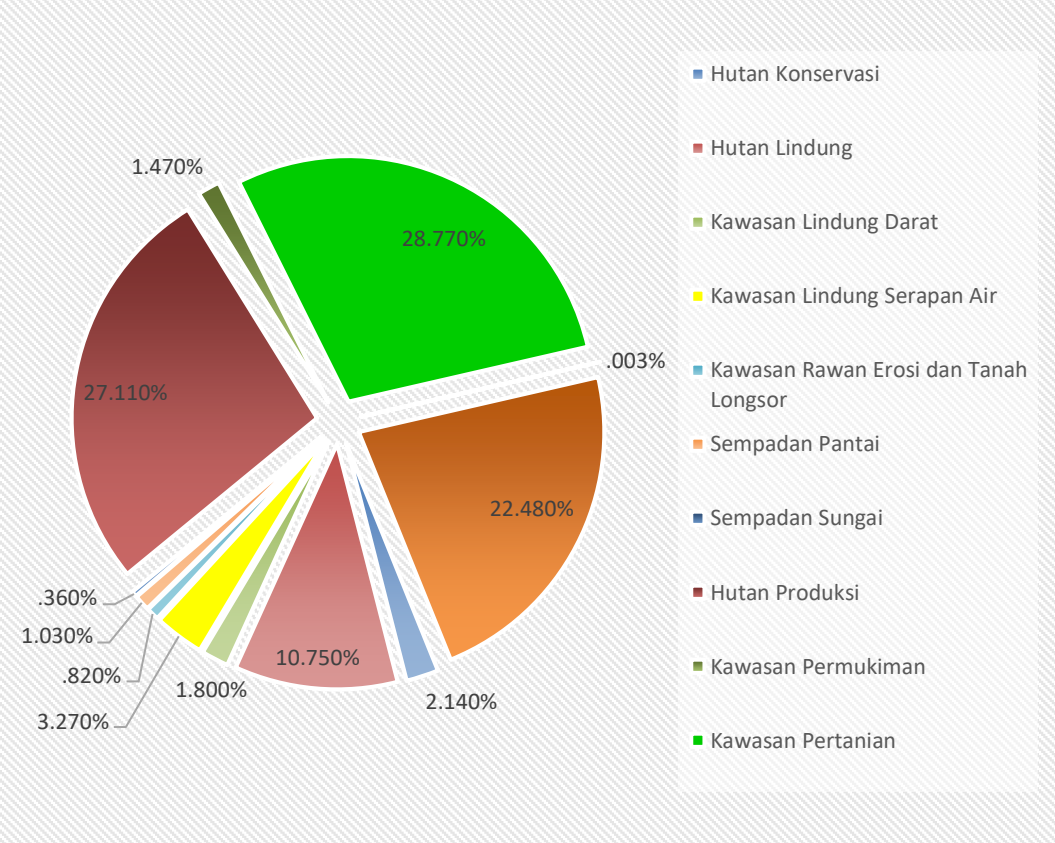

Gambar. 2.14. Persentase Luas Kawasan Berdasarkan Pola Ruangnya

(Sumber: Peta Pola Ruang RTRW Prov Kep Bangka Belitung, data diolah)

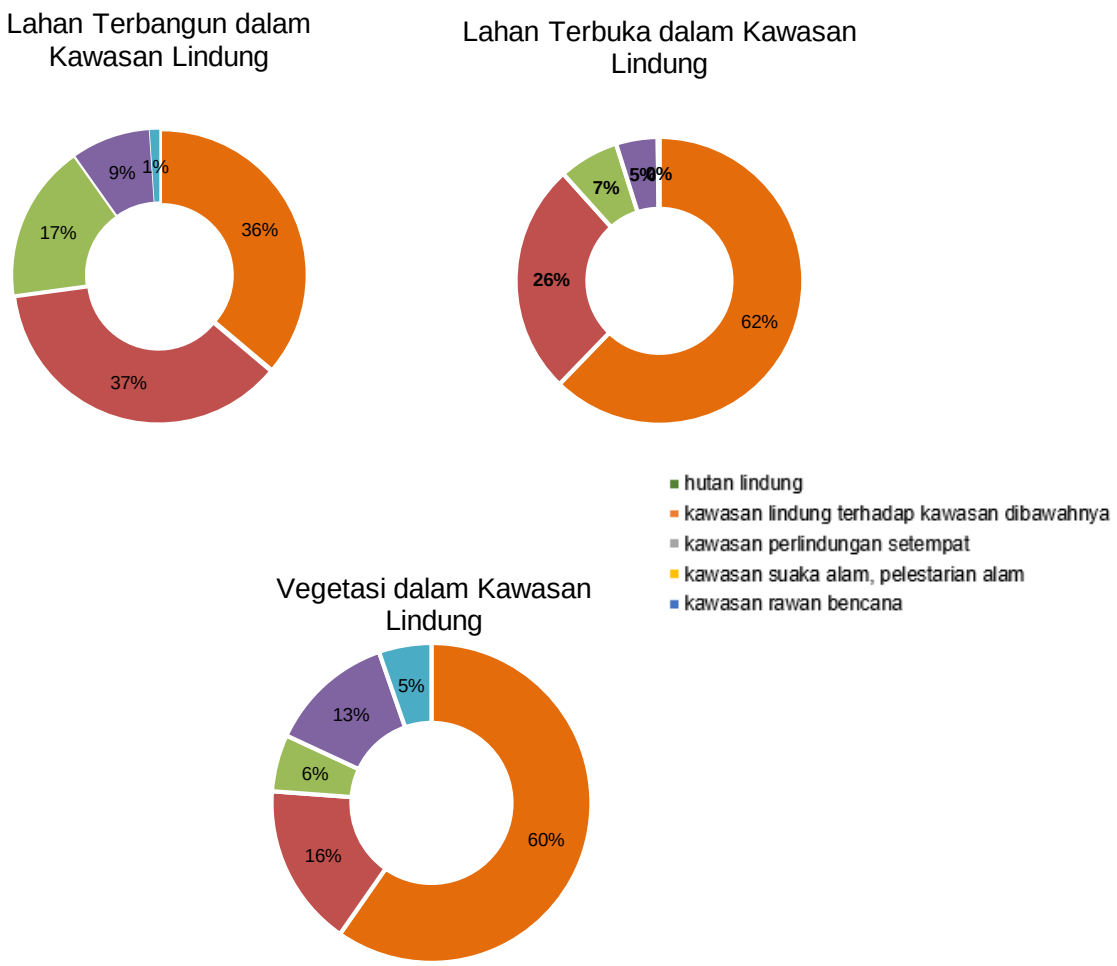

Gambar. 2.15. Persentase Penutup Lahan Utama di Kawasan Lindung

(Sumber: Peta Pola Ruang RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung dan Peta Penutup Lahan Tahun 2019, data diolah)

Berdasarkan hasil analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis terhadap pola ruang RTRW Prov. Kep. Bangka Belitung dan penutup lahan KLHK tahun 2019, terlihat bahwa dari beberapa subkawasan lindung, penutup lahan vegetasi terbesar berada didalam kawasan hutan lindung dengan persentase 60%. Angka ini memang cukup baik namun data terkait penutup lahan kelas lahan terbuka dan lahan terbangun di kawasan lindung harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa dari total luasan lahan terbuka, sebanyak 62% arealnya berada di dalam kawasan hutan

lindung sedangkan pada kelas lahan terbangun, sebanyak 36% dari total luasannya berada pada kawasan hutan lindung. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga mengubah bentang alam atau *landscape*nya dari yang bervegetasi menjadi tidak bervegetasi.

II.1.3.2. Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama

Pemanfaatan lahan utama di masing-masing wilayah administrasi kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan penutup/penggunaan lahan eksisting tahun 2019 ditampilkan pada Tabel II.9 berikut.

Tabel II.8. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Badan Air (Ha)
1.	Kabupaten Bangka	17.048,15	11,15	195.604,18	33.182,68	13.696,48	1.930,03
2.	Kabupaten Bangka Barat	21.202,85	-	158.818,67	41.106,80	32.001,40	1.804,77
3.	Kabupaten Bangka Tengah	15.837,74	-	115.348,71	27.465,89	24.496,69	232,72
4.	Kabupaten Bangka Selatan	21.824,36	1.161,64	250.494,235	12.260,39	43.075,28	391,52
5.	Kabupaten Belitung	19.982,88	-	66.786,74	66.053,03	46.914,82	246,76
6.	Kabupaten Belitung Timur	9.896,88	588,30	88.880,16	53.931,30	46.141,72	703,27
7.	Kota Pangkalpinang	3.734,84	-	6.051,79	-	211,88	388,23
	Jumlah	109.527,70	1.761,10	881.984,49	234.000,10	206.538,27	5.697,30

Sumber: Peta Penutup Lahan BPKH Wil XIII, data diolah

Lahan kering adalah kelas penutup lahan yang paling mendominasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan mencapai 881.984,49 ha atau setara dengan 61,27 % dari keseluruhan luasan pemanfaatan lahan pada tabel diatas. Kelas ini terdiri atas penutup lahan belukar, pertanian lahan kering serta pertanian lahan kering campur semak

dimana luasan terbesar berada di Kabupaten Bangka Selatan. Sementara itu kelas perkebunan menempati urutan kedua pemanfaatan lahan dengan luasan sebesar 234.000,10 (16,26 %) yang mayoritas berada di Kabupaten Belitung. Penutup lahan sawah menjadi kelas pemanfaatan lahan terkecil di provinsi ini yaitu dengan luasan hanya sekitar 1.761,10 ha saja yang sebagian besar tersebar di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

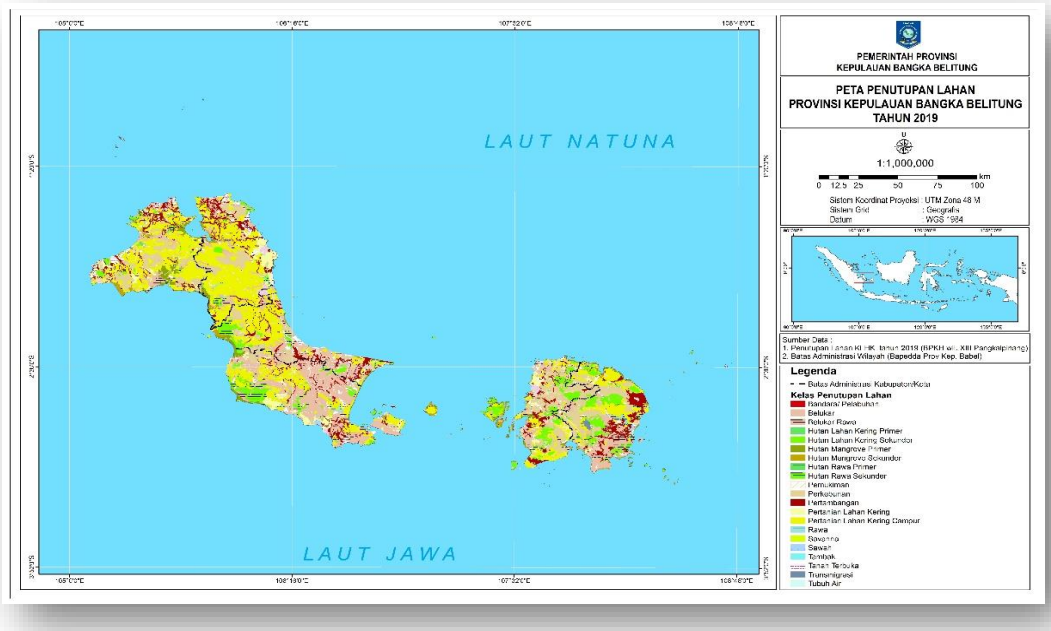

Gambar.2.16. Peta Penutup Lahan Prov Kep. Bangka Belitung Tahun 2019

(Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang)

II.1.3.2 Kawasan hutan berdasarkan fungsi dan statusnya

Berdasarkan SK pemutakhiran kawasan hutan terbaru SK.8093/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/II/2018, hutan produksi merupakan fungsi hutan terbesar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luasan 432.883,51 ha sedangkan taman wisata alam merupakan fungsi hutan dengan luasan terkecil yaitu 7.192,42 ha. Berdasarkan statusnya, hutan negara memegang luasan terbesar yaitu 659.014 ha sedangkan taman hutan raya mempunyai luasan 11.900,38 ha (Gambar 2.17)

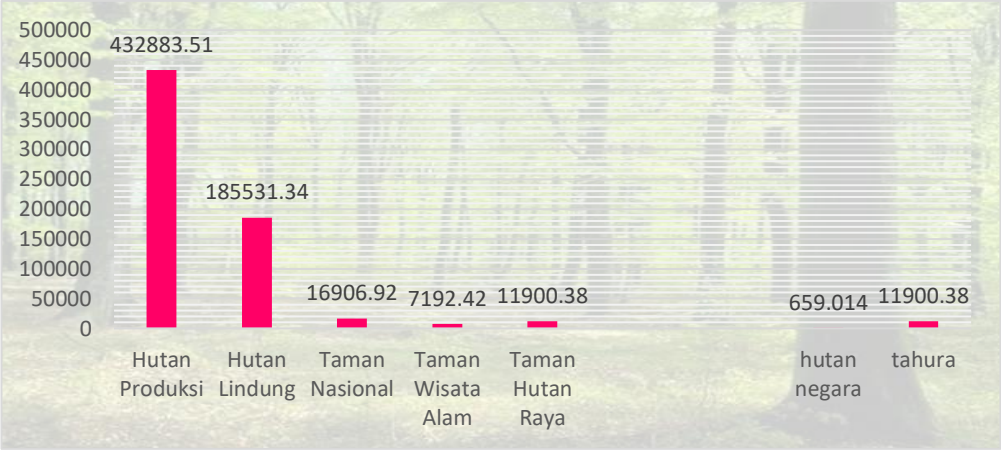

Gambar.2.17. Hutan Berdasarkan Fungsi dan Statusnya

(Sumber: Dinas Kehutanan Prov Kep. Bangka Belitung, 2020)

Berdasarkan luasan hutan produksi yang dimanfaatkan dalam menghasilkan produk berupa kayu, Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah dengan pemanfaatan terbesar yaitu seluas 89.560,76 ha yang kemudian disusul oleh Kabupaten Belitung dengan luasan 40.436,04 ha. Selanjutnya disusul dengan Kabupaten Bangka Selatan seluas 31.630 ha. Luas pemanfaatan areal hutan produksi paling sedikit berada di Kabupaten Belitung dengan luasan 3.324,32 ha saja (Gambra 2.18)

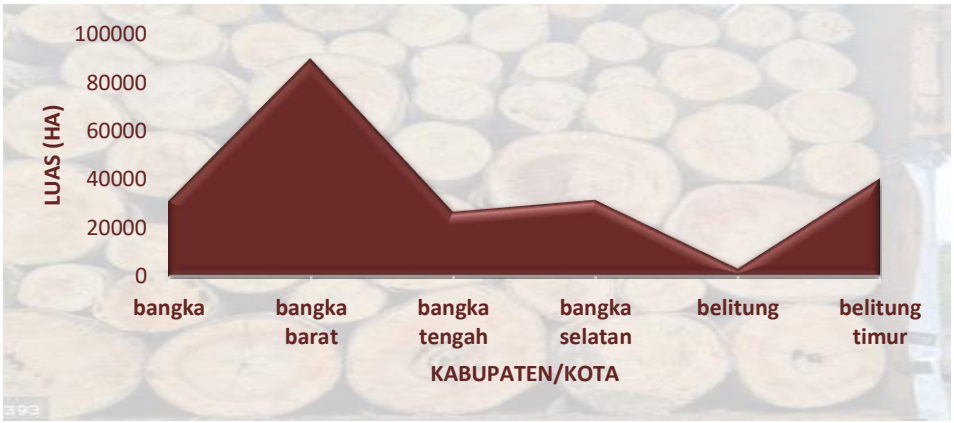

Gambar 2.18. Luasan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Sumber : (Dinas Kehutanan, 2020 dan Buku Basis Data Geospasial, 2019)

II.1.3.4. Perubahan Biofisik Lingkungan

a.Lahan Kritis

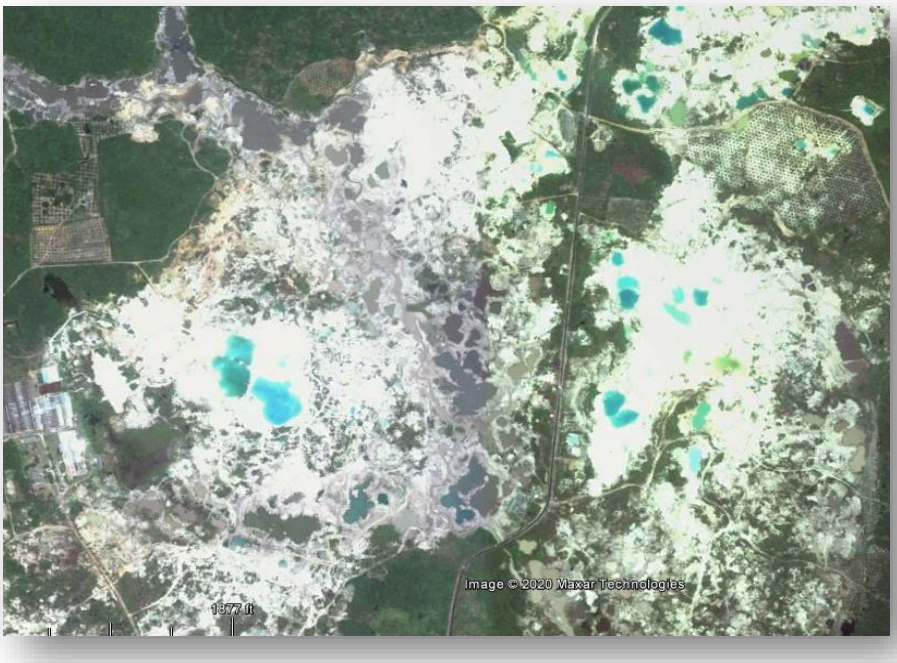

Gambar 2.19. Lahan Kritis Penambangan di Kab. Bangka Barat
(Sumber: CSRT – Google Earth, perekaman tahun 2019)

Berbagai tekanan atau *pressure* terhadap tata guna lahan salah satunya melalui penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahannya serta tanpa adanya pengelolaan yang tepat akan mengarah pada terjadinya perubahan kondisi biofisik lingkungan yang tergambarkan saat ini melalui banyaknya lahan yang mengalami degradasi atau dikenal dengan istilah lahan kritis. Berdasarkan UU nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air disebutkan bahwa lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau tidak dibudidayakan. Parameter penilaian kekritisan lahan yang berada pada kawasan lindung dan budidaya tentu saja tidak sama. Pada kawasan lindung, penilaian dikaitkan dengan fungsi perlindungan pada sumberdaya hutan dalam hal ini penutup lahan vegetasi, tanah dan air, faktor kemiringan lereng, tingkat erosi serta manajemen pengelolaan kawasan yang dilakukan sedangkan penilaian kekritisan lahan di daerah budidaya selain tetap mempertimbangkan

parameter kunci seperti aspek kemiringan lereng, tingkat erosi maupun jenis batuan juga menitikberatkan pada fungsi produksi dan pelestarian sumberdaya lahan itu sendiri untuk kepentingan produktivitas.

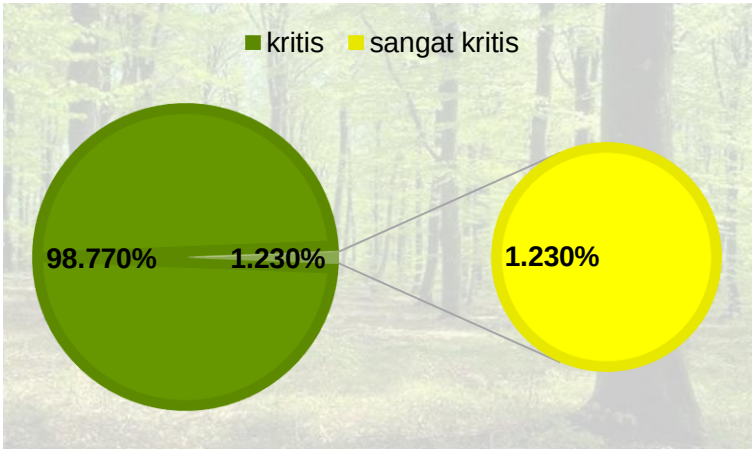

Gambar 2.20. Persentase Lahan Kritis dan Sangat kritis ditinjau dari Luasan Lahan Terkategori Kritis

(Sumber: Dinas Kehutan Prov Kep. Bangka Belitung, 2020)

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19.850,24 ha lahan dikategorikan kedalam lahan kritis atau setara dengan 98,77% dari total luasan lahan yang terkategori kritis. Sementara itu lahan kategori sangat kritis menempati luasan sebesar 227,86 ha (Gambar 2.20). Lahan sangat kritis ini berada di dalam kawasan hutan produksi dimana seluas 190,936 ha berada di Kabupaten Bangka Selatan serta sisanya yaitu 56,921 ha berada di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Degradasi lahan hingga terkategorikan lahan kritis sebagian besar berada di dalam kawasan hutan lindung yaitu seluas 9.416,43 ha dan paling sedikit berada di dalam kawasan hutan konservasi dengan luasan 86,92 ha. Rincian persebaran lahan kritis di tiap kabupaten/ kota ditunjukkan pada Gambar 2.21 di bawah ini.

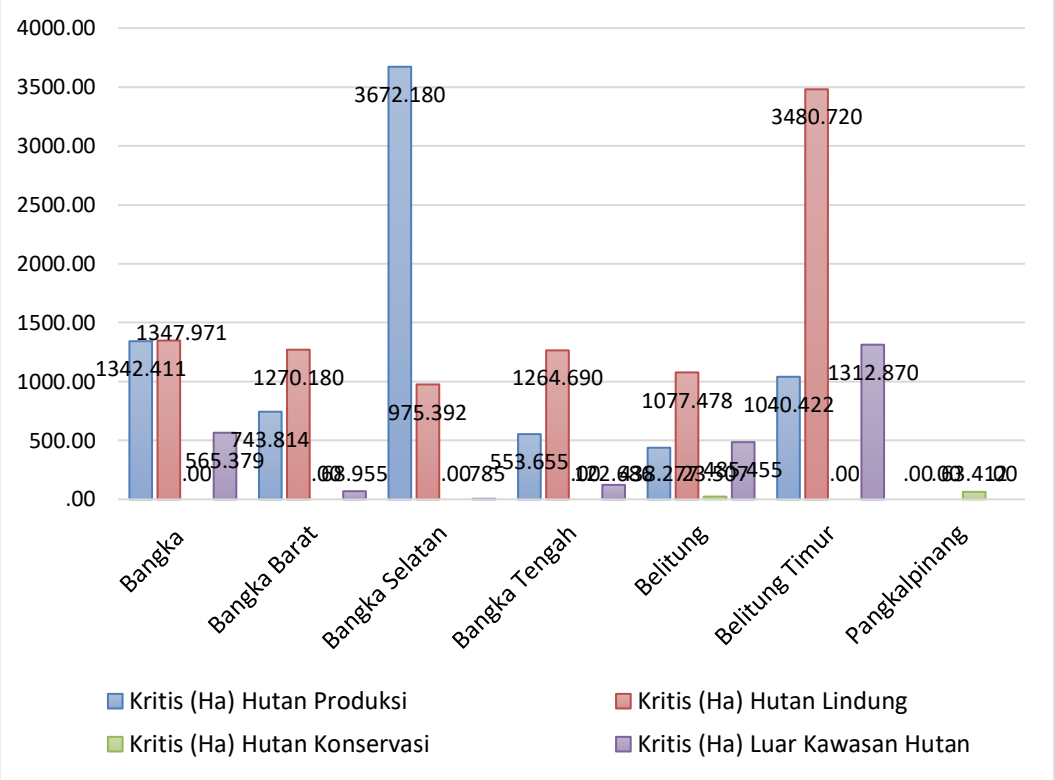

Gambar 2.21. Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kabupaten/Kota

(Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020)

Lahan kritis di dalam kawasan lindung paling banyak terjadi di Kabupaten Belitung Timur dengan luasan mencapai 3.408,7 ha sementara itu luasan lahan kritis terkecil berada di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dengan luasan sebesar 975,4 ha. Aktivitas pembalakan hutan untuk perkebunan maupun penambangan mendominasi terjadinya lahan kritis di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Lahan kritis yang ditimbulkan terkait aktivitas penambangan timah sifatnya lebih ekstrim daripada pembukaan lahan untuk perkebunan, hal ini dikarenakan kegiatan penambangan merombak penutup lahan yang sebelumnya bervegetasi menjadi lahan terbuka tak bervegetasi. Apabila proses penambangan timah khususnya yang bersifat ilegal terus berlangsung dan tidak dibarengi oleh reklamasi yang optimal maka luas lahan kritis akan semakin meningkat.

Tabel II.9. Evaluasi Kerusakan Lahan Kering untuk Produksi Biomassa

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	>20 cm	Tidak
2	Kebatuan Permukaan	> 40%	<40%	Tidak
3	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	82,87 % pasir*	Melebihi
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm3	1,5975 g/cm3	Melebihi
5	Porositas Total	< 30% ; > 70%	40,94%	Tidak
6	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	169,92	Melebihi
7	pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,46	Tidak
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,136	Tidak
9	Redoks	< 200 mV	-	Tidak
10	Jumlah Mikroba	< 10^2cfu/g tanah	1,0x104; 2,0x102	Tidak

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

Data diatas merupakan salah satu *output* kegiatan evaluasi kerusakan tanah di lahan kering yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dari 10 parameter yang dianalisis, 3 diantaranya melebihi baku mutu sesuai PP nomor 150 tahun 2000 tentang Baku Mutu Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Ketiga parameter tersebut yaitu komposisi fraksi, berat isi serta derajat pelulusan air. Komposisi fraksi sesuai hasil pengamatan mengandung > 80 % pasir yang

artinya sulit untuk menyimpan unsur hara maupun air. Selanjutnya hasil pengamatan terhadap berat isi yaitu 1,5975 g/cm^3 atau melebihi baku mutu yang ada. Hal ini berarti sampel tanah tersebut sangat padat sehingga dapat mempengaruhi proses penetrasi air oleh sistem perakaran tanaman. Sementara itu hasil pengamatan terhadap parameter derajat pelulusan air yang melebihi baku mutu mengindikasikan sifat tanah ini yang sukar menyimpan air.

Tabel II.10. Perbandingan tingkat kekritisan lahan tahun 2018-2019

Kategori lahan	Tahun	
	2018	2019
Lahan Kritis (ha)	20.428	20.098
Lahan Sangat Kritis (ha)	260	247,86

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kep Bangka Belitung, 2020

Data lahan kritis cenderung mengalami penurunan luasan pada tahun 2019. Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam rentang waktu satu tahun, lahan kritis berkurang sebanyak 330 ha sementara lahan sangat kritis mengalami penurunan sebesar 12,14 ha. Hal ini tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas lahan.

b. Kerusakan Gambut

Gambut merupakan bentuk lahan organik yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bahaya kebakaran hutan. Berdasarkan data spasial Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut KLHK yang bersumber dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP), luas lahan gambut di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 47.996,36 ha yang berada di 5 (lima) wilayah administrasi kabupaten/ kota di Pulau Bangka sementara di Pulau Belitung tidak dijumpai adanya gambut.

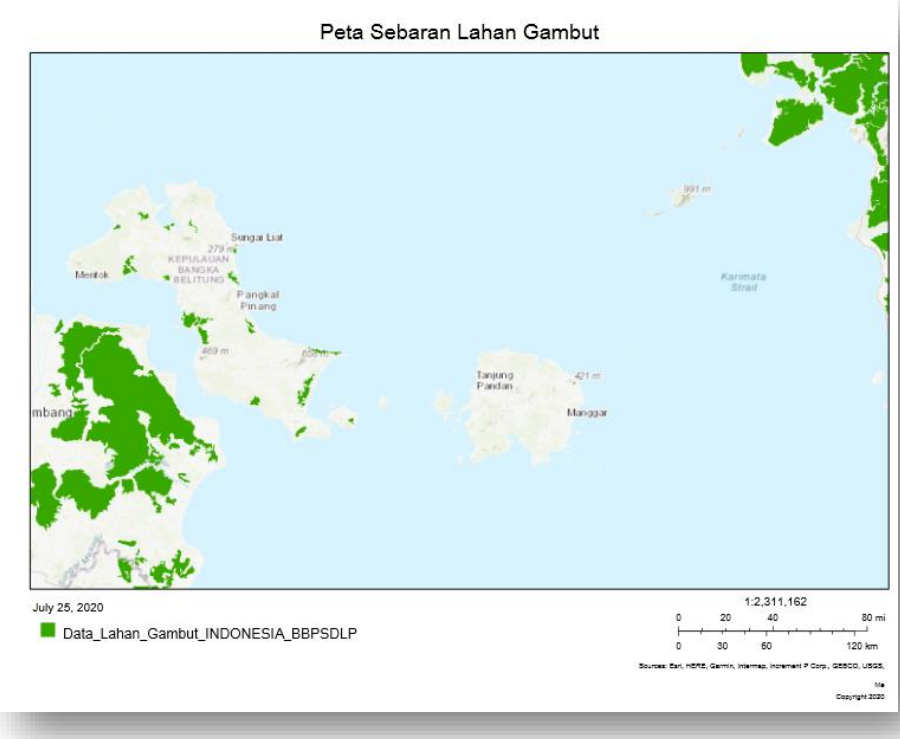

Gambar.2.22. Persebaran Lahan Gambut di Prov. Kep. Bangka Belitung

(Sumber: WebGIS PKGPPKL – MenLHK, data diolah)

Perbandingan luasan lahan gambut dapat dilihat pada Gambar……berikut ini.

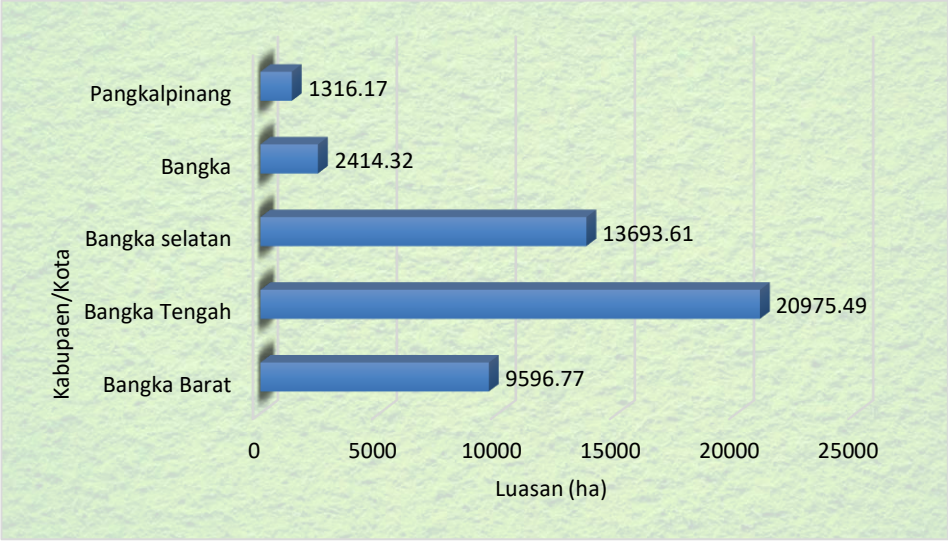

Gambar.2.23. Perbandingan Luasan Gambut di Kabupaten/ Kota

(Sumber: WebGIS PKGPPKL – MenLHK, data diolah)

Bangka Tengah merupakan kabupaten dengan luasan ekosistem gambut terbesar yaitu mencapai 20.975.49 ha atau 43,70 % dari keseluruhan ekosistem gambut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ekosistem gambut di pulau Bangka paling sedikit dengan luasan 1.316, 17 ha berada di wilayah administrasi Kota Pangkalpinang. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lahan gambut di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami stratifikasi kerusakan mulai dari level rusak ringan hingga rusak berat.

Dari hasil pengolahan data spasial tersebut, tingkat kerusakan ringan lahan gambut berkisar pada persentase diatas 90% dengan persebaran luasan di seluruh kabupaten/ kota, sementara itu tingkat kerusakan lahan gambut sedang berada pada rentang persentase luasan 0,5 % - 4,5 % dan tingkat kerusakan berat pada rentang angka hingga 3 % luasan ekosistem gambut yang telah dipetakan. Wilayah dengan luasan terbesar pada tingkat kerusakan gambut pada level berat adalah Kabupaten Bangka Barat sedangkan wilayah yang paling sedikit mengalami kerusakan berat yaitu berada di Kabupaten Bangka Selatan.

Lebih rinci persentase kerusakan lahan gambut di kabupaten/ kota ditunjukkan pada Gambar 2.24 berikut.

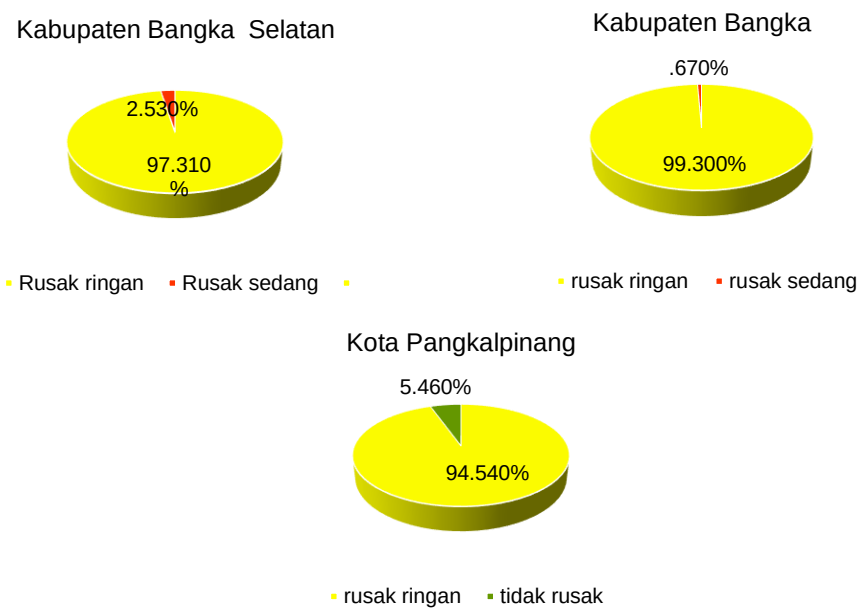

Gambar 2.24. Tingkat Kerusakan Lahan Gambut di Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Sumber: WebGIS PKGPPKL – MenLHK, data diolah)

Dari keseluruhan lahan gambut yang ada, luasan yang belum mengalami kerusakan hanya berkisar dibawah 6 % saja. Dari hasil *overlay* atau tumpang susun dengan peta penutup lahan tahun 2019 diperoleh indikasi penyebab kerusakan yaitu terkait konversi lahan gambut menjadi lahan perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering campur semak serta lahan terbangun. Diantara konversi lahan tersebut, kontributor terbesar terhadap kerusakan lahan gambut adalah terkait aktivitas perkebunan dan pertambangan.

c. Ekosistem pesisir

Sebagai wilayah kepulauan yang mengalami perkembangan cukup pesat, aktivitas pemanfaatan lahan berlangsung hingga di sepanjang wilayah pesisir. Beragam tindakan yang menghasilkan pressure terhadap lingkungan pesisir mempengaruhi kelestarian ekosistemnya yang sebetulnya penting untuk dijaga. Tiga ekosistem penting yang berada di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung yaitu ekosistem mangrove,

padang lamun dan terumbu karang saat ini mengalami ancaman degradasi terkait alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan sempadan pantai serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam khususnya mineral timah di saerah pesisir hingga ke perairan laut.

Ekosistem Mangrove

Gambar 2.25 . Habitat Mangrove Jenis *Rhizopora sp* di salah satu wilayah pesisir Pulau Bangka

(Sumber: DLH Prov. Kep. Babel, 2019)

Mangrove merupakan salah satu jenis penutup lahan bervegetasi yang hidup di daerah yang terpengaruh oleh pasang surut dan bersifat toleran terhadap kadar garam atau salinitas yang cukup tinggi (Kusmana, 2005). Ekosistem mangrove memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomi yang dapat berjalan secara bersamaan. Di kepulauan Bangka Belitung, fungsi ekologis mangrove berkenaan sebagai penahan laju sedimentasi dari daratan khususnya dari aktivitas penambangan sehingga menjaga kejernihan air sampai ke wilayah ekosistem terumbu karang,

penyerap emisi gas rumah kaca melalui mekanisme fotosintesis yang disimpan dalam bentuk biomassa (*carbon stock*) hingga berfungsi sebagai penahan abrasi pantai. Selanjutnya terkait fungsi ekonomi berkenaan sebagai tempat masyarakat mencari udang dan kepiting sebagai mata pencaharian hingga dikembangkan sebagai tempat wisata alami.

Di dalam Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove disebutkan bahwa status kondisi mangrove dapat dilihat berdasarkan kriteria kerapatan pohon dalam 1 hektar luasan penutup lahannya. Data terkait kerapatan mangrove tahun 2018 yang dihimpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kep. Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut

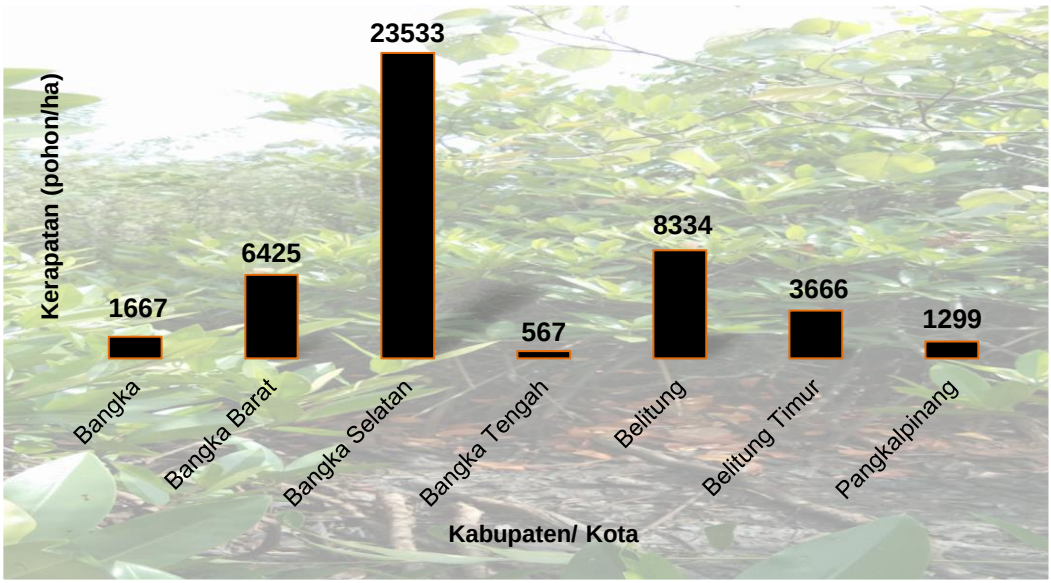

Gambar 2.26. Kerapatan Mangrove di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov Kep. Babel, 2020)

Jika mengacu pada kriteria sesuai peraturan diatas maka kawasan sampling mangrove di wilayah Kabupaten Bangka Tengah termasuk dalam kelas kerapatan jarang dengan jumlah tegakan 567 pohon/ha, sementara di wilayah Kota Pangkalpinang terkategori kerapatan sedang dengan jumlah tegakan 1299 pohon/ha atau kurang dari 1500 pohon/ha sedangkan pada 4 wilayah administratif lainnya yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat,

Bangka Selatan, Belitung serta Belitung Timur termasuk dalam kelas kerapatan sangat padat dengan jumlah tegakan diatas 1500 pohon/ ha yaitu masing-masing mencapai 1667 pohon/ha ; 6425 pohon/ha ; 23533 pohon/ha ; 8334 pohon/ha ; dan 2666 pohon/ha. Dari kriteria ini selanjutnya diindikasikan bahwa kawasan sampling hutan mangrove di Kabupaten Bangka Tengah termasuk dalam kategori rusak berat, kawasan sampling hutan mangrove di Kota Pangkalpinang terkategori rusak sedang sedangkan di kawasan sampling di 5 kabupaten/ kota lainnya masih dalam kategori baik. Walaupun kesimpulan kategori kerusakan mangrove juga bergantung pada luasan areal sampling kerapatan yang harus representatif dengan luasan wilayah namun indikasi diatas menjadi catatan terkait dampak lingkungan yang terjadi apabila tekanan terhadap tata guna lahan di wilayah pesisir terus berlangsung melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut.

Ekosistem Padang Lamun

Di kalangan masyarakat lokal Kepulauan Bangka Belitung, ekosistem lamun (*seagrass*) tidak terlalu populer jika dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya seperti mangrove ataupun terumbu karang. Namun demikian sejumlah riset telah membuktikan bahwa keberadaan ekosistem lamun ini sama pentingnya dengan kedua ekosistem yang telah disebutkan sebelumnya dalam bersinergi menjaga keseimbangan lingkungan hidup di wilayah pesisir. Lamun bersama halnya dengan mangrove berperan utama dalam memperangkap sedimen yang mempengaruhi kejernihan air laut serta penyimpan karbon yang sangat potensial.

Tabel II.12 dibawah ini menyajikan data lokal terkini yang terkait dengan kerusakan padang lamun di sejumlah titik sampling yang menjadi habitat ekosistemnya di Provinsi Kep Bangka Belitung yaitu di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung serta Belitung Timur.

Tabel II.11. Kerusakan Padang Lamun Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten	Lokasi Pengamatan	Persentase Area Kerusakan (%)
			-
1.	**Bangka Tengah**	Pulau Ketawai	59%
		Pulau Semujur	26%
2.	**Bangka Selatan**	Pulau Kelapan	4%
		Pulau Seniur	1%
		Pulau Seniur	3%
		Pulau Ibul	3%
		Pulau Lepar	55%
		Desa Tukak	5%
		Desa Tukak	27%
3.	**Belitung**	Pantai Bukit Berahu	48%
		Pantai Bukit Berahu	2%
		Pantai Tanjung Binga (Pelabuhan)	18%
		Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	18%
		Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	16%
		Pantai Tanjung Kelayang	28%
		Pantai Tanjung Kelayang	8%
		Pulau Seliu, Membalong	42%
		Pulau Seliu, Membalong	18%
		Pulau Buloh	6%
		Selat Nasik	38%
		Selat Nasik	30%
		Selat Nasik	37%
		Selat Nasik	38%
4.	**Belitung Timur**	Pantai Aik Lanun	5%
		Pantai Aik Lanun	15%
		Pantai Aik Lanun	15%
		Pantai Aik Lanun	36%
		Pantai Aik Lanun	27%
		Pantai Aik Lanun	17%
		Pantai Aik Lanun	23%
		Pantai Aik Lanun	10%
		Pantai Aik Lanun	10%
		Pantai Aik Lanun	4%
		Pantai Aik Lanun	8%

No	Kabupaten	Lokasi Pengamatan	Persentase Area Kerusakan (%)
		Pantai Aik Lanun	4%
		Pantai Aik Lanun	5%
		Pantai Aik Lanun	5%
		Pantai Aik Lanun	3%
		Pantai Aik Lanun	12%
		Pantai Aik Lanun	4%
		Pantai Aik Lanun	17%
		Pantai Aik Lanun	16%
		Pantai Setinggi	12%
		Pulau Melidang, Gantong	4%
		Pulau Melidang, Gantong	5%
		Pulau Melidang, Gantong	1%
		Pulau Melidang, Gantong	15%

Dari 47 lokasi diatas dapat diketahui bahwa tingkat kerusakan ekosistem lamun yang telah melebihi 50 % yaitu pada lokasi sampling Pulau Ketawai di Kabupaten Bangka Tengah dengan persentase kerusakan 59 % kemudian disusul dengan tingkat kerusakan 55 % di lokasi sampling Pulau Lepar di Kabupaten Bangka Selatan. Walaupun lamun termasuk jenis vegetasi perairan yang mudah untuk tumbuh dan berkembangbiak namun di sisi lain lamun sangat sensitif terhadap gangguan aktivitas manusia. Data luasan areal kerusakan lamun diatas menjadi bukti kondisi *realtime* di masa sekarang terkait aktivitas yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kadar sedimen tersuspensi di lingkup perairan diantaranya aktivitas penambangan mineral timah di sepanjang pesisir hingga perairan dangkal, aktivitas pembangunan pelabuhan atau dermaga serta aktivitas kapal nelayan dalam jumlah signifikan.

Ekosistem Terumbu Karang

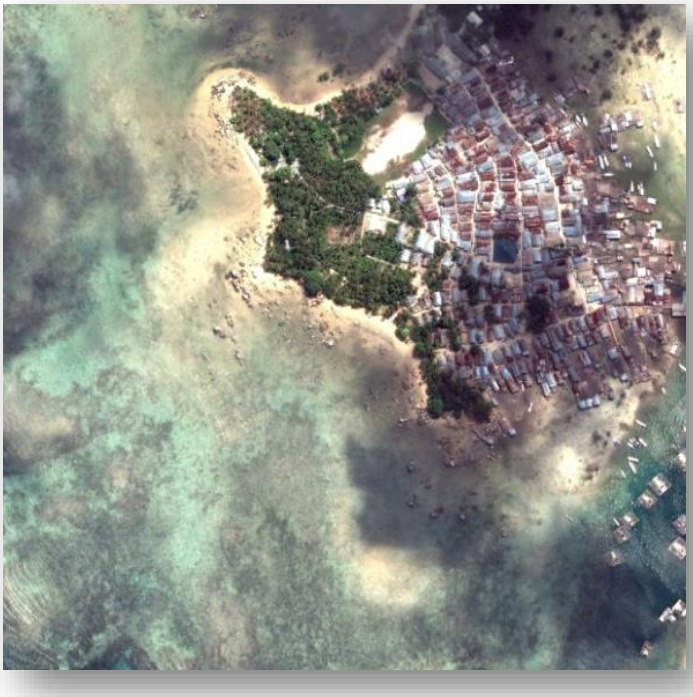

Gambar 2.27. Spot terumbu karang di Pulau Celagen, Kab.Bangka Selatan
(Sumber: Google Earth - CSRT perekaman tahun 2012)

Terumbu karang merupakan salah satu potensi sumber daya alam di wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang penting untuk dijaga kelestariannya. Organisme ini berperan besar sebagai benteng alami dalam menahan abrasi pantai seperti halnya kawasan hutan mangrove. Selain itu kondisi terumbu karang dapat mengindikasikan kualitas lingkungan perairan dimana organisme ini berada. Gambar 2.28 berikut menampilkan data yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait persentase jumlah lokasi pengamatan ekosistem terumbu karang di sejumlah kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus kondisi ekosistemnya yang dinyatakan dalam status sangat baik, baik, sedang serta buruk.

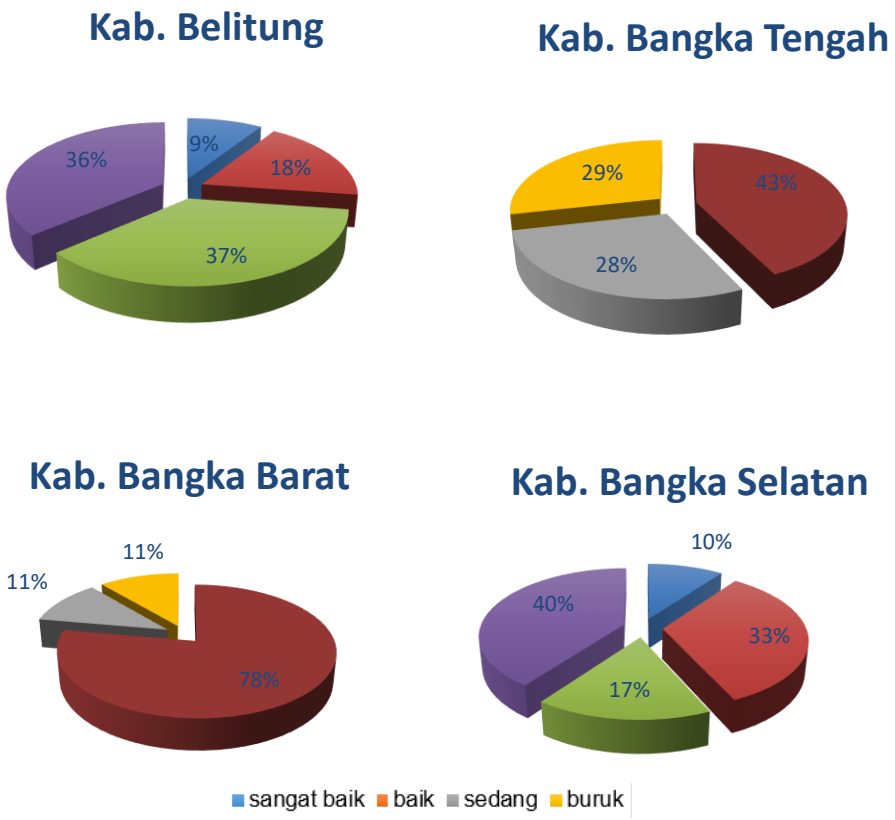

Gambar 2.28. Persentase jumlah lokasi sampling terumbu karang beserta kondisinya

(Sumber: DKP Prov Kep Bangka Belitung, 2020)

Dari pengamatan terhadap ekosistem terumbu karang di 4 kabupaten di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlihat bahwa sebanyak 10 % lokasi di perairan Bangka Selatan dengan status terumbu karang sangat baik. Selanjutnya 78 % lokasi pengamatan dengan status terumbu karang baik yaitu di perairan Bangka Barat. Untuk terumbu karang dengan status sedang dijumpai pada 37% lokasi pengamatan di perairan Belitung sedangkan status terumbu karang buruk berada pada 40% lokasi pengamatan di wilayah Bangka Selatan.

Banyaknya lokasi di Kabupaten Bangka Selatan dengan status terumbu karang buruk merupakan potret nyata tekanan terhadap lingkungan pesisir yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas pembangunan dermaga di wilayah ini serta penambangan timah di pesisir dan laut

membuat laju sedimentasi meningkat dan hal ini berbahaya karena butiran sediment dapat menutupi polip karang hingga menimbulkan kerusakan hingga kematian karang di wilayah tersebut. Kondisi terumbu karang dalam status buruk yang juga dijumpai di sekitar 36% lokasi pengamatan di Kabupaten Belitung juga tidak terlepas dari adanya aktivitas antropogenik yaitu kandasnya kapal besar berbendera asing di perairan Belitung sehingga menghancurkan ekosistem karang di wilayah itu padahal untuk memulihkan kembali ekosistem terumbu karang dibutuhkan waktu hingga berpuluh-puluh tahun. Rusaknya ekosistem terumbu karang pada akhirnya akan berdampak negatif bagi lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

2.1.3.4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan

IKTL atau Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan salah satu cerminan kondisi tata guna lahan di masa sekarang sekaligus sebagai bahan proyeksi terhadap kualitas lahan di masa yang akan datang. Gambar 2.27 berikut menyajikan profil IKTL Prov. Kep Bangka Belitung sejak tahun 2015 – 2019.

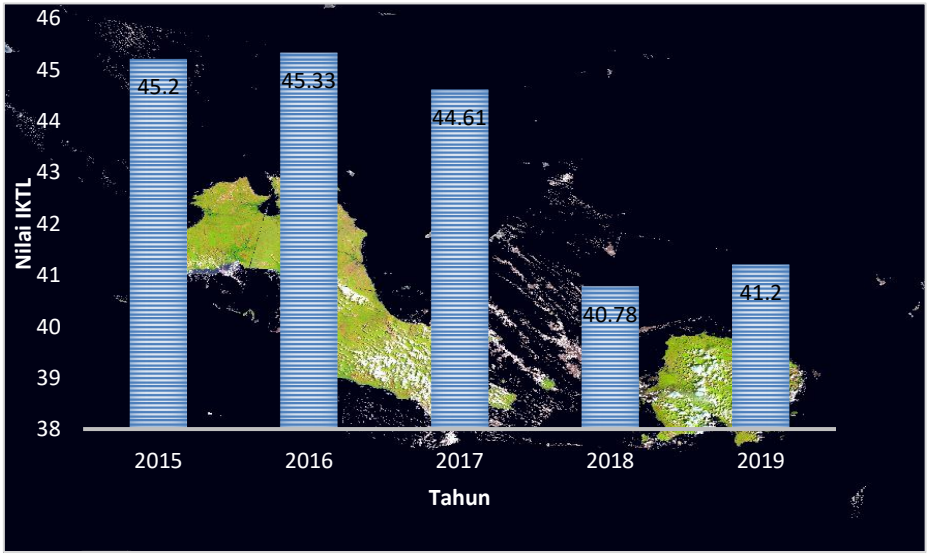

Gambar. 2.29. Nilai IKTL Sepanjang Tahun 2015 – 2019

(Sumber: DLH Prov Kep Bangka Belitung,2020)

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2019 adalah 41,2. Angka ini merupakan kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 40,78. Dalam

rentang waktu antara tahun 2017 hingga 2018 terjadi penurunan nilai IKTL secara signifikan yaitu 3,83 sementara antara tahun 2018 hingga akhir 2019 yang justru terjadi kenaikan IKTL sebesar 0,42. Walaupun demikian angka ini masih menempatkan Bangka Belitung dalam kondisi sangat kurang baik. Faktor adanya penambahan parameter tutupan lahan vegetasi diluar kawasan hutan yang dimasukkan ke dalam formula terbaru dalam perhitungan IKTL turut berpengaruh mempengaruhi kenaikan nilai IKTL Bangka Belitung. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya intervensi dalam artian yang positif terhadap penataan dan pemanfaatan lahan maka dapat dipastikan nilai IKTL akan terus menurun.

II.1.4 Impact

II.1.4.1 Dampak Ekologis

a. Penurunan kesuburan tanah

Konsep mendasar dari daya dukung lahan adalah perbandingan antara ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) dari lahan itu sendiri. Hal penting yang harus dipahami bahwa *supply* lahan bersifat terbatas sementara *demand*nya cenderung terus mengalami peningkatan. Banyaknya eksploitasi lahan secara berlebihan maupun alih fungsi lahan yang marak terjadi terkait aktivitas perkebunan maupun penambangan dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung dan daya tampung terhadap lahan. Hal ini berbanding lurus terhadap dampak yang dihasilkan yaitu turunnya kesuburan tanah di sejumlah wilayah. Secara umum tingkat kesuburan tanah hasil proses penambangan (*tailing*) di Pulau Bangka tergolong rendah yang ditandai oleh tingginya fraksi pasir dengan karakteristik sifat kimia pH rendah serta kandungan unsur-unsur seperti karbon, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, kalium serta natrium yang sangat rendah (Asmarhansyah, 2015). Hal ini menyebabkan lahan bekas penambangan timah bukan merupakan media tanam yang ideal sehingga

harus dilakukan upaya *treatment* atau pemulihan untuk meningkatkan kualitas lahannya.

b. Turunnya Produktivitas Lada

Gambar 2.30. Kebun Lada di Kabupaten Bangka

(Sumber: DLH Prov Kep. Babel, 2019)

Tekanan yang terus menerus diberikan kepada lingkungan terkait aktivitas penambangan maupun perkebunan kelapa sawit skala besar turut berimbas kepada penurunan produktivitas lada putih sebagai salah satu komoditas unggulan dari Bangka Belitung terutama dari sisi berkurangnya lahan untuk berkebun serta kondisi lahan yang ada tapi sudah terbilang kritis.

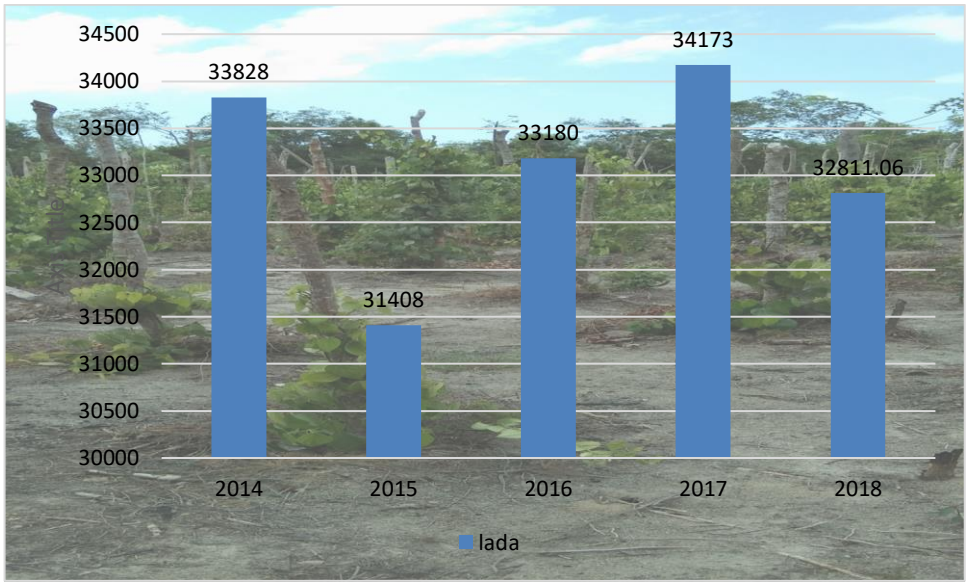

Gambar 2.31. Produktivitas Lada Sepanjang Tahun 2014 – 2018

(Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019)

Dari visualisasi diatas terlihat bahwa hasil produksi lada cenderung mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 hingga 2015 mengalami penurunan produksi sebesar 2.420 ton atau sebesar 7,15 % sedangkan pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan sebesar 1.772 ton atau setara 5,34 % dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai produksi sebesar 34.173 ton lada di tahun 2017. Selanjutnya penurunan kembali terjadi di tahun 2018 sebesar 1.361,94 ton.

c. Penurunan fungsi ekologis ekosistem pesisir

Kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun serta terumbu karang berdampak pada terganggunya fungsi ekologis di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu bukti yaitu terjadinya abrasi di pantai Pesaren Belinyu yang kondisinya semakin memprihatinkan. Disamping itu kerusakan ekosistem ini turut berpengaruh pada aktivitas nelayan di sepanjang pesisir.

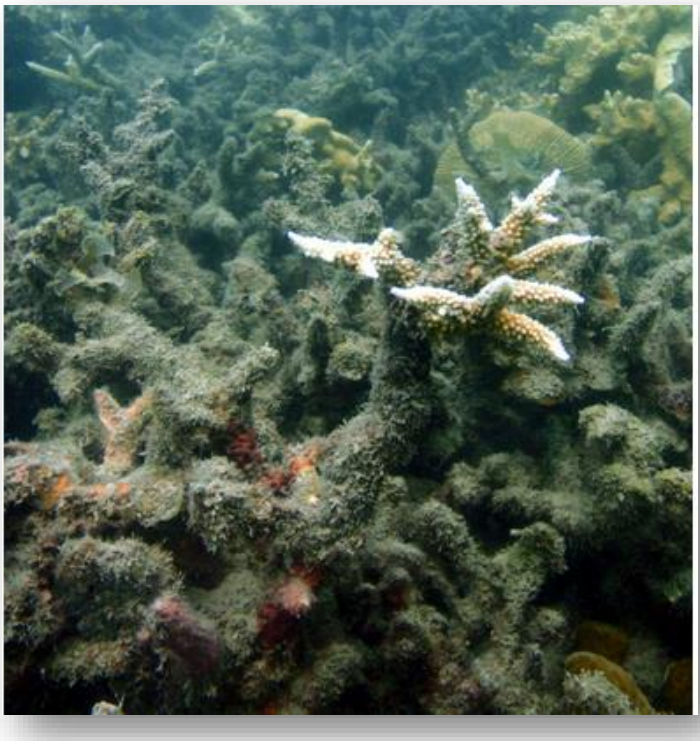

Gambar 2.32. Terumbu Karang Tertutup Sedimen Penambangan Laut di Pulau Pemuja – Kabupaten Bangka Barat

(Sumber: Indra Ambalika Syari/ Yayasan Sayang Babel Kite)

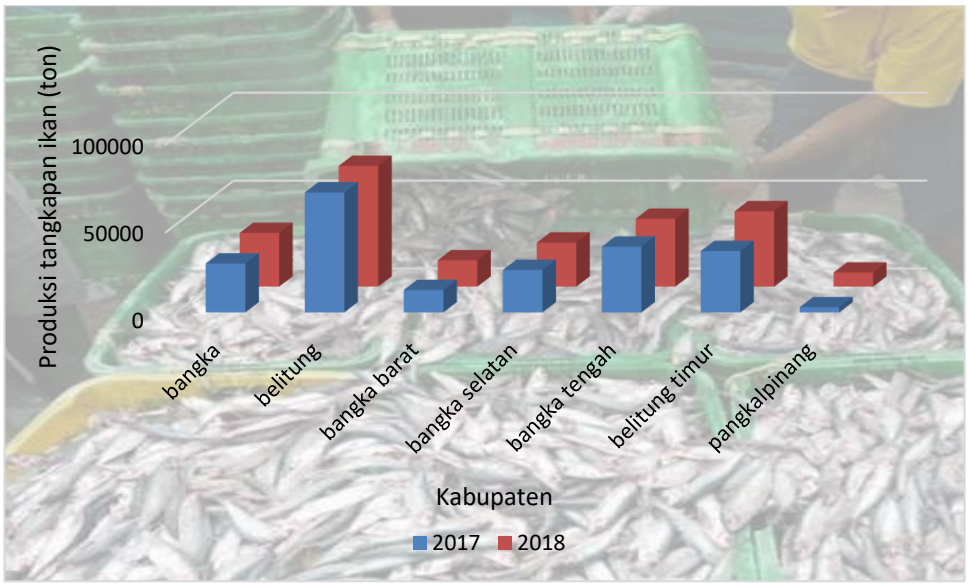

Gambar 2.33. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2018

(Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019)

Hasil keseluruhan produksi tangkapan ikan menunjukkan terjadinya trend kenaikan dari sebelumnya pada tahun 2017 sebesar 208.019,7 ton

menjadi 228.524,7 ton hasil produksi perikanan tangkap (Gambar 2.33). Angka ini diikuti pula oleh kenaikan nilai tangkapan ikan sebesar Rp. 1,631,645,821.70. Sekilas angka ini cukup wajar namun jika dibandingkan dengan data rumah tangga perikanan tangkap dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan jumlah rumah tangga perikanan tangkap yang menggunakan perahu motor sementara sebaliknya jumlah rumah tangga nelayan tradisional yang tidak menggunakan perahu menurun drastis (Gambar 2.34). Hal ini mengindikasikan bahwa kerusakan ekosistem mangrove serta terumbu karang di pesisir membuat jumlah tangkapan ikan di wilayah tersebut berkurang sehingga memaksa nelayan untuk mencari ikan di perairan laut yang lebih dalam. Hasil tangkapan ikan menggunakan perahu motor secara kuantitas lebih banyak namun biaya produksi yang dikeluarkan juga lebih besar sehingga secara nilai yang dihasilkan tidak mampu secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir

Gambar 2.34 Jumlah RT Perikanan Tangkap Tahun 2014 – 2018

(Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2019)

II.1.4.2 Dampak kesehatan

Aktivitas manusia yang menimbulkan tekanan dalam tata guna lahan turut membawa dampak kesehatan baik yang sifatnya temporer maupun akumulatif. Pemanfaatan lahan untuk aktivitas penambangan meninggalkan jejak fisik pada bentang alam berupa cekungan-cekungan buatan hasil penggalian mineral yang biasanya terisi air atau yang dikenal dengan istilah lokal "kolong". Jumlah kolong ini mencapai ratusan yang terdistribusi secara spasial hampir di semua wilayah administrasi kabupaten/kota. Di musim penghujan keberadaan kolong-kolong ini menjadi habitat bagi nyamuk vektor penyakit demam berdarah maupun malaria. Sementara itu di musim kemarau jumlah penderita diare mengalami peningkatan salah satunya diakibatkan oleh pemakaian sumber air baku domestik yang berasal dari kolong hasil penambangan timah yang diindikasikan telah tercemar. Di sisi lain, potensi radiasi yang bersumber dari mineral ikutan sebagai produk samping penambangan timah menimbulkan ancaman di bidang kesehatan terkait sifat karsinogeniknya.

Buku profil Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dan 2018 telah merilis data jumlah penderita TB paru dengan gejala mirip dengan kanker paru-paru dimana jumlah penderitanya mengalami peningkatan secara signifikan dari 2.777 penderita pada tahun 2017 dan melonjak hingga 6.452 penderita pada tahun 2018. Jumlah penyakit menular utama yang banyak diderita oleh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada Tabel. berikut

Tabel II.12. Jenis Penyakit Utama Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita pada Tahun	
		2017	2018
1.	Diare	23.223	38.988
2.	TB Paru	2.777	6.452
3.	Demam Berdarah Dengue	339	764
4.	Malaria	94	221
5.	HIV	270	205
6.	Campak	296	51

Sumber : Dinas Kesehatan Prov Kep. Bangka Belitung, 2019

II.1.4.3 Dampak Bencana

Sepanjang tahun 2019 telah terjadi beberapa bencana di provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor serta puting beliung .

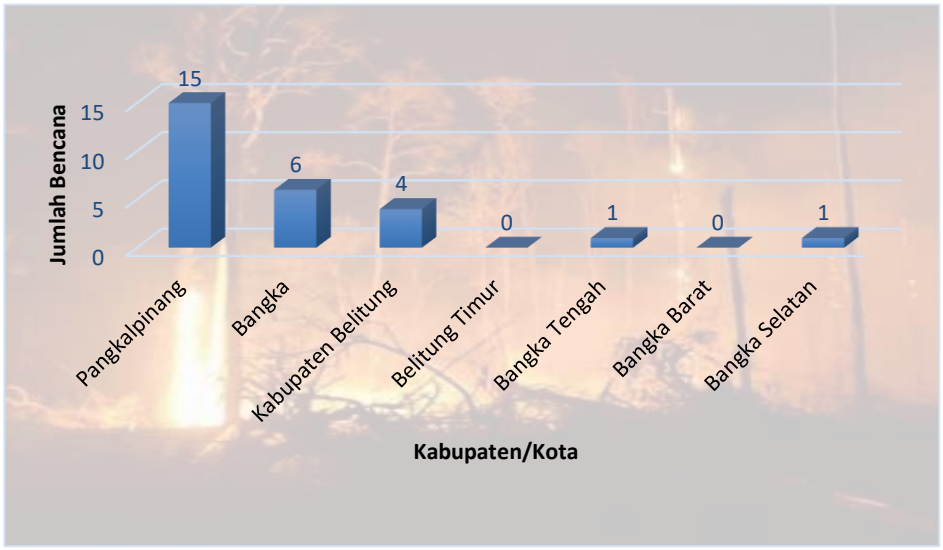

Gambar 2.35. Kejadian Bencana di Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 (Sumber: BPBD Prov Kep. Bangka Belitung, 2019)

Pada Tahun 2019, bencana banjir paling banyak terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang sebanyak 15 lokasi disusul oleh Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung sebanyak masing-masing 6 dan 4 lokasi. Ditinjau dari segi topografi, wilayah kota Pangkalpinang relatif datar namun bagian pusat kota cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah sekelilingnya. Hal ini menyebabkan banjir menjadi ancaman utama wilayah ini. Sebagai ibukota provinsi tingkat perkembangan lahan terbangun di Pangkalpinang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Hal ini pula yang menambah kerawanan terhadap bencana banjir karena imbas dari banyaknya lahan terbangun dapat mengurangi jumlah infiltrasi air kedalam tanah ketika hujan sehingga meningkatkan *surface run off.* Kondisi ini diperparah pula oleh laju sedimentasi sungai yang tinggi akibat penambangan timah khususnya yang bersifat illegal. Bercermin dari hal ini penting sekali kajian penataan ruang yang berbasis mitigasi terhadap bencana.

Gambar 2.36. Kejadian Banjir Pada Tanggal 27 Februari di Parittiga – Kabupaten Bangka Barat

(Sumber: BPBD Prov Kep. Bangka Belitung,2019)

Selain banjir, bencana yang juga marak terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan.

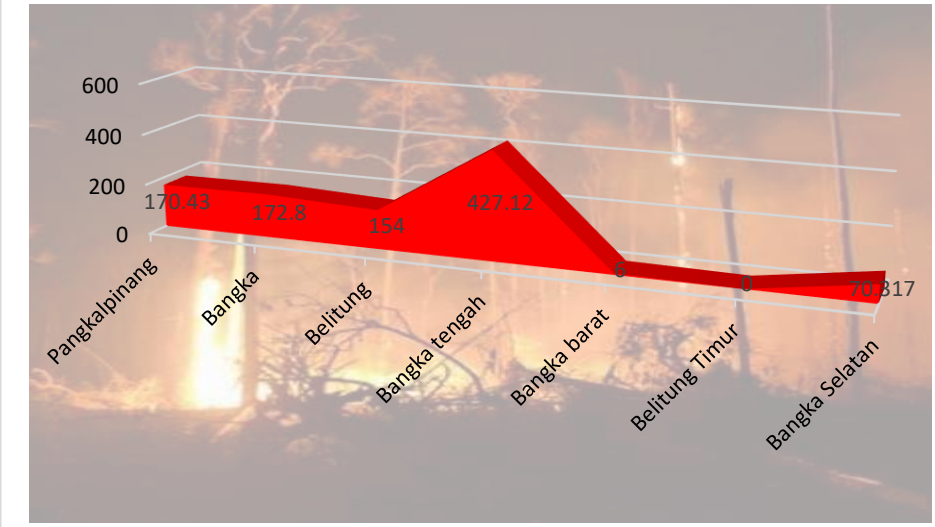

Gambar. 2.37. Luasan Areal Terdampak Kebakaran Hutan Tahun 2019

(Sumber: BPBD Prov Kep. Bangka Belitung, 2019)

Pada tahun 2019 hampir semua wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kecuali Kabupaten Belitung Timur melaporkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dimana bencana terparah terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dengan luasan areal terdampak mencapai 427,12 ha.

Terkait dengan masalah dalam tata guna lahan, data dari BPBD Kabupaten Bangka Tengah menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana ini yaitu adanya pembukaan lahan perkebunan. Teknik seperti ini memang lazim digunakan di beberapa wilayah namun kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali akan menimbulkan dampak lanjutan yang tidak kalah negatifnya.

Gambar 2.38. Kebakaran Lahan Gambut di Lintas Timur Kabupaten Bangka, 11 September 2019

(Sumber: Babel AntaraNews)

II.1.4.4 Dampak sosial ekonomi

Konflik sosial merupakan salah satu dampak yang banyak terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai akibat dari alih fungsi maupun eksploitasi lahan secara berlebihan. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain et al (2018) mengemukakan bahwa terdapat dua jenis konflik terkait permasalahan tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pertama, konflik dalam hal perebutan kesempatan untuk menguasai sumber daya alam dalam hal ini mineral timah baik di daratan maupun di lautan termasuk didalamnya konflik nelayan di pesisir yang terancam mata pencahariannya akibat aktivitas penambangan timah di wilayah pesisir ; kedua, konflik terkait sengketa pertanahan utamanya didominasi terkait pembukaan lahan perkebunan sawit. Untuk kasus yang pertama banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, dan Kota Pangkalpinang sedangkan konflik kedua sebagian besar banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bangka.

Konflik sosial ini berpotensi untuk tetap terjadi sehingga penting

dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya konflik tersebut di masa yang akan datang.

II.1.5 Respon

II.1.5.1. Respon terhadap dampak ekologis

a. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas serta peranan hutan dan lahan dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Selain itu kegiatan ini merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap ancaman bencana alam khususnya banjir, erosi dan tanah longsor. Gambar 2.39 berikut menampilkan sejumlah kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di sejumlah wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019

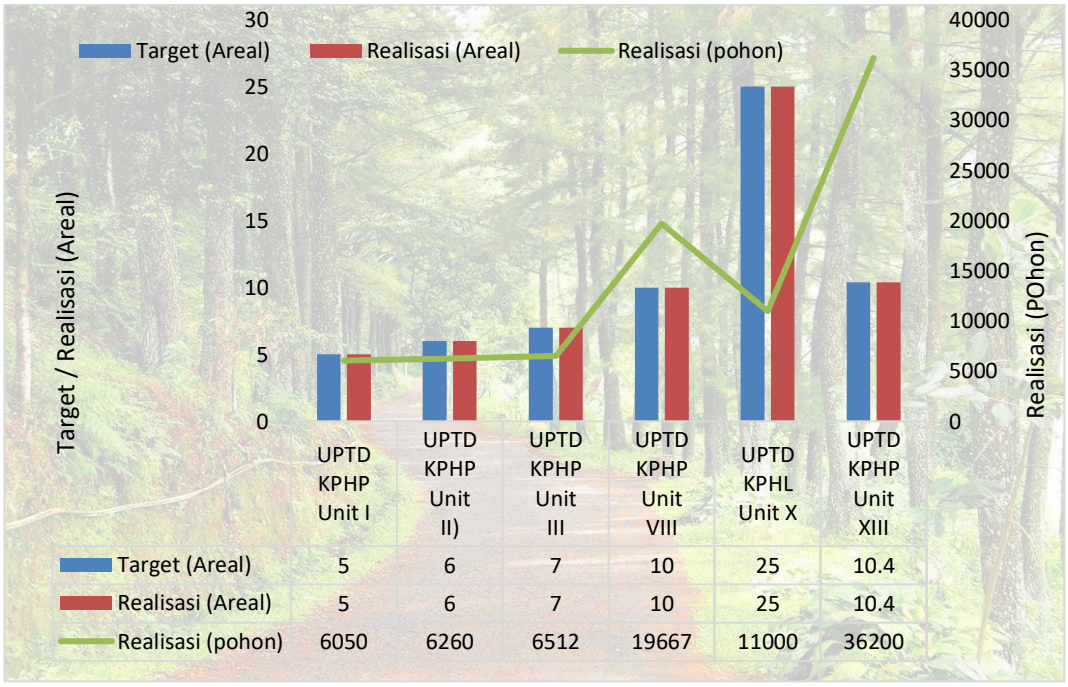

	UPTD KPHP Unit I	UPTD KPHP Unit II)	UPTD KPHP Unit III	UPTD KPHP Unit VIII	UPTD KPHL Unit X	UPTD KPHP Unit XIII
Target (Areal)	5	6	7	10	25	10.4
Realisasi (Areal)	5	6	7	10	25	10.4
Realisasi (pohon)	6050	6260	6512	19667	11000	36200

Gambar 2.39. Target dan Realisasi Kegiatan RHL Tahun 2019

(Sumber : Dinas Kehutanan Prov Kep Babel, 2020)

Luasan areal hutan yang berhasil dilakukan reboisasi yaitu sesuai dengan target sebesar 84,4 ha dengan jumlah tegakan yang ditanam sebanyak 102.789 pohon. Selain itu sejumlah kegiatan fisik instansi lainnya dalam upaya reboisasi lahan dan hutan diperlihatkan pada Tabel II. 14 berikut ini.

Tabel II.13. Kegiatan Fisik Instansi Lainnya Di bidang Reboisasi/Penghijauan

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
1.	Pembibitan tanaman asam	Kab. Belitung Timur; Kab. Bangka dan Kota Pangkalpinang	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung kerjasama dengan perusahaan dan sekolah
2.	Penyerahan bibit Gerakan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pantai Takari Kab. Bangka	Dinas Kehutanan Prov. Kep Bangka Belitung
3.	Penanaman bibit mangrove	Pantai Terentang Kab. Bangka Tengah	Pemprov. Kep Bangka Belitung kerjasama dengan Pemkab Bangka Tengah
4.	Penanaman bibit pohon endemik	Bukit Mangkol	BPBD Prov. Kepulauan Bangka Belitung
5.	Penyerahan sekaligus penanaman bibit kayu putih di lahan kritis	Desa Batu Penyu Kab. Belitung Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kep Bangka Belitung

Sumber: DLH Prov. Kep. Babel dan website babelprov.go.id, 2020

Gambar 2.40. Kegiatan Penanaman Pohon Produktif yang dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pantai Takari, Bangka 30 Nov 2019

(Sumber: Diskominfo Prov Kep. Babel, 2020)

b. Reklamasi Lahan Bekas Penambangan Timah

Gambar 2.41. Salah satu Lahan Reklamasi PT Timah, Tbk

(Sumber: DLH Prov. Kep. Babel, 2020)

Sebagai salah satu bentuk upaya pengoptimalan kegiatan rehabilitasi lahan kritis terutama pasca penambangan sekaligus bentuk pengawasan terhadap reklamasi yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan, pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas ESDM melaksanakan kegiatan inventarisasi reklamasi lahan bekas penambangan timah. Hal ini juga bersinergi dengan program reklamasi oleh PT Timah Tbk seperti yang diperlihatkan pada Tabel II.15 Hingga Tabel. II.16 dibawah ini.

Tabel II.14. Reklamasi Bekas Eksplorasi Tambang

Wilayah IUP	Luas Rencana Reklamasi Tahun 2015-2019 (Ha)	Realisasi Reklamasi Tahun 2015 – 2019 (Ha)
Bangka	289,50	292,82
Bangka Barat	192,44	207,90
Bangka Tengah	157,10	158,72
Belitung	122	126,80
Belitung Timur	314,25	321,81
Lintas Kabupaten	401,0	405,20
Jumlah	**1.596,89**	**1.635,65**

Tabel II.15. Realisasi Reklamasi Laut Pada tahun 2016 - 2019

Wilayah IUP	Luas Rencana Reklamasi Laut Tahun 2015-2019 (Ha)	Realisasi Reklamasi Tahun 2015 – 2019 (Ha)
Bangka - Fish shelter (unit) - Transplantasi karang	 770 485	 710 465
Bangka Barat - Fish shelter (unit) - Transplantasi karang	 680 240	 600 240
Bangka Tengah - Fish shelter (unit) - Transplantasi karang	 60 40	 0 0

(lanjutan tabel)		
Bangka Selatan - Fish shelter (unit)	285	285
Lintas Kabupaten - Fish shelter (unit) - Transplantasi karang	790 560	790 560
Kundur dan Karimun - Penahan abrasi - Penanaman Mangrove (ha) - Pemantauan Kualitas Air Laut	1.360 5 180	1.360 5 180
Jumlah	**1.596,89**	**1.635,65**

Sumber: Laporan Tahunan PT. Timah Tbk, 2019

c. Penangkaran Satwa

Dengan semakin berkurangnya tutupan hutan akibat eksploitasi perkebunan dan pertambangan membuat keberadaan satwanya terancam kelestariannya. Kegiatan penangkaran satwa yang telah berjalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dlihat pada Tabel II.17 dibawah ini.

Tabel II.16. Penangkaran Satwa

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
1	*2*	*3*	*4*
1	Wijaya, SH	SK.22/IV-K.8/2015 tanggal 14 Januari 2015	Kijang *(Muntiacus muntjak)*, rusa totol *(Axis axis)*
2	Danny Widjaya	SK.44/IV-K.8/2015 tanggal 25 Februari 2015	Kijang *(Muntiacus muntjak)*, rusa totol *(Axis axis)*
3	PD. Budiman	SK.106/IV-SET/2015 tanggal 9 April 2015	Buaya muara *(Crocodylus porosus)*, Buaya senyulong *(Tomistoma schlegelii)*
4	PT. Timah (Persero), Tbk	SK.76/IV-K.8/2015 tanggal 15 April 2015	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*
5	Hero Tio	SK.103/IV-K.8/2015 tanggal 11 Juni 2015	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, rusa timor *(Rusa timorensis)*, kijang *(Muntiacus muntjak)*, rusa totol *(Axis axis)*
6	Benny Setiawan	SK.129/IV-K.8/2015 tanggal 28 Juli 2015	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*
7	Reva Vergano	SK.146/IV-K.7/2015 tanggal 2 Oktober 2015	Kijang *(Muntiacus muntjak*), rusa totol *(Axis axis*)

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
8	M. Hasbi JR	SK.25/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 7 Maret 2017	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Rusa Totol *(Axis axis)*
9	Agita Sulistiana Permadi	SK.29/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 8 Maret 2017	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*
10	Andy Evans Gunady	SK.85/K.12/TU/KSA/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
11	Yanti Lioe	SK.33/K.12/TU/KSA/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Rusa Totol *(Axis axis)*
12	Gun An	SK.71/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
13	Zunaria	SK.72/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018	Rusa Sambar (Rusa unicolor), Kijang (Muntiacus muntjak), Rusa Totol (Axiz axis)
14	Muhamad Adystia Sunggara	SK.188/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 13 Juli 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
15	Indra Setiawan	SK.193/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 18 Juli 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
16	Dawin	SK.208/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 30 Juli 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
17	Budiman	SK.344/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
18	Hendry	SK.347/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor),* Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
19	Replianto	SK.20/K.12/TU/KSA/1/2019 tanggal 10 Januari 2019	Rusa Timor *(Rusa timorensis)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*

Sumber : BKSDA Resort Konservasi Wilayah Bangka Belitung, 2020

d. Penundaan Ijin baru

Salah satu langkah pemerintah pusat dalam menurunkan deforestasi hutan sekaligus mitigasi terhadap perubahan iklim yaitu melalui Inpres nomor 5 tahun 2019 tentang kebijakan penghentian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut yang kemudian diterjemahkan dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.

7099/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2019. Kebijakan pusat ini turut berlaku di wilayah Bangka Belitung dimana sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih kegiatan perkebunan sawit di dalam lahan gambut.

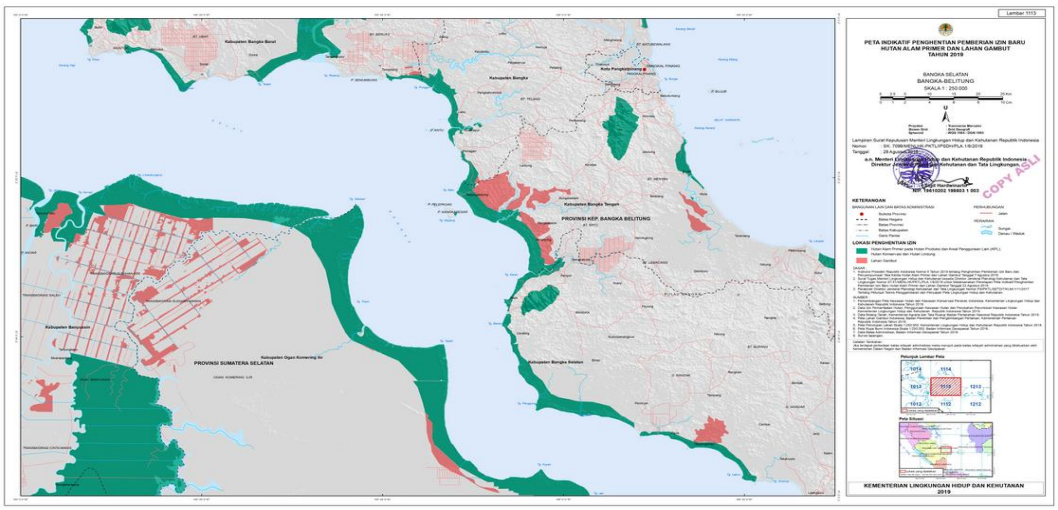

Gambar 2.42. Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Bangka Selatan

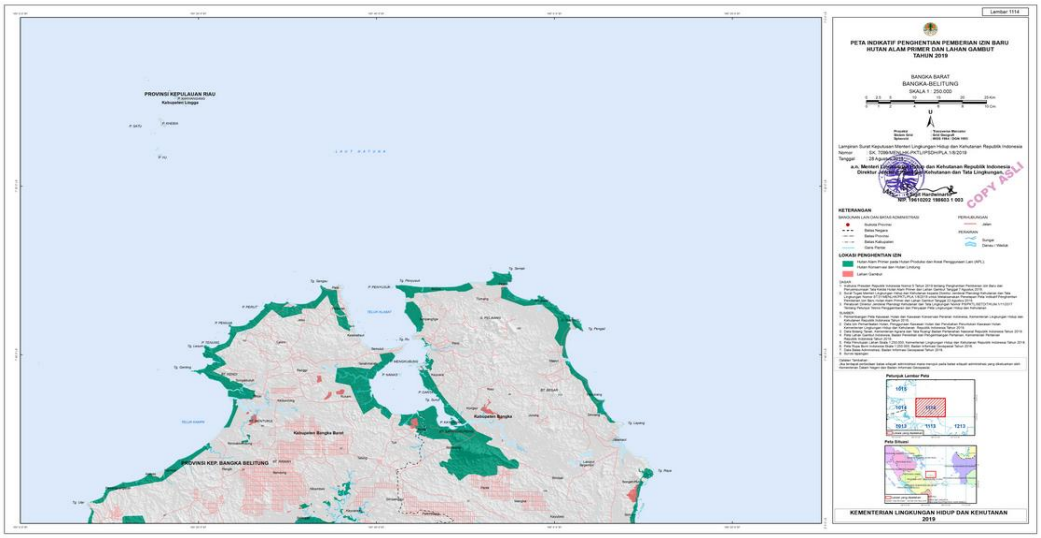

Gambar 2.43. Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Bangka Barat

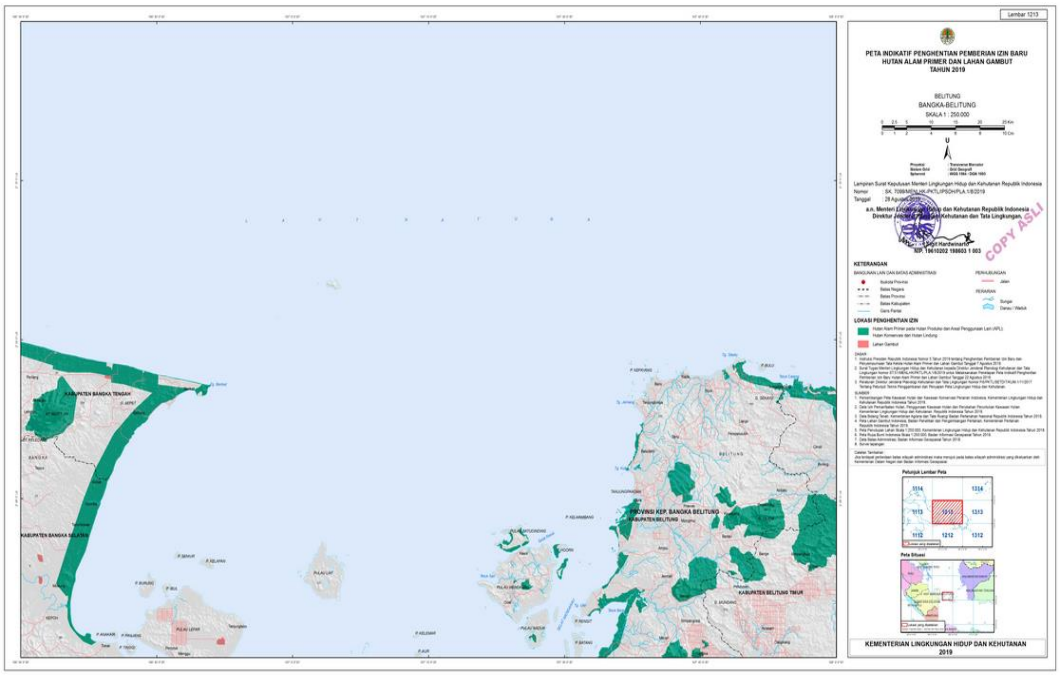

Gambar 2.44. Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Belitung

Gambar 2.45. Peta indikatif penghentian pemberian ijin baru hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2019 di Belitung Timur (Sumber: WebGIS.Dephut.go.id)

e. Pengendalian Penataan Ruang

- TKPRD atau Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah dibentuk oleh Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk pengendalian terhadap kebijakan tata ruang agar implementasinya di lapangan selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2019 Tim ini telah membahas 13 usulan pengajuan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan provinsi yang melibatkan kabupaten/kota.
- Terhadap pelanggaran tata ruang, sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 -2034 akan dikenakan sanksi administratif secara berjenjang yang lebih rinci disebutkan pada ayat 4 yaitu berupa peringatan tertulis ; penghentian sementara kegiatan ; penghentian sementara pelayanan umum ; penutupan lokasi ; pencabutan izin ; pembatalan izin ; pembongkaran bangunan ; pemulihan fungsi ruang; dan denda administratif.
- Terkait maraknya alih fungsi lahan yang terjadi terutama akibat penambangan timah illegal yang merambah hingga ke wilayah hutan lindung, di sepanjang tahun 2019 telah banyak dilakukan razia gabungan dari pihak kepolisian daerah , pemerintah provinsi serta TNI. Tindakan represif ini merupakan bentuk penertiban tegas terhadap aksi penambangan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dimana terdapat sanksi pidana didalamnya (Gambar 2.46).

Gambar 2.46. Penertiban Timah Inkonvensional – Geopark Belitung 3 November 2019

(Sumber: Babel Antara News)

f. Penyusunan RPPLH

Pembangunan yang berwawasan lingkungan bersumber dari perencanaan berbasis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, tahapan perencanaan ini memerlukan suatu instrumen yang disebut Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPLH memiliki fungsi penting dalam menyelaraskan kebijakan lingkungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang tugas pokok dan fungsinya bersinggungan dengan persoalan lingkungan hidup. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan serta tidak saling melempar tanggung jawab jika terjadi masalah terkait lingkungan hidup.

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun dokumen RPPLH dan dalam perkembangan terakhirnya dokumen ini telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS) pada tanggal 17 Desember 2019 di Jakarta. Terkait dengan hal tersebut

telah disampaikan pula sejumlah masukan tertulis untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen ini.

g. Pelaksanaan KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, Rencana dan/atau Program. Dengan kata lain KLHS disusun agar setiap rencana pemanfaatan ruang tetap berpedoman pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa KLHS wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional dan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan daerah serta Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup.

Di sepanjang tahun 2019 ada dua KLHS yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung yaitu KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perubahan Tahun 2017 – 2022 serta KLHS Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular.

h. Percepatan Penentuan Ambang Batas Kritis Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup (DDDT LH) merupakan salah satu mandat penting yang dibawa oleh Undang-Undang Nmor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Dalam pasal 12 disebutkan bahwa apabila RPPLH belum tersusun maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung

dan daya tampung lingkungan hidup. Terkait aspek tata guna lahan, di dalam pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwasanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah ataupun rencana rincinya melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan hal ini maka jelas bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini mempunyai pengaruh yang besar dalam penataan ruang suatu wilayah. DDDT LH dapat menjadi referensi penataan ruang sekaligus bertindak sebagai instrumen pengendali.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup saat ini telah diterapkan dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penentuan *critical threshold* atau ambang kritis DDDT LH selanjutnya menjadi salah satu tugas besar yang harus segera diselesaikan. Secara teoritis ketika suatu nilai dari unit analisis telah melewati ambang tersebut maka DDDT LH nya dinyatakan sudah terlampaui sehingga untuk menentukan ambang batas ini harus melalui kajian yang cukup komprehensif dan panjang. Berkenaan dengan hal tersebut sat ini Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep Bangka Belitung sedang dalam tahap mempersiapkan bahan terkait kajian ini.

i. Percepatan Pengesahan Perda RZWP3K

Mengacu pada Undang-Undang No.27 Tahun 2007 yang kemudian disempurnakan melalui UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RZWP3K sesuai dengan kewenangan masing-masing. RZWP3K sangat penting karena dapat menjadi payung hukum yang kuat terhadap perencanaan tata ruang khususnya di wilayah pesisir. Di akhir tahun 2019 draft dokumen RZWP3K telah berada dalam tahap finalisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendapatkan persetujuan agar dapat segera dijadikan peraturan daerah.

II.1.5.2 Terhadap Dampak Kesehatan

- Terkait wabah malaria yang menjadi endemik di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan salah satunya dipengaruhi oleh persebaran kolong-kolong hasil penambangan timah, pada tahun 2019 ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan memfokuskan diri dalam program eliminasi penyakit malaria di kawasan penambangan timah illegal di Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Tengah dalam rangka menyongsong Bangka Belitung sebagai daerah bebas malaria pada tahun 2020.
- Terhadap ancaman radiasi mineral ikutan dari aktivitas penambangan timah, pada bulan Juni tahun 2019 telah diselenggarakan kegiatan Desiminasi Pengawasan Tenorm (*Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material*) oleh Bapeten yang bertujuan untuk memberikan informasi pengetahuan dan wawasan tentang keselamatan dalam pengelolaan mineral radioaktif kepada para pelaku usaha tambang di Bangka Belitung. Seperti yang telah diketahui bahwa radiasi yang ditimbulkan dari proses pengolahan mineral ikutan timah dapat menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan salah satunya adalah penyakit kanker apabila tidak dilakukan dan diawasi secara benar. Selain itu sebelumnya terkait pengelolaan mineral ikutan timah ini telah dibuat regulasinya dalam Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.1.5.3 Terhadap Dampak bencana

- Peningkatan pembangunan bidang kebencanaan merupakan salah satu unggulan pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022. Adapun fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab

dalam merespon dan menanggulanginya baik pada saat sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana.

- Selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan dalam mengantisipasi banjir dengan memulihkan daerah hulu resapan air, penguatan infrastruktur, pengerukan kolam retensi maupun alur sungai, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Badan Penanggulangan Dampak Bencana telah membentuk Satuan Tugas Bencana Banjir dan Satuan Tugas bencana kekeringan untuk mengatasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya satgas ini diharapkan dapat mengatasi banjir secara lebih cepat saat terjadi bencana alam tersebut.

II.1.5.4 Terhadap Dampak sosial ekonomi

- Masalah tata guna lahan yang berimbas hingga timbulnya konflik sosialdi masyarakat akan mengancam stabilitas keamanan di Bangka Belitung. Dalam mengatasi konflik sosial terkait perebutan lahan maupun konflik sosialnelayan dengan penambang di wilayah pesisir, Kepolisian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pendekatan secara persuasif yaitu musyawarah dan secara hukum yang tegas.
- Penyelenggaraan sosialisasi penguatan masyarakat di daerah rawan bencana dan konflik sosial semakin intens dilaksanakan sebagai bentuk minimalisir terhadap ancaman konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Gambar 2.47. Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019

(Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020)

- Untuk mengantisipasi konflik atau sengketa terkait pemanfaatan lahan serta untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat maka telah dimulai pelaksanaan reformasi agraria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diawali dengan pembentukan tim Gugus Reformasi Agraria yang ditetapkan dengan SK. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/136.a/I/2018. Pada tahun 2019 sertifikasi lahan pertanian dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota sebanyak 25.000 bidang lahan dari target seluas 365.000 bidang.

II.2. Kualitas Air

Air merupakan salah satu unsur sumber daya alam yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sumber air merupakan wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara yang menjadi salah satu modal dasar dan faktor utama dalam pembangunan.

Penggunaan air secara luas dalam kehidupan manusia digunakan secara dominan dalam pemenuhan kebutuhan domestik rumah tangga. Selain itu, air merupakan salah satu *raw material* pada seluruh kegiatan industri, baik sebagai bahan utama ataupun sebagai bahan pendukung dari suatu kegiatan industri. Untuk menjaga fungsi air maka perlu dilakukan usaha dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Sumber air pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi air permukaan berupa sungai, embung, dan air tanah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki panjang sungai 10.514 KM berdasarkan data hidrologi Inageoportal -BIG 2020. Sungai ini terbagi atas sungai besar dan kecil serta tersebar diseluruh Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Sungai besar yang melintasi dua kabupaten adalah Sungai Baturusa yang berada pada Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang dan Sungai Buding yang berada pada Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Selain Itu terdapat pula sungai besar yang berada pada tiap kabupaten/kota yaitu Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang, Sungai Kurau dan Sungai Selan yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, Sungai Bangka kota dan Sungai Kepoh yang berada di Kabupaten Bangka Selatan, Sungai Semenduk pada Kabupeten Bangka, Sungai Mancung berada pada Kabupaten Bangka Barat, Sungai Cerucuk yang berada pada Kabupaten Belitung dan Sungai Lenggang yang berada pada Kabupaten Belitung Timur.

Sumber air lainnya yang terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kolong dan Embung. Kolong merupakan lubang bekas penambangan timah yang memiliki cekungan dan dapat menampung air hujan. Kualitas air pada kolong sangat tergantung pada usia Kolong. Kolong muda merupakan kolong yang baru terbentuk dengan usia kurang dari 5 tahun dengan karakteristik air memiliki pH 2 – 4 dan mengandung logam berat yang tinggi. Kolong menengah adalah kolong yang memiliki usia 5 – 20 tahun dengan karakteristik logam di air masih cukup tinggi dan pH berkisar pada 4 – 5. Kolong tua adalah kolong yang memiliki kondisi biogeofisik yang sudah normal dengan pH berkisar pada 5.5 – 7 (Henny dan Susanti, 2009).

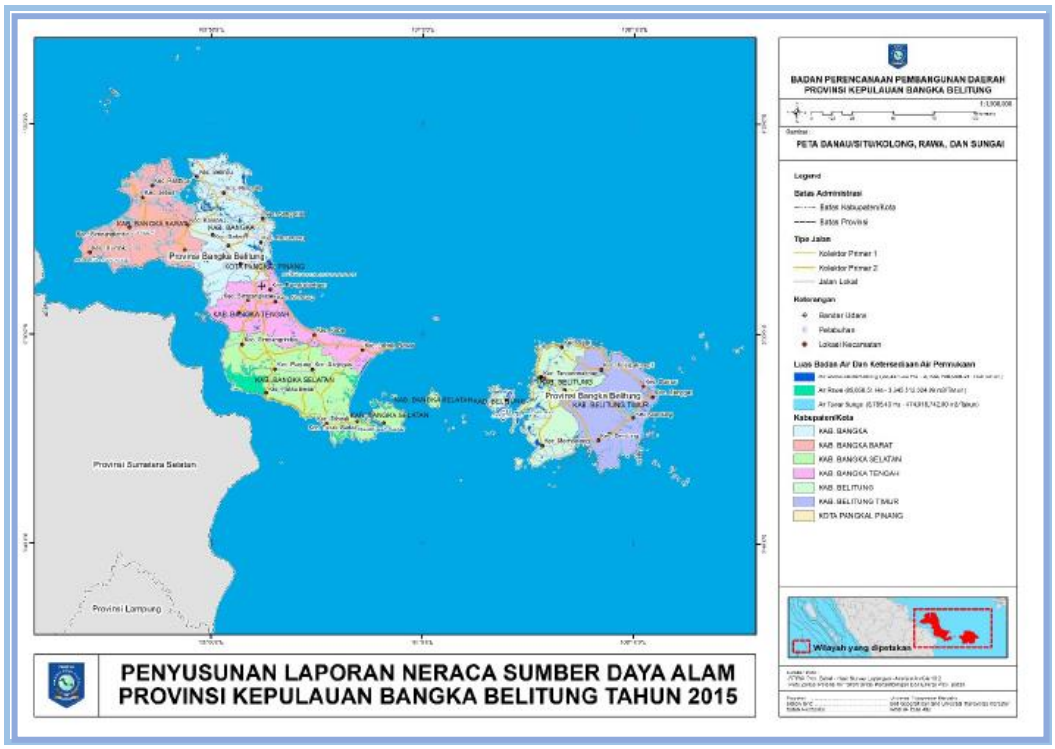

Gambar 2.48. Peta Danau/Kolong/Rawa/Situ dan Sungai, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015.

Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air hujan dan limpasan serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian, perkebunan dan peternakan terutama pada saat musim kemarau. Luasan total dari kolong dan embung pada Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung adalah 2.623 Ha dengan kemampuan menampung volume air sebesar 95 juta kubik air.

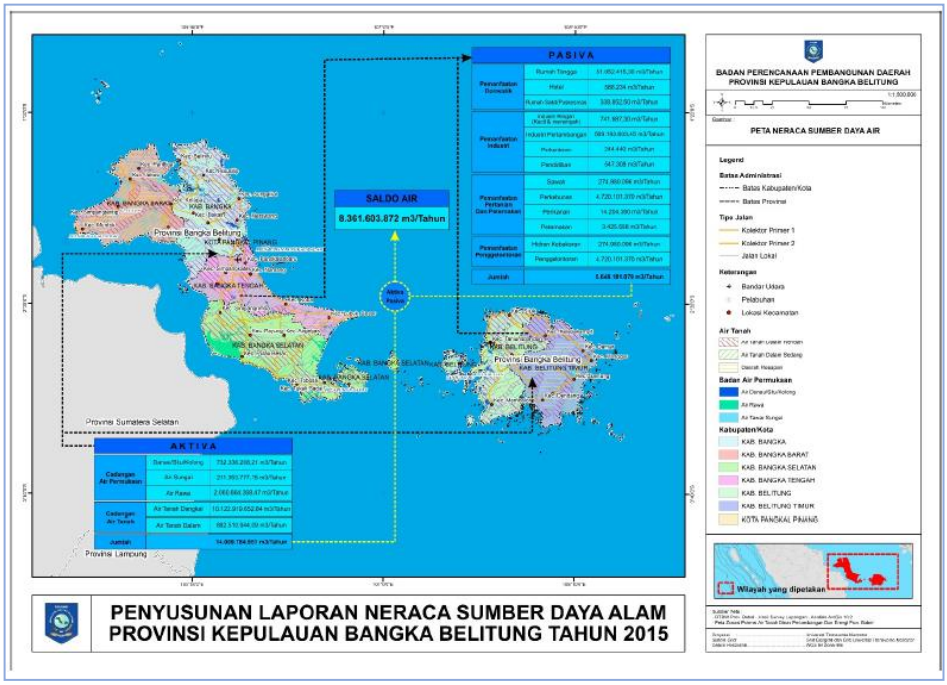

Gambar 2.49. Peta Sumber Daya Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data Neraca Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015, total ketersediaan air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 18.861.907.561,87 m^3 /tahun yang terdiri dari air permukaan 5.922.624.825,20 m^3/tahun dan ketersediaan air tanah 12.939.282.736,67 m^3/tahun. Air permukaan terakumulasi berjumlah 5.922.624.825,20 m^3/tahun yang terdiri dari hasil tampungan 2.918.270.471,37 m^3/tahun dan hasil imbuhan 3.004.354.353,83 m^3/tahun. Jumlah air tanah yang tersedia diprovinsi kepulauan bangka Belitung terdiri dari air tanah dangkal 10.122.919.652,84 m^3/tahun dan air tanah dalam 2.816.363.083,82 m^3/tahun.

Jika dilihat dari analisis SDA Provinsi dari perhitungan neraca sumber daya air yang menghitung aktiva dan pasiva ketersediaan air bangka masih surplus sebesar 8.361603.872 m^3/tahun.

Tabel. II.17. Ketersediaan Air Permukaan dari Situ/Danau/Waduk/Kolong Berdasarkan Wilayah Administratif.

Kabupaten Kota	Total Luas Kolong / Danau / Situ (Ha)	Volume (m3)	Tampungan (m3/th)	Total Ketersediaan Air Permukaan (m3/Tahun)
Kab. Bangka	8,866.48	398,991,610.57	213,303,574.95	612,295,185.52
Kab. Bangka Barat	5,441.45	244,865,271.21	130,906,606.42	375,771,877.63
Kab. Bangka Selatan	2,951.91	132,835,989.71	71,015,005.67	203,850,995.39
Kab. Bangka Tengah	3,984.65	179,309,041.57	95,859,809.02	275,168,850.58
Kab. Belitung	3,177.65	142,994,302.76	76,445,707.55	219,440,010.32
Kab. Belitung Timur	5,896.91	265,361,044.03	141,863,783.21	407,224,827.24
Kota Pangkal Pinang	122.28	5,502,662.85	2,941,760.24	8,444,423.09
Total	30,441.33	1,369,859,922.70	732,336,247.07	2,102,196,169.77

Sumber: Neraca Sumber Daya Alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015.

Jika dilihat dari ketersediaan air yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memang dalam kondisi surplus, namun dari sisi kualitas air masih terdapat berbagai permasalahan dengan rendahnya hasil pemantauan untuk beberape parameter kualitas air dan degredasi kualitas air yang terjadi memerlukan tinjauan dan respons penanganannya.

II.2.1 Tinjauan Daya Dukung Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Luasan kelas jasa ekosistem penyediaan air dalam kategori tinggi sebesar 12.060,12 ha atau 0,72% pada tahun 1996, kemudian meningkat hingga seluas 12.630,69 ha atau 0,76% pada tahun 2006, dan kembali menurun tajam pada tahun 2016, yaitu seluas 49.649,09 ha atau 2,98%. Perubahan luasan kelas jasa ekosistem penyediaan air dalam kategori sedang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 1996 – 2016 menunjukkan adanya penurunan luasan wilayah yaitu sebesar 79.204,39 ha atau 4,75 % pada tahun 1996, kemudian menurun hingga menjadi seluas 76.046,43 ha atau 4,56 % pada tahun 2006, dan kembali menurun tajam hingga seluas 49.649,09 ha atau setara dengan 2,98 % dari luasan

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016. Jasa ekosistem penyediaan air kategori rendah pada tahun 1996 seluas 1.331.570,01 ha atau setara dengan 79,86%. Luasan tersebut menurun pada tahun 2006 yaitu sebesar 1.175.883,64 ha atau 70,52 % dan secara konsisten menurun di tahun 2016 menjadi 1.112.163,73 ha atau 66,70 %.

Menurunnya luasan jasa ekosistem penyediaan air kategori tinggi, sedang dan rendah tidak telepas dari meningkatnya luasan wilayah pada kategori sangat rendah. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memberikan jasa ekosistem penyediaan air dalam kategori sangat rendah pada tahun 1996 sebesar 231.736,97 ha atau setara dengan 13,90 % dari total luas wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luasan ini meningkat pada tahun 2006 dan 2016 dengan luasan sebesar 390.010,74 ha atau 23,39 % pada tahun 2006, dan 481.606,76 ha atau 28,88 % pada tahun 2016. Kelas jasa ekosistem penyediaan air bersih kategori sangat tinggi cenderung konstan, yaitu sekitar 0,1% luas wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.50. Peta Indikatif Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 1996

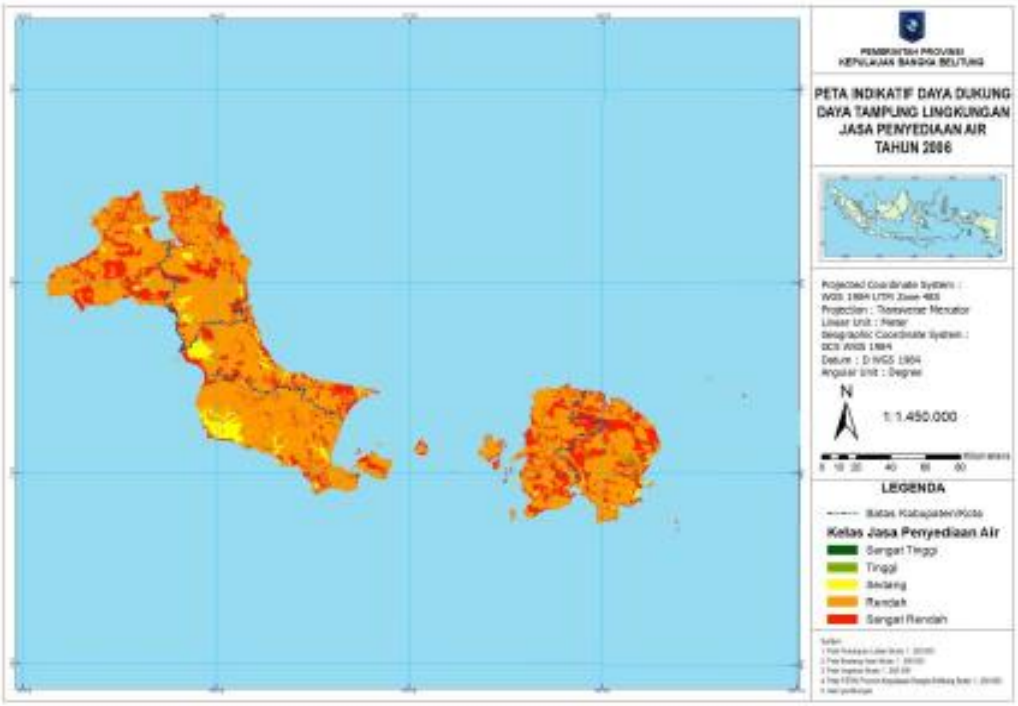

Gambar 2.51. Peta Indikatif Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 2006

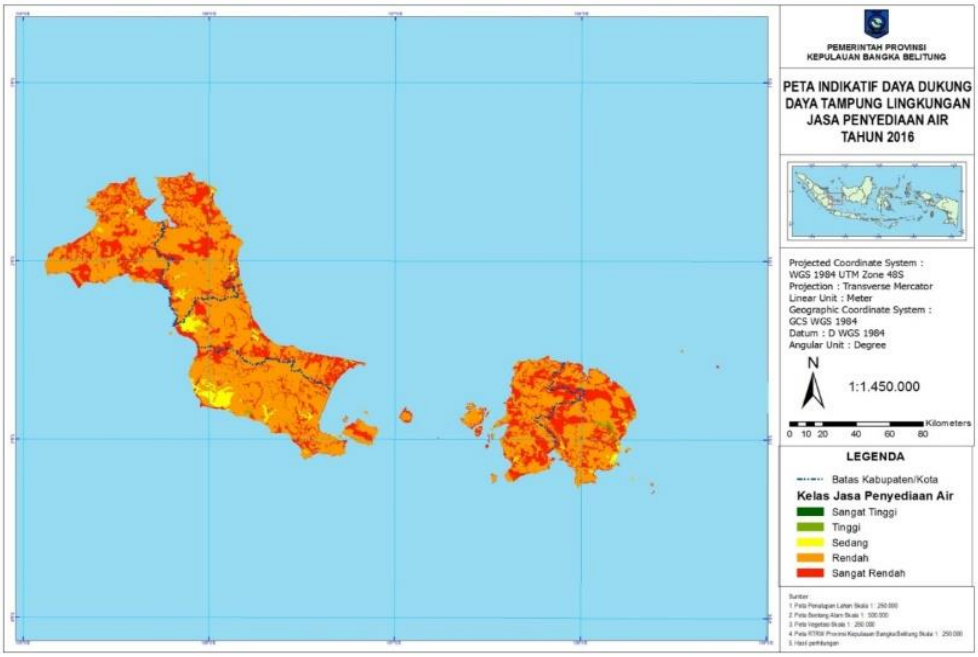

Gambar 2.52. Peta Indikatif Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 2016

Jika dilihat dari analisis peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 1996, 2006 dan 2016

memperlihatkan degredasi kualitas penyediaan air bersih dari tahun 1996,2006 dan 2016 seperti bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel II.18. Distribusi Daya Dukung Penyediaan Air 1996-2016

Kelas	Tahun 1996		Tahun 2006		Tahun 2016	
	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	131,15	0,01	131,15	0,01	132,38	0,01
Tinggi	12.060,12	0,72	12.630,69	0,76	11.150,68	0,67
Sedang	79.204,39	4,75	76.046,43	4,56	49.649,09	2,98
Rendah	1.331.570,01	79,86	1.175.883,64	70,52	1.112.163,73	66,70
Sangat Rendah	231.736,97	13,90	390.010,74	23,39	481.606,76	28,88
Blank	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76	12.703,01	0,76
Total (Ha)	**1.667.405,65**	**100**	**1.667.405,65**	**100**	**1.667.405,65**	**100**

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

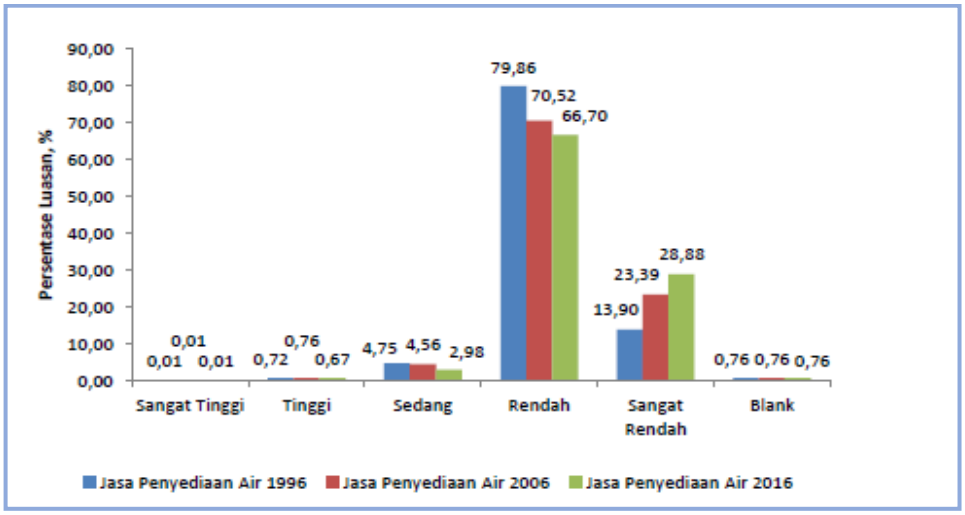

Gambar 2.53. Distribusi Daya Dukung Penyediaan Pangan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber: Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai sumber daya alam yang utama, potensi sumber air pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya sungai menjadi kebutuhan prioritas dalam pengelolaan dan pengendaliannya. Usaha dalam

pengelolaan dan pengendalian sungai ini dilakukan dengan melakukan pemantauan sungai secara berkelanjutan agar mendapatkan informasi yang utuh mengenai perubahan kualitas air sungai secara terus menerus. Jumlah titik pantau sungai yang dilakukan secara berkala berjumlah 43 titik yang tersebar pada 11 sungai besar dan dilakukan dalam 3 kali periode yang mewakili musim panas, musim peralihan/pancaroba dan musim kemarau.

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pembangunan dalam berbagai sektor memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan. Dalam setiap aktivitas manusia baik berupa personal maupun aktivitas dalam kelompok /industri akan selalu menghasilkan dampak negatif pada lingkungan yang berupa limbah. Limbah yang dihasilkan dapat berupa limbah cair, padat maupun gas. Limbah ini yang akan selalu menjadi faktor yang menekan daya dukung lingkungan dan menurunkan kualitas air sungai.

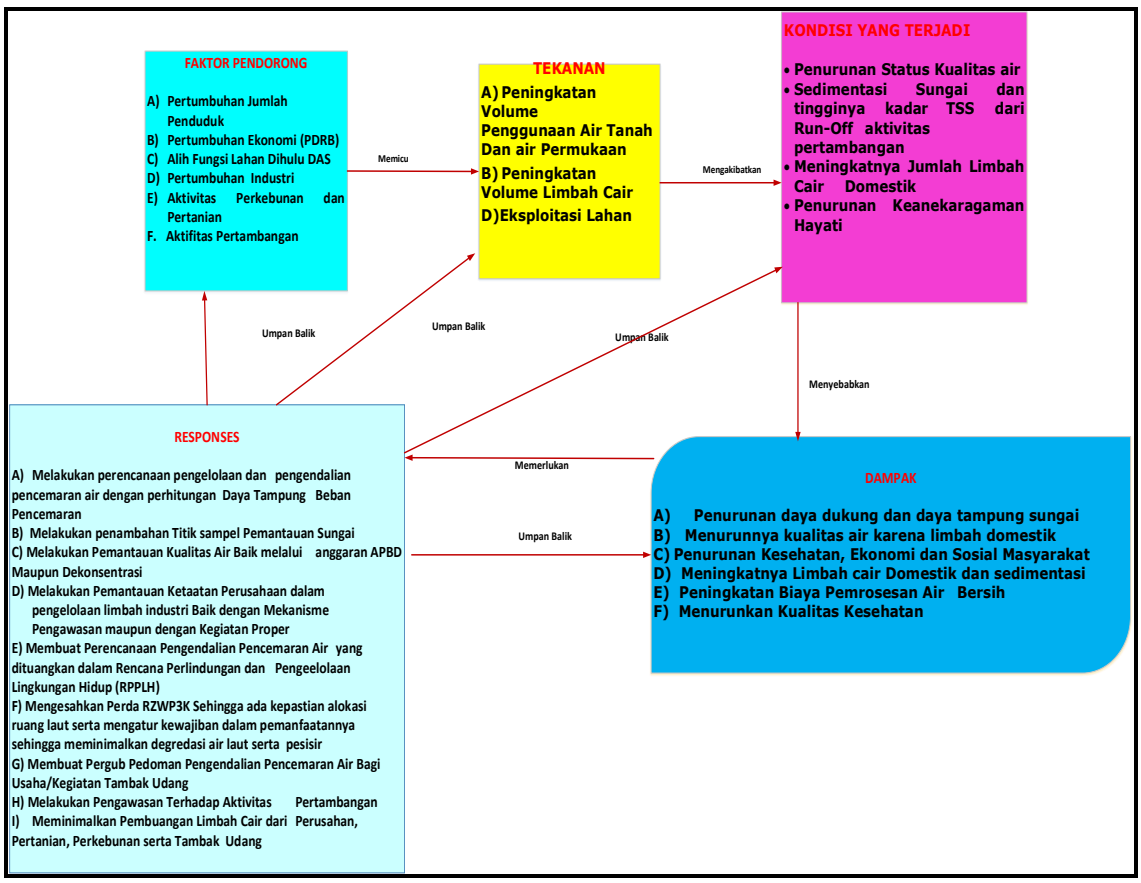

Gambar 2.54. Visualisasi Skematik DPSIR Kualitas Air

II.2.2 Driving Force

Menurunnya kualitas air sungai merupakan indikasi telah terjadi penambahan zat kontaminan ke dalam air sungai yang berasal dari aktivitas manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada dasarnya *drive force* berasal dari keinginan/kebutuhan manusia untuk dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi *drive* yang utama yang menggerakan manusia untuk beraktivitas dalam berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari data Produk Domestik Bruto (PDRB).

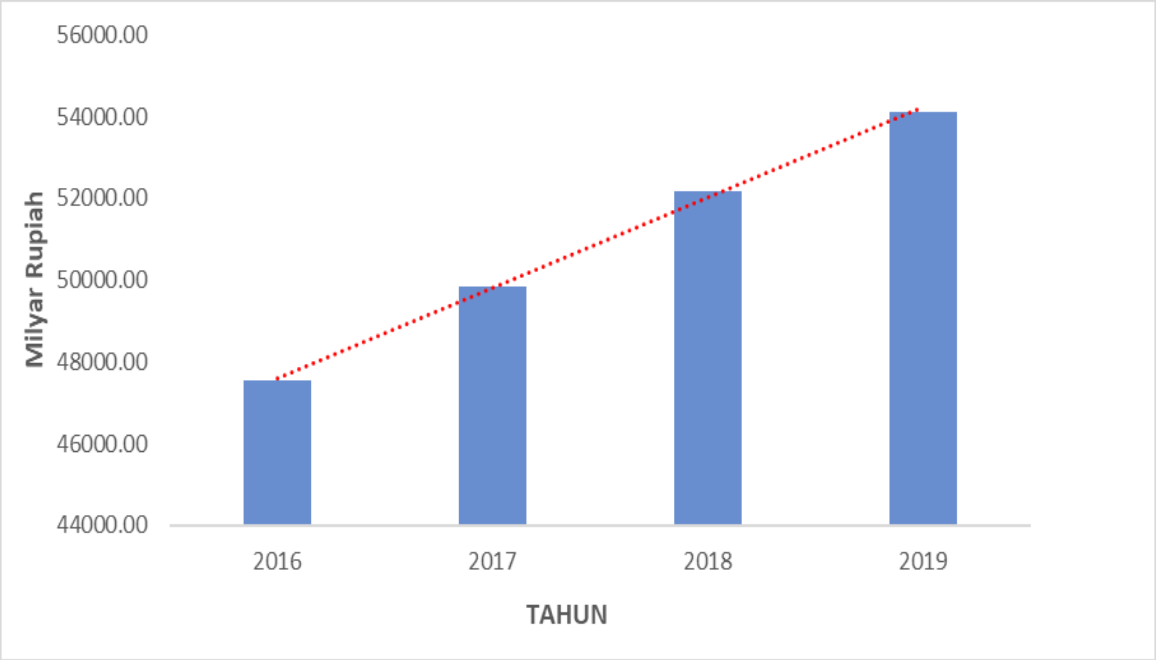

Gambar 2.55. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Sumber BPS, 2020)

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut besaran PDRB berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2019 mencapai 54 triliun meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 52 triliun atau tumbuh sebesar 3.8% dari tahun 2018. Adapun kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 menurut pengeluaran disumbang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 28,9 triliun atau 53% dari

total pendapatan. Laju pertambahan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan dan kebutuhan.

Peningkatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan penduduk terhadap kebutuhancakan secara langsung meningkatkan jumlah industri. Peningkatan aktivitas industri pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan dampak langsung pada kualitas lingkungan secara menyeluruh. Kegiatan industri akan menyumbang *effluent* limbah yang berupa limbah cair, B3, maupun emisi.

Aktivitas lain yang dapat menjadi *driving force* dalam penurunan kualitas lingkungan adalah aktivitas tambang illegal yang terjadi pada daerah aliran sungai (DAS). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki barang tambang berupa Timah (Sn) memicu penambangan illegal yang memiliki kontribusi dalam menekan lingkungan khususnya kualitas air sungai.

II.2.3. Pressure

Berdasarkan data *driving force* yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas maka akan menimbulkan tekanan pada kelestarian lingkungan khusus nya terhadap kualitas air sungai. Pemenuhan kebutuhan penduduk yang meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan akan meningkatkan kebutuhan akan tempat tinggal. Hal ini akan menyebabkan perubahan fungsi lahan. Kebutuhan lahan untuk perumahan dan aktivitas industri akan mengurangi kawasan hutan yang dikonversi menjadi perumahan. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 4% dan laju pertambahan pendapatan sebesar 3.8% pada 2019 telah meningkatkan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan perumahan sebesar 4% atau sebesar 1.759 Ha.

Peningkatan aktivitas industri dan penambahan jumlah penduduk ikut meningkatkan penggunaan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air. Air bersih yang digunakan akan menghasilkan limbah cair domestik ataupun

limbah cair industri yang akan masuk ke dalam sungai. Limbah cair ini akan menekan daya tampung dan daya dukung sungai yang selanjutnya akan menyebabkan menurunnya kualitas air sungai.

II.2.4 State

Tingkat perubahan lingkungan yang terjadi seperti penurunan kualitas air baik yang berasal dari air sungai, kolong/embung, dan kualitas pesisir/air laut sebagai muara dari semua DAS yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kondisi kualitas air dapat diketahui dari pemantauan yang dilakukan secara rutin dan terus menerus. Beberapa kondisi kualitas air yang telah dilakukan pemantauan adalah sebagai berikut

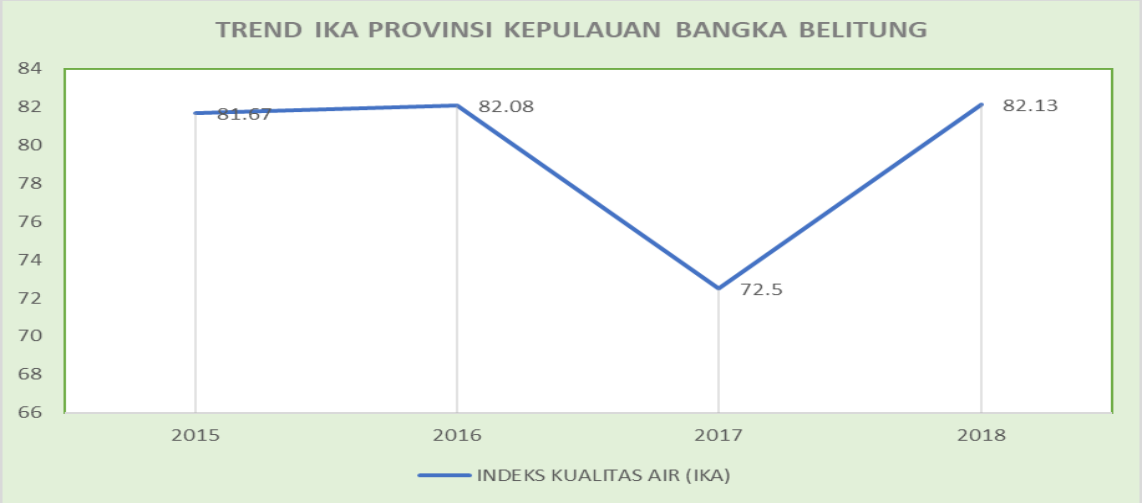

Gambar 2.56. Indeks Kualitas Air Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data historis Indeks Kualitas Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, trend Indeks Kualitas Air (IKA) provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan klasifikasi kualitas air NSF-WQI masih berada dalam kreteria baik. Untuk Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 dan sebelumnya masih dihitung berdasarkan dua sungai yaitu Sungai Baturusa dan Sungai Buding dengan dana Dekonsentrasi dari KLHK. Jika dilihat data trend IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2015-2018 pada tahun 2017 terjadi

penurunan IKA, pada tahun 2017 juga terdapat perubahan metodologi perhitungan IKA, IKA dihitung dengan status mutu kelas I PP No.82 Tahun 2001, sedangkan tahun 2018 kembali ada perbaikan metodologi perhitungan IKA, ada penambahan *jumlah parameter yang digunakan menjadi 10 parameter yaitu: DO, Fecal coliform, COD pH,BOD,NH3-N,TP,TSS,NO3-N dan TDS dengan perhitungan bobot dan transformasi nilai sub indeks parameter kualitas air yang ditetapkan dalam metode Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia.* Sedangkan Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 sebesar **76,81** nilai IKA ini dihitung berdasarkan pemantauan kualitas Sungai di 6 Kabupaten dan 1 Kota. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA-NSF) diatas memperlihatkan bahwa untuk 11 sungai yang dipantau kualitasnya sebagian besar masih berada pada klasifikasi baik dan cukup baik. Jika dilihat dari hasil perhitungan IKA-NSF tiap-tiap sungai yang dilakukan pemantauan, kemudian dirata-ratakan maka nilai IKA-NSF Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 76,81 dan jika dibandingkan dengan kriteria baru IKA maka ***IKA provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kriteria cukup baik.***

Tabel II.2.19. Data Kualitas Sungai

NO	Nama Sungai Sampel	Lokasi Sampel	Debit	IKA-NSF	Klasifikasi
1	Sungai Lenggang Belitung	Hulu Sungai Lenggang, Jembatan Desa Lintang	0.00	81.01	BAIK
2	Sungai Lenggang Belitung	Tengah Sungai Lenggang, Bendungan Pice	0.00	78.25	CUKUP BAIK
3	Sungai Lenggang Belitung	Hilir Jembatan Desa Gantung	0.00	79.00	CUKUP BAIK
4	Sungai Cerucuk Belitung	Hulu Sungai Cerucuk, Jembatan Desa Hibul	0.00	70.46	CUKUP BAIK
5	Sungai Cerucuk Belitung	Tengah Sungai Cerucuk, Jembatan Air Mungkul	0.00	76.44	CUKUP BAIK
6	Sungai Cerucuk Belitung	Hilir Sungai Cerucuk, Jembatan Lilang	0.00	76.53	CUKUP BAIK
7	Sungai Selan	Hulu Sungai Selan, Jembatan SP Kerakas	0.00	66.32	SEDANG
8	Sungai Selan	Tengah Sungai Selan, Dermaga Perahu Sungai Selan	0.00	67.33	SEDANG

NO	Nama Sungai Sampel	Lokasi Sampel	Debit	IKA-NSF	Klasifikasi
9	Sungai Selan	Hilir Sungai Selan, TPI Sungai Selan	0.00	65.66	SEDANG
10	Sungai Rangkui	Hulu Sungai Rangkui Jembatan Air Nangka Desa Kace Kec. Mendo Barat	0.00	79.05	CUKUP BAIK
11	Sungai Rangkui	Tengah Sungai Rangkui Pintu Air Kolong Retensi Pangkalpinang	0.00	81.40	BAIK
12	Sungai Rangkui	Jembatan Jalan Trem	0.00	77.98	CUKUP BAIK
13	Sungai Kepoh	Hulu Sungai Kepoh (Plat Deuker Desa Air Gegas)	0.00	67.85	SEDANG
14	Sungai Kepoh	Tengah Sungai Kepoh (Jembatan Kuning Dusun Tepus)	0.00	71.68	CUKUP BAIK
15	Sungai Kepoh	Hilir Sungai Kepoh (Dermaga Perahu Dusun Tirem)	0.00	72.26	CUKUP BAIK
16	Sungai Kurau	Hulu Sungai Kurau (Jembatan Desa Paku)	0.00	64.33	SEDANG
17	Sungai Kurau	Tengah Sungai Kurau (Tambatan Perahu Sungai Penyak)	0.00	65.82	SEDANG
18	Sungai Kurau	Hilir Sungai Kurau (Tambatan Perahu Desa Kurau)	0.00	69.78	SEDANG
19	Sungai Bangka Kota	Hulu Sungai Bangka Kota (Jembatan Kp. Pasir Desa Kerakas Kab. Bangka Tengah)	0.00	77.75	CUKUP BAIK
20	Sungai Bangka Kota	Tengah Sungai Bangka Kota (Muara S.Buluh Desa Bangka Kota, Kab Bangka Selatan)	0.00	78.64	CUKUP BAIK
21	Sungai Bangka Kota	Hilir Sungai Bangka Kota (Muara Sungai Bangka Kota, Kabupaten Bangka Selatan)	0.00	75.77	CUKUP BAIK
22	Sungai Mancung	Hulu Sungai Mancung (Plat Deuker Kebun Sawit H. Arpan, SP Tempilang, Kec. Kelapa)	0.00	78.74	CUKUP BAIK
23	Sungai Mancung	Tengah Sungai Mancung (Jembatan Desa Mancung, Kelapa)	0.00	76.85	CUKUP BAIK
24	Sungai Mancung	Hilir Sungai Mancung (Dermaga Kapal Kayu Arang Kec. Kelapa, Kab Bangka Barat)	0.00	80.38	BAIK
25	Sungai Semenduk	Hulu Sungai Semenduk (Jembatan Air Jangkang Simpang Penagan)	0.00	76.70	CUKUP BAIK
26	Sungai Semenduk	Tengah Sungai Semenduk (Dermaga Sungai Semenduk)	0.00	70.83	CUKUP BAIK

NO	Nama Sungai Sampel	Lokasi Sampel	Debit	IKA-NSF	Klasifikasi
27	Sungai Semenduk	Hilir Sungai Semenduk (Dermaga Sungai Aik Pandan)	0.00	71.24	CUKUP BAIK
28	Sungai BATURUSA	TITIK 1 Baturusa	0.11	79.80	CUKUP BAIK
29	Sungai BATURUSA	TITIK 2 Baturusa	4.81	83.14	BAIK
30	Sungai BATURUSA	TITIK 3 Baturusa	14.24	82.12	BAIK
31	Sungai BATURUSA	TITIK 4 Baturusa	25.22	81.75	BAIK
32	Sungai BATURUSA	TITIK 5 Baturusa	35.64	80.91	BAIK
33	Sungai BATURUSA	TITIK 6 Baturusa	31.20	80.76	BAIK
34	Sungai BATURUSA	TITIK 7 Baturusa	15.80	80.90	BAIK
35	Sungai BATURUSA	TITIK 8 Baturusa	9.90	80.69	BAIK
36	Sungai BUDING	TITIK 1 Buding	5.65	82.60	BAIK
37	Sungai BUDING	TITIK 2 Buding	11.75	79.18	CUKUP BAIK
38	Sungai BUDING	TITIK 3 Buding	9.45	82.96	BAIK
39	Sungai BUDING	TITIK 4 Buding	7.76	79.73	CUKUP BAIK
40	Sungai BUDING	TITIK 5 Buding	10.80	84.28	BAIK
41	Sungai BUDING	TITIK 6 Buding	8.20	82.33	BAIK
42	Sungai BUDING	TITIK 7 Buding	2.05	79.42	CUKUP BAIK
43	Sungai BUDING	TITIK 8 Buding	11.43	84.05	BAIK

1. Kondisi Kualitas Air Sungai

Berdasarkan fungsinya sungai akan menjadi tempat menampung debit air yang berasal dari air hujan maupun dari tanah, sehingga kualitas air sungai sangat tergantung pada aktivitas yang terjadi di daerah aliran sungai (DAS). Kualitas air sungai dapat diketahui dari upaya pemantauan sungai yang telah dilakukan. Upaya pemantauan air sungai pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada sungai besar pada setiap kabupaten dan sungai yang melintasi 2 kabupaten.

Tabel II.20. Lokasi Pemantauan Sungai

Nama Sungai	Titik Pantau	Frekuensi	Panjang Sungai (Km)	Lokasi (Kab/Kota
S. Batu Rusa	8	3	32.83	Bangka - Pangkalpinang
S. Buding	8	3	39.04	Belitung - Belitung Timur
S. Lenggang	3	3	60.45	Belitung Timur
S. Cerucuk	3	3	38.52	Belitung
S. Selan	3	3	38.76	Bangka Tengah
S. Rangkui	3	3	12.48	Pangkalpinang
S. Kepoh	3	3	55.41	Bangka Selatan
S. Kurau	3	3	58.81	Bangka Tengah
S. Bangka Kota	3	3	28.8	Bangka Selatan
S. Mancung	3	3	13.59	Bangka Barat
S. Semenduk	3	3	23.58	Bangka

Berdasarkan data diatas panjang sungai yang telah dilakukan pemantauan sepanjang 402.27 KM. Parameter pengujian kualitas air sungai dilakukan sesuai dengan PP 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menggunakan baku mutu air Kelas II. Klasifikasi mutu air Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana, rekreasi air, pembudidayaan air tawar, peternakan, dan pengairan tanaman. Pengambilan sampel uji dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode pengambilan sampel air permukaan menggunakan metode SNI 6989.57: 2008 Metode Pengambilan Contoh Air Permukaan.

Berdasarkan hasil pemantauan sungai yang dilakukan pada tahun 2019, didapatkan nilai beberapa parameter kunci sebagai penyebab pencemaran seperti *Total Suspended Solid* (TSS), *Biochemical Oxigen Demand* (BOD), dan *Chemical Oxigen Demand* (COD) melewati baku mutu air Kelas II pada PP 82 Tahun 2001. Baku mutu untuk parameter TSS adalah 50 ppm, baku mutu untuk parameter BOD adalah 3 ppm, dan untuk parameter COD sebesar 25 ppm. Analisis trend data dilakukan dengan menggunakan nilai rata rata parameter pada setiap titik pengambilan sampel dalam 3 periode pemantauan tahun 2019.

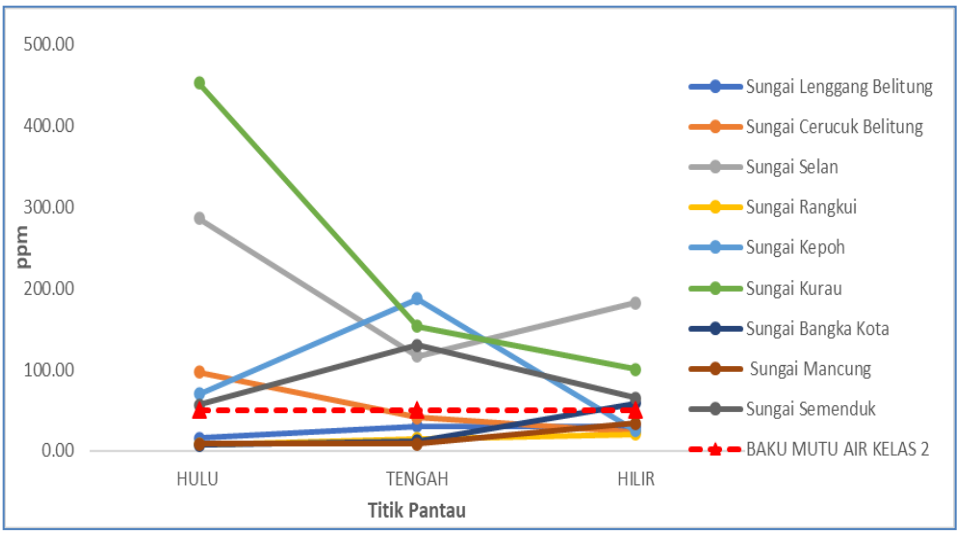

Gambar 2.57. Profil Parameter TSS Pada Sungai Kabupaten/Kota

Hasil pemantauan 9 sungai yang terdapat pada kabupaten/kota selama 3 periode pemantauan pada tahun 2019 didapatkan profil parameter TSS bervariasi pada masing masing sungai. Sebanyak 55% sungai memiliki nilai TSS berada diatas baku mutu yang telah terjadi pada hulu sungai. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi degradasi lahan, khususnya aktivitas tambang yang dilakukan di hulu sungai. Aktivitas tambang akan menyebabkan lepasnya larutan tersuspensi ke badan air sehingga akan meningkatkan kekeruhan air sungai.

Pada bagian tengah sungai terjadi penurunan nilai TSS, khususnya pada S. Selan dan S. Kurau. Hal ini mengindikasikan bahwa sungai masih dapat melakukan *self purification* terhadap beban parameter TSS yang berlebih, walaupun nilai TSS pada titik tengah pemantauan masih berada diatas baku mutu. Penurunan parameter TSS akan sangat tergantung dari karakteristik sungai. Perbedaan kedalaman sungai dan putaran hidrolik air sungai sangai berpengaruh besar dalam proses *self purification* TSS pada badan air. Untuk sungai dengan jenis aliran laminar akan sangat membantu proses pengendapan padatan, sehingga dapat menurunkan nilai TSS. Pada titik pantau tengah ini terdapat 44% sungai yang nilai TSS nya masih berada diatas baku mutu.

Pada titik hilir sungai masih terdapat sungai yang memiliki parameter TSS yang diatas baku mutu. Sebanyak 44 % sungai masih memiliki parameter TSS diatas baku mutu. Hal ini menandakan bahwa daya tampung sungai sudah tidak mampu untuk menahan beban pencemaran TSS di sepanjang sungai. *Self Purification* yang berjalan secara alami pada sungai sudah tidak mampu untuk mengurangi pencemar TSS di sepanjang badan sungai.

Parameter TSS merupakan salah satu parameter kunci sebagai indikator pencemaran sungai. Parameter TSS berhubungan langsung dengan laju sedimentasi pada sungai yang dapat menyebabkan badan sungai kehilangan daya tampung nya dan dapat menyebabkan banjir pada daerah sekitar sungai ketika debit air naik. Selain itu parameter TS

berhubungan langsung dengan parameter *Dissolve Oxigen* (DO). Semakin tinggi nilai TSS maka akan partikel padatan akan memenuhi partikel air dan akan menggurangi jumlah oksigen yang dapat diserap oleh air. Hal ini akan mengakibatkan degradasi zat pencemar lainnya seperti COD dan BOD tidak dapat terjadi karena kurangnya oksigen di dalam air. Bila hal ini terjadi maka kemampuan self purification sungai akan menurun.

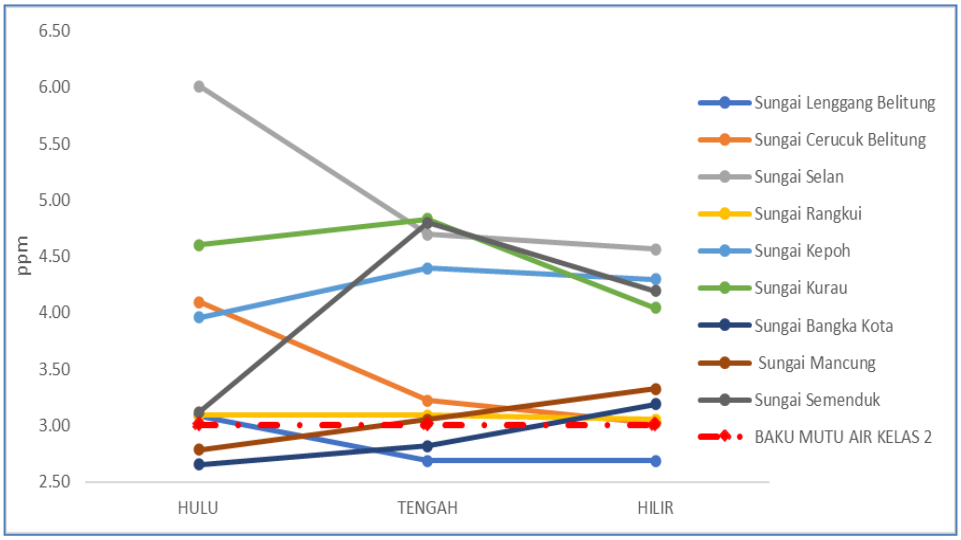

Gambar 2.58. Profil Parameter BOD Pada Sungai Kabupaten/Kota

Hasil pemantauan untuk parameter BOD secara dominan berada diatas baku mutu. Pada titik pantau Hulu sungai sebanyak 78% sungai memperoleh nilai BOD diatas baku mutu. Tingginya nilai BOD dapat menjadi indikasi bahwa terjadi kontaminasi dari limbah organik yang berasal dari limbah perternakan maupun perkebunan. Perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang menghasilkan limbah organik yang tinggi. Kandungan BOD dari industri ini berada pada ambang baku mutu 100 ppm dengan debit tertinggi 2.5 m^3 CPO.

Pada titik pantau tengah sungai sebanyak 78% sungai memiliki nilai BOD berada diatas baku mutu. Hal ini mengindikasikan bahwa proses degradasi BOD pada sistem *self purification* sungai tidak berjalan efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan oksigen pada air sungai kurang

sehingga nilai BOD tetap tinggi ketika berada pada tengah sungai. Hal lain yang dapat menyebabkan tingginya nilai BOD di titik tengah sungai adalah masuknya pencemar BOD dari limbah domestik yang berada di sepanjang sungai.

Pada titik pantau hilir sungai terdapat 89% jumlah sungai memiliki nilai BOD berada diatas baku mutu. Keadaan sungai di sepanjang titik tengah menuju ke hulu dipadati oleh pemukiman penduduk. Pembuangan limbah domestik dari rumah tangga menjadi faktor dominan dalam peningkatan nilai BOD di hilir sungai.

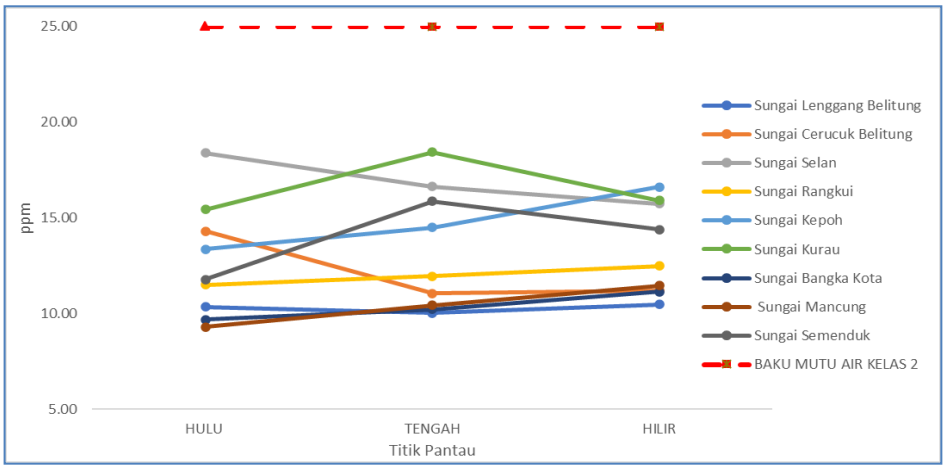

Gambar 2.59. Profil Parameter COD Pada Sungai Kabupaten/Kota

Hasil pemantauan sungai terhadap parameter COD menunjukkan bahwa di semua sungai yang dipantau berada dibawah baku mutu. *Chemical Oxigen Demand* (COD) merupakan parameter pencemar anorganik yang dapat didegradasi secara biologis dengan bantuan oksigen. Proses degradasi COD terjadi pada suasana aerob.

Pada titik pantau hulu, semua parameter COD berada dibawah baku mutu. Pada titik pantau tengah, nilai COD memiliki kecenderungan naik hampir pada semua sungai yaitu sebanyak 78% sungai. Hal ini dapat diakibatkankan adanya peningkatan pembuangan limbah domestik sepanjang aliran sungai.

Pada titik pantau hilir sungai sebanyak 67% sungai mengalami trend kenaikan nilai COD. Akan tetapi sungai masih mampu untuk mendegradasi

secara alami parameter COD, sehingga nilai parameter COD tetap berada dibawah baku mutu.

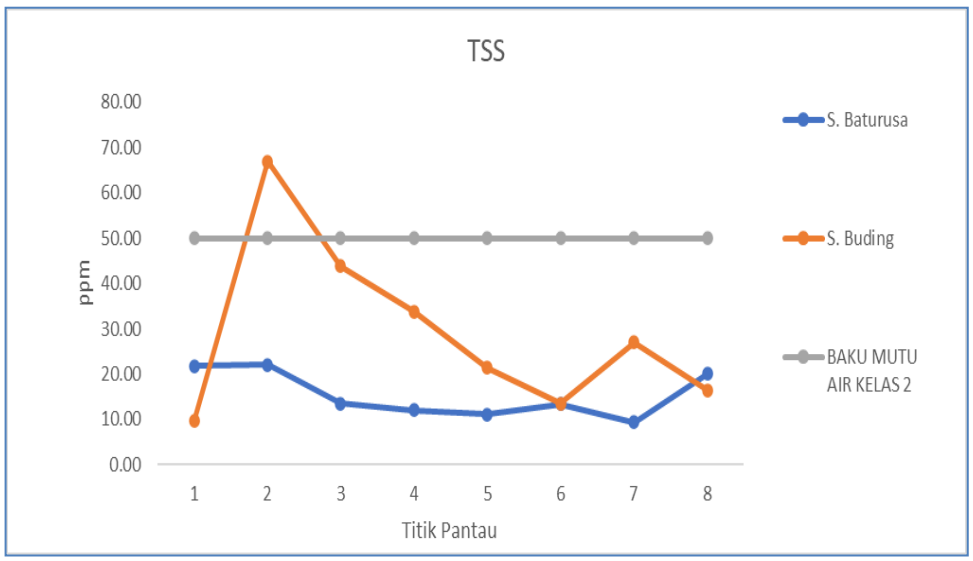

Gambar 2.60. Profil Parameter TSS Pada Sungai Baturusa dan Sungai Buding

Untuk hasil pemantauan terhadap sungai yang melintasi 2 kabupaten/kota yaitu S. Baturusa dan S. Buding didapatkan hasil parameter TSS secara dominan berada dibawah baku mutu. Titik pantau 1 sampai ke 6 merupakan titik pantau yang dimulai dari hulu sampai ke hilir sungai dan titik pantau 7 dan 8 merupakan anak sungai. Pemantauan sungai ini menggunakan dana APBN yang berasal dari Kementrian LHK. Trend penurunan parameter TSS terjadi pada setiap titik pemantauan dari hulu menuju ke hilir sungai terjadi pada S. Baturusa dan S. Rangkui. Hal ini memberikan indikasi bahwa *self purification* pada sungai masih berjalan dengan baik, sehingga kualitas air sungai dapat terjaga. Karakteristik pada daerah hulu sungai masih berupa hutan dan perkebunan sawit. Pada titik 2 S. buding terjadi lonjakan nilai TSS yang melewati baku mutu. Hal ini diakibatkan adanya aktivitas penambangan illegal yang terjadi disekitar alur sungai.

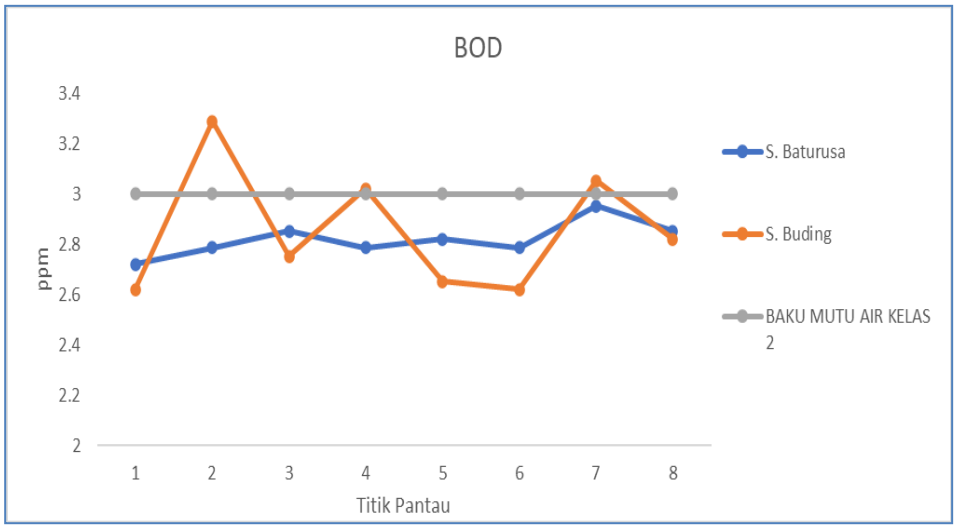

Gambar 2.61. Profil Parameter BOD Pada Sungai Baturusa dan Sungai Buding

Hasil pemantauan untuk parameter BOD memiliki nilai yang fluktuatif. Nilai BOD pada S. Buding pada titik pantau 2 melewati baku mutu. Hal ini berbanding lurus dengan parameter TSS. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen yang terdapat dalam air dikarenakan tingginya partikel tersuspensi di air. Peningkatan nilai BOD pada titik tengah sungai merupakan indikasi bahwa masuknya limbah domestik dari perumahan sekitar sungai, karena karakteristik pada titik pantau ini melewati perumahan penduduk. Untuk nilai BOD pada hilir sungai Kembali mengalami trend penurunan, hal ini terjadi karena terjadinya proses self purification pada sungai dan berkurangnya limbah domestik yang masuk ke dalam sungai. Karakteristik daerah hilir sungai merupakan hutan.

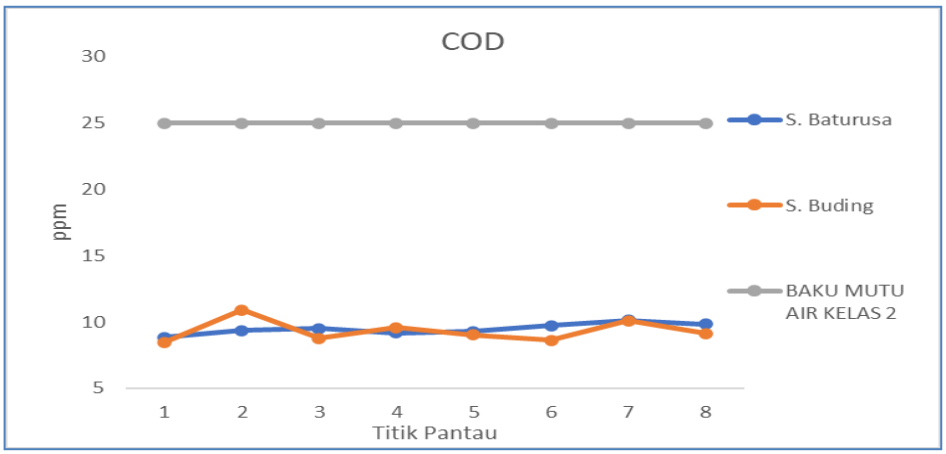

Gambar 2.62. Profil Parameter COD Pada Sungai Baturusa dan Sungai Buding

Hasil pemantauan terhadap parameter COD menunjukkan nilai COD masih berada dibawah baku mutu dari hulu dan hilir sungai. Peningkatan nilai COD hanya terjadi pada titik 2 S. Buding. Hal ini berbanding lurus dengan kenaikan parameter TSS dan BOD. Pada titik ini kekurangan oksigen terlarut dalam air telah mengakibatkan peningkatan zat anorganik yang tidak dapat terdegradasi.

Pada seluruh proses pemantauan yang dilakukan terhadap sungai telah terjadi penurunan fungsi *self purification* pada sungai yang diakibatkan oleh tingkat sedimentasi yang tinggi serta berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air yang disebabkan oleh tinggi nya parameter TSS pada hulu sungai sebagai akibat dari aktivitas penambangan illegal serta peningkatan nilai BOD dan COD pada titik tengah sungai sampai dengan hilir sungai sebagai akibat meningkatnya volume limbah domestik yang berasal dari perumahan penduduk. Aktivitas industri perkebunan sawit yang berada di hulu sungai ikut berkontribusi terhadap penurunan kualitas air sungai.

2. Kualitas Air Kolong/Embung

Pemantauan terhadap kualitas air kolong/embung juga dilakukan pada beberapa lokasi. Pemantaun kualitas air kolong/embung ini dilakukan karena masyarakat menggunakan air kolong/embung sebagai sumber air baku. Parameter utama dalam pemantauan kualitas air kolong/ embung adalah pH, TSS, T Phospat, ammonia, dan bakteri coly. Parameter kunci pemantauan ini didasarkan bahwa air kolonng/embung bersumber pada limpasan air hujan dan limpasan air lainnya yang masuk ke dalam kolong/embung. Penentuan parameter ini juga didasarkan terhadap baku mutu sumber air bersih. Pemantauan kualitas air kolong dilakukan pada 3 lokasi.

Tabel II.21. Lokasi Pemantauan Air Kolong

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat	
			Lintang	Bujur
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1.93294	106.1564
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2.54894	106.3524
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3.03009	106.6946

Kualitas air kolong yang dipantau menunjukkan bahwa semua parameter yang di pantau berada dibawah baku mutu Kelas 2 pada PP 82 Tahun 2001. Nilai pH berada pada rentang 4 – 6 untuk semua jenis kolong. Kolong pada rentang ini merupakan jenis kolong dengan usia menengah, dan sudah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kebutuhan penyiraman tanaman.

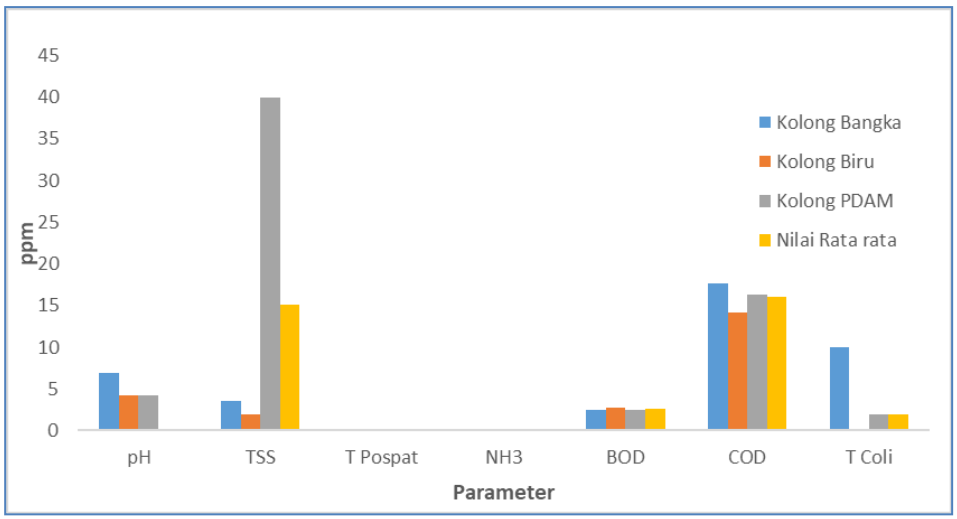

Gambar 2.63. Profil Kualitas Kolong

Tingginya nilai TSS pada Kolong PDAM terjadi karena dampak aktivitas dari penambangan illegal yang terjadi pada hulu sungai. Untuk meningkatkan kualitas air kolong menjadi kebutuhan air minum/air baku diperlukan proses pengolahan fisik lebih lanjut yaitu dengan cara pengendapan.

3. Kualitas Air Sumur

Untuk Kualitas air sumur dilakukan pemantauan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di 6 Kabupaten dan 1 Kota, dengan kritereia sumur-sumur yang banyak di konsumsis oleh masyarakat diwilayah pengambilan sampel.

Tabel II.22. Kualitas Air Sumur

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Khlorida (mg/l)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belerang sebagai H2S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)
1	Kabupaten Belitung Timur	20/02/2020	0,75	< 0.002	-	0,0101	<3.18	< 0.02	-	< 1.80	18,9
2	Kabupaten Belitung	20/02/2020	17,5	0,003	-	0,122	< 3.18	0,02	-	11	430
3	Kabupaten Bangka	11/3/2020	0,5	0,0075	-	0,0124	15	< 0.02	-	22	24
4	Kabupaten Bangka Barat	12/3/2020	31,2	0,002	-	0,0213	35,9	< 0.02	-	< 1.80	2
5	Kabupaten Bangka Tengah	12/3/2020	41	0,0035	-	0,00786	52	< 0.02	-	14	17
6	Kota Pangkalpinang	13/03/2020	55,7	< 0.002	-	0,00537	20,4	< 0.02	-	< 1.8	< 1.8
7	Kabupaten Bangka Selatan	17/03/2020	16,5	< 0.002	-	0,0178	31,3	< 0.02	-	15	22

Dari hasil pemantauan kualitas sumur di Provinsi Keepulauan Bangka Belitung, hampir secara umum nilai pH air sumum berada dibawah baku mutu dan kondisi air sumur cenderung asam.

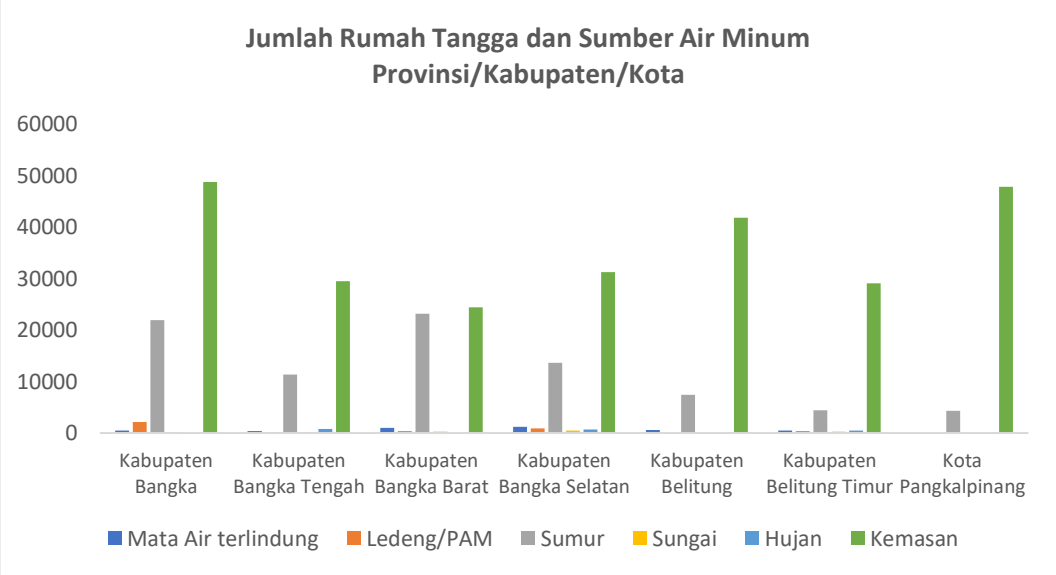

Gambar 2.64. Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum

Jika dilihat data kualitas air sumur (Data BPS dan diolah,2020) Jumlah sumber air minum terbesar yang digunakan yaitu air kemasan dan sumur dan PDAM, namun masih terdapat penggunaan sungai sebagai sumber air minum sehingga kualitas air sungai sangat penting untuk dijaga untuk memastikan baku mutu sesuai dengan parameternya dan kualitas air sebagai sumber bahan baku PDAM terjaga sehingga meminimalkan biaya pengolahan air minum.

4. Kualitas Air Laut

Dalam ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana pengembangan dan zonasi pemanfaatan tanah sangatlah penting untuk mencapai pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pemanfaatan potensi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung meliputi pemanfaatan untuk kegiatan konservasi, pelabuhan, penangkapan ikan, budidaya laut, pariwisata, pertambangan, serta alur pelayaran. Berbagai macam kegiatan ini, selain memajukan perekonomian, juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif yang timbul akibat aktivitas pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut adalah degradasi lahan, pencemaran lingkungan, dan konflik antar kepentingan. Sebagai upaya pencegahan terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, dan untuk merencanakan pola ruang pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedang mempercepat penyelesaian Peraturan Daerah terkait zonasi laut atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan pada tanggal 17 Juli 2020 Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah di sahkan dengan Perda No.3 Tahun 2020.

Dokumen RZWP3K ini telah dilengkapi dengan KLHS. Salah satu kajian yang dilakukan dalam dokumen KLHS adalah kajian TSS dengan pemodelan.

Kajian TSS untuk Dampak Pertambangan

Aktivitas pertambangan timah lepas pantai akan menyebabkan tingginya kekeruhan di sekitar wilayah penambangan. Hal ini dikarenakan ketika penyedotan/pengerukan material timah di dasar laut, terdapat sedimen – sedimen yang terangkat ke badan air. Selain itu, terdapat buangan hasil sisa (*tailing*) penyaringan timah yang umumnya akan langsung dibuang ke laut. Hal inilah yang menyebabkan tingginya *total suspended solid* (TSS) di wilayah sekitar operasi pertambangan dilakukan.

Peningkatan TSS pada suatu wilayah dapat terlihat dari semakin keruhnya perairan tersebut. Keruhnya suatu perairan akan berdampak pada ekosistem laut itu sendiri, terutama terumbu karang sebagai habitat pemijahan, tempat mencari makan, dan rumah bagi sejumlah besar organisme laut. Ketika suatu wilayah tersebut tercemar oleh tingginya TSS, hanya beberapa jenis biota yang bisa bertahan dan yang paling rentan adalah terumbu karang. Rusaknya terumbu karang akan mengganggu keseluruhan ekosistem pada perairan tersebut.

Kondisi eksisting TSS di perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Gambar 2.30. Konsentrasi padatan tersuspensi (TSS) di perairan ini berkisar antara 3 – 269 mg/L. Aktivitas pertambangan pasir yang akan dilaksanakan di lokasi – lokasi IUP akan berpotensi meningkatkan konsentrasi TSS yang kemudian akan berpengaruh terhadap ekosistem di perairan itu sendiri. Untuk mengetahui dampak aktivitas pertambangan terhadap TSS perairan, disimulasikan aktivitas operasi IUP dan dampaknya terhadap TSS di perairan Bangka Belitung.

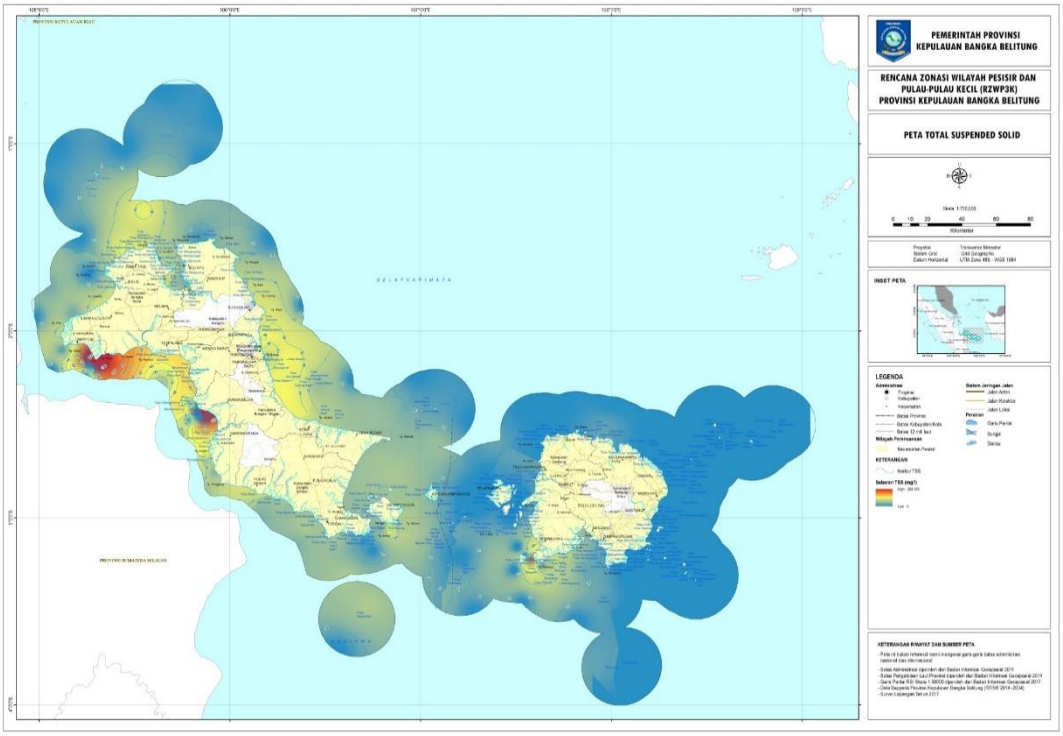

Gambar.2.65. Kondisi Eksisting TSS Di Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil pemodelan/simulasi diketahui bahwa apabila terdapat aktivitas pertambangan, maka akan terjadi penyebaran TSS yang terus meluas sepanjang waktu. Sumber TSS dari lokasi Izin Usaha Penambangan (IUP) yang berada jauh dari lepas pantai cenderung akan terbawa arus menuju laut lepas dan tidak berdampak signifikan terhadap pesisir. Selain itu, pola ini juga ditujukan terhadap sumber-sumber TSS dari IUP yang memiliki kedalaman perairan lebih dari 7 meter.

Pada kondisi ini, TSS yang dihasilkan akan cenderung terendapkan di dasar laut yang cukup dalam dan tidak terangkat kembali akibat adanya arus vertikal maupun gelombang sehingga, TSS yang dihasilkan pada daerah-daerah ini cenderung lebih rendah dibandingkan lokasi-lokasi aktivitas penambangan yang lainnya.

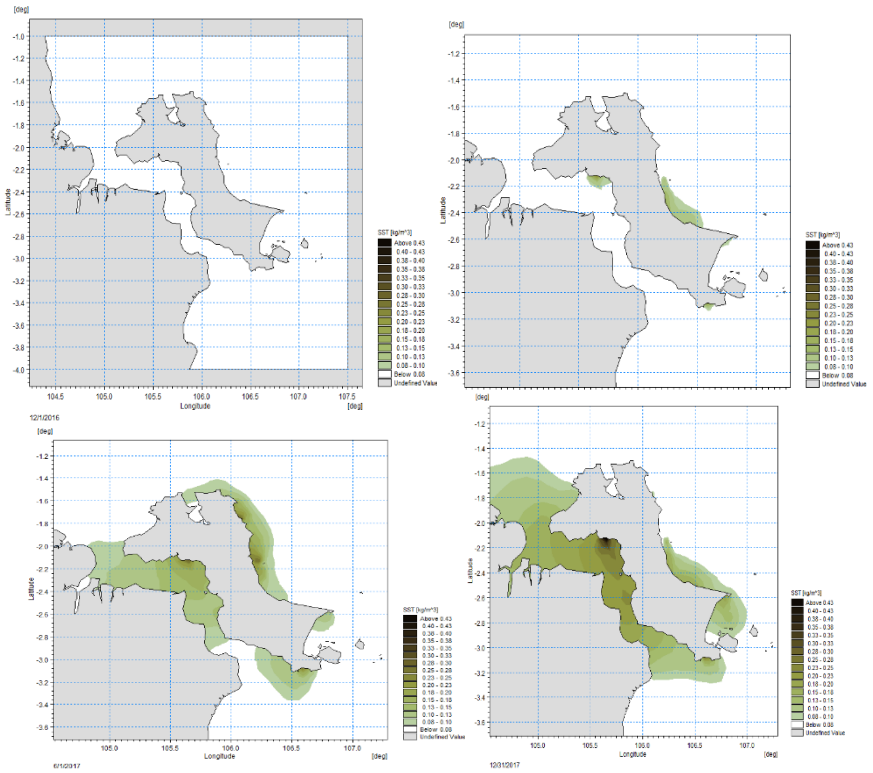

Gambar 2.66. Pemodelan TSS Di Perairan Bangka Belitung

Pemantauan kualitas air laut dilakukan dengan cara melakukan sampling air laut pada daerah sekitar pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemantauan air laut pada tahun 2019 masih dilakukan oleh bidang P3KLL KLHK dengan berkoordinasi dengan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengambilan sampel air laut dilakukan di 10 titik pantau.

Tabel II.23. Titik koordinat Pengambilan Sampel Air Laut

No	Nama Lokasi	Titik Koordinat		Lokasi Sampling
		Lintang	Bujur	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1	Perairan Pulau Bangka	-1,9118	106.2079	Pantai Rebo
2	Perairan Pulau Bangka	-1,8468	106.1506	Batu Bedon
3	Perairan Pulau Bangka	-1,8045	106.1385	Pantai Parai
4	Perairan Pulau Bangka	-1,7472	106.0817	Bedukang
5	Perairan Pulau Bangka	-1,6681	106.0423	Pantai Tuing
6	Perairan Pulau Bangka	-1,5435	105.6546	Romodong
7	Perairan Pulau Bangka	-1,6122	105.6837	Pelabuhan Belinyu
8	Perairan Pulau Bangka	-2,1406	106.2045	Muara Pasir Padi
9	Perairan Pulau Bangka	-2,0925	106.1893	Tanjung Bunga
10	Perairan Pulau Bangka	-2,0748	106.2100	Air Anyer

Parameter yang menjadi acuan dalam rekomendasi kualitas air laut adalah parameter TSS, DO, Amonia, T Pospat dan Minyak Lemak. Tingkat kualitas air laut ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terdapat 2 parameter yang melebihi baku mutu yaitu DO dan Kecerahan. Peringkat IKAL digolongkan menjadi 5 bagian dengan kriteria *Very Bad* (0-24), *Bad* (25-49), *Medium* (50-69), *Good* (70-89), dan *Excellent* (90-100).

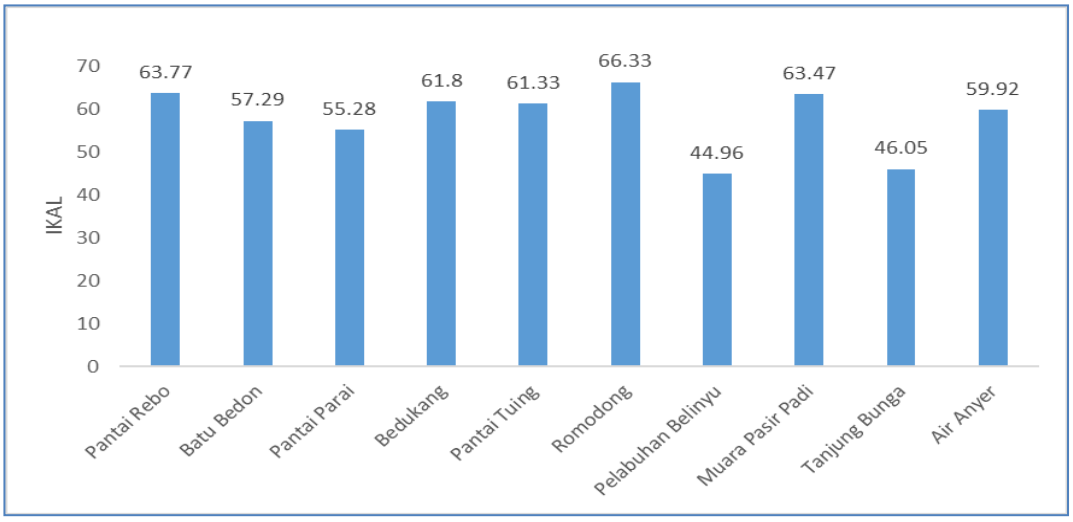

Gambar 2.67. Indeks Kualitas Air Laut

Gambaran kualitas air laut yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata rata berada pada peringkat *Medium*. Titik pantau pada Pelabuhan Belinyu masuk dalam kategori *Bad*. Hal ini diakibatkan dari aktivitas pelabuhan yang ramai sehingga polutan yang berasal dari aktivitas bongkar muat barang maupun bahan bakar ikut menekan kualitas air laut pada Pelabuhan.

Aktivitas Pelabuhan merupakan salah satu indikasi peningkatan kegiatan industri yang terjadi pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Aktivitas ini menyumbang limbah cair yang dapat berupa limbah domestik dan limbah minyak yang berasal dari aktivitas pengisian bahan bakar kapal.

5. CURAH HUJAN RATA-RATA

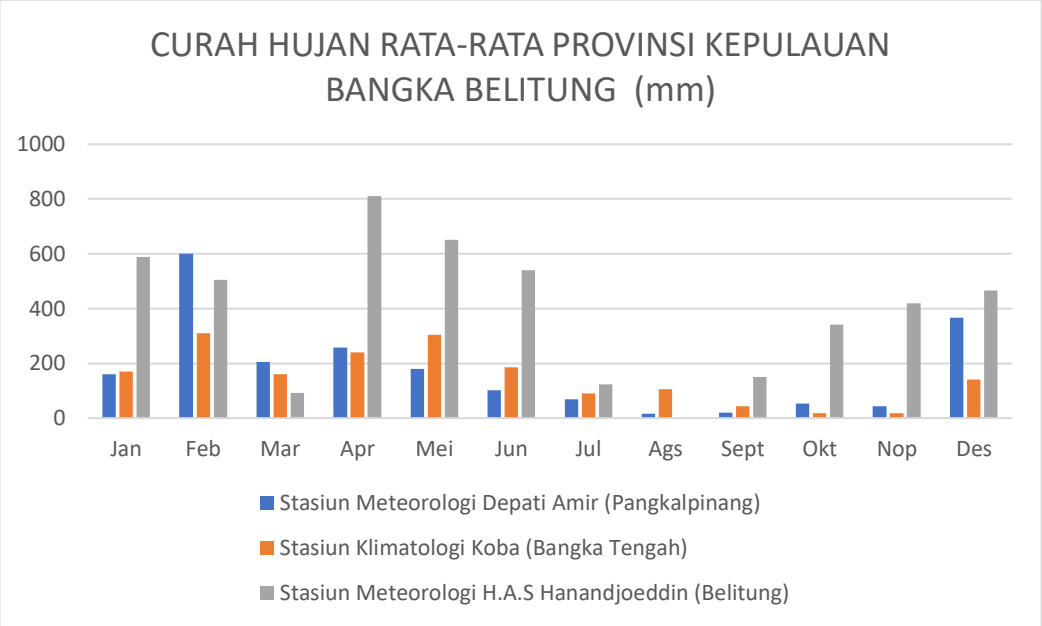

Gambar. 2.68. Curah Hujan Rata-Rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan data curah hujan rata-rata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung curah hujan rata-rata tertinggi pada bulan April dan juni menurut stasiumn pemantau meteriologi H.A.S Hannadjoedin Belitung, sedangkan untuk Pulau Bangka Curah Hujan Rata-rata bulanan Januari-sampai maret memperlihatkan curah hujan yang cukup tinggi dengan 600,8 mm berdasarkan pemantauan stasiun meteriologi depati amir.

6. Jumlah Rumah Tangga Dan Sumber Air Minum

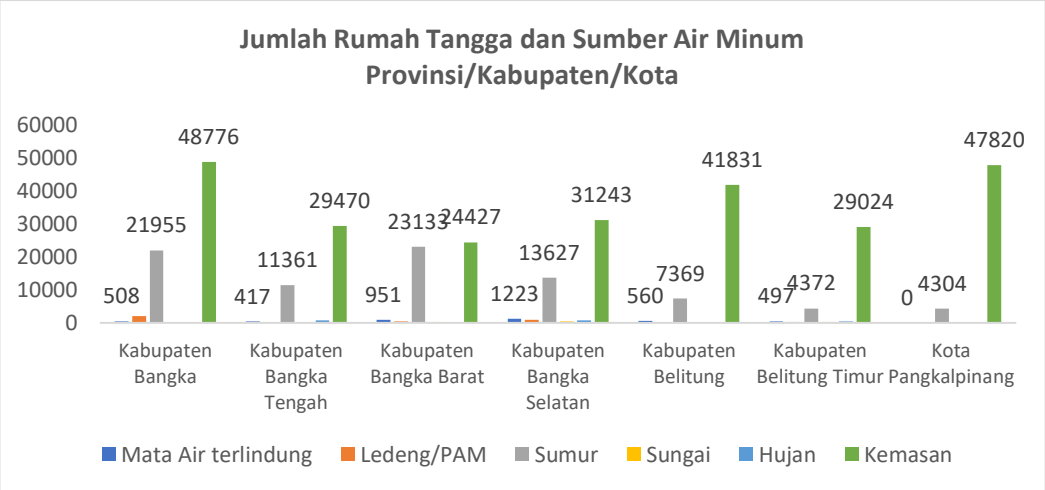

Gambar 2.69. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air minum

Berdasarkan jumlah rumah tangga dengan sumber air minum di Provinsi Kepulauan bangka Belitung, penggunaan air kemasan paling banyak digunakan disemua kabupaten, diikuti dengan penggunaan sumur. Berdasarkan data diatas masih terdapat penggunaan sungai sebagai air minum sehingga kualitas air sungai sangat penting di jaga karena berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

II.2.5 Impact

Penurunan kualitas air sungai akan memberikan dampak yang besar pada tatanan kehidupan sosial pada masyarakat. Peningkatan laju sedimentasi yang tinggi akan mengakibatkan bencana banjir yang terjadi di sepanjang aliran sungai pada saat debit air maksimum. Banjir terjadi karena daya tampung sungai terhadap air yang masuk berkurang diakibatkan volume padatan yang berada di dasar sungai. Banjir akan memberikan dampak sosial dan dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar aliran sungai.

Air sungai yang menjadi sumber air baku apabila tercemar oleh polutan organik yang bersumber dari BOD maupun COD akan menimbukan bau sehingga menurunkan kualitas air yang akan digunakan. Selain itu penurunan kualitas air yang akan digunakan akan mempengaruhi sanitasi masyarakat dan akan memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat sekitas sungai. Berdasarkan data BPS 2020 terdapat 1.292 rumah tangga yang memanfaatkan air permukaan sebagai sumber air bersih. Terjadi peningkatan sebesar 4% dari tahun 2018 sebesar 1.238 rumah tangga.

Dampak lain dari turunnya kualitas sungai adalah dampak estetika yaitu munculnya bau yang kurang sedap pada air sungai. Penurunan kualitas sungai secara keseluruhan akan mengurangi pasokan air bersih

yang dapat digunakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas domestik maupun aktivitas industri.

Kualitas air laut juga rentan dengan pencemaran bai dari aktifitas pemanfaatan ruang laut seperti pertambangan illegal yang marak terjadi, dan berbagai run of serta pembuangan limbah cair, fenomena berkembangnya investasi pengembangan tambak udang vaname juga memerlukan penanganan dalam pemenuhan kewajiban Outlet IPAl yang membuang hasil PengelolaanIPAL ke laut sehingga sesuai Baku mutu yang sisyaratkan.

II.2.6. Respons

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menjaga kualitas air agar dapat dipergunakan sebagai sumber air bersih maupun menjaga dari laju sedimentasi yang akan menyebabkan bencana banjir pada musim hujan. Berdasarkan driving force, pressure, state dan impact yang menjadi analisis diatas, maka berbagai upaya yang telah dilakukan. Upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kualitas air diantaranya adalah:

1. Melakukan Perhitungan Beban Pencemaran Sungai

Sebagai bentuk respon dalam menjaga kualitas sungai pada tahun 2019 dilakukan perhitungan daya tampung dan daya dukung kualitas S. Baturusa dan S. Buding. Sungai ini telah dilakukan pemantauan secara periodik. Berdasarkan hasil analisa diatas, untuk sungai baturusa masih berada pada kualitas kelas 2. Tujuan dilakukan perhitungan beban sungai ini adalah agar dapat memberikan dasar dalam memberikan kebijakan terhadap pelaku industri baru yang akan menjalankan aktivitas di sepanjang sungai baturusa.

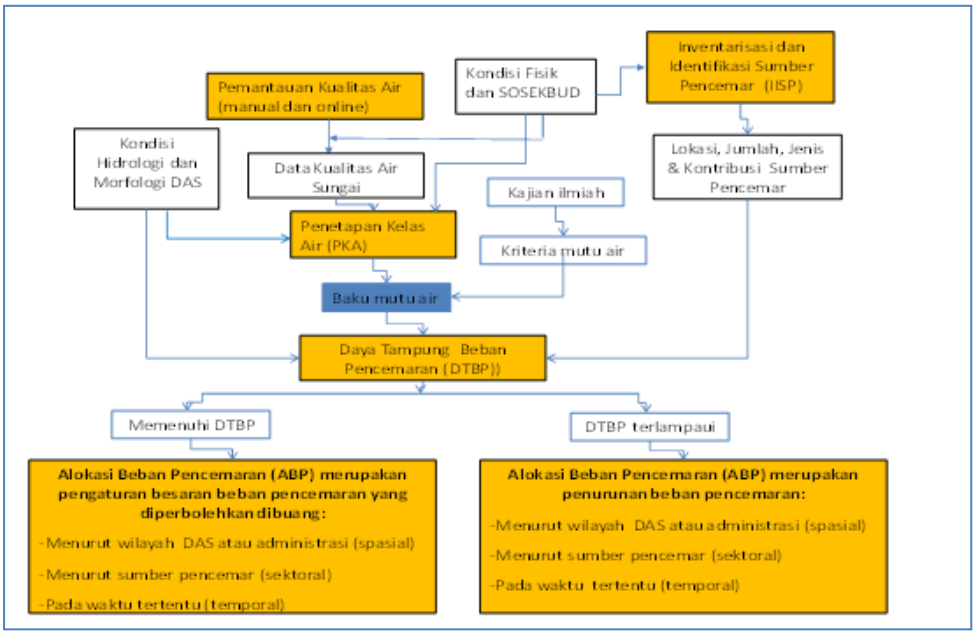

Gambar 2.70. Tahapan Perhitungan Beban Pencemaran

Perhitungan DTBP Sungai Baturusa dilakukan dengan menggunakan parameter BOD sebagai parameter kunci karena parameter tersebut dapat mewakili kondisi kualitas air Sungai Baturusa sekaligus juga mewakili sumber pencemar dominan yang ada di DAS Baturusa. Disamping itu, berdasarkan data seri hasil pemantauan parameter BOD di Sungai Baturusa hampir selalu memenuhi baku mutu air kelas 1 dan 2. Parameter TSS tidak dimodelkan dalam kajian ini, karena hasil pemantauan kualitas air di seluruh titik sampling di Sungai Baturusa menunjukan parameter tersebut selalu memenuhi mutu air kelas 1. Disamping itu parameter TSS tidak mewakili keseluruhan sumber pencemar yang berada di DAS Baturusa.

Keluaran dari kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar adalah beban pencemar yang diperkirakan dihasilkan oleh sumber pencemar di DAS Baturusa yang berpotensi masuk dan mencemari Sungai Baturusa. Karena semua kecamatan di Kab.Baturusa masuk di DAS Baturusa, maka perhitungan beban pencemar dilakukan di seluruh kecamatan. Beban pencemaran yang diperoleh dalam kajian ini dapat dilihat menurut kecamatan serta berdasarkan jenis sumber pencemar. Parameter pencemar air yang digunakan adalah BOD dengan mempertimbangkan

karakteristik air limbah seluruh sumber pencemar yang terdapat di DAS Baturusa. Disamping itu, BOD juga merupakan parameter kunci yang digunakan untuk menganalisis kualitas air Sungai Baturusa.

Kajian alokasi beban pencemaran Sungai Baturusa ini menggunakan model model kualitas air QUAL2Kw (Version 5.1), yaitu model kualitas air yang termasuk ke dalam stream dan river model. Namun demikian model kualitas air QUAL2Kw (Version 5.1) merupakan model yang berbasis stream, yang tidak memodelkan bahan pencemar sebelum masuk ke badan air, sehingga bahan pencemar tidak dapat ditelusuri sumbernya. Maka dalam studi ini model QUAL2Kw (Version 5.1) dikombinasikan dengan hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar yang berpotensi masuk ke Sungai Baturusa.

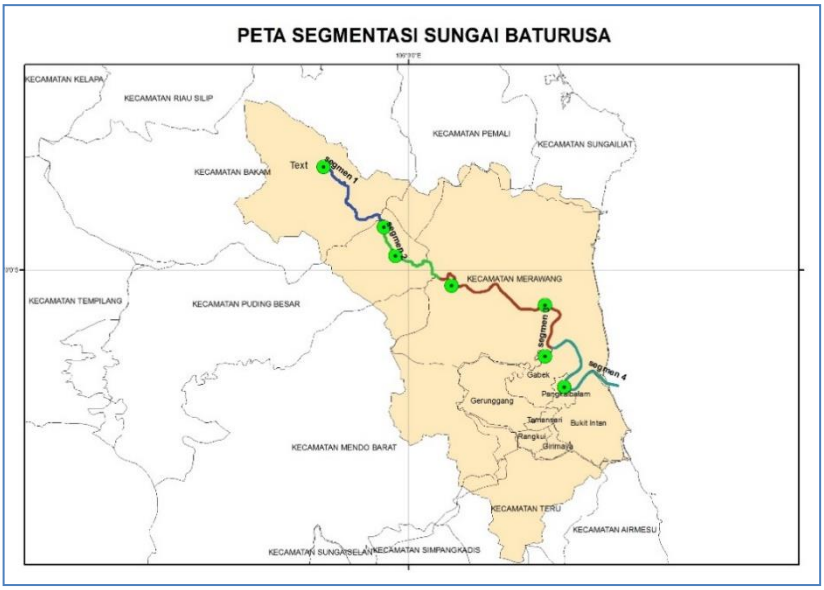

Gambar 2.71. Peta Segmentasi Sungai Baturusa

Dari hasil pengolahan data daya tampung S. Baturusa didapatkan bahwa sungai Baturusa menampung beban BOD sebesar 626,576 kg/hari. Secara simulasi beban pencemaran maksimal menurut baku mutu kelas 2, S. Baturusa masih mempunyai kemampuan menampung beban BOD sebesar 235,2672 Kg/Hari atau 25% dari kapasitas maksimal.

Sumber beban pencemar yang masuk ke dalam Sungai Baturusa merupakan gabungan baik dari point source maupun Non Point source secara langsung ataupun melalui anak sungai serta melalui saluran air

terbuka di DAS Baturusa yang akhirnya akan bermuara ke dalam Sungai Baturusa.

Perhitungan daya tampung beban pencemaran di S. Buding dilakukan berdasarkan status mutu air yang dimiliki dan hasil pemantauan kualitas air. Status mutu air dihitung berdasarkan dua metode yaitu Storet dan Indeks pencemaran. Berdasarkan perhitungan Metode Storet, menggunakan baku mutu air kelas 2 status mutu air Sungai Buding tahun 2018 di beberapa lokasi termasuk dalam kategori cemar sedang. Sedangkan berdasarkan perhitungan Indeks Pencemaran menunjukkan hasil 83 % memenuhi dan 17 % cemar ringan.

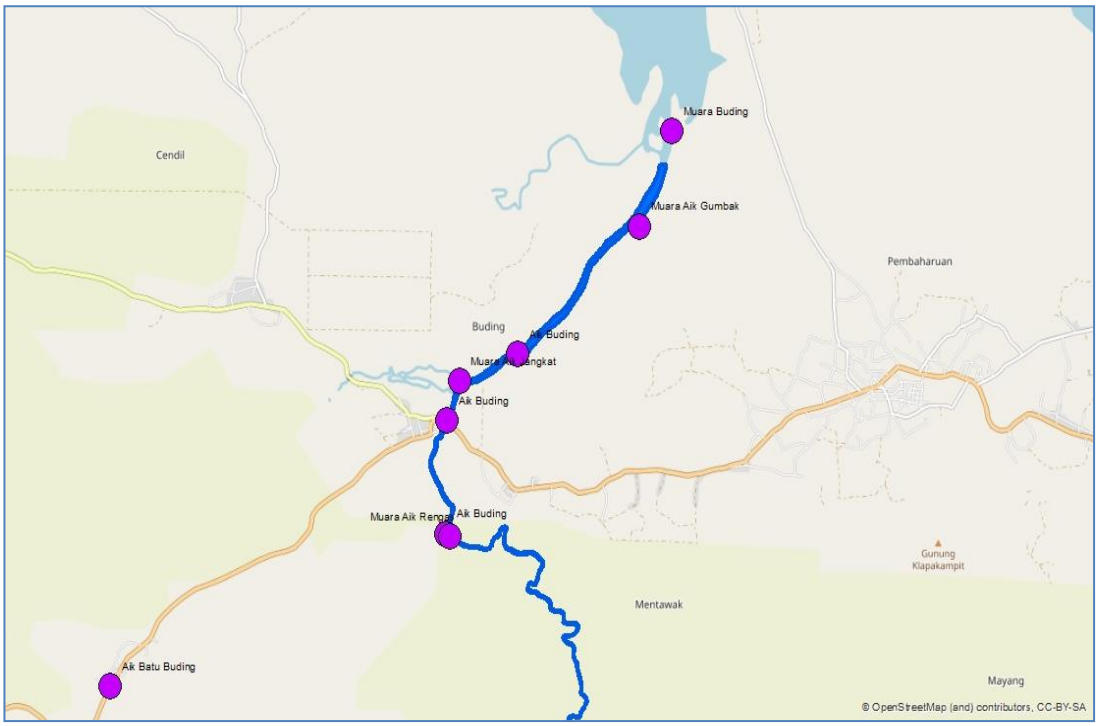

Gambar 2.72. Segmentasi Sungai Buding

Berdasarkan data pemantauan sungai dengan dibandingkan menggunakan baku mutu air kelas 2, DTBP Sungai Buding yang berarti jumlah beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan masuk ke sungai agar sungai tersebut masih memenuhi kelas 2 untuk parameter BOD, adalah sebesar 3465,8 kg/hari. Beban pencemaran eksisting yang ada di S. Buding untuk parameter BOD adalah 3234,5 kg/hari. Berdasarkan analisis tersebut

dapat diperkirakan bahwa total beban pencemar BOD yang masih tersedia di Sungai Buding dan memenuhi mutu air kelas 2 adalah sebesar 231,3 kg/hr.

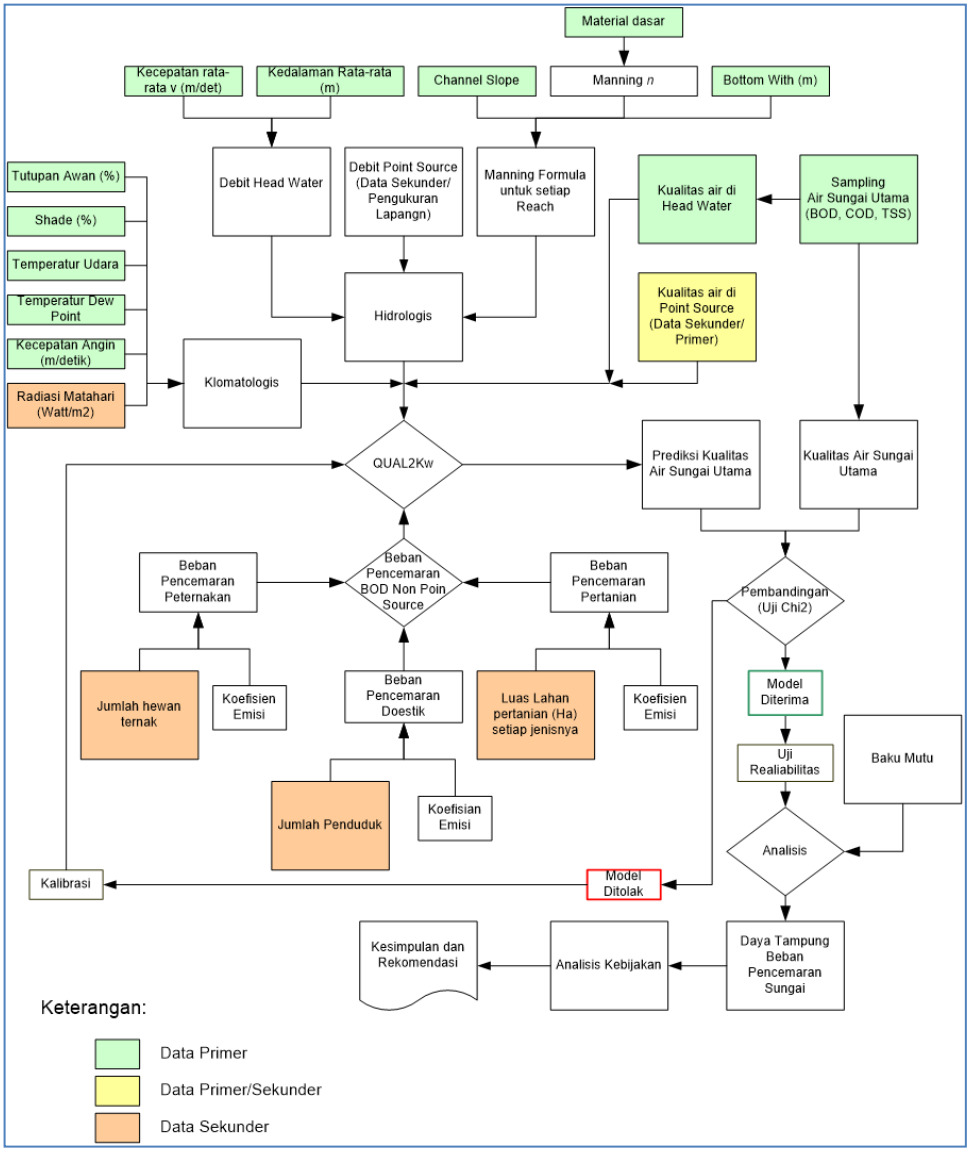

Gambar 2.73. Alur Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil kajian daya tampung diatas, maka perijinan usaha/industri baru dapat disesuaikan dengan kemampuan sungai dalam menampung beban pencemaran disesuaikan dengan beban yang akan di hasilkan oleh kegiatan industri tersebut.

Gambar 2.74. Perhitungan beban pencemaran sungai dan pengambilan sampel air sungai

Sebagai bentuk respons untuk mengurangi beban pencemaran sungai selain sungai Buding dan Baturusa, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 juga telah melakukan perhitungan daya tampung beban pencemaran sungai Rangkui. Perhitungan beban pencemaran ini untuk mengetahui kondisi eksisting beban pencemran sungai dan dilakukan pemodelan beban pencemaran dengan melakukan pemodelan Qual2K sehingga diketahui beban pencemaran yang ada dan upaya-upaya penurunan beban pencemaran yang mungkin dapat dilakukan.

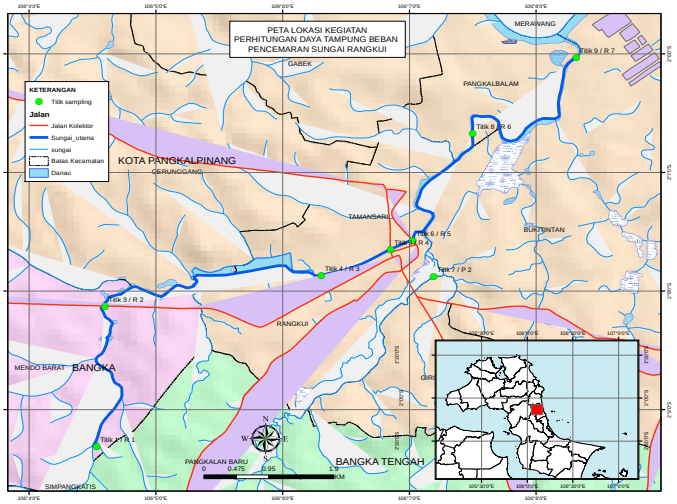

Gambar 2.75. Peta Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai dan Titik Sampling

Tabel II.24. Nilai TSS Hasil Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai

Sumber Pencemar	Lokasi (Km)			TSS		Selisih	Keterangan	
	Titik	Up	Down	DT	BP			
S. Pedindang Hilir (Gudang Padi)	4.98			1.80	19.30	17.50	Kelebihan Beban	972%
NPS1 (Mendo Barat)		12.00	11.00	1.06	0.72	-0.34	Dapat menerima beban	-32%
NPS2 (Gerunggang dan Rangkui)		10.00	7.00	0.00	-1.08	-1.08		-
NPS3 (Tamansari dan Rangkui)		6.50	5.70	0.74	1.49	0.75	Kelebihan Beban	101%
NPS4 (Tamansari dan Rangkui)		5.50	5.25	0.45	1.04	0.58	Kelebihan Beban	128%
~~NPS5 (Tamansari, Bukitintan dan Rangkui)~~	-	~~5.20~~	~~5.00~~	~~0.00~~	~~0.11~~	~~0.11~~		
~~NPS6 (Tamansari, Bukitintan dan Pangkalbalam)~~	-	~~4.90~~	~~3.00~~	~~0.07~~	~~19.44~~	~~19.51~~		
				4.06	21.46	17.40	Dapat menerima beban	429%

Keterangan:
DT = Daya Tampung (Ton/jam)
BP = Beban Pencemaran (Ton/jam)
NPS = Sumber Pencemar Non Titik

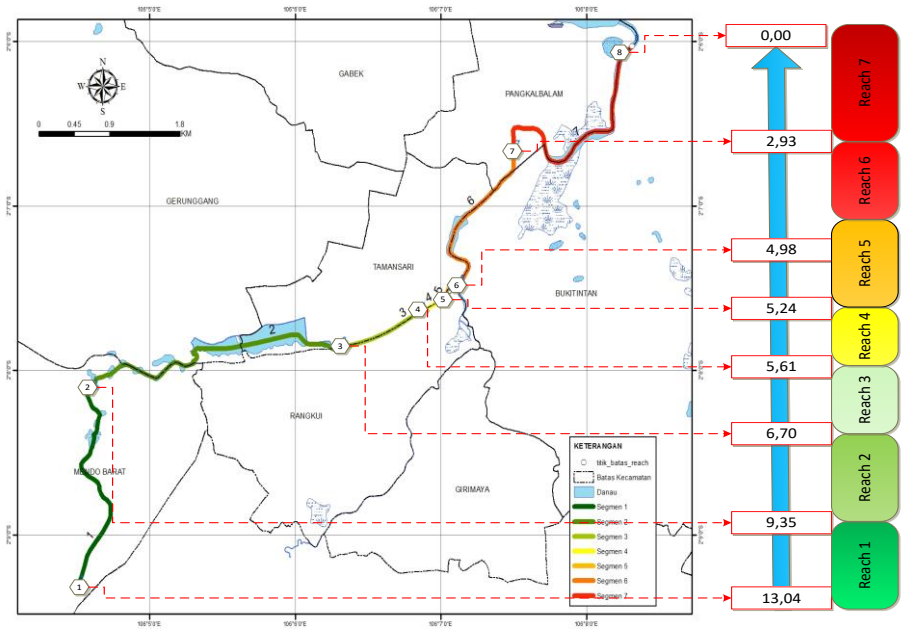

Gambar 2.76. Segmentasi Sungai Utama Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran

Berdasarkan Tabel TSS di atas Secara keseluruhan beban pencematran TSS yang harus diturunkan dari sumber-sumber pencemar yang ada di wilayah tersebut sebesar 429%. Pada anak Sungai Pedindang beban pencemaran TSS harus diturunkan hingga 972%. Di Kecamatan Tamansari dan Rangkui pada segmen NPS3 harus menurunkan beban pencemaran TSS sebanyak 101% dan di NPS4 harus menurunkan beban pencemar sebesar 128%

Tabel II.25. Nilai COD Hasil Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai

Sumber Pencemar	Lokasi (Km)			COD		Selisih	Keterangan	
	Titik	Up	Down	DT	BP			
S. Pedindang Hilir (Gudang Padi)	4.98			0.90	1.17	0.27	Kelebihan Beban	30%
NPS1		12.00	11.00	0.50	0.43	-0.07	Dapat menerima beban	-14%
NPS2		10.00	7.00	0.27	0.15	-0.12	Dapat menerima beban	-45%
NPS3		6.50	5.70	0.20	0.08	-0.12	Dapat menerima beban	-59%
NPS4		5.50	5.25	0.23	0.45	0.22	Kelebihan Beban	92%
~~NPS5~~	-	~~5.20~~	~~5.00~~	~~0.00~~	~~-0.05~~	~~-0.05~~	~~Dapat menerima beban~~	
~~NPS6~~	-	~~4.90~~	~~3.00~~	~~0.07~~	~~-0.89~~	~~-0.96~~	~~Dapat menerima beban~~	
Total				2.11	2.29	0.18	Kelebihan Beban	8%

Berdasarkan perhitungan Kelebihan Beban Pencemaran COD terjadi di anak Sungai Pedindang Hilir sebesar 0,27 Ton/jam. Agar Sungai Pedindang memenuhi baku mutu kelas II maka sumber-sumber pencemar di wilayah tersebut mengurangi beban pencemaran COD sebesar 30%. Kelebihan Beban Pencemaran COD juga terdapat di NPS4 yang berada di Kecamatan Rangkui dan Tamansari yaitu sebesar 0,22 Ton/jam. Penurunan beban pencemaran COD sebesar 92% diperlukan di daerah itu agar Sungai Rangkui pada segmen tersebut memenuhi baku mutu kelas II. Dengan pengelolaan sumber-sumber pencemar pada kedua wilayah tersebut

diharapkan 8% beban pencemaran COD yang harus diturunkan di Sungai Rangkui dapat dicapai.

Upaya-upaya sebagai bentuk respons penurunan daya tampung beban pencemaran sungai terus dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya upaya ini sebagai bentuk respons untuk perbaikan kualitas air harus dilakukan secara terpadu tidak terbatas dari batasan administrasi kabupaten dan kota.

2. Kegiatan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Sungai

Dalam usaha meningkatkan kualitas sungai yang telah melampaui daya tampung sungai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan rencana aksi pengendalian sungai. Rencana aksi ini merupakn tindak lanjut dari kegiatan perhitungan beban pencemaran pada S. Rangkui. Pada hasil perhitungan beban pencemaran S. Rangkui pada tahun 2018 didapatkan data bahwa kualitas air sungai telah berada di atas kemampuan daya tampung sungai. Kualitas sungai ini menurun disebabkan oleh limbah domestik yang masuk ke dalam sungai. Hal ini tercermin dari beban pencemar BOD dan COD yang tinggi.

Selain secara kualitas sungai, Sungai Rangkui merupakan sungai yang menjadi sumber bencana banjir pada kota Pangkalpinang. Tekanan pada sungai ini adalah penambangan illegal pada hulu sungai sehingga menyebabkan terjadinya laju sedimentasi yang tinggi pada setiap segmen sungai. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir pada saat debit air naik di musim hujan.

Hasil identifikasi permasalahan dominan yang terjadi pada Sungai Rangkui adalah limbah domestik dan laju sedimentasi yang tinggi.

Tabel 2.26. Program dan Kegiatan Pengendalian Kualitas Air

PERMASALAHAN	PROGRAM	KEGIATAN	STAKEHOLDER
Air Limbah industri melebihi baku mutu	Pengawasan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pelaksanaan penegakan hukum,	Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar, Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, Reuse dan recycle air limbah	Dinas Deperindag, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota tergantung lokasinya
Tidak memiliki IPAL	Pengawasan dan pembinaan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pelaksanaan penegakan hukum, Pembangunan IPAL Individu atau Kawasan	Pembangunan IPAL , Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar, Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, penegakan hukum, Reuse dan recycle air limbah	Dinas Deperindag, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota tergantung lokasinya
IPAL ada, operasi tidak sempurna	Pengawasan dan pembinaan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, pelaksanaan penegakan hukum	Pembangunan IPAL , Penerapan izin berbasis alokasi beban pencemar, Pemasangan alat pemantauan air limbah otomatis dan kontinyu, penegakan hukum, Reuse dan recycle air limbah,	Dinas Perindag, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota tergantung lokasinya
Regulasi belum optimal	Penyusunan regulasi yang memadai,Sosialisasi, pelibatan masyarakat	Sosialisasi, kampanye, monitoring oleh instansi DLH kab/kota, monitoring oleh masyarakat	Dinas Sosial, DLH Prov, KLHK, DLH Kab/Kota

Rencana aksi yang dilakukan dalam memulihkan kualitas sungai rangkui adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penghijauan di hulu sungai yang rusak akibat penambangan liar.
b. Melakukan pembangunan SITU sebagai antisipasi laju sedimentasi yang tinggi.
c. Melakukan perawatan sungai dengan melakukan pengerukan sungai secara berkala.
d. Memaksimalkan IPAL komunal yang telah ada dengan kapasitas 80 SR di sepanjang Sungai Rangkui, sehingga mengurangi beban pencemar yang berasal dari sumber domestik.
e. Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sungai dalam menjaga kebersihan sungai.

3. Meningkatkan Pemantauan Kualitas Air Sungai

Program pemantauan sungai yang berkala telah dilakukan secara periodik dan dilakukan secara terus menerus oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil dari program pemantauan kualitas air adalah untuk mendapatkan data yang menggambarkan kualitas sungai yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks Kualitas Air (IKA) yang didapatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 adalah 69.29.

Indeks Kualitas Air ini dihitung dengan menggunakan metode WQI index dengan 9 parameter kunci. Perhitungan ini merupakan nilai IKA dari 2 sungai besar yang melintasi 2 kabupaten/kota. Jika nilai IKA untuk 11 sungai yang dipantau dimasukkan ke dalam perhitungan maka nilai IKA akan turun menjadi 61.16. Jika perhitungan IKA menggunakan metode IKA NSF yang menggunakan 10 parameter kunci maka IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada indeks 76.81 untuk seluruh titik pantau pada 11 sungai dengan 3 kali periode pengambilan sampel.

Gambar 2.77. Kegiatan Sampling Air Sungai

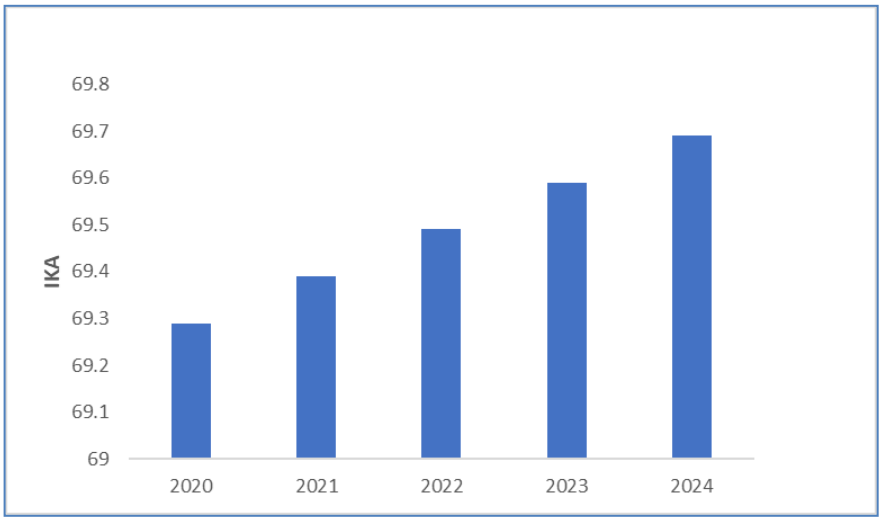

Gambar 2.78. Target IKA (P3KLL, KLHK)

Untuk mencapai dan mempertahankan nilai IKA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan penambahan titik pantau pada sungai ataupun kolong/embung. Nilai IKA merupakan gambaran kualitas air yang berada pada suatu daerah, sehingga semakin banyak titik sampling dan data yang digunakan dalam perhitungan IKA maka akan semakin menggambarkan keadaan kualitas air pada daerah tersebut.

4. Pengawasan Terhadap Ketaatan Perusahaan Terhadap Pengelolaan Limbah Cair

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup melakukan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan HIdup dilakukan terhadap 85 (Delapan Puluh Lima) Perusahaan dan/atau Usaha dari berbagai sektor usaha, seperti sekor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, jasa dan sektor agro industry serta tambak udang. Kegiatan pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tehadap 5 (lima) aspek yang terdiri dari aspek dokumen lingkungan (perizinan lingkungan hidup dan pelaporan pengelolaan pemantauan lingkungan), aspek pengendalian pencemaran air (PPA), aspek pengendalian pencemaran udara (PPU), aspek pengelolaan limbah B3 (PLB3) dan aspek pengendalian kerusakan lahan (PKL) untuk kegiatan pertambangan. Hasil dari kegiatan ini berupa

ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama kualitas air terus dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga meminimalkan pencemaran yang terjadi.

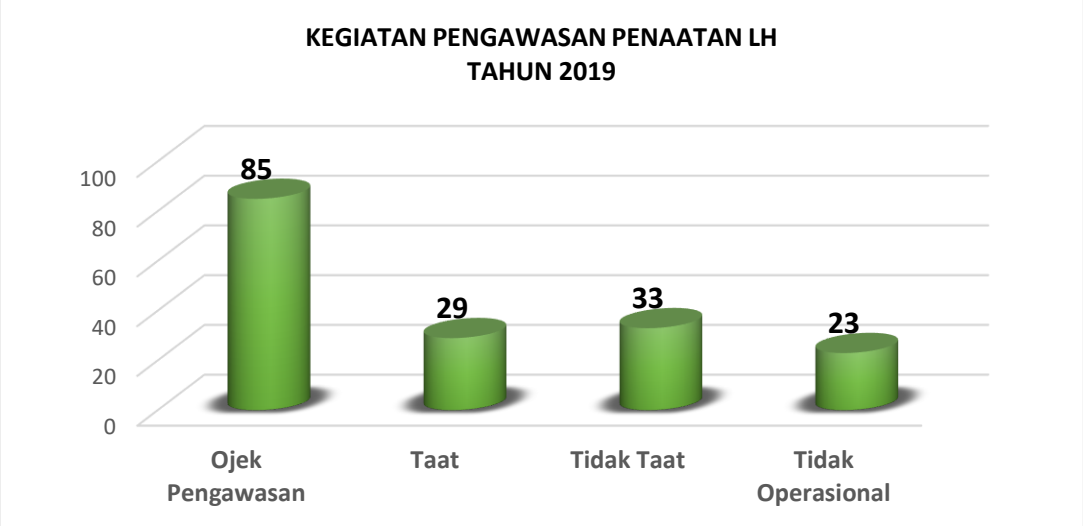

Gambar 2.79. Tingkat Ketaatan Perusahaan Pada Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan terhadap pertambangan dan aktivitas pertambangan juga terus di lakukan, meminimalkan run-off dari aktivitas pertambangan terutama aktivitas pertambangan illegal mutlak dilakukan sebagai respons mengurangi kerusakan aliran sungai dan sedimentasi sungai. Berbagai kegiatan Rehabilitasi lahan, penghijauan harus dilakukan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mekanisme pengawasan dan rehabilitasi lahan terus melakukan kebiatan- kegiatan penghijauan dan reboisasi untuk mengurangi efek dari sedimentasi dan penurunan kualitas sungai akibat aktivitas pertambangan.

Pembukaan) Kegiatan Pengawasan Penaatan LH di PT.DS Jaya Abadi Kota Pangkalpinang	Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan PT. Bumi Hero Perkasa di Kab.Belitung Kegiatan Penambangan Bijih Timah
Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan PT. Istana Kawi Kencana di Kab.Bangka Kegiatan Hutan Tanam Industri	Objek Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup terkait Aspek Pengelolaan Limbah B3

Gambar 2.80. Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan Hidup

Beberapa upaya lain untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air sungai dari hulu ke hilir yang telah dilakukan, di antaranya:

- Tindakan pencegahan pencemaran dengan merekomendasikan sirkulasi air yang tertutup pada kegiatan-kegiatan industri saat masih

pada tahap penilaian dokumen lingkungan sebelum mendapatkan izin lingkungan;

- Pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan atas komitmen pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan (RKL-RPL);
- Penegakan hukum dan penerapan pemberian sanksi ataupun *reward* kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ataupun berhasil melaksanakan pengelolaan lingkungan;
- Usaha reboisasi atau penghijauan serta pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mengurangi intensitas dan volume erosi, serta menjaga ketersediaan air tanah;
- Membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah regional yang sedang berproses hingga saat ini;
- Melakukan intensifikasi pertanian.

Pada tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan Pergub No. 34 Tahun 2019 yang direvisi dengan Pergub No. 32 Tahun 2020 tentang pedoman pengendalian pencemaran air bagi usaha dan kegiatan budidaya tambak udang. Perkembangan usaha tambak udang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahu 2019 sangat massif, sehingga diperlukan kebijakan yang mengatur baik limbah dari tambak udang yang akan dibuang ka badan air atau ke laut. Selain sebagai bentuk respons tidak hanya dikeluarkan peraturan Gubernur namun Dinas Lingkungan Hidup membentuk tim untuk mengecek keberadaan Tambak Udang secara spasial dengan menggunakan Citra resulusi sangat tinggi untuk kepentingan perizinan serta untuk peroses pengawasan lingkungan sehingga potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

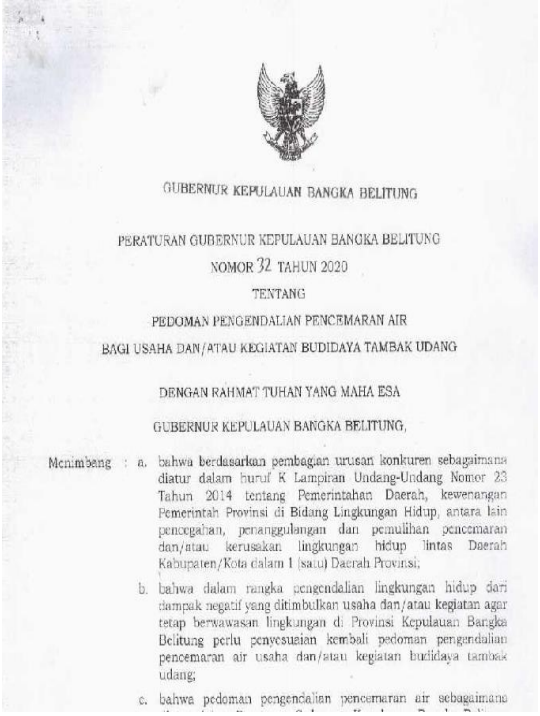

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BUDIDAYA TAMBAK UDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembagian urusan konkuren sebagaimana diatur dalam huruf K Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup, antara lain pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

b. bahwa dalam rangka pengendalian lingkungan hidup dari dampak negatif yang ditimbulkan usaha dan/atau kegiatan agar tetap berwawasan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu penyesuaian kembali pedoman pengendalian pencemaran air usaha dan/atau kegiatan budidaya tambak udang;

c. bahwa pedoman pengendalian pencemaran air sebagaimana

Gambar 2.81. SK Gubernur No.32 Tahun 2020 Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha atau /Kegiatan Tambak Udang

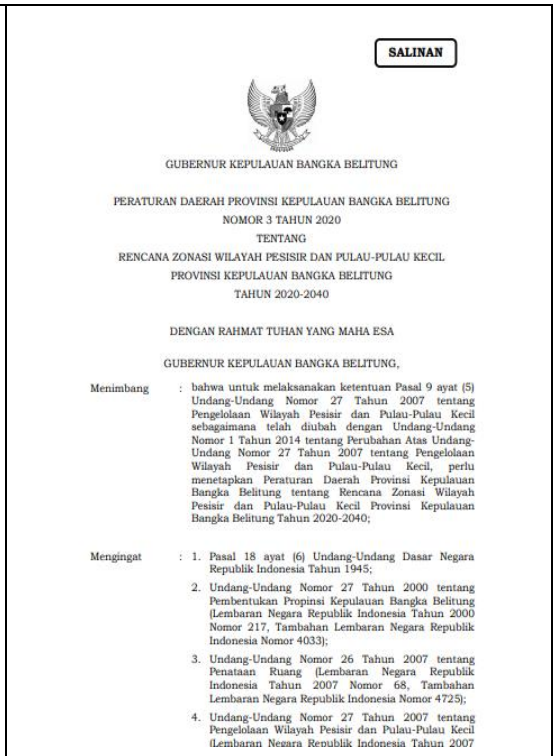

SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Gambar 2.82. Perda No. 3 Tahun 2020 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rona Awal
GE 25 Juni 2015

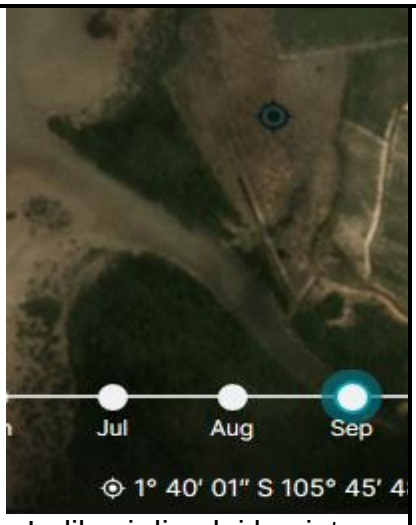

Indikasi dimulai kegiatan
PS September 2017

Kenampakan visual terkini
PS April 2020

Gambar 2.83. Contoh Pengecekan Spasial Dinas Lingkungan Hidup Terhadap usaha Tambak Udang

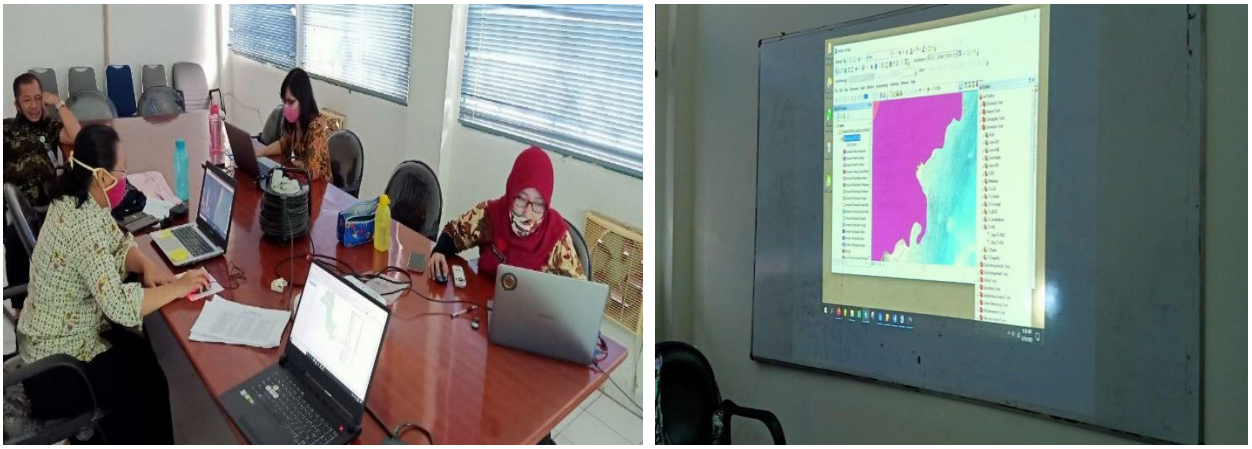

Gambar 2.81. Tim pengecekan Spasial Dinas Lingkungan Hidup Terhadap usaha Tambak Udang

Pada tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengesahkan Perda RZWP3K pada tanggal 27 April 2020, dengan disahkannya Perda RZWP3 K ini merupakan respons Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sisi kebijakan dalam memberikan izin pemanfaatan ruang laut, sehingga bisa meminimalkan kerusakan lingkungan, terutama pengaturan kegiatan-kegiatan pertambangan yang ada di laut serta alokasi ruang laut lainnya. Memastikan penerapan izin lokasi perairan merupakan salah satu respons yang dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.3. Kualitas Udara

Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk menajamin kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi mahluk hidup lainnya. Kualitas udara perkotaan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Penyediaan sumber energi listrik yang menggunakan bahan bakar fosil dan aktivitas kendaraan merupakan faktor utama penyumbang polutan yang berupa gas.

Kualitas udara dihitung menggunakan parameter gas yang dominan yaitu SO_2 dan NO_2. Selain zat pencemar berupa gas, terdapat juga polutan di udara yang berupa partikulat. Partikulat dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan ukuran partikulat di udara. *Total Suspended Partikulat* (TSP) merupakan partikel debu yang memiliki ukuran dalam rentang 1 -500 mikron. *Partikulat Matter* 10 (PM 10) adalah partikulat yang memiliki ukuran lebih kecil dari 10 mikron, sedangkan PM 2.5 adalah partikulat yang memiliki ukuran 2.5 mikron.

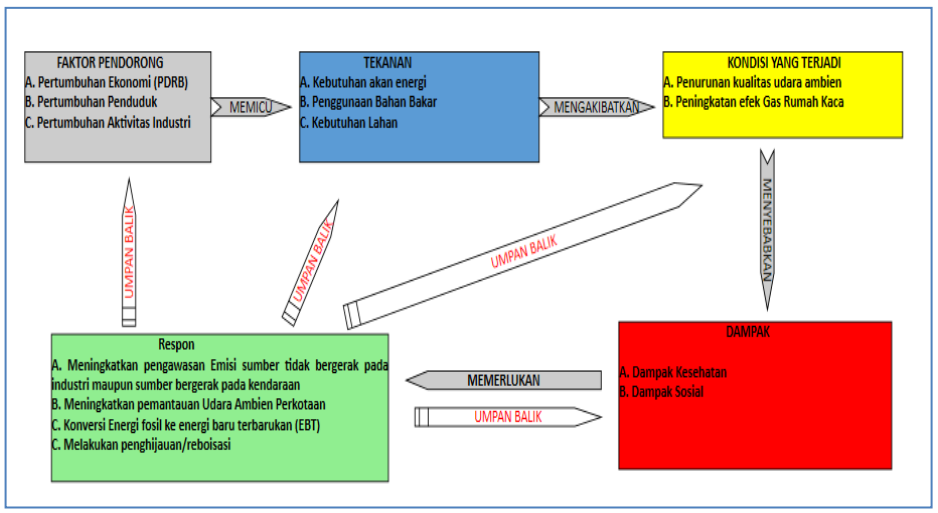

Gambar 2.85. Analisis DPSIR Kualitas Udara

II.3.1 Driving Force

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan laju penduduk merupakan faktor utama dalam *drive* terhadap kualitas udara perkotaan. Aktivitas

manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup berupa transportasi dan energi telah menghasilkan efek samping berupa emisi sisa pembakaran yang masuk ke dalam udara ambien, sehingga mutu udara ambien akan turun kedalam tingkatan tertentu yang mengakibatkan udara ambien tidak dapat lagi memenuhi fungsinya.

Kegiatan transportasi merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia. Pola penggunaan kendaraan pribadi menjadi aktivitas rutin yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Emisi yang dikeluarkan oleh hasil pembakaran mesin kendaraan dapat berupa CO_2, HC, SO_2, dan Oksidan (O_3). Emisi yang dihasilkan sangat tergantung dengan efisiensi mesin kendaraan, jenis bahan bakar, serta jarak yang digunakan dalam menggunakan kendaraan.

Meningkatnya ekonomi akan mendorong munculnya jenis kegiatan industri baru. Peningkatan jumlah industri ini akan turut menyumbangkan emisi yang berasal dari hasil pembakaran sesuai dengan jenis bahan bakar yang digunakan. Gas utama yang dihasilkan pada pembakaran mesin produksi adalah gas SO_2, dan NO_2. Tingkat produksi yang tinggi akan menghasilkan beban pencemaran emisi yang tinggi juga, sehingga dapat menekan kualitas udara ambien perkotaan.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar merupakan salah satu *drive* yang dapat memunculkan masalah polusi udara. Hasil pembakaran akan menghasilkan gas CO_2 dan N_2O. Gas ini merupakan penyumbang utama bagi gas rumah kaca (GRK). Peningkatan konsentrasi GRK pada udara ambien dapat menyebabkan kenaikan temperatur udara, sehingga menurunkan kualitas kehidupan manusia.

II.3.2 Pressure

Tekanan terhadap kualitas udara ambien pada lingkungan terjadi karena adanya peningkatan pada penggunaan transportasi, penggunaan bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik, serta pembakaran

dari mesin produksi pada industri. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan memberikan tekanan terhadap perubahan tata guna lahan dengan penambahan panjang jalan dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Perluasan Panjang jalan ini akan menekan perubahan fungsi lahan, selain dari fasilitas pendukung akan menghasilkan limpasan air.

Peningkatan akan kebutuhan sumber energi listrik akan memberikan tekanan dengan penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama dalam menghasilkan listrik.

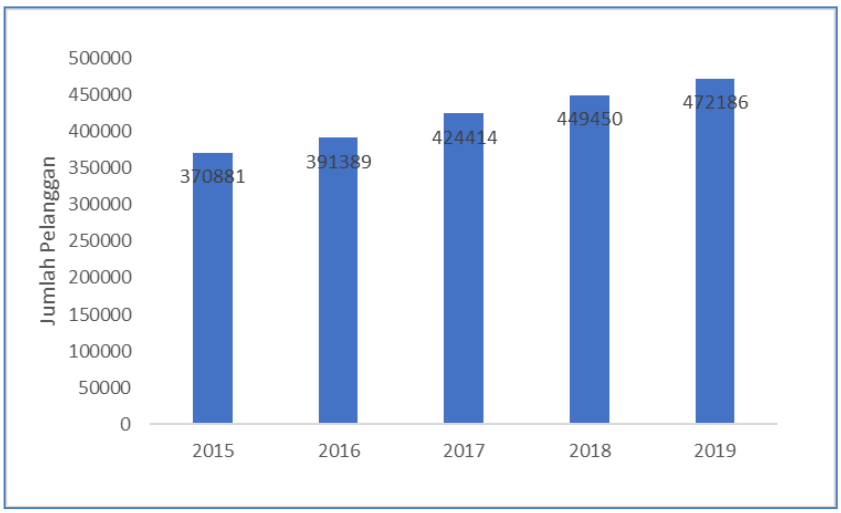

Gambar 2.86. Jumlah Pelanggan Listrik (BPS, 2020)

Berdasarkan data pelanggan listrik pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi peningkatan tingkat sambungan listrik sebesar 4% pada tahun 2019. Hal ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk yang berkisar 4% dan peningkatan PDRB Provinsi bangka Belitung sebesar 3.8% pada tahun 2019.

II.3.3 State

Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan indikator kualitas udara ambien perkotaan. IKU pada umumnya dihitung berdasarkan lima gas pencemar utama yaitu, SO_2, NO_2, O_3, CO serta partikulat baik TSP, PM10, PM2.5. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 3 lokasi pada

masing masing kabupaten/kota yang mewakili wilayah industri, perumahan, dan transportasi menggunakan metode *manual active sampler*.

Perhitungan IKU di Indonesia menggunakan baku standar kualitas udara berdasarkan *EU Directives*. Standar *EU Directives* berdasarkan kebutuhan udara ambien untuk standar kesehatan manusia.

Tabel II.27. Standar EU Directive

No	Jenis Pollutant	Target Value/Limit Value
1	PM_{10}	40 µg/m^3/Tahun
2	$PM_{2.5}$	20 µg/m^3/Tahun
3	O_3	> 80 µg/m^3/8 Jam
4	SO_2	20 µg/m3/Tahun
5	NO_2	40 µg/m^3/Tahun
6	PM_{10} daily	50 µg/m^3
7	Benzena	5 µg/m^3/Tahun
8	CO	-

Jumlah titik pemantauan udara ambien secara manual aktif dilakukan dengan durasi sampling 24 jam dengan jumlah titik minimal 24/tahun atau 2 kali pemantauan setiap bulan. Berdasarkan lampiran III Permen LH No. 12 Tahun 2010 jika pemantauan dilakukan kurang dari 24 titik maka akan menghasilkan margin error antara 47% - 48%.

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan DLH Provinsi Bangka Belitung pada setiap kabupaten/kota memberikan hasil yang baik. Hal ini mencerminkan masih baiknya kualitas udara ambien perkotaan pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IKU provinsi dihitung dari IKU masing-masing Kabupaten dan kota setelah diperoleh data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO2 dan ***NO_2*** dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten dan kota dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman,

transportasi. dengan metode manual aktif portable. Pada tahun 2019 IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 81,54.

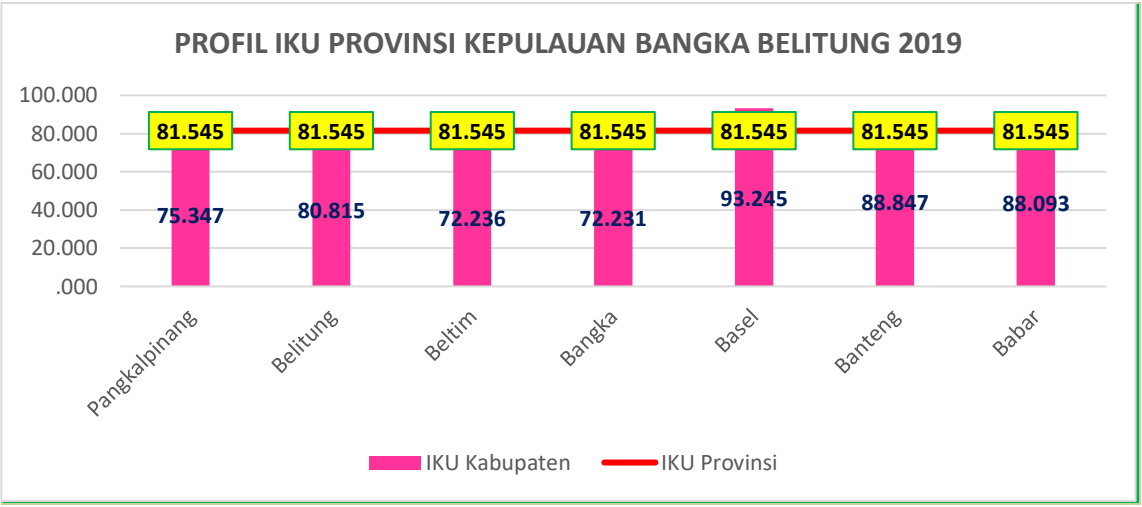

Gambar 2.87. Profil Nilai IKU per Kab/Kota

Berdasarkan keterwakilan data pada pemantauan kualitas udara ambien yang dilaksanakan pada tahun 2019, satu lokasi sampling tidak dilakukan sesuai dengan permenLH No 12 tahun 2010, yaitu lokasi sampling komersil dan jika dilihat jumlah data minimum hari pemantauan pada pemantauaan kualitas udara ambien 2019 masih terdapat kekurangan data, untuk manual aktif diperlukan data 24 hari pertahun (2 kali perbulan setiap pemantauan 24 jam) hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran.

Nilai IKU pada gambar diatas berdasarkan nilai parameter SO_2 dan NO_2. Gas pencemar SO_2 dihasilkan dari emisi pembakaran yang menggunakan bahan bakar minyak diesel. Gas NO_2 merupakan gas yang berasal dari system pembakaran yang tidak sempurna. Penghasil gas NO_2 terbesar berasal dari pembakaran mesin kendaraan. Peningkatan volume gas SO_2 dan NO_2 di dalam udara ambien akan menurunkan kualitas udara yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

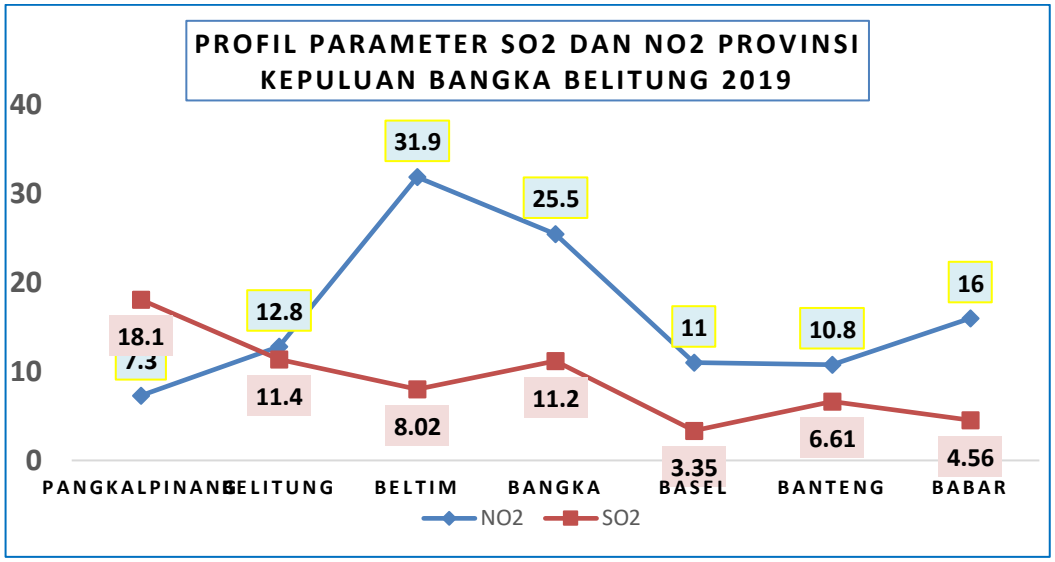

Gambar 2.88. Profil Sebaran SO_2 dan NO_2

II.3.4 Impact

Sebaran gas SO2 dan NO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran mesin industri, pembangkit listrik dan kendaraan bermotor merupakan sumber polutan utama yang menjadi zat pencemar pada udara ambien perkotaan. Tekanan penambahan beban pencemaran akan menurunkan kualitas udara perkotaan, sehingga akan menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat.

Hasil *sampling* yang dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan *manual sampling* ataupun berdasarkan data yang dihasilkan *passive sampler* kualitas udara ambien perkotaan masih berada pada kondisi baik. Sesuai dengan data sebaran nilai IKU per Kabupaten/Kota, ada 3 kabupaten atau 4.28% yang memiliki nilai IKU diatas rata rata Provinsi Kepulauan Bangka Bangka. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara 3 kabupaten ini yaitu, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Bangka Tengah memiliki kualitas udara sangat baik daripada kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gas *Nitrogen Oxide* (NO) dan *Nitrogen dioxside* (NO_2) adalah dua oksida oksigen yang paling penting dalam pencemaran udara. Di dalam analisa laboratorium kedua gas tersebut dapat disatukan menjadi NO_x. Gas

NO_2 merupakan gas yang lebih berbahaya bagi kesehatan daripada NO, karena NO bersifat iritasi. Gas NO merupakan produk samping utama dari proses pembakaran yang timbul dari reaksi pada suhu tinggi antara N_2 dan O_2. Gas NO juga dapat dihasilkan dari proses oksidasi yang terjadi pada pembakaran dengan menggunakan bahan bakar batubara dan minyak. Pada setiap pembakaran menggunakan bahan bakar minyak akan mengasilkan residu nitrogen sebesar 0.2 – 0.8% NO, sedangkan batu bara akan menghasilkan 1 – 2% NO. Efek samping dari polutan NO dan NO_2 yang terdapat di udara ambien adalah terjadinya iritasi pada mata dan kulit dan apabila terjadi konsentrasi yang tinggi maka akan menyebabkan sesak nafas, terutama bagi manusia yang memiliki gangguan asma.

Gas SO_2 terbentuk dari oksidasi sulfur yang terkandung dalam bakan bakar termasuk pada jenis industri yang menggunakan bahan baku belerang. Emisi antropogenik SO_2 merupakan jenis emisi yang dihasilkan dari cerobong pabrik/*stationer point source*. Pembakaran industri meliputi seluruh boiler, pemanas dan tungku yang digunakan sebagai utilitas terutama pada industri pembangkit dan peleburan (*smelter*). Kadar SO_2 di udara dapat menyebabkan beberapa dampak kesehatan pada manusia. Gas SO_2 di udara dapat dengan cepat berubah menjadi asam karena adanya intensitas uap air, kandungan asam pada udara ambien dapat menyebabkan iritasi pada hidung serta akan masuk menyerang ke dalam system pernapasn manusia. Kondisi asam di udara ambien dapat memicu terjadinya hujan asam yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit manusia.

Secara umum peningkatan kadar konsentrasi polutan yang berbentuk gas akan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di udara sehingga secara langsung akan meningkatkan temperatur udara perkotaan.

II.3.5 *Respons*

Berdasarkan *driving force, pressure, state dan impact* yang terjadi maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

melakukan langkah langkah untuk mencegah penurunan kualitas udara perkotaan. Laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk yang menjadi *drive* utama dalam menekan kualitas udara perkotaan tidak dapat dihentikan akan tetapi dapat dikelola dengan baik.

1. Kegiatan Pemantauan Udara Ambient Kabupaten/Kota

Data hasil pemantauan merupakan sumber utama untuk mengetahui kualitas udara perkotaan. Kegiatan pemantauan secara manual akan tetap dilakukan secara periodik dengan menambah titik pemantauan agar terpenuhinya titik minimum yang disyaratkan di dalam PERMEN LH No. 12 Tahun 2010 yaitu 24 titik pemantauan yang mewakili kondisi industri, perumahan, perkantoran dan jalan. Pemantauan dilakukan dengan durasi 24 jam atau 2 kali setiap bulan dalam satu tahun. Penambahan titik sampling dan pemerataan waktu sampling akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kualitas udara ambien perkotaan.

Gambar 2.89. Kegiatan Sampling Udara Ambien

Berdasarkan perhitungan nasional dengan menggunakan *passive sampler* indeks kualitas udara IKU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki indeks 91. Data berdasarkan hasil pengukuran data manual

sampling IKU memiliki indeks 81.54 Indeks IKU dengan nilai 91 termasuk dalam kategori BAIK.

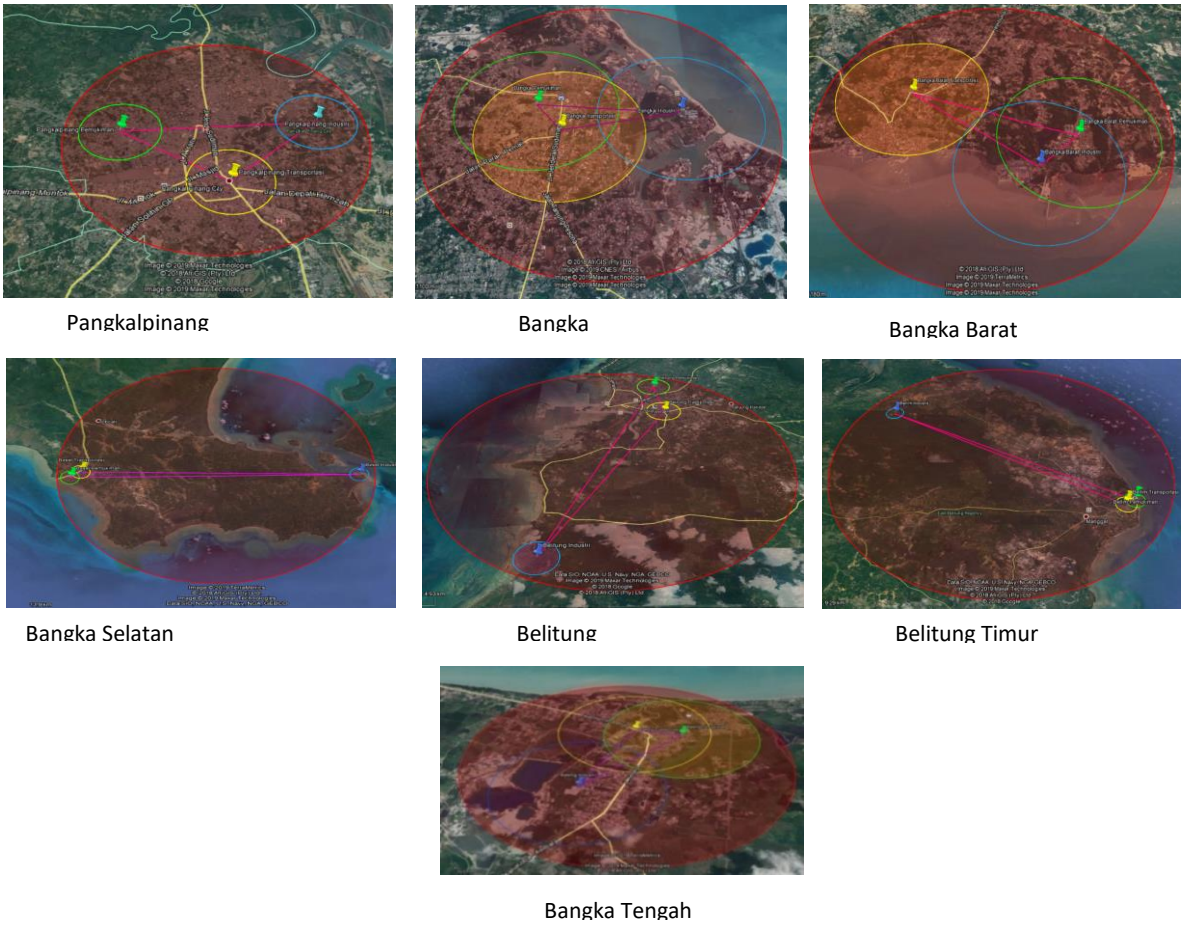

Gambar 2.90. Visualisasi titik pengambilan sampel kualitas udara

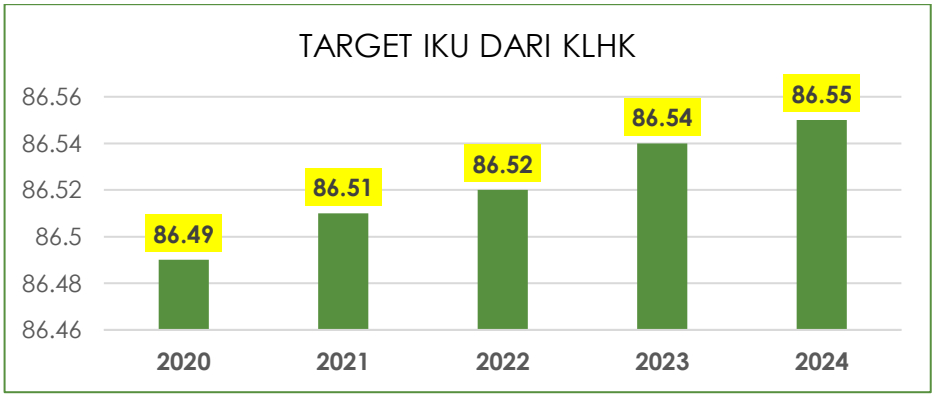

Gambar 2.91. Target IKU (P3KLL, KLHK)

Jika mengacu pada target yang dikeluarkan oleh KLHK untuk pencapaian IKU tahun 2020-2024 maka berbagai respons dan *effort* harus

disiapkan secara baik terutama mempertahankan kualitas udara yang sekarang ditambah dengan upaya perbaikan kualitas udara, Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih berada dalam kondisi baik, jika dilihat trend data historis Indeks Kualitas Udara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun masih dalam keadaan baik, namun harus tetap dilakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi tersebut. Ada berbagai upaya intervensi untuk tetap menjaga kualitas udara dalam kondisi baik diantaranya:

1. Pengendalian Pencemaran udara Sumber Bergerak

   Pengendalian pencemar udara sumber bergerak dapat dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan diantaranya:

   a. Manajemen transportasi dan pengadaan transportasi masal;
   b. Kegiatan uji emisi kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara berkala;
   c. Membuat regulasi daerah terkait emisi gas buang kendaraan bermotor.

2. Pengendalian Udara Sumber Tidak Bergerak

   Ada berbagai upaya yang harus tetap dilaksanakan dalam pengendalian sumber udara tidak bergerak diantaranya:

   a. Pengawasan ketaatan pelaku usaha terkait kewajiban pengelolaan emisi sumber tidak bergerak yang dapat dilakukan dengan mekanisme pengawasan rutin dan berkala, maupun kegiatan PROPER (Program Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan lingkungan Hidup);
   b. Membuat regulasi (peraturan daerah) terkait pengendalian pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.

Selain upaya-upaya diatas, pemantauan kualitas udara secara kontinyu terus dilakukan. Meminimalkan resiko terhadap kebakaran hutan juga merupakan upaya yang harus dilakukan mengingat kebakaran hutan merupakan faktor yang dapat menurunkan kualitas udara. Peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau serta penggunaan bahan bakar serta

energi ramah lingkungan merupakan pilihan yang harus dipertimbangkan kedepan untuk meminimalkan potensi penurunan kualitas udara.

2. Kegiatan Pengawasan Emisi Industri

Untuk mempertahankan kualitas udara ambien perkotaan diperlukan usaha pemantauan secara terus menerus terhadap cerobong industri. Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk meningkatkan ketaatan industri yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengelola emisi udara yang dihasilkan.

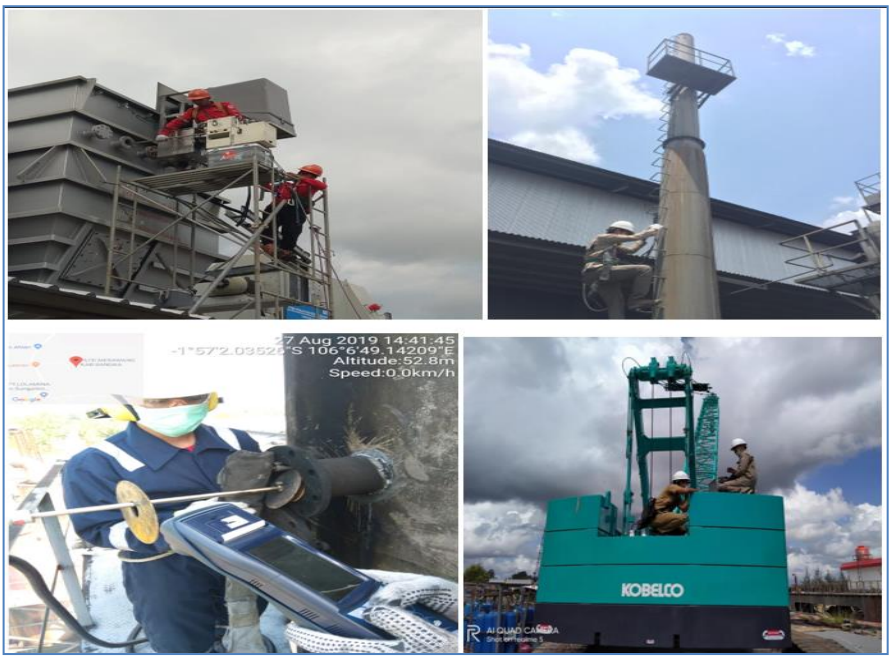

Gambar 2.92. Kegiatan Sampling Emisi Industri

Kegiatan pengawasan terhadap industri ini khususnya terhadap emisi cerobong ditekankan pada kesesuaian metode teknis pengukuran emisi secara manual dan fasilitas sampling yang ada di cerobong. Kesesuaian metode dan cara sampling yang baik akan memberikan gambaran data beban pencemaran yang dihasilkan semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya. Data beban pencemaran yang didapatkan dari laporan setiap industri dapat dijadikan tolak ukur beban pencemaran gas di udara ambien perkotaan.

II.4. Risiko Bencana

Disamping keindahan dan kekayaan alam yang dimiliki, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk daerah rawan bencana. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2020, diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki risiko bencana dengan tingkat rendah untuk bencana epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi. Namun memiliki risiko bencana tingkat tinggi untuk bencana Banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, kekeringan dan tanah longsor.

Tabel II.28. Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenis Bencana	Tingkat risiko
1.	Banjir	Tinggi
2.	Cuaca ekstrim	Tinggi
3.	Epidemi dan wabah penyakit	Rendah
4.	Gelombang pasang dan abrasi	Tinggi
5.	Gempa bumi	Rendah
6.	Kebakaran hutan dan lahan	Tinggi
7.	Kegagalan teknologi	Tinggi
8.	Kekeringan	Tinggi
9.	Tanah longsor	Tinggi

Sumber: Dok. Kajian risiko bencana Tahun 2016 – 2020, BPBD Prov. Kep. Babel

Secara geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikelilingi oleh laut dimana perkotaan terletak sangat dekat dengan pantai, cukup rendah dari muka air laut dan dilalui oleh sungai-sungai besar sehingga potensi permasalahan yang dihadapi adalah permasalahan yang berhubungan dengan air. Selain itu kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebagian besar merupakan dataran rendah, datar dan terbuka namun

memiliki daerah penyangga antara lain Mangkol, Maras, Menumbing, Gunung Lalang, Permisan dengan elevasi 0-500 MDPL sehingga mempunyai resiko cukup tinggi terhadap cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor dan ROB. (BPKH,2017)

Gambar 2.93. Tren Kejadian Bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 10 Tahun Terakhir

Sumber: DIBI, 2019 (https://bnpb.cloud/dibi/laporan5a)

Sejarah kebencanaan yang terjadi di suatu wilayah penting untuk diketahui agar dapat memproyeksikan jenis risiko bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut. Hal ini dimaksudkan juga agar pemerintah dapat menyusun upaya mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Dari gambar diatas (gambar II.4.2) DIBI mencatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010 – 2019) kejadian banjir dan kebakaran hutan dan lahan mendominasi jumlah kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kejadian banjir terparah terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 11 kejadian banjir dengan korban meninggal 3 orang, luka - luka 4 orang dan terdampank mengungsi sebanyak 25.058 jiwa dan menyebabkan rumah terendam sebanyak 1.672 unit. Sedangkan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan terparah terjadi pada tahun 2018 dengan 73 jumlah kejadian. Berbeda dengan bencana banjir yang hampir setiap tahun terjadi, bencana kebakaran hutan dan lahan sepanjang 10 tahun terakhir hanya terjadi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan frekuensi kejadian di tahun 2019.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2020 terhadap jenis bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor banjir bandang cuaca ekstrim kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit serta kegagalan teknologi yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2015 (Tabel II.24), bencana gempa bumi dan epidemi (wabah penyakit) memiliki luas bahaya (dalam satuan ha) rendah, tingkat risiko sedang dan tanpa merusak lingkungan. Sedangkan bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi serta kegagalan teknologi memiliki risiko tinggi dengan kerusakan terhadap lingkungan diperkirakan juga tinggi. Risiko kerusakan lingkungan tergolong sangat luas pada beberapa jenis bencana, seperti bencana banjir dapat mencapai 482.133 ha, bencana kekeringan seluas 519.258 ha, kebakaran hutan seluas 381.025 ha, bencana akibat kegagalan teknologi mencapai luas 300.186 ha, tanah longsor seluas 13.581 ha, dan risiko kerusakan lingkungan oleh gelombang ekstrim dan abrasi sebesar 25.007 ha (RPPLH, 2018).

Tabel II.29. Kajian Risiko Bencana Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Bencana	Bahaya			Kerusakan Lingkungan			Risiko Kelas
	Rendah	**Sedang**	**Tinggi**	**Kelas**	**Luas (Ha)**	**Kelas**	
Gempa bumi	1.642.423	-	-	Rendah	-	-	Sedang
Banjir	-	1.334.018	225.891	Sedang	482.133	Tinggi	Tinggi
Tanah longsor	10.300	13.160	18.839	Tinggi	13.581	Tinggi	Tinggi
Banjir bandang	76	159	365	Tinggi	280	Tinggi	Tinggi
Cuaca ekstrim	-	1.642.423	-	Sedang	-	-	Tinggi
Kekeringan	353.075	1.178.542	110.805	Sedang	519.258	Tinggi	Tinggi
Kebakaran hutan dan lahan	55.344	549.538	710.764	Tinggi	381.025	Tinggi	Tinggi
Gelombang ekstrim dan abrasi	95	74.436	-	Sedang	25.007	Tinggi	Tinggi
Epidemi dan wabah penyakit	1.642.423	-	-	Rendah	-	-	-
Kegagalan teknologi	-	-	198.798	Tinggi	300.186	Tinggi	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kepulauan Bangka Belitung BPBD (2015-2020) dalam RPPLH, 2018.

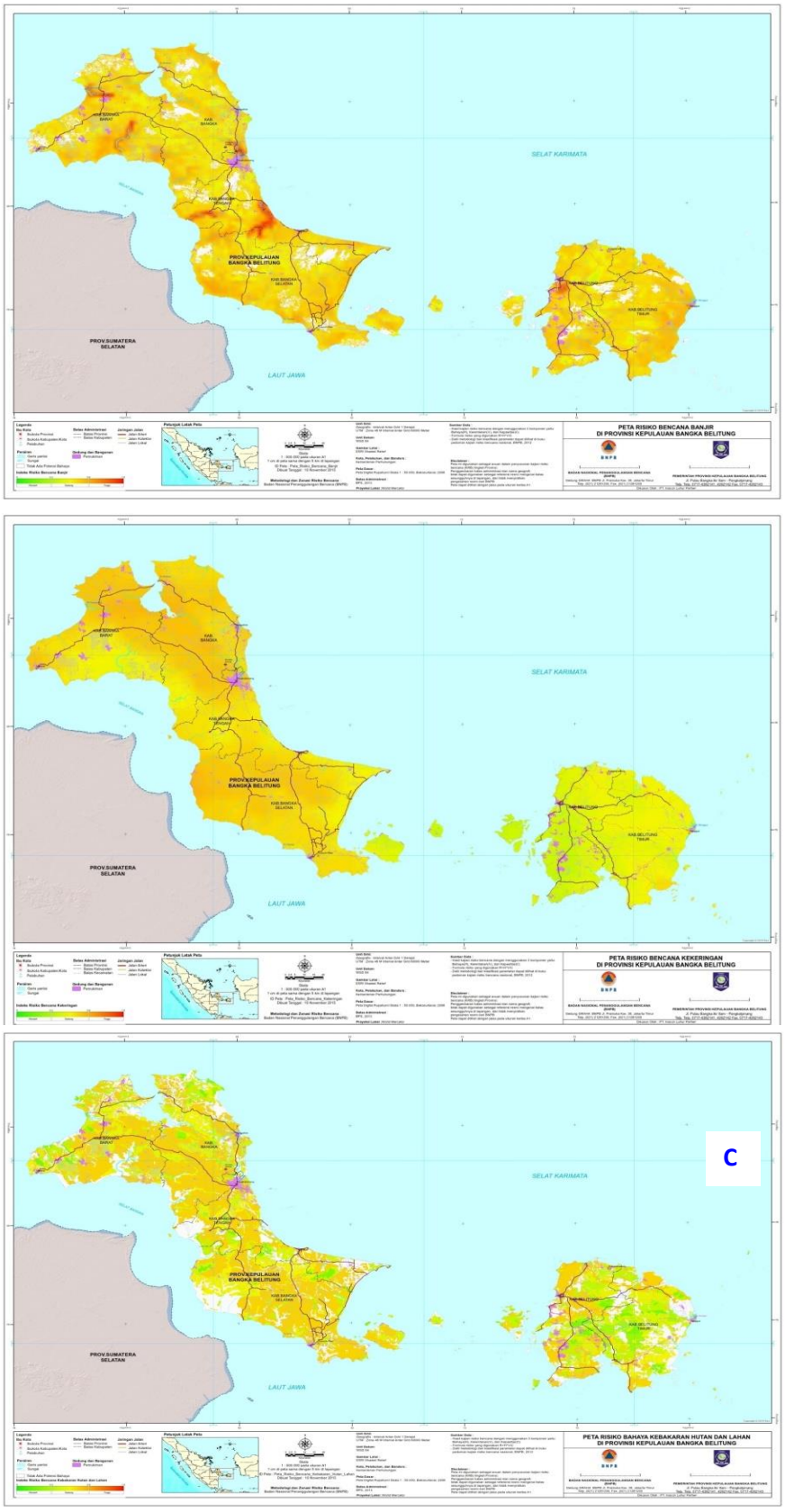

Gambar 2.94. Peta Risiko Bencana : (A) Banjir, (B) Kekeringan dan (C) Kebakaran Hutan dan Lahan (Kajian Risiko Bencana Kepulauan Bangka Belitung 2015-2020)-BPBD

a.

b.

c.

d.

Gambar 2.95. Foto-foto kejadian banjir di Muntok, Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018
Sumber : a. Bangka Tribun News b. Merdeka c. Radar Bangka d. Okenews, diakses pada tanggal 30 April 2019

Tabel II.30. Kejadian Bencana Alam di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kejadian Bencana	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Korban	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Korban	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Korban
Angin Puting Beliung/Angin Kencang	11 (5,21%)	111 KK, 4 meninggal dunia	40 (14,44%)	236 KK dan 4 korban jiwa	10 (3,17%)	165 KK
Banjir Bandang/Rob/Bah	143 (67,77%)	19.019 KK, 3 meninggal dunia	95 (34,30%)	1.607 KK (22.104 orang terdampak)	34 (10,79%)	294 KK (5.724 orang terdampak)
Di laut/Pantai/Gelombang/Ombak	6 (2,84%)	18 jiwa, 7 meninggal dunia	15 (5,42%)	45 orang	12 (3,81%)	54 orang termasuk 10 korban jiwa
Di Sungai	0	0	2 (0,72%)	3 korban jiwa	1 (0,32%)	5 orang termasuk 1 korban jiwa
Longsoran Tanah/Batu/Pasir	8 (3,79%)	20 jiwa termasuk 10 orang meninggal dunia	5 (1,81%)	16 orang termasuk 6 korban jiwa	7 (2,22%)	22 orang termasuk 8 korban jiwa
Kebakaran Hutan/Lahan	1 (0,47%)	0	66 (23,83%)	0	175 (55,56%)	0
Kebakaran Rumah/Perumahan	11 (5,21%)	8 KK	21 (7,58%)	19 KK	40 (12,70%)	61 orang termasuk 3 orang tewas
Kebakaran Gedung Pemerintahan	0	0	4 (1,44%)	1 orang	1 (0,32%)	0
Kebakaran Pasar/Ruko, Gedung, Gudang, Kantor/Sekolah Swasta, Warung/Toko dan Lainnya	7 (3,32%)	10 jiwa termasuk 1 orang meninggal dunia	7 (2,53%)	6 orang	15 (4,76%)	9 orang termasuk 2 korban jiwa
Kabut Asap	0	0	0 (0,00%)	0	0 (0,00%)	0
Gempa Bumi	15 (7,11%)	0	16 (5,78%)	0	16 (5,08%)	0
Bencana Sosial	2 (0,95%)	2 jiwa	1 (0,36%)	9 orang termasuk 1 korban jiwa	0 (0,00%)	0
Tersambar Petir	7 (3,32%)	24 jiwa termasuk 2 orang meninggal dunia	5 (1,81%)	1 korban jiwa, 6 luka berat-sedang, 18 luka ringan	4 (1,27%)	13 orang termasuk 7 korban jiwa

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Bencana banjir dirasakan mulai sering terjadi pada Tahun 2015 lalu yang dapat disebabkan oleh iklim tropis membentuk kondisi bulan basah sewaktu musim hujan dan bulan kering yang relatif seimbang, ketika musim hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan bencana banjir pada daerah dataran rendah. Pasang laut yang tinggi dan perubahan iklim menyebabkan potensi kejadian bencana banjir semakin tinggi. Bencana banjir besar tercatat terjadi pada Bulan Februari 2016 menimpa Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka. Penyebab banjir yaitu curah hujan sangat tinggi dan kondisi pendangkalan sungai oleh penambangan. Jumlah korban jiwa sebanyak 3 orang, dan yang mengungsi 17.829 keluarga (SLHD, 2016). Bencana banjir Tahun 2017 di Kabupaten Belitung Timur menimbulkan kerugian sangat besar mencapai angka lebih dari 300 miliar rupiah (DIKPLHD, 2017).

Sepanjang Tahun 2018 tercatat beberapa kejadian bencana pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

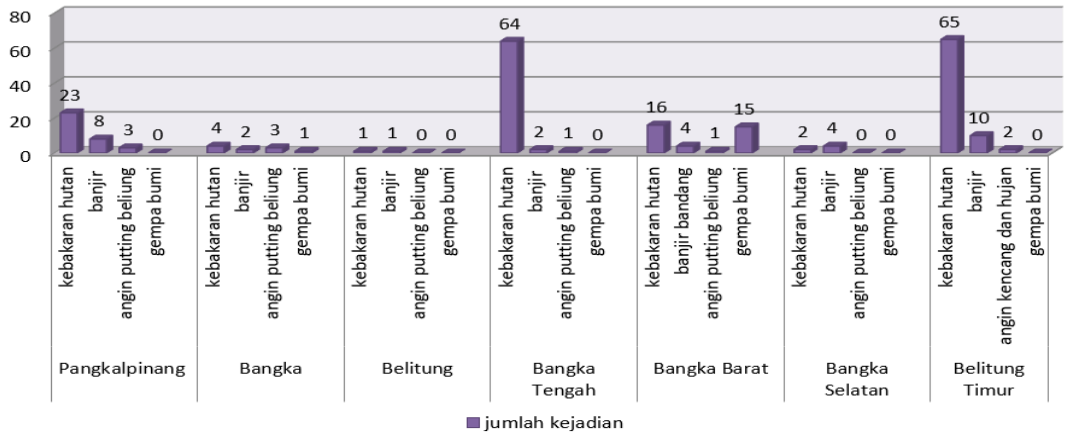

Gambar 2.96. Jumlah Kejadian Bencana di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

II.4.1. *Driving Forces*

Faktor pemicu kejadian bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama adalah kegiatan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (RPPLH, 2018). Berdasarkan kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 (Gambar 2.50), kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir menempati dua tempat teratas pada kejadian bencana di kabupaten/kota. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kepulauan Bangka Belitung 2015-2020 keduanya juga merupakan bencana risiko kelas tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan pada Tahun 2018 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai daerah ke-6 yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan (BMKG, 2018).

Tahun 2018 Kabupaten Belitung Timur mengalami angka kejadian kebakaran hutan dan lahan paling tinggi yaitu 65 kejadian (Gambar 2.50) yang umumnya disebabkan oleh ulah manusia yang sengaja membakar hutan untuk lahan perkebunan namun kemudian menjalar ke kawasan hutan (BPBD Beltim, 2018). Aktivitas membakar hutan dan lahan merupakan salah satu cara membuka ladang baru oleh masyarakat hutan di wilayah Bangka Belitung setelah dilakukan penebangan pepohonan pada lahan yang sudah ditentukan luasnya, seperti yang dilakukan oleh orang Lom di Dusun Pejam Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka (Cholillah, 2017).

Kebakaran hutan dan lahan merupakan pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang berdiri, *log* (kayu bulat), tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon (Saharjo, 2003 dalam Syaufina, dkk, 2018).

Kejadian banjir besar pada data yang dihimpun oleh Balai Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Baturusa Cerucuk, 2018 terjadi pada tanggal 11 Maret 2018 di Kec. Muntok, Kab. Bangka Barat dengan daerah terdampak meliputi Desa Air Putih, Kel. Sungai Daeng, Kel. Tanjung, Kel. Belo Laut serta Kel. Sungai Baru (Kampung Culong, Kampung Ulu, Kampung Belo, Tanjung dan Pasar Muntok). Penyebabnya curah hujan yang terjadi selama dua hari ditambah dengan gelombang pasang serta adanya penyempitan aliran akibat sedimentasi, pembangunan permukiman maupun sarana lain sebagai pendukung kehidupan manusia.

Tabel II.31. Luasan penutupan lahan tahun 2018 - 2019

Nama Tutupan Lahan	Tahun 2018	Tahun 2019
Hutan Lahan Kering Primer	600,38	531,44
Hutan Lahan Kering Sekunder	113.935,84	101.828,41
Hutan Mangrove Primer	33.797,41	33.647,10
Hutan Rawa Primer	596,05	550,92
Belukar	295.434,88	298.425,98
Perkebunan	194.548,81	234.031,00
Pemukiman	33.174,72	35.462,04
Lahan Terbuka	75.630,75	75.368,09
Savana	7.080,02	7.055,60
Tubuh Air	5.598,81	5.652,41
Hutan Mangrove Sekunder	33.391,82	32.403,31
Hutan Rawa Sekunder	44.621,88	44.539,89
Belukar Rawa	58.005,27	54.421,47
Pertanian Lahan Kering	58.111,86	54.938,62
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	556.362,38	530.689,02
Sawah	1.762,78	1.762,78
Tambak	628,38	628,38
Bandara	146,08	257,27
Transmigrasi	2.416,80	2.416,80
Pertambangan	144.783,81	146.426,21
Rawa	10.964,11	10.556,12
Total Luasan	**1.671.592,85**	**1.671.592,85**

Sumber: BPKH wilayah XIII, 2020

Dari data luasan penutupan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 – 2019, pada beberapa tutupan lahan terjadi peningkatan antaralain perkebunan, pertambangan, permukiman dan bandara, sedangkan rata - rata luasan hutan dan pertanian belukar mengalami penurunan luasan.

Alih fungsi lahan hutan di bagian hulu DAS menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, jasa, dan perkebunan dapat mengakibatkan

menurunnya kemampuan lahan untuk menahan air, sehingga air hujan akan langsung dialirkan ke hilir DAS (Utomo dan Supriharjo, 2012). Alih fungsi lahan tersebut menyebabkan erosi pada lahan yang selanjutnya terendapkan (sedimentasi) pada saluran irigasi, sungai dan danau sehingga mengakibatkan pendangkalan yang berujung pada penurunan kapasitas daya tampung air dapat menjadi pemicu terjadinya banjir dan tanah longsor.

Gambar 2.97. Kondisi penutupan lahan di hulu
Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2017

Gambar 2.98. Kondisi Penutupan Lahan Di Tahura, Mangkol
Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang , 2017

Gambar 2.99. Kondisi kebun sahang di lahan dengan kelerengan curam
Sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2017

Aktivitas pertambangan timah terutama Tambang Inkonvensional sebagai salah satu penyebab alih fungsi hutan/lahan yang tidak tepat di wilayah sungai di Bangka karena memasuki wilayah hutan bahkan hingga ke permukiman masyarakat (Kementerian PUPR, 2016). Akibat pertambangan timah rakyat, air sungai menjadi keruh akibat naiknya konsentrasi *Total Suspended Solid* (TSS) karena digunakan untuk pencucian bijih timah, menyebabkan daerah aliran sungai (DAS) mengalami pendangkalan akibat sisa lumpur bekas galian penambangan yang dibuang ke sungai selanjutnya akan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir (Yuliana, 2016).Perubahan penggunaan lahan menjadi salah satu penyebab banjir karena perubahan tutupan lahan hutan menjadi lahan terbangun dan terbuka dapat berdampak pada peningkatan koefisien air limpasan yang berpotensi meningkatkan luas banjir apabila sistem infrastruktur drainase yang tersedia tidak mampu menampung.

II.4.2. *Pressures*

Menurut BPDASHL Baturusa Cerucuk keadaan atau kondisi lahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada lahan yang relatif rendah sekaligus datar (Gambar 2.4.3) namun memiliki kawasan penyangga dataran tinggi menumbing, Maras, Mangkol, Permisan serta Gunung Lalang dengan elevasi 0-500 MDPL sehingga rawan terjadi banjir dan rob.

2.

Gambar 2.100. Kondisi Lahan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Sumber : BPDASHL, 2017

Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, banjir yang kerap terjadi menyebabkan kerugian ekonomi sehingga tetap harus ditanggulangi. Pada umumnya penyebab banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah curah hujan tinggi, pasang air laut (rob), perubahan penggunaan lahan serta terganggunya aliran air akibat aktivitas tambang (BPDASHL, 2017). Senada, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bangka Tahun 2016 berpendapat bahwa Intensitas hujan yang tinggi di daerah hulu WS Bangka kerap menyebabkan banjir karena daerah tersebut merupakan dataran rendah serta merupakan pertemuan sungai dengan anak-anak sungainya. Selain itu pada daerah hilir WS Bangka kerap terjadi banjir yang disebabkan

oleh pasang surut muka air laut, sehingga pada saat muka air laut naik air sungai yang akan masuk ke laut akan terganggu.

Daerah potensi banjir terbesar terjadi di Kota Pangkalpinang dengan luas genangan 8.266,7 Ha. Baharuddin dan Sidarto, 1995 dalam penelitian yang dilakukan oleh Narulita dan Marganingrum, 2017 dengan studi kasus DAS Cerucuk, Pulau Belitung, peningkatan hujan maksimum harian dan jumlah hari hujan sekecil apapun dapat menyebabkan banjir karena tipe geologi dominasi batuan granit yang kedap air. Oleh karena itu air hujan yang jatuh di lokasi ini tidak bisa masuk sebagai cadangan air tanah dan menyebabkan akuifer air tanah dalam tidak berkembang di daerah ini. Akuifer air tanah di Pulau Belitung hanya pada kedalaman 3 – 5 m dari permukaan tanah, tidak ada air tanah dalam (Pryambodo dan Hasanudin, 2013 dalam Narulita dan Marganingrum, 2017).

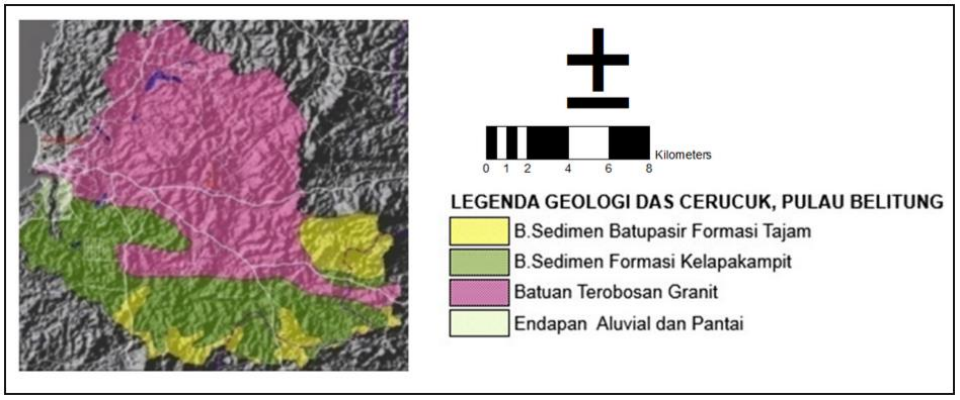

Sumber : Baharuddin dan Sidarto, 1995 dalam Narulita dan Marganingrum, 2017

Gambar 2.101. Peta Geologi DAS Cerucuk

II.4.3. *States*

Sebagai *states* yaitu kondisi lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan keadaan daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang telah terpetakan dalam Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem yang disusun pada tahun 2018. Telah diketahui bahwa sesungguhnya ekosistem mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan

dan perlindungan dari beberapa tipe bencana, khususnya bencana alam (DDDTLH, 2018).

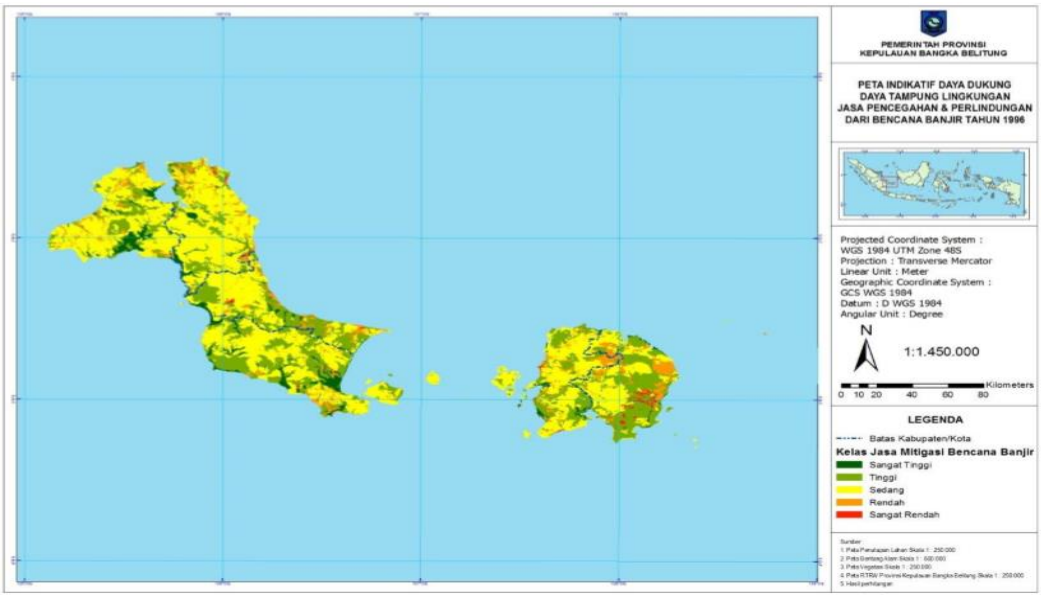

Gambar 2.102. Tampilan Peta Indikatif DDDT Jasa Pencegahan Bencana Banjir Tahun 2016

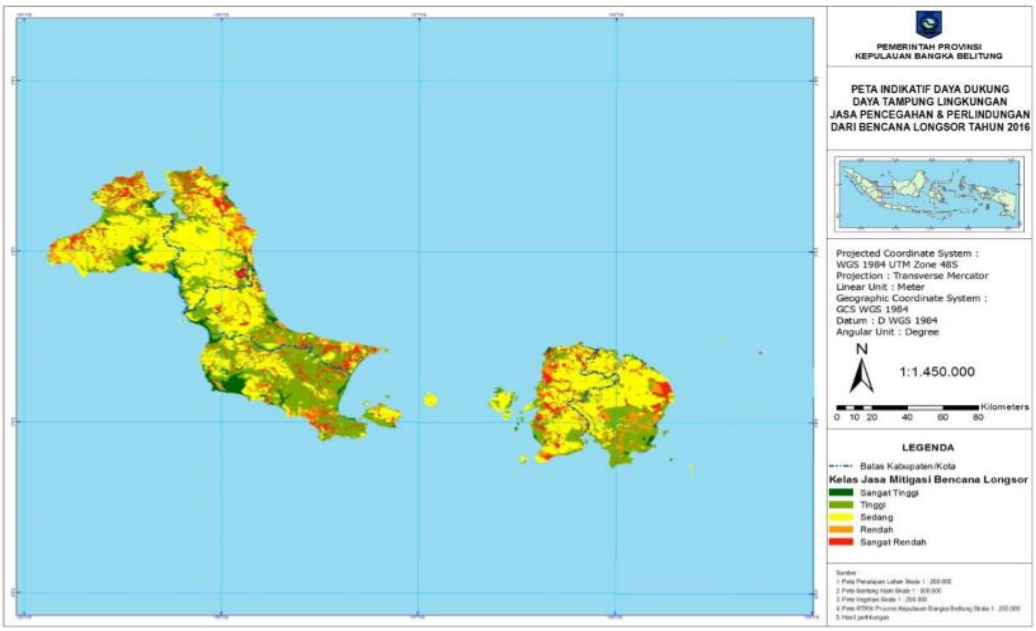

Gambar 2.103. Tampilan Peta Indikatif DDDT Jasa Pencegahan Bencana Longsor

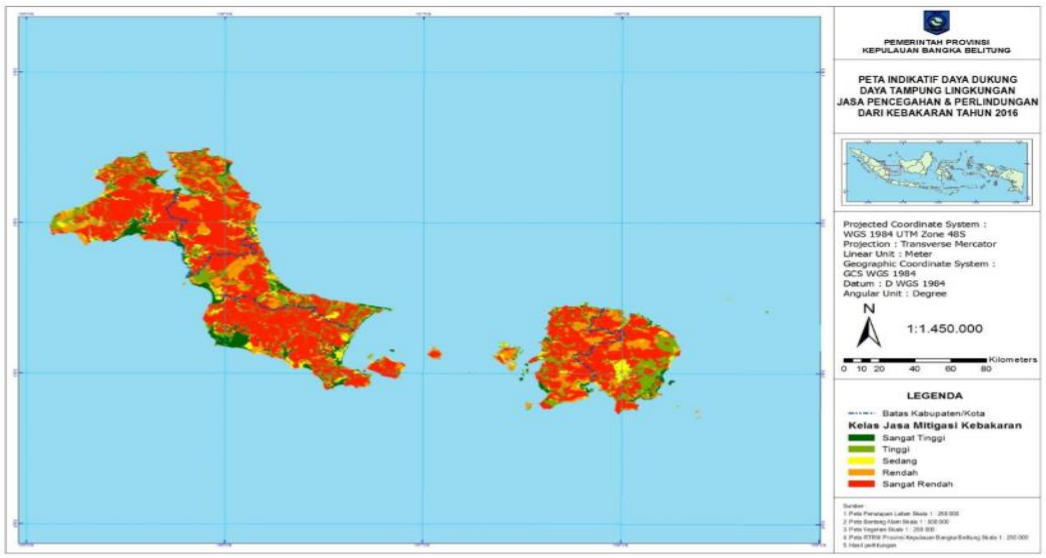

Gambar 2.104. Peta Indikatif DDDT Jasa Pencegahan Bencana Kebakaran Tahun 2016

Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, banjir, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, banjir dan tsunami. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.Lahan dengan kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan longsor kategori sangat rendah dan rendah didominasi oleh tutupan lahan berupa lahan pertambangan dan lahan terbuka yang tidak bervegetasi, sedangkan lahan dengan kelas jasa pencegahan dan perlindungan dari bencana kebakaran didominasi oleh tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur semak dan semak belukar yang mudah terbakar. Kawasan dengan lahan tertutup vegetasi berperan penting dalam mencegah terjadinya bencana jika dibandingkan dengan kawasan yang tidak bervegetasi. Tutupan lahan bervegetasi melindungi kawasan tersebut dari erosi, longsor maupun

abrasi. Sistem perakaran vegetasi dan kerapatan kanopi dapat berfungsi menghambat pergerakan air dan meminimalisir pengikisan tanah/ erosi.

II.4.4. *Impacts*

Berbagai kegiatan industri dan aktivitas manusia di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa industri peleburan dan pemurnian biji timah *(smelter)* pabrik kelapa sawit, pengolahan kayu, minuman ringan, *asphalt mixing plant*, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, industri pariwisata, kendaraan bermotor, limbah padat, sarana transportasi, limbah cair dan limbah B3 dari penginapan/hotel serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, pembuangan sampah (IKLH, 2017 dalam RPPLH, 2018) dapat mempengaruhi kualitas lingkungan.

Degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup tentunya merugikan kehidupan manusia walaupun penyebabnya bukan semata-mata karena ulah manusia, namun manusia dan alam. Faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus atau tsunami yang menyebabkan degradasi lingkungan tidak dapat diprediksi dan dihindarkan oleh manusia sepenuhnya. Sedang faktor manusia dalam hal ini merupakan aktivitas yang menyebabkan degradasi lingkungan sepenuhnya tergantung usaha manusia dalam mengendalikan kegiatannya, termasuk dalam mengelola lingkungan hidup (Triwidiastuti, 2016). Menurut Alikodra, 2012 laju degradasi sumber daya alam dan pencemaran jauh lebih tinggi dibandingkan laju kemampuan manusia melakukan upaya perbaikan dan upaya perlindungan serta pelestarian sumber daya alam belum berjalan sesuai harapan. Dampak yang jelas akibat kejadian bencana adalah degradasi lingkungan yang mengakibatkan banyak kerugian seperti kerusakan fisik, korban jiwa, timbulnya penyakit, perubahan iklim dan kelaparan. Pengaruh tidak langsung kerusakan fisik dari bencana tanah longsor adalah penurunan produktivitas lahan, nilai bangunan, dan infrastruktur, reruntuhan puing-puing dan massa tanah serta aliran lumpur dapat menimpa penduduk dan mengakibatkan kematian. Sedangkan

kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan fisik bangunan dan infrastruktur, menimbulkan wabah penyakit (yang disebabkan oleh bakteri atau virus seperti diare, muntaber, malaria, dan infeksi), persediaan air bersih yang terkontaminasi bakteri. Keadaan banjir dalam waktu lama akan menjadikan persediaan pangan di daerah yang kebanjiran menipis dan kekurangan pangan.

Tercatat sebanyak 723 kejadian bencana alam yang terjadi pada tahun 2019. Bencana alam yang kerap terjadi di Bangka Belitung adalah bencana hidrometerologi diantaranya terdapat 18 kejadian gelombang pasang, 15 kejadian puting beliung, 8 kejadian tanah longsor, 2 kejadian banjir dan 1 kejadian abrasi. Selain itu juga terjadi bencana alam kebakaran hutan dan lahan sebanyak 679 kejadian.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang berkaitan erat dengan kondisi iklim. Perubahan iklim yang terjadi karena pemanasan global menjadi tantangan besar dimasa mendatang dan perlu ditingkatkan upaya mitigasi dan adaptasinya. Kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh meningkatnya volume mencairnya es di kutub juga berdampak pada kondisi perairan di Indonesia, terlebih lagi pada daerah kepulauan seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.32. Informasi resiko Luas wilayah dan jumlah jiwa terpapar bencana banjir tahun 2019

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Banjir	
PANGKALPINANG		Luas Wilayah Resiko (HA)	Resiko Jiwa Terpapar
	Rangkui	504	2.891
	Bukit intan	1.521	3.732
	Girimaya	90	869
	Pangkal Balam	435	15.487
	Gabek	433	1.610
	Taman Sari	274	10.191
	Gerunggang	161	176
TOTAL		3.418	34.956
BANGKA INDUK	Mendo Barat	97	887

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Banjir	
	Merawang	158	6.480
	Puding Besar	745	2.210
	Sungailiat	3.592	4.043
	Pemali	3	2.832
	Bakam	212	167
	Belinyu	519	13.271
	Riau Silip	417	4.395
TOTAL		5.743	34.285
BANGKA TENGAH	Koba	824	17.811
	Lubuk Besar	407	3.148
	Pangkalan Baru	746	1.696
	Namang	83	568
	Sungai Selan	2.813	5.976
	Simpang Katis	5	6
TOTAL		4.878	29.205
BANGKA SELATAN	Payung	1.296	38
	Pulau Besar	2.279	2.966
	Simpang Rimba	4.205	463
	Toboali	2.219	11.929
	Tukak Sadai	167	1.694
	Air Gegas	175	219
	Lepar Pongok	79	2.882
	Kep.Lepar Pongok	7	938
TOTAL		10.427	21.129
BANGKA BARAT	Kelapa	308	1.337
	Tempilang	2.711	1.596
	Mentok	8	1.755
	Simpang Teritip	971	1.299
	Jebus	345	1.225
	Parit Tiga	149	1.639
TOTAL		4.492	8.851
BELITUNG	Membalong	462	3.592
	Tanjung Pandan	2.499	36.387
	Badau	217	1.985
	Sijuk	59	525
	Selat Nasik	6	119
TOTAL		3.243	42.608
BELITUNG TIMUR	Dendang	548	823
	Simpang Pesak	80	2.484
	Gantung	217	12.420
	Simpang Renggiang	126	289

Kabupaten / Kota	Kecamatan	Banjir	
	Manggar	1.413	24.352
	Damar	1	2.951
	Kelapa Kampit	257	1.118
TOTAL		2.642	44.437
TOTAL KESELURUHAN		**34.843**	**215.471**

Sumber: BPBD,2019

II.4.5. *Respons*

Dalam mengatasi bencana banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menurut BPDASHL, 2017 hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi hulu hilir terutama DAS lintas kabupaten (seperti DAS Rangkui Pedindang Pusuk yang merupakan DAS banjir Pangkalpinang 2016) disertai dengan penataan ruang yang terintegrasi.
2. Tidak mengeluarkan izin-izin pada daerah penyangga (Menumbing dan sekitarnya, Maras, Mangkol, Permisan, Gunung Lalang).
3. Penanganan daerah hulu Kawasan penyangga (misalnya memasyarakatkan penggunaan junjung hidup pada tanaman sahang).
4. Penertiban perambahan hutan daerah penyangga.
5. Penertiban izin-izin tambang dan tambang illegal yang menyebabkan terganggunya aliran sungai.
6. Pembangunan dam/sedimen trap sebagai upaya memaksimalkan kulong sebagai retensi agar curah hujan dan aliran yang masuk dapat di tampung dan dialirkan secara bertahap.
7. Pengerukan sedimen pada aliran sungai dan kolong.
8. Pengelolaan sampah.
9. Mitigasi pada daerah-daerah rawan banjir.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2019 (RLPPD Tahun 2019) sebagai berikut:

a. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
b. Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana
c. Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat
d. Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana
e. Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah - Kajian Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan peningkatan pembangunan bidang kebencanaan menjadi prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan fokus kegiatan pengalokasian anggaran tanggap bencana utamanya kebakaran hutan dan banjir, agar pemerintah provinsi lebih baik dan bertanggung jawab dalam merespon dan menanggulanginya. Baik pada saat sebelum, saat dan pasca bencana (RPJMD, 2017). Sebagai langkah awal sudah dilakukan inisiasi implementasi dengan melakukan deklarasi Babel Siaga Bencana pada tanggal 26 April 2019 bertepatan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (gambar 2.105).

Hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perwujudan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab mensejahterakan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Selain itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk menyusun peta rawan bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya peningkatan kewaspadaan dan penanggulangan korban bencana di daerah.

Gambar 2.105. Deklarasi Babel Siaga Bencana Tanggal 26 April 2019 oleh Seluruh OPD Dipimpin oleh Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber : Babelreview diakses pada tanggal 30 April 2019

II.5. Perkotaan

II.5.1 Tinjauan Pembangunan Perkotaan

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi pencapaian yang harus diupayakan dalam meminimalkan risiko terhadap lingkungan hidup. Perkembangan perkotaan salah satunya dituntut untuk lebih menerapkan prinsif-prinsif berkelanjutan, karena banyak pandangan bahwa kota sesungguhnya tidak pernah berkelanjutan hal ini dikarenakan kota-kota selalu mengeksploitasi surplus pangan dan material yang dihasilkan oleh daerah dibelakangnya (pedesaan) dengan demikian mengganggu sistem ekologis yang sebelumnya bersifat siklus.

Menurut Haughton, G & C Hunter (1994) dalam Veronica Adelin kota merupakan suatu wilayah dimana didalamnya terdapat orang - orang dan kegiatannya yang secara terus menerus meningkatkan alam, lingkungan buatan dan lingkungan sosial diwilayah mereka dari skala wilayah yang kecil sampai skala regional dan selalu mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rogers (2004) mendefinisikan kota berdasarkan pelayanannya menjadi:

a. Suatu kota yang adil adalah suatu kota yang mendapat keadilan akan makanan, tempat perlindungan, pendidikan, kesehatan dan harapan, serta semua orang berpartisipasi dalam kegiatan kota.
b. Suatu Kota yang indah adalah suatu kota terdapat seni, arsitektur dan percikan imajinasi pemandangan.
c. Suatu Kota yang kreatif adalah kota terbuka bagi siapa saja dan mengerahkan semua potensi sumber daya manusia serta mengizinkan suatu perubahan yang cepat
d. Suatu Kota yang ekologis adalah suatu kota yang memperkecil dampak ekologi, dimana pemandangan dan format area terbangun bangunan-bangunan dan sarana penunjangnya seimbang, aman dan hemat energi.

e. Suatu kota yang *easy contact* dan mobilitas adalah suatu kota dimana pertukaran informasi dapat terjadi secara cepat *(face-to-face)* dan secara elektronik.
f. Suatu kota yang ringkas dan banyak pusat kota adalah suatu kota yang melindungi pinggiran kota, memiliki pusat-pusat yang dapat mengumpulkan atau menyatukan masyarakat dalam skala lingkungannya dan dapat memaksimalkan jarak tempuhnya.

Permasalahan pembangunan perkotaan saat ini menjadi tantangan yang banyak dihadapi diantaranya tata ruang kawasan perkotaan sistem transportasi dan lingkungan diantaranya: kebutuhan lahan perumahan yang menyebabkan *urban sprawl,* perkotaan menyebar secara ekspansif, isu alih fungsi lahan pertanian, inefisiensi penyediaan infrastruktur, kebergantungan terhadap kendaraan bermotor yang semakin tinggi, kemacetan lalu lintas, peningkatan konsumsi energi, pencemaran udara, persampahan serta penurunan kualitas lingkungan. Mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan merupakan tujuan yang harus dilakukan. Menurut Giradeth (2004) kota berkelanjutan adalah kota yang memungkinkan semua warganya **memenuhi kebutuhannya** dan meningkatkan **kesejahteraannya** tanpa menurunkan kondisi lingkungan alam atau orang lain, dimasa kini dan masa depan. Sedangkan menurut Leitmann (1999) Kota berkelanjutan merupakan kota-kota dengan jejak ekologis perkapita yang kecil atau berkurang, kota-kota yang menciptakan kesejahteraan perkapita yang tidak menurun, kota-kota yang mengurangi risiko kesehatan, meminimasi pencemaran, dan memaksimalkan sumber daya alam terbarukan.

II.5.2 Permasalahan Perkotaan

Sebagai tempat permukiman, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pendidikan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi di perkotaan, kota bertumbuh secara fisik dengan berbagai sarana dan prasarananya. Hal ini menyebabkan pesatnya perkembangan industrialisasi

dan pertumbuhan ekonomi diperkotaan yang selanjutnya menstimulasi urbanisasi dan pertumbuhan populasi. Masyarakat perkotaan juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan merubah wajah kota melalui konsumsi makanan, energi dan tanah. Sehingga kegiatan produktif perkotaan tersebut menimbulkan masalah lingkungan dalam bentuk penurunan kualitas udara dan air, penurunan pasokan air, fasilitas perumahan dan sanitasi yang tidak memadai, kemacetan lalu lintas dan peningkatan timbulan sampah (Jago-on, et al, 2009). Masalah lingkungan ini menurut Inoguchi, 2015 memiliki banyak kesamaan pada berbagai kota di dunia menyebabkan banyak kota mengalami kemajuan secara ekonomi namun mengalami kemunduran secara ekologi karena aktivitas antropogenik.

Lingkungan hidup dan pembangunan perkotaan dapat berjalan beriringan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Mengacu pada yang dilakukan oleh Zhao dan Bottero, 2010 yang menilai dan mengevaluasi keberlanjutan terhadap wilayah permukiman masyarakat perkotaan menggunakan DPSIR *framework* melalui pendekatan multidisiplin dengan penilaian dan evaluasi yang kompleks antara manusia dengan lingkungan hidup dan disesuaikan dengan kondisi di wilayah perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tabel II.33):

- *Driving force* merupakan proses dan kegiatan antropogenik yang mungkin memiliki efek terhadap lingkungan;
- *Pressure* adalah efek langsung dari aktivitas antropogenik yang berpengaruh terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial;
- *State* mencerminkan kondisi aktual lingkungan perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- *Impact* adalah ukuran dampak lingkungan akibat adanya perkembangan perkotaan;
- *Responses* yaitu usaha yang mengacu pada tindakan spesifik untuk mengurangi tekanan.

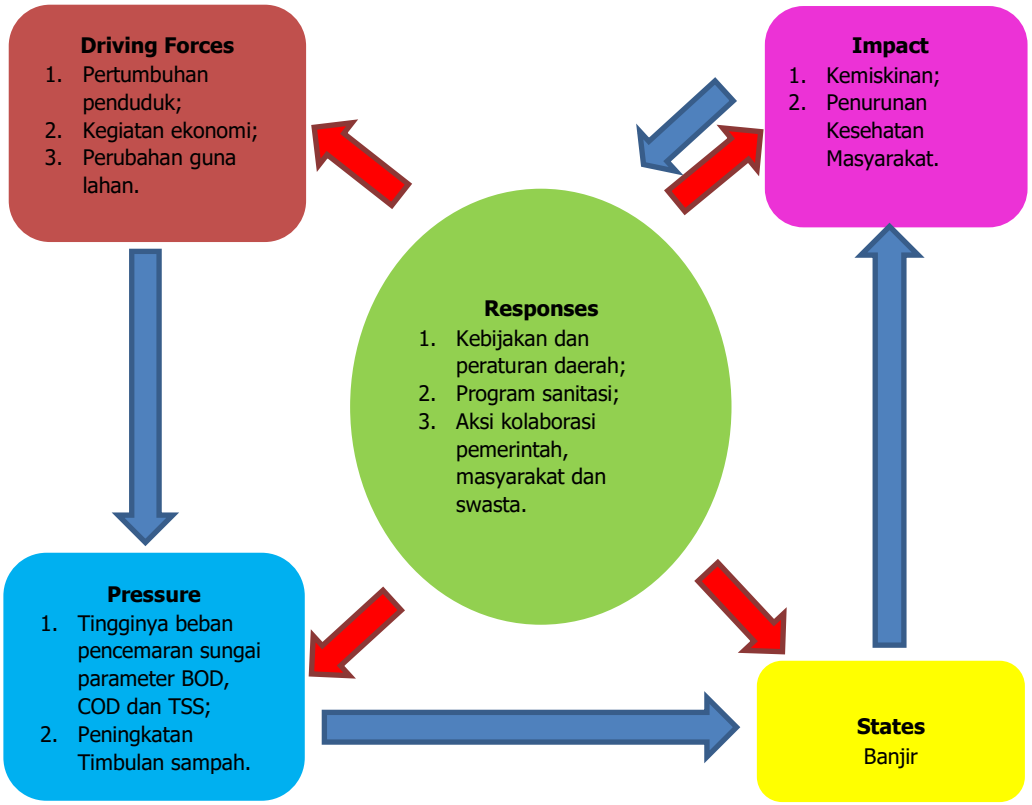

Gambar 2.106. Struktur Kerangka DPSIR Masalah Lingkungan Perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: hasil identifikasi, 2020

Tabel II.33. Identifikasi analisis DPSIR perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek Keberlanjutan	Indikator	Keterangan DPSIR
Ekonomi	- Kegiatan ekonomi; - Pembangunan permukiman.	D D
Lingkungan	- Perubahan guna lahan; - Tingginya beban pencemaran sungai parameter BOD, COD dan TSS tinggi; - Banjir; - Peningkatan timbulan sampah.	D P S P
Sosial	- Pertumbuhan penduduk; - Penurunan kesehatan masyarakat; - Kebijakan dan peraturan daerah; - Rencana aksi kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta; - Kemiskinan.	D I R R R I

Sumber: hasil identifikasi, 2020

II.5.2.1 Driving Force

II.5.2.1.1 Pertumbuhan Penduduk dan Kegiatan Ekonomi

Berdasarkan Susenas 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk sebesar 1.223.296 jiwa, 49,22 persen bertempat tinggal di daerah perkotaan dan 50,78 persen berada di pedesaan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.

Tabel II.34. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk (%)*	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km^2)
Kota Pangkalpinang	118,8	212.700	21,7	1.791
Kabupaten Bangka	2.950,69	337.300	21,7	114
Kabupaten Belitung	2.293,69	189.800	21,7	83
Kabupaten Bangka Tengah	2.126,36	196.200	21,7	92
Kabupaten Bangka Barat	2.820,61	213.200	21,7	76
Kabupaten Bangka Selatan	3.607,08	210.000	21,7	58
Kabupaten Belitung Timur	2.507,00	129.600	21,7	52
T o t a l	**16.424,23**	**1.488.800**		**91**

Sumber: BPS, 2020; * Pertumbuhan penduduk 2010-2019

Kegiatan ekonomi dan jumlah populasi berkaitan erat dengan perkembangan wilayah perkotaan. Menurut Sarker, et all, 2016, berlangsungnya kegiatan-kegiatan masyarakat di perkotaan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi dan banyak ekonom berpendapat peningkatan jumlah populasi di perkotaan berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan meningkatkan kekayaan negara dalam jangka panjang.

Gambar 2.107. Persentase Penduduk Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, proyeksi hingga Tahun 2035, sumber: BPS, 2020, diolah

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020, dominasi mata pencaharian penduduk utama berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tertinggi Tahun 2019 adalah industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan pertambangan (gambar 2.108). Sisanya berupa kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, transportasi dan pergudangan, real estate, jasa pendidikan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, dan lain-lain.

Dalam Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp.75,83 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp.53,95 triliun. Selain itu PDRB per Kapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 mencapai Rp.50,93 juta. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 sebesar 3,32 persen, melambat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sebesar 4,46 persen. Lapangan

usaha penyumbang pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yaitu Pertanian, Perdagangan dan Industri Pengolahan.

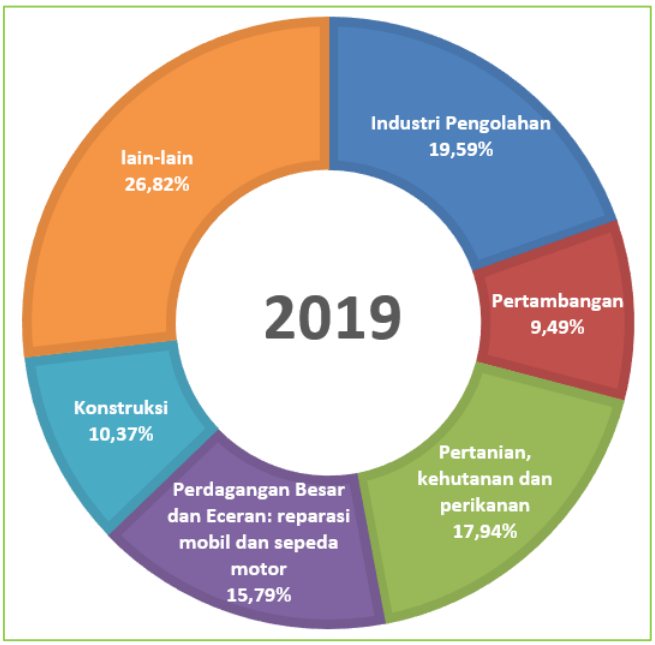

Gambar 2.108. Struktur PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019, sumber: BPS, 2020, diolah

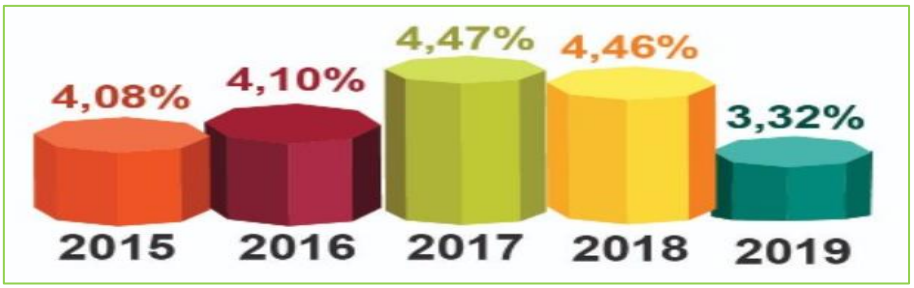

Gambar 2.109. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: BPS, 2020

Fenomena urbanisasi merupakan salah satu dampak akibat pembangunan perkotaan berikut sarana dan prasarana yang memacu perkembangan ekonomi sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan berusaha di kota (Harahap, 2013). Sebaliknya kecenderungan aktivitas ekonomi akan terpusat pada wilayah yang mempunyai konsentrasi penduduk cukup tinggi, sedangkan urbanisasi

sendiri berkorelasi positif terhadap peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah dan berkontribusi terhadap makin luasnya area konsentrasi penduduk yang dikenal dengan nama daerah perkotaan. Sehingga menurut Mardiansjah, dkk, 2018 urbanisasi berkaitan erat dengan proses peningkatan jumlah dan konsentrasi penduduk serta proses perkembangan kota serta perkembangan kawasan-kawasan perkotaan di wilayah regional.

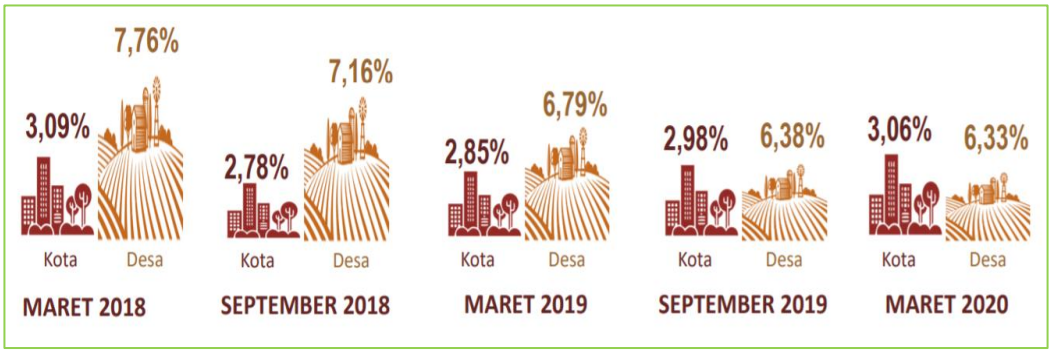

Gambar 2.110. Disparitas Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: BPS, 2020

Cepatnya pertumbuhan ekonomi sejalan dengan tuntutan peningkatan kualitas hidup yang lebih baik lagi (Zao dan Bottero, 2010). Kebutuhan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, sehingga seiring dengan pertumbuhan kota dan pertumbuhan penduduk, permintaan tempat tinggal meningkat terutama yang dekat dengan tempat kerja (Pasya, 2012). Lebih lanjut menurut Makarau, 2011 masalah pemukiman tidak cukup dengan perbandingan jumlah penduduk yang terus bertambah dan luas tanah tersedia namun juga permasalahan umum perkotaan adalah sering terjadi aglomerasi penduduk pada berbagai pusat kegiatan seperti perkantoran, industri, kampus, perdagangan dan sebagainya. Persebaran sumber daya yang tidak merata dapat menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah (Sodik dan Iskandar, 2007), selain itu konsentrasi penduduk hanya di suatu wilayah tertentu diikuti dengan aktivitas ekonominya akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan serta mengakibatkan disparitas penduduk kaya-miskin dan tidak meratanya pembangunan (Mauleny, 2015).

II.5.2.1.2. Perubahan Guna Lahan

Peningkatan jumlah penduduk wilayah perkotaan secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan. Karena lahan tidak dapat bertambah, selanjutnya terjadi perubahan penggunaan lahan dengan menurunkan peruntukan lahan sebelumnya (Kusrini, dkk, 2011) dengan kata lain perubahan penggunaan lahan merupakan peralihan suatu bentuk dan lokasi penggunaan lahan dari sebelumnya. Beberapa penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memberikan dampak negative diantaranya:

- Sebanyak 159 dari 433 DAS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisi sangat kritis karena aktivitas pertambangan yang dilakukan secara massif dan perubahan lahan secara cepat dari kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, berdampak pada peningkatan laju sedimentasi yang masuk kemudian turun ke sungai dan mengakibatkan sungai menjadi dangkal, laut dan pantai menjadi keruh disertai bencana banjir pada tahun 2017 di Kecamatan Tanjung Pandan dan Badau, Kabupaten Belitung (Santoso dan Wicaksono, 2018);
- Terjadinya penurunan dan peningkatan debit selama tahun 2014-2018 akibat perubahan tata guna lahan di sepanjang DAS Pompong, Kabupaten Bangka yang dimanfaatkan masyarakat untuk penambangan timah yang sering menyebabkan banjir dan genangan serta kesulitan air baku di daerah hilir yaitu di Kecamatan Sungailiat (Pertiwi, dkk, 2019);
- Terdapat ketidaksesuaian ruang yang terjadi secara permanen oleh 33 bangunan, sebagian besar di Kelurahan Bintang, Kecamatan Rangkui yang berada di lokasi daerah sempadan Sungai Pedindang, Kota Pangkalpinang. Sedangkan sepanjang sempadan sungai merupakan kawasan lindung sebagai daerah pendukung antara sungai dan ekosistem darat yang merupakan daerah aktivitas manusia hingga tidak saling terganggu (Ferianda dan Setiawan, 2016);

- Hasil analisis guna lahan tahun 2004 dengan guna lahan tahun 2011 di Kabupaten Belitung sebesar, dampak kegiatan pertambangan timah inkonvensional telah merubah peruntukan penggunaan lahan sebesar 9,62% dari arahan fungsi kawasan Rencana Tata Ruang Kabupaten Belitung dan menyebabkan kerusakan parah antara lain menciptakan kolong bekas tambang yang berisi air dengan kandungan logam berat Fe, Pb, dan As sudah melebihi ambang batas 4 ppm dapat mengganggu kesehatan manusia mengakibatkan sejumlah penyakit seperti keracunan dan kanker (Pirwanda dan Pirngadie, 2015);
- Aktivitas penambangan timah di Kabupaten Bangka menyumbang perluasan perubahan penggunaan lahan pada periode tahun 2004-2009 sebesar 4.370,20 Ha dengan laju pertambahan rata-rata 874,04 Ha per tahun dan pada periode 2009-2014 bertambah sebesar 2.421,06 Ha dengan laju pertambahan rata-rata sebesar 484,21 Ha per tahun. Pertambangan timah ini mempunyai karakteristik system terbuka *(open pit)*, sehingga akan mengalami potensi penurunan kualitas tanah yang sulit dikembalikan seperti semula (Yunito dan Santosa, 2015);
- Studi pada Kota Pangkalpinang Tahun 2016 membuktikan pertambangan timah rakyat yang merambah ke wilayah hutan lindung dan DAS dari lahan bekas tambang PT. Timah, Tbk menjadi salah satu penyebab banjir Kota Pangkalpinang tahun 2016 (Yuliana, 2017).

II.5.2.2. Pressure

II.5.2.2.1. Tingginya beban pencemaran sungai parameter BOD, COD dan TSS

Pada Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan kajian inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air di wilayah tujuh kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini meliputi penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang

masuk ke dalam sumber air terhadap parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan TSS (*Total Suspended Solid*) dengan hasil pada gambar 2.111, 2.112 dan 2.113.

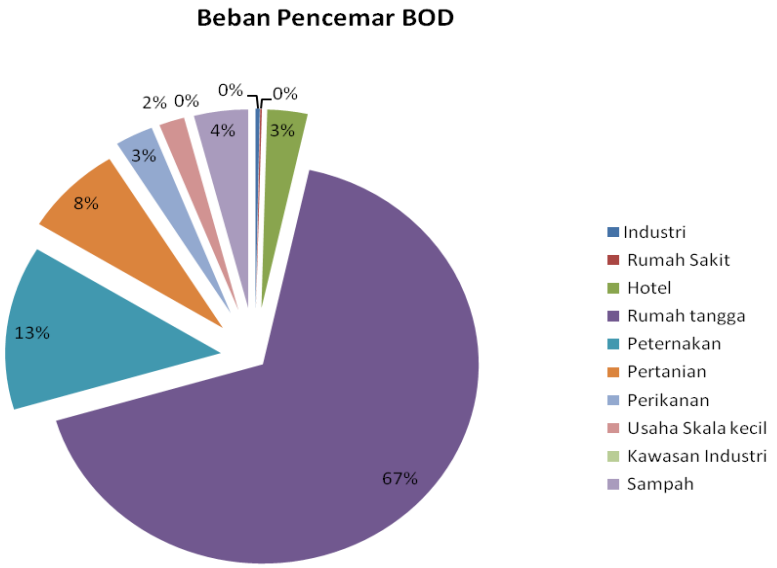

Gambar 2.111. Kontribusi sektor dalam beban pencemaran BOD pada sumber air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

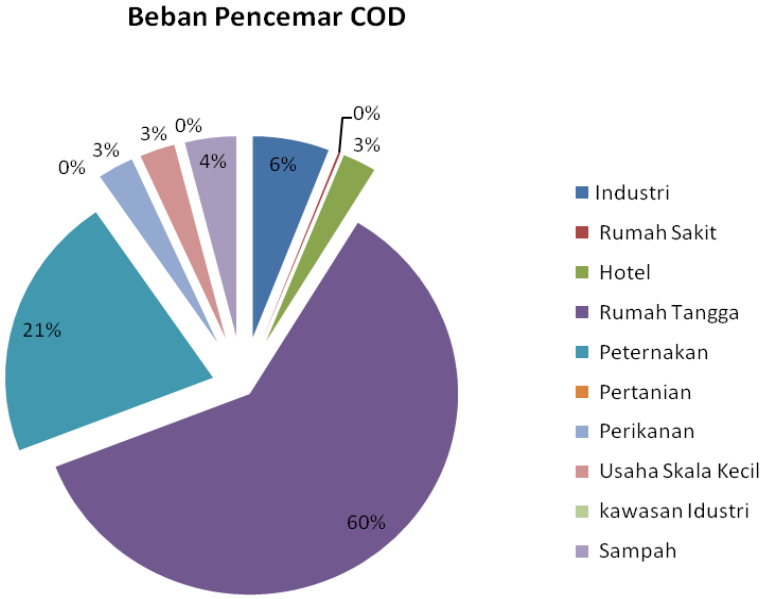

Gambar 2.112. Kontribusi sektor dalam beban pencemaran COD pada sumber air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

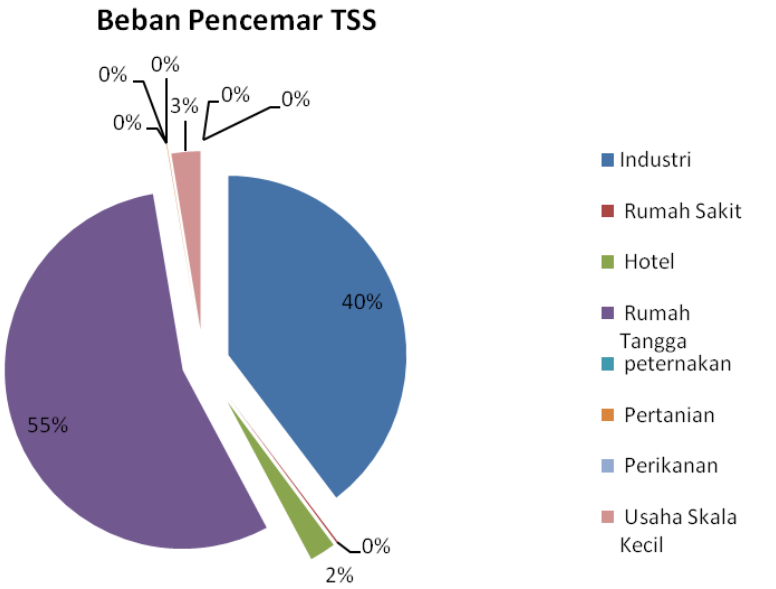

Gambar 2.113. Kontribusi sektor dalam beban pencemaran TSS pada sumber air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Hasil kajian Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Rangkui terhadap parameter BOD, COD dan TSS oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pemodelan numerik metode QUAL2Kw pada Tahun 2017 yang melintasi Kabupaten Bangka Tengah, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dengan kajian pada Kecamatan Pangkalbalam, Bukit Intan, Tamansari, Rangkui, Girimaya dan Gerunggang di Kota Pangkalpinang ditunjukkan pada tabel 2.34, 2.35 serta 2.36.

Anak Sungai Pedindang kelebihan beban sebesar 0,256 Ton/jam sehingga pada sungai tersebut harus diturunkan beban pencemaran BOD sebesar 237%. Sumber-sumber pencemar non point di Kecamatan Mendo Barat (NPS1) kelebihan beban sebesar 0,031 Ton/jam sehingga harus diturunkan beban pencemaran BOD sebesar 52%. Di NPS2 (Gerunggang dan Rangkui) harus menurunkan beban pencemaran BOD sebesar 31%, NPS3 (Tamansari dan Rangkui) 125%, NPS4 (Tamansari dan Rangkui) 158%, dan NPS5 (Tamansari, Bukitintan dan Rangkui) 64%.

Tabel II.35. Hasil Perhitungan DTBP Parameter BOD Sungai Rangkui

Sumber Pencemar	Lokasi (Km)			BOD		Selisih	Keterangan
	Titik	Up	Down	DT	BP		
S. Pedindang Hilir (Gudang Padi)	4,98			0,108	0,364	0,256	Kelebihan Beban 237%
NPS1 (Mendo Barat)		12,00	11,00	0,059	0,090	0,031	Kelebihan Beban 52%
NPS2 (Gerunggang dan Rangkui)		10,00	7,00	0,033	0,043	0,010	Kelebihan Beban 31%
NPS3 (Tamansari dan Rangkui)		6,50	5,70	0,022	0,049	0,027	Kelebihan Beban 125%
NPS4 (Tamansari dan Rangkui)		5,50	5,25	0,028	0,072	0,044	Kelebihan Beban 158%
NPS5 (Tamansari, Bukitintan dan Rangkui)		5,20	5,00	0,033	0,054	0,021	Kelebihan Beban 64%
NPS6 (Tamansari, Bukitintan dan Pangkalbalam)		4,90	3,00	0,073	0,000	-0,073	Dapat menerima beban
Total				0,356	0,671	0,316	Kelebihan Beban 89%

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan: DT: Daya Tampung (Ton/jam); BP: Beban Pencemaran (Ton/jam); NPS: Sumber Pencemar Non Titik

Kelebihan Beban Pencemaran COD terjadi di anak Sungai Pedindang Hilir sebesar 0,27 Ton/jam. Kelebihan Beban Pencemaran COD juga terdapat di NPS4 yang berada di Kecamatan Rangkui dan Tamansari yaitu sebesar 0,22 Ton/jam.

Tabel II.36. Hasil Perhitungan DTBP Parameter COD Sungai Rangkui

Sumber Pencemar	Lokasi (Km)			COD		Selisih	Keterangan
	Titik	Up	Down	DT	BP		
S. Pedindang Hilir (Gudang Padi)	4,98			0,90	1,17	0,27	Kelebihan Beban 30%
NPS1 (Mendo Barat)		12,00	11,00	0,50	0,43	-0,07	Dapat menerima beban
NPS2 (Gerunggang dan Rangkui)		10,00	7,00	0,27	0,15	-0,12	Dapat menerima beban
NPS3 (Tamansari dan Rangkui)		6,50	5,70	0,20	0,08	-0,12	Dapat menerima beban
NPS4 (Tamansari dan Rangkui)		5,50	5,25	0,23	0,45	0,22	Kelebihan Beban 92%
NPS5 (Tamansari, Bukitintan dan Rangkui)		5,20	5,00	0,00	-0,05	-0,05	Dapat menerima beban
NPS6 (Tamansari, Bukitintan dan Pangkalbalam)		4,90	3,00	0,07	-0,89	-0,96	Dapat menerima beban
Total				2,11	2,29	0,18	Kelebihan Beban 8%

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan: DT: Daya Tampung (Ton/jam); BP: Beban Pencemaran (Ton/jam); NPS: Sumber Pencemar Non Titik

Tabel II.37. Hasil Perhitungan DTBP Parameter TSS Sungai Rangkui

Sumber Pencemar	Lokasi (Km)			TSS		Selisih	Keterangan
	Titik	Up	Down	DT	BP		
S. Pedindang Hilir (Gudang Padi)	4,98			1,80	19,30	17,50	Kelebihan Beban 972%
NPS1 (Mendo Barat)		12,00	11,00	1,06	0,72	-0,34	Dapat menerima beban
NPS2 (Gerunggang dan Rangkui)		10,00	7,00	0,00	-1,08	-1,08	Dapat menerima beban
NPS3 (Tamansari dan Rangkui)		6,50	5,70	0,74	1,49	0,75	Kelebihan Beban 101%
NPS4 (Tamansari dan Rangkui)		5,50	5,25	0,45	1,04	0,58	Kelebihan Beban 128%
NPS5 (Tamansari, Bukitintan dan Rangkui)		5,20	5,00	0,00	-0,11	-0,11	Dapat menerima beban
NPS6 (Tamansari, Bukitintan dan Pangkalbalam)		4,90	3,00	0,07	-19,44	-19,51	Dapat menerima beban
Total				4,06	21,46	17,40	Kelebihan Beban

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019
Keterangan: DT: Daya Tampung (Ton/jam); BP: Beban Pencemaran (Ton/jam); NPS: Sumber Pencemar Non Titik

Pada anak Sungai Pedindang beban pencemaran TSS harus diturunkan hingga 972%. Di Kecamatan Tamansari dan Rangkui pada segmen NPS3 harus menurunkan beban pencemaran TSS sebanyak 101% dan di NPS4 harus menurunkan beban pencemar sebesar 128%.

II.5.2.2.2 Peningkatan Timbulan Sampah

Studi Manajemen dan Produksi Persampahan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 menemukan bahwa sampah yang dihasilkan mencapai 654,80 ton/hari, setara dengan 239.000 ton/tahun. Penanganan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sehingga membutuhkan lokasi pembuangan yang luas dan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan akan membutuhkan lahan untuk menampung keberadaan sampah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki karakteristik wilayah geografis yang unik di tengah perairan, sehingga mempengaruhi pola bisnis persampahan dalam transportasi tidak semudah di wilayah daratan (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018).

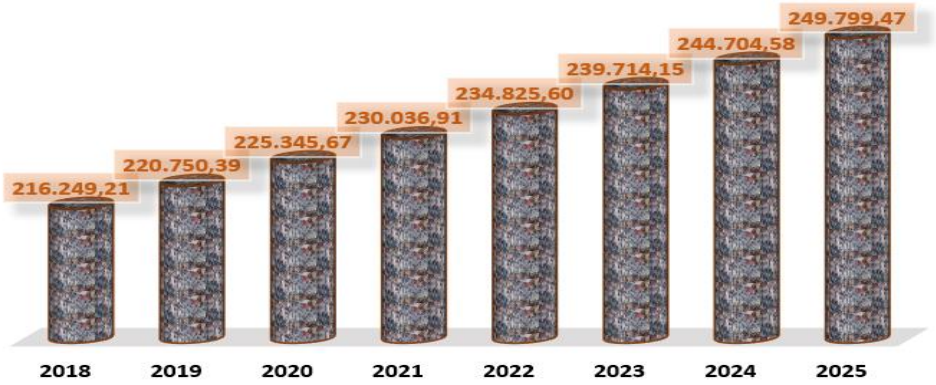

Gambar 2.114. Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per Tahun dalam Ton/Tahun, sumber: Jakstrada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019, diolah

II.5.2.3 State

Kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan makin terbatas akibat meningkatnya tekanan manusia terhadap sumber daya alam terutama lahan dan air, dibuktikan dengan bencana banjir yang sering terjadi. Bencana ini kemudian diikuti dengan tanah longsor, adanya korban jiwa, pengungsian penduduk dan gangguan kesehatan serta kelaparan bahkan kejadian kriminalitas.

Gambar 2.115. Jumlah lokasi banjir per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 lokasi yang sering terjadi bencana banjir adalah Kota Pangkalpinang sebanyak 15 lokasi (gambar 2.115). Tercatat lokasi banjir dan genangan yang terjadi pada Bulan Desember 2019 yaitu Kecamatan Rangkui, Gerunggang, Bukit Intan, dan Tamansari (tabel 2.38). Dengan ketinggian 40-60 cm banjir merendam sekitar 300 rumah dan 1,5 km jalan yaitu Jalan Theresia, Kampung Bintang, Jalan Kayu Putih, Jalan Linggarjati, Jalan Balai, Jalan Ahmad Yani, Jalan Balai, Jalan Masjid Nurrohmah, Jalan Pasar Pagi (Media Indonesia Online, 15 Desember 2019). Banjir diperparah dengan musim hujan dan pasang air laut berkisar antara 1,9-2 meter serta kondisi saluran air yang kurang baik mengakibatkan hujan meluap ke pemukiman dan fasilitas umum seperti jalan, kantor pelayanan publik, SPBU dan pusat perbelanjaan (Antaranews.com, 15 Desember 2019).

Tabel II.38. Kejadian Bencana Alam Banjir dan Genangan Air Kota Pangkalpinang Bulan Desember 2019

Kecamatan	Kelurahan	Jenis Bencana Alam	Tanggal Kejadian
Rangkui	Bintang	Genangan air	14 Desember 2019
Gerunggang	Kacangpedang	Genangan air	14 Desember 2019
Tamansari	Batintikal	Genangan air	14 Desember 2019
Tamansari	Gedung Nasional	Banjir	14 Desember 2019
Rangkui	Paritlalang	Genangan air	14 Desember 2019
Tamansari	Rawabangun	Genangan air	14 Desember 2019
Gerunggang	Bukitsari	Banjir dan genangan air	14 Desember 2019
Tamansari	Kejaksaan	Banjir	14 Desember 2019
Gerunggang	Bukitsari	Genangan air	15 Desember 2019
Tamansari	Rawabangun	Genangan air	15 Desember 2019
Tamansari	Gedung Nasional	Genangan air	15 Desember 2019
Girimaya	Bukitbesar	Genangan air	16 Desember 2019
Bukitintan	Semabunglama	Banjir	16 Desember 2019
Tamansari	Gedung Nasional	Genangan air	16 Desember 2019

Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang, 2020, diolah

Selain itu pada Bulan Desember 2019 menurut BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilanda hujan lebat disertai angin kencang dan petir (Kompas.com, 14 Desember 2019). BMKG juga mencatat pada Bulan

Desember 2019 Kota Pangkalpinang mengalami curah hujan tinggi 300-400 mm (gambar 2.116).

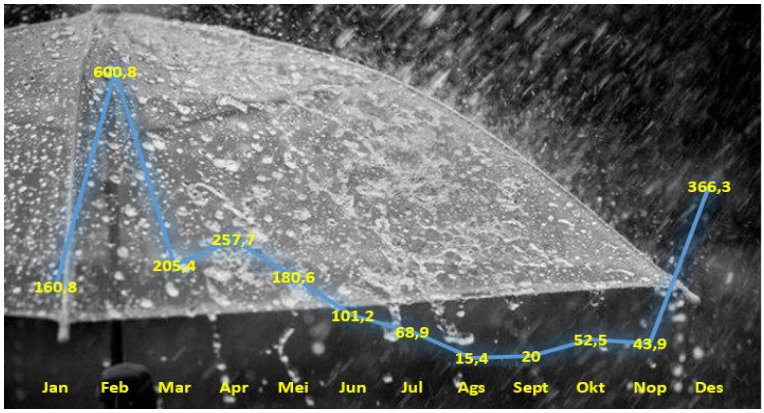

Gambar 2.116. Curah hujan per bulan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 dalam mm, sumber: BMKG, 2020

II.5.2.4. Impact

II.5.2.4.1 Kemiskinan

Meskipun memiliki jumlah penduduk miskin terendah ke-4 secara nasional yaitu 4,53 persen dan gini ratio terendah secara nasional yaitu 0,262 persen (data BPS pada Bulan Maret 2020) namun kemiskinan harus dapat ditanggulangi karena seperti diketahui bersama kemiskinan merupakan suatu lingkaran yang akan terus terjadi karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan sumber daya manusia yang dihasilkan juga rendah secara intektual dan fisik yang berakibat produktivitas rendah.

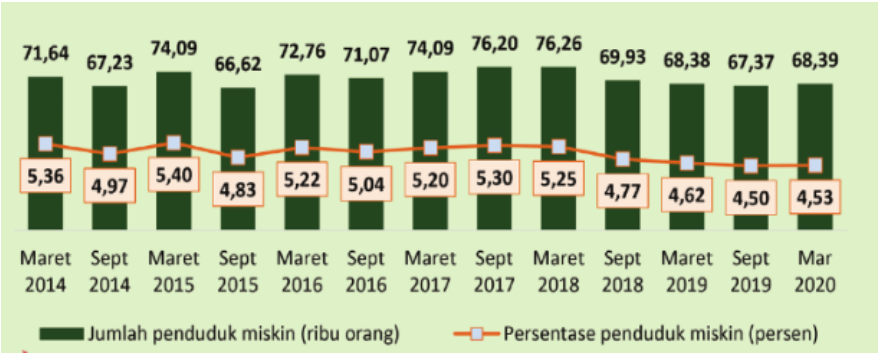

Gambar 2.117. Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: BRS BPS, 2020

II.5.2.4.2 Penurunan Kesehatan Masyarakat

Diyakini bahwa pencemaran air dan udara, kerusakan sumber daya alam, deforestasi, degradasi fungsi hutan dan lahan musnahnya berbagai spesies hayati, banjir bahkan timbulnya jenis penyakit merupakan akibat dari penurunan fungsi lingkungan yang merupakan gejala negative dari faktor manusia (Puspitasari, 2009).

Penyakit utama yang diderita oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah diare (gambar 2.118). Penyakit Diare ditandai dengan buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya (3 kali atau lebih dalam sehari) dan berlangsung kurang dari 7 hari. Diare disebabkan karena infeksi terutama infeksi virus, sedangkan faktor-faktor lainnya meliputi malabsorpsi, keracunan makanan, dan diare terkait penggunaan antibiotik (DTA/AAD).

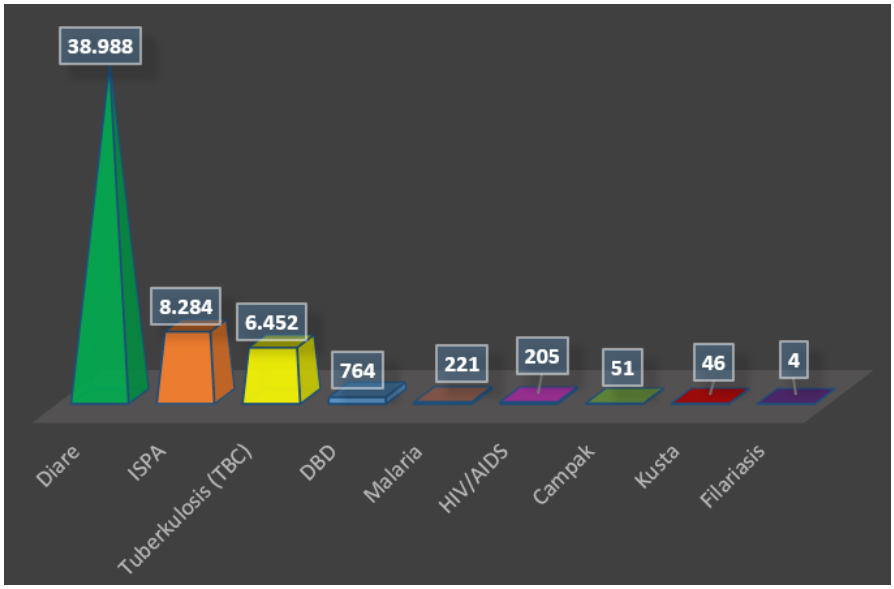

Gambar 2.118. Jumlah penderita (orang) dan penyakit utama yang diderita masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.39. Kebijakan Daerah sebagai Response Masalah Lingkungan Perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
Kota Pangkalpinang		
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 27 Juni 2019	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 1 Tahun 2012 Tanggal 27 Januari 2012	Rencana Tata Ruang dan wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2012-2030 (sedang proses Peninjauan Kembali)
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 November 2013	Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 4 tahun 2010 Tanggal 29 Maret 2010	Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Walikota Pangkalpinang	Nomor 66 Tahun 2018 Tanggal 18 Desember 2018	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusaka *Civic Centre* Kota Pangkalpinang
Kabupaten Bangka		
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka	Nomor 15 tahun 2014 Tanggal 24 November 2014	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka	Nomor 5 tahun 2016 Tanggal 18 Juni 2016	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka	Nomor 8 Tahun 2015 Tanggal 30 April 2015	Pengelolaan Sampah dam Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
Kabupaten Belitung		
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung	Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015	Pengelolaan Sampah
Kabupaten Bangka Tengah		
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013	Pengelolaan Sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Nomor 13 Tahun 2016 Tanggal 16 Desember 2016	Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
Kabupaten Bangka Barat		
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat	Nomor 9 Tahun 2018 Tanggal 8 Agustus 2018	Pengelolaan Limbah Domestik
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat	Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 17 April 2012	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
Kabupaten Bangka Selatan		
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan	Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015	Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik
Kabupaten Belitung Timur		
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 20 Oktober 2014	Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 2 tahun 2017 Tanggal 2 Mei 2017	Pengeloaan Air Limbah Domestik

sumber: JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.5.2.5 Responses

II.5.2.5.1. Kebijakan dan Peraturan Daerah

Adanya dinamika dalam proses perkembangan perkotaan membuat suatu wilayah harus siap menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan akibat bertumbuhnya kota dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek social, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola yang baik. Pemerintah bersama masyarakat dan swasta menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dengan berbagai tujuan kebijakan. Kebijakan pembangunan Indonesia merupakan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah melalui perencanaan terintegrasi. Beberapa peraturan dan kebijakan terkait permasalahan lingkungan perkotaan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dihimpun pada tabel 2.39.

II.5.2.5.2. Program Sanitasi

Program sanitasi yang mencakup air limbah domestic, persampahan dan drainase perkotaan ditargetkan menjadi 100% dapat diakses oleh penduduk Indonesia pada Tahun 2019 dan merupakan tujuan keenam Sustainable Development Goal's (SDG's). Perwujudan tujuan ini diupayakan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 melalui 5 (lima) pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), pengelolaan makanan dan minuman, pengamanan sampah serta pengamanan limbah rumah tangga (Prayitno dan Widati, 2018).

Stop BABS merupakan pilar utama yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan luas dampaknya terhadap kesehatan lingkungan yaitu penurunan kualitas lingkungan yang pada gilirannya berdampak pada kesehatan masyarakat. Seluruh kelurahan/desa di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program STBM

(gambar 2.119) namun sebesar 3,77 persen masyarakat belum sadar untuk tidak BABS (STBM Indonesia, 2020).

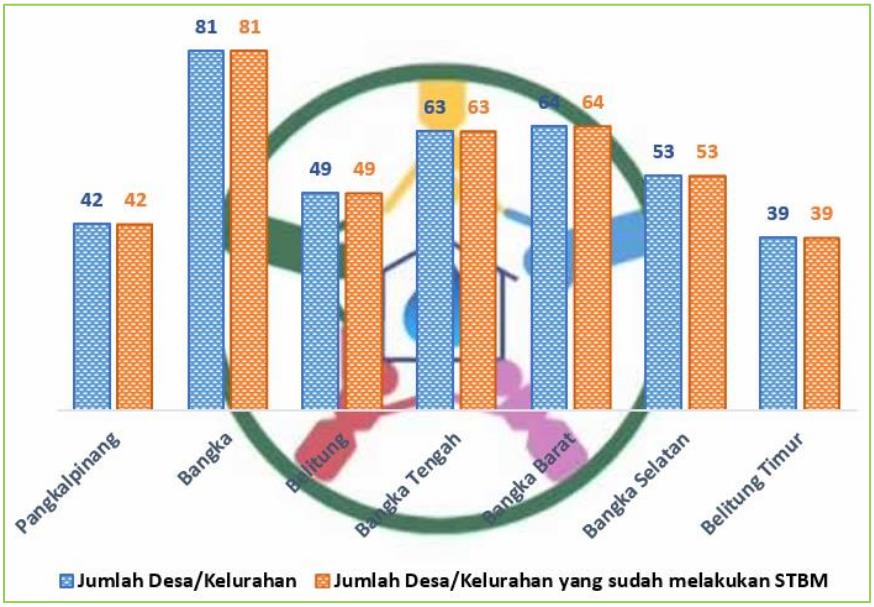

Gambar 2.119. Desa/Kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah melaksanakan STBM (sudah pemicuan), sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

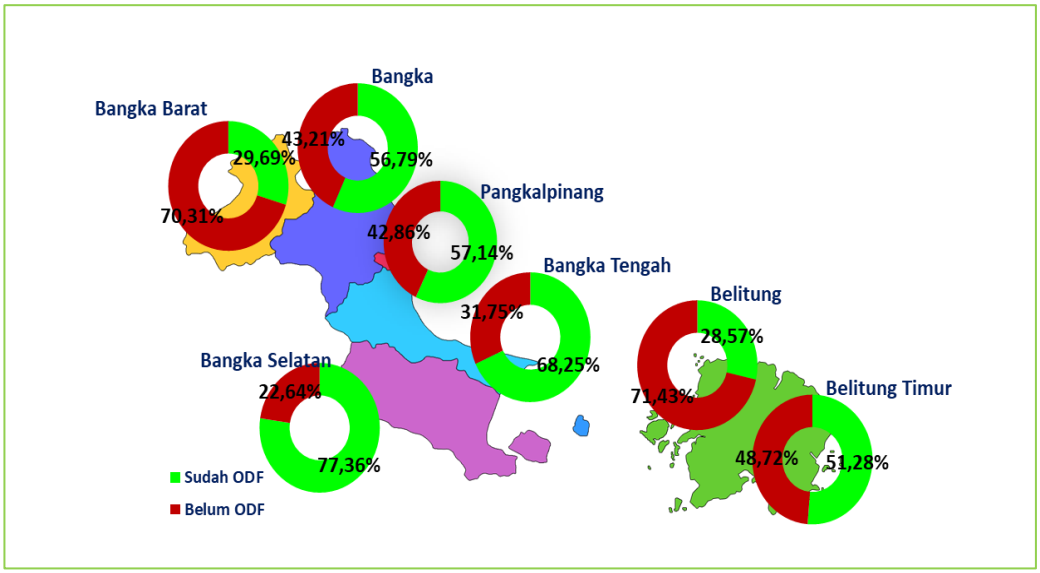

Gambar 2.120. Progres Desa/kelurahan ODF Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2019, sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sampai akhir Tahun 2019 sebanyak 207 atau sebesar 52,94 persen dari total jumlah 391 desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ODF *(Open Defecation Free)* atau Stop BABS (gambar 2.120).

Desa/kelurahan ODF tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bangka Selatan 77,36 persen, sedangkan pencapaian terendah 28,57 persen oleh Kabupaten Belitung. Progress desa/kelurahan tertinggi Tahun 2019 dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2018 di Kabupaten Belitung Timur 23,07 persen dan terendah 6,12 persen oleh Kabupaten Belitung.

Tabel II.40. Pencapaian Indikator Program Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Penduduk Akses Sanitasi (Jamban Sehat)	Penduduk Akses Air Minum Berkelanjutan
Kota Pangkalpinang	212.460	98,72	96,41
Kabupaten Bangka	316.093	95,50	88,31
Kabupaten Belitung	169.053	88,49	79,32
Kabupaten Bangka Tengah	180.613	93,77	78,73
Kabupaten Bangka Barat	195.130	95,21	91,77
Kabupaten Bangka Selatan	176.658	95,74	75,16
Kabupaten Belitung Timur	123.305	90,58	77,90
T O T A L	1.373.312	94,46	85,06

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

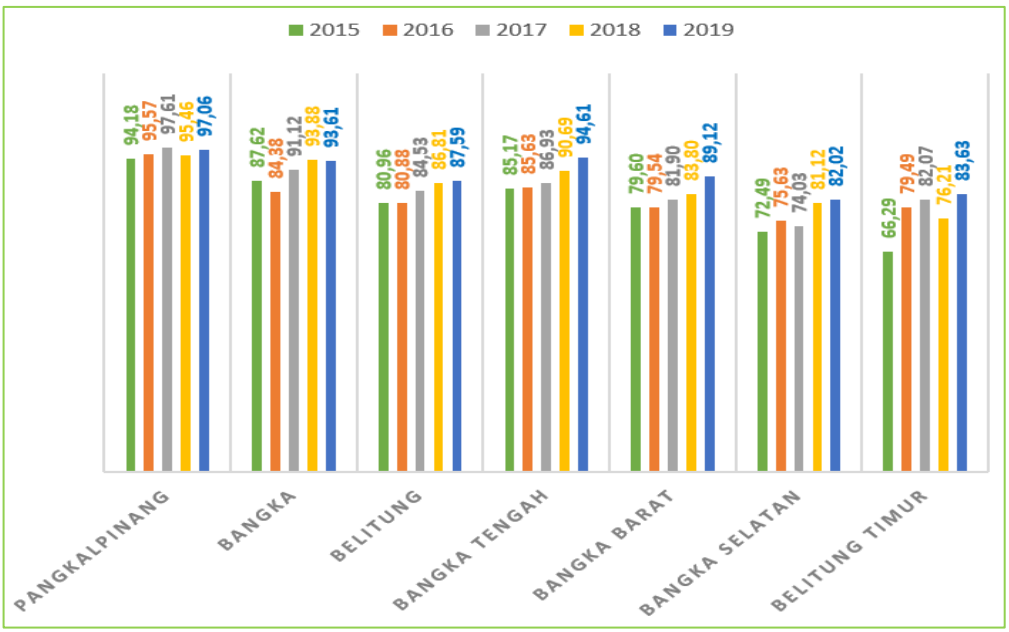

Gambar 2.121. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019, sumber: BPS, 2020

Upaya peningkatan ODF dilakukan dengan pemicuan yang merupakan cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi oleh individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan (Pamsimas, 2018). Pemicuan dilakukan untuk menimbulkan kesadaran bahwa kebiasaan BAB di sembarang tempat adalah masalah bersama karena dapat berimplikasi pada semua masyarakat sehingga solusinya juga harus dilakukan dan dipecahkan secara bersama.

Dengan sumber daya dan sarana prasarana berupa 62 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), 70 orang sanitarian serta 80 persen fasilitator aktif (STBM Indonesia, 2020) diharapkan pada Tahun 2021 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mencapai 100 persen ODF selain itu terwujudnya kabupaten/kota ODF dengan 100 persen desa/kelurahan ODF menjadi indikator keberhasilan intervensi sensitif konvergensi stunting sekaligus mendukung program pariwisata yang sehat (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020).

Gambar 2.122. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama jajarannya melaksanakan penanaman pohon pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia di Kawasan Wisata Biodiversity, Sungai Upang, Desa Tanah Bawah tanggal 24 November 2019. Sumber: Dok. DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

Tabel II.42. Aksi Kolaborasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Perkotaan Tahun 2019

Kegiatan	Lokasi	Pelaksana Kegiatan
Aksi Bersih Pantai Mangkalok dengan pengelolaan sampah pantai menjadi *ecobrick* pada tanggal 23 Februari 2019	Pantai Mangkalok	Komunitas Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup Becak Babel *(Bangka Environment Creative Activist of 'Kawa')*, Komunitas Forum Genre Sepintu Sedulang, Komunitas ARA dan PT. Refined Bangka Tin
Aksi Bersih Sampah Pantai tanggal 8 Maret 2019	Pantai Kuala, Jembatan Emas	Komunitas Peduli Sampah dan Lingkungan Hidup Becak Babel *(Bangka Environment Creative Activist of 'Kawa')* bersama perwakian mahasiswa UBB, Polman Babel, Stisipol, pecinta alam, Pemuda Karang Taruna, pelajar sekolah dan PT. Refined Bangka Tin.
Penanaman pohon endemik dari 34 Provinsi seluruh Indonesia di Hutan Mangkol pada peringatan Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) pada tanggal 12 Oktober 2019 dan peresmian Kelekak Nusantara oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 13 Oktober 2019	Hutan Mangkol, Kabupaten Bangka Tengah	BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perwakilan provinsi seluruh Indonesia
Gotong Royong Akbar membersihkan Sungai Rangkui dalam upaya mengembalikan kondisi sungai pada tanggal 22 November 2019	Berpusat di Taman Mandara dan pembersihan dilakukan di sepanjang aliran Sungai Rangkui	Sedikitnya 2000 orang dari berbagai elemen pemerintah, swasta dan masyarakat mulai dari pelajar, organisasi kepemudaan dari preman hingga alim ulama, BUMN dan perusahaan swasta serta jajaran Pemkot Pangkalpinang dipimpin oleh Walikota Pangkalpinang.
Penanaman pohon perupuk dalam kegiatan tema "Menanam Hari Menuju Esok Yang Lebih Baik" dalam rangka Hari Menanam Pohon pada tanggal 24 November 2019	Kawasan Wisata Biodiversity, Sungai Upang, Desa Tanah Bawah, Kabupaten Bangka	Diprakasai oleh Bangka Flora Society, PLN Babel dihadiri Sonny Keraf, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten Bangka, Kades Tanah Bawah, masyarakat, anak-anak dan perkumpulan Kampung Dongeng Indonesia
Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) pada tanggal 30 November 2019 di buka oleh GubernurKepulauan Bangka Belitung	Pantai Takari Rebo, Bangka	Forum DAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, relawan lingkungan, instansi BUMN/ BUMD, instansi pemerintah serta Kelompok Tani Hutan selaku pemegang izin HKm/HD/HTR.
Aksi bersih sampah dan penghijauan "Babel Coastal Cleanup and Green up Action" pada tanggal 21 Desember 2019	Pantai Temberan, Air Anyir	Becak Babel, PT. PJB dan PT. PJB Services PLTU Bangka
Pembangunan beberapa titik wisata baru seperti Taman Sari, Taman Madara di Kota Pangkalpinang yang berfungsi sebagai RTH dan taman rakyat dilengkapi tempat ibadah melibatkan CSR PT. Timah dan bantuan dari Bank Indonesia.	Kota Pangkalpinang	Pemkot Pangkalpinang, PT. Timah, Bank Indonesia dan menggandeng Pokdarwis.

Sumber: dari berbagai sumber dan dokumentasi kegiatan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

II.5.2.5.3. Aksi Kolaborasi Pemerintah, Masyarakat dan Swasta

Kolaborasi merupakan bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga maupun pihak-pihak yang

terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat (Haryono, 2012). Kolaborasi yang merupakan kerja sama antar kepentingan melibatkan pemerintah pemerintah, swasta dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *collaborative governance* dan menjadi salah satu bentuk perwujudan dari kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* (Irawan, 2017). Sambodo dan Pribadi, 2016 menulis Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut *collaborative governance* dalam pengelolaan pembangunan, terutama setelah terjadi perubahan mendasar dalam pemerintahan akibat reformasi, ketika rakyat mulai mengetahui hak dan kewenangan dan menuntut untuk terlibat dalam pembangunan di wilayahnya. Namun sebelumnya kolaborasi di Indonesia sudah berlangsung sejak lama walaupun dengan tingkatan berbeda dan menjadi ciri khas yang dikenal dengan gotong royong atau swadaya.

Adanya keterbatasan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan perkotaan berupa anggaran, sumber daya teknologi dan sebagainya membuat pemerintah melakukan kerja sama dengan sektor lainnya yaitu swasta dan masyarakat. Hal ini terjadi juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kerja sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan perkotaan supaya menjadi lebih baik dan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat (tabel 2.41).

Gambar 2.123. Wilhelmina Park Kota Pangkalpinang yang asri, pengembangannya menurut Walikota Pangkalpinang merupakan bantuan CSR pihak ketiga, didalamnya terdapat pohon-pohon berusia puluhan tahun dan fasilitas publik.

II.5.3 Permasalahan Persampahan

Sampah perkotaan merupakan salah satu dampak dari perkembangan pembangunan perkotaan yang sangat cepat. Bahkan menurut Dethier, 2017 di kota besar jumlah sampah naik secara eksponensial, namun kualitas lingkungan hidup menurun secara signifikan. Pengelolaan limbah padat perkotaan yang tidak efisien merupakan penyebab degradasi lingkungan di negara berkembang (Khajuria et al, 2010) namun dengan pengelolaan berkelanjutan sampah dapat menjadi energi terbarukan (Liu et al, 2019). Sebetulnya menurut Dethier, 2017 pemerintah telah berusaha mengatasi masalah lingkungan perkotaan dari tahun 1980-an, namun tidak cukup berhasil karena implementasi kebijakan yang tidak baik, adanya tindakan korupsi, kurangnya komitmen terhadap isu-isu lingkungan, serta rendahnya kesadaran pemerintah daerah. Satu-satunya program lingkungan yang dapat dikatakan cukup berhasil adalah Program Adipura yang menilai kota paling bersih di Indonesia per tahun. Sejak diselenggarakan Tahun 1986 hingga Tahun 2019 program ini telah diikuti lebih dari 500 kabupaten/kota dari 34 provinsi (KLHK, 2019).

Dalam sambutannya pada Rakernis Adipura di Jakarta pada Juli 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi, persoalan persampahan menjadi salah satu tekanan yang magnitude dan mengalami peningkatan dimensi terhadap kualitas lingkungan hidup perkotaan. Menteri LHK juga memaparkan lima hal mendasar dalam persoalan persampahan di Indonesia, yaitu:

1. Tingkat kapasitas pengelolaan persampahan dari pemerintah daerah yang relatif masih rendah, meskipun angka tingkat pelayanan meningkat, pada Tahun 2015 sebesar 63,70 persen dan pada Tahun 2018 menjadi 71,59 persen. Namun pengelolaan sampah yang baik dan benar masih berada pada angka 32 persen yang disebabkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih dominan dioperasikan secara *open dumping*

(pembuangan terbuka), pada Tahun 2018 TPA *open dumping* sebanyak 55,56 persen.

2. Tingkat kepedulian masyarakat masih sangat rendah terkait pengelolaan sampah. Hasil survey BPS, 2018 Indeks Ketidakpedulian Masyarakat Indonesia terhadap pengelolaan sampah dari angka 0-1 adalah 0,72.
3. Tren peningkatan sampah plastik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pada Tahun 1995 komposisi sampah plastic sebesar 9 persen, Tahun 2005 meningkat menjadi 11 persen dan pada Tahun 2016 menjadi 16 persen, sehingga jika tren ini berjalan secara normal dan BAU *(Business as Usual)*, maka persoalan sampah plastik dapat menjadi ancaman sangat serius bagi kehidupan dan lingkungan hidup.
4. Peran dan tanggung jawab produsen belum menjadi *mandatory* (kewajiban) dalam pengurangan sampah.
5. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwa sejak Tahun 2013 tidak diperkenankan lagi operasional TPA dilakukan secara *open dumping*, begitu juga dengan Perda-Perda berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang harus dilakukan.

Hal-hal tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat perkotaan serta dapat menyebabkan masyarakat terperangkap dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang lebih lanjut mengakibatkan biaya untuk mendapatkan air bersih semakin mahal, biaya kesehatan akibat pencemaran meningkat serta meningkatkan risiko bencana akibat kerusakan lingkungan.

Tabel II.42. Kabupaten/kota yang mendapat Piala Adipura

Tahun Perolehan	Nama Kota
Tahun 2017	Kota Sungailiat (Kabupaten Bangka); Kota Koba (Kabupaten Bangka Tengah); Kota Toboali (Kabupaten Bangka Selatan).
Tahun 2018	Kota Sungailiat (Kabupaten Bangka); Kota Koba (Kabupaten Bangka Tengah); Kota Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Manggar (Kabupaten Belitung Timur).

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dalam dua tahun terakhir yaitu Tahun 2017 dan 2018, hal yang cukup menggembirakan mengenai persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibuktikan dengan peningkatan jumlah kota yang mendapat Piala Adipura, setelah absen pada Tahun 2016 (tabel 2.42).

Banyak penelitian menggunakan model DPSIR *framework* dalam menilai dan mengevaluasi pengelolaan persampahan perkotaan *(Municipal Solid Waste).* Model yang dibangun oleh *European Environment Agency (EEA)* pada tahun 1999 ini mengadopsi model yang telah ada sebelumnya yaitu *PSR (Pressure-State-Response) framework* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan *United Nations Environmental Programme (UNEP)* pada tahun 1980-an.

Penelitian tentang analisis DPSIR sampah perkotaan antara lain: Kajuva, et al pada Tahun 2018 menilai tentang risiko lingkungan dari persampahan di Kota Dar Es Salaam, Tanzania; Khajuria et al, 2011 yang menganalisis MSW di India mengungkapkan kerangka DPSIR yang diintegrasikan dengan model Life Cycle Assessment (LCA) merupakan alat terbaik untuk menilai dampak timbulan sampah; serta Lahou dan Alsabbagh, 2019 menggunakan kerangka DPSIR untuk menilai pengelolaan sampah di Kuwait.

Masebinu, et al, 2017 dalam studinya melakukan review dari beberapa penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju timbulan sampah di perkotaan (tabel 2.43). Sedangkan Khajuria et al, 2010 menentukan faktor peningkatan timbulan sampah perkotaan yaitu urbanisasi, GDP per kapita, tingkat literasi dan kepedulian, serta layanan sanitasi. Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi setempat, disusun kerangka DPSIR untuk melakukan analisis permasalahan persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (gambar 2.124) beserta identifikasi indikator keberlanjutan yaitu aspek ekonomi, social dan lingkungan (tabel 2.43).

Tabel II.43. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju timbulan sampah perkotaan

Faktor Berpengaruh	Keterangan
Demografi	Jumlah dan kepadatan populasi, jumlah rumah tangga dan kepadatan rumah tangga, type dan ukuran rumah tangga, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pengeluaran, konsumsi energy dan tingkat pendapatan
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto, Indeks Harga Konsumen, status pekerjaan dan anggaran untuk sampah
Geografi	Kondisi iklim dan geografi serta sumber daya alam
Teknologi	Manufaktur yang tidak memenuhi standar, fasilitas dan peralatan yang tidak efisien
Sosial	Tingkat kepedulian, tingkat literasi, kerja sama antar masyarakat, agama dan budaya, urbanisasi, daya tarik pariwisata dan stabilitas politik
Perilaku konsumen	Pola konsumsi, aktivitas memasak, gaya hidup dan pola pembuangan sampah
Legislative dan administrasi	Strategi dan kebijakan, penegakan hukum dan kelembagaan, misalnya biaya pembuangan, program daur ulang serta jumlah sampah yang didaur ulang.

Sumber: Masebinu et al, 2017

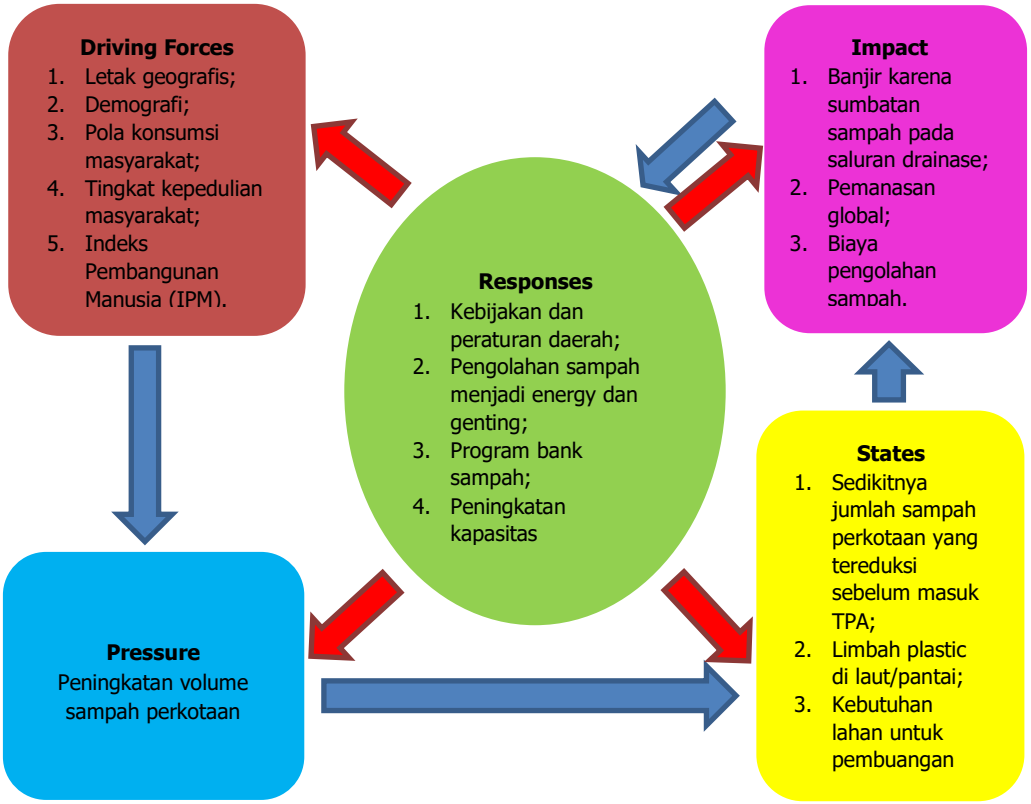

Gambar 2.124. Kerangka DPSIR Pengelolaan Persampahan Perkotaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel II.44. Identifikasi Kerangka DPSIR Pengelolaan Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Aspek keberlanjutan	Indikator	Keterangan DPSIR
Ekonomi	- Pendapatan per kapita (demografi); - Biaya pengolahan sampah; - Pengolahan sampah menjadi energy dan genting; - Program bank sampah.	D I R R
Lingkungan	- Letak geografis; - Peningkatan volume sampah perkotaan; - Banjir karena sumbatan pada saluran drainase; - Pemanasan global; - Limbah Plastik dilaut/pantai; - Sedikitnya jumlah sampah perkotaan yang tereduksi sebelum masuk ke TPA.	D P I I S S
Sosial	- Pertumbuhan penduduk (demografi); - Pola konsumsi masyarakat; - Tingkat kepedulian masyarakat; - Index Pembangunan Manusia; - Kebutuhan lahan untuk pembuangan sampah; - Kebijakan dan peraturan daerah; - Peningkatan kapasitas masyarakat.	D D D D S R R

Sumber: Hasil Identifikasi, 2020

II.5.3.1 Driving Force

II.5.3.1.1 Letak Geografis

Memiliki 20,10 persen wilayah daratan dan 79,90 persen wilayah laut menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan persampahan. Tuntutan kemandirian pengelolaan atas sampah yang dihasilkan dipengaruhi terutama oleh faktor biaya transportasi antar pulau dalam bisnis pengelolaan persampahan yang dipandang tidak sepadan dengan nilai sampah (DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018). Selain itu dengan wilayah perairan yang luas membuat masyarakat menjadi lebih permisif untuk membuang sampah ke laut.

II.5.3.1.2. Demografi

Pertumbuhan populasi bersama industrialisasi, urbanisasi serta perkembangan ekonomi merupakan penyebab signifikan peningkatan produksi limbah padat perkotaan di dunia (Kaushal et al, 2012), hubungan antara populasi perkotaan dan timbulan sampah dalam studi di beberapa negara Asia oleh Khajuria et al, 2010 dapat dilihat pada gambar 2.119

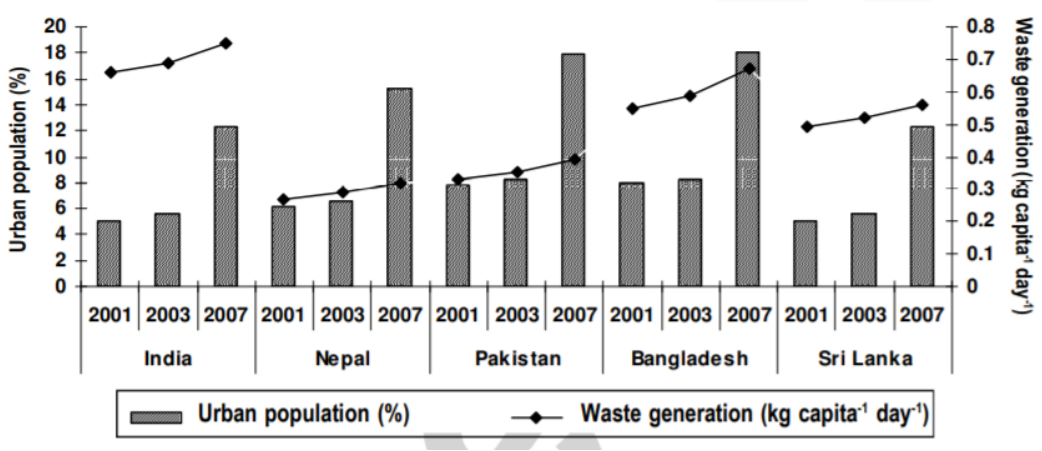

Gambar 2.125. Hubungan antara populasi perkotaan dan timbulan sampah dari penelitian di beberapa negara, studi antara Tahun 2001-2007. Sumber: World fact sheet, 2001 dalam Khajuria, 2010.

Tabel II.45. Perkiraan Jumlah Sampah Per Hari di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (m^3/hari)
Kota Pangkalpinang	208.868	316,47
Kabupaten Bangka	327.259	396,68
Kabupaten Belitung	182.293	220,96
Kabupaten Bangka Tengah	196.607	238,31
Kabupaten Bangka Barat	208.955	253,28
Kabupaten Bangka Selatan	210.019	254,57
Kabupaten Belitung Timur	125.771	316,47

Sumber: DLH, 2019

Di banyak studi faktor demografi rumah tangga mencakup jumlah dan jumlah anggota keluarga di negara-negara berkembang memberikan kontribusi terhadap jumlah limbah padat perkotaan sebesar 55% hingga 80% (Miezah et al, 2015). Penelitian oleh Trang, et al, 2016 menunjukkan rumah tangga dengan anggota lebih banyak menghasilkan jumlah sampah

yang lebih besar setiap harinya. Jumlah anggota keluarga *(family size)* berhubungan dengan generasi limbah padat karena pengaruh makanan dan kebiasaan konsumsi (Liu, et al, 2019)

Tabel II.46. Rumah tangga dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga		Rata-rata jumlah anggota keluarga	
	Tahun 2010	Tahun 2019	Tahun 2010	Tahun 2019
Kota Pangkalpinang	45.119	54.789	3,90	3,88
Kabupaten Bangka	70.870	86.176	3,93	3,91
Kabupaten Belitung	40.575	48.918	3,86	3,88
Kabupaten Bangka Tengah	40.540	49.137	4,00	3,99
Kabupaten Bangka Barat	45.131	54.755	3,90	3,89
Kabupaten Bangka Selatan	42.626	51.635	4,07	4,07
Kabupaten Belitung Timur	28.092	33.923	3,81	3,82

Sumber: BPS, 2020

Berbeda dengan Wang, et al (2019), Tasaki dan Kawai, 2014, atau Prajati, dkk, 2015, yang memiliki tren pendapatan per kapita berkorelasi positif terhadap generasi limbah padat perkotaan, Trang, et al, 2017 pada penelitiannya tentang faktor social ekonomi terhadap generasi sampah perkotaan di Thu Dau Mot, Vietnam menemukan hubungan yang negative antara pendapatan keluarga dan generasi sampah yang berarti orang dengan pendapatan tinggi menghasilkan sampah lebih sedikit dari pada orang dengan *income* rendah. Hal ini juga mematahkan pendapat keluarga yang memiliki pendapatan lebih besar memproduksi sampah lebih banyak per hari. Namun hal ini dapat diterima dengan kota yang merupakan pusat ekonomi, keuangan, budaya dan industri yang memiliki ketersediaan pelayanan makanan dan minuman yang sangat beragam, sehingga rumah tangga dengan status ekonomi lebih tinggi lebih sering makan diluar dan jarang memasak di rumah, berbanding terbalik dengan keluarga yang memiliki pendapatan lebih sedikit seperti hasil penelitian Badrudin, et al, 2002 di Taman Perling, Johor Bahru, Malaysia.

Gambar 2.126. PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2019, sumber: BPS, 2020

Tabel II.47. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kelompok Umur (tahun)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0–4	68.502	65.831	134.333
5–9	67.412	64.768	132.180
10–14	65.456	62.258	127.714
15–19	63.297	59.906	123.203
20–24	63.624	58.835	122.459
25–29	67.540	61.455	128.995
30–34	67.689	61.220	128.909
35–39	65.180	58.312	123.492
40–44	60.667	52.062	112.729
45–49	52.839	45.168	98.007
50–54	42.312	36.691	79.003
55–59	32.128	29.570	61.698
60–64	24.728	23.238	47.966
65–69	16.488	15.695	32.183
70–74	9.020	9.325	18.345
75+	7.641	9.935	17.576
Total	**774.523**	**714.269**	**1.488.792**

Sumber: BPS, 2020

Tabel II.48. Rasio Ketergantungan Umur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2010-2035

Tahun	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Non produktif	403,1	432,8	470,2	508	541	575,1
Produktif	827,1	940	1.047,40	1.149,50	1.247,80	1.335,90
Rasio ketergantungan	48,7	46	44,9	44,2	43,4	43

Sumber: BKKBN, 2016

Sampah rumah tangga merupakan kontributor terbesar dari total sampah yang dihasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 50% (gambar 2.127). Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga memiliki pengaruh yang besar terhadap timbulan sampah perkotaan.

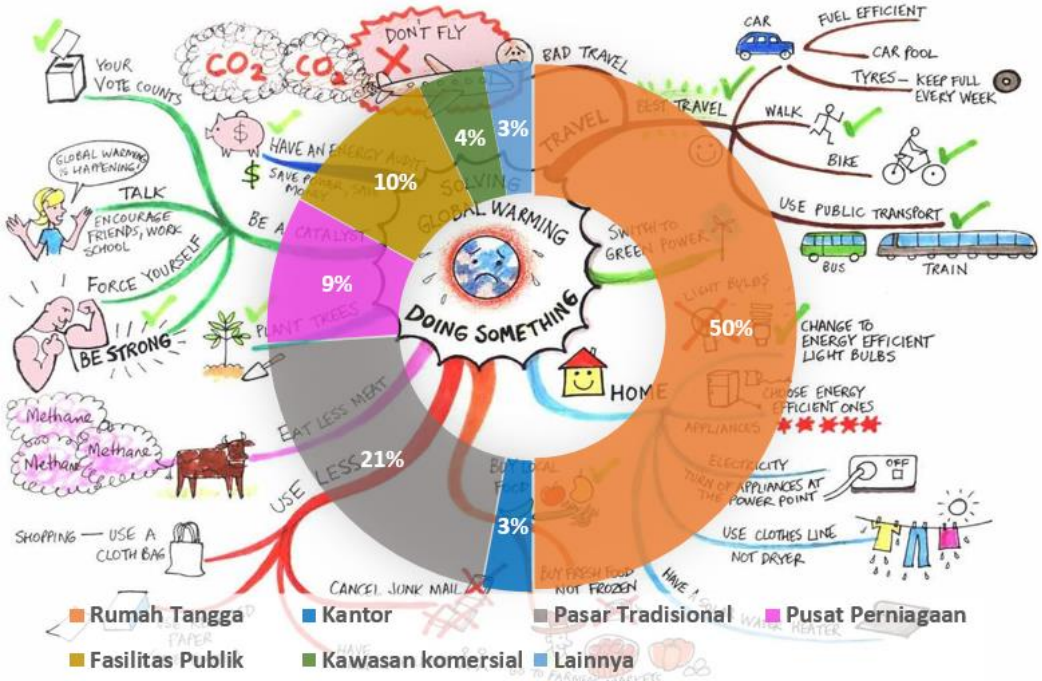

Gambar 2.127. Sumber sampah yang dihasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

II.5.3.1.3 Pola Konsumsi Masyarakat

Seiring dengan terjadinya perubahan pola konsumsi masyarakat, jenis sampah yang dihasilkan konsumen mengalami perubahan, seperti penggunaan bahan tidak terurai *(non degradable)* yang menggantikan bahan terurai *(degradable)* dalam membungkus makanan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang tidak terurai. Pada Tahun 1995 komposisi sampah plastik sebesar 9 persen, Tahun 2005 meningkat menjadi 11 persen dan pada Tahun 2016 menjadi 16 persen (KLHK, 2019).

II.5.3.1.4 Tingkat Kepedulian Masyarakat

Menurut Hamzah, 2013 perilaku adalah refleksi sikap mental yang terbentuk dari kepedulian. Sehingga dapat disimpulkan kepedulian

membentuk perilaku. Menurut BPS, 2018 yang melakukan survey terhadap Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia, pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator selain pengelolaan air, pengelolaan energy dan transportasi pribadi, tingginya tingkat ketidakpedulian terhadap sampah dapat terlihat dari perilaku rumah tangga di Indonesia mengenai penanganan sampah atau membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja sebagai upaya mengurangi sampah plastik.Lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia menggunakan cara yang tidak ramah lingkungan ketika melakukan melakukan pengelolaan terhadap sampah, membakar sampah (53%) yang akan menimbulkan polusi udara, membuang sampah ke sungai/selokan (5%) dan sembarangan tempat (2.7%) (Gambar 2.5.25). Sedangkan upaya dalam mengurangi sampah plastic, sebesar 81,4 persen rumah tangga di Indonesia jarang membawa tas belanja sendiri ketika berbelanja.

Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup (IPKLH) berkisar dari 0 hingga 1. Nilai IPKLH yang semakin besar (mendekati 1) menunjukkan semakin tingginya tingkat ketidakpedulian lingkungan di suatu wilayah dan sebaliknya semakin kecil nilai IPKLH (mendekati 0) menunjukkan semakin rendah tingkat ketidakpedulian (semakin peduli) lingkungan di wilayah tersebut (gambar 2.122).

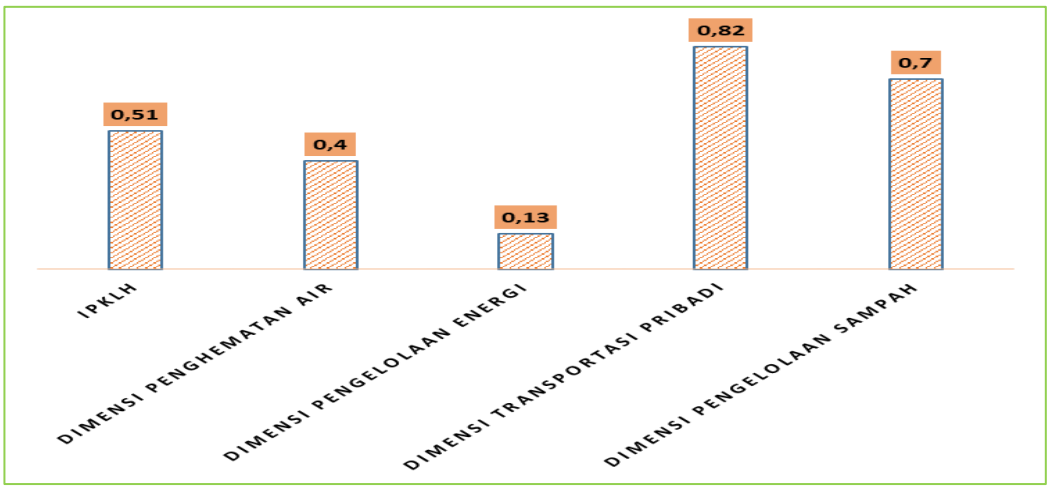

Gambar 2.128. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: BPS, 2018, diolah

II.5.3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian BPS, 2018 terdapat hubungan antara perilaku ketidakpedulian pengelolaan sampah dengan kondisi social ekonomi yang diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan PDRB per kapita. Semakin baik kondisi social ekonomi suatu wilayah maka perilaku kepedulian terhadap pengelolaan sampah semakin baik. Hal ini terbukti kelompok provinsi dengan IPM dan PDRB perkapita tinggi cenderung berkelompok dengan IPKLH pengelolaan sampah yang rendah, dan sebaliknya. Namun menurut Elyasa dalam penelitiannya Tahun 2019 tentang pengaruh IPM terhadap timbunan sampah di tujuh kabupaten/kota wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hal ini tidak berlaku karena diperoleh hasil nilai IPM berbanding lurus dengan jumlah timbunan sampah di TPA (gambar 2.123). Penyebabnya menurut Elyasa dapat disebabkan oleh faktor meningkatnya social ekonomi masyarakat menyebabkan konsumsi meningkat.

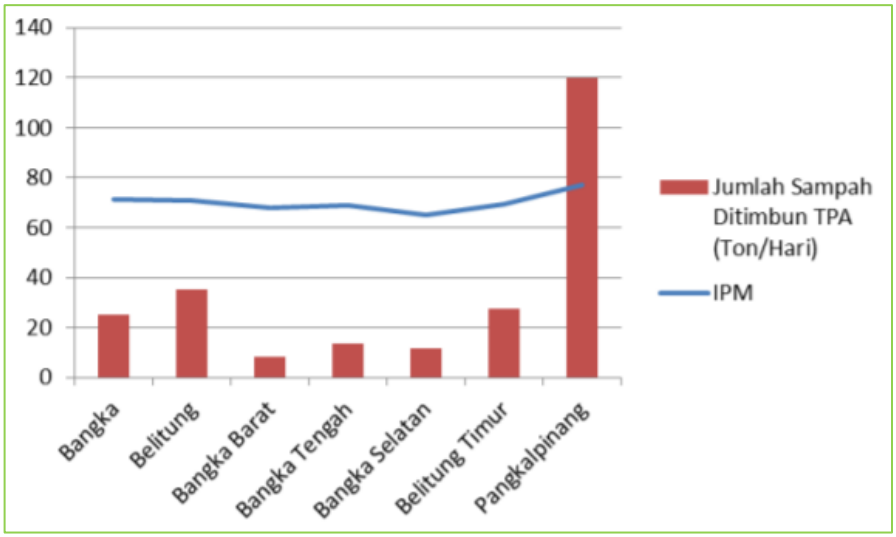

Gambar 2.129. Pengaruh tingginya IPM terhadap jumlah sampah yang ditimbun di TPA. Sumber: Elyasa, 2019

II.5.3.2 Pressure

Peningkatan volume sampah perkotaan menjadi *pressure* pada upaya pengelolaan persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Studi Manajemen dan Produksi Persampahan di Wilayah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 telah melakukan perhitungan massa sampah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan data jumlah penduduk dari BPS pada Tahun 2017 dan jumlah produksi sampah per kapita dari masing-masing kabupaten/kota yang tercantum dalam isian Adipura serta *judgement* atau penyesuaian dengan mempertimbangkan standar referensi sampah per kapita nasional (tabel 2.49).

Tabel II.49. Produksi Sampah Per Kapita dan Total Sampah Dihasilkan pada Tahun 2017

Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)*	Sampah per kapita (kg/orang/hari)**	Massa Sampah (Ton/Tahun)
Kota Pangkalpinang	204.392	0,600	44.761,85
Kabupaten Bangka	324.305	0,400	47.348,53
Kabupaten Belitung	182.418	0,392	26.093,85
Kabupaten Bangka Tengah	188.603	0,424	29.200,00
Kabupaten Bangka Barat	204.778	0,470	35.153,15
Kabupaten Bangka Selatan	201.782	0,470	34.582,29
Kabupaten Belitung Timur	124.587	0,481	21.863,50
T O T A L	**1.430.865**	**0,457**	**239.003,17**

Sumber: *Data Jumlah Penduduk Tahun 2017, BPS, 2018; pengumpulan data Kabupaten/Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

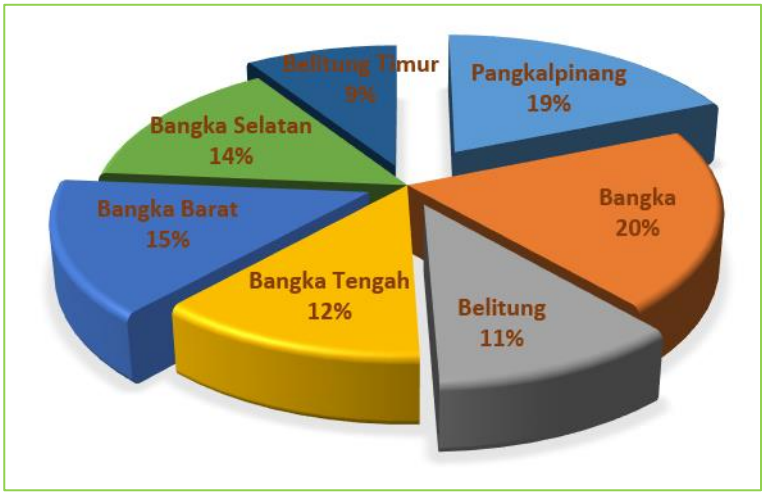

Gambar 2.130. Komposisi asal produksi sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.

Jumlah sampah per kapita tertinggi berada di Kota Pangkalpinang yaitu 0,600 kg/orang/hari. Hal ini menurut studi yang dilakukan karena tingkat ekonomi penduduk dan keberadaan sarana dan prasarana yang ada di Kota Pangkalpinang seperti pelabuhan, bandar udara, pusat perbelanjaan yang mendorong urbanisasi dan kegiatan perekonomian yang berkorelasi positif dengan jumlah produksi sampah.

Selain Kota Pangkalpinang, sumber sampah terbanyak berasal dari Kabupaten Bangka dikarenakan jumlah penduduk yang banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya (gambar 2.130). Perhitungan dengan menggunakan data jumlah penduduk dan total sampah diketahui bahwa per kapita penduduk di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghasilkan sampah sebesar 0,462 kg/hari.

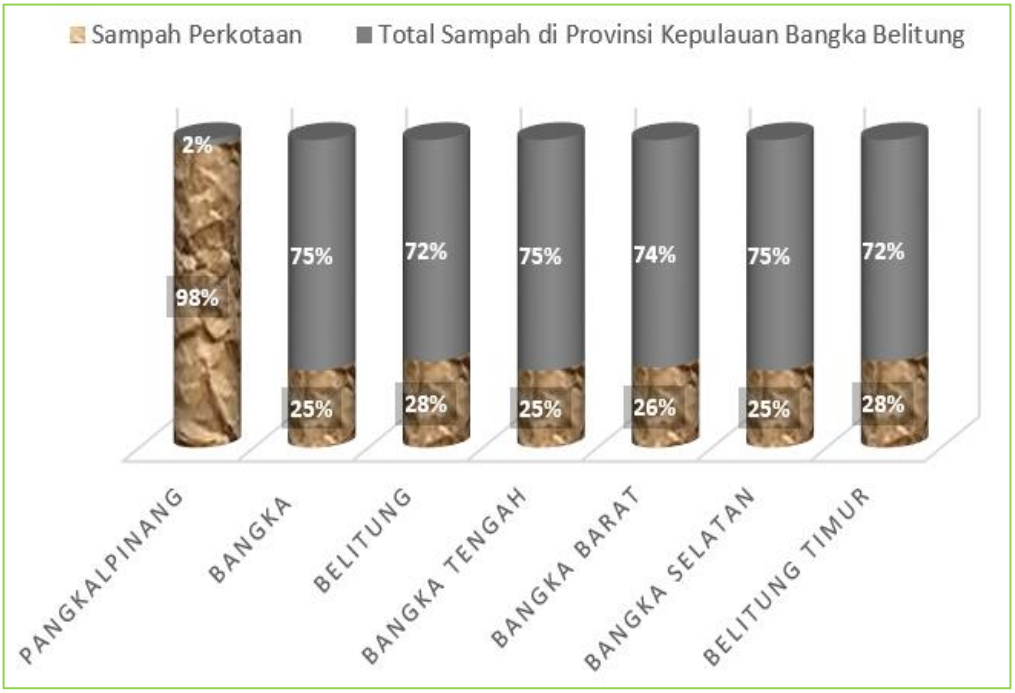

Gambar 2.131. Perbandingan sampah perkotaan dan total sampah yang dihasilkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari gambar 2.131 menunjukkan jumlah sampah Kota Pangkalpinang yang tinggi dibandingkan dengan total sampah yang dihasilkan. Hal ini

disebabkan karena Pangkalpinang merupakan sampah daerah perkotaan, yang cenderung memiliki permasalahan ketersediaan lahan untuk Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebaliknya daerah non perkotaan lebih mudah mendapatkan lahan untuk penyelesaian masalah persampahan (DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018).

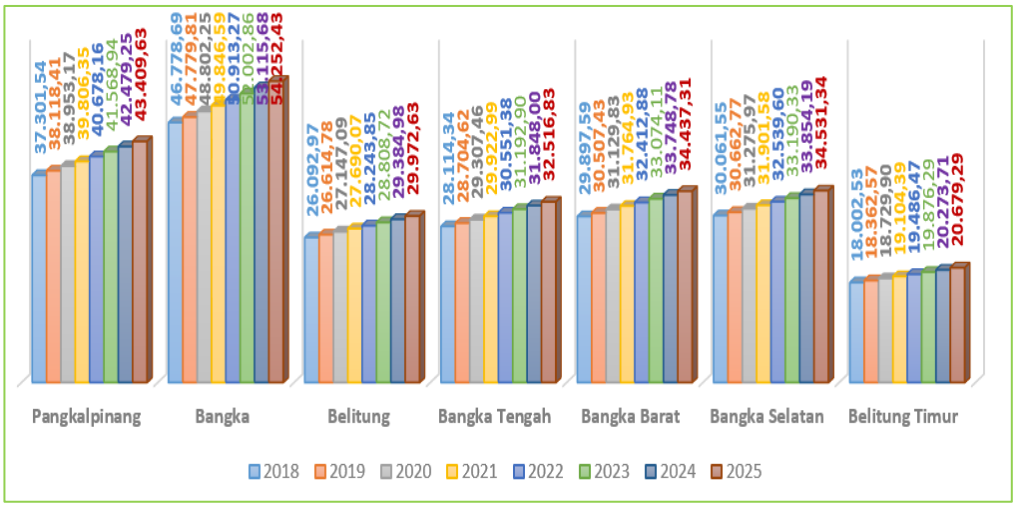

Gambar 2.132. Hasil perhitungan dan proyeksi timbulan sampah Tahun 2018 s.d Tahun 2025 per kabupaten/kota dalam Ton/Tahun, sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Berdasarkan faktor demografi mencakup jumlah penduduk, persentase pertumbuhan penduduk serta dengan memasukkan faktor estimasi, gambar 2.132 menyajikan proyeksi produksi sampah hingga Tahun 2025 yang tergambarkan semakin meningkat setiap tahunnya.

II.5.3.3 State

II.5.3.3.1 Sedikitnya Jumlah Sampah yang Tereduksi Sebelum Masuk TPA.

Menurut Dokumen Studi Manajemen dan Produksi Sampah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 sampah terproduksi dari kegiatan masyarakat yang masuk TPA sejumlah 263 ton/hari dari total sampah tang timbul sebesar 971,45 ton/hari, sedangkan sampah yang

ditargetkan untuk tereduksi dari TPST3R/bank sampah/kampung organic kurang lebih 8,7 persen.

Tabel II.50. Jumlah Timbulan Sampah dan Sampah Masuk TPA Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Massa Sampah (ton/hari)	Massa Sampah Perkotaan (ton/hari)	Sampah Tereduksi (ton/hari)	Massa Sampah Masuk TPA Tercatat (ton/hari)	Lokasi TPA
Kota Pangkalpinang	122,65	120,00	6,10	120,00	- TPA Belinyu; - TPA Kenanga
Kabupaten Bangka	129,72	32,32	12,44	58,29	- TPA Paritenam
Kabupaten Belitung	71,49	19,67	13,38	35,36	- TPA Gunung Sadai
Kabupaten Bangka Tengah	80,00	20,00	3,39	13,25	- TPA Simpang Jongkong
Kabupaten Bangka Barat	96,31	25,15	4,82	8,26	- TPA Muntok
Kabupaten Bangka Selatan	94,75	23,79	11,72	16,10	- TPA Simpang Besaoh
Kabupaten Belitung Timur	59,90	16,48	4,85	11,54	- TPA Trafo Mayang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	654,80	257,59	56,72	262,80	

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Pada kasus Kota Pangkalpinang jumlah sampah yang TPA hampir sama dengan jumlah sampah yang timbul (Tabel 2.50). Hal ini dapat menyebabkan masa pakai TPA menjadi lebih singkat seperti yang terjadi pada TPA Paritenam saat ini.

II.5.3.3.2 Limbah Plastik di Laut/Pantai

Di tengah masyarakat dunia yang makin sadar lingkungan hidup dan pernyataan PBB dalam situs https://www.unenvironment.org/ bahwa Indonesia adalah sumber pencemar plastik di lautan nomor dua di dunia setelah China, isu pencemaran plastik di laut dapat mempengaruhi citra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu tujuan wisata dunia, lebih lanjut hal ini dapat menjadi faktor penurunan kedatangan wisatawan dan akan berdampak langsung terhadap kemajuan bidang pariwisata.

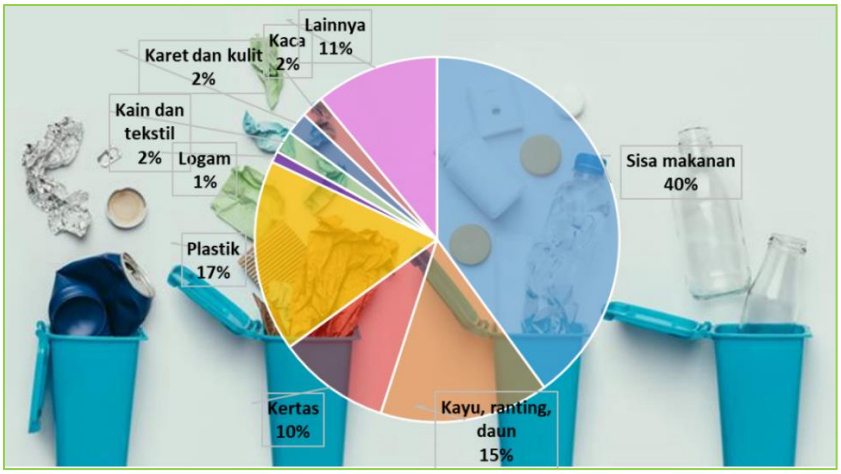

Gambar 2.133. Komposisi Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Dari data komposisi sampah, sampah jenis plastic merupakan jenis sampah nomor dua terbanyak yang dihasilkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (gambar 2.127).

Tabel II.51. Komposisi Sampah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis	Komposisi (%berat)						
	Pangkalpinang	Bangka	Belitung	Bangka Tengah	Bangka Barat	Bangka Selatan	Belitung Timur
Sisa Makanan	54,25	23,09	36,56	48,00	21,27	37,46	43,92
Kayu, ranting, daun	7,86	33,93	5,97	15,00	5,48	19,99	3,96
Kertas	9,93	11,50	12,93	5,50	17,19	10,04	5,44
Plastik	15,05	18,82	20,40	17,00	19,96	17,42	33,19
Logam	0,45	0,62	1,03	1,00	17,92	1,32	0,89
Kain dan tekstil	2,42	3,79	2,70	10,00	2,47	1,95	1,56
Karet dan kulit	1,70	0,53	1,70	2,00	3,89	2,01	0,39
Kaca	1,93	0,66	2,64	0,50	3,35	1,84	1,42
Lainnya	6,40	7,06	16,07	1,00	8,47	7,97	9,23

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

II.5.3.3.3. Kebutuhan Lahan untuk Pembuangan Sampah

Meningkatnya volume sampah perkotaan yang tidak tereduksi berakibat menjadi permasalahan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu mempersingkat umur TPA dengan makin sempitnya lahan untuk menampung sampah di TPA tersebut. Padahal seiring dengan berjalannya waktu akibat pertambanhan jumlah penduduk dan pembangunan, ketersediaan lahan akan semakin berkurang. Hal ini terjadi pada TPA

Paritenam yang sudah tidak mampu menampung sampah terproduksi (DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018).

Tabel II.52. TPA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama TPA	Spesifikasi	Lingkup Area	Sampah masuk/hari (ton/hari)	Volume eksisting (m^3)
TPA Paritenam, Pangkalpinang	- Luas: 4,8 ha; - Kapasitas: 125.000m^3; - Desain system: *sanitary landfill;* - Existing: *sanitary landfill* (sebagian kecil) dan *open dumping;* - Tahun mulai operasi: 2009; - Rencana umur: 20 tahun.	Kota Pangkalpinang	120	95.000,00
TPA Belinyu, Simpang Tiga, Kabupaten Bangka	- Luas: 15 ha; - Kapasitas: 135.000m^3; - Desain system: *sanitary landfill;* - Existing: *Open dumping.*	Kabupaten Bangka	3,00	2.956,50
TPA Kenanga, Kabupaten Bangka	- Luas: 5 ha; - Kapasitas: 135.000m^3; - Desain system: *controlled landfill.*	Kabupaten Bangka	55,29	40.077,00
TPA Simpang Jongkong, Koba, Kabupaten Bangka Tengah	- Luas: 20 ha; - Kapasitas: 70.000m^3; - Desain system: *Sanitary landfill.*	Kabupaten Bangka Tengah	13,25	10.000,00
TPA Junjung Besaoh, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	- Luas: 15 ha; - Kapasitas: 160.000m^3; - Desain system: *sanitary landfill.*	Kabupaten Bangka Selatan	16,10	40.000,00
TPA Muntok, Air Belo, Kabupaten Bangka Barat	- Luas: 4,2 ha; - Kapasitas: 114.135m^3; - Desain system: *sanitary landfill.*	Kabupaten Bangka Barat	8,26	Tidak ada data
TPA Gunung Sadai	- Luas: 8,5 ha; - Desain system: *sanitary landfill*; - Eksisting: open dumping; - Tahun Operasi: 2012.	Kabupaten Belitung	35,36	Tidak ada data
TPA Trafo Mayang, Kabupaten Belitung Timur	- Luas: 12 ha; - Kapasitas: 120.000m^3; - Desain system: *sanitary landfill.*	Kabupaten Belitung Timur	11,54	Tidak ada data

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Salah satu kelemahan pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia selain system kumpul-angkut-buang adalah keterbatasan kemampuan TPA dalam mengelola sampah. TPA Paritenam yang memiliki luas 4,8 ha (tabel 2.52) dengan system *open dumping* saat ini diketahui sudah tidak layak dan tidak dapat menangani sampah masuk dengan baik. Sampah yang tidak

ditangani dengan baik memiliki multiplier effect baik sektor ekonomi maupun lingkungan karena akan mengakibatkan pencemaran air, tanah dan udara, perubahan iklim hingga bibit penyakit. Serta secara estetika merusak pemandangan kota dan menimbulkan bau tidak sedap.

II.5.3.4 Impact

II.5.3.4.1 Banjir Karena Sumbatan pada Drainase

Secara umum system drainase merupakan serangkaian bangunan air yang berfungsi mengurangi dan membuang kelebihan air (banjir) dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan dengan optimal (Ardana, dkk, 2018). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, 2014 sarana drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

Menurut Hambali, 2015 menurunnya fungsi pelayanan drainase menyebabkan genangan dan banjir di Kota Pangkalpinang. Kolong Kacang Pedang dan Sungai Rangkui merupakan satu kesatuan sub system drainase berfungsi sebagai pengendali banjir di Kota Pangkalpinang, namun seringkali fungsi vital ini terganggu karena menurunnya kualitas drainase akibat tercemar limbah rumah tangga dan industri. Kapasitas saluran drainase yang belum memadai, pembangunan pemukiman di sepanjang saluran drainase yang dapat mengurangi luas penampang basah saluran serta ditemukan beberapa ruas saluran drainase sampah rumah tangga dan buangan tanah merupakan permasalahan sektor drainase Kota Pangkalpinang (tabel 2.53).

Restiani dan Sabri, 2015 dalam menganalisis kinerja system drainase Kelurahan Kuto Panji, Kecamatan Belinyu, permasalahan umum banjir di Jalan Singayudha yang dapat mengancam permukiman dan infrastruktur perekonomian serta terganggunya arus lalu lintas adalah sampah yang

terdapat pada saluran drainase. Sampah yang menyumbat saluran drainase juga menjadi permasalahan utama pada banjir ketika hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Kelurahan Tanjung, Kota Muntok, Kabupaten Bangka Barat (Melinda, dkk, 2018).

Tabel II.53. Masalah pada beberapa saluran drainase Kota Pangkalpinang

Wilayah	Permasalahan
Kelurahan Gedung Nasional	- Penyempitan penampang saluran karena adanya bangunan hunian milik masyarakat diatas saluran RT. 1 menyebabkan terjadinya banjir; - Hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi lama menyebabkan banjir disertai sampah dan sedimentasi yang mengalir menuju RT. 2; - Perilaku masyarakat RT. 4 yang membuang sampah menyebabkan saluran air tersumbat; - Di RT. 5 terdapat saluran air kecil yang tidak berfungsi sering terjadi banjir jika hujan dengan durasi lama; - Terjadi penumpukan sedimen dan sampah di badan sungai sekitar RT. 6; - RT. 7 merupakan wilayah kategori kumuh dengan sedimentasi menumpuk dan masyarakat membuang sampah; - RT. 8 merupakan daerah paling kumuh di daerah hilir yang terdapat banyak tumbuhan liar, sampah dan sedimentasi di badan sungai.
Kelurahan Kejaksaan	- RW. 4 memiliki masalah utama buruknya pengelolaan sampah rumah tangga, sehingga menumpuk di saluran yang terbawa ke sungai rangkui; - Limbah rumah tangga langsung dialirkan ke drainase yang mengalir ke Sungai Rangkui menyebabkan airnya berwarna kehitaman dan berbau.
Kelurahan Pintu Air	- Adanya sedimentasi sungai akibat pertambangan di daerah hulu; - Penumpukan sampah di saluran drainase dekat pemukiman padat penduduk dan faktor limbah rumah tangga membuat kualitas air kurang baik; - Aktivitas pembangunan daerah sekitar bangunan pintu air dan tumpukan sampah menyebabkan aliran air menuju saluran utama tersumbat

Sumber: Hambali, dkk, 2015

II.5.3.4.2 Pemanasan Global

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) atau *Greenhouse Gases (GHGs)* merupakan permasalahan lingkungan lain yang harus diatasi akibat sampah. TPA sebagai tempat pembuangan akhir sampah memiliki potensi untuk menghasilkan gas-gas penyebab perubahan iklim dan pemanasan global ini (Dhokhikah dan Trihadiningrum, 2012).

Dalam Draft Petunjuk Teknis Perhitungan Emisi GRK pada Sektor Industri, Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (2012), Gas Rumah Kaca merupakan gas yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efek rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam konvensi PBB mengenai Perubahan Iklim ada enam jenis yang digolongkan sebagai GRK yaitu karbondioksida (CO_2), gas metan (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), sulfurheksafluorida (SF_6), perfluorokarbon (PFCS) dan hidrofluorokarbon (HFCS). Selain itu ada beberapa gas yang juga termasuk dalam GRK yaitu karbonmonoksida (CO), nitrogen oksida (NO_X), klorofluorokarbon (CFC), dan gas-gas organik *non metal volatile*. Ilmuwan menggunakan istilah GWP *(Global Warming Potential)* untuk membandingkan kekuatan pengaruh antara gas-gas rumah kaca tersebut terhadap pemanasan global (Team SOS, 2011). GWP didefinisikan sebagai ukuran pengaruh suatu gas rumah kaca dalam satuan berat terhadap pemanasan global. Ilmuwan juga membandingkan GWP antara gas-gas rumah kaca dengan CO_2 sehingga GWP CO_2 sama dengan 1.

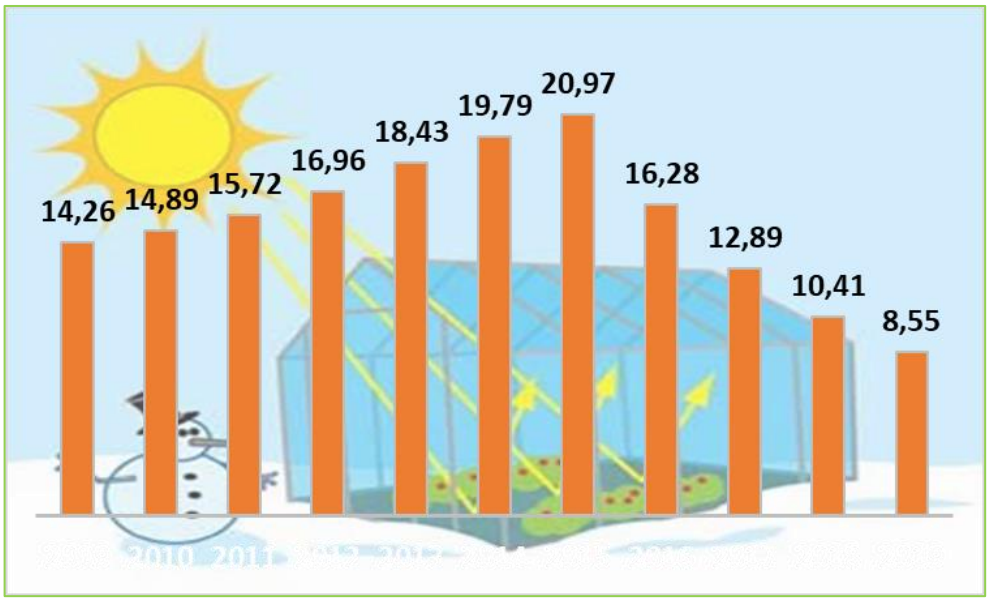

Gambar 2.134. Emisi Sektor Limbah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ($GgCO_2$), sumber: KLHK, 2020

II.5.3.4.3. Biaya Pengolahan Sampah

Sistem pengelolaan kumpul-angkut-buang membutuhkan biaya pengelolaan sampah tidak sedikit. Total biaya pengelolaan sampah mencakup biaya investasi dan manajemen jenis pengolahan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya pembelian kendaraan pengangkut sampah dan produk olahan (Pratamasyari, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prajati, dkk, 2015 yang menghitung biaya pengelolaan sampah beberapa ibukota provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dengan permodelan menggunakan proyeksi pertumbuhan penduduk beserta aspek demografi yang dikembangkan oleh Khajuria et al, 2010 dan berdasarkan KSN-SPP 2006, Pangkalpinang pada Tahun 2015 dan 2020 sebagai kota sedang yang sedang berkembang mengalokasikan dana lebih besar dari PDRB untuk biaya pengelolaan sampah dengan rasio biaya terhadap pengelolaan PDRB untuk pengelolaan sampah sebesar lebih dari 0,8 persen (tabel 2.54).

Tabel II.54. Rasio Biaya Pengelolaan Sampah Kota Pangkalpinang terhadap PDRB

Tahun	Biaya Total Pengelolaan Sampah (milyar/tahun)	PDRB (milyar/tahun)	Rasio Biaya Pengelolaan terhadap PDRB
2015	42,93	41,81	1,0268
2020	55,35	65,52	0,8448

Sumber: Prajati, dkk, 2015

II.5.3.5 Responses

Berikut adalah responses baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan persampahan perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II.5.3.5.1 Kebijakan dan Peraturan Daerah

Sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia masih bertumpu pada pemerintah terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan dengan Indeks Perilaku Ketidakpedulian

Indonesia pada dimensi pengelolaan sampah sebesar 0,72 (BPS, 2018, KLHK, 2019).

Tabel II.55. Kebijakan Daerah sebagai Response Masalah Persampahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Kebijakan	Nomor dan Tanggal	Tentang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
Peraturan Gubernur	Nomor 48 Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2019	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kota Pangkalpinang		
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang	Nomor 6 Tahun 2013 Tanggal 28 November 2013	Pengelolaan Sampah
Kabupaten Bangka		
Peraturan Bupati	Nomor 43 tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018	Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Bangka
Kabupaten Belitung		
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung	Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015	Pengelolaan Sampah
Kabupaten Bangka Tengah		
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah	Nomor 4 Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013	Pengelolaan Sampah
Kabupaten Bangka Barat		
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat	Nomor 3 tahun 2012 Tanggal 17 April 2012	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan
Kabupaten Bangka Selatan		
Peraturan Bupati	Nomor 51 Tahun 2018 Tanggal 12 Oktober 2018	Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bangka Selatan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Kabupaten Belitung Timur		
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Nomor 8 Tahun 2014 Tanggal 20 Oktober 2014	Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan

Sumber: JDIH Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Jati, 2013 melakukan penelitian peran pemerintah dalam pengelolaan sampah adalah sebagai regulator dan penyedia servis *(service provider)*. Peran pemerintah sebagai regulator dalam pengelolaan sampah meliputi kebijakan, peraturan daerah dan sanksi hukum, sedangkan peran pemerintah sebagai *service provider* adalah penanggung jawab pelayanan, membuat mekanisme/alur pelayanan serta lokasi pelayanan.

II.5.3.5.2. Pengolahan Sampah menjadi Energi dan Genting

Semakin besar fraksi sampah yang tidak tertangani, biaya pengelolaan sampah di TPA akan semakin besar, sehingga dapat dicari alternative pengelolaan sampah yang modern dengan mengubah sampah

menjadi produk bernilai jual (Pratamasyari, 2019). Mengubah sampah menjadi produk bernilai jual akan menambah reduksi sampah masuk ke TPA, dan dapat menekan biaya pengelolaan sampah karena meminimumkan banyaknya sampah yang diangkut ke *landfill*.

Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersinergi dengan PT. PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung untuk mengolah sampah melalui program *waste to energy.* Bersama Kelompok Swadaya Masyarakat Sekar Rukun, PT. PLN dan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengolah sampah menjadi sumber energy listrik Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang hasilnya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Tinggi. Hal ini dilaksanakan dengan teknologi peuyemisasi yaitu sampah organic dan anorganik difermentasi menjadi pellet sampah sebagai sumber energy listrik yang diolah menggunakan teknologi gasifier.

Program bank sampah akan lebih bermanfaat jika dipadukan dengan kreatifitas yang memberi nilai ekonomis bagi sampah sehingga menjadi produk daur ulang yang bermanfaat. Pemerintah Kabupaten Belitung mendorong desa-desa melalui BUMDes untuk mendirikan pabrik pengolahan sampah plastic, salah satunya yang terletak di Kampung Ilir, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung yang mengolah sampah plastic menjadi genting plastic.

II.5.3.5.3. Program Bank Sampah

Program bank sampah merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan persampahan. Dasar hukum program bank sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa paradigma pengelolaan sampah harus berubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan pada sumbernya dan daur ulang sumber daya.

Dengan strategi 3R yaitu Reduce, Reuse dan Recycle, bank sampah dapat diterapkan di masyarakat. Melalui program bank sampah, Haryanti,

dkk, 2020, penerapan bank sampah pada Kota Yogyakarta terbukti membantu pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan potensi reduksi sebesar 97 persen dan berdasarkan survey setelah adanya bank sampah 65 persen responden menyatakan lingkungan menjadi bersih dan 35 persen menyatakan lingkungan sangat bersih. Sedangkan di Surabaya dengan program bank sampah, sampah tereduksi sebesar 81,50 persen (Wardhani dan Harto, 2018). Keberadaan sebuah bank sampah seperti Bank Sampah Malang (BSM) di Kota Malang Jawa Timur, proyeksi perhitungan menggunakan *koefisien Generation Rate* dari jumlah penduduk yang berpotensi menghasilkan volume timbulan sampah dan skenario, peluang BSM dapat mereduksi sampah yang dibuang ke TPA pada Tahun 2020 sebesar 2 persen setara 3,956 ton namun dengan penguatan melalui strategi optimalisasi BSM melalui diversifikasi produk melalui komposting dan ekspansi afiliasi di sekolah-sekolah diproyeksikan pada Tahun 2020 dapat mereduksi sebesar 22,702 ton (gambar 2.135).

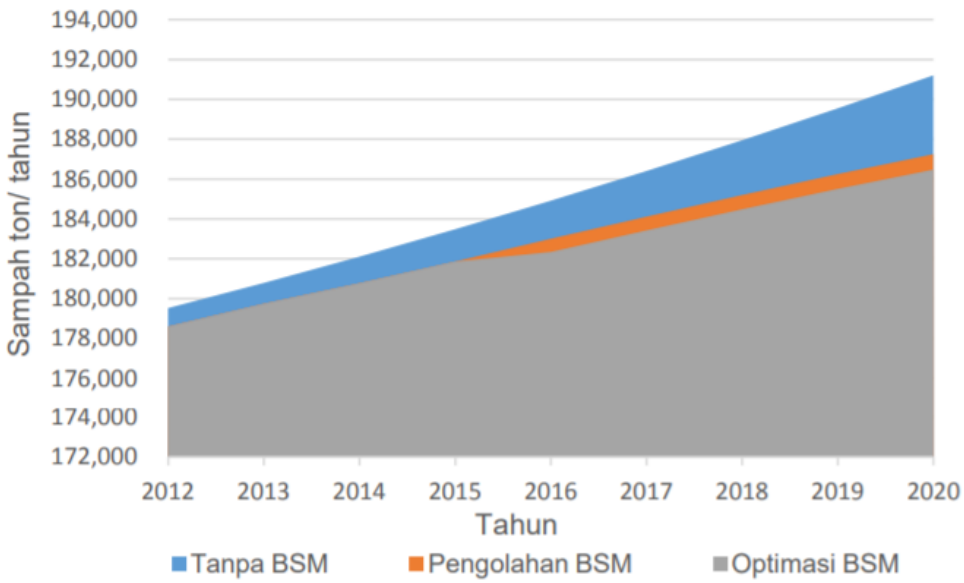

Gambar 2.135. Proyeksi perbandingan volume sampah di Kota Malang sebelum dan setelah optimalisasi Bank Sampah Malang, sumber: Pratama dan Ihsan, 2017.

Tabel II.56. Jumlah Bank Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Karyawan (orang)	Omset (Rp)
Kota Pangkalpinang							
Bank Sampah Papin	SK No. 188.4/18/DLH/I/2017	1.935	Aktif	Kota Pangkalpinang	1.324	5	1.300.000,-
Bank Sampah Kawa Begawe	SK. No. 07/SK05/Kel-sld/XII/2017	300	Aktif	Selindung Lama, Kec. Gabek	200	6	300.000,-
Bank Sampah Berkah	14 Tahun 2019	Tidak ada data	Aktif	Kel. Semabung Lama, Kec. Bukit Intan	Tidak ada data	9 orang	Tidak ada data
Kabupaten Bangka Tengah							
Bank Sampah Kel. Simpang Perlang (Teratai)	SK No. 188.5/50/19.04.01.1005/2018 tanggal 1 Februari 2018	960	Aktif	Kelurahan Simpang Perlang	6	3	500.000,-
Bank Sampah Kel. Arung Dalam	SK No.188.5/043/19.04.01.1002/2019 tanggal 7 Januari 2019	2.400	Aktif	Kelurahan Arung Dalam	30	2	Tidak ada data
Bank Sampah Guntung (Temiang Jaya)	SK No. 188.5/15/19.04.01.2006/2019 tanggal 1 Januari 2019	43.734	Aktif	Desa Guntung (Temiang Jaya)	15	5	800.000,-
Bank Sampah Terentang III (Berpanen)	SK No. 188.5/57/19.04.01.2008/2019 tanggal 2 Januari 2019	52.470	Aktif	Desa Terentang III	26	8	1.000.000,-
Bank Sampah Penyak (Bejebeu Lilai)	SK No. 188.5/007.sk/19.04.01.07/2016 tanggal 4 Januari 2016	177.114	Aktif	Desa Penyak	85	2	Tidak ada data
Bank Sampah Desa Kurau Timur	SK. No. 141/54/19.04.01.2003/2019 tanggal 12 Februari 2019	900	Aktif	Desa Kurau Timur	5	4	Tidak ada data
Bank Sampah Desa Kulur Ilir (Kulur Berseri)	-	13.344	Aktif	Desa Kulur Ilir	2	5	500.000,-
Bank Sampah Desa Lubuk Besar (KSM Berkah Mandiri)	-	18	Aktif	Desa Lubuk Besar	89	4	2.500.000,-
Bank Sampah Desa Belilik	-	6.276	Aktif	Desa Belilik	38	2	Tidak ada data
Bank Sampah Kayu Besi (Bahagia Lestari)	-	1.356	Aktif	Desa Kayu Besi	6	2	Tidak ada data
Bank Sampah Bukit Kijang (Butterlfy Sped Bank)	SK No. 188.45/6a/19.04.05.2007/2018 tanggal 31 Januari 2019	12.525,6	Aktif	Desa Kijang	53	2	Tidak ada data

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.56. Jumlah Bank Sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lanjutan)

Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Peserta (orang)	Jumlah Karyawan (orang)	Omset (Rp)
Kabupaten Bangka Tengah							
Bank Sampah Desa Cambai (Bernila)	SK No. 188.45/021/19.04.05.2009/2018	45.408	Aktif	Desa Cambai Selatan	135	12	Tidak ada data
Bank Sampah Desa Padang Baru	SK No. 188.45/45/19.04.02.2010/2019 tanggal 3 Januari 2019	69.732	Aktif	Desa Padang Baru	20	4	Tidak ada data
Bank Sampah Desa Benteng (Jaya Lestari)	SK No. 188.45/45/19.04.02.2010/2019 tanggal 3 Januari 2019	6.936	Aktif	Desa Benteng	13	7	Tidak ada data
Kabupaten Bangka Barat							
Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau	SK No. : 660.1/23/19.05.01.2007/2019	408,3	Aktif	Desa Air Limau	80	12	3.323.000,-
Kabupaten Belitung Timur							
Bank Sampah Induk Pelangi Nusa	SK No. 188.4/005.a/KEP/BLHD/I/2013	4,39	Aktif	Kabupaten Belitung Timur	12	17	5.113.000,-
Bank Sampah Pelangi Nusa Unit DLH	SK No. 188.4/24/KEP/DLH/VII/2018	385	Aktif	Komplek Perkantoran Pemkab Beltim	32	8	455.000,-
Bank Sampah Pelangi	SK No. 422/169/SK/SMP6MANGGAR/2017	431	Aktif	SMPN 6 Manggar	130	8	613.000,-
Bank Sampah Desa Lalang	SK Nomor 43 Tahun 2019		Aktif	Desa Lalang (Dusun Sekip, Dusun Terang Bulan, Dusun Sawah)	23	9	305.000,-

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.5.3.5.4 Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Akar permasalahan belum terkelolanya sampah perkotaan dengan baik menurut Antin, dkk, 2017 bahwa keberadaan sampah bagi sebagiann besar masyarakat dipandang sebagai barang sisa yang harus dibuang, rendahnya tingkat kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah, penegakan regulasi tentang persampahan oleh pemerintah dirasa belum optimal dan terbatasnya lahan untuk tempat pembuangan akhir.

Literasi sampah merupakan pemberdayaan masyarakat melalui sampah. Dengan melek sampah yaitu paham tentang bahaya dan manfaat sampah secara tidak langsung akan membangun masyarakat berkelanjutan, yaitu masyarakat yang dapat membangun dan menata hidupnya secara bersama bertumpu pada kesadaran pentingnya lingkungan hidup dan hidup selaras dengan alam yang akan melahirkan perilaku yang ramah lingkungan, kesadaran ini menurut Capra disebut sebagai ekoliterasi atau melek ekologi (Keraf, 2010).

Upaya pembentukan karakter peduli lingkungan pada masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan melalui pendidikan lingkungan, penegakan hukum yang jelas serta kampanye media social (Gusmadi dan Samsuri, 2019). Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Sari dan Pratiwi, 2020, terhadap pengetahuan masyarakat mengenai komposisi sampah pesisir Kawasan Wisata Pasir Padi dengan responden sebagian besar berjenis kelamin perempuan, berumur antara 20-30 tahun, berpendidikan SMA/sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, wirausaha dan pegawai swasta, komposisi sampah yang sangat sering dijumpai masyarakat adalah puntung rokok dan bagian tumbuhan, plastik bungkus permen dan makanan ringan, pipet plastik, plastik asoy (kresek), botol plastik dan kertas. Persepsi wisatawan terhadap sampah di Kawasan Wisata Pasir Padi berdasarkan jumlah presentase dengan urutan cukup setuju sampai sangat setuju didapatkan dampak sampah terhadap: kesehatan manusia (100%), keindahan pantai (99%), kenyamanan wisatawan pantai (99%), ekosismtem laut (98%), dan sektor wisata bahari (98%). Anggapan

wisatawan bahwa yang bertanggung jawab menjaga lingkungan pesisir adalah pendidik di sekolah maupun di perguruan tinggi (76%), siswa di sekolah dan mahasiswa di kampus (74%), masyarakat umum (73%), diri sendiri (73%), pemerintah dan pembuat kebijakan (72%), lembaga swadaya masyarakat (71%), penjual eceran yang menjual produk (71%), industri bersifat komersial (70%), media (69%), ilmuwan (66%) dan industri yang menghasilkan limbah (64%).

Tabel II.57. Kegiatan Literasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2019

Nama Kegiatan/Lokasi	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama Persemaian Bibit Asam antara sekolah dan swasta. **Isi perjanjian:** - **melaksanakan penyemaian bibit tanaman asam dalam cup/ bekas wadah plastik minuman sejumlah 500 bibit tanaman asam yang berhasil disemai (minimal 15 cm);** - **Persemaian menggunakan cup plastik yang tidak tepakai menjadi wadah untuk menanam sebagai upaya pemanfaatan limbah plastik dan daur ulang program 3R;** - **Bibit hasil semai dihargai Rp.4.000,-.**	Kota Pangkalpinang	23 November 2018	- Botanical Group, diwakili oleh Kophi (Komunitas Peduli Hijau); - SMAN 3 Pangkalpinang.
	Kota Pangkalpinang	23 November 2018	- Botanical Group diwakili oleh Kophi (Komunitas Peduli Hijau); - SMAN 2 Pangkalpinang.
	Kabupaten Belitung Timur	10 April 2019	- PT. Sahabat Mewah Makmur; - SMAN 1 Simpang Pesak.
	Kabupaten Belitung Timur	10 April 2019	- PT. Sahabat Mewah Makmur; - SMAN 1 Damar.
	Kabupaten Belitung Timur	10 April 2019	- PT. Sahabat Mewah Makmur; - SMKN 1 Dendang.
	Kabupaten Bangka	4 November 2019	- PT. Refined Bangka Tin; - SMK Yapensu Sungailiat.
	Kabupaten Bangka	4 November 2019	- PT. Refined Bangka Tin; - SMKN 1 Sungailiat.
	Kabupaten Bangka	4 November 2019	- PT. Refined Bangka Tin; - SMAN 1 Sungailiat.
	Kabupaten Bangka	4 November 2019	- PT. Refined Bangka Tin; - SMAN 1 Pemali.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bentuk fasilitasi perjanjian kerja sama sekolah dan swasta dalam penanaman bibit asam (2018), pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk

kompos organik dan kompos cair (2019) serta Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah (2019) yang dilaksanakan merata pada tujuh kabupaten/kota (tabel 2.57).

Tabel II.57. Kegiatan Literasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2019 (lanjutan)

Nama Kegiatan/Lokasi	*Lokasi*	*Waktu Pelaksanaan*	*Peserta*
Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah. **Materi:** - **cara mendirikan bank sampah;** - **Mengaktifkan kembali bank sampah yang pasif;** - **Cara memilah sampah menjadi sampah bernilai ekonomis.**	Kota Pangkalpinang	10 Oktober 2019	1. KSM Kawa Begawe; 2. Rumah Aspirasi; 3. KSM Berkah; 4. KSM Sukun Mandiri; 5. KSM Melati.
	Kabupaten Bangka	9 Oktober 2019	1. PKK Kabupaten Bangka; 2. Bank Sampah Karya Mandiri; 3. Bank Sampah Setara; 4. KSM Sahabat Alam Sungai Upang; 5. KSM Sri Menanti Berkarya; 6. KSM Pemali.
	Kabupaten Belitung	17 Oktober 2019	1. PKK Kabupaten Belitung; 2. KSM Desa APJ; 3. KSM Perincong Kelekak; 4. KSM Beringin Mandiri; 5. KSM Lebah Kabupaten Belitung.
	Kabupaten Bangka Tengah	5 November 2019	1. Bank Sampah simpang Perlang; 2. Bank Sampah Teratai; 3. PKK Koba; 4. PKK Guntung; 5. PKK Padang Mulia; 6. PKK Namang; 7. PKK Kurau Timur; 8. PKK Kurau Barat; 9. PKK Arung Dalam; 10. PKK Belilik; 11. PKK Berok; 12. PKK Cambai; 13. PKK Nibung; 14. PKK Penyak.
	Kabupaten Bangka Barat	24 Oktober 2019	1. Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau; 2. Bank Sampah Kelapa; 3. KSM Maju Besaoh; 4. KSM Perigi Batu; 5. PKK Tanjung; 6. PKK Kecamatan Kelapa; 7. PKK Kelurahan Sungai Baru; 8. PKK Kelurahan Sungai Daeng.
	Kabupaten Bangka Selatan	14 Oktober 2019	1. Bank Sampah Desa Rias; 2. Bank Sampah Parittiga Toboali; 3. Bank Sampah Yapentob, Toboali; 4. KSM TPST Gadung; 5. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangka Selatan.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.57. Kegiatan Literasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018-2019 (lanjutan)

Nama Kegiatan/Lokasi	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Peserta
Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah. **Materi:** - **cara mendirikan bank sampah;** - **Mengaktifkan kembali bank sampah yang pasif;** - **Cara memilah sampah menjadi sampah bernilai ekonomis.**	Kabupaten Belitung Timur	21 Oktober 2019	1. KSM Desa Batu Penyu; 2. KSM Desa Padang; 3. KSM Desa Mempaya; 4. KSM Desa Sukamandi; 5. KSM Desa Jangkang; 6. KSm Buku Limau; 7. Bank Sampah Pelangi Nusa; 8. Bank Lalang Jaya.
Pelatihan pengolahan sampah rumah tangga menjadi pupuk kompos organic dan kompos cair. **Materi:** - **Pengertian kompos;** - **Manfaat Pengomposan;** - **Prinsip Pengomposan;** - **Jenis dan cara membuat kompos.**	Kota Pangkalpinang	1 Oktober 2019	1. KSM Kawa Begawe; 2. KSM Berkah; 3. IP Babel; 4. KSM Sukun Mandiri; 5. Rumah Aspirasi.
	Kabupaten Bangka	16 Juli 2019	1. KSM Bank Sampah Setara; 2. KSM TPA Sungailiat; 3. KSM Nurseri Gudang Asri; 4. KSM Bank Sampah Karya Makmur Pemali; 5. KSM Kelurahan Belinyu.
	Kabupaten Belitung	18 Juli 2019	1. Komunitas Pasar; 2. Komunitas TPA Sadai; 3. Kelompok Komunitas Bank Sampak Desa Air Pelempang Jaya; 4. Komunitas Pengelola Sampah Desa Juru Seberang; 5. Komunitas Pengelola Sampah Desa Lesung Batang.
	Kabupaten Bangka Tengah	15 Agustus 2019	1. KSM Simpang Perlang; 2. KSM Padang Mulia; 3. KSM Berok; 4. KSM Arung Dalam; 5. KSM Desa Belilik.
	Kabupaten Bangka Barat	24 September 2019	1. KSM Sumur Batu; 2. KSM TPA Air Belo; 3. KSM TPST Kelapa; 4. KSM Muara Jepu Pelangas; 5. KSM Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau.
	Kabupaten Bangka Selatan	31 Juli 2019	1. KSM Teladan; 2. PKK Kabupaten Bangka Selatan; 3. KSM Kelurahan Ketapang; 4. KSM Petugas Kebersihan Pasar; 5. KSM Bank Sampah Parettige.
	Kabupaten Belitung Timur	5 Juli 2019	1. KSM Desa Lalang; 2. KSM Desa Suku Sawang; 3. KSM Desa Sukamandi; 4. TPS3R Desa Mempaya; 5. Pengelola Pasar Kota Manggar.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.6. Tata Kelola

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan pedoman Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup. Undang-Undang ini mengamanatkan agar dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh pemangku kepentingan karena kualitas lingkungan hidup yang terus menurun merupakan ancaman bagi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia. Tujuan pelaksanaan urusan lingkungan hidup berwujud meningkatnya target dan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini terdiri dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara serta Indeks kualitas Tutupan Lahan (Gambar 2.130).

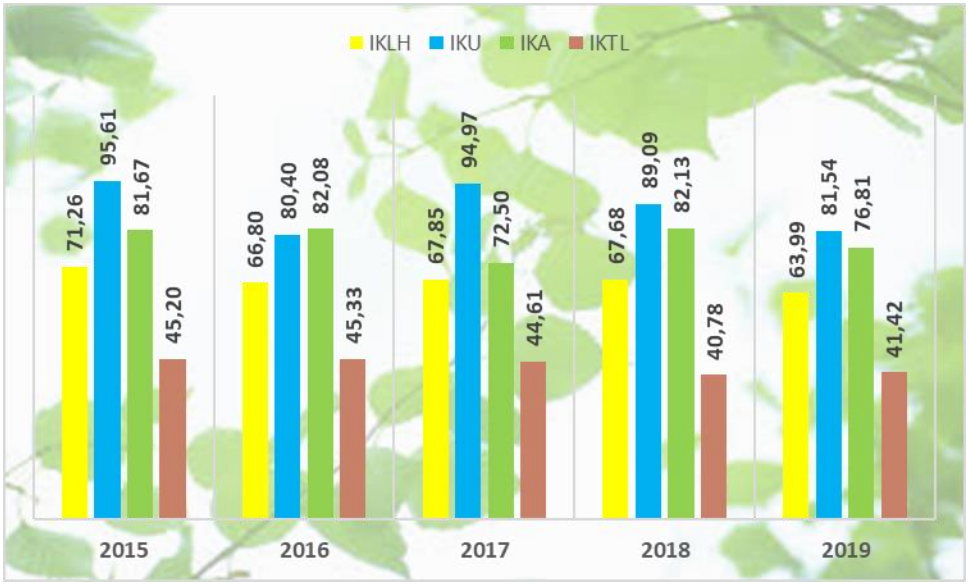

Gambar 2.136. Nilai IKLH, IKA, IKU dan IKTL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019.

Mengacu pada KLHK, 2018, capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 berada dalam kategori 'cukup baik' (tabel II.62). Namun demikian IKLH beserta indikator-indikatornya harus tetap dikelola

dengan baik mengingat selama tiga tahun kebelakang, nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki trend yang menurun.

Tabel II.58. Klasifikasi Peringkat IKLH

No	Predikat	Nilai IKLH
1.	Sangat Baik	IKLH > 80
2.	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3.	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4.	Kurang Baik	50 < IKLH ≤ 60
5.	Sangat Kurang Baik	40 < IKLH ≤ 50
6.	Waspada	30 < IKLH ≤ 40

Sumber: KLHK, 2018

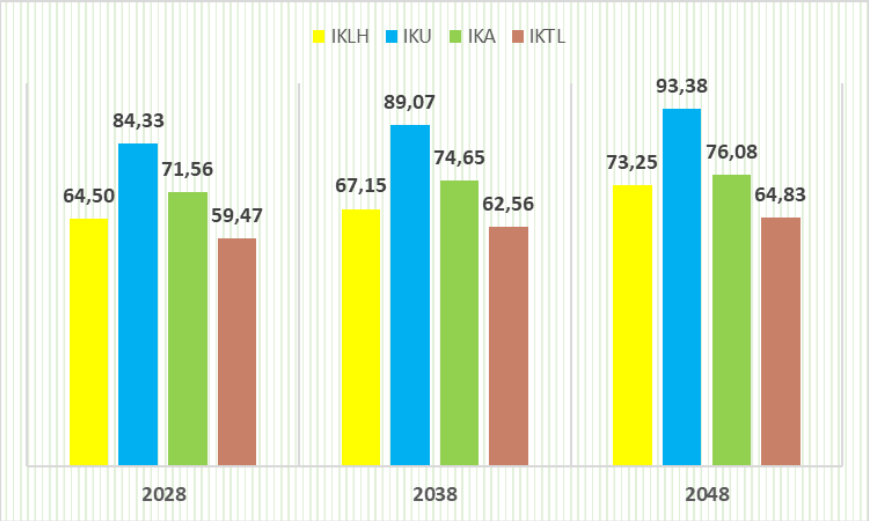

Gambar 2.137. Target IKLH berikut IKU, IKA dan IKTL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.

Hasil analisis pada pembuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018 dengan mempertimbangkan pada trend perubahan nilai IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2017 serta arah kebijakan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, target nilai IKLH hingga Tahun 2048 pada gambar 2.131 Dasar perkiraan yang digunakan adalah 5 persen untuk 10 tahun pertama, 3 persen pada 10 tahun kedua

serta 2 persen pada 10 tahun ketiga. Menurut dokumen RPPLH tersusun pencapaian target IKLH melalui empat hal yaitu:

1. Kemampuan ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air;
2. Alih fungsi lahan, tutupan dan kualitas lahan;
3. Penataan dan pemanfaatan ruang laut;
4. Pengelolaan sampah.

Selaras dengan RPPLH, peningkatan nilai IKLH tertuang dalam misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dan menjadi indikator kinerja tujuan peningkatan tata kelola lingkungan hidup. Hal ini juga sejalan dengan UUPPLH bahwa tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

United Nation Development Programme (UNDP) pada 2011 merumuskan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* meliputi:

a. *Partisipation* (partisipasi), yaitu atas dasar kebebasan berasosiasi dan menyampaikan pendapat serta berekspresi, masyarakat dapat terlibat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
b. *Rule of law* (aturan hukum), yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c. *Transparency* (transparansi), informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus tersedia secara bebas, dapat diakses, tersedia dalam bentuk yang mudah dimengerti serta media yang tepat agar mudah dijangkau masyarakat.
d. *Responsiveness*, setiap lembaga atau institusi publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

e. *Consensus orientation*, selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f. *Equity*, setiap orang dalam masyarakat termasuk kelompok rentan dan minoritas memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
g. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus perlindungan terhadap lingkungan hidup secara bergaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
h. *Accountability*, seluruh aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keraf (2010) berpendapat terdapat korelasi sangat positif antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan komitmen penyelenggaraan pemerintahan terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi bagian integral dari seluruh kebijakan pembangunan karena kesalahan kebijakan di bidang lingkungan hidup akan sangat merugikan, baik dari segi ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup itu sendiri, kehancuran budaya masyarakat terkait dengan lingkungan hidup, ketahanan sosial serta kualitas kehidupan.

Purniawati, dkk, 2020 pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintah dapat tercapai. Namun agar dapat dikatakan sebagai *good environmental governance*, walaupun telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip *good governance* persyaratan lain yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan ekologi *(ecological sustainability)* sehingga *good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik *(good governance)* yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. *United Nation Environmental Programme* (UNEP) pada 2017, prinsip dasar tata kelola lingkungan yang baik *(good environmental governance)* bahwa melalui tata pemerintahan yang baik

(good governance) tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara adil dan efektif.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki visi yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yaitu "Babel Sejahtera, Provinsi Maju, yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi" dengan makna teknologi adalah penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berdaya saing berbasis teknologi untuk mendorong percepatan visi dan misi. Sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi sebagai salah satu misi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendorong percepatan mewujudkan misi meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Sesuai dengan prinsip *good governance*, tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 terlihat dari birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, serta pembangunan demokrasi yang menitikberatkan pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mempunyai payung hukum berupa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Penerapan tata kelola lingkungan yang baik dengan melibatkan prinsip dan karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di analisis dengan menggunakan kerangka kerja DPSIR (gambar 2.132).

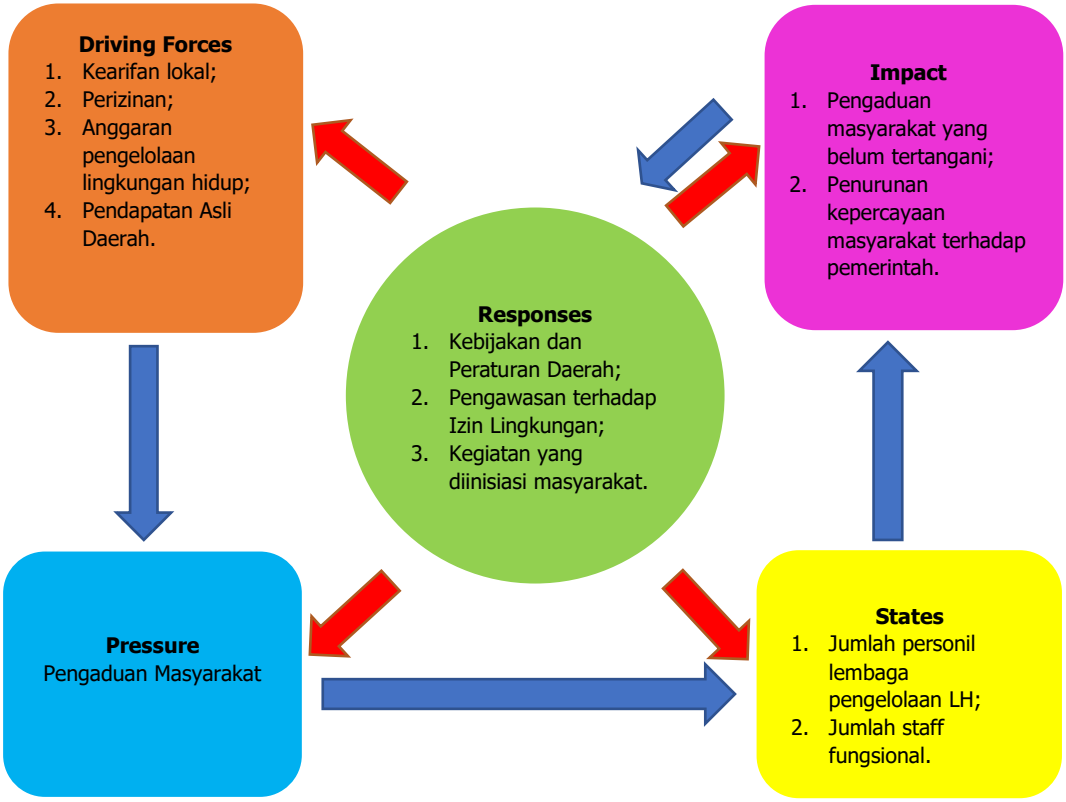

Gambar 2.138. Kerangka DPSIR Penerapan Tata Kelola Lingkungan yang Baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: hasil identifikasi, 2020.

II.6.1. Driving Force

II.6.1.1. Kearifan Lokal

Dalam UUPPLH kearifan lokal dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara lestari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 kearifan lokal diidentifikasi sebagai praktik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat hukum adat di daerah. Pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah sesuai semangat otonomi daerah diharapkan dapat mendorong proses kebijakan publik menjadi lebih partisipatif, transparan, akuntabel dan membuat pemerintah di daerah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lokal di daerahnya (Amin, 2013). Menurut Risal, 2016 unsur-unsur kearifan lokal dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memahami dinamika pemerintahan lokal, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik di

daerah dan membuat masyarakat yang masih memegang teguh adat dan budaya lokal merasa diperhatikan dan dimengerti oleh pemimpinnya.

Kearifan lokal merupakan modal sosial bentukan yang dapat menjadi penangkal potensi konflik berulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui pemetaan konflik yang dilakukan oleh Zulkarnain, dkk, 2018 terdapat tiga konflik sosial potensial yang perlu diantisipasi dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu potensi konflik ekonomi terhadap sumber daya timah, konflik agrarian terkait ekspansi skala besar penanaman sawit, serta konflik antar pemuda desa dan etnis. Tradisi Maras Tahun dapat untuk menumbuhkembangkan tradisi musyawarah mufakat yang bebas dari kepentingan individu/kelompok tertentu terutama kepentingan ekonomi pertimahan dan penggunaan lahan. Pelestarian kelekak dan hutan riding beserta dukun kampung menjadi bentuk komitmen bersama menjaga dan melestarikan tanah/lahan sebagai modal sosial (investasi) sekaligus penyelamat aktivitas perambahan hutan, perampasan tanah, dan *illegal logging*. Begalor dan tradisi nganggong sebagai wadah stabilitas dan penguatan integrasi sosial antardesa dalam mengatasi masalah kenakalan remaja.

Tabel II.59. Kearifan Lokal Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Lokasi	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
1.	Masyarakat Belantu, Desa Kembiri, Membalong, bagian selatan Pulau Belitung	1. Penetapan sebagian daerah aliran sungai sebagai daerah larangan untuk waktu tertentu merupakan bentuk penyelamatan dan pelestarian lingkungan perairan untuk mencegah, menanggulangi serta memulihkan sungai beserta ekosistemnya. 2. Peralatan tangkap ramah lingkungan, karena hanya ikan cukup umur dan berukuran besar yang terjaring. 3. Upaya pelestarian menjaga sumber daya genetik ikan-ikan lokal. 4. Pemeliharaan lubuk sungai menjaga keanekaragaman hayati karena merupakan tempat berkumpulnya ikan dan aneka organisme perairan.	Nirok nanggok[1]	Tradisi mengambil ikan di lembong (lubuk sungai) yang dilakukan secara berkelompok menggunakan tirok (tombak bermata besi yang runcing) dan tanggok (jala kecil bergagang kayu) ketika musim kemarau panjang setiap tahun antara Bulan Agustus-Oktober dan sudah menjadi agenda pariwisata Pulau Belitung. Pengambilan ikan dilakukan beramai-ramai pada saat yang telah ditentukan melalui prosesi panjang dipimpin oleh dukun air dan disaksikan pemuka kampung.
2.	Wilayah Bangka Belitung	1. Mengatur pembukaan lahan untuk mencegah degradasi kerusakan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati. 2. Kelekak sebagai upaya membangun lahan terbuka hijau, menjamin kelangsungan hidup generasi masa depan dari bencana lingkungan *(sustainable)*. 3. Hutan riding, hutan pemalian serta hutan lareng sebagai lalu lintas hewan sehingga tidak mengganggu kebun/ladang (pengendalian hama secara alami). 4. Upaya konservasi Hutan Pelawan sebagai inang tumbuh jamur pelawan, sumber nektar lebah madu liar.	1. Dukun kampung, hutan riding dan hutan pemalian (Kabupaten Belitung)[2] 2. Kelekak[2,3] 3. Hutan rimbek, hutan haminte/hutan cadangan (Kabupaten Bangka)[3] 4. Hutan lareng (Kabupaten Bangka Selatan)[3] 5. Hutan Pelawan (Kabupaten Bangka Tengah)[3,4]	Tradisi pengelolaan hutan termasuk hutan mangrove di wilayah pesisir oleh masyarakat secara tradisional dan berdasarkan adat tradisi leluhur nenek moyang.

Sumber: 1. Irwandi dan Dulkiah, 2017; 2. Siburian, 2014; 3. Cholillah, 2017; 4. Henri, dkk, 2018.

Tabel II.59. Kearifan Lokal Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lanjutan)

No.	Lokasi	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
3.	Kabupaten Bangka	Pengaturan lahan untuk tambang upaya penyelamatan lingkungan dari eksploitasi pasir timah agar dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam serta pertimbangan keberlanjutan lingkungan untuk masa mendatang.	Timah ampak[5]	Kepercayaan terhadap suatu daerah/lahan bahwa sudah diampak/diasal/dijampi oleh orang terdahulu yang jika dilanggar atau tetap dilakukan penambangan maka kualitas pasir timah yang rendah dan kondisi timbangan timah sangat ringan seperti pasir biasa dan tidak laku dijual dikenal dengan timah ampak atau timah kopong.
4.	Wilayah Bangka Belitung	Refleksi keinginan hidup harmonis dengan alam, melindungi lingkungan serta kerangka perahu miniature yang tenggelam selanjutnya dapat menjadi rumah ikan.	Sedekah laut/ tradisi Muang Jong[6]	Pada waktu tertentu setiap tahunnya masyarakat beramai-ramai membuat miniatur perahu yang diisi dengan sesajian seperti beragam kue, ketupat dan makanan yang dibungkus daun kemudian menyelenggarakan pesta adat semalam suntuk mengelilingi miniatur perahu tersebut dan membaca syair yang mengandung magis, kemudian melarungnya kelaut pada pagi hari.

Sumber: 5. Rahayu, 2016, 6. Anggara, 2018

II.6.1.2. Perizinan

Keraf, 2010 dalam bukunya Etika Lingkungan Hidup mengungkapkan sasaran utama dari UUPPLH adalah menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dari mulai perencanaan hingga penegakan hukum lingkungan. Hal ini membuat daya dukung dan daya tampung menjadi jembatan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta kepentingan perlindungan lingkungan hidup sebagai inti dari maksud tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan telah tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) melalui Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan ekonomi di wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak harus serta merta dihalangi namun sebaliknya harus didorong untuk kesejahteraan masyarakat selama tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sebaliknya tidak boleh dipaksakan selama daya dukung dan daya tampung wilayah ekoregion sudah terpenuhi. Hal ini membuat pembangunan dan kepentingan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak harus bertentangan dengan kepentingan perlindungan lingkungan hidup sekaligus adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi penanggung jawab usaha dengan hadirnya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa setiap pelaku usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib mendapatkan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Gubernur melalui perangkat daerah, begitu juga dengan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Izin lingkungan yang diterbitkan berarti KLHS serta Amdal sudah disetujui berarti pula bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup maasih terbuka untuk usaha dan/atau kegiatan dimaksud. Dokumen izin lingkungan sendiri dalam penyusunan dan pelaksanaannya melibatkan partisipasi masyarakat melalui

saran, masukan, tanggapan serta berhak mengajukan keberatan terhadap dokumen lingkungan (gambar 2.133)

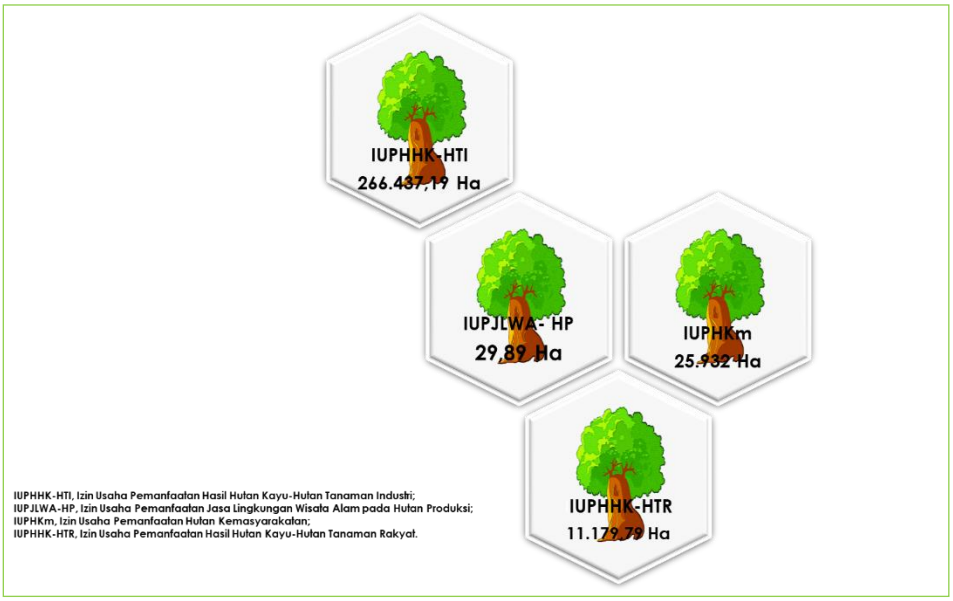

Gambar 2.139. Luas Izin Pemanfaatan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: KLHK, 2019, diolah

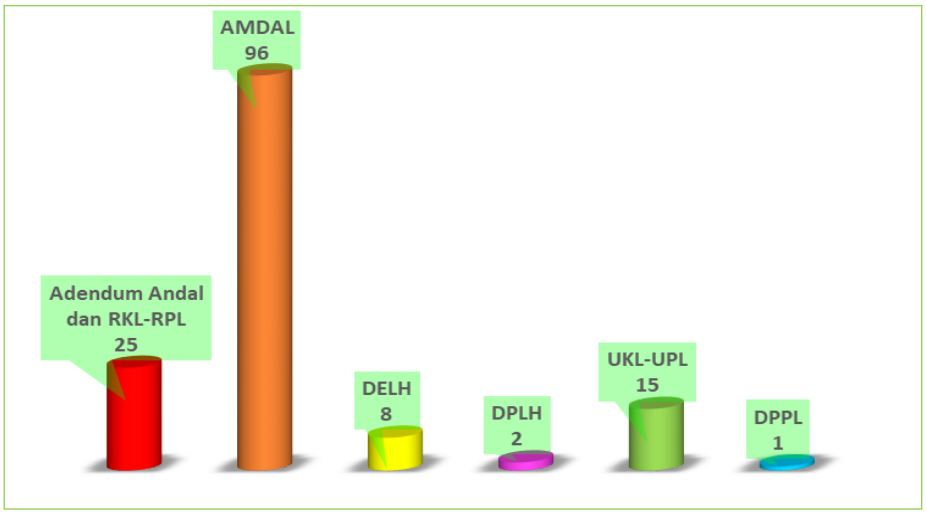

Gambar 2.140. Jumlah Dokumen Izin Lingkungan kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Tahun 2019, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Pengelolaan limbah B3 berupa pengumpulan limbah B3 juga wajib mendapat Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung melalui perangkat daerah dan penerbitan izin tersebut harus diketahui dan mudah dijangkau masyarakat dengan cara mengumumkan melalui media cetak atau media elektronik paling lambat satu hari kerja sejak izin diterbitkan.

Tabel II.60. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola LB3

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
1.	PT. Tata Hamparan Eka Persada	Agroindustri	Penyimpanan Sementara	188.4/04/PY-LB3/DINPMP2KUKM/V/2018
2.	PT. Forestalestari Dwikarya (Tanjung Kembiri Mill)	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.46/002/KEP/LB3/DMPPTSPP/2017
3.	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka Selatan	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/311/BLH/2016
4.	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/269/2.12.1.1/2018
5.	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II - DPPU Depati Amir Pangkalpinang	Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran BBM Jenis Jet A-1 (Migas)	Penyimpanan Sementara	188.45/4042/KLH/2014
6.	PT. Timah Tbk - Unit Produksi Belitung	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/254 Tahun 2016
7.	PT. Astika Murni Utama	Jasa	Penyimpanan Sementara	188.46/004/KEP/LB3/DPMPTSPP/2018
8.	PT. PLN (Persero) PLTD Merawang	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.4/48/TPS-B3/LH/VII/2016
9.	PT. Prima Timah Utama	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	322/KEP/BLH/VII/2015
10.	PT. Bukit Timah	Peleburan dan Pemurnian Timah	Penyimpanan Sementara	172 Tahun 2014

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.60. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola LB3 (lanjutan)

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
11.	PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK) - Unit Galangan Selindung	Galangan Kapal	Penyimpanan Sementara	210/Kep.DLH/V/2017
12.	PT. Tinindo Inter Nusa	Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	219/Kep/BLH/IV/2015
13.	PT. Refined Bangka Tin	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.4/02/PY-LB3/DINPMP2KUKM/IV/2018
14.	PT. Timah Tbk - Unit Metalurgi	Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian)	Penyimpanan Sementara	188.45/255/2.12.1.1/2018
15.	PT. Belitung Energy	Ketenagalistrikan	Penyimpanan Sementara	503/04/IPSLB3/DPMPTSPP/II/2018
16.	PT. PLN (Persero) - Unit PLTD Mentok	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/602/1.08.02/2013
17.	PT. Pahala Harapan Lestari	MPJ (Dockyard Kapal/Galangan Kapal)	Penyimpanan Sementara	380/KEP/BLH/IX/2015
18.	PT. Timah Tbk - UPDB Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.4/36/PY-LB3/DINLH/VII/2017
19.	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Agroindustri (Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit)	Penyimpanan Sementara	188.45.608 Tahun 2014
20.	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/344/1.08.02/2014
21.	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Perkebunan, Pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan CPO, dan Pengolahan Inti Sawit	Penyimpanan Sementara	503/02/IPSLB3/DPMPTSPP/I/2018
22.	PT. Sawindo Kencana	Agroindustri Pabrik Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/20.A/2.5.1.1/2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.60. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola LB3 (lanjutan)

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
23.	PT. Gunung Pelawan Lestari	Agroindustri (Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit)	Penyimpanan Sementara	188.4/58/TPS-LB3/LH/IX/2016, 188.4/59/TPS-LB3/LH/IX/2016, 188.4/60/TPS-LB3/LH/IX/2016
24.	PT. PLN (Persero) PLTD Pilang	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/003/KEP/BLHD/I/2014
25.	PT. PLN (Persero) PLTD Padang	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45-151 Tahun 2014
26.	PT. Belitung Industri Sejahtera	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.46/001/Kep/LB3/DPMPTSPP/2018
27.	PT. PLN (Persero) PLTD Koba	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/4282/KLH/2013
28.	PT. PLN (Persero) PLTD Toboali	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/384/BLH tahun 2013
29.	PT. Mitra Stania Prima	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.4/29/TPS-LB3/LH/VI/2014
30.	PT. Bumi Permai Lestari - PKS Bukit Perak	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/287/2.12.1.1/2017
31.	PT. Putra Bangka Mandiri	Agroindustri (Perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit dan KCP)	Penyimpanan Sementara	188.4/15.1/TPS-B3/LH/II/2015
32.	PT. Parit Sembada	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45-667 Tahun 2015
33.	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.4/32/PY-LB3/DINLH/VI/2017
34.	PT. Rebinmas Jaya	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/185.A/KEP/BLHD/2016
35.	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama - Palm Oil Mill	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/219/DPKPLH/2017
36.	PT. Valten Cahaya Anugrah	Pengelolaan Limbah B3	Pengumpulan Limbah B3	188.4/22/DINLH/2018

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.6.1.3. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seiring dengan prinsip otonomi yang menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang sudah ada dan mempunyai untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewenangan dalam memformulasikan kebijakan public dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, sekaligus diharapkan untuk mempu mengeluarkan kebijakan bagi kepentingan umum yang berorientasi poada perlindungan dan pengelolaan lingkungan, mampu mengawasi jalannya pembangunan yang memperhatikan kepentingan lingkungan, serta mampu mengalokasikan anggaran yang memadai bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

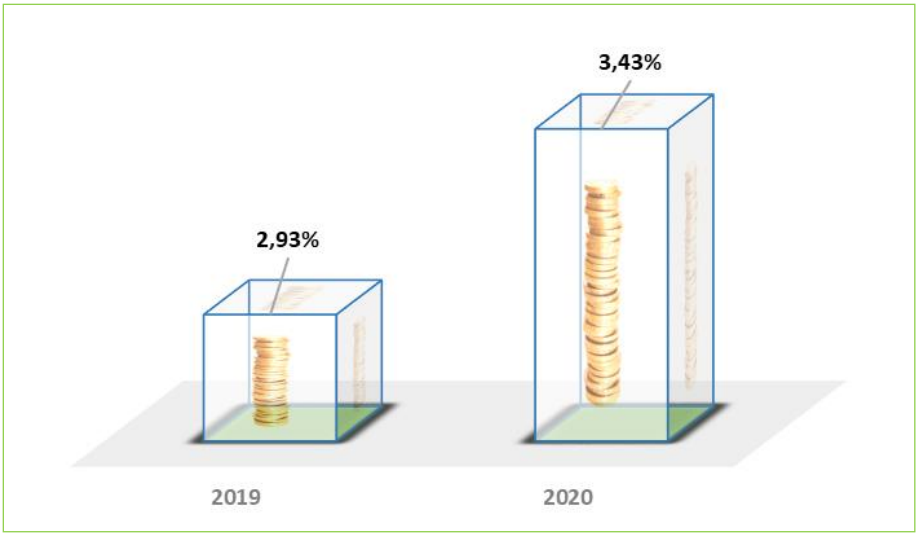

Gambar 2.141. Persentase Anggaran Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020, diolah

Pada Tahun 2019 pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup sebesar 2,93 persen atau sebesar Rp.85.736.350.074,- dari keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar Rp.2.922.021.699.832,72 dan pada Tahun 2020 anggaran bidang lingkungan hidup tersebut mengalami kenaikan menjadi 3,43 persen atau Rp.95.375.895.633,- (gambar 2.35) dari keseluruhan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp.2.922.021.699.832,72.

Selain dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara kegiatan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung urusan bidang lingkungan hidup pada Tahun 2019 mendapat porsi anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disajikan dalam tabel II.65.

Tabel II.61. Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup yang Bersumber dari APBN, 2019

Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)
APBN	**Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi**	**425.000.000,-**
	Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Proper	425.000.000,-
	J u m l a h	**425.000.000,-**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

II.6.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari aktivitas ekonomi daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 850.705.473.042,00 dan pada Tahun 2019 sebesar Rp.826.727.129.332,07 (Tabel II.66).

Kebijakan keuangan daerah digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan agar memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat.

Tabel II.62. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Jenis PAD	Tahun 2018 (Rp.)	Tahun 2019 (Rp.)
1	Pajak daerah	787.235.519.038,83	760.997.424.482,42
2	Retribusi daerah	7.605.377.047,00	8.729.460.053,00
3	Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.114.092.291,88	5.442.309.381,71
4	Lain-lain PAD yang Sah	50.750.484.664,29	51.557.935.414,94
J U M L A H		**850.705.473.042,00**	**826.727.129.332,07**

Sumber: Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.

II.6.2. Pressure

UUPPLH pasal 65, hak dasar manusia dalam kaitannya dengan lingkungan hidup bahwa setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Walaupun pengelolaan lingkungan lebih menonjolkan pemerintah sebagai kewenangan, pelaksana sekaligus penanggung jawab, namun dalam pelaksanaannya kedudukan masyarakat sangat penting, karena sangat jelas bahwa risiko yang muncul akibat tata kelola lingkungan hidup akan dirasakan oleh masyarakat (Kahfi, 2015). Melalui Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pos P3SLH) yang dikelola oleh Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah B3, Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan mengenai pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya baik berupa pengaduan secara langsung, media massa maupun media sosial lainnya (Tabel II.67).

Tabel II.63. Pengaduan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK Nomor S-123/PPSA/PP/GKM/2019 Perihal Bantuan Staf /PPLHD (berdasarkan pengaduan masyarakat) pada tanggal 23 Januari 2019.	Dugaan ketidaktaatan/pelanggaran kegiatan PT. Vitrama Property yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan bangunan (rumah warga retak)	Tim DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DLH Kabupaten Bangka Tengah mendampingi Tim Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK. Diberikan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1767/MenlHK-PHLHK/GKM.0/3/2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Vitrama Properti.
Disposisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atas surat dari Bupati Bangka Selatan Nomor: 660/2459.a/DPKPLH/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal Sanksi Administrasi kepada PT. Timah, Tbk pada tanggal 26 Februari 2019.	Hasil pengawasan bersama bahwa di pusat pencucian bijih timah (PPBT) Toboali tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup terutama pada kegiatan pengelolaan limbah B3. Aktifitas yang ada tidak seperti biasanya dan mobilitas transportasi angkut sangat tinggi sehingga kondisi jalan masuk ke PPBT yang berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk menjadi tidak kondusif/rawan lakalantas; kegiatan tambang PT. Timah, Tbk di desa Paku (IUP 1536) Kec. Payung berlokasi di Bukit Baji yang dikerjakan/dimitrakan kepada CV.Persada Tambang Intitama belum mengantongi izin lingkungan hidup/sedang dalam proses addendum ANDAL dan RKL-RPL.	Diterbitkan surat kepada PT. Timah terkait penghentian kegiatan penambangan timah di lokasi Bukit Baji sampai selesainya proses addendum ANDAL dan RKP-RPL dengan surat nomor: 660/570/DLH tanggal 22 April 2019 hal Tindaklanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan; diterbitkan surat kepada Bupati Bangka Selatan terkait hasil verifikasi serta wajib melakukan penghentian kegiatan penambangan dengan surat nomor: 660/0391/DLH tanggal 29 April 2019 hal Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan atas Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Pusat Pencucian Bijih Timah (PPBT) dan Operasional CV. Persada Tambang Intitama.
Sdr.M.Aris (anggota Pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) pada tanggal 29 April 2019	Dugaan pencemaran air Sungai Jeruk oleh CPO dari Pabrik PT. Palmindo (sekarang PT. THEP).	Melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel air sungai terhadap surat pengaduan terkait adanya dugaan pencemaran Sungai Jeruk oleh CPO dari pabrik perkebunan sawit milik PT. Palmindo di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka; dibuat surat tindaklnjut hasil verifikasi pengaduan kepada PT. THEP dengan nomor: 660/652/DLH tanggal 9 Mei 2019 agar PT. THEP melakukan pengelolaan terhadap janjang kosong, cangkang dan abu janjang kosong pengelolaan air lindinya, mengoptimalkan fungsi bak sedimentasi yang berfungsi sebagai oil trap.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.63. Pengaduan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (lanjutan)

Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
Media Online Berita Sungailiat pada tanggal 4 Mei 2019	Beroperasinya PIP PT.Timah,Tbk dipesisir Pantai Laut Romodong Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka	Melakukan verifikasi lapangan terkait adanya keresahan masyarakat nelayan Kecamatan Belinyu terhadap beroperasinya Ponton Isap Ponton (PIP) PT.Timah,Tbk dipesisir Pantai Laut Romodong Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka; diselenggarakan audiensi masyarakat nelayan ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait menolak keberadaaan Ponton Isap Produksi (PIP) illegal tersebut; menyerankan kepada PT. Timah, Tbk untuk Ponton Isap Produksi (PIP) hanya beroperasi pada zonasi kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) lebih dari 6 Ponton Isap Produksi (PIP) untuk DU 1561 sesuai kajian Adendum ANDAL, RKL-RPL Pertambangan Timah PT. Timah, Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta melakukan pengelolaan dampak sosial sesuai dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Pertambangan Timah PT. Timah, Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan Ponton Isap Produksi (PIP) sampai kondusif dan tidak menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat.
Pengaduan masyarakat (Sdr. Badarudin) via WA pada tanggal 10 Mei 2019	Adanya aktifitas tambang ilegal, wilayah masuk di KP.PT.Timah. Limbah merusak karena berada di DAS dan perumahan penduduk, pemandian rusak.	Melakukan verifikasi lapangan terkait aktifitas tambang ilegal yang limbahnya di duga merusak lingkungan berada di Daerah Aliran Sungai dan perumahan penduduk, pemandian rusak di Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Pada tanggal 13 Juli 2019 Sdr. Badarudin memberikan informasi bahwa masalah tambang yang dilaporkan selesai dengan cara dimusyawarahkan oleh warga, aparat setempat dan pemilik tambang.
Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK nomor: S.681/PPSA/PP/GKM.0/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 hal : Permohonan Penanganan Pengaduan diterima pada tanggal 10 Juni 2019	Dugaan tambang timah yang menimbulkan pencemaran pantai dan laut di Pantai Takari Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.	Sudah dilakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2019 via Pos serta ke TIM PETI Gubernur untuk dilakukan tindaklanjut.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.63. Pengaduan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (lanjutan)

Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
Perintah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung lewat media WA terkait uji coba tambang dari CV. Bangun Jaya Bersama pada area Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Timah, Tbk di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juli 2019	Dalam rangka melakukan pengumpulan data dan keterangan serta verifikasi lapangan terkait kegiatan uji coba Tambang Skala Kecil (TSK) CV. Bangun Jaya Bersama pada area Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Timah, Tbk di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.	Memerintahkan kepada PT. Timah, Tbk melalui surat Kepala DLH Provinsi Kep. Bangka Belitung nomor: 660/1058/DLH tanggal 12 Agustus 2019 hal penghentian kegiatan uji coba tambang CV. Bangun Jaya Bersama selaku Mitra PT.Timah, Tbk dan melakukan pengurugan (pemulihan) terhadap lahan yang sudah dibuka tersebut; berdasarkan Surat dari Dinas PUPRT Kabupaten Bangka Tengah tanggal 31 Juli 2019 yang menjelaskan status titik-titik koordinat kegiatan tersebut berada pada pola ruang Zona Budidaya dan Zona Lindung dengan arahan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan/dilarang; Melakukan pengambilan sampel air di 3 titik pada lokasi; menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung perihal telah dilakukan verifikasi lapangan dan melakukan langkah-langkah: (1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Bangka Tengah; (2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/warga disekitar lokasi kegiatan sebelum melakukan kegiatan penambangan; (3) Menjaga kualitas air permukaan dengan tidak membuang tailing dan air proses produksi ke media lingkungan dengan menerapkan sistem sirkulasi tertutup sehingga tidak; (4) Menjaga kondisi sosial masyarakat sekitar lokasi kegiatan.
Berita dari media sosial Forum Jual Beli Bangka Belitung (FJBBB) tanggal 14 Juli 2019.	Dugaan ulah TI Rajuk yang dominan dilakukan oleh masayarakat pendatang yang sudah merusak terumbu karang.	Melakukan verifikasi lapangan atas dugaan pengaduan terkait aktifitas TI Rajuk di Pantai Jerangkat Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat; melakukan pengawasan secara ketat bersama dengan PT. Timah, Tbk.
Perintah Langsung dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 15 Juli 2019	Adanya bau yang menyengat di sekitar area SMKK 5 Pangkalpinang	Melakukan verifikasi lapangan terkait pengaduan dugaan pencemaran bebauan oleh kegiatan RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang; menyarankan kepada pihak RSUD Depati Hamzah agar melakukan kajian lanjutan akibat tidak optimalnya kinerja IPAL dengan uji coba penambahan bakteri pengurai air limbah ke dalam IPAL untuk 1 bulan yang di pantau kembali dan kepada pihak SMKN V untuk menambah pepohoan yang berdaun jarum sebagai sarana peredam bau.
Berita dalam media Koran Bangka Pos tanggal 9 Agustus 2019	Dugaan pencemaran pada air Sungai Jeruk Kabupaten Bangka terindikasi dari matinya ikan yang hidup di sungai tersebut.	Melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel air Sungai Jeruk.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.63. Pengaduan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (lanjutan)

Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap pengaduan melalui media sosial WA tanggal 26 September 2019	Adanya aktivitas tambang timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di daerah aliran Sungai Berok, Kecamatan Belinyu	Melakukan verifikasi lapangan atas pengaduan dari nelayan Teluk Kelabat terkait aktifitas tambang timah yang menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) yang mengakibatkan pendangkalan alur sungai ke muara serta limbah tambang mencemari daerah tangkapan nelayan di daerah Sungai Berok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka; Pengambilan sampel air Sungai Berok.
Berita melalui media Bangka Pos Online dan informasi dari Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung (Jessik Amundian) tanggal 1 Oktober 2019	Terjadinya bentrok fisik ratusan nelayan melawan penambang terkait terkait adanya aktivitas tambang illegal yang diduga merusak habitat atau populasi laut dan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan di pantai Matras Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	Melakukan verifikasi lapangan dan menjadi mediator dalam perselisihan yang terjadi dengan hasil yaitu: penambang telah melakukan pembongkaran alat tambang serta menyampaikan surat ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII dengan nomor: 660/258/DLH tanggal 3 Oktober 2019 hal: Permohonan Informasi Status Kawasan Hutan.
Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 19 Oktober 2019 dan Undangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/3423./DISHUB/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Undangan	Masalah pembangunan dermaga oleh PT. Swarna Nusa Sentosa (SNS) yang diduga illegal di Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan	Melaksanakan pembahasan adanya pembangunan dermaga illegal oleh PT. Swarna Nusa Sentosa (PT. SNS) di Dinas PUPR dan Perhubungan Kab. Basel dan melakukan verifikasi lapangan di Pulau Lepar; telah diterapkan sanksi administratif paksaan pemerintah dengan nomor SK. 188.4/ 1402/DLH/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. SNS di Kabupaten Bangka Selatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan dermaga di Pulau Lepar Desa Kumbung Kec. Lepar Pongok, Kab. Basel dan agar melaporkan pelaksanaan RKP-RPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tembusan DPKPLH Kab. Basel.
Surat dari Manager Parai Beach Resort & Spa, Sungailiat nomor: 010/HRD-PBRS/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Temuan Limbah di pinggir Pantai Parai, Sungailiat.	Temuan limbah kegiatan penambangan di pesisir Pantai Parai, yang diduga menimbulkan pencemaran air laut dan merusak lingkungan Pantai Parai di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.	Pada tanggal 17 Oktober 2019, Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka telah melakukan peninjauan ke lokasi yang di duga adanya limbah di pesisir pantai Parai, dengan kondisi air laut saat verifikasi lapangan sudah terlihat jernih alami serta tidak tercium bau yang tidak sedap, selanjutnya jika masih menemukan adanya limbah sebagaimana dimaksud di sekitar pesisir pantai parai dan merekomendasikan kepada pihak management Parai, sesuai kewenangan untuk melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.63. Pengaduan Masyarakat tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (lanjutan)

Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
Laporan dari Pokmaswas Tanjung Ketapang (Sdr Joni Zuhri) tanggal 4 November 2019	Adanya pembukaan lahan mangrove di Pesisir Merbau Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan oleh Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam.	Melakukan Koordinasi dengan Polres Kabupaten Bangka Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Bangka Selatan, pelapor a.n Sdr Joni Zuhri dan rekan, serta pihak PT. Mina Bahari Merbau a.n Bapak Salim selaku Penanggung Jawab perusahaan terkait rencana pemasangan tanda larangan/plang himbauan kegiatan di lokasi Mangrove terkait pelaporan dari POKMASWAS Tanjung Ketapang terhadap kegiatan pembukaan lahan mangrove di Pesisir Merbau Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
Berita dari Media online Bangkapos.com tanggal 16 November 2019 dan Posbelitung.com tanggal 22 Nopember 2019	Dugaan adanya sebuah rumah kosong yang menyimpan limbah medis sehingga menimbulkan bau busuk dan menyengat	Melakukan verifikasi lapangan, pengumpulan data dan informasi serta keterangan terhadap dugaan terjadi Pencemaran Limbah B3 Medis di Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung; dilakukan proses penyidikan dan sedang di koordinasikan dengan Dirjen PSLB3 KLHK oleh pihak Kepolisian Polres Belitung dan rumah kosong tempat penumpukan/penyimpanan Limbah B3 Medis sudah dilakukan penyegelan dan dipasang garis polisi (police line) oleh Polres Belitung; dibuatkan Berita Acara Serah Terima Titip Rawat Barang Bukti dari Polre Belitung ke DLH Kabupaten Belitung pada tanggal 16 November 2019; melakukan koordiasi dengan Dirjen PSLB3 KLHK terkait ditemukannya tumpukan Limbah B3 Medis di Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, bahwa CV.Nur Annisa harus bertanggung jawab terhadap Tumpukan Limbah B3 di rumah kosong tersebut untuk segera di angkut dibawa ke pemusnah akhir yang berizin, karena Limbah B3 tersebut berbahaya dan bersifat inspeksius dikhawatirkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.6.3. States

Kondisi eksisting atau *states* pada terwujudnya *good environmental governance* terselenggaranya pemerintahan yang baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan tingkat pendidikan (gambar 2.136) dalam hal ini pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah personil 93 orang.

Pejabat fungsional bidang lingkungan hidup terdiri dari staf yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan staf yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk yang tersebar di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi) yang berlokasi di tujuh kabupaten/kota (tabel II.68).

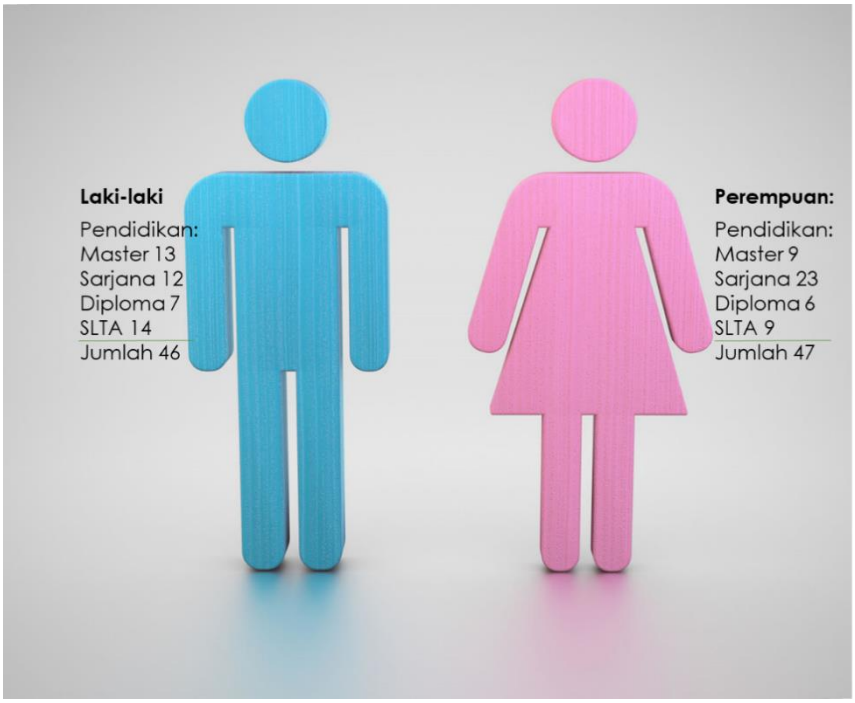

Gambar 2.142. Jumlah personil pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.64. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
	Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	2	6	1	6
	Pengawas Lingkungan Hidup	1	-	1	-
	Penyidik PNS	2	-	2	-
Dinas Kehutanan	Penyuluh Kehutanan	1	-	1	-
	Polisi Kehutanan	2	1	2	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	-	-	-
UPTD KPHP Rambat Menduyung	Penyuluh Kehutanan	1	1	1	1
	Polisi Kehutanan	2	-	1	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
UPTD KPHP Jebu Membang Antan	Penyuluh Kehutanan	3	-	3	-
	Polisi Kehutanan	1	1	1	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	-
UPTD KPHP Bubus Panca	Penyuluh Kehutanan	3	-	3	-
	Polisi Kehutanan	2	-	1	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Penyuluh Kehutanan	2	1	2	1
	Polisi Kehutanan	1	-	1	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
UPTD KPHP Sungai Sembulan	Penyuluh Kehutanan	3	2	3	1
	Polisi Kehutanan	2	-	1	2
	Pengendali Ekosistem Hutan	2	-	2	-
UPTD KPHP Sungai Palas	Penyuluh Kehutanan	3	-	3	-
	Polisi Kehutanan	2	-	1	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	1	-	1	-
UPTD KPHP Belantu Mendanau	Penyuluh Kehutanan	2	3	2	3
	Polisi Kehutanan	9	1	8	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
UPTD KPHP Gunung Duren	Penyuluh Kehutanan	4	3	4	3
	Polisi Kehutanan	8	-	7	-
	Pengendali Ekosistem Hutan	1	-	1	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

II.6.4. Impact

Pengaduan merupakan salah satu bentuk partisipasi sebagai bagian dari hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan yang mendapat jaminan kepastian hukum (Kahpi, 2015). Terhadap adanya pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan yang menjadi kewenangan tingkat provinsi pada Tahun 2019 sudah tertangani walaupun hanya sampai pada tahap verifikasi lapangan.

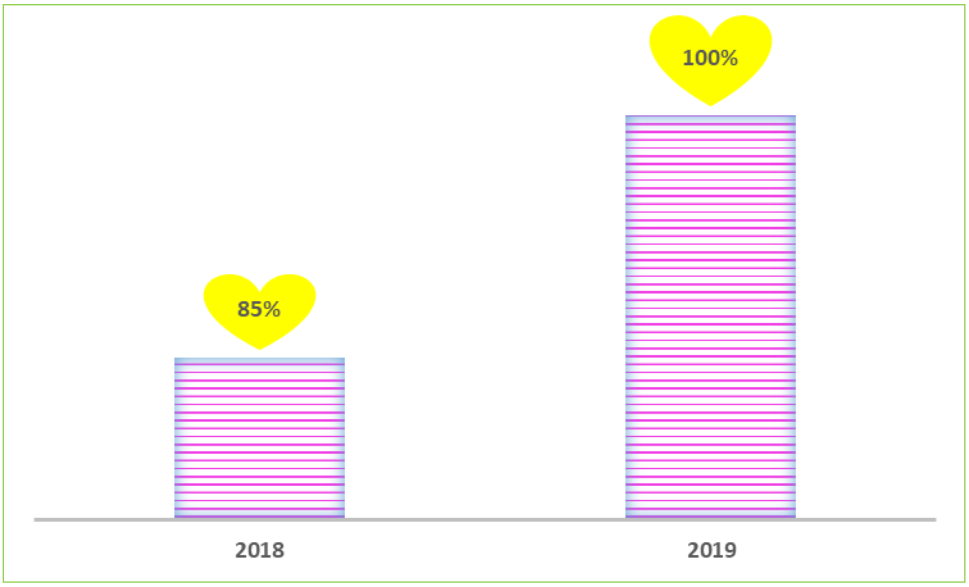

Gambar 2.143. Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang Tertangani Tahun 2018 dan Tahun 2019, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Permasalahan yaitu keadaan anggaran yang diperuntukkan bagi Kegiatan Pengaduan Kasus Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup sangat terbatas dan kurang memadai, hanya cukup hingga tahap verifikasi lapangan terhadap pengaduan yang diterima, sedangkan untuk meningkatkan sampai ke proses penuntutan dan penegakan hukum belum bisa dilakukan, karena untuk pembuktian dan pembayaran tenaga ahli yang akan membantu dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu fungsi dan peran sumber daya manusia dalam bidang lingkungan hidup yaitu Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) maupun Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) belum cukup optimal karena keterbatasan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan serta penyelesaian pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan hidup (DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

II.6.5. Responses

Respons terhadap upaya terwujudnya tata kelola lingkungan yang baik adalah dengan melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan izin lingkungannya dengan hasil pada gambar 2.138. Upaya lainnya adalah menegakkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup baik dalam bentuk peraturan daerah maupun Peraturan Gubernur (Tabel II.69).

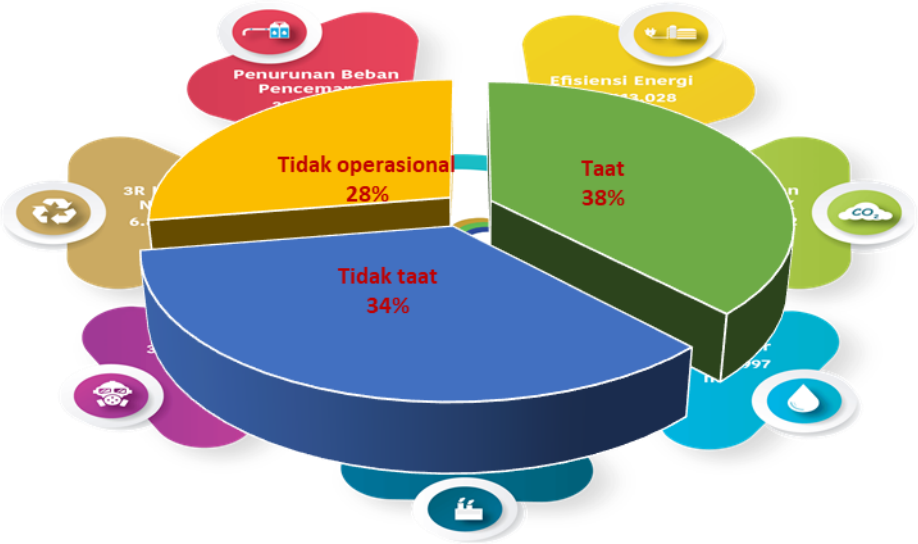

Gambar 2.144. Persentase Hasil Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Hadirnya kebijakan dan peraturan daerah merupakan salah satu bentuk response upaya mencapai target IKLH yang telah disepakati dan menjadi payung hukum pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam koridor menuju pencapaian target IKLH.

Tabel II.65. Produk Hukum sebagai Response Pencapaian Target IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2020

Jenis	Nomor dan Tanggal	Tentang
Peraturan Daerah	Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 30 Oktober 2018	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Peraturan Daerah	Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 27 April 2020	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020-2040.
Peraturan Gubernur	Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 29 Jnauari 2018	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Peraturan Gubernur	Nomor 48 Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2019	Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Peraturan Gubernur	Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal 20 Mei 2020	Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tambak Udang

Sumber: sumber: JDIH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Melalui prinsip partisipasi *Good Environmental Governance* melibatkan aktor-aktor meliputi pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Diketahui masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan system pemerintahan yang baik, peran pentingnya dalam kegiatan pemerintah adalah membantu memberikan masukan penyelesaian masalah public yang ada di masyarakat pada pemerintah. Menurut Antonio Gramsci (salah satu tokoh penting dalam gerakan politik dalam aliran Marxisme-Hutagalung, D, 2004) yang karyanya sering dikaitkan dengan *civil society*, *civil society* adalah kelompok non-negara (NGOs) yang membentuk benteng sejarah dalam rangka menghadapi hegemoni negara di hamper semua sektor kehidupan, sehingga tidak berlebihan jika masyarakat sipil dikatakan sebagai penunjang tercapainya *good governance* yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah.

Tabel II.66. Beberapa Program dan Kegiatan yang Diinisiasi Oleh Masyarakat

Pihak Inisiasi	Program/Kegiatan
Alobi Foundation	- Animal Rescue, Pusat Penyelamatan Satwa, Sosialisasi dan Edukasi yang bertempat di Kawasan reklamasi Air Jangkang; - Bersama PT. Timah dan BKSDA Sumatera Selatan melakukan pelepasliaran satwa langka hasil penyerahan masyarakat dan titipan BKSDA Sumatera Selatan; - Bersinergi dengan KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menumbuhkan sikap konservasionis generasi muda.
Bangka Flora Society	- Mengembangkan kawasan biodiversity Sungai Upang, Desa Bawah Tanah; - Konservasi tanaman anggrek; - Pembinaan Generasi Muda dalam bidang konservasi.
LSM Laskar Hijau	- Sinergi bersama KPHP Rambat Menduyung melakukan pengembangan Geopark Bangka Barat dengan tiga konsep penggabungan geodiversity, biodiversity dan culturaldiversity sebagai sarana wisata, edukasi dan pemberdayaan masyarakat; - Didukung PT. Timah, Tbk menggelar pelatihan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah peserta SMA Negeri Tempilang dan SMA Negeri Pemali.
Walhi Bangka Belitung	- Konsentrasi pada isu-isu lingkungan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti pertambangan dan alih fungsi lahan.
Yayasan Terumbu Karang Indonesia	- Bersama HKm Juru Seberang Bersatu membangun Belitung Mangrove Park, memanfaatkan jasa lingkungan untuk pengembangan wisata berkelanjutan yaitu rehabilitasi lahan bekas tambang menjadi taman wisata mangrove, upaya rehabilitasi lahan dan sequestrasi karbon.

Sumber: pengolahan data, 2020

Tabel II.67. Keadaan Flora dan Fauna Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Hewan Menyusui	Arctictis binturong	Binturong			√	
	Rusa unicolor	Rusa Sambar			√	
	Arctogalidia trivirgata	Musang Akar			√	
	Tragulus napu	Pelanduk			√	
	Nycticebus coucang	Kukang			√	
	Muntiacus muntjak	Kijang			√	
	Tarsius bancanus	Mentilin	√		√	
	Manis javanica	Trenggiling			√	
	Callosciurus prevostii	Tupai 3 warna		√		
Burung	Spilornis cheela	Elang Bido			√	
	Haliastur indus	Elang Bondol			√	
	Spizaetus cirrhatus	Elang Brontok			√	
	Haliaeetus leucogaster	Elang Laut			√	
	Anthracoceros malayanus	Rangkong Hitam			√	
	Aethopyga rhodolaemus	Burung Madu Leher Merah			√	
	Aethopyga duyvenbodei	Burung Madu Sangihe			√	
Reptil	Crocodylus porosus	Buaya Muara			√	
	Manouria emys	Kura-kura hutan		√		
	Chelonia mydas	Penyu hijau			√	
	Eretmochelys imbricata	Penyu Sisik			√	
	Dermochelys coricea	Penyu Belimbing			√	
	Python bivittatus	Sanca Bodo			√	
Ikan	Dugong dugon	Duyung			√	
	Orcaella brevirotris	Pesut			√	

Sumber: BKSDA Resort Bangka Belitung, 2020

Tabel II.68. Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
LSM Aliansi Lingkungan Hidup (ALIH) Bangka	-	Jln. Kacang Pedang no. 77A Pangkalpinang
Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (YP3LH)	-	Jln. Depati Bahrin no. 75 Pangkalpinang
Team Operasional Penyelamatan Lingkungan Kep. Bangka Belitung (TOPEL)	-	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPMA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	601/BKBPPM/2004	Jalan Irian No. 10 Kel. Asam Pangkalpinang
Forum Lingkungan Hidup (FOLHI)	628/BKBPPM/2004	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
Yayasan Babel Hijau	677/BKBPPM/2007	Jln. Belibis I no. 167 RT 05 RW 02 Pangkalpinang
LSM Garda Lingkungan Hidup (GALIH)	388/BKBPPM/2010	Jl. Belinjo No. 195 Bukit Merapin Gerunggang Pangkalpinang Telp. 0717 434834
Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	408/BKBPPM/2010	Jl. Kapt. Munzir Thalib No. 23 Kec. Taman sari Pangkalpinang
Yayasan Bangka Belitung Lestari	19/BKBPPM/2011	Jl. Lumba-Lumba I No.21 A Kel. Gabek I Kec. Gabek Pangkalpinang Telp. (0717) 424570
Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPLH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	220/13/BKBPPM/II/2013	Jl. Kampung Melayu Dalam Rt.07 Rw.03 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
Yayasan Cinta Lestari Lingkungan Hidup	220/23/BKBPPM/2013	Jl. RE. Martadinata Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GEMPA)	SKT BATENG 200/120/130/0003/VIII/2014	Jln. Soekarno Hatta II Gg. Sukma Rt. 09/12 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020 dan hasil identifikasi dan pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel II.69. Lembaga Swadaya Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (lanjutan)

Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
Organisasi Pelestarian Flora dan Fauna (Alobi)	Nomor 3 Tanggal 28 September 2017	Jl. Sumedang Gg. H.Sani Rt.001/004 Kel.Kejaksaan Kec.Taman Sari Pangkalpinang
Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung	Nomor 07 tanggal 23 Januari 2018	Jl. Belanak Raya No. 64 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Kota pangkalpinang 33118
Yayasan Terumbu Karang Soubad	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
Perhimpunan Pencinta dan Pelestari Tanaman Bangka (Bangka Flora Society)	Nomor 6 Tanggal 9 November 2011	Jl. Diponegoro No. 59 RT.07 Kel. Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
Yayasan Sayang Babel Kite	AHU - 8265.AH.01.04.Tahun 2012	Jl. Sudirman, RT. 02, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020 dan hasil identifikasi dan pengumpulan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Gambar 2.145. Kegiatan Menanam Pohon di Desa Tanah Bawah, Sungai Upang, Kabupaten Bangka tanggal 24 November 2019. Kegiatan ini di inisiasi oleh Bangka Flora Society yang diketuai oleh Ibu Dian (ketiga dari kanan) bersama dengan PT. PLN Bangka Belitung dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta istri dan Sonny Keraf (keempat dari kiri) beserta istri yang merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup (1999-2004) serta seorang penggiat tanaman anggrek Indonesia.

BAB III
ISU PRIORITAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Foto: Ariyandi

BAB III
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

III.1. Isu Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keberhasilan pembangunan seringkali hanya dipandang dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa memperhitungkan lingkungan sebagai daya dukung dan faktor pembangunan berkelanjutan. Pandangan yang keliru terhadap eksploitasi terhadap sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi daerah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan ke kondisi semula. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung melibatkan banyak pelaku lintas sektor, seperti sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan pertambangan. Selain bermanfaat untuk pembangunan, aktivitas-aktivitas perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung juga menimbulkan berbagai macam dampak terhadap lingkungan, seperti masalah pencemaran air, pencemaran udara, penurunan produktivitas lahan, hingga masalah kesehatan dan sosial kemasyarakatan.

Permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan dengan hanya pendekatan teknis semata, namun dibutuhkan tinjauan terhadap kondisi sosial masyarakan, ekonomi dan tinjawan secara ekologis, kajian terhadap permasalahan lingkungan hidup merupakan kajian yang interdisipliner karena fenomena permasalahan lingkungan bersinggungan dengan kondisi geografis, biologis, teknologi, politik maupun sosial budaya. Permasalahan atau isu lingkungan yang timbul di Kepulauan Bangka Belitung sangat kompleks dan menyangkut dimensi yang luas. Isu-isu tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dan *stakeholder* terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat diatasi atau diminimalisir. Penanganan isu-isu lingkungan hidup bukan hanya melibatkan para pelaku lintas sektor, namun juga lintas wilayah, dan memerlukan waktu tertentu sesuai dengan besaran

dampak yang ditimbulkan. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, penanganan terhadap isu-isu yang timbul tidak akan optimal.

III.2. Proses Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu yang diangkat pada tahun 2020 dirumuskan secara partisipatif dengan keterlibatan berbagai *stakeholder* yang dilakukan melalui *Focus Group Discusion* (FGD) serta melalui workshop penyusunan DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung isu juga melihat kondisi eksisting yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, identifikasi isu yang sudah terkumpul melalui FGD kemudian dilakukan analisis melalui *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dengan tujuan mendapatkan Isu prioritas atau isu utama yang merupakan isu-isu yang menjadi prioritas dalam penanganannya, dan diutamakan daripada isu-isu lainnya agar kualitas lingkungan hidup segera membaik.

Pada tahun 2020 identifikasi serta penetapan isu prioritas dilakukan dengan tahapan, yaitu:

1. Identifikasi dan penyaringan isu di dalam Tim Kelompok Kerja,
2. Pengelompokan isu-isu yang telah teridentifikasi,
3. Penetapan kriteria isu prioritas dan penilaian terhadap kriteria-kriteria yang telah diputuskan,
4. Penilaian *(scoring)* isu oleh para pakar (pemangku kepentingan) berdasarkan kriteria-kriteria yang ada,
5. Analisis dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* dan Matriks *Pairwise Comparison*.

Perumusan isu prioritas dilaksanakan oleh tim kelompok kerja dan tim penyusun yang dibahas dalam pertemuan *Focus Group Discussion (FGD)*.

Gambar. 3.1 FGD Perumusan Isu Prioritas

Hasil identifikasi dan penyaringan awal isu yang telah dikelompokkan adalah :

1. Regulasi terkait pola/tata ruang wilayah yang belum optimal
2. Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maksimal
3. Penurunan perubahan ekonomi karena menurunnya sektor penambangan.
4. Harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak stabil
5. Perubahan penutupan lahan
6. Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal
7. Banjir
8. Degradasi kualitas air
9. Kebakaran hutan dan lahan.
10. Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar.
11. Paparan bahan radioaktif penambangan timah
12. Konflik sosial perebutan lahan

Penentuan isu prioritas dilakukan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. AHP merupakan salah satu bentuk model pengambilan keputusan dengan beberapa kriteria. AHP digunakan untuk menentukan skala rasio dari perbandingan pasangan yang diskrit maupun kontinyu, yang diperoleh dari ukuran aktual ataupun preferensi. Pengambilan keputusan terhadap beberapa alternatif pilihan dilakukan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Alternatif-alternatif pilihan yang diprioritaskan dipilih dengan mempertimbangkan kriteria-kritera yang telah dirumuskan. Tahapan metode AHP terdiri dari :

1. Mengidentifikasi masalah,
2. Dekomposisi masalah dengan menyusun struktur hirarki,
3. Membuat matriks *pairwise comparative* judgement,
4. Sintesis prioritas dengan nilai *eigenvector*.

Identifikasi masalah merupakan upaya untuk mendefinisikan tujuan utama *(goal)* yang akan diwujudkan. Tujuan utama dalam penggunaan metode AHP ini adalah untuk menentukan isu prioritas. Setelah tujuan utama ditentukan, selanjutnya dilakukan dekomposisi masalah dengan memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya, yaitu dengan mendekomposisikan ke dalam kriteria dan alternatif.

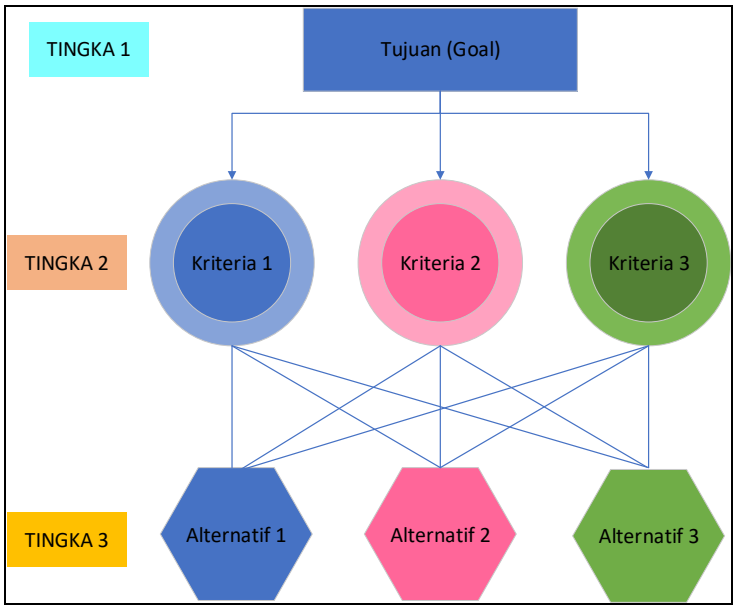

Gambar 3.2. Dekomposisi Masalah Menjadi Struktur Hirarki

Pada hirarki tingkat 1 didefinisikan tujuan utama *(goal)*, yaitu untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup. Pada hirarki tingkat 2 ditentukan beberapa kriteria, yaitu aktual, urgensi, signifikan, sensitif, permanen, luas sebaran, intensitas, dan kumulatif. Pada hirarki tingkat 3 ditentukan alternatif-alternatif yang ada, yaitu 14 isu hasil pengelompokan dari hasil penyaringan awal isu.

Tabel III.1. Susunan Hirarki Hasil Dekomposisi Masalah

Hirarki 1 *(goal)*	Merumuskan isu prioritas	
Hirarki 2 (kriteria)	○ aktual ○ urgensi ○ signifikan ○ sensitif	○ permanen ○ luas sebaran ○ intensitas ○ kumulatif

Hirarki 3 (alternatif)	○ Regulasi terkait pola/Tata ruang wilayah yang belum optimal ○ Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maksimal ○ Penurunan perubahan ekonomi karena menurunnya sektor penambangan. ○ Harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak stabil ○ Perubahan penutupan lahan ○ Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal ○ Banjir ○ Degredasi kualitas air ○ Kebakaran Kualitas hutan dan lahan. ○ Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar. ○ Paparan bahan radio aktif penambangan timah ○ Konflik sosial perebutan lahan

Comparative judgement dilakukan dengan membuat penilaian kepentingan relatif dua elemen pada tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Melalui penilaian perbandingan berpasangan dapat diketahui derajat kepentingan relatif antara dua kriteria. Hasil penilaian dituliskan dalam bentuk matriks *pairwise comparison*. Matriks *pairwise comparison* untuk pembobotan kriteria disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.2. Matriks *Pairwise Comparison* Pembobotan Kriteria

Kriteria	Aktual	Urgensi	Signifikan	Sensitif	Permanen	Luas Sebaran	Intensitas	Kumulatif
Aktual	1,0	0,3	0,3	1,0	3,0	0,3	1,0	1,0
Urgensi	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0
Signifikan	3,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	3,0
Sensitif	1,0	1,0	0,3	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3
Permanen	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Luas Sebaran	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Intensitas	1,0	1,0	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Kumulatif	1,0	1,0	0,3	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Nilai yang tercantum dalam matriks *pairwise comparison* untuk pembobotan kriteria pada Tabel 2 di atas merupakan hasil perbandingan nilai patokan (skala dasar) yang digunakan dalam penyusunan skala kepentingan. Skala dasar yang digunakan untuk perbandingan tingkat kepentingan disajikan pada tabel berikut ini.

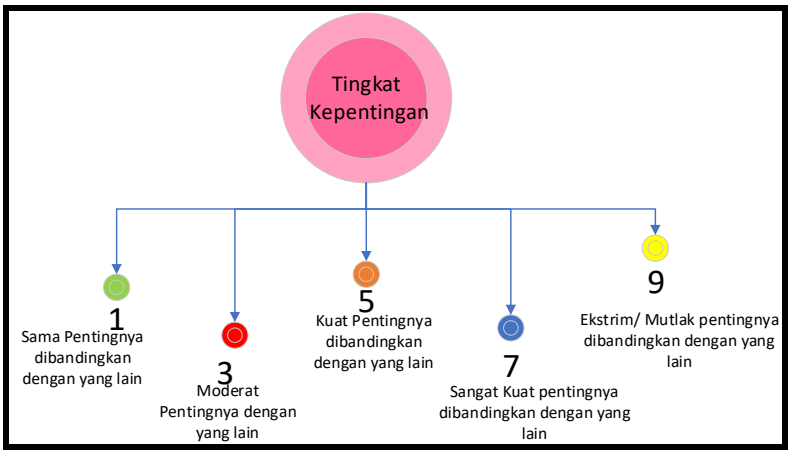

Gambar. 3.3 Tingkat Kepentingan

Matriks berpasangan pada Tabel 2 dapat digunakan untuk menentukan peringkat dari kriteria-kriteria yang ada dengan mengubahnya menjadi matriks *eigenvector*. Solusi *eigenvector* ditempuh dengan langkah-langkah berikut ini.

1. Komputasi menggunakan matrik berpasangan sebagai dasar untuk penghitungan kuadrat matrik berpasangan setiap saat.
2. Jumlah setiap baris pada hasil kuadrat matriks berpasangan dihitung dan dinormalisasi sehingga menghasilkan *eigenvector* yang pertama.
3. Perhitungan dihentikan apabila perbedaan hasil normalisasi antara dua perhitungan yang berturutan telah mendekati angka nol.

Hasil kuadrat matriks berpasangan dan normalisasinya pada perhitungan yang pertama disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel III.3. Hasil Perhitungan untuk Perumusan *Eigenvector* yang Pertama

Kriteria	HASIL KUADRAT MATRIK BERPASANGAN								Jumlah baris	EIGEN FACTOR
	Aktual	Urgensi	Signifikan	Sensitif	Permanen	Luas Sebaran	Intensitas	Kumulatif		
Aktual	0,075	0,05	0,05556	0,07143	0,25	0,0454545	0,13636	0,10714	0,790945166	0,098868
Urgensi	0,225	0,15	0,16667	0,07143	0,25	0,1363636	0,13636	0,10714	1,242965368	0,155371
Signifikan	0,225	0,15	0,16667	0,21429	0,08333	0,1363636	0,13636	0,32143	1,433441558	0,17918
Sensitif	0,075	0,15	0,05556	0,07143	0,08333	0,1363636	0,04545	0,03571	0,652849928	0,081606
Permanen	0,025	0,05	0,16667	0,07143	0,08333	0,1363636	0,13636	0,10714	0,776298701	0,097037
Luas Sebaran	0,225	0,15	0,16667	0,07143	0,08333	0,1363636	0,13636	0,10714	1,076298701	0,134537
Intensitas	0,075	0,15	0,16667	0,21429	0,08333	0,1363636	0,13636	0,10714	1,069155844	0,133644
Kumulatif	0,075	0,15	0,05556	0,21429	0,08333	0,1363636	0,13636	0,10714	0,958044733	0,119756
	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1

Normalisasi

A

B

Kriteria	Aktual	Urgensi	Signifikan	Sensitif	Permanen	Luas Sebaran	Intensitas	Kumulatif			
Aktual	1.0	0.3	0.3	1.0	3.0	0.3	1.0	1.0		Aktual	0.098868146
Urgensi	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0		Urgensi	0.155370671
Signifikan	3.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0		Signifikan	0.179180195
Sensitif	1.0	1.0	0.3	1.0	1.0	1.0	0.3	0.3		Sensitif	0.081606241
Permanen	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	X	Permanen	0.097037338
Luas Sebaran	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		Luas Sebaran	0.134537338
Intensitas	1.0	1.0	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0		Intensitas	0.133644481
Kumulatif	1.0	1.0	0.3	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0		Kumulatif	0.119755592

C = [A]X[B]	D = C/B
0.88134921	8.91439
1.39181097	8.958003
1.60045996	8.932125
0.71161316	8.720083
0.83050746	8.558638
1.19773629	8.902631
1.16321248	8.703782
1.04375902	8.715743

PERHITUNGAN CR		
λ =	8.800675	
Nkriteria =	8	
CI =	0.114382	
RI =	1.485	
CR =	0.077025	< 10 % (konsisten)

Selisih *eigenvector* ke-2 dengan *eigenvector* pertama maupun selisih *eigenvector* ke-3 dengan *eigenvector* ke-2 telah mendekati nilai nol sehingga penghitungan dengan kuadrat matriks berpasangan dihentikan. Nilai *eigenvector* terakhir yang telah diperoleh digunakan untuk menentukan peringkat kriteria. Peringkat kriteria berdasarkan *eigenvector* yang diperoleh ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel III.4. Hasil Perumusan Peringkat Kriteria dengan *Eigenvector*

Peringkat	Kriteria	Bobot
1	Signifikan	0,17918
2	Urgensi	0,155371
3	Luas Sebaran	0,134537
4	Intensitas	0,133644
5	Kumulatif	0,119756
6	Aktual	0,098868
7	Permanen	0,097037
8	Sensitif	0,081606

Matriks hasil penilaian terhadap alternatif isu dinormalisasi dan dikalikan dengan matriks *eigenvector* terakhir sehingga diperoleh nilai bobot masing-masing alternatif isu dan peringkatnya sebagai berikut.

Tabel 3.5 Penentuan Hirarki I Isu Prioritas

ISU	AKTUAL	URGENSI	SIGNIFIKAN	SENSITIF	LUAS SEBARAN	PERMANEN	INTENSITAS	KUMULATIF
Regulasi terkait pola/tata ruang wilayah yang belum optimal	0.083926212	0.116703268	0.084201734	0.07551063	0.07575117	0.116229037	0.051489759	0.045607943
Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maksimal	0.06594553	0.045837575	0.037181483	0.051088847	0.039519445	0.04584703	0.036596582	0.043005557
Penurunan pertumbuhan ekonomi karena melemahnya sektor penambangan	0.072914937	0.042569486	0.0939318	0.053346117	0.089654751	0.039348114	0.051799265	0.03334941
Harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak stabil	0.051283876	0.040459698	0.048174388	0.039150145	0.034478023	0.02472461	0.022476103	0.01982767
Alih Fungsi Lahan	0.13593807	0.11850645	0.122299638	0.129916582	0.116891667	0.105808897	0.175878356	0.13932052
Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	0.143997505	0.161316709	0.123016566	0.164112719	0.128945238	0.153422337	0.129378145	0.130072428
Banjir	0.106721801	0.138174818	0.131683854	0.10355188	0.126454795	0.080994002	0.140516905	0.080880737
Degradasi kualitas air	0.115600769	0.111072637	0.096011107	0.075393134	0.114947223	0.184367596	0.120127356	0.065076114
Kebakaran hutan dan lahan	0.047065336	0.032840054	0.063804023	0.086110015	0.064196411	0.053762428	0.041810739	0.040144513
Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar	0.029673426	0.047254698	0.054217617	0.056519872	0.053645907	0.03081791	0.049795865	0.154491258
Paparan bahan radioaktif penambangan timah	0.083949672	0.114377472	0.091080921	0.066260132	0.104030115	0.098028129	0.111267378	0.181774008
Konflik sosial perebutan lahan	0.062982867	0.030887134	0.05439687	0.099039929	0.051485257	0.066649911	0.068863548	0.066449843

X

KRITERIA	EIGEN F
AKTUAL	0.098868146
URGENSI	0.155370671
SIGNIFIKAN	0.179180195
SENSITIF	0.081606241
LUAS SEBARAN	0.097037338
PERMANEN	0.134537338
INTENSITAS	0.133644481
KUMULATIF	0.119755592

=

DILIHAT 3 - 5 PERINGKAT TERATAS BERDASARKAN BOBOTNYA

ISU	BOBOT AKHIR	
Regulasi terkait pola/tata ruang wilayah yang belum optimal	0.083010281	
Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maks	0.044517167	
Penurunan pertumbuhan ekonomi karena melemahnya sektor penambangan	0.059917221	
Harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak stabil	0.035233705	
Alih Fungsi Lahan	0.130135735	2
Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	0.140756517	1
Banjir	0.115698102	3
Degradasi kualitas air	0.111848587	4
Kebakaran hutan dan lahan	0.052072983	
Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar	0.059110798	
Paparan bahan radioaktif penambangan timah	0.107719964	
Konflik sosial perebutan lahan	0.059978939	

Tabel III.6. Peringkat Alternatif Isu Berdasarkan Bobotnya

ISU	BOBOT AKHIR	Peringkat Isu
Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal	0,140756517	**1**
Alih Fungsi Lahan	0,130135735	**2**
Banjir	0,115698102	**3**
Degradasi kualitas air	0,111848587	**4**
Paparan bahan radioaktif penambangan timah	0.107719964	5
Regulasi terkait pola/tata ruang wilayah yang belum optimal	0.083010281	6
Konflik sosial perebutan lahan	0.059978939	7
Penurunan pertumbuhan ekonomi karena melemahnya sektor penambangan	0.059917221	8
Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar	0.059110798	9
Kebakaran hutan dan lahan	0.052072983	10
Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maksimal	0.044517167	11
Harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak stabil	0.035233705	12

III.3. Penetapan Isu Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan hasil diskusi bersama Tim Kelompok Kerja dan Penyusun Dokumen IKPLHD Tahun 2020, maka empat isu dengan peringkat paling atas ditetapkan sebagai isu prioritas lingkungan hidup daerah pada tahun 2019. Keempat isu prioritas tersebut adalah :

1. **Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal**
2. **Alih fungsi lahan**
3. **Banjir**
4. **Degradasi kualitas air**

Gambar. 3.4 Penyampaian Isu Prioritas Kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan penandatanganan Pernyataan Isu DIKPLHD

Isu Prioritas yang diangkat didalam DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah di lakukan proses partisipatif dari berbagai pemangku kepentingan dan telah dirumuskan di sampaikan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kemudian di tandatangani dalam bentuk surat pernyataan.

III. 4 Analisis Isu Prioritas

Analisis terhadap isu prioritas ini akan di detilkan pada alih fungsi lahan karena dianggap berkorelasi dengan isu yang lain terutama banjir dan degradasi kualitas air yang telah dibahas pada BAB II. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam DIKPLHD 2019 menetapkan isu prioritas yang dihadapi ada 4 isu. Isu-isu yang ditetapkan merupakan tantangan yang harus di selesaikan dengan berbagai intervensi kebijakan serta perencanaan pengawasan serta pengendalian terhadap isu yang ditangani.

III.4.1 Pengelolaan Sampah dan Limbah Belum Optimal

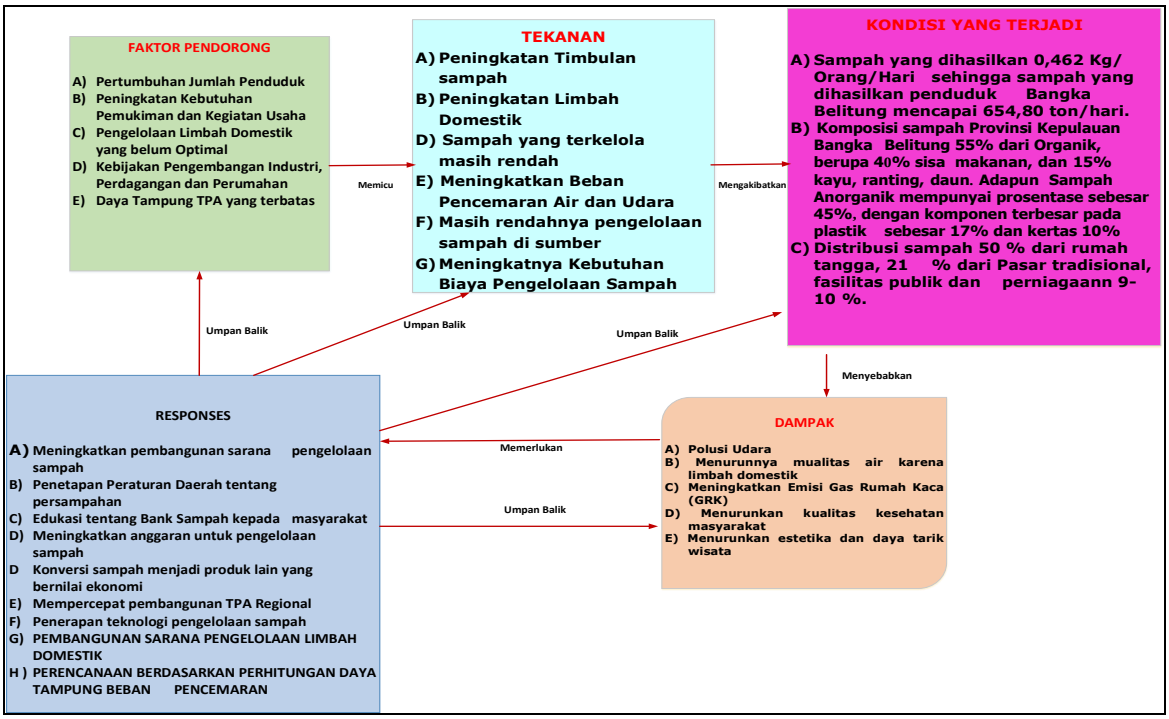

Gambar 3.5 Visualisasi Skematik DPSIR Persampahan dan Limbah Domestik

Sampah dan limbah domestik menjadi permasalahan prioritas yang diangkat di dalam DIKPLHD 2019, ini dikarenakan timbulan sampah yang terus meningkat sementara ketersediaan TPA di bangka Belitung kapasitasnya semakin terbatas .

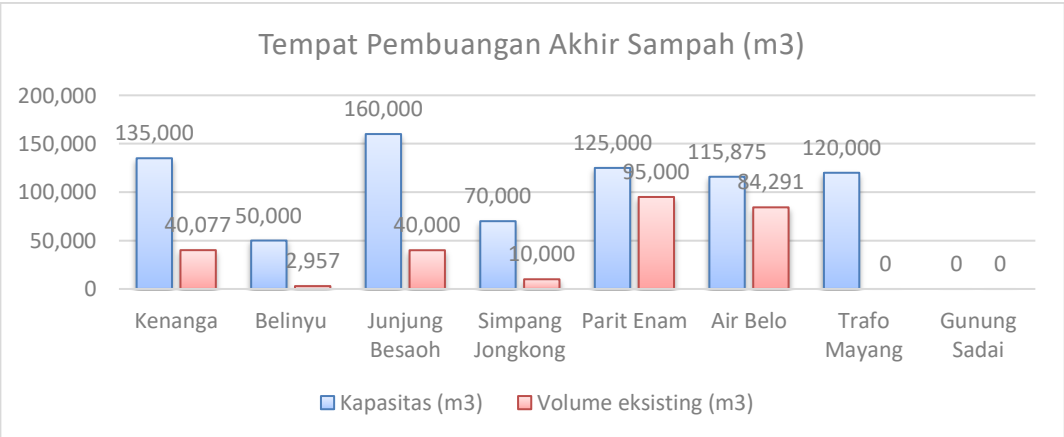

Gambar. 3.6 Kapasitas TPA dan Eksistingnya

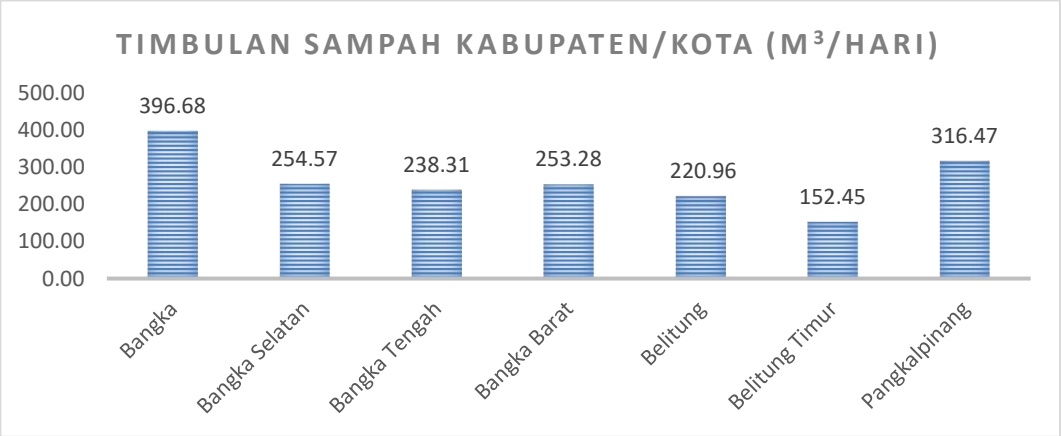

Gambar 3.7 Timbulan Sampah Kabupaten/Kota

Jika melihat data diatas, persampahan dan limbah domestik akan menjadi permasalahan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepan sehingga perlu berbagai upaya sebagai bentuk respons pengelolaan persampahan dan limbah domestic baik melalui kegiatan minimisasi sampah dengan bank sampah dan 3 R maupun pengembangan sampah menjadi produk lain seperti pellet sampah untuk PLN yang diddukung dengan regulasi dan kebijakan daerah.

Untuk analisis isu prioritas yang lain akan didetilkan pada isu alih fungsi lahan karena berkorelasi dengan dua isu yang lain yaitu banjir dan degradasi kualitas air yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 3.8 Skema DPSIR Isu Alih Fungsi Lahan

III.4.2 Alih Fungsi Lahan

Hasil penjaringan isu dalam forum group discussion yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *Analysis Hierarchy Process* (AHP) menampilkan isu alih fungsi lahan di peringkat kedua isu prioritas yang diangkat dalam DIKPLHD tahun ini. Alih fungsi lahan yang marak terjadi merupakan salah satu masalah besar dalam tata guna lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Isu ini diperkuat melalui hasil analisis spasial antara peta penutup lahan dari Ditjen Planologi KLHK tahun 2018 dan 2019 dengan menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi geografis yang menunjukkan terjadinya peningkatan luasan yang didominasi oleh penutup lahan perkebunan, pertambangan, serta permukiman. Alih fungsi lahan ditandai oleh adanya peningkatan luasan penutup lahan yang baru sekaligus penurunan luasan pada penutup lahan sebelumnya.

III.4.2.1 Driving Force

1. Laju pertumbuhan penduduk dan rumah tangga baru

Jumlah penduduk dan rumah tangga cenderung mengalami pertambahan setiap tahunnya. Hal ini dibarengi oleh meningkatnya kebutuhan akan lahan baik untuk permukiman maupun sebagai mata pencaharian sebagai kebutuhan primer manusia.

2. Pertumbuhan ekonomi

Kegiatan ekstraktif dalam hal ini pertambangan mineral timah masih menjadi sektor utama penopang perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi ini memang dikenal telah menjadi salah satu penyuplai terbesar kebutuhan timah dunia. Selain itu perkembangan di sektor perkebunan khususnya kelapa sawit semakin menunjukkan trend yang positif dibandingkan dengan komoditas lainnya seperti lada maupun karet yang mengalami penurunan produktivitas karena sejumlah faktor.

Kegiatan ekonomi dari kedua sektor besar ini berbanding lurus dengan kebutuhan lahannya. Hal ini merupakan salah satu driving force dalam banyaknya kasus alih fungsi lahan yang terjadi.

3. Lemahnya pengawasan terhadap tata ruang

Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi merupakan salah satu indikasi dari kurang optimalnya monitoring terhadap pelaksanaan tata ruang di lapangan.

III.4.2.2 Pressure

1. Penambangan timah illegal

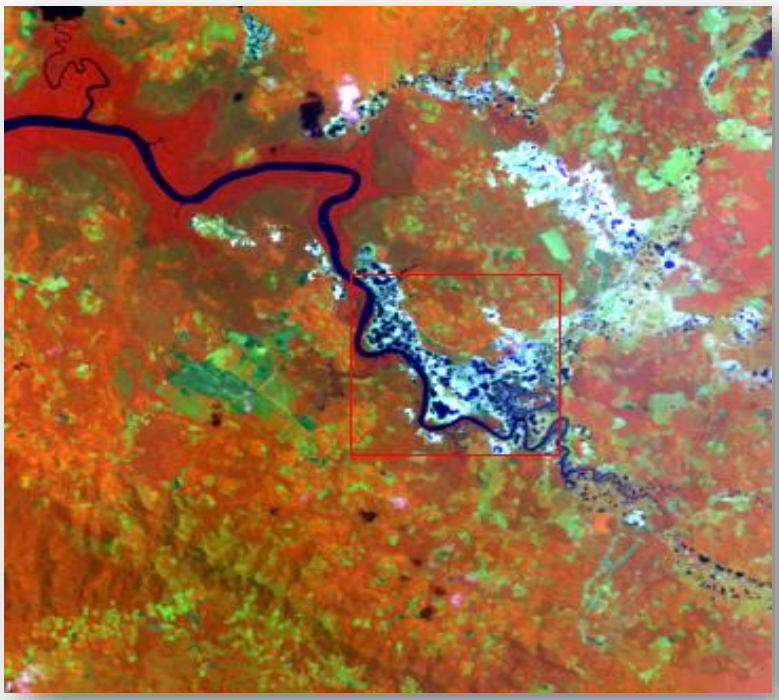

Gambar 3.9 Aktivitas Penambangan Timah Illegal (Inset Merah) di salah satu aliran sungai di Kabupaten Bangka melalui Citra Satelit
(Sumber: Interpretasi visual citra Landsat 8 OLI 562, USGS perekaman tahun 2019)

Kepulauan Bangka Belitung sangat terkenal dengan potensi mineral timahnya. Faktor ekonomi terkait dengan besarnya keuntungan yang didapatkan dari sektor ini membuat banyaknya penutup lahan utamanya yang bervegetasi yang beralih fungsi menjadi lahan pertambangan illegal.

Selain itu aktivitas penambangan illegal juga berlangsung di lahan reklamasi yang seharusnya steril dari kegiatan tersebut.

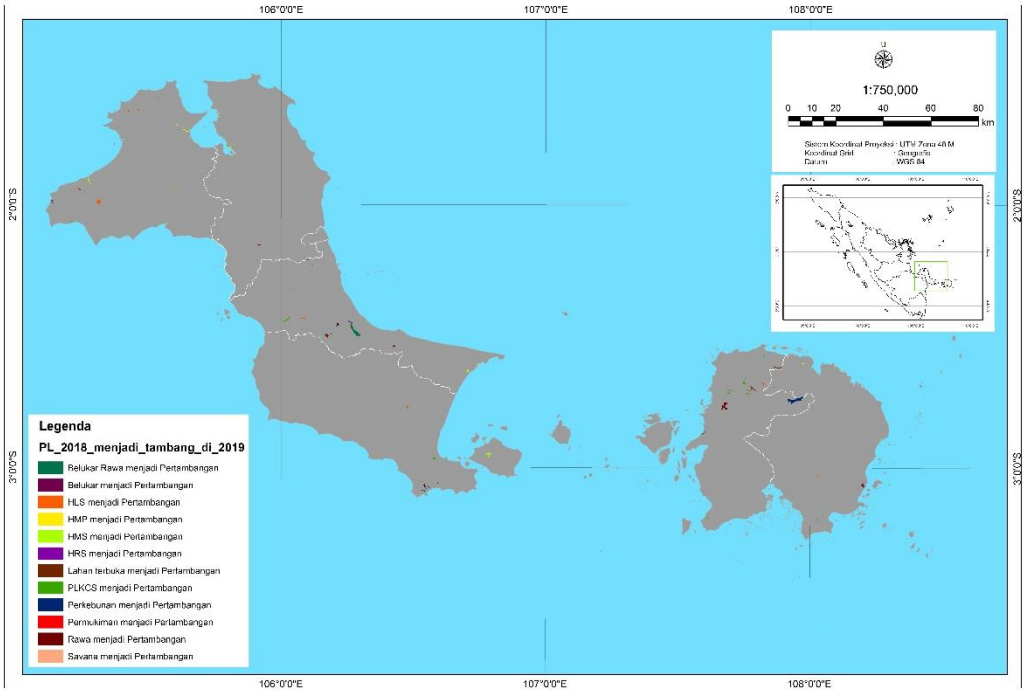

Gambar 3.10 Penutup Lahan Tahun 2018 yang beralih fungsi menjadi Lahan Penambangan di tahun 2019

(Sumber: Peta Penutup Lahan tahun 2018-2019 BPKH Wilayah XIII, Data diolah)

Gambar diatas menampilkan perubahan beberapa penutup lahan yang utamanya bervegetasi menjadi lahan terbuka penambangan di tahun 2019. Secara spasial terlihat bahwa alih fungsi lahan ini sebagian besar terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Belitung. Berdasarkan hasil analisis tumpang susun peta penutup lahan dua waktu diatas diketahui areal pertambangan di tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 1.642,4 ha. Dari pengolahan data terlihat bahwa konversi jenis tutupan lahan paling banyak terjadi yaitu belukar rawa (824,54 ha); pertanian lahan kering campur semak (765,65 ha); hutan mangrove sekunder (681,21 ha); pertanian lahan kering (605,68 ha); hutan sekunder (543,06 ha); tanah terbuka (330,35 ha); rawa (309,42 ha); belukar (289,86 ha); hutan mangrove primer (59,14 ha); hutan rawa sekunder (44,82 ha); savanna (24,42 ha); serta permukiman (16,14 ha). Perubahan tutupan lahan yang

didominasi oleh vegetasi ini mengindikasikan bahwa sektor ini dipandang masih bisa mendatangkan nilai ekonomi yang cukup tinggi namun disisi lain perubahan tersebut akan berdampak pada degradasi lingkungan.

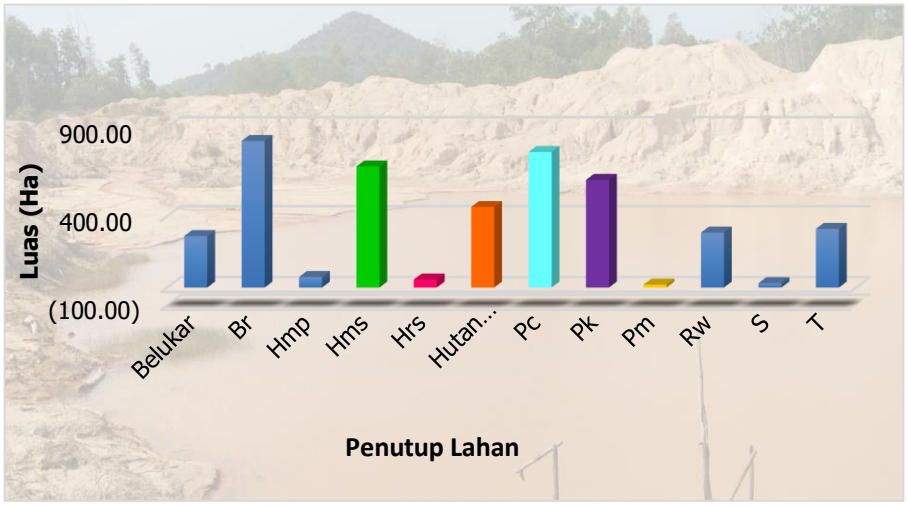

Gambar 3.11 Luasan Penutup Lahan yang Beralih Fungsi Menjadi Lahan Penambangan

(Sumber: Peta penutup lahan 2018-2019 BPKH Wil XIII Pangkalpinang, data diolah)

2. Dinamika Pembukaan lahan Perkebunan

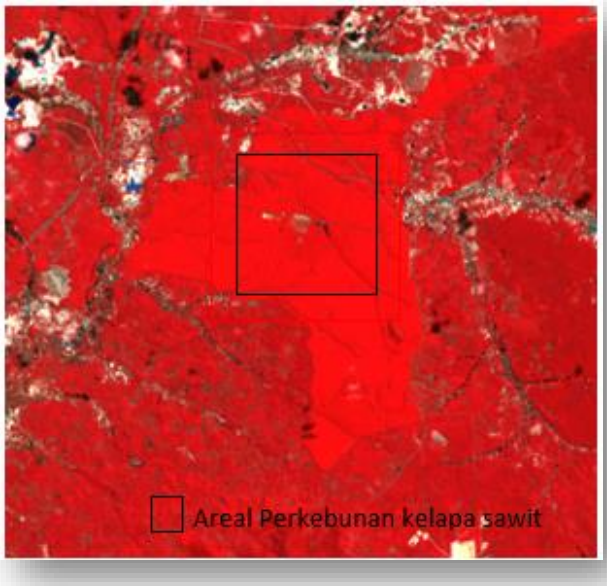

Gambar 3.12 Kenampakan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Belitung melalui citra satelit

(Sumber: Interpretasi visual citra Landsat 8 OLI 543, USGS tahun perekaman 2019)

Lahan perkebunan mengalami ekspansi cukup besar. Hal ini terlihat dari banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi sepanjang tahun 2018-2019

(Gambar 3.13) utamanya berada di Kabupaten Belitung dan diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah.

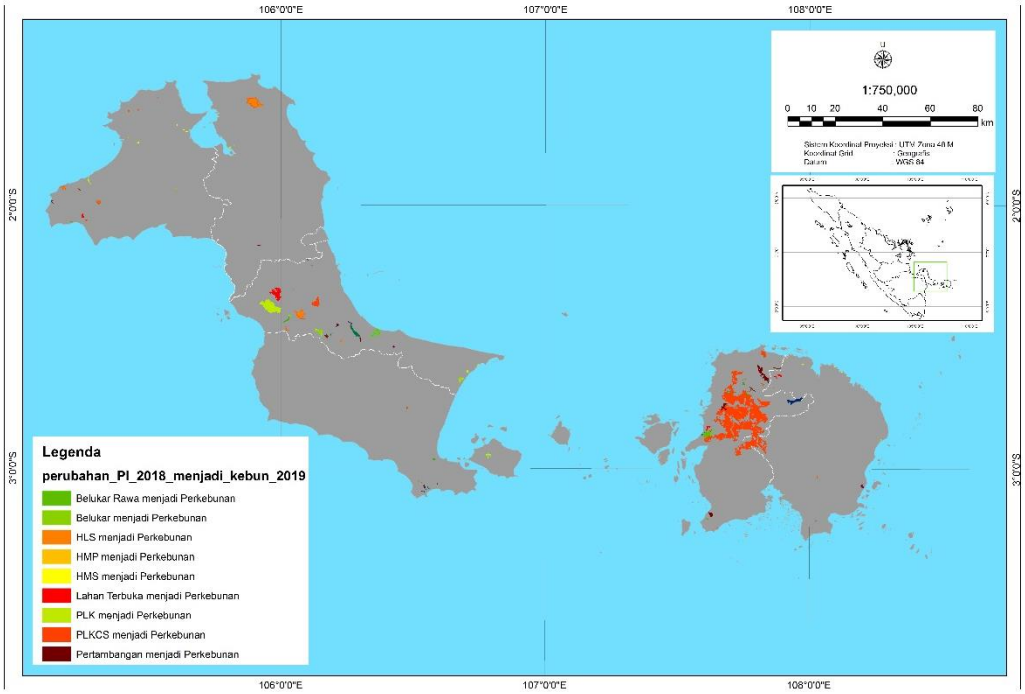

Gambar 3.13 Alih fungsi lahan menjadi perkebunan

(Sumber: Peta penutup lahan tahun 2018-2019 BPKH Wil XIII, data diolah)

Tutupan lahan perkebunan yang mengalami peningkatan luasan sebagai dampak dari alih fungsi lahan pertanian lahan kering campur semak dengan luasan lebih dari 30 ribu ha juga merupakan hasil dari konversi beberapa tutupan lahan lainnya seperti belukar (689,71 ha); belukar rawa (1.069,63 ha); hutan mangrove primer (11,37 ha); hutan mangrove sekunder (37,28 ha); hutan sekunder (2.633,47 ha); pertanian lahan kering (2.513,88 ha); tanah terbuka (1.558,72 ha) serta pertambangan (1.031,91 ha). Perbandingan luasan perubahan tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.14 berikut.

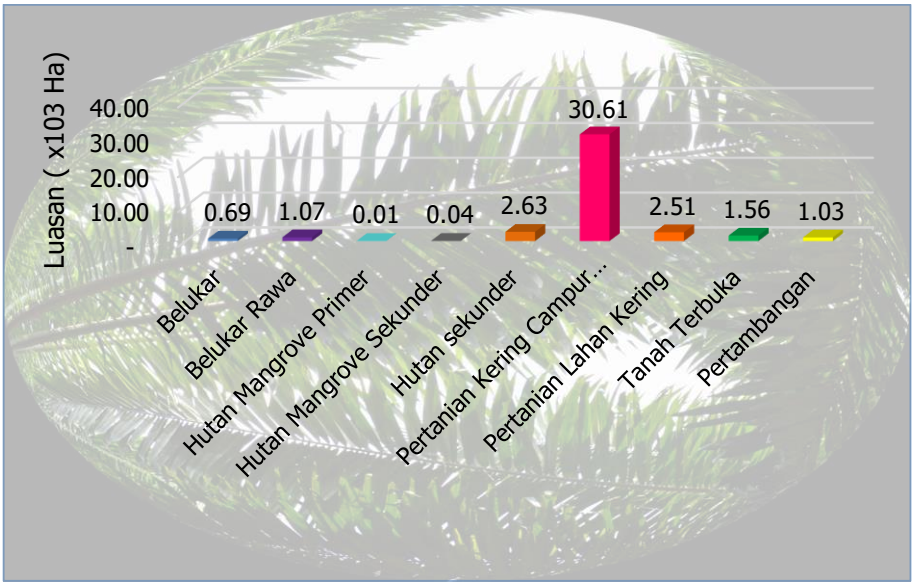

Gambar 3.14 Kelas Penutup Lahan yang beralih fungsi menjadi Perkebunan

(Sumber: Peta penutup lahan 2018-2019 BPKH Wil XIII Pangkalpinang, data diolah)

3. Dinamika Perkembangan Permukiman

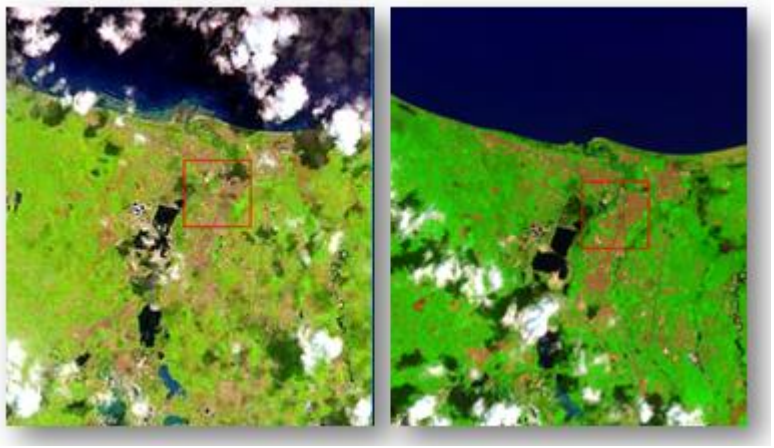

Gambar 3.15 Visualisasi Perkembangan Lahan Terbangun salah satu kawasan di Kab. Bangka Tengah

(Sumber: Interpretasi visual citra Landsat 8 OLI 752, USGS perekaman tahun 2017 dan 2019)

Berdasarkan hasil tumpang susun peta penutup lahan tahun 2018-2019, sebanyak 2.476,99 ha penutup lahan beralih fungsi menjadi permukiman. Pertanian lahan kering campur semak merupakan penutup lahan yang paling banyak mengalami alih fungsi yaitu seluas 1.065,59 ha, diikuti oleh kelas pertanian lahan kering seluas 693,12 ha; pertambangan seluas 426,01 ha; belukar seluas 109,91 ha hingga yang paling sedikit

mengalami alih fungsi yaitu hutan mangrove sekunder seluas 26,14 ha. Secara spasial terlihat bahwa alih fungsi lahan menjadi permukiman sebagian besar terjadi di wilayah administrasi Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Sementara itu di Kabupaten Belitung Timur paling minim terlihat adanya pertambahan permukiman baru bahkan tidak terlihat adanya perubahan sama sekali di wilayah Kota Pangkalpinang (Gambar 3.15).

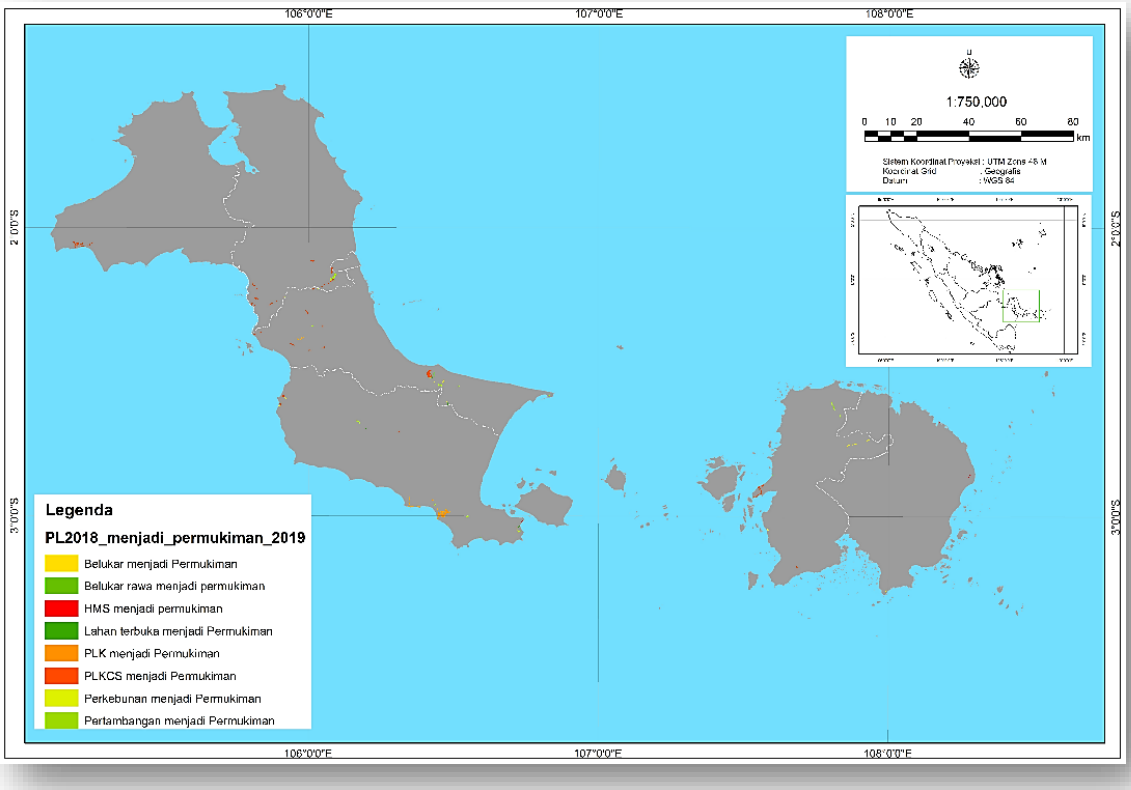

Gambar 3.16 Alih Fungsi Lahan menjadi Permukiman

(Sumber: Peta penutup lahan tahun 2018-2019, data diolah)

Lebih rinci, dari hasil tumpang susun tersebut tercatat luasan alih fungsi lahan menjadi permukiman terbesar yaitu seluas 901.0931 ha di Kabupaten Bangka tengah sedangkan di wilayah Kota Pangkalpinang tidak terjadi alih fungsi lahan dimaksud. Secara luasan administrasinya, Kabupaten Bangka Tengah merupakan wilayah dengan luasan paling kecil setelah kota Pangkalpinang yaitu seluas 2.126,36 ha dengan kepadatan penduduk 4,06 %. Ditinjau secara spasial, pertambahan lahan permukiman baru ini membentuk pola yang sifatnya menyebar di beberapa wilayah.

Banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi mengindikasikan pesatnya perkembangan di wilayah tersebut. Perbandingan luasan alih fungsi lahan menjadi permukiman secara jelasnya diperlihatkan pada Gambar 3.16. berikut.

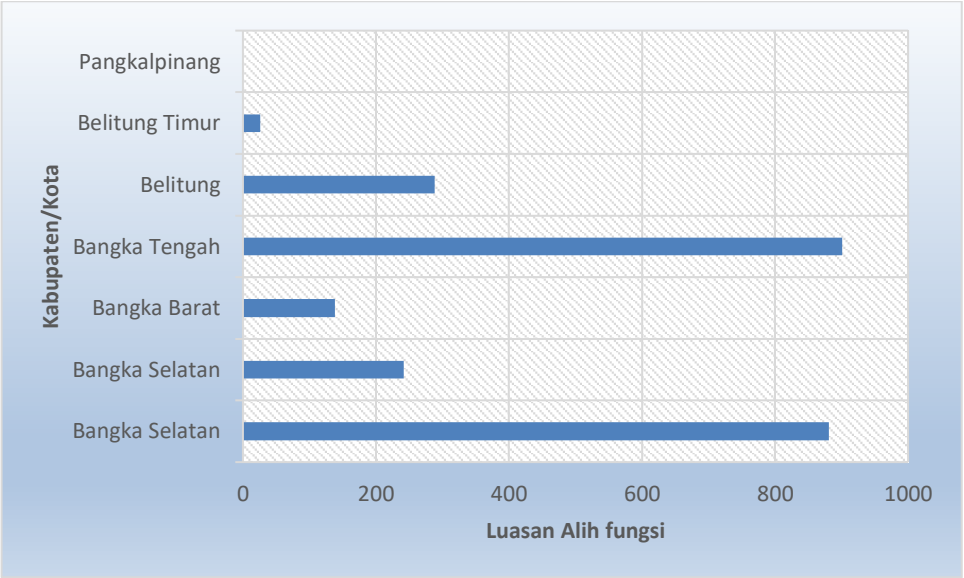

Gambar 3.16 Perbandingan Luasan Alih Fungsi Lahan Menjadi Permukiman di Tahun 2019

(Sumber: Peta penutup lahan 2018-2019 BPKH Wil XIII, data diolah)

III.4.2.3 State

1. Profil Penutup Lahan Tahun 2019

Berdasarkan peta penutup lahan skala 1 : 250.000 hasil interpretasi citra satelit Landsat 8 OLI dan SPOT 7 (BPKH wilayah XIII Pangkalpinang, 2020) diketahui bahwa jenis tutupan lahan vegetasi masih mendominasi daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persentase luasan mencapai 83,44 % sementara sisanya yaitu 16,56 % merupakan tutupan lahan non vegetasi. Pertanian lahan kering campur semak menjadi tutupan lahan secara umum sekaligus tutupan vegetasi terbesar dengan luas 530.689,02 ha atau setara 31,74 % dari luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya tutupan lahan vegetasi lainnya yang turut mendominasi yaitu belukar dan perkebunan dengan luasan masing-masing

298.425,98 atau setara 17,85% dari luas daratan wilayah dan 234.031,00 ha atau setara 14,06% dari luas daratan wilayah . Disisi lain, pertambangan mendominasi tutupan lahan non vegetasi dengan luasan mencapai 145.952,01 atau setara 8,77 % dari luas daratan wilayah. Dari total luasan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tutupan hutan mempunyai luas sebesar 213.501,06 ha atau hanya berkisar 12,77% saja. Adapun kelas tutupan lahan hutan terbesar adalah hutan lahan kering sekunder dengan luas 101.828,41 ha atau setara 7,3 % dari luasan tutupan lahan bervegetasi.

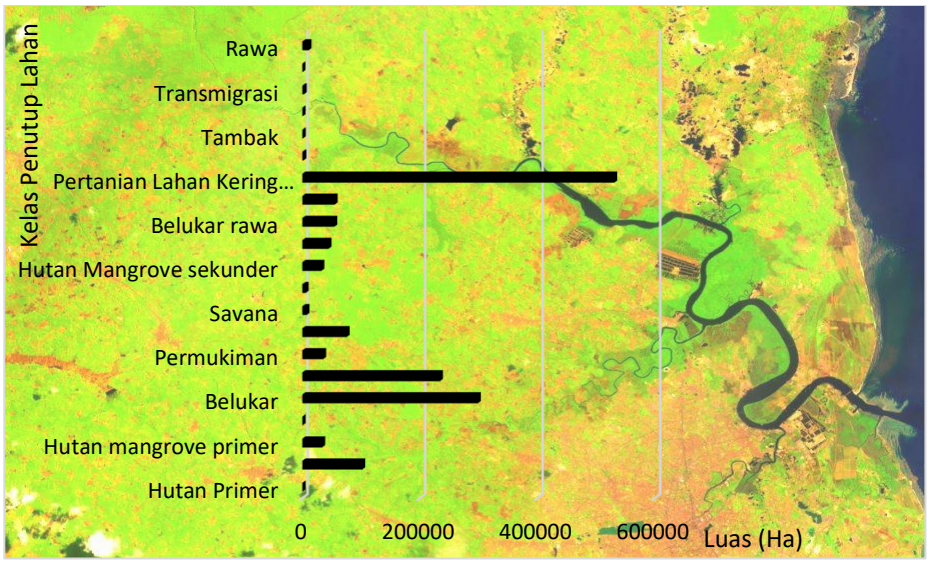

Gambar 3.17 Luasan Penutup Lahan Tahun 2019

(Sumber: Peta Penutup Lahan BPKH Wilayah XIII, 2020)

Dari hasil analisis spasial, kelas tutupan lahan pada tahun 2018 yang paling banyak mengalami alih fungsi lahan yaitu pertanian lahan kering campur semak seluas 32.764,40 ha, kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 12.107,43 ha serta belukar seluas 1.130,17 ha. Sementara itu jenis tutupan lahan yang tidak mengalami perubahan luasan sama sekali yaitu kelas tubuh air; bandara; sawah; tambak; serta areal transmigrasi. Terjadinya penurunan luasan pada penutup lahan pertanian lahan kering campur semak sebagian besar akibat konversi menjadi lahan perkebunan

yaitu sebesar 30.611.60 ha disamping beralih fungsi menjadi tutupan lahan lainnya yaitu belukar (170,10 ha); permukiman (1.065,59 ha); areal bandara (111,18 ha); tanah terbuka (11,18 ha) serta areal pertambangan (762,75 ha). Secara garis besar perubahan ini menunjukkan bahwa dari segi ekonomi, aktivitas perkebunan dinilai lebih baik dan menjanjikan daripada aktivitas sebelumnya di bidang pertanian. Di sisi lain dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi pada pertanian lahan kering campur semak berarti telah terjadi penyusutan areal pertanian di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Perubahan Penutup lahan Hutan

Tutupan hutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas hutan lahan kering; hutan rawa serta hutan mangrove. Dalam rentang waktu tahun 2018-2019 terjadi penurunan luasan hutan dengan total sebesar 13.200,32 ha sebagai akibat konversi menjadi tutupan lahan lainnya (Gambar 3.18). Perubahan luasan terbesar dialami oleh tutupan hutan sekunder yaitu 11.865,43 ha sementara hutan rawa primer mengalami perubahan luasan terkecil yaitu seluas 45,13 ha (Gambar 3.19).

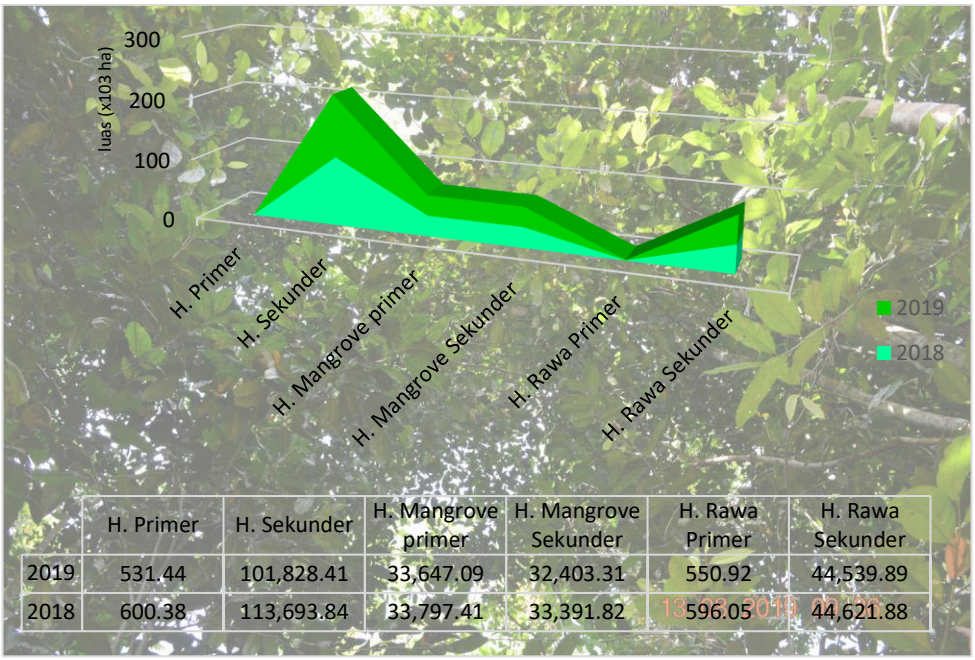

	H. Primer	H. Sekunder	H. Mangrove primer	H. Mangrove Sekunder	H. Rawa Primer	H. Rawa Sekunder
2019	531.44	101,828.41	33,647.09	32,403.31	550.92	44,539.89
2018	600.38	113,693.84	33,797.41	33,391.82	596.05	44,621.88

Gambar 3.18. Luasan perubahan penutup lahan hutan 2018-2019

(Sumber: peta penutup lahan BPKH Wil XIII, data diolah)

Dari total luasan perubahan hutan sekunder tersebut, sekitar 7.058,82 ha terkonversi menjadi pertanian lahan kering campur semak.

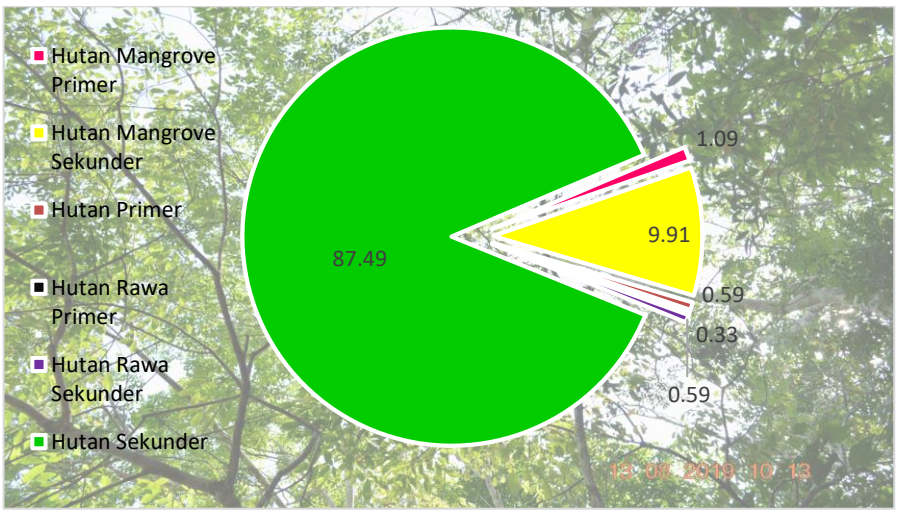

Gambar 3.19 Persentase Perubahan Luasan Penutup Hutan yang mengalami Alih Fungsi Lahan 2018 – 2019

(Sumber: Peta penutup lahan BPKH Wil XIII, data diolah)

Pertambangan banyak mengkonversi tutupan lahan yang sebelumnya bervegetasi menjadi tutupan lahan tak bervegetasi. Hasil

analisis tahun 2018 – 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 3.745,48 ha atau setara dengan 85,1 % lahan bervegetasi mengalami alih tata guna lahan menjadi areal pertambangan. Dari angka tersebut, seluas 1.237,68 ha hutan telah mengalami alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan (Gambar 3.20) dimana hutan lahan kering sekunder yang beralih fungsi menjadi areal pertambangan yaitu seluas 453,06 ha. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya pemberitaan di media lokal mengenai razia penambangan khususnya timah illegal yang merambah hingga ke dalam wilayah hutan khususnya hutan lindung. Aksesibilitas yang terbatas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan monitoring terhadap kegiatan penambangan berjalan kurang optimal.

Selain itu hasil analisis memperlihatkan bahwa trend penambangan tersebut mulai beralih ke wilayah sempadan sungai dan pesisir yang ditunjukkan oleh konversi lahan hutan mangrove sekunder menjadi areal penambangan seluas 681,21 ha. Peralihan tersebut terkait dengan cadangan timah alluvial di daratan yang sudah berkurang. Tekanan terhadap tata guna lahan yang dialami oleh proses deforestasi hutan pada akhirnya akan berdampak pada turunnya kualitas lingkungan termasuk berpengaruh dalam upaya mitigasi perubahan iklim.

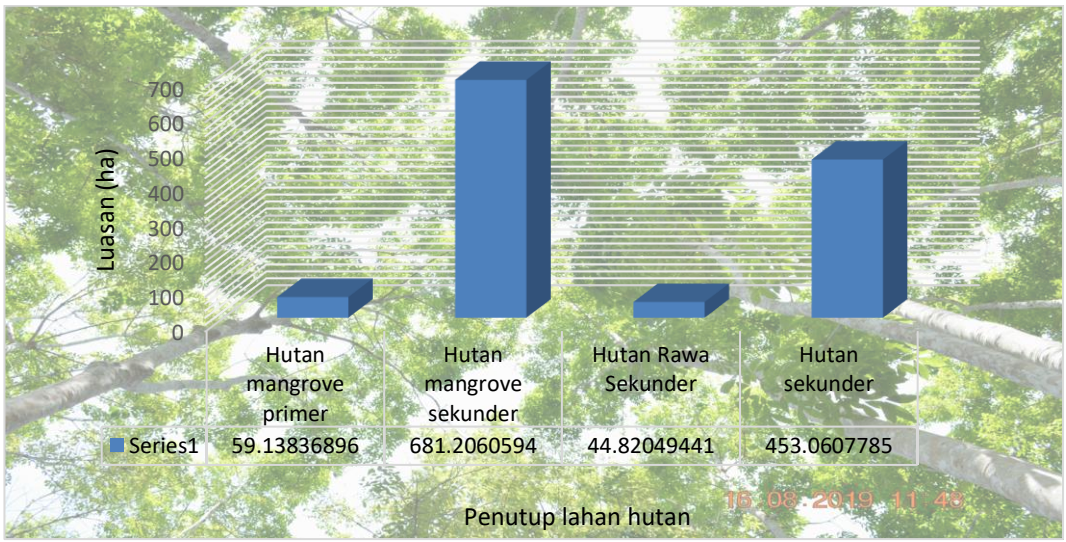

Gambar 3.20 Luasan hutan yang beralih fungsi menjadi pertambangan

(Sumber: Peta penutup lahan 2018-2019 BPKH Wil XIII, data diolah)

3. Lahan Kritis

Berdasarkan data terakhir dari Dinas kehutanan Prov Kepulauan Bangka Belitung, luas lahan yang terkategori kritis yaitu seluas 20.098,1 ha dengan rincian luas lahan kritis sebesar 19.850,24 ha yang sebagian besar tersebar di wilayah Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka Selatan serta lahan sangat kritis seluas 247,86 ha yang mayoritas berada di Kabupaten Bangka Selatan. Lahan kritis tersebut merupakan dampak dari aktivitas perambahan hutan untuk penambangan timah serta pengembangan lahan perkebunan.

4. Kondisi ekosistem di pesisir

Berdasarkan hasil analisis spasial penutup lahan tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa luasan hutan mangrove di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 63.559,6 ha yang tersebar di sepanjang pesisir seluruh kabupaten kecuali di Kota Pangkalpinang. Adapun kawasan hutan mangrove terbesar berada di Kabupaten Bangka Barat dengan luas sebesar 21.179,82 ha. Sejumlah tekanan yang dialami oleh lingkungan pesisir utamanya akibat alih fungsi lahan terlihat melalui Gambar 3.21 berikut ini dimana ekosistem mangrove cenderung mengalami penurunan luasan dalam 3 tahun terakhir. Bahkan dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2019 hasil analisis spasial menunjukkan berkurangnya luasan penutup lahan mangrove sebesar 1.138.8 ha.

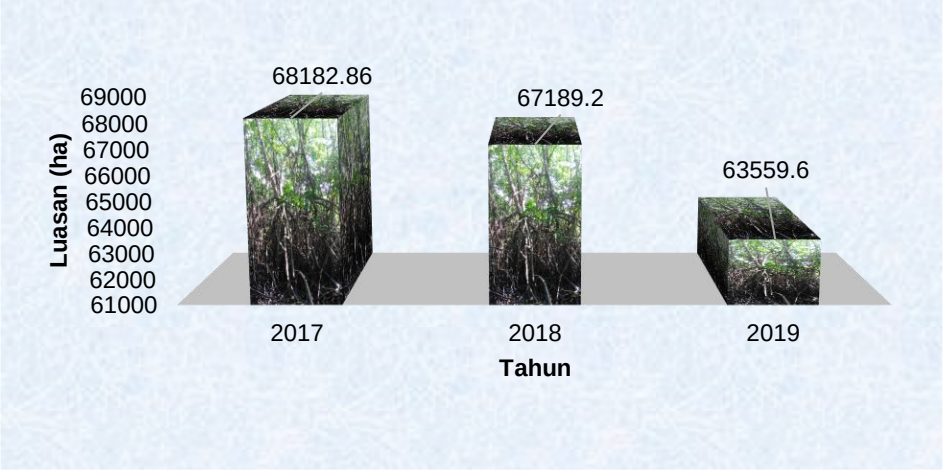

Gambar 3.21 Perubahan Luasan hutan Mangrove Tahun 2017-2019

(Sumber: Peta penutup lahan tahun 2017-2019 BPKH Wilayah XIII, data diolah)

5. Kondisi IKTL

Pada tahun 2019 nilai indeks kualitas tutupan lahan di Bangka Belitung yaitu sebesar 41,2. Alih fungsi lahan yang terjadi kawasan hutan seluas 11.005,628 ha yang beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, pertanian lahan kering campur semak, pertambangan serta permukiman sangat berkontribusi dalam kategori indeks kualitas tutupan lahan sangat kurang baik. Secara kuantitas, tutupan hutan merupakan komponen utama dalam perhitungan IKTL sedangkan penutup lahan baru hasil alih fungsi tidak termasuk dalam parameter perhitungan indeks ini.

II.4.2.4 Impact

1. Turunnya kesuburan tanah

Alih fungsi lahan menjadi lahan penambangan berdampak pada turunnya kualitas tanah. Dilihat dari komposisi material timbunan hasil penambangan, sisa hasil proses pencucian bijih timah atau *tailing* mempunyai unsur hara yang paling rendah. Tabel III.7 menampilkan hasil analisis morfologi tanah hasil penambangan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel III.7 Sifat Morfologi Tanah Bekas Penambangan di Bangka Belitung

Sifat morfologi	Tanah pucuk	Tailing	Tanah mineral bagian bawah	Tanah campuran
Warna	Kelabu merah kekuningan	Kelabu terang putih	Kelabu gelap putih	Kelabu merah kekuningan
Tekstur lapangan	Liat berpasir-lempung liat berpasir	Pasir	Pasir berlempung-lempung berpasir	Lempung berpasir-lempung liat berpasir
Struktur	Gumpal-pejal (massif)	Butir tunggal (single grains)	Pejal (massif)	Pejal (massif)
Konsistensi lembab	Teguh – gembur	Lepas – sangat gembur	Sangat teguh	Gembur-teguh
Bahan kasar (%)	< 5	20-30	30-40	20-30
pH lapangan	4,0 – 4,5	4,0 – 5,0	4,5 – 5,5	4,0 – 5,5
Kedalaman	Dalam (85cm)	Dalam (90 cm)	Dalam (85 cm)	Sangat dalam (>100 cm)

(Sumber: Abdul, 2017)

Tabel III.8 Rata-rata dan kisaran beberapa sifat tanah bekas tambang di Bangka Belitung

Karakteristik	Tanah pucuk	Tailing	Material lapisan bawah	Tanah campuran
Pasir (%)	61.3 (49,2 – 74,7)	82,4 (72,3 0 92,8)	62,7 (41,3-85,4)	62,1 (41,3-79,7)
Debu (%)	10,5 (4,4-16,7)	5,4(0,2-21,3)	28,4 (13,0-51,8)	28,6 (13,7-43,10)
Liat (5)	28,2 (20,9-35,1)	12,3 (4,4-21,3)	28,4 (13,0-51,8)	28,6 (13,7-43,10)
Tekstur	Lempung liat berpasir	Pasir	Lempung liat berpasir	Lempung liat berpasir
pH tanah	4,0 (3,8-4,3)	4,9 (4,3-5,3)	4,8 (4,2-5,2)	4,5 (4,2-5,0)
C organik (%)	1,85 (1,07-3,14)	0,16 (0,05-0,62)	0,12 (0,06-0,18)	0,66 (0,15-1,19)
P_2O_5 total (mg $100g^{-1}$)	8,6 (2,5-22,0)	3,8 (2,2-9,9)	3,6 (2,3-5,5)	5,66 (2,48-10,63)
K_2O total (mg $100g^{-1}$)	5,0 (2,0-12,7)	1,03 (0,64-1,75)	1,8 (0,6-3,3)	2,75 (1,64-5,20)
P_2O_5 Bray I (ppm)	18,8 (2,3-43,3)	5,26 (0,98-16,91)	1,4 (0,5-2,8)	8,66 (0,53-38,45)
Basa-Basa (cmol 100 g^{-1})	0,60 (0,43-0,93)	0,83 (0,35-1,88)	1,05 (0,67-1,84)	0,85 (0,43-1,69)
KTK (cmol 100 g^{-1})	6,95 (3,17-12,40)	2,48 (1,19-4,030	3,83 (1,73-6,84)	4,58 (3,17-5,97)
KB (%)	10 (7-14)	35 (15-64)	33 (11-60)	18 (12,29)
Cu (ppm)	0,65 (0,43-1,13)	0,54 (0,43-0,94)	0,58 (0,44-0,85)	0,49 (0,44-0,52)
Pb (ppm)	7,59 (1,75-17,93)	9,99 (0,65-37,84)	16,91 (10,50-22,41)	7,61 (4,61-14,32)
Cd (ppm)	Td	Td	0,09 (0,05-0,12)	Td
Hg (ppm)	Td	0,19 (0,01-0,82)	0,82 (td-0,82)	td

Sumber: Abdul, 2017

Berdasarkan kedua tabel diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa secara fisik karakteristik tanah sisa atau timbunan hasil penambangan memiliki tekstur yang kasar berpasir serta unsur hara yang rendah yang dapat dilihat dari sifat kimiawi pH rendah, kandungan C, N, dan P serta basa-basa Ca, Mg, K dan Na sangat rendah (Asmarhansyah, 2017; Abdul, 2017).

2. Menurunnya Kualitas Air

Meningkatnya aktivitas penambangan akan mempengaruhi kualitas air permukaan . Hal ini merupakan imbas dari proses pencucian bijih timah yang banyak masuk kedalam badan sungai dan terkonsentrasi sebagai sedimen di perairan. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh Saputro et al (2014) disimpulkan bahwa aktivitas penambangan timah di sepanjang aliran sungai Jelitik telah menurunkan tingkat kualitas air yang ditandai oleh naiknya konsentrasi beban pencemar khususnya parameter kekeruhan. Selain itu *tailing* dari proses penambangan mengandung logam berat yang juga dapat terakumulasi sekaligus mengontaminasi perairan.

3. Turunnya Produktivitas Pertanian

Alih fungsi penutup lahan pertanian lahan kering campur semak menjadi penutup lahan lainnya seperti pertambangan, perkebunan maupun permukiman menjadi berdampak pada menurunnya luasan areal bercocok tanam sekaligus menurunkan produktivitas hasil pertanian.

4. Meningkatnya Resiko Bencana

Alih fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan terbuka untuk aktivitas penambangan di sepanjang alur sungai akan meningkatkan konsentrasi sedimen di perairan sekaligus mempercepat pendangkalan sungai. Secara spesifik, alih fungsi hutan berarti akan mengurangi sumber alami resapan air. Dengan topografi wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang mayoritas datar hingga sedikit bergelombang dan ditambah dengan kondisi hujan

dalam intensitas besar dapat mengakibatkan timbulnya bencana banjir. Ancaman yang sama saat makin banyaknya alih fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun yang mengakibatkan banyaknya terjadi *surface run off* dan meningkatkan resiko genangan serta banjir.

Alih fungsi lahan tersebut juga meningkatkan resiko terjadinya erosi dan tanah longsor. Keberadaan vegetasi khususnya yang bertajuk lebar dengan kerapatan sedang hingga tinggi akan mengurangi besarnya energi kinetik hujan yang dapat mengelupaskan permukaan tanah. Sistem perakarannya juga berperan dalam mengikat partikel tanah sehingga mengurangi resiko pengikisan material permukaan tanah oleh air.

Bencana lain yang merupakan dampak dari alih fungsi lahan yaitu kebakaran hutan dan lahan yang utamanya terjadi akibat pembukaan lahan baru untuk perkebunan.

5. Ancaman kenaikan suhu permukaan daratan

Alih fungsi penutup lahan bervegetasi menjadi lahan terbuka tidak bervegetasi utamanya pertambangan akan berpengaruh pada tingkat kelembaban tanah dan suhu di areal tersebut (Lestari et al, 2008). Lahan terbuka ataupun lahan terbangun akan meningkatkan nilai emisivitas sehingga suhu di lingkungan tersebut akan menjadi lebih tinggi daripada areal di sekitarnya terutama yang bervegetasi. Dengan demikian semakin tingginya alih fungsi lahan yang terjadi maka berdampak pada kenaikan *land surface temperature* (LST) atau suhu permukaan daratan. Di musim kemarau imbas dari meningkatnya LST tersebut berbanding lurus dengan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan.

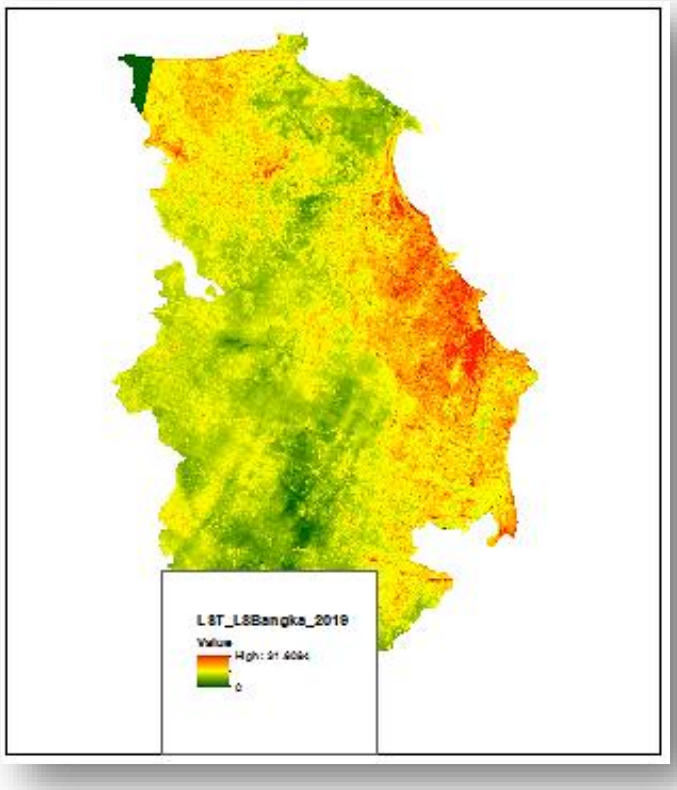

Gambar 3.22. Ilustrasi *Land Surface Temperature* di Kabupaten Bangka melalui Citra Satelit

(Sumber: Analisis LST Citra Landsat 8 OLI perekaman 2 September 2019)

6. Implementasi terhadap mitigasi perubahan iklim

Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* terkait isu perubahan iklim yang telah ditetapkan dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sejak tahun 2016 dimana salah satu sektor yang termuat didalamnya yaitu kehutanan sebesar 17,2 %(INDC, 2016). Alih fungsi lahan bervegetasi khususnya hutan menjadi lahan terbuka penambangan, perkebunan maupun permukiman secara massif tentunya bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai pemicu terjadinya perubahan iklim.

Dalam sebuah kajian terkait hubungan antara perubahan penutup lahan terhadap potensi penyerapan gas karbondioksida yang berbasis pada analisis digital citra multitemporal dan pemodelan *Cellular Automata – Markov Chain* di Kabupaten Bangka diketahui diperoleh salah satu hasilnya bahwa dalam rentang tahun 2017 hingga tahun 2030 pada kondisi *business as usual* penurunan luasan penutup lahan bervegetasi akibat terkonversi

menjadi penutup lahan yang tidak bervegetasi akan menyebabkan turunnya sequestrasi atau penyerapan karbondioksida sebesar 1.383.433 ton CO_2 (Tassri, 2019). Hal ini merupakan gambaran kaitan antara alih fungsi lahan terhadap penyerapan gas karbondioksida mempunyai korelasi yang negatif.

7. Konflik sosial

Alih fungsi lahan dapat berimbas pada terjadinya friksi atau konflik sosial di masyarakat karena hal ini terkait dengan mata pencaharian di sektor pertambangan maupun perkebunan. Beberapa konflik tersebut diantaranya:

- Konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka
- Konflik masyarakat dengan perusahaan terkait HGU perkebunan di Kabupaten Belitung Timur
- Konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan timah laut di pesisir Pantai Kabupaten Bangka
- Konflik antar masyarakat terkait lahan penambangan timah eks PT Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah

III. 4.2.5 Response

Terhadap segala dampak dari perspektif lingkungan, sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya alih fungsi lahan tersebut yang semuanya bermuara pada kebijakan, maka salah satu langkah besar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu dalam mempercepat pengesahan kebijakan RZWP3K. Di akhir tahun 2019, dokumen RZWP3K telah memasuki tahap akhir setelah rapat tanggapan dan saran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain itu, sejumlah usaha nyata telah dilaksanakan oleh segenap organisasi perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

saling bersinergi dalam meminimalisir segala dampak tersebut melalui sejumlah kegiatan seperti yang disebutkan dibawah ini.

1. Dampak Lingkungan

a. Rehabilitasi Lahan

Salah satu bentuk upaya pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memulihkan lahan kritis akibat alih fungsi lahan diantaranya yaitu:

- Kegiatan reboisasi hutan oleh Dinas Kehutanan di beberapa kawasan yang terealisasi seluas 84,4 ha dengan jumlah tegakan 102.789 pohon.

Gambar 3.23. Penyerahan Simbolis Bibit Reboisasi Hutan dan Lahan
(Sumber: Dok. Dinas Kehutanan Prov Kep Babel, 2019)

- Pembibitan tanaman asam oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan perusahaan Refined Bangka Tin (RBT) dan sekolah-sekolah

Gambar 3.24. Kerjasama pembibitan tanaman asam antara pihak DLH Prov. Kep. Babel – Perusahaan *Refined Bangka Tin*
(Sumber: Dok. DLH Prov Kep Babel, 2019)

b. Reklamasi Lahan Tambang

- Penanaman bibit pohon buah yang membawa manfaat bagi jangka panjang di seputar lahan kritis di daerah bandara sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Penanaman Pohon dan Menuju Bapak Penggerak Reklamasi Nasional Bangka Belitung

Gambar 3.25 Kegiatan Penanaman Pohon dan Menuju Bapak Penggerak Reklamasi Nasional
(Sumber: Dok. Dinas Kehutanan Prov Kep. Babel, 2019)

c. Penertiban terhadap aktivitas penambangan illegal

Sejumlah penertiban telah banyak dilaksanakan oleh tim Gabungan utamanya dari sat pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai tindakan tegas pemerintah daerah dalam mengatasi maraknya penambangan timah inkonvensional dimana diantaranya diperlihatkan pada Gambar 3.25 dan Gambar 3.26 dibawah ini.

Gambar 3.26. Penertiban timah illegal di situs Kota Kapur, Kec. Mendo Barat
(Sumber: Dok. Satpol PP Prov Kep Bangka Belitung, 2019)

Gambar 3.27. Penertiban Timah illegal di kawasan hutan konservasi Bukit Menumbing

(Sumber: Dok. Satpol PP Prov Kep. Babel ,2019)

d. Pemulihan Ekosistem Pesisir

- Penanaman Mangrove di Pesisir Pulau Bangka

Gambar 3. 28. Kegiatan penanaman bibit mangrove *Rhizopora apiculata* di Bangka Tengah

(Sumber: Dok. DLH Prov Kep Babel, 2019)

- Penetapan Kawasan Ekonomi Esensial (KEE) di Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Pulau Pongok, Kab. Bangka Selatan

Gambar 3.29. Konsultasi Publik Penetapan KEE

(Sumber: Dok. Dinas Kehutanan Prov Kep. Babel, 2019)

e. Pemberian bantuan 500 bibit lada, 500 junjung serta 5 kg pupuk untuk 1 batang lada sebagai upaya peningkatan produktivitas lada sebagai komoditi unggulan dari Bangka Belitung.

Gambar 3.30. Penyerahan simbolis bibit lada di Kecamatan Air Gegas oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
(Sumber: Dok. Biro Humas Prov. Kep. Babel, 2019)

2. Terhadap Dampak bencana

a. Kegiatan pendalaman sejumlah alur sungai utama yang mengalami sedimentasi yaitu di muara Sungai Kurau Kabupaten Bangka Tengah, Muara Sungai Tanjung di Kabupaten Bangka Barat, Muara sungai Jelitik di Kabupaten Bangka dan muara sungai Lenggang di Kabupaten Belitung Timur.

Gambar 3.31 Rapat pembahasan pengembangan alur sungai Kurau untuk antisipasi banjir
(Sumber: Dok. Diskominfo Prov. Kep. Babel, 2019)

b. Pembentukan satgas antisipasi bencana banjir dan kebakaran hutan oleh BPBD Provinsi Kep. Bangka Belitung

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bangka Belitung melibatkan pramuka sebagai lini terdepan dalam pencegahan dan penanggulanan bencana daerah di Bangka Belitung.

Gambar 3.32 Kegiatan pelatihan satuan petugas pramuka peduli bencana banjir yang diadakan oleh BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung
(Sumber: Dok. BPBD Prov Kep. Babel, 2019)

3. Terhadap Dampak Sosial ekonomi

a. Dalam mengatasi konflik sosial terkait alih fungsi lahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kep. Bangka Belitung mengadakan sinkronisasi penanganan konflik sosial di lapangan dalam kegiatan Peningkatan Kemampuan Terhadap Bhabinkabtibmas yang diikuti oleh perwakilan anggota Bhabinkabtibmas se kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 4 Juli 2019.

Gambar 3.33 Kegiatan Peningkatan Kemampuan Terhadap Bhabinkabtibmas
(Sumber: Dok. Badan Kesbangpol Prov Kep. Babel, 2019)

b. Kegiatan rapat koordinasi terkait penanganan konflik sosial

Gambar 3.34 Kegiatan Monitoring, Verifikasi dan Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penyelenggara Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi
(Sumber: Dok. Badan Kesbangpol Prov Kep Babel, 2019)

c. Dalam mengantisipasi konflik akibat alih fungsi lahan utamanya lahan pertanian diminimalisir dalam kegiatan reformasi agraria. Pada tahun 2019 targetnya adalah 25.000 bidang lahan pertanian.

Gambar 3.35 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reformasi Agraria
(Sumber:Dok. Diskominfo Prov Kep. Babel, 2019)

BAB IV
INOVASI DAERAH

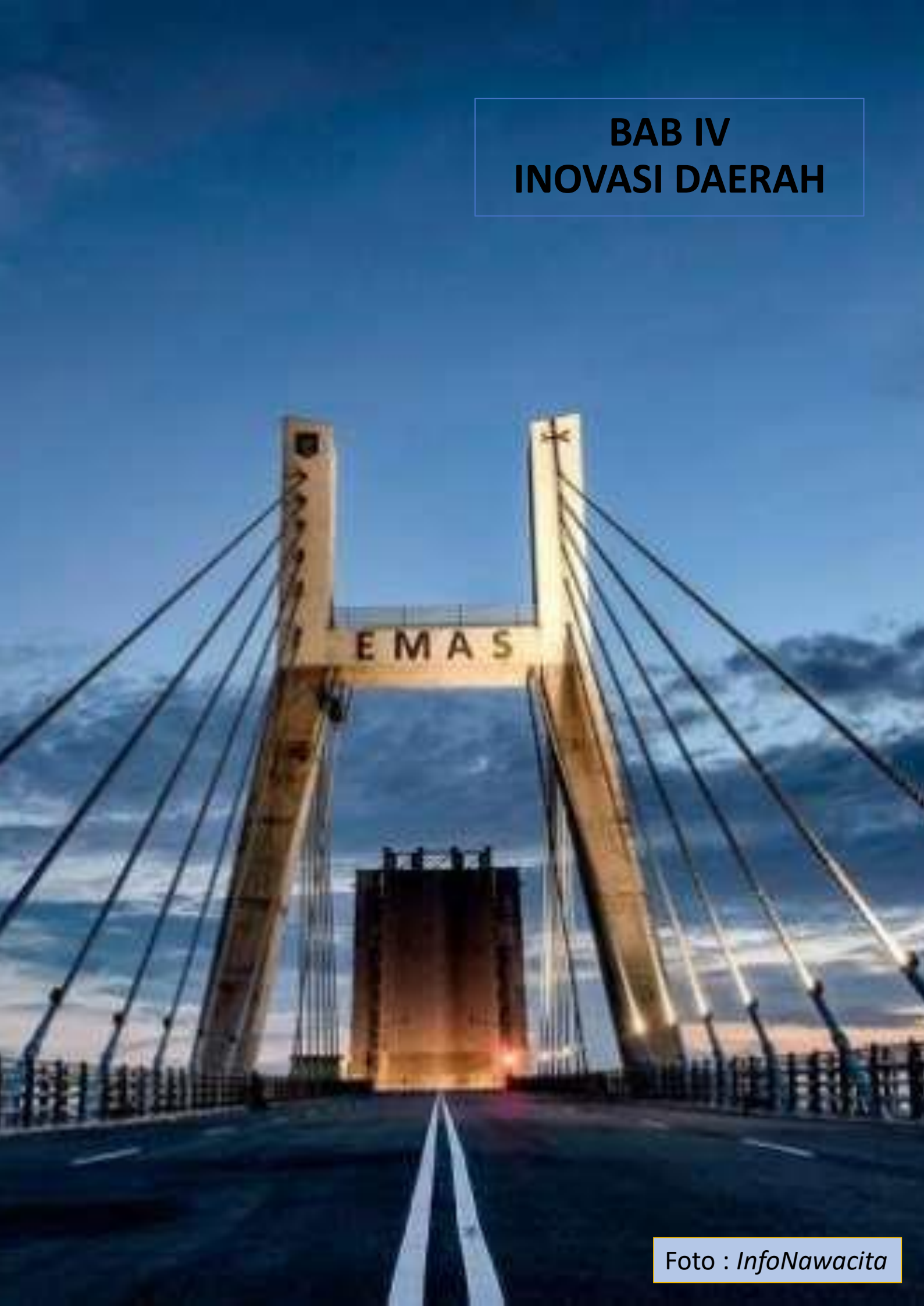

Foto : *InfoNawacita*

BAB IV
INOVASI DAERAH
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

IV.1. Konsep Dasar Inovasi

Inovasi merupakan suatu kreasi, pengembangan dan pengembangan implementasi suatu produk, proses ataupun layanan baru dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas atau keunggulan bersaing. Steve P. Robbins dan Timoty A. Judge mendefinisikan inovasi sebagai sebuah gagasan baru yang dijalankan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses atau layanan (Stephen P. Robbins dan Timothy A.Judge, Organizational Behavior 2011: 361). Sedangkan Sthepen P.Robbins dan Marry Coulter menyatakan inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna.

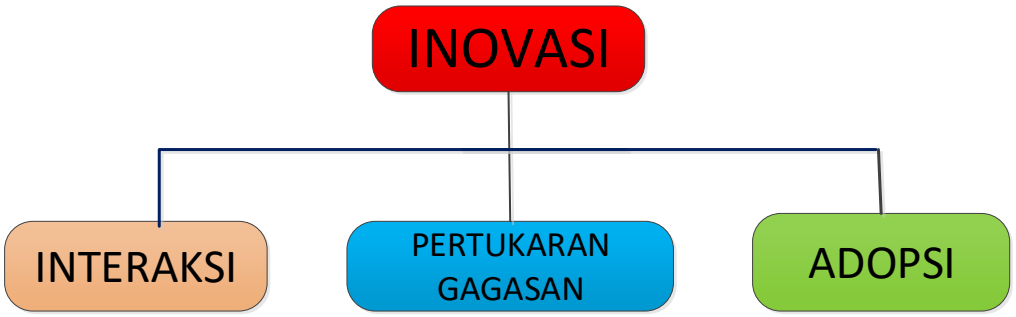

Gambar 4.1. Visualisasi Skematik Inovasi

Setiap praktik pemikiran dan teori tentang inovasi haruslah berurusan dengan " pengetahuan" dan "*Values*" pengetahuan kolektif dan nilai-nilai kolektif (*Sony Yuliar, Paparan inovasi ITB 2016).*

Inovasi terbentuk karena didorong oleh kehendak dan diarahkan oleh pengetahuan yang ada sehingga menghasilkan nilai-nilai lebih dalam

bentuk pembuatan suatu karya ataupun penggunaan karya yang sudah ada. Inovasi di dalam dunia pemerintahan merupakan bentuk pembelajaran dan perubahan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan. Inovasi dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa menjadi solusi untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi terkait pengelolaan lingkungan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan pengelolaan dan memulihkan kondisi lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Komitmen ini tertuang jelas dalam visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah. Visi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan 2025. Adapun makna dalam visi ini adalah :

1. Provinsi Kepulauan merupakan cerminan karakteristik Bangka Belitung yang berbentuk kepulauan dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta turut andil dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah.
2. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus membangun, berpikir jauh ke depan, dan kreatif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan tata pemerintahan yang baik.
3. Sejahtera merupakan tujuan pembangunan untuk mewujudkan pemenuhan atas hak-hak dasar masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan peningkatan pendapatan, pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik, serta mendapatkan rasa aman.

4. Berwawasan Lingkungan adalah berubahnya sikap mental masyarakat sehingga lebih berorientasi pada kehidupan jangka panjang melalui keinginan yang kuat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam serta peduli terhadap kelestarian lingkungan.

Visi pembangunan Kepulauan Bangka Belitung tersebut diwujudkan dengan melaksanakan misi-misi berikut ini.

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan dan mencapai visi pembangunan jangka panjang tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama masyarakat telah melakukan beberapa inovasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Berikut ini diuraikan beberapa hal yang merupakan tindakan inovasi dalam pengelolaan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung.

IV.2. Inovasi Pengelolaan Lahan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menganggap penting permasalahan terkait lahan sehingga diangkat menjadi isu prioritas DIKPLHD seperti yang telah dijelaskan pada analisis DPSIR Tata Guna Lahan dan Alih fungsi lahan.

Berkaitan dengan Inovasi dalam pengelolaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat di Gambar 4.2.

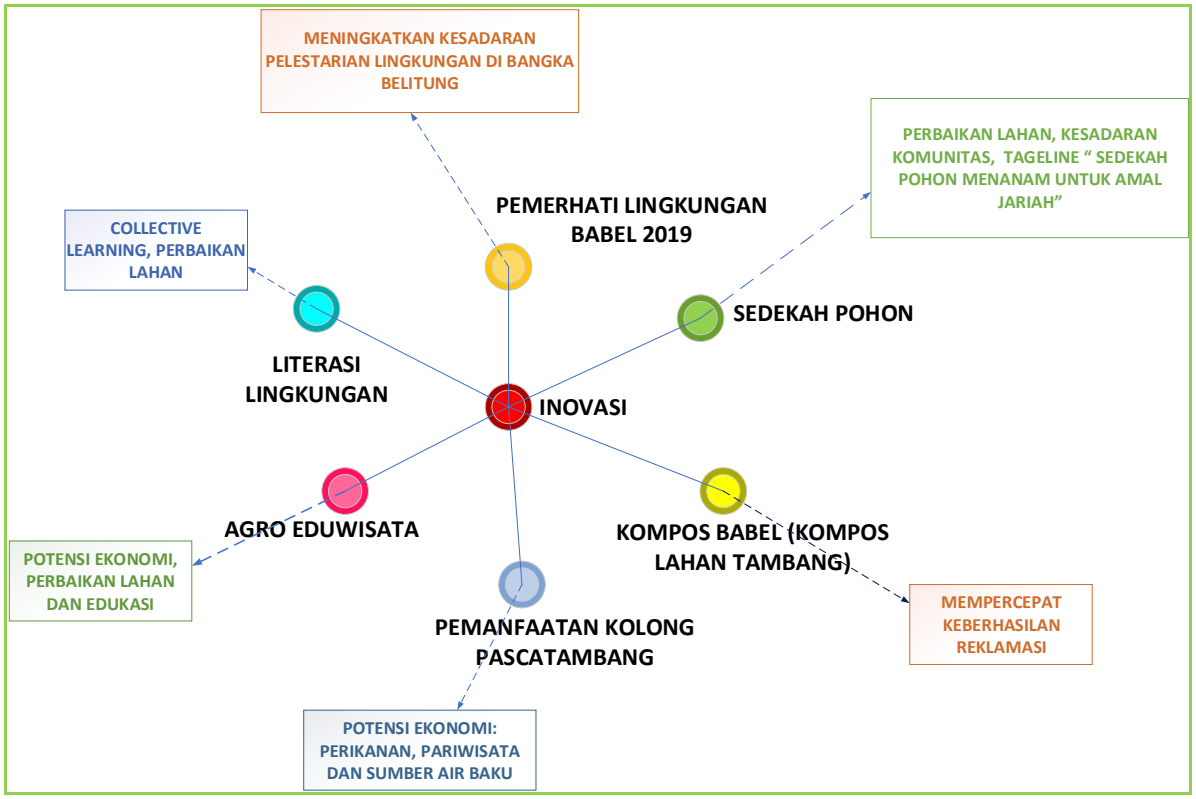

Gambar.4.2. Visualisasi Skematik Inovasi dalam Pengelolaan Lahan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan tata guna lahan dalam bentuk inovasi telah dilakukan sebagai bentuk komitmen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meminimalkan kerusakan lahan tentunya ini berkaitan dengan karakteristik Bangka Belitung sebaagai daerah yang dikenal sebagai daerah tambang timah dengan berbagai permasalahan terekaiat kerusakan lahan yang dihadapi. Adapun bentuk inovasi sebagai komitmen Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Program Pemerhati Lingkungan Bangka Belitung

Program ini bertujuan memberikan penghargaan kepada pemerhati lingkungan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program ini hampir sama dengan Kalpataru yang ada di pusat, namun di terapkan pada daerah lokal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ("Kalpataru versi Bangka Belitung"). Program ini sangat didukung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk komitmen, Gubernur memberikan penghargaan kepada orang-orang yanag dianggap mempunyai kepedulian terhadap lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan dengan kegiatan ini akan meningkatkan kesadaraan kolektif masyarakat dalam menjaga lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar.4.3 Gubernur Menyerahkan Penghargaan Program Pemerhati Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Literasi Lingkungan

Program literasi lingkungan ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengikut sertakan pihak-pihak swasta untuk berkontibusi dalam peelestarian lingkungan dengan melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah dalam penyediaan bibit yang akan ditanam, proses pembibitan di lakukan di sekolah-sekolah kemudian bibit tersebut di beli oleh perusahaan unttuk penghijauan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disatu sisi kegiatan ini menimbulkan literasi akan pentingnya pelestarian lingkungan kepada siswa dan sekolah-sekolah dan meningkatkan peran serta masyarakat swasta untuk berkontribusi dalam meminimalkan kerusakan lingkungan, sehingga terjadi *collective*

learning dan inovasi yang di hasilkan menimbulkan *added value* untuk perbaikan lingkungan dan masyarakat Bangka Belitung.

Literasi lingkungan merupakan upaya untuk mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Untuk tahun 2019 bentuk kegiatannya pelestarian tanaman asam (pembibitan). Pembibitan tanaman asam tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Kabupaten Bangka, merupakan kerjasama antara sekolah dengan perusahaan. Di Kabupaten Belitung Timur, antara PT Sahabat Mewah Makmur dengan SMA Negeri 1 Simpang Pesak, SMA Negeri 1 Damar, SMK Negeri 1 Dendang. Di Kabupaten Bangka, antara PT Refined Bangka Tin dengan SMA 1 Sungailiat, SMK 1 Sungailiat, SMA 1 Pemali, dan SMK Yapensu Sungailiat.

Gambar 4.4. Penandatanganan Kerjasama antara PT RBT dengan pihak sekolah di Kabupaten Bangka

Gambar 4.5. Penyerahan bibit tanaman asam kepada PT SMM di Kabupaten Belitung Timur

Memberikan pemahamaan kepada siswa akan pentingnya menjaga lingkungan dengan kegiatan ini, dapat memberikan efek perbaikan jangka Panjang. Bangka Belitung sebagai daerah tambang penting untuk memmperhatikan perkembangan SDM masyarakat sehingga dengan literasi ini anak-anak usia sekolah tidak terjerumus dalam kegiatan pertambangan yang mempunyai dimensi etik pekerja anak pada daerah pertambangan serta merubah *mindset* anak-anak dari pekerja tambang inkonvensional yang merusak lingkungan kearah perbaikan lingkungan dengan

memasukkan unsur ekonomi (*benefit)* dari literasi lingkungan dengan kegiatan pembibitan yang akan dibeli oleh perusahaan.

Gambar. 4.6. Proses Penandatanganan MOU Literasi Lingkungan

3. Kompos Babel

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil timah terbesar di Indonesia sehingga pertambangan menjadi urat nadi dalam perekonomian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Selain meningkatkan perekonomian, masyarakat, pertambangan juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung, terutama adanya lahan bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh penambang tanpa dilakukan pengelolaan dan pemulihan. Lahan-lahan bekas tambang ini akan berubah menjadi lahan kritis, yaitu lahan yang tidak produktif lagi karena kandungan unsur haranya yang minim.

Pemulihan kualitas lahan kritis bekas tambang memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan tidak mungkin untuk memulihkan kondisi lahan utuh seperti semula. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan, di

antaranya adalah melakukan reklamasi atau rehabilitasi terhadap lahan bekas tambang tersebut. Mengingat kondisi lahan kritis yang kandungan haranya sangat sedikit, maka proses penanaman sangat sulit dilakukan. Mengatasi hal tersebut, muncul inovasi pemberian "Kompos Babel" pada lahan-lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman, yang diinisiasi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Baturusa Cerucuk.

Gambar 4.7. Briket Kompos Babel

Gambar 4.8. Proses Pembuatan Kompos Babel

Kompos Babel ini terbuat dari bahan-bahan utama yang sangat mudah ditemui di lingkungan Bangka Belitung, seperti seresah dan kompos ternak. Seresah merupakan sampah-sampah organik yang berupa tumpukan dedaunan, ranting, dan sisa vegetasi lainnya yang sudah mengering dan berubah dari warna aslinya. Komposisi bahan yang

digunakan untuk membuat Kompos Babel adalah 50% seresah dan 50% kompos ternak.

Penggunaan Kompos Babel untuk penanganan lahan bekas tambang memberikan beberapa kelebihan sebagai berikut ini.

1. Lebih praktis karena bentuknya blok dan mudah dibawa ke lokasi penanaman.
2. Komposisi nutrisi bagi tanaman sesuai, dan kebutuhan nutrisi tanaman dapat terpenuhi selama 2 tahun (pertumbuhan tanaman terjamin).
3. Lebih efisien dalam pembiayaan dan pemeliharaan dibanding produk serupa.

Selain Kompos Babel, bentuk inovasi lainnya di bidang pengelolaan lahan di Kepulauan Bangka Belitung yang teridentifikasi adalah proses pemanfaatan kearifan lokal di Desa Jada Barin untuk menjaga dan mengelola lahan-lahan milik desa agar tidak dipergunakan oleh pihak lain, yang selanjutnya lahan-lahan desa ini dimanfaatkan dan diolah untuk perkebunan karet, hutan desa, dan lain-lain demi pelestarian lingkungan. Hasil dari pengolahan lahan desa ini digunakan untuk pembiayaan biaya kesehatan dan pendidikan bagi warga desa yang kekurangan.

4. **Sedekah Pohon**

Inovasi selanjutnya dalam pengelolaann lahan yang menjadi isu prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu ***SEDEKAH POHON.*** Inovasi ini diharapkan mamapu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perbaikan kualitas lahan dengan tigeline *"menanam untutk amal jariah"*. Diharapkan timbul kesadaran kolektif masyarakat dalam meningkatkan kegiatan penghijauan dengan menanam pohon sebagai bentuk adopsi dari inovasi ini. Pohon yang ditanam akan memberikan manfaat secara ekologis dan sedekah jariyah merupakan sedekah yang akan terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Tidak perlu membangun

masjid mahal-mahal, cukup menanam pohon. Maka manfaat pohon itu akan terus mengalir pahala sedekah jariyahnya meski si penanam pohon telah meninggal.

Tentunya sukses kegiatan ini selain didukung oleh inisiator inovasi seperti Dinas Lingkungan Hidup, LSM lingkungan, masyarakat serta swasta juga harus didukung oleh tokoh-tokoh agama. Berbagai kegiatan sedekah pohon telah terdokumentasi dan dilaksanakan pada tahun 2019-2020 diantaranya sebagai berikut:

Gambar 4.9 Kegiatan Sedekah Pohon

5. Agro Edduwisata Serta Pemanfaatan Kolong Pasca Tambang

Gambar.4.10. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berkomitmen dalam Keberhasilan Reklamasi Pasca Tambang

Sebagai bentuk inovasi yang ditawarkan yaitu program eduwisata merupakan aksi tindaklanjut pasca tambang, dengan mengembangkan Kawasan reklamasi pasca tambang dengan berbagai berbagai pertanian, perkebunan, peternakan yang terintegrasi. Disatu sisi keberhasilan reklamasi dapat dicapai namun disisi lain peningkatan ekonomi masyarakat juga dapat dikembangkan dan memunculkan destinasi wisata baru.

Gambar. 4.11. Budidaya Tanaman Pertanian, Peternakan, Dan Perkebunan, lokasi Air Jangkang Kabupaten Bangka

Gambar 4.12 Reklamasi dengan Konsep Eduwisata, Habitat Satwa, Pembibitan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Sarpras Penelitian (Bekerjasama dengan PT. Timah) di Kabupaten Bangka

IV.3. Inovasi Persampahan

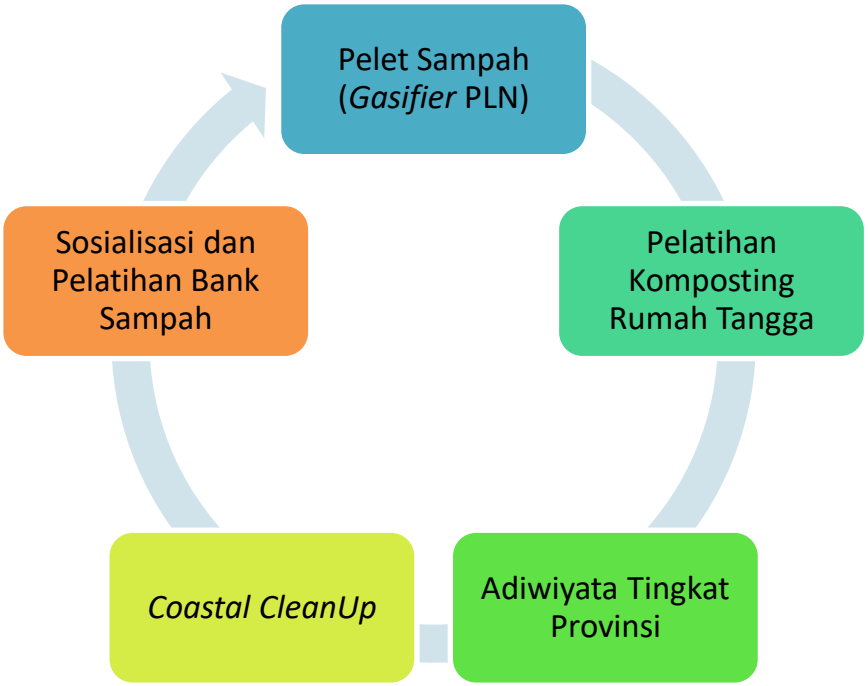

Gambar 4.13 Visualisasi Skematik Inovasi Persampahan

1. Pelet sampah

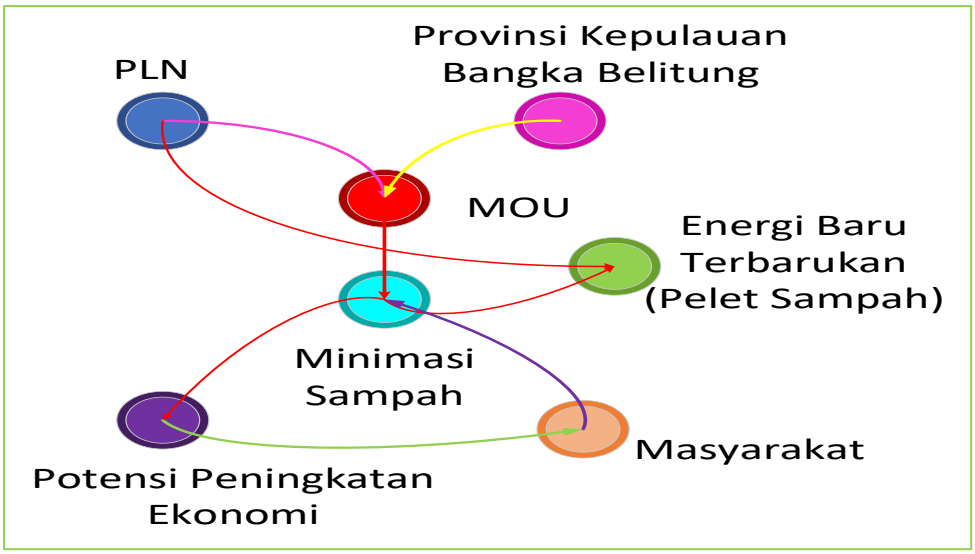

Gambar 4.14 jejaring Inovasi Pelet sampah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bersama PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung mengembangkan energi baru terbarukan. Penandatanganan MOU langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan GM PLN Wilayah Bangka Belitung dilakukan di Ruangan Tanjung Pendam Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 4.15 Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam MOU antara PLN dengan Pemprov Babel Tahun 2019

Proses pembuatan pellet sampah ini merupakan terobosan yang diambil untuk mewujudkan *green energy* di Kepulauan Bangka Belitung sekaligus meminimalkan timbulan sampah yang ada. Proses pembentukan

pellet sampah ini dimulai dengan proses pengeringan selama lebih kurang sepuluh hari diberi bioaktivator dicincang kemudian dijadikan pellet untuk digunakan di *reactor gasifier*.

Gambar 4.16 Proses pembuatan pellet sampah

Gambar 4.17 Serah terima bahan perlengkapan pelatihan pembuatan pellet sampah di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka

Dengan inovasi ini akan meminimalkan timbulan sampah yang ada terutama sampah rumah tangga serta mengatasi penumpukan sampah yang tidak tertangani. Selain itu terdapat *Added Value* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, tidak hanya sisi lingkungan yang menerima manfaatnya namun dari sosial ekonomi masyarakat juga dapat meningkat dengan penjualan pellet sampah yang dibeli oleh PLN.

Diharapkan kegiatan ini terus berlajut untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengusung *green energy* tidak hanya PLTS dari sampah kedepan namun aka nada penggunaan energi baru dan terbarukan tentunya.

2. Pelatihan Komposting Sampah Rumah Tangga

Pada tahun 2019 dilakukan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga dan dilaksanakan sesuai dengan target perencanaan, yaitu di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah. Total kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan adalah sebanyak 35 kelompok. Kepada masing-masing kelompok dibagikan satu set peralatan komposter, terdiri dari satu unit komposter padat dan satu unit komposter cair.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah domesti rumah tangga serta meningkatkan kemampuan untuk melakukan pengelolaan sampah melalui komposting.

Gambar 4.18 Komposter yang digunakan dalam pelatihan

Tabel IV.1 Kelompok masyarakat yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga

No	Kabupaten/Kota	Kelompok Masyarakat	Tanggal Pelaksanaan
1	Kabupaten Bangka Barat	1. KSM Sumur Batu 2. KSM TPA Air Belo 3. KSM TPST Kelapa 4. KSM Muara Jepu Pelangas 5. KSM Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau	24 September 2019
2	Kabupaten Bangka Selatan	1. KSM Teladan 2. PKK Kabupaten Bangka Selatan 3. KSM Kelurahan Ketapang 4. KSM Petugas Kebersihan Pasar 5. KSM Bank Sampah Paret Tige	31 Juli 2019
3	Kabupaten Bangka Tengah	1. KSM Simpang Perlang 2. KSM Padang Mulia 3. KSM Berok 4. KSM Arung Dalam 5. KSM Desa Belilik	15 Agustus 2019
4	Kabupaten Bangka	1. KSM Bank Sampah Setara 2. KSM TPA Sungailiat 3. KSM Nurseri Gudang Asri 4. KSM Bank Sampah Karya Makmur Pemali 5. KSM Kelurahan Belinyu	16 Juli 2019
5	Kabupaten Belitung Timur	1. Desa Lalang 2. Desa Suku Sawang 3. Desa Sukamandi 4. TPS3R Desa Mempaya 5. Pengelola Pasar Kota Manggar	5 Juli 2019
6	Kabupaten Belitung	1. Komunitas Pasar 2. Kelompok TPA Sadai 3. Kelompok Komunitas Bank sampah Desa Air Pelempang Jaya	18 Juli 2019

		4. Komunitas Pengelola Sampah Desa Juru Seberang 5. Komunitas Bank Sampah Desa Lesung Batang	
7	Kota Pangkalpinang	1. KSM Kawa Begawe 2. KSM Berkah 3. IP Babel 4. KSM Sukun Mandiri 5. Rumah Aspirasi	1 Oktober 2019
Sumber :	Daftar hadir peserta pelatihan pengolahan sampah rumah tangga		

3. Adiwiyata Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Untuk meningkatkan kepedulian akan kebersihan dilingkungan sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuat Program Adiwiyata Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Program ini juga sebagai bentuk pembinaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitungterhadap sekolah-sekolah.

Tim Adiwiyata Provinsi bertugas melakukan pembinaan kepada tim Adiwiyata kabupaten/kota, sedangkan pembinaan kepada sekolah/madrasah (termasuk SLTA) dilakukan oleh tim Adiwiyata kabupaten/kota. Berikut daftar sekolah yang mendapat penerima penghargaan ADIWIYATA tingkat provinsi:

Tabel IV.2 Sekolah Penerima Penghargaan Tingkat Provinsi

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SD Negeri 30 Pangkalpinang	Jl. Girimaya – Kota Pangkalpinang
2.	SD Negeri 37 Pangkalpinang	Jl. Depati Barin Kel. Opas Indah – Kota Pangkalpinang
3.	SMP Negeri 1 Simpang Teritip	Jl. Lintas Pangkalpinang Simpang Teritip Kab. Bangka Barat
4.	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangka	JL. Pahlawan, No. 12/42, Karya Makmur, Sungailiat, Kabupaten Bangka.
5.	SDN 19 Manggar	Jl. Tanjung Mudong Dusun Sekip Desa Lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur
6.	SMP NEGERI 3 Tanjungpandan	Jl. M. Nuh No. 29 Tanjungpandan, Kabupaten Belitung

No.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
7.	SD Muhammadiyah Muntok	Jl. Kejaksaan II, Kelurahan Tanjung , Kec. Muntok, Kabupaten Bangka Barat
8.	SD Negeri 5 Simpang Pesak	Dusun Air Lanun, Desa Tanjung Kelumpang Kec. Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur
9.	SD NEGERI 33 Tanjungpandan	Jl. Air Kelubi, Kelurahan Perawas, Kec. Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
10.	SD Negeri 6 Simpang Pesak	Dusun Air Nyuruk, Desa Dukong Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur
11.	SD NEGERI 23 Tanjungpandan	Jl. Pak Tahau, Kel. Air Saga, Kec. Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
12.	SMP Negeri 2 Simpang Pesak	Kelurahan Tanjung Kelumpang Kec. Simpang Pesak, Kab. Belitung Timur
13.	SDN 9 Mendo Barat	Jl. Mentok Km. 24, Desa Zed, Kec. Mendo Barat, Kabupaten Bangka

Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Gambar 4.19 Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menyerahkan ADIWIYATA Tingkat Provinsi

4. Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah

Upaya pengurangan sampah terus dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya melakukan berbagai sosialisasi dan pelatihan bank sampah. Pada tahun 2019, kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang,

Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan adanya bank sampah ini selain aspek lingkungan yang terjaga dengan meminimalkan sampah juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dari pengelolaan sampah. Berbagai *success story* dari bank sampah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya dapat membayar BPJS warganya dari pengelolaan bank sampah contohnya bank sampah Srimeranti Berkarya Kabupaten Bangka dan bank sampah di Namang Kabupaten Bangka Tengah.

Gambar. 4.20. Sosialisasi pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga

5. Instruksi Gubernur, Peraturan Gubernur dalam Pengelolaan Sampah

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan Bangka Belitung dalam pengelolaan persampahan beberapa instruksi Gubernur dan Peraturan Gubernur terkait diantaranya:

a. Peraturan gubernur No. 48 tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

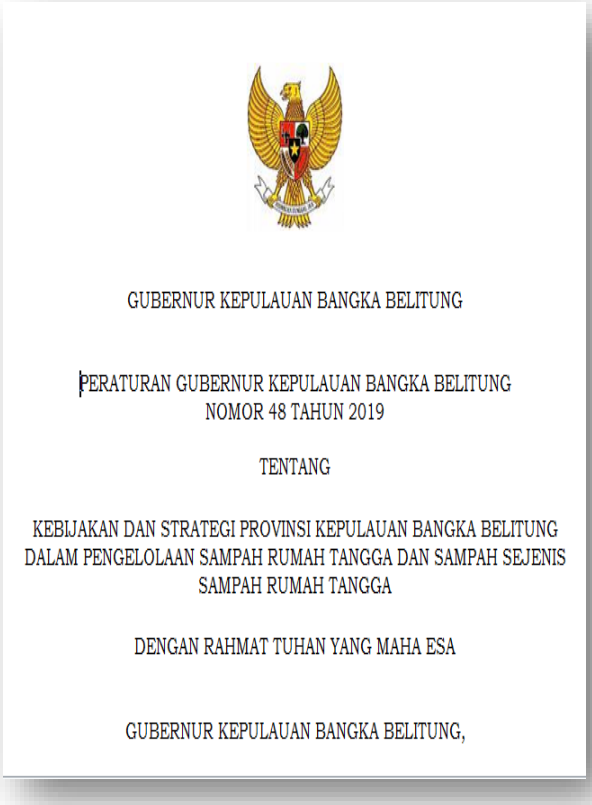

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

b. Surat Edaran Pengurangan minuman kemasan plastik di ruang pertemuan dan hotel di Bangka Belitung

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 14 Oktober 2019

Kepada
Yth. Bupati dan Walikota
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di-
TEMPAT

SURAT EDARAN
Nomor : 065 / 1051 / Disbudpar/ 2019

TENTANG

PENGURANGAN MINUMAN KEMASAN PLASTIK DI RUANG PERTEMUAN DAN HOTEL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 120/ 00939/ DLH/ 2019 tentang Pengurangan Sampah Anorganik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Bupati/ Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat mendukung pengurangan sampah plastik dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanakan kegiatan rapat/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ pelatihan dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan di hotel ataupun ruang pertemuan, diharapkan dalam penyediaan minuman tidak menggunakan kemasan berbahan plastik 1(satu) kali pakai;
2. Melakukan pembinaan terhadap hotel/penyedia ruang rapat untuk menyediakan *dispenser* atau sejenisnya pada saat kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah untuk menggantikan air minum dalam kemasan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan Yth:
1. Kepala Dinas Pariwisata se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Provinsi Kepulauan Bangka- Belitung
3. Ketua PHRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

C. Instruksi Gubernur Pengurangan sampah Anorganik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

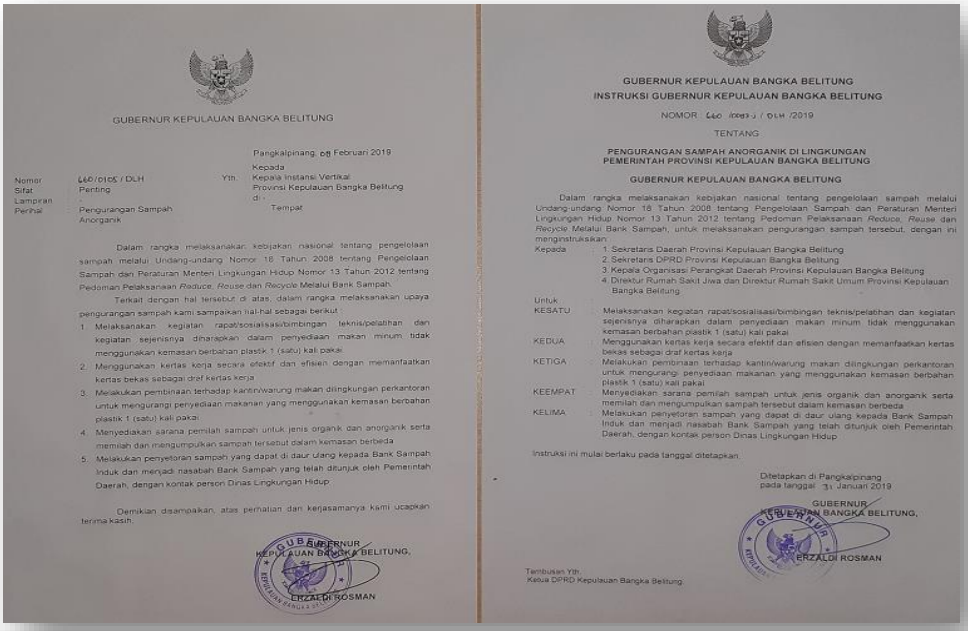

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 08 Februari 2019

Nomor : 660/0105 / DLH
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengurangan Sampah Anorganik

Kepada
Yth. Kepala Instansi Vertikal
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam rangka melaksanakan upaya pengurangan sampah kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan sejenisnya diharapkan dalam penyediaan makan minum tidak menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai.
2. Menggunakan kertas kerja secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kertas bekas sebagai draf kertas kerja.
3. Melakukan pembinaan terhadap kantin/warung makan dilingkungan perkantoran untuk mengurangi penyediaan makanan yang menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai.
4. Menyediakan sarana pemilah sampah untuk jenis organik dan anorganik serta memilah dan mengumpulkan sampah tersebut dalam kemasan berbeda.
5. Melakukan penyetoran sampah yang dapat di daur ulang kepada Bank Sampah Induk dan menjadi nasabah Bank Sampah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dengan kontak person Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 660 /0093 / DLH /2019

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH ANORGANIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, untuk melaksanakan pengurangan sampah tersebut, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan kegiatan rapat/sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan dan kegiatan sejenisnya diharapkan dalam penyediaan makan minum tidak menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai.
KEDUA : Menggunakan kertas kerja secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan kertas bekas sebagai draf kertas kerja.
KETIGA : Melakukan pembinaan terhadap kantin/warung makan dilingkungan perkantoran untuk mengurangi penyediaan makanan yang menggunakan kemasan berbahan plastik 1 (satu) kali pakai.
KEEMPAT : Menyediakan sarana pemilah sampah untuk jenis organik dan anorganik serta memilah dan mengumpulkan sampah tersebut dalam kemasan berbeda.
KELIMA : Melakukan penyetoran sampah yang dapat di daur ulang kepada Bank Sampah Induk dan menjadi nasabah Bank Sampah yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, dengan kontak person Dinas Lingkungan Hidup.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 31 Januari 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

Tembusan Yth.
Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 4.21. Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Instruksi Gubernur Kepada Bupati dan Walikota

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Instruksi Gerakan Indonesia bersih kepada Bupati dan Walikota serta OPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan diantaranya:

Gambar 4.22. Kegiatan Pembersihan Sampah Di Kabupaten Kota

IV.4. Inovasi Pengelolaan Habitat Pesisir dan Laut

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan ini harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, namun juga harus dijaga kelestariannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatannya.

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya, ekosistem pesisir dan laut di Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami kerusakan, ditandai dengan luasnya kerusakan habitat mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Salah satu bentuk inovasi untuk menangani kerusakan terumbu karang yang terjadi yang marak dilakukan adalah transplantasi terumbu karang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada mahasiswa Universitas Bangka Belitung dan masyarakat nelayan di Pulau Semujur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan di Dusun Tuing, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Gambar 4.23. Bimbingan Transplantasi Terumbu Karang di Dusun Tuing

Melalui kegiatan bimbingan transplantasi terumbu karang ini diharapkan agar masyarakat, terutama masyarakat di wilayah pesisir dapat teredukasi untuk melaksanakan transplantasi terumbu karang secara mandiri sebagai bentuk pengelolaan terhadap terumbu karang yang telah rusak atau mati. Kegiatan ini juga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut demi kelangsungan hidup di masa depan. Selain transplantasi terumbu karang, pemerintah juga melaksanakan kegiatan sosialisasi lainnya terkait pelestarian ekosistem pesisir, seperti sosialisasi tentang metode penanganan terdamparnya ikan duyung (dugong).

Gambar 4.24. Bimbingan Transplantasi Terumbu Karang di Pulau Semujur

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir, pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan kajian prototype jenis kapal fiber representatif untuk nelayan 3 GT. Kapal 3GT ini akan diperbantukan kepada sebagian nelayan di Kepulauan Bangka Belitung sehingga nelayan yang terbiasa menggunakan kapal kayu dapat perlahan-lahan beralih ke kapal fiber. Penggunaan kapal fiber ini diharapkan dapat menghemat penggunaan bahan baku kapal yang terbuat dari kayu sehingga mengurangi konsumsi kayu di Kepulauan Bangka Belitung. Dengan demikian, diharapkan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga tetap terjaga.

Bentuk lain inisiatif Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait peningkatan kesejahteraan nelayan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan adalah adanya kajian pemanfaatan energi angin untuk menggerakkan mesin tempel perahu nelayan tanpa menggunakan

BBM maupun energi listrik. Hal ini juga merupakan bentuk penghematan penggunaan energi di Kepulauan Bangka Belitung.

IV.5. Inovasi Pelestarian Flora dan Fauna

Pulau Bangka yang terletak di bagian timur Sumatera merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Besar yang secara biogeografi terbentang pada wilayah zoogeografi Kepulauan Indonesia-Malaysia. Biogeografi paparan sunda menyimpan keanekeragaman hayati yang tinggi dengan 15.000 jenis tanaman endemik dan 701 jenis vertebrata endemik. Tingkat endemisitas beberapa jenis satwa seperti burung mengalami peningkatan seiring waktu. Tingkat keragaman kelompok tanaman, keragaman burung, dan keragaman primata semakin meningkat jumlahnya di kawasan dataran rendah dibandingkan dataran tinggi. Variasi spesies di Kepulauan Bangka Belitung tidak jauh berbeda dengan Sumatra.

Berdasarkan pada jumlah dan jenisnya flora fauna di Pulau Bangka sangat khas dan beragam. Salah satu pohon dengan nama lokal Nyatoh (*Palaquium bancanum*) dan primata khas yaitu Mentilin (*Cephalophacus bancanus*) telah ditetapkan sebagai flora dan fauna identitas Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hanya saja, keberadaan flora dan fauna tersebut semakin terancam akibat pembukaan lahan dan pembalakan liar. Selain Pohon Nyatoh dan Mentilin, masih ada beberapa spesies lain di Kepulauan Bangka Belitung yang tergolong flora atau fauna dilindungi.

Gambar 4.25 Nyatoh dan Mentilin

Sebagai bentuk kepedulian terhadap species langka, khususnya hewan yang terancam punah, sebagian masyarakat di Pulau Bangka membentuk suatu komunitas perlindungan flora dan fauna, yaitu *Animal Lovers Bangka Island* (ALOBI). Di antara aktivitas yang dijalankan ALOBI, yang merupakan bentuk inovasi dalam pengelolaan lingkungan adalah :

1. berbagai macam kegiatan penangkaran atau rehabilitasi hewan yang dilindungi (inisiasi masyarakat),
2. pembangunan *mini zoo* untuk habituasi dan edukasi satwa di Jalan Sumedang, Kelurahan Kejaksaan, Taman Sari, Pangkalpinang sebagai bentuk pelestarian lingkungan hidup bekerja sama dengan PLN Wilayah Kepulauan Bangka Belitung,
3. berbagai macam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk peduli dan ikut melindungi satwa langka khususnya mentilin dan hewan-hewan lain yang terancam punah, yang disertai dengan pembagian kaos, pemasangan spanduk bertuliskan stop eksploitasi, perburuan, dan perdagangan satwa dilindungi.

IV.6. Penghargaan Lingkungan Hidup

Dalam rangka memotivasi pelaku usaha, instansi, maupun masyarakat suatu daerah dalam melaksanakan pengelolaan atau pelestarian lingkungan, pemerintah memberikan berbagai macam penghargaan bagi mereka yang terbukti berhasil dalam bidang pengelolaan ataupun pelestarian lingkungan. Berikut ini tercantum berbagai jenis penerima penghargaan lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019.

Tabel IV.3. Penerima Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019 Di Kepulauan Bangka Belitung

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka Tengah	Nirwasita Tantra *(Green Leadership Award)* Kategori Kabupaten Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
2	Yasir	Kalpataru Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
3	SMP Negeri 2 Tanjungpandan	Adiwiyata Nasional Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
4	Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
5	Kota Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
6	Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
7	Kota Kota, Kabupaten Bangka Tengah	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
8	Mentok, Kabupaten Bangka Barat	Sertifikat Adipura Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
9	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
10	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Metalurgi Muntok	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
11	PT. Dok Air Kantung (Kabupaten Bangka)	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
12	PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung (Kota Pangkalpinang)	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
13	PT. Pahala Harapan Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
14	PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
15	PT. Karini Utama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
16	PT. Astika Murni Utama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
17	PT. Medco E&P Indonesia - Terminal Khusus FSO Bangka Marine Terminal	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
18	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II - Depot Pengisian Pesawat Udara Depati Amir	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
19	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II - Terminal BBM Pangkal Balam	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
20	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Perak Grati	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
21	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sub Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Padang	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
22	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
23	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Koba	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
24	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Pilang	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
25	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Toboali	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
26	PT. PLN (Persero) Batam - PLTG MPP Air Anyir Bangka	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
27	PT. PLN (Persero) PLTU Suge	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
28	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Bangka Belitung Sektor Pembangkitan PLTU 3 Babel	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
29	CV. Mutiara Alam Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
30	PT. Bumi Permai Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
31	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
32	PT. Foresta Lestari Dwikarya	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
33	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
34	PT. Gunung Maras Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
35	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
36	PT. MP Ledong West Indonesia	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
37	PT. Parit Sembada	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
38	PT. Pratama Unggul Sejahtera	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
39	PT. Putra Bangka Mandiri	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
40	PT. Rebinmas Jaya	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
41	PT. Sawindo Kencana	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
42	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
43	PT. Tata Hamparan Eka Persada	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
44	PT. Timah (Persero), Tbk. - Wilasi II Bangka Selatan	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
45	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Sungailiat	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
46	PT. Timah (Persero), Tbk. - UPDB BPP Bangka Barat	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
47	PT. Timah (Persero), Tbk. - Wilayah Operasi Belitung	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
48	PT. Babel Inti Perkasa	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
49	PT. Bukit Timah	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
50	PT. Prima Timah Utama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
51	PT. Refined Bangka Tin	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
52	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
53	SD Negeri 9 Mendo Barat Kabupaten Bangka	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
54	SD Negeri 19 Manggar Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
55	SD Negeri 5 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
56	SD Negeri 6 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
57	SD Negeri 23 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
58	SD Negeri 33 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
59	SD Negeri 30 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
60	SD Negeri 37 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
61	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangka	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
62	SD Muhammadiyah Muntok Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
63	SMP Negeri 1 Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
64	SMP Negeri 3 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
65	SMP Negeri 2 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
66	PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung	Perusahaan yang Berkontribusi dalam Pengembangan Energi Listrik dan Sampah sebagai Bahan Bakar PLTBg Gasifier Sampah Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
67	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Perusahaan yang Berkontribusi dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Persemaian Bibit Asam Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
68	PT. Refined Bangka Tin	Perusahaan yang Berkontribusi Persemaian Bibit Asam Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
69	Yasir, A.Md	Individu Perintis Lingkungan (Mangrove Munjang Kurau) Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
70	Abriandika Pratama	Individu Perintis Lingkungan Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
71	M. Toha	Individu Perintis Lingkungan (Mangrove Batu Dinding Belinyu) Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IV.7. Dokumen Lingkungan

Sebagai wujud antisipasi terhadap kerusakan lingkungan, dan untuk mengelola dampak-dampak negatif terhadap lingkungan yang timbul akibat aktivitas pembangunan, berbagai macam jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, wajib mengajukan permohonan izin lingkungan sebagai syarat untuk mendpaatkan izin usaha. Dalam rangka untuk mendapatkan izin lingkungan ini, pelaku usaha wajib menyusun dokumen lingkungan, baik berupa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UKL-UPL), maupun berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan dapat diperoleh pelaku usaha atau pemrakarsa melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), dan permohonan serta penerbitan Izin Lingkungan.

Dokumen lingkungan tersebut dibuat pada tahap perencanaan usaha dan /atau kegiatan. Adapun tata laksana penilaian, pemeriksaan dan penerbitan izin lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Dalam pelaksanaan proses penilaian, pemeriksaan dan penerbitan izin lingkungan membutuhkan perangkat Komisi Penilai AMDAL yang berlisensi yang terdiri dari sekretariat dan tim teknis yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan izin lingkungan antara lain usaha dan/atau kegiatan yg belum memiliki izin lingkungan namun sudah beroperasi, usaha dan /atau kegiatan yang tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki, lokasi usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang, konflik sosial dan lain-lain.

Permasalahan terkait izin lingkungan tersebut dapat diantisipasi jika perencanaan dibuat dengan baik serta melibatkan masyarakat sekitar lokasi yang terdampak dan masyarakat pemerhati lingkungan. Salah satu upaya dari instansi lingkungan hidup agar proses penerbitan izin lingkungan dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku

agar keputusan yang dibuat tidak cacat hukum, maka dibutuhkan peninjauan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan.

Berikut ini tersaji tabel mengenai dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dinilai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2019.

Tabel IV.4. Dokumen Lingkungan yang Dinilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2019

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahabat Mewah dan Makmur
2	AMDAL	Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru dan Bukit Intan, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Steelindo Wahana Perkasa
4	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Parit Sembada
5	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV PLTU Air Anyir, Gardu Induk Pangkalpinang – Gardu Induk Sungailiat	PT. PLN (Persero) Wilayah BABEL
6	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Membalong dan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Palmindo Billiton Berjaya
7	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sijuk dan Badau, Kabupaten Belitung	PT. Agro Makmur Abadi
8	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Membalong dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Forestalestari Dwikarya
9	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Gunung Pelawan Lestari

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
10	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai *(offshore)* di Laut Tanjung Penyusuk, Simping, S. Belinyu, Danta, Kabupaten Bangka dan Laut Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sarana Marindo
11	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	PT. Swarna Nusa Sentosa
12	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Pugul, Riau dan Silip, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka	PT. Tata Hamparan Eka Persada
13	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putra Bangka Mandiri
14	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa di Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Bangka Inti Besaoh
15	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Payung dan Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Plasma Besaoh
16	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, Sijuk dan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung serta di Kecamatan Gantung dan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Rebinmas Jaya
17	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah serta Kecamatan Air Gegas dan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Nesia
18	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Inhutani V SPHK-BABEL

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
19	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk
20	DPPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelabuhan Pangkalbalam di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pangkalbalam
21	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Istana Kawi Kencana
22	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Jalan Toboali – Sadai ± 44.55 Km di Kecamatan Toboali dan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung - Satuan Kerja SNVT P2JJ BABEL
23	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah di Kelurahan Bacang dan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang
24	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Kep. Babel.	PT. Mitra Stania Prima
25	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Perairan Laut Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Aega Prima
26	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin
27	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ± 10.101 Ha di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera
28	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah di Kawasan Industri Ketapang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
29	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kec. Simpang Rimba, Payung, Air Gegas dan Pulau Besar, Kabupaten Basel dan di Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa dan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangun Rimba Sejahtera
30	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Halaban Primavestama
31	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	PT. Kampit Tin Utama
32	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billiton Jaya Utama
33	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kompleks Olahraga *(Sport Center)* dan Fasilitasnya di Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Babel
34	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Puncak Hall (Pembangunan Hotel dan Parkir) di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	PT. Puncak Prima Lestari
35	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kab. Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Babel Tinindo
36	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Cirindo Mining Utama
37	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka dan Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Abadi Berkatindo

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
38	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo
39	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dan di Kecamatan Sijuk dan Membalong, Kabupaten Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera
40	DPLH	Usaha dan/atau Kegiatan PLTD di Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;di Kelurahan koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah; di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung; di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	PT. PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung
41	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Bahan Galian Timah di Kecamatan Payung, Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Serumpun
42	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Wilayah Laut Pasir Padi, Kota Pangkalpinang	PT. Stanindo Inti Perkasa
43	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Kelambui, Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin
44	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Bijih Timah *(Smelter)* di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tommy Utama
45	AMDAL	Rencana usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (offshore) di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Synergy Maju Bersama
46	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK – HTI di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Indosukses Lestari Makmur
47	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pembangunan T/L 70 kV Dukong-Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
48	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Sejahtera Utama
49	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya
50	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Rambat dan Keranji, di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tinindo
51	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi di Kecamtan Koba, Namang, Simpang Katis dan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	PT. Agrindo Persada Lestari
52	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah Lepas Pantai di Tanjung Pemuja Desa Tayu Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sinar Mutiara Sejahtera
53	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Kelapa-Mentok dan Gardu Induk Terkait	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II
54	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Oli Bekas sebagai Bahan Bakar Tanur untuk Peleburan Timah di Unit Metalurgi di Desa Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	PT. Timah (Persero) Tbk
55	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Desa Air Gantang dan Desa Kelabat, Kabupaten Bangka Barat	PT. Sumber Jaya Indah
56	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II
57	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. United Smelting
58	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kecamatan Dendang dan Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur seluas ±9.485 Ha	PT. Greenland Diorama

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
59	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu yang menghubungkan Tanjung Gudang Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung
60	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri di Tanjung Ular, di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	PT. Timah (Persero) Tbk
61	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka	PT. Goshen Bangka Mulia
62	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kabupaten Bangka Selatan	PT. Goshen Bangka Mulia
63	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kec. Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur seluas ± 29.418 Ha	PT. Andalan Karya Pertiwi
64	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. Tiga Sekawan
65	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran di Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel
66	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Swiss-Bel Hotel di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	PT. Bangun Mega Lestari
67	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	PT. Bangka Prima Tin
68	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Tambang di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Silika Tiga Mas
69	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat	PT. Babel Sumber Pratama Mineral

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
70	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)*di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	PT. Cipta Mineral Bumi Selaras
71	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	PT. Hasil Alam Sukses Pratama
72	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	PT. Arsed Indonesia
73	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
74	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Mutiara Prima Sejahtera
75	AMDAL	Rencana kegiatan pembangunan bendung pice besar Daerah Irigasi Selingsing dengan luas tampungan 3.182,40 Ha di Desa Lenggang dan Desa Selingsing, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
76	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah dengan kapasitas produksi tambahan 10 ton/hari di Dusun Bangek, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billitin Makmur Lestari
77	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah dengan Tambahan Kegiatan Ponton Isap Produksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
78	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	rencana usaha pembangunan mill-plant pengolahan mineral logam timah (relokasi) dengan kapasitas pengolahan 100 ton ore (bongkah)/hari pada lahan seluas 3,3, Ha di Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta Mulia
79	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* dengan Tambahan Kapasitas Produksi 7.000 ton/tahun di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.	PT. Mitra Stania Prima
80	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Penambanagan Timah Lepas Pantai *(Offshore*) di Perairan Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka	PT. Hasil Alam Gemilang Pratama
81	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Kepelabuhan Pangkalbalam di Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkalbalam
82	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (*mill plant* dan *smelter*) dengan kapasitas terpasang 100 ton ore/hari untuk *mill plant* dan kapasitas tanur terpasang 2 x 20 ton/heat/hari untuk *smelter* dalam areal seluas 3,3 Ha di Dusun Gumbak, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	PT. Menara Cipta mulia
83	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanus terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	PT. Synergy Maju Bersama
84	AMDAL	Rencana perubahan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanur terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan kepemilikan dari PT. Synergy Maju Bersama menjadi PT. Lautan Harmonis Sejahtera	PT. Lautan Harmonis Sejahtera
85	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Prima Timah Utama
86	AMDAL	Perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas HGU 11.337,582 Ha dan kapasitas pabrik 60 ton TBS/jam di Kecamatan Membalong, Badau dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa	PT. Forestalestari Dwikarya

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
		perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	
87	DELH	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. Dua Sekawan
88	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha peleburan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan perubahan kapasitas produksi sebesar 38,4 ton/hari di Kawasan Industri Ketapang, Jl. TPI Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Tinindo Inter Nusa
89	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah (*Smelter*) di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	CV. Bangka Timah Makmur
90	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dermaga dengan panjang ± 102 m dan lapangan penumpukan seluas ± 5.265 m² di Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	PT. Pelindo II (Persero)
91	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan mengganti teknologi produksi dari tanur pendam menjadi tanur listrik dengan kapasitas produksi 30 ton/hari dan perubahan nama perusahaan dari CV. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Donna Kembara Jaya	PT. Donna Kembara Jaya
92	AMDAL	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (*Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Bangka Serumpun	PT. Bangka Serumpun
93	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Desa Pelempang, Desa Air Bulu, Desa Rukam, Desa Cengkong Abang, Desa Kota Kapur, Desa Petaling, dan Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kapasitas produksi dari 60 ton/hari menjadi 120 ton/hari dan penambahan unit pengolahan kernel	PT. Putra Bangka Mandiri
94	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Air Baku dengan luas 12,6 Ha, kedalaman 6 m dan daya tampung 720.000.000 m³ di Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung	Dinas PU Kab. Belitung Timur

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
95	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Muntok-Padang dengan kapasitas 25.285 KW dan 31.040 KW berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 94 PAL II, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan di Jalan Simpang Renggiang-Manggar, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	PT. PLN (Persero) Wilayah Babel
96	UKL -UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembnagunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Pkp-Kelapa-Mentok dan SUTT Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Basel	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
97	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah berupa perubahan kepemilikan dari CV. Serumpun Sebalai menjadi PT. Premium Tin Indonesia	PT. Premium Tin Indonesia
98	AMDAL	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) seluas ± 33,494 Ha di Desa Pergam, Kec. Air Gegas, di Desa Bedengung, Irat, Kecamatan Payung, di Desa Jelutung II, Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, dan di Desa Batu Betumpang, Panca Tunggal, Fajar Indah, Suka Jaya, Sumber Jaya Permai, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	PT. Hutan Lestari Raya
99	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* dengan luas areal ± 4.482 m² dan kapasitas tanur terpasang 3.600 Ton Ore/Tahun di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
100	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jln. Ketapang, Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 2 x 15 ton/hari menjadi 2 x 20 ton/hari dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik.	PT. DS Jaya Abadi
101	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengerukan Alur Sungai Manggar dengan volume kerukan 279.308,48 m³ dan dumping area 2051’18,65’’S 108028’1,74’’E serta dengan kedalaman 20 m oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Dinas Perhubungan Kab. Beltim

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
102	AMDAL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan lingkungan hidup dengan bertambahnya kerjasama kemitraan dengan BUMD, BUMDes, CV. Koperasi dan bentuk kemitraan lainnya	PT. Timah (Persero) Tbk Perubahan Pengelolaan
103	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pengamanan Maksimum Pulau Naduk seluas ± 206,23 Ha di Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik, Kab. Belitung	Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian
104	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Jernang dengan daya tampung embung sebesar 510.383,59 m^3 di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Prov. Bangka Belitung Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
105	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Angkut Produksi dan Peningkatan Dermaga Terminal Khusus Tanjung Resing untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas areal jalan 4,5 Ha (Kawasan Hutan : 3,92 Ha dan areal peruntukan lain : 0,58 Ha) dan luas areal terminal khusus (APL) : 14,96 Ha di Desa Dendang, Kec. Dendang, Kab. Beltim	PT. Sahabat Mewah Makmur
106	DPLH	kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 529,93 Ha di Desa Berang-Ibul dan Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dan Desa Balunijuk dan Merawang, Kecamatan Merawang serta Desa Air Duren-Bukit Tabir, Kecamatan Pemali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tata Hamparan Eka Persada
107	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Koba dari 8.836 KW menjadi 13.854 KW dan PLTD Selat Nasik dari 400 KW menjadi 2.670 KW di Jalan Listrik Nomor 1, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan Kelurahan Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Bangka Belitung
108	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di di Laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan penggunaan kapal isap dengan metode Bore Hole Mining (BHM) (2 Unit) yang operasinya mampu mencapai target solid sebesar 60.000 m3/bulan dan	PT. Stanindo Inti Perkasa

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
		tidak melakukan cut and fill pada dasar laut dengan luas 238,84 Ha	
109	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat Km 18,5, Desa Merawang No. 449, Kec. Merawang, Kab. Bangka berupa rencana perubahan status badan usaha CV. Keranji Jaya Mandiri PT. Kijang Jaya Mandiri, pembangunan dan peningkatan tanur terpasang dari 6.000 ton/tahun menjadi 11.700 ton/tahun, peningkatan luas areal dari 2,3 ha menjadi 12,4 Ha dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	PT. Kijang Jaya Mandiri
110	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 3.500 ton/tahun menjadi 6.900 ton/tahun dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik	CV. Tiga Sekawan
111	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 143 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Sentosa	PT. Sentra Tin Indo Sentosa
112	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 57 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Sentra Tin Indo menjadi PT Sentra Tin Indo Makmur	PT. Sentra Tin Indo Makmur
113	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 118,61 ha di Laut Bubus, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Cemerlang	PT. Sentra Tin Indo Cemerlang
114	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Nusantara Sungailiat dengan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur muara sungai dan perairan laut sungailiat sebesar 34.299,040 m^3 dan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur dan kolam pelabuhan perikanan nusantara sungailiat sebesar 900.000 m^3	PT Pulomas Sentosa

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
115	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Tiga Sekawan menjadi PT. Rajehan Ariq	PT. Rajehan Ariq
116	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandara Depati Amir di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka dan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Angkasa Pura II
117	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. Venus Inti Perkasa
118	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus seluas 0,3 Ha di Desa Gantong, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur	PT. Hero Progres Internasional
119	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai *(Offshore)* dengan luas 247 Hektar di Laut Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat berupa perubahan kepemilikan dari PT. Sarana Marindo menjadi PT. Jelajah Marindo Persada	PT. Jelajah Marindo Persada
120	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di laut dengan metode Bore Hole dengan luas area 108.753 Ha di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	PT. Timah (Persero) Tbk
121	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 778 Hektar di Laut Penganak, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Agung Persada	PT. Agung Persada Sejahtera
122	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* dengan luas 3.295 Hektar di Laut Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Permata Indah Menumbing	PT. Permata Indah Menumbing
123	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai dengan luas 200 Hektar di Laut Pasir Padi, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Tinindo Inter Nusa menjadi PT. Tin Industri Nasional	PT. Tin Industri Nasional

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
124	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 2.099 Hektar di Laut Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Tinindo Inter Nusa menjadi PT Tin Industri Abadi	PT. Tin Industri Abadi
125	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) d Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 4 x 6 ton/heat menjadi 20 ton/hari (1 x 20 ton/hari) dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	PT. Lautan Harmonis Sejahtera
126	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Jl. TPA Kenanga RT 01 Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Dua Sekawan menjadi PT Masbro Alam Stania dan perubahan jenis tanur dari tanur bakar menjadi tanur listrik dengan kapasitas produksi tetap 3.500 ton/tahun serta perubahan unit genset dari 2 unit genset kapasitas @ 150 kVA menjadi 2 unit genset kapasitas @ 1.100 kVA	PT. Masbro Alam Stania
127	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah *(Smelter)* Di Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT Alam Lestari Kencana menjadi PT Mitra Sukses Globalindo	PT. Mitra Sukses Globalindo
128	UKL - UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV Dukong – Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
129	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV Sabang Tin Industries menjadi PT Rajawali Rimba Perkasa dan perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 28 ton/hari menjadi 43 ton/hari serta perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	PT. Rajawali Rimba Perkasa

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
130	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengerukan pasir laut seluas 1.800 Ha di Perairan Selat Lepar, Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan berupa perubahan judul dokumen lingkungan hidup dari pendalaman alur pelayaran pelabuhan sadai menjadi pengerukan pasir laut serta perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	PT. Mitra Bangka Resources
131	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Timah di Dusun Kelekak Datuk, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung berupa rencana perubahan penggunaan alat-alat produksi	PT. Babel Surya Alam Lestari
132	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam (Zirkon dan Kuarsa) di Jl. Ketapang Kawasan Industri RT/RW. 01/01, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Megah Mineral Sejahtera
133	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Ruas – Ruas Jalan yang telah beroperasi (Eksisting), sepanjang 570,56 Km di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
134	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Air Anyir - Pangkalpinang 2 dan GI 150 kV Pangkalpinang 2, di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka	PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel
135	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan teknologi dari 5 tanur pantul menjadi 2 tanur pantul dan 3 tanur listrik, perubahan peningkatan sistem pengelolaan limbah domestik dan sirkulasi air proses serta pemisahan kajian smelter dan tambang dari dokumen AMDAL sebelumnya (terpadu) menjadi tersendiri/terpisah	PT. Refined Bangka Tin
136	Amdal	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	PT. Putera Sarana Shakti
137	Amdal	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai dengan luas 258 Hektar di Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka,berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Putera Sarana Shakti	PT Putera Sarana Shakti

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
138	Amdal	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai *(Offshore)* dengan luas 108 Hektar di Laut Sungai Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Lautan Sarana Mandiri	PT Lautan Sarana Mandiri
139	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jalan Raya Ketapang, RT.001/001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang yang semula 15.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar menjadi 20.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar dan dengan menambah 2 unit tanur listrik, peningkatan luas areal yang semula 5.740 m2 menjadi 58.825 m2 dan peningkatan luas bangunan yang semula 3.312 m2 menjadi 8.526 m2	PT. Sariwiguna Bina Sentosa
140	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) yang berada di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Timah Utama Sejahtera menjadi PT Mitra Sukses Globalindo dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu perubahan kapasitas tanur bakar terpasang sebesar 3.000 Ton/Tahun dan penambahan tanur listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 12.000 Ton/Tahun	T. Mitra Sukses Globalindo
141	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pertambangan timah di Prov. Kep. Bangka Belitung berupa perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu: 1. Penambangan Timah di darat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang kegiatannya berupa: a) Tambang Kecil Terintegrasi (TKT) menggunakan bore hole mining b) Pengoperasian gudang bijih timah sementara yang selanjutnya disebut stasiun pengumpul c) Pengoperasian gudang biji timah 2. Penambangan timah di perairan laut di Pulau Bangka, meliputi: a) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya menjadi satu dengan peralatan penambangan b) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya terpisah dengan peralatan penambangan 3. Pengolahan bijih timah dengan sistem mekanik di tambang darat Pulau Bangka dan Belitung	PT Timah, Tbk

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
		4. Pengolahan bijih timah dengan sistem basah dan kering di PPBT Pulau Bangka dan Pulau Belitung meliputi: a) PPBT di Muntok, di Jebus dan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat b) PPBT di Pemali, di Batu Rusa dan Belinyu Kabupaten Bangka c) PPBT di Kabupaten Bangka Tengah d) PPBT di Toboali Kabupaten Bangka Selatan e) PPBT di Selingsing Kabupaten Belitung Timur 5. Pembangunan dan pengoperasian Fuming dan Ausmelt di Unmet Muntok Kabupaten Bangka Barat, berupa: a) Pembangunan dan pengoperasian Fuming b) Pembangunan dan pengoperasian Ausmelt 6. Pembangunan dan pengoperasian PPBT dan peleburan di Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi: a) Pembangunan dan pengoperasian PPBT (Pusat Pencucian Bijih Timah) b) Pembangunan dan pengoperasian peleburan bijih timah c) Laboratorium	
142	Amdal	Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 30 Hektar di Laut Danta, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Marindo Sukses Samudera	PT. Marindo Sukses Samudera
143	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah *(smelter)* di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Putra Karya menjadi CV Venus Inti Perkasa dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kapasitas tanur terpasang (total) : 25.000 ton/tahun, penggunaan tanur tetap (tanur bakar) kapasitas terpasang : 11.000 ton/tahun dan penambahan tanur listrik (kapasitas terpasang) : 14.000 ton/tahun	CV. Venus Inti Perkasa
144	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah *(smelter*) di Jl. TPA Kenanga Permai, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi rencana perubahan penggantian 2 unit tanur bakar menjadi 2 unit tanur listrik, peningkatan	PT. Artha Cipta Langgeng

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
		kapasitas tanur terpasang dari 3.000 ton/tahun menjadi 12.000 ton/tahun dan durasi operasi 1 x 18 jam/hari menjadi 2 x 12 jam/hari	
145	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi perubahan penggantian 2 unit tanur pantul menjadi 2 unit tanur listrik.	PT. Refined Bangka Tin
146	UKL-UPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Tambak Udang Vannamei di Jalan Raya Koba, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka	PT. SHRIMPI

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

IV.8. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pada tahun 2019 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan HIdup dilakukan terhadap 85 (Delapan Puluh Lima) Perusahaan dan/atau Usaha dari berbagai sektor usaha, seperti sekor pertambangan, energi dan migas, sektor manufaktur, jasa dan sektor agro industry serta tambak udang. Kegiatan pengawasan penaatan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tehadap 5 (lima) aspek yang terdiri dari aspek dokumen lingkungan (perizinan lingkungan hidup dan pelaporan pengelolaan pemantauan lingkungan), aspek pengendalian pencemaran air (PPA), aspek pengendalian pencemaran udara (PPU), aspek pengelolaan limbah B3 (PLB3) dan aspek pengendalian kerusakan lahan (PKL) untuk kegiatan pertambangan. Hasil dari kegiatan ini berupa ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

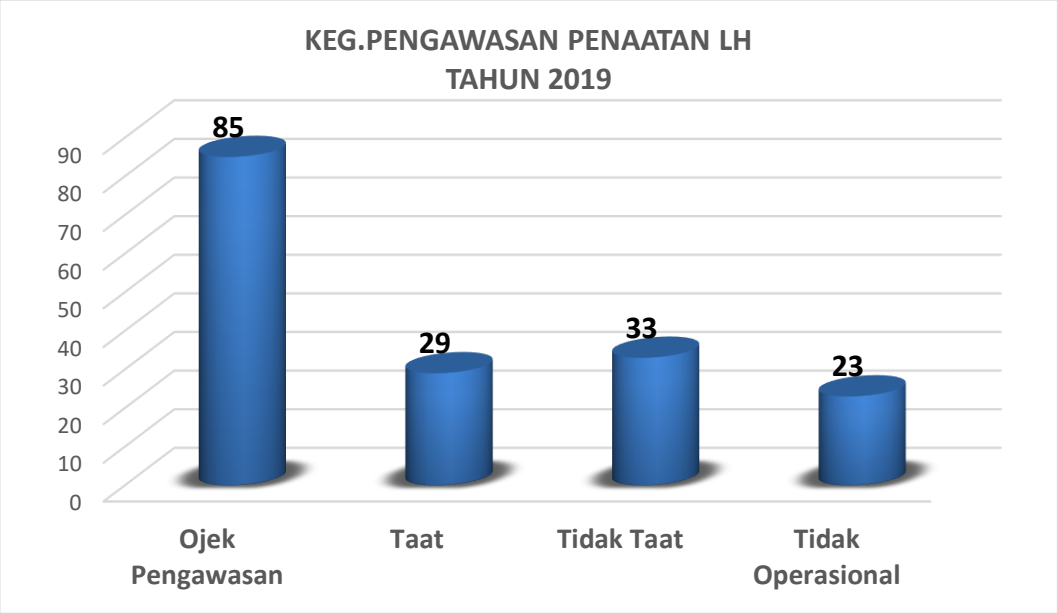

Gambar. 4.26 Kegiatan Pengawasan Penaatan LH

Berdasarkan data pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap 85 pelaku usaha/ kegiatan di dapat data perusahaan yang taat sebanyak 29 perusahaan, 33 tidak taat dan terdapat 23 yang tidak beroperasi, dengan data sebagai berikut:

Tabel IV.5. Pengawasan Izin Lingkungan Tahun 2018

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjut
1	PT. BANGKA SERUMPUN	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**Tidak Operasional**	-
2	PT. DS JAYA ABADI	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**TAAT**	-
3	PT. STANINDO INTI PERKASA	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**TAAT**	-
4	PT. PELINDO II CABANG PELABUHAN PANGKAL BALAM	Pelabuhan	Kota Pangkal Pinang	**TIDAK TAAT (Raport Merah)**	**Sanksi Administrasi**
5	PT.SARIWIGUNA BINA SENTOSA	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**TAAT (Raport Biru)**	-
6	PT. RAJEHAN ARIQ	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**Tidak Operasional**	-
7	CV. VENUS INTI PERKASA	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**TAAT**	-

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjut
8	CV. UNITED SMELTING	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**Tidak Operasional**	-
9	PT. BANGKA BELITUNG TIMAH SEJAHTERA	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**Tidak Operasional**	-
10	CV. DUA SEKAWAN	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**Tidak Operasional**	-
11	PT.DEWA PUTRA BANGKA	Tambang Pengolahan	Kota Pangkal Pinang	**TIDAK TAAT**	-
12	PT.DEVINA MARDI PERMATA	Distribusi BBM	Kota Pangkal Pinang	**TAAT**	-
13	PT. PUNCAK PRIMA LESTARI	Hotel/Mall	Kota Pangkal Pinang	**TAAT**	-
14	PT. BANGKA INTI BESAOH	Sawit	Kab.Bangka Selatan	**TAAT**	-
15	PT. ANGKASA PURA II - BANDAR UDARA DEPATI AMIR	Bandar Udara	Kota PKP/Kab.Bateng	**TAAT**	-
16	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMSEL BABEL	Gedung/Mall	Kota Pangkal Pinang	**TAAT**	-
17	PT. BANGKA PLASMA BESAOH	Sawit	Kab.Bangka Selatan	**TAAT**	-
18	PT.ARIES KENCANA SEJAHTERA	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	-
19	PT.INTI STANIA PRIMA	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	-
20	CV.AYI JAYA	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	-
21	PT.PLN (PERSERO) WILAYAH BABEL (Unit Distribusi)	Distribusi PLN	Kab.Bangka	**TAAT**	-
22	PT. INHUTANI V SPHK-BABEL	HTI	Kab.Bangka	**TIDAK TAAT**	**Sanksi Administrasi**
23	PT.PLN (PERSERO) PLTU AIR ANYIR	PLTU	Kab.Bangka	**TAAT (Raport Biru)**	-
24	PT. PELINDO II CABANG BELINYU	Pelabuhan	Kab.Bangka	**TAAT**	-
25	PT.BANGKA TIN INDUSTRY	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	**TIDAK TAAT**	**Sanksi Administrasi**
26	PT. BANGKA NESIA	HTI	Kab.Bangka Tengah	**TIDAK TAAT**	**Sanksi Administrasi**
27	PT.ISTANA KAWI KENCANA	HTI	Kab.Bangka	**TIDAK TAAT**	**Sanksi Administrasi**
28	PT. HUTAN LESTARI KARYA	HTI	Kab.Bangka Selatan	**TIDAK TAAT**	**Sanksi Administrasi**

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjut
29	PT. AGRINDO PERSADA LESTARI	HTI	Kab.Bangka Tengah	TIDAK TAAT	Sanksi Administrasi
30	PT. BANGUN RIMBA SEJAHTERA	HTI	Kab.Bangka Barat	TIDAK TAAT	Sanksi Administrasi
31	PT. SINAR MUTIARA SEJAHTERA	Tambang Mineral	Kab.Bangka Barat	TIDAK TAAT	Sanksi Administrasi
32	PT.GRAND CIRINDO/ HOTEL NOVOTEL	Hotel/Mall	Kota PKP/Kab.Bateng	TAAT	-
33	PT. BANGUN MEGA LESTARI/HOTEL SWISS BEL	Hotel/Mall	Kota Pangkal Pinang	TAAT	-
34	HOTEL SOLL MARINA	Hotel/Mall	Kota PKP/Kab.Bateng	TAAT	-
35	HOTEL SANTIKA	Hotel/Mall	Kota PKP/Kab.Bateng	TAAT	-
36	RS.BHAKTI WARA	Rumah Sakit	Kota Pangkal Pinang	TIDAK TAAT	-
37	RS. BHAKTI TIMAH	Rumah Sakit	Kota Pangkal Pinang	TAAT	-
38	PT. AGRO MAKMUR ABADI	Sawit	Kab.Belitung	TAAT	-
39	PT.ANDALAN KARYA PERTIWI	SAWIT	Kab.Belitung Timur	TIDAK TAAT	Sanksi Administrasi
40	PT.INDO SUKSES LESTARI MAKMUR	HTI	Kab.Belitung Timur	TIDAK TAAT	Sanksi Administrasi
41	RSUD KOTA PANGKALPINANG	Rumah Sakit	Kota Pangkal Pinang	TIDAK TAAT	-
42	PT.PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBAGUNAN SUMBAGSEL	Distribusi PLN	Kota Pangkal Pinang	TAAT	-
43	GRAND SAHID HOTEL	Hotel/Mall	Kota Pangkal Pinang	TAAT	-
44	RS.SILOAM	Rumah Sakit	Kota PKP/Kab.Bateng	TAAT	-
45	PT.AGRO PRATAMA SEJAHTERA	HTI	Kab.Belitung	TIDAK TAAT	Sanksi Administrasi
46	PT. PALMINDO BILLITON BERJAYA	Sawit	Kab.Belitung	TAAT	-
47	PT.COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA	Distribusi Minuman	Kota Pangkal Pinang	TAAT	-
48	PT. KIJANG JAYA MANDIRI	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	Tidak Operasional	-
49	PT.ATD MAKMUR MANDIRI	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	TAAT	-
50	PT.ARTHA CIPTA LANGGENG	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	TAAT	-

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjut
51	PT.PANCA MEGA PERADA	Tambang Pengolahan	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	
52	PT. AEGA PRIMA	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	
53	PT. SARANA MARINDO	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	
54	PT. KAMPIT TIN UTAMA	Tambang Mineral	Kab.Belitung Timur	**Tidak Operasional**	
55	PT.BABEL SURYA ALAM LESTARI	Tambang Pengolahan	Kab.Belitung	**Tidak Operasional**	
56	PT. TOMMY UTAMA	Tambang Pengolahan	Kab.Belitung Timur	**Tidak Operasional**	
57	PT. CIRINDO MINNING UTAMA	Tambang Mineral	Kab.Bangka Barat	**Tidak Operasional**	
58	PT. BANGKA PRIMA TIN	Tambang Mineral	Kab.Bangka Selatan	**Tidak Operasional**	
59	PT.MITRA SUKSES GLOBALINDO	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**TAAT**	
60	PT. SENTRA TIN INDO MAKMUR	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	
61	PT. ARSED INDONESIA	Tambang Mineral	Kab.Bangka Bara	**Tidak Operasional**	
62	PT.SEMESTA SURYA PERSADA	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**TAAT**	
63	PT. HASIL ALAM GEMILANG PRATAMA	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	
64	PT. MITRA STANIA PRIMA	Tambang Mineral	Kab.Bangka Tengah	**Tidak Operasional**	
65	PT.SUMBER JAYA INDAH	Tambang Mineral	Kab.Bangka Barat	**Tidak Operasional**	
66	PT.PLN MPP-Batam	Tambang Mineral	Kab.Bangka Selatan	**TAAT (Raport Biru)**	
67	PT.PERMATA INDAH MENUMBING afiliasi PT.Goshen Bangka Mulia	Tambang Mineral	Kab.Bangka	**Tidak Operasional**	
68	UPDB PT.Timah-Bateng	Tambang Mineral	Kab.Bateng	**TAAT**	
69	PT. BUMI HERO PERKASA	Tambang Pengolahan	Kab.Belitung	**TAAT**	
70	PT. SWARNA NUSA SENTOSA	Pabrik Kelapa Sawit	Kab.Bangka Tengah	**TAAT**	
71	PT. SEJAHTERA INDAH PERKASA	Tambak Udang	Bangka Selatan	**TIDAK TAAT**	
72	PT. SUMBER ALAM SEGARA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
73	PT. LOTUS MANDIRI SUKSES	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	

No	Nama Perusahaan	Sektor	Kab./Kota	Status Ketaatan	Rekomendasi/ Tindaklanjut
74	KSU MITRA ALBAJO	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
75	PT. INDAH MAKMUR MANDIRI	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
76	PT. TAMBAK SUKSES PRATAMA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
77	PT. GARAYA MAKMUR SENTOSA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
78	CV. PANORAMA LINTAS TIMUR	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
79	PT. BAHARI BIO MAKMUR	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
80	PT. BAHARI BIO MAKMUR	Tambak Udang	Bangka Barat	**TIDAK TAAT**	
81	PT. SEJAHTERA INDAH PERKASA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
82	PT. BUDI AGRI SEJAHTERA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
83	CV. TJAHAYA MAKMUR FAJAR	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
84	PT. PRAYASA MINA TIRTA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	
85	PT. PELANGI ARGO SENTOSA	Tambak Udang	Bangka	**TIDAK TAAT**	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019

BAB V
PENUTUP

Foto : Ismuryanto TN

BAB V
PENUTUP

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam proses pembangunan daerah tentunya akan berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan meningkatkan berbagai potensi terutama sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pariwisata, serta kelautan dan perikanan. Selain menyejahterakan masyarakat, aktivitas perekonomian dan pembangunan juga menimbulkan permasalahan yang bisa mengganggu atau mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi komitmen Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial masyarakat.

Dalam proses peningkatan perekonomian daerah untuk pembangunan dengan berbagai aktivitasnya tentu terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang bersinggungan dengan lingkungan hidup antara lain tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, bencana, permasalahan perkotaan dan tata kelola. Berbagai permasalahan tersebut telah dianalisis dengan metode atau kerangka berpikir dengan *Driving Force – Pressure – State – Impact - Response (DPSIR)* .

Terdapat empat isu prioritas yang telah ditetapkan dengan Surat Pernyataan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor: 660/0600/DLH dengan isu prioritas sebagai berikut: (1) Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal, (2) Alih fungsi lahan, (3) Banjir, (4) Degradasi Kualitas Air.

V.1. DPSIR dan Isu Lingkungan

Berbagai driver sebagai faktor isu prioritas yang dianalisis pada DIKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya:

a. Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pertumbuhan penduduk dan berbagai aktivitas perekonomiannya yang terus bertambah merupakan faktor pendorong masalah persampahan dan limbah belum optimal, besarnya timbulan sampah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1.832,71 m^3/hari dengan kapasitas TPA terbatas ditambah belum tersedianya TPA regional menjadi permasalahan persampahan kedepan jika tidak dilakukan berbagai intervensi kebijakan pengelolaan persampahan.

b. Alih fungsi lahan

Sebagai faktor pendorong diantaranya pertambahan jumlah penduduk yang berkorelasi dan berbanding lurus dengan tingginya kebutuhan penggunaan lahan terutama untuk permukiman maupun sebagai tempat aktivitas manusia sementara di sisi lain jumlah lahan yang tersedia untuk peruntukan-peruntukan tersebut cenderung tetap dalam jangka waktu tertentu. Ketidakseimbangan antara kedua variabel inilah yang pada akhirnya menimbulkan tekanan pada tata guna lahan yang telah ada. Selain itu pertumbuhan ekonomi dengan berbagai aktifitasnya seperti pertambangan, pertanian perkebunan juga berkorelasi terhadap alih fungsi lahan dan eksploitasi lahan secara berlebihan.

c. Banjir

Kejadian banjir walaupun intensitasnya menunjukkan trend menurun, masih menjadi prioritas isu di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berbagai faktor pendorong permasalahan banjir yang terjadi diantaranya: kerusakan lahan dan alih fungsi lahan sehingga menyebabkan sedimentasi di sungai, karakteristik daerah yang rendah serta sampah yang menyumbat saluran

drainase menjadi bebrapa faktor terjadinya banjir di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai kebijakan sebagai bentuk respon bencana banjir telah dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diantaranya: Rehabilitasi hutan dan lahan, penertiban izin tambang illegal yang akan merusak DAS dan meningkatkan sedimentasi, peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan tata ruang terhadap perizinan dan didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan.

d. Degradasi kualitas air

Penurunan kualitas air juga berkorelasi dari alih fungsi lahan dan permasalahan sampah, pertumbuhan penduduk dan berbagai aktifitas perekonomian juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas air. Aktivitas lain yang dapat menjadi *driving force* dalam penurunan kualitas air adalah aktivitas tambang illegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terjadi pada daerah aliran sungai (DAS).

Impact atau dampak dari perubahan lingkungan akibat aktivitas perekonomian, terutama dari sektor industri dan pertambangan menghasilkan banyak limbah dan kerusakan lahan, serta penurunan kualitas lahan, air dan udara. Selain itu, maraknya pembangunan perumahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tempat tinggal penduduk yang semakin bertambah banyak jumlahnya, telah menyebabkan peningkatan jumlah limbah sampah, limbah domestik yang belum mampu ditangani secara optimal.

Response adalah tindakan yang diambil oleh suatu kelompok atau individu dalam masyarakat dan pemerintah untuk mencegah, mengganti rugi, memperbaiki atau beradaptasi dengan perubahan keadaan lingkungan, serta untuk memodifikasi perilaku manusia yang berkontribusi terhadap munculnya dampak atau resiko. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerapkan beberapa kebijakan dan melaksanakan beberapa program terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah bersama masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan beberapa kebijakan atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk *response* atau tanggapan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi, di antaranya adalah :

a. Rehabilitasi lahan, melalui reklamasi lahan bekas tambang, penanaman pohon dan penghijauan atau reboisasi.
b. Penggunaan Kompos Babel yang diberikan pada lahan bekas tambang sebelum dilakukan penanaman atau revegetasi.
c. Bimbingan teknis dan sosialisasi untuk mahasiswa dan masyarakat terkait pengelolaan sampah, terutama melalui bank sampah.
d. Instruksi dan edaran terkait pengurangan timbulan sampah organik dan anorganik, termasuk sampah plastik.
e. Inovasi terkait penanganan sampah telah dilakukan seperti MoU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PLN untuk meminimalisasi sampah dengan membuat pellet sampah menjadi bahan PLTS.
f. Kegiatan literasi , penghargaan lingkungan serta berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
g. Bimbingan teknis nelayan di wilayah pesisir untuk melakukan transplantasi terumbu karang yang telah rusak atau mati sebagai bentuk upaya untuk memperbaiki ekosistem pesisir dan laut. Kegiatan ini merupakan respon terhadap kerusakan habitat terumbu karang yang merupakan akibat dari sedimentasi yang merupakan hasil aktivitas pertambangan di laut.
h. Penangkaran satwa langka sebagai sarana habituasi dan edukasi, serta kampanye kepada masyarakat terkait perlindungan satwa langka di Bangka Belitung oleh komunitas pecinta hewan ALOBI.
i. Pemantauan kualitas air sungai dan udara secara rutin setiap tahun untuk memastikan kondisi air sungai dan udara tetap terjaga.

j. Dalam rangka menjaga persediaan air tanah di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah melalui tim teknis Komisi Penilai AMDAL memberikan masukan terkait kajian ketersediaan air tanah, dan penghematan dalam pemanfaatannya untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang membutuhkan air dalam jumlah besar untuk pelaksanaan kegiatannya.
k. Dalam rangka menjaga kualitas udara di Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas udara secara rutin.

V.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian dan data-data yang tersaji dalam dokumen IKPLHD ini, beberapa hal berikut ini menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Menanggulangi kerusakan lahan yang sudah cukup parah di Kepulauan Bangka Belitung, serta menciptakan tindakan antisipatif untuk pencegahan kerusakan lahan yang lebih parah. Salah satu upaya yang bisa dilaksanakan adalah dengan mengaplikasikan inovasi-inovasi yang aplikatif untuk merehabilitasi lahan, baik lahan hutan yang mengalami kerusakan maupun lahan bekas pertambangan.
2. Terkait pencemaran air tanah dan air permukaan di Kepulauan Bangka Belitung, perlu tindakan pengawasan secara rutin dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang membuang limbah cair industri ke sungai atau badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu sesuai aturan yang berlaku. Perlu juga digalakkan penggunaan pupuk kompos di bidang pertanian dan perkebunan sebagai pengganti pupuk kimia.
3. Perlu dilaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dengan intensitas yang lebih sering kepada masyarakat dan pelaku usaha.

4. Penerapan teknologi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, serta mempercepat terwujudnya TPA Regional.
5. Segera menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat aktivitas pertambangan, terutama pertambangan di wilayah laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem.
6. Diperlukan transformasi pemenuhan ekonomi masyarakat sehingga tidak menggantungkan kepada ekstraksi dan eksplorasi sumber daya alam terutama pertambangan dan mengembangkan potensi lokal daerah seperti perkebunan dan pariwisata kongritnya Bangka Belitung harus mempersiapkan perekonomian yang tidak hanya bertumpu pada pertambangan namun menuju perekonomian yang berbasis industri pengolahan dan jasa berdasarkan potensi daerah.
7. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka akan dibentuk kawasan-kawasan strategis yang memiliki peran penting terhadap kemajuan perekonomian. Pembangunan kawasan-kawasan strategis tersebut harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengacu pada RPPLH provinsi yang telah disusun, serta memperhatikan dan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam materi Kebijkan, Rencana, dan/atau Program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul, R. Lahan Bekas Tambang Timah Di Pulau Bangka Dan Belitung, Indonesia Dan Kesesuaiannya Untuk Komoditas Pertanian (Ex-Mining Land in Bangka and Belitung Islands, Indonesia and Their Suitability for Agricultural Commodities), 41(2), 101–114. https://doi.org/10.2017/jti.v41i2.7176. 2017

Agustina, H. Pemantauan Kualitas Air Laut 2019. 2019

Amin, I.D. Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 3 No.1, April 2013.

Ardana, P.D.H., Soriarta, I.K., Saputra, I.D.P.A. Evaluasi Kinerja Jaringan Drainase Di Jalan Raya Umaalasbatu Belig, Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Fakultas Teknik UNR, Gradien Vol.10, No.2, Oktober 2018.

Asmarhansyah. Inovasi Teknologi untuk Peningkatan Produktivitas Lahan Bekas Tambang Timah. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, *11*(2), 91–106. 2017

Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri. Draft Petunjuk Teknis Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Industri. Jakarta, 2012.

BPS. Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia. Jakarta: 2018.

Badan Standarisasi Nasional. Klasifikasi Penutup Lahan Bagian I: Skala Kecil dan Menengah (2014). Indonesia.

BPS Prov. Kep. Bangka Bellitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka 2020. Pangkalpinang:2020

BPS Prov. Kep Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019. Pangkalpinang:2019

Badruddin, M., Yusof, M., Othman, F., Hashim, N., Ali, N.C. The Role Of Socio-Economic And Cultural Factors In Municipal Solid Waste Generation: A Case Study In Taman Perling, Johor Bahru, Jurnal Teknologi, 37(F) Dis. 2002: 55–64.

DIRJEN PPKL KLHK. Penyampaian Acuan Target Indeks Lingkungan Kabupaten/Kota. 2020.

DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Studi Manajemen dan Produksi Persampahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang: 2018.

DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pangkalpinang: 2018.

DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Sungai Rangkui. Pangkalpinang: 2019.

DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Buding. Pangkalpinang: 2019.

DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019. Pangkalpinang: 2019.

Danoedoro, P. (2008). Membangun Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Multiguna. *Conference : Fora Tematik Sumber Daya Alam Darat*, *1*(Agustus 2008).

Dethier, J. Trash, Cities, and Politics: Urban Environmental Problems in Indonesia. Cornell University Press: Indonesia, Number 103, April 2017, pp. 73-90 (Article).

Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y. Solid Waste Management in Asian Developing Countries: Challenges and Opportunities. J. Appl. Environ. Biol. Sci., 2(7)329-335, 2012.

Ferianda, A., Setiawan, B. Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pedindang di Kota

Pangkalpinang. Majalah Geografi Indonesia Vol. 30, No. 2, September 2016 (114-119).

Gusmadi, S., Samsuri. Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4, Nomor 2, Juni 2019.

Harahap, F. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. Jurnal Society, Vol. I, No.1, Juni 2013.

Haryati, S., Gravitiani, E., Wijaya, M. Studi Penerapan Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Journal Bioeksperimen. Vol. 6 (1) Pp. 60-68.

Haryono, N. Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik. Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012.

Inoguchi, T. Newman, E., Paoletto, G., Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan Ekologi. Jakarta: LP3ES; 2015.

Irawan, D. Collaborative Governance: Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara Kota Surabaya. IR-Perpustakaan Universitas Airlangga: 2017.

Jago-on, K. A., Kaneko, S., Fujikura, R., Fujiwara, A., Imai, T., Matsumoto, T., Zhang, J., Tanikawa, H., Tanaka, K., Lee, B., Taniguchi, M. Urbanization and subsurface environmental issues: An attempt at DPSIR model application in Asian cities. Science of Total Environment 407 (2009) 3089-3104.

Jati, T.K. Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 1 Nomor 1, April 2013, 1-16.

KLHK. Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018. Jakarta: 2018.

KLHK. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Acara Rapat Teknis Adipura Tahun 2019. Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Menteri LH

Nomor 201 Tahun 2014 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, Pub. L. No. Kepmen LH Nomor 201 Tahun 2014 (2014). Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Penataan Ruang, Pub. L. No. UU Nomor 26 Tahun 2007, 107 (2007). Indonesia.

Kementerian Hukum dan HAM RI. Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pub. L. No. PP Nomor 15 Tahun 2010 (2010). Indonesia

Kajuva, E., Zhang, J., Tong, Z., Si, A., Na, Li. The DPSIR Model for Environmental Risk Assessment of Municipal Solid Waste in Dar es Salaam City, Tanzania. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 1692.

Keraf, A.S. Etika Lingkungan Hidup. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Khajuria, A., Matsui, T., Machimura, T. Life cycle assessment of municipal solid waste with regard to DPSIR framework: Evidence from India. Environment Science an Indian Journal. ESAIJ, 7(2), 2012 [41-46].

Kusmana, C. *Teknik Rehabilitasi Mangrove*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2005

Kusrini, Suharyadi, Hardoyo, S. Perubahan Penggunaan Lahan Dan Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Majalah Geografi Indonesia Vol. 25, No. 1, Maret 2011 (25 - 40).

Lahou, A., Alsabbagh, M. Assessment of Municipal Solid Waste Management in the State of Kuwait. International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 10, No. 2, February 2019.

Lestari, T., Abdi Z., widodo J., Yohanes. Analisis Vegetasi di Lahan Bekas Penambangan Timah Desa Rebo, Kabupaten Bangka. Enviagro, Vol. 2 (2): 11-28. 2008.

Liu, J., Li, Q., Gu, W., Wang, C. The Impact of Consumption Patterns on the Generation of Municipal Solid Waste in China: Evidences from Provincial Data. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 1717.

Makarau, V. Penduduk, Perumahan Pemukiman Perkotaan Dan Pendekatan Kebijakan. Jurnal Sabua Vol.3, No.1: 53-57, Mei 2011.

Mardiansjah, F., Handayani, W., Setyono, J. Pertumbuhan Penduduk Perkotaan dan Perkembangan Pola Distribusinya pada Kawasan Metropolitan Surakarta. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan P-ISSN: 2338-1604 dan E-ISSN: 2407-8751 Volume 6 Nomor 3, Desember 2018, 215-233.

Mauleny, A. Agglomeration, Socio-Economic Changes, and Development Policy of Jakarta. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, No. 2, Desember 2015 147 – 162.

Melinda, D., Hisyam, E.S., Gunawa, I. Analisis Kinerja Sistem Drainase Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok. Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat. 2 Oktober 2018.

Miezah, K., Obiri-Danso, K., Kadar, Z., Fei-Baffoe, B., Mensah, M. Municipal solid waste characterization and quantification as a measure towards effective waste management in Ghana. Waste Management 46 (2015) 15–27.

Pamsimas Indonesia. Pemicuan Perubahan Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tahun 2018. Jakarta: 2019.

Pasya, G. Pemukiman Penduduk Perkotaan. Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2012, halaman 61-70.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, Pub. L. No. Perda Nomor 2 Tahun 2014, 166 (2014). Indonesia.

Pertiwi, P., Hisyam, E., Yofianti, D. Analisis Pengaruh Perubahan Tata Guna Lahan Terhadap Jumlah Aliran Permukaan Pada DAS Pompong Di Kabupaten Bangka. Pangkalpinang: Prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Pada Masyarakat ISBN: 978-602-61545-0-7. 2019.

Pirwanda, F., Pirngadie, B. Dampak Kegiatan Tambang Timah Inkonvensional Terhadap Perubahan Guna Lahan Di Kabupaten

Belitung. Bandung: Jurnal Planologi Universitas Pasundan; Nopember 2015 Volume 2 Nomor 3.

Prajati, G., Padmi, T., Rahardyan, B. Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Dan Kependudukan Terhadap Timbulan Sampah Di Ibu Kota Provinsi Jawa dan Sumatera. Jurnal Teknik Lingkungan Volume 21 Nomor 1, Mei 2015.

Prasetiyono, E. Evaluasi Kegiatan Akuakultur Di Kolong Pasca Tambang : Analisis Pencemaran Air Kolong. 2015.

Pratama, R.A., Ihsan, I.M. Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan Studi Kasus: Bank Sampah Malang. Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 18, No 1, Januari 2017, 112-119.

Pratamasyari, D.A. Mengkaji Alternatif Pengelolaan Limbah Padat Kota Palu Berdasarkan Biaya Pengelolaan Optimal. Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan. Volume 16 Nomor 2 Desember 2019 (Halaman 241 - 251).

Prayitno, J., Widati, S. Kajian Strategi Promosi Kesehatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Di Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kota Surabaya. Surabaya: 2018.

Purniawati, Kasana, N., Rodiyah. Good Environmental Governance In Indonesia (Perspective of Environmental Protection And Management). The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2(1), 43-56 (March 2020).

Puspitasari. Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta). Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1 Februari 2009 Halaman 23-24.

Restiani, E. Analisis Kinerja Sistem Drainase Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu. Jurnal Fropil. Vol 3 Nomor 2 Juli-Desember 2015.

Richard C. Flagan, J. H. S. FUNDAMENTAL Of AIR POLLUTION. Prentice-Hall, Inc. 1998.

Risal, M. Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau). Jurnal Administrative Reform, Vol. 4 No. 2 , April - Juni 2016.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. *Organizational Behavior* (15th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc. 2013.

Sambodo, G. Pribadi, U. Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 Februari 2016.

Santoso, K., Wicaksono, A. Land Use Change Effect in 2008 and 2018 on Surface Runoff Coefficient in Cerucuk Watershed, Belitung Regency, Bangka Belitung Province. Seminar Nasional Penginderaan Jauh ke-5 Tahun 2018.

Saputro, B., Santosa, L., Herumurti, S. Pengaruh Aktivitas Penambangan Timah Putih (SN) terhadap Kerusakan Lingkungan Perairan Sungai Jelitik Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Majalah Geografi Indonesia. 2014.

Sari, E., Pratiwi, D.F. Pengetahuan Masyarakat Dan Pendataan Terhadap Komposisi Sampah Pesisir Di Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020.

Sari, E., Pratiwi, D.F. Persepsi dan Partisipasi Wisatawan terhadap Sampah di Pantai Pasir Padi Pulau Bangka. Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunitas 5 (1), 2020, 38-46.

Sarker, S., Khan, A., Mannan, M. Urban Population and Economic Growth: South Asia Perspective. European Journal of Government and Economics Volume 5, Number 1 (June 2016) ISSN: 2254-7088.

Signsmart KLHK. Aplikasi. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020.

Siregar, H., & Wahyuni, D. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. *Economics Development*, (pertumbuhan ekonomi dan penduduk miskin). Retrieved from http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3.2007

Sodik, J., Iskandar, D. Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 8, Nomor 2, Oktober 2007: 117-129.

STBM Indonesia. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Tassri, N. Proyeksi Serapan Karbondioksida Berdasarkan Analisis Citra Landsat Multitemporal Perubahan Penutup Lahan Bervegetasi Terkait Aktivitas Penambangan Timah di Kabupaten Bangka. Tesis. Universitas Gadjah Mada. 2019

Team SOS. Pemanasan Global: Solusi dan Peluang Bisnis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2011.

Trang, P., Dong, H., Toan, D., Hanh, N., Thu, N. The Effects of Socio-economic Factors on Household Solid Waste Generation and Composition: A Case Study in Thu Dau Mot, Vietnam. Energy Procedia 107 (2017) 253 – 258.

United States Geological Survey. (2020). Landsat 8 OLI acquisition. Retrieved July 20, 2020, from https://earthexplorer.usgs.gov/

Yuliana. Analisis Dampak Pertambangan Timah Rakyat Terhadap Bencana Banjir: Studi Pada Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016. Jurnal Prodi Manajemen Bencana. April 2017. Volume 3 Nomor 1.

Yuliar,S. Bahan Paparan Inovasi Untuk Pembangunan Inklusif, ITB, 2017.

Yunito, M., Santosa, L. Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Akibat Penambangan Timah Berdasarkan Analisis Neraca Sumberdaya Lahan Spasial Di Kabupaten Bangka. 2015.

Zhao, X., Bottero, M. Application of System Dynamics and DPSIR Framework for Sustainability Assessment ff Urban Residential Areas. 2010.

Zulkarnain, I., Erman, E., Pudjiastuti, T. N., & Mulyaningsih, Y. Konflik di Kawasan Pertambangan Timah di Bangka Belitung *: Persoalan dan*

Solusi. Jakarta: LIPI Press. 2005

Zulkarnain, I., Sulaiman, A., Harahap, F.R. Modal Sosial Bentukan Dalam Penyelesaian Konflik di Bangka Belitung. Society, Volume 6, Nomor 2, Desember 2018.

LAMPIRAN I

TABEL DATA DIKPLHD-2019

65 TABEL DATA

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2019

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		183.652,58	154.501,06	1.251,41	26.484,39	1.387,54
		2. Kawasan Bergambut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Kawasan Resapan Air		55.920,08	42.631,46	1.270,41	11.112,89	451,07
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		17.660,52	10.973,84	474,10	1.912,61	226,54
		2. Sempadan Sungai		6.090,36	3.931,01	125,94	967,18	969,11
		3. Kawasan Sekitar Danau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Ruang Terbuka Hijau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		35.453,89	32.997,44	302,44	1.994,08	71,95
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		17.286,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		6.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Erosi dan Tanah Longsor		14.049,26	13.778,95	37,09	82,11	151,12
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Kawasan Rawan Banjir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
			v. Kawasan Rawan Tsunami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vi. Kawasan Rawan Abrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ii. Sempadan Mata Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Ramsar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3. Taman Buru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6. Terumbu Karang		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kawasan Budidaya				1.363.888,47	1.139.136,76	35.419,57	175.871,64	12.419,99

Sumber : DLH Provinsi Kep. Bangka Belitung (Diolah dari Peta RTRW Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2014, Peta Kawasan Hutan, dan Peta Penutupan Lahan Tahun 2019)

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kabupaten Bangka	17.048.15	11,15	195.604,18	33.182,68	13.696,48	1.930,03
2.	Kabupaten Bangka Barat	21.202,85	-	158.818,67	41.106,80	32.001,40	1.804,77
3.	Kabupaten Bangka Tengah	15.837,74	-	115.348,71	27.465,89	24.496,69	232,72
4.	Kabupaten Bangka Selatan	21.824,36	1.161,64	250.494,235	12.260,39	43.075,28	391,52
5.	Kabupaten Belitung	19.982,88	-	66.786,74	66.053,03	46.914,82	246,76
6.	Kabupaten Belitung Timur	9.986,88	5 88,30	88.880,16	53.931,30	46.141,72	703,27
7.	Kota Pangkalpinang	3734,84	-	6.051,79	-	211,88	388,23
	Jumlah	109.527,70	1.761,10	881.984,49	234.000,10	211.143,83	5.697,30

Keterangan :

Sumber: Peta Penutup Lahan tahun 2019 BPKH wilayah XIII Pangkalpinang, Data diolah tahun 2020

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	432.883,51
2.	Hutan Lindung	185.531,34
3.	Taman Nasional	16.906,92
4.	Taman Wisata Alam	7.192,42
5.	Taman Buru	-
6.	Cagar Alam	-
7.	Suaka Margasatwa	-
8.	Taman Hutan Raya	11.900,38
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	659.014
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	-
3.	Hutan Kota	-
4.	Taman Hutan Raya	11.900,38
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	-

Keterangan :
Sumber : SK.8093/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/II/2018 tentang pemutakhiran peta kawasan hutan Bangka Belitung, BPKH wilayah XIII Pangkalpinang 2020

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1. Hewan Menyusui	*Arctictis binturong*	Binturong			V	
	Rusa unicolor	Rusa Sambar			V	
	Arctogalidia trivirgata	Musang Akar			V	
	Tragulus napu	Pelanduk			V	
	Nycticebus coucang	Kukang			V	
	Muntiacus muntjak	Kijang			V	
	Tarsius bancanus	Mentilin	V		V	
	Manis javanica	Trenggiling			V	
	Callosciurus prevostii	Tupai 3 warna		V		
2. Burung	*Spilornis cheela*	Elang Bido			V	
	Haliastur indus	Elang Bondol			V	
	Spizaetus cirrhatus	Elang Brontok			V	
	Haliaeetus leucogaster	Elang Laut			V	
	Anthracoceros malayanus	Rangkong Hitam			V	
	Aethopyga rhodolaemus	Burung Madu Leher Merah			V	
	Aethopyga duyvenbodei	Burung Madu Sangihe			V	
3. Reptil	*Crocodylus porosus*	Buaya Muara			V	
	Manouria emys	Kura-kura hutan		V		
	Chelonia mydas	Penyu hijau			V	
	Eretmochelys imbricata	Penyu Sisik			V	
	Dermochelys coricea	Penyu Belimbing			V	

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Python bivittatus	Sanca Bodo			√	
4. Amphibi						
5. Ikan						
	Dugong dugon	Duyung			√	
	Orcaella brevirotris	Pesut			√	
6. Keong						
7. Serangga						
8. Tumbuh-tumbuhan						

Keterangan :-

Sumber : BKSDA Resort Bangka Belitung, 2020

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2020

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
1	*2*	*3*	*4*
1	Wijaya, SH	SK.22/IV-K.8/2015 tanggal 14 Januari 2015	Kijang *(Muntiacus muntjak)*, rusa totol *(Axis axis)*
2	Danny Widjaya	SK.44/IV-K.8/2015 tanggal 25 Februari 2015	Kijang *(Muntiacus muntjak)*, rusa totol *(Axis axis)*
3	PD. Budiman	SK.106/IV-SET/2015 tanggal 9 April 2015	Buaya muara *(Crocodylus porosus)*, Buaya senyulong *(Tomistoma schlegelii)*
4	PT. Timah (Persero), Tbk	SK.76/IV-K.8/2015 tanggal 15 April 2015	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*
5	Hero Tio	SK.103/IV-K.8/2015 tanggal 11 Juni 2015	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, rusa timor *(Rusa timorensis)*, kijang *(Muntiacus muntjak)*, rusa totol *(Axis axis)*
6	Benny Setiawan	SK.129/IV-K.8/2015 tanggal 28 Juli 2015	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*
7	Reva Vergano	SK.146/IV-K.7/2015 tanggal 2 Oktober 2015	Kijang *(Muntiacus muntjak*), rusa totol *(Axis axis*)
8	M. Hasbi JR	SK.25/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 7 Maret 2017	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Rusa Totol *(Axis axis)*
9	Agita Sulistiana Permadi	SK.29/K.12/TU/KSA/3/2017 tanggal 8 Maret 2017	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*
10	Andy Evans Gunady	SK.85/K.12/TU/KSA/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017	Rusa Sambar *(Rusa unicolor*), Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa yang Ditangkarkan
11	Yanti Lioe	SK.33/K.12/TU/KSA/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Rusa Totol *(Axis axis)*
12	Gun An	SK.71/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
13	Zunaria	SK.72/K.12/TU/KSA/3/2018 tanggal 5 Maret 2018	Rusa Sambar (Rusa unicolor), Kijang (Muntiacus muntjak), Rusa Totol (Axiz axis)
14	Muhamad Adystia Sunggara	SK.188/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 13 Juli 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
15	Indra Setiawan	SK.193/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 18 Juli 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
16	Dawin	SK.208/K.12/TU/KSA/7/2018 tanggal 30 Juli 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
17	Budiman	SK.344/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 23 Agustus 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor)*, Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
18	Hendry	SK.347/K.12/TU/KSA/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018	Rusa Sambar *(Rusa unicolor),* Kijang *(Muntiacus muntjak)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*
19	Replianto	SK.20/K.12/TU/KSA/1/2019 tanggal 10 Januari 2019	Rusa Timor *(Rusa timorensis)*, Rusa Totol *(Axiz axis)*

Keterangan : dari data yang didapat, penangkar TSL merupakan perorangan dan perusahaan

Sumber : BKSDA Resort Konservasi Wilayah Bangka Belitung, 2020

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten/Kota	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kab. Bangka	1.342,411	1.347,971	-	565,379	-	-	-	-	Tambang dan atau Kebun
2	Kab. Bangka Barat	743,814	1.270,18	-	68,955	-	-	-	-	-
3	Kab. Bangka Selatan	3.672,18	975,392	-	0,785	190,936	-	-	-	-
4	Kab. Bangka Tengah	553,655	1.264,69	-	122,686	56,921	-	-	-	-
5	Kab. Belitung	438,277	1077,478	23,507	485,455	-	-	-	-	-
6	Kab. Belitung Timur	1.040,422	3.480,72	-	1.312,87	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkalpinang	-	-	63,412	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel 7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1	< 20 cm	0,2 - 1,3	NA	NA
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	NA	NA
3	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	NA	NA
4	100 - 150	9,0 - 12	NA	NA
5	> 150 cm	> 12	NA	NA

Keterangan : Tidak dilakukan pemantauan akibat erosi
Sumber: DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi : Kepulauan Bangka Tengah (Bangka Tengah)
Tahun : 2018

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Ketebalan Solum	< 20 cm	>20 cm	Tidak
2	Kebatuan Permukaan	> 40%	<40%	Tidak
3	Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	82,87 % pasir*	Melebihi
4	Berat Isi	> 1,4 g/cm3	1,5975 g/cm3	Melebihi
5	Porositas Total	< 30% ; > 70%	40,94%	Tidak
6	Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0	169,92	Melebihi
7	pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	5,46	Tidak
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	0,136	Tidak
9	Redoks	< 200 mV	-	Tidak
10	Jumlah Mikroba	< 10^2cfu/g tanah	1,0x104; 2,0x102	Tidak

Keterangan : Inventarisasi dan Pengelolaan Lahan Kritis 2012-2017 Kabupaten Bangka Tengah
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah

Tabel 9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/Tidak
1	Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3m	NA	NA
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5	NA	NA
3	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 Cm	NA	NA

Keterangan: Tidak ada data, belum dilakukan pendataan untuk kerusakan di lahan basah
Sumber: DLH Prov.Kep.Bangka Belitung

Tabel 10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun : 2018

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	Bangka			1667
2	Bangka Barat			6425
3	Bangka Selatan			23533
4	Bangka Tengah			567
6	Belitung			8334
7	Belitung Timur			3666
8	Pangkalpinang			1299

Keterangan:
Sumber : DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
	Bangka Tengah	-	-
1	Pulau Ketawai	-	59%
2	Pulau Semujur	-	26%
	Bangka Selatan	-	-
5	Pulau Kelapan	-	4%
6	Pulau Seniur	-	1%
7	Pulau Seniur	-	3%
8	Pulau Ibul	-	3%
9	Pulau Lepar (Penutuk)	-	55%
10	Desa Tukak	-	5%
11	Desa Tukak	-	27%
	Belitung	-	-
12	Pantai Bukit Berahu	-	48%
13	Pantai Bukit Berahu	-	2%
14	Pantai Tanjung Binga (Pelabuhan)	-	18%
15	Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	-	18%
16	Pantai Tanjung Binga (PT.Belpi)	-	16%
17	Pantai Tanjung Kelayang	-	28%
18	Pantai Tanjung Kelayang	-	8%
19	Pulau Seliu, Membalong	-	42%
20	Pulau Seliu, Membalong	-	18%
21	Pulau Buloh	-	6%
22	Selat Nasik	-	38%
23	Selat Nasik	-	30%
24	Selat Nasik	-	37%
25	Selat Nasik	-	38%
	Belitung Timur	-	-
26	Pantai Aik Lanun	-	5%
27	Pantai Aik Lanun	-	15%
28	Pantai Aik Lanun	-	15%
29	Pantai Aik Lanun	-	36%
30	Pantai Aik Lanun	-	27%
31	Pantai Aik Lanun	-	17%
32	Pantai Aik Lanun	-	23%
33	Pantai Aik Lanun	-	10%

No	Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
34	Pantai Aik Lanun	-	10%
35	Pantai Aik Lanun	-	4%
36	Pantai Aik Lanun	-	8%
37	Pantai Aik Lanun	-	4%
38	Pantai Aik Lanun	-	5%
39	Pantai Aik Lanun	-	5%
40	Pantai Aik Lanun	-	3%
41	Pantai Aik Lanun	-	12%
42	Pantai Aik Lanun	-	4%
43	Pantai Aik Lanun	-	17%
44	Pantai Aik Lanun	-	16%
45	Pantai Setinggi	-	12%
46	Pulau Melidang, Gantong	-	4%
47	Pulau Melidang, Gantong	-	5%
48	Pulau Melidang, Gantong	-	1%
49	Pulau Melidang, Gantong	-	15%

Keterangan : Pengambilan sampel pada titik-titik tertentu, bukan pada semua wilayah
Sumber : DKP Prov. Kep. Bangka Belitung

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Kab./Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	Kabupaten Bangka	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bangka Barat	-	-	-	-	-
3	Kabupaten Bangka Tengah	-	-	-	-	-
4	Kabupaten Bangka Selatan	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Belitung	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Belitung Timur	-	-	-	-	-
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-	-

Keterangan : Hanya dilakukan pengambilan sampel pada beberapa titik, sesuai format Tabel 10.A.

Sumber : DKP Prov. Kep. Bangka Belitung

Tabel 12.a Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	*Hard Coral Life*	*Dead Coral*	*Algae*	*Other*	*Sand/ Rubble*	*Kategori*
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	23,92%	1,80%	0,00%	18,50%	55,78%	BURUK
2	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	27,80%	1,50%	9,90%	5,30%	55,50%	SEDANG
3	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Tanjung Sangkar	24,14%	0,90%	48,88%	0,30%	25,78%	BURUK
4	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	Barat Daya P. Seniur	0,00%	1,76%	27,08%	1,68%	69,48%	BURUK
5	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	58,06%	20,74%	0,00%	3,90%	17,30%	BAIK
6	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	24,88%	0,00%	0,00%	2,86%	72,26%	BURUK
7	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	28,50%	6,22%	43,60%	0,48%	21,20%	SEDANG
8	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	60,34%	35,72%	0,00%	3,54%	0,40%	BAIK
9	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	18,78%	21,56%	45,50%	0,40%	13,76%	BURUK
10	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Timur Laut P. Lepar	20,02%	38,06%	22,84%	9,44%	9,64%	BURUK
11	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Timur Laut P. Lepar	51,26%	40,82%	2,20%	2,70%	3,02%	BAIK
12	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	19,72%	55,14%	14,36%	7,98%	2,80%	BURUK
13	19-11-2016	2° 51' 44.809" S	107° 0' 53.168" E	Barat Daya P. Gusung Asam	47,04%	4,30%	22,96%	5,56%	20,14%	SEDANG
14	20-11-2016	2° 48' 45.583" S	107° 3' 15.224" E	Barat P. Ketawai	60,16%	31,14%	1,24%	6,02%	1,44%	BAIK
15	20-11-2016	2° 49' 32.074" S	107° 4' 16.745" E	Utara P. Ketawai	38,86%	24,66%	27,44%	4,68%	4,36%	SEDANG
16	20-11-2016	2° 52' 31.548" S	107° 5' 54.546" E	Timur P. Pongok	17,04%	4,90%	11,60%	22,96%	43,50%	BURUK
17	20-11-2016	2° 55' 16.324" S	107° 4' 55.834" E	Selatan P. Pongok	19,72%	51,52%	25,62%	3,14%	0,00%	BURUK
18	19-11-2016	2° 53' 38.774" S	107° 1' 52.590" E	Barat daya P. Pongok	7,64%	29,44%	42,22%	4,10%	16,60%	BURUK
19	21-11-2016	2° 53' 55.086" S	106° 50' 9.593" E	Timur Laut P. Lepar	4,50%	0,00%	60,26%	3,16%	32,08%	BURUK
20	19-11-2016	2° 54' 50.501" S	107° 3' 5.818" E	Selatan P. Kelapan	75,80%	23,32%	0,00%	0,62%	0,26%	SANGAT BAIK
21	20-11-2016	2° 50' 43.768" S	107° 5' 22.682" E	Timur P. Kelapan	63,68%	19,14%	14,16%	0,44%	2,58%	BAIK

No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	*Hard Coral Life*	*Dead Coral*	*Algae*	*Other*	*Sand/ Rubble*	*Kategori*
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
22	19-11-2016	2° 50' 15.950" S	107° 2' 1.198" E	Barat P. Kelapan	57,56%	13,04%	25,58%	0,56%	3,26%	BAIK
23	21-11-2016	2° 55' 33.262" S	106° 52' 30.590" E	Mayora P. Lepar	16,88%	27,64%	14,98%	6,64%	33,86%	BURUK
24	18-11-2016	2° 50' 27.540" S	106° 50' 13.960" E	Utara P. Kelapan	8,10%	6,92%	75,26%	0,00%	9,72%	BURUK
25	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	20,94%	76,88%	0,00%	0,98%	1,20%	BURUK
26	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	57,32%	9,38%	28,90%	4,40%	0,00%	BAIK
27	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Tanjung Sangkar	54,02%	32,98%	2,16%	0,56%	10,28%	BAIK
28	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	Barat Daya P. Seniur	58,96%	0,00%	30,40%	0,42%	10,22%	BAIK
29	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	72,74%	15,90%	2,60%	0,90%	7,86%	BAIK
30	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	70,10%	29,90%	0,00%	0,00%	0,00%	BAIK
31	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	58,60%	41,40%	0,00%	0,00%	0,00%	BAIK
32	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	31,60%	52,80%	0,60%	0,00%	15,00%	SEDANG
33	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	57,00%	39,00%	0,60%	1,10%	2,30%	BAIK
34	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Timur Laut P. Lepar	75,46%	18,18%	3,70%	0,00%	2,66%	SANGAT BAIK
35	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Timur Laut P. Lepar	65,30%	22,62%	9,64%	0,36%	2,08%	BAIK
36	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	66,58%	32,96%	0,00%	0,46%	0,00%	BAIK
37	19-11-2016	2° 51' 44.809" S	107° 0' 53.168" E	Barat Daya P. Gusung Asam	34,42%	31,50%	21,14%	0,26%	12,68%	SEDANG
38	20-11-2016	2° 48' 45.583" S	107° 3' 15.224" E	Barat P. Ketawai	42,86%	54,64%	0,00%	1,98%	0,52%	SEDANG
39	20-11-2016	2° 49' 32.074" S	107° 4' 16.745" E	Utara P. Ketawai	72,94%	24,52%	0,00%	1,30%	1,24%	BAIK
40	20-11-2016	2° 52' 31.548" S	107° 5' 54.546" E	Timur P. Pongok	27,96%	63,44%	3,86%	0,38%	4,36%	SEDANG
41	20-11-2016	2° 55' 16.324" S	107° 4' 55.834" E	Selatan P. Pongok	70,80%	28,70%	0,00%	0,50%	0,00%	BAIK
42	19-11-2016	2° 53' 38.774" S	107° 1' 52.590" E	Barat daya P. Pongok	69,44%	29,14%	0,00%	1,42%	0,00%	BAIK
43	21-11-2016	2° 53' 55.086" S	106° 50' 9.593" E	Timur Laut P. Lepar	76,38%	14,40%	2,92%	1,82%	4,48%	SANGAT BAIK
44	19-11-2016	2° 54' 50.501" S	107° 3' 5.818" E	Selatan P. Kelapan	14,00%	54,90%	0,00%	0,00%	31,10%	BURUK
45	20-11-2016	2° 50' 43.768" S	107° 5' 22.682" E	Timur P. Kelapan	40,58%	45,12%	3,92%	0,30%	10,08%	SEDANG
46	19-11-2016	2° 50' 15.950" S	107° 2' 1.198" E	Barat P. Kelapan	21,00%	1,36%	51,14%	1,26%	25,24%	BURUK
47	21-11-2016	2° 55' 33.262" S	106° 52' 30.590" E	Mayora P. Lepar	14,98%	13,46%	52,00%	1,10%	18,46%	BURUK
48	18-11-2016	2° 50' 27.540" S	106° 50' 13.960" E	Utara P. Kelapan	51,26%	43,96%	0,00%	0,60%	4,18%	BAIK

TABEL DATA -DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG-2019

No.	Waktu Pengambilan Data	Koordinat		Lokasi	*Hard Coral Life*	*Dead Coral*	*Algae*	*Other*	*Sand/ Rubble*	*Kategori*
					(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
49	18-11-2016	2° 51' 48.934" S	106° 44' 8.770" E	Timur Laut P. Burung	12,94%	40,18%	37,10%	0,74%	9,04%	BURUK
50	18-11-2016	2° 52' 31.994" S	106° 44' 55.885" E	Utara P. Burung	86,90%	12,08%	0,00%	0,44%	0,58%	SANGAT BAIK
51	18-11-2016	2° 52' 51.272" S	106° 48' 1.480" E	Selatan P. Memperak	68,80%	28,72%	0,70%	0,00%	1,78%	BAIK
52	18-11-2016	2° 50' 42.480" S	106° 47' 8.330" E	P. Bakau	69,88%	20,46%	4,78%	3,26%	1,62%	BAIK
53	18-11-2016	2° 49' 58.590" S	106° 47' 5.370" E	Karang Aji	61,40%	37,90%	0,00%	0,00%	0,70%	BAIK
54	18-11-2016	2° 50' 18.740" S	106° 48' 17.580" E	Tanjung Ular	62,90%	31,90%	0,00%	0,60%	4,60%	BAIK
55	18-11-2016	2° 51' 4.388" S	106° 49' 34.871" E	Karang Gajah Mas	62,90%	31,90%	0,00%	0,60%	4,60%	BAIK
56	21 - 11 - 2016	2° 50' 35.167" S	106° 51' 15.167" E	Timur Laut P. Kelapan	36,10%	45,52%	16,34%	0,00%	2,04%	SEDANG
57	20-11-2016	2° 51' 28.627" S	106° 51' 25.884" E	Barat P. Kelapan	35,54%	61,70%	0,00%	1,02%	1,74%	SEDANG
58	21 - 11 - 2016	2° 54' 46.278" S	106° 50' 54.002" E	Selatan Pulau kera	45,88%	50,74%	1,62%	1,12%	0,64%	SEDANG
59	21 - 11 - 2016	2° 55' 38.867" S	106° 53' 3.977" E	Karang Tengah Selat Nasik	11,08%	6,30%	35,12%	3,32%	44,18%	BURUK
60	21 - 11 - 2016	2° 55' 57.338" S	106° 54' 11.966" E	Selatan P. Ketawai	16,90%	23,80%	50,60%	0,00%	8,70%	BURUK

Keterangan: -

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Jenis Penggunaan Lahan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Permukiman	33.174,72	34.933,43
2.	Industri	-	-
3.	Tanah kering	-	-
4.	Perkebunan	194.548,81	227.674,29
5.	Semak belukar	295.434,88	295.616,42
6.	Tanah kosong	-	-
7.	Perairan/kolam	5.598,81	5.598,81
8.	Bandara	146,08	257,27
9	Lahan Terbuka	75.630,75	75.673,93
10	Pertambangan	144.783,81	145.546,56

Sumber : Olahan Data Penutup Lahan BPKH wilayah XIII Pangkalpinang, 2019

Tabel-14. Jenis PemanfaatanLahan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2019

No.	Jenis Pemanfaatan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tambang		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
2.	Perkebunan		Besar	391,064	
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
3.	Pertanian		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat	151,531	
4.	Pemanfaatan		Besar		
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat	43,315	

Keterangan : Data yang tersedia tidak dikelompokkan menjadi skala besar, sedang, kecil, atau rakyat

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2019

Tabel-14.a Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kabupaten/Kota

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

Penggunaan Lahan/ *land use*	Luas
I. Lahan Pertanian/ Agricultur Area: 1173412	
I.1 Lahan Sawah/ *Paddy wetfield*	25093
I.2 Lahan Bukan sawah:	
a. Tegal	97930
b. Ladang	30416
c. Perkebunan	394408
d. Hutan Rakyat	43661
e. Padang pengembalaan	3232
f. Sementara tidak diusahakan	59174
g. Lain-lain (Tambak,kolam, empang , Hutan negara)	519497
II. Lahan Bukan Pertanian	
Jalan, perkantoran, sungai, dll	490607
Total I + II	**1664018**

Sumber : Provinsi Bangka Belitung dalam angka, 2019

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pasir Bangunan	CV. HARAPAN REZEKI BUNGSU		83,5	180.000
2	Pasir Bangunan	PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA		123,1	444.000
3	Pasir Bangunan	PT. JABEL TRI BERSAUDARA		151,64	440.000
4	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero		35,40	114.227
5	Pasir Bangunan	CV. Irpau Hero		91,59	122.247
6	Pasir Bangunan	CV. DHIKA YOGATAMA		152,7	228.000
7	Pasir Bangunan	PT. DAGO PASIR ALAM		80,3	408.000
8	Pasir Bangunan	CV. ALFINDO		114,7	180.000
9	Pasir Bangunan	CV. BUMI PASUNDAN		98,7	240.000
10	Pasir Bangunan	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA		165,2	300.000
11	Pasir Kuarsa	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		39,2	120.000
12	Pasir Kuarsa	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		23,65	300.000
13	Pasir Kuarsa	PT. PRIMA BUNDIARTA NUSA		49,64	240.000
14	Pasir Kuarsa	PT. MITRA PASIR BERLIAN		30,6	180.000
15	Pasir Kuarsa	CV. HARAPAN REJEKI Bungsu		83,5	480.000

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
16	Pasir Kuarsa	PT. KURNIA MANDIRI ADIPERKASA		190	331.500
17	Pasir Kuarsa	PT SUMBER ALAM ANTARNUSA		164,1	180.000
18	Pasir Kuarsa	PT. KARYA CIPTA LAHANINDO		132,4	360.000
19	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		177,9	200.000
20	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		192	400.000
21	Pasir Kuarsa	PT. BELITUNG SAND MINING		71,3	200.000
22	Pasir Kuarsa	PT. HAMPARAN MINERALINDO ABADI		198	277.500
23	Pasir Kuarsa	PT. SEJAHTERA UTAMA MITRA JAYA		190	300.000
24	Pasir Kuarsa	PT. Facific Dipta Karya		197	92.000
25	Tanah Liat	PT. Hero Ceramas		195,00	81.473
26	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres Internasional		198	101.728
27	Pasir Kuarsa	PT. Hero Progres Internasional		180	89.229
28	Pasir Kuarsa	PD. DUTA LESTARI		1,3	1.300
29	Pasir Kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOUCES		82,31	71.001
30	pasir kuarsa	PT.CINTA MAPUR INDONESIA		137	172.872
31	pasir kuarsa	CV. Dersan Silica Indonesia		40,00	371.250
32	pasir kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		32,84	135.000
33	pasir kuarsa	PT. MITRA PERSADA RESOURCES		71	127.008
34	Pasir Kuarsa	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA		150,4	149.940
35	Pasir Kuarsa	PT. WALIE TAMPAS CITRATAMA		46,2	780.000

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
36	Pasir Kwarsa	PT. MUTIARA TERANG RESOURCES		170	100.000
37	Batu Granit	PT. ANUGERAH KREATIF MANDIRI		105,261	23.750
38	Granit	PT. Ludai Gede Bilitonite		138,00	86.262
39	Batu Granit	PT. ADITYA BUANA INTER		12,86	180.000
40	Batu Granit	PT. MANDIRi KARYA MAKMUR		150	360.000
41	Granit	PT. BUMIWARNA AGUNG PERKASA		150	480.000
42	Tanah Liat	PT. SRIYUDI ALAM PERKASA		88,89	48.000
43	Tanah liat	PT. PRIMA BUDIARTA NUSA		106	160.000
44	Tanah Liat	CV. SRIYUDI LITA JAYA		500	15.000
45	Tanah Liat	CV. Harapan Aldi Sejahtera		150,00	86.632
46	Tanah Liat	CV. Irpau Hero		28,3	110.000
47	Tanah Liat	PT. JABEL TRI BERSAUDARA		92	80.000
48	Tanah Liat	PT. Hero Ceramas		195,00	81.473
49	Tanah Liat	PT. Setia Maju Pratama		196,00	96.000

Sumber: Dinas ESDM, 2020

Tabel 16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kabupaten Bangka Barat (UPTD KPHP Rambat Menduyung/Unit I)				5	5	6.050
	Kabupaten Bangka Barat (UPTD KPHP Jebu Bembang Antan/Unit II)				6	6	7.260
	Kabupaten Bangka (UPTD KPHP Bubus Panca/Unit III)				7	7	6.512
	Kabupaten Bangka (UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin/Unit IV)				5	0	0
	Kabupaten Bangka Tengah (UPTD KPHP Sungai Sembulan/Unit V)				21	21	19.667
	Kabupaten Bangka Selatan (UPTD KPHP Muntai Palas/Unit VIII)				10	10	11.000
	Kabupaten Belitung (UPTD KPHL Belantu Mendanau/Unit X)				25	25	36.200
	Kabupaten Belitung Timur (UPTD KPHP Gunung Duren/Unit XIII)				10,4	10,4	16.100

Keterangan :

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

No.	Kab/ Kota	Luas (Ha)	kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Bangka Barat	9.596,77	-	Rusak ringan = 93.9 % Rusak sedang = 3.91 % Rusak berat = 2.20 %	Konversi menjadi lahan perkebunan; pertambangan serta pertanian lahan kering campur semak
2	Kabupaten Bangka Tengah	20.975,49	-	Rusak ringan = 94.9 % Rusak sedang = 4,01 % Rusak berat = 1.04 %	Konversi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan
3	Kabupaten Bangka Selatan	13.693,61	-	Rusak ringan = 97.31 % Rusak sedang = 2.53 % Rusak berat = 0.15 %	Konversi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan
4	Kabupaten Bangka	2.414,32	-	Rusak ringan = 99.3 % Rusak sedang = 0.67 %	Konversi menjadi pertanian lahan kering campur semak
5	Kota Pangkalpinang	1.316,17	-	Rusak ringan = 94.54 %	Konversi menjadi lahan terbangun
6	Kabupaten Belitung	0	-	-	-
7	Kabupaten Belitung Timur	0	-	-	-

Keterangan tabel: Tidak ada informasi terkait kedalaman gambut
Sumber : Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dalam Webgis PKGPPKL-MENLHK, data diolah DLH Prov Kep. Babel tahun 2020
Kolom 1 - 6 Cukup Jelas

Tabel-18 : Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2019

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bangka	PT. Inhutani V Unit Bangka	16.730,00	SK.377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009
2	Kabupaten Bangka	PT. Istani Kawi Kencana	13.440,00	SK.136/Menhut-II/2010 tanggal 25 Maret 2010
3	Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	PT. Bangkanesia	51.205,00	SK.639/Menhut-II/2009 tanggal 9 Oktober 2009
4	Kabupaten Bangka dan Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera	30.773,00	SK.208/Menhut-II/2011 tanggal 12 April 2011
5	Kabupaten Belitung Timur	PT. Indo Sukses Lestari Makmur	10.025,19	SK.114/Menlhk/Setjen/PLA.2/2/2019 tanggal 4 Februari 2019
6	Kabupaten Belitung Timur	PT. Andalan Karya Pertiwi	29.140,00	SK.8/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2015 tanggal 19 Agustus 2015
7	Kabupaten Bangka Selatan	PT. Hutan Lestari Raya	31.630,00	19/1/IUPPHK-HI/PMDN/2017 tanggal 20 Desember 2017
8	Kabupaten Bangka Tengah	PT. Agrindo Persada Lestari	26.259,00	SK.338/Menhut-II/2014 tanggal 27 Maret 2014
9	Kabupaten Bangka Barat	PT. Bangun Rimba Sejahtera	57.235,00	SK.336/Menhut-II/2013 tanggal 16 Mei 2013 jo SK.639/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018
10	Kabupaten Bangka	KTH Panca Indah Lestari	11,50	SK.2040/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017
11	Kabupaten Bangka	KTH Panca Lestari	109,10	SK.2039/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017
12	Kabupaten Bangka	KTH Plasma Nutfah	29,00	SK.688/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/2/2018 tanggal 20 Februari 2018

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
13	Kabupaten Bangka	KTH Panca Lestari III	405,00	Proses tanggal 9 September 2019
14	Kabupaten Bangka	KTH Deniang Lestari	341,00	Proses tanggal 28 September 2019
15	Kabupaten Belitung	KTH Padang Jaya	106,78	522/803/DPK/2013 tanggal 4 Oktober 2013
16	Kabupaten Belitung	KTH Sumber Rezeki	33,71	SK.4006/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 25 Juli 2017
17	Kabupaten Belitung	Kan Jaya	31,20	404/SK/DTPHP2KKP tanggal 22 April 2014
18	Kabupaten Belitung	KTH Berutak Angus	46,80	SK.4004/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 25 Juli 2017
19	Kabupaten Belitung	Akasia Mangium	84,50	403/SK/DTPHP2KKP tanggal 22 April 2014
20	Kabupaten Belitung	KTH Simpor Lestari	80,87	SK.4003/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 25 Juli 2017
21	Kabupaten Belitung	Gamalina	87,10	406/SK/DTPHP2KKP tanggal 22 April 2014
22	Kabupaten Belitung	KTH Nyurok Jaya	46,94	SK.4005/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 25 Juli 2017
23	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Aik Kemang	418,00	SK.7060/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 29 Desember 2017
24	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Sengkelik	320,00	SK.7059/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 29 Desember 2017
25	Kabupaten Belitung	KTH Lestari	81,00	SK.768/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/2/2018 tanggal 19 Februari 2018
26	Kabupaten Belitung	Kelompok Tani Hutan Tunas Mekar	28,00	SK.7058/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 tanggal 18 Desember 2017

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
27	Kabupaten Belitung	KTH Maju Jaya	53,00	SK.770/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/2/2018 tanggal 19 Februari 2018
28	Kabupaten Belitung	KTH Lestari	149,00	SK. 5631/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/9/2018 tanggal 4 September 2018
29	Kabupaten Belitung	KTH Bukit Harapan	27,00	SK.767/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/2/2018 tanggal 19 Februari 2018
30	Kabupaten Belitung	KTH Maju Bersama	420,00	Proses tanggal 20 Agustus 2018
31	Kabupaten Belitung	KTH Libut Jaya	127,26	522/536.a/DPK/2013 tanggal 4 Juli 2013
32	Kabupaten Belitung	KTH Tunas Jaya	24,94	522/802/DPK/2013 tanggal 4 Oktober 2013
33	Kabupaten Belitung	Mahoni	109,50	402/SK/DTPHP2KKP tanggal 22 April 2014
34	Kabupaten Belitung	Sengon	74,50	405/SK/DTPHP2KKP tanggal 22 April 2014
35	Kabupaten Belitung	Gapoktan Kembiri Lestari	837,00	SK. 7114/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tanggal 10 Oktober 2018
36	Kabupaten Belitung	KTH Mekar Jaya	244,00	SK. 6841/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018
37	Kabupaten Bangka Barat	KSU Sekar Biru Sejahtera	308,84	SK.2043/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
38	Kabupaten Bangka Barat	Eva Afriani (KTH Air Belo I)	14,00	188.45/392/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
39	Kabupaten Bangka Barat	KSU Penyambung Permai	90,27	SK.2044/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017
40	Kabupaten Bangka Barat	Awin (KTH Air Belo I)	1,11	188.45/391/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
41	Kabupaten Bangka Barat	Muszul (KTH Air Belo I)	1,07	188.45/390/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
42	Kabupaten Bangka Barat	Hariyadi (KTH Air Belo I)	2,50	188.45/385/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
43	Kabupaten Bangka Barat	Asmadi (KTH Air Belo I)	1,17	188.45/383/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
44	Kabupaten Bangka Barat	Amadin (KTH Air Belo I)	2,30	188.45/382/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
45	Kabupaten Bangka Barat	Agus (KTH Air Belo I)	0,80	188.45/381/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
46	Kabupaten Bangka Barat	Nasran (KTH Air Belo I)	5,70	188.45/380/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
47	Kabupaten Bangka Barat	Samin (KTH Air Belo I)	1,90	188.45/379/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
48	Kabupaten Bangka Barat	Waris (KTH Air Belo I)	0,30	188.45/378/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
49	Kabupaten Bangka Barat	Gapar (KTH Air Belo I)	0,78	188.45/375/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
50	Kabupaten Bangka Barat	Kimin (KTH Air Belo I)	2,70	188.45/373/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
51	Kabupaten Bangka Barat	Jamisa (KTH Air Belo I)	0,82	188.45/372/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
52	Kabupaten Bangka Barat	Amin (KTH Air Belo I)	3,30	188.45/371/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
53	Kabupaten Bangka Barat	Zulhaidir (KTH Air Belo I)	1,52	188.45/370/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
54	Kabupaten Bangka Barat	Rima Melati (KTH Air Belo I)	8,00	188.45/368/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
55	Kabupaten Bangka Barat	Daini (KTH Air Belo I)	1,80	188.45/367/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
56	Kabupaten Bangka Barat	Jais (KTH Air Belo I)	3,75	188.45/366/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
57	Kabupaten Bangka Barat	Kud (KTH Air Belo I)	0,69	188.45/365/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
58	Kabupaten Bangka Barat	Sakirin (KTH Air Belo I)	1,00	188.45/364/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
59	Kabupaten Bangka Barat	Sarli (KTH Air Belo I)	1,38	188.45/363/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
60	Kabupaten Bangka Barat	Salimin Tandan (KTH Air Belo I)	1,28	188.45/361/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
61	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung II	50,15	188.45/205/2.02.02/2014 tanggal 15 April 2014
62	Kabupaten Bangka Barat	KTH Mayang I	28,24	SK.2045/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tanggal 11 April 2017
63	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung III	45,62	188.45/462/2.02.02/2014 tanggal 28 Oktober 2014
64	Kabupaten Bangka Barat	Dona (KTH Air Belo I)	0,95	188.45/377/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
65	Kabupaten Bangka Barat	Saldin (KTH Air Belo I)	2,50	188.45/389/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
66	Kabupaten Bangka Barat	Rusduan (KTH Air Belo I)	13,80	188.45/388/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
67	Kabupaten Bangka Barat	Jufri (KTH Air Belo I)	1,99	188.45/387/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
68	Kabupaten Bangka Barat	Abil (KTH Air Belo I)	2,00	188.45/386/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
69	Kabupaten Bangka Barat	Sahrul Umar (KTH Air Belo I)	0,53	188.45/384/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
70	Kabupaten Bangka Barat	Arli (KTH Air Belo I)	1,06	188.45/374/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
71	Kabupaten Bangka Barat	Panudin (KTH Air Belo I)	1,21	188.45/369/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
72	Kabupaten Bangka Barat	Sadimin Dul Hadi (KTH Air Belo I)	4,00	188.45/362/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
73	Kabupaten Bangka Barat	Falen Atma Sagita (KTH Air Belo I)	2,15	188.45/376/2.02.01/2012 tanggal 26 September 2012
74	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Belo II	37,10	188.45/207/2.02.02/2014 tanggal 15 April 2014
75	Kabupaten Bangka Barat	KTH Air Menduyung I	49,98	188.45/206/2.02.02/2014 tanggal 15 April 2014
76	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Beruang Abadi	142,02	SK. 3741/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017
77	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya	3,29	188.45/622/DPK/2015 tanggal 25 Agustus 2015
78	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya II	9,75	SK. 3745/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017
79	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Tunas Harapan	18,80	188.45/621/DPK/2015 tanggal 25 Agustus 2015
80	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Selan Jaya II	16,51	SK. 3746/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017
81	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Bejunjung	14,74	SK. 3742/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
82	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Kawa Bae	86,41	SK. 3743/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017
83	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Laju Mandiri	27,33	SK. 3744/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017
84	Kabupaten Bangka Tengah	KTH Katis Maju	27,33	SK. 3744/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/6/2017 tanggal 20 Juli 2017
85	Kabupaten Bangka Selatan	KSUM Bina Pribumi Permai	2.045,00	SK.688/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/2/2018 tanggal 20 Maret 2018
86	Kabupaten Bangka Selatan	KTH Bukit Kabung	2.405,00	SK.1204/MENLHKPSKL/PKPS/PSL.0/3/2018 tanggal 20 Maret 2018
87	Kabupaten Belitung Timur	KTH Sri Tunas	182,38	SK.3934/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 19 Juli 2017
88	Kabupaten Belitung Timur	Fengky F (Bersatu)	2,50	503/150/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
89	Kabupaten Belitung Timur	KTH Setia Bakti	267,27	SK.3935/MenlhkPSKL/PKPS/PSL.0/7/2017 tanggal 17 Juli 2017
90	Kabupaten Belitung Timur	Fredy (Bersatu)	0,50	503/151/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013
91	Kabupaten Belitung Timur	Sofriadi (Bersatu)	2,80	503/152/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013
92	Kabupaten Belitung Timur	Zuhardin (Bersatu)	1,50	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
93	Kabupaten Belitung Timur	Juhandri	3,30	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
94	Kabupaten Belitung Timur	Sri Wahyuni	3,30	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
95	Kabupaten Belitung Timur	Basirin	5,20	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
96	Kabupaten Belitung Timur	Trisnal	4,90	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
97	Kabupaten Belitung Timur	Amri	3,30	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
98	Kabupaten Belitung Timur	Arjuno	4,10	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
99	Kabupaten Belitung Timur	Zani Hasiman	3,70	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
100	Kabupaten Belitung Timur	KTH Selindang Mitra Mandiri	20,20	503/001/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 6 Februari 2014
101	Kabupaten Belitung Timur	KTH Bebak Lamak	18,00	503/002/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 6 Februari 2014
102	Kabupaten Belitung Timur	KTH Kuatjin Makmur	33,40	503/003/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 6 Februari 2014
103	Kabupaten Belitung Timur	KTH Lingkup Ilir	21,10	503/007/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 21 Februari 2014

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
104	Kabupaten Belitung Timur	KTH Pemuda Jaya I	15,89	503/011/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 20 Juni 2014
105	Kabupaten Belitung Timur	Supran (KTH Karya Luhur Lestari)	2,50	503/ 038/ IUPHHK-HTR/ BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
106	Kabupaten Belitung Timur	Kamsul (Senyubuk I)	0,30	503/091/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
107	Kabupaten Belitung Timur	Eddy Harun (KTH Aik Kayu Kubor)	4,90	503/068/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 3 April 2013
108	Kabupaten Belitung Timur	Cuaidi (Segantang Lestari)	2,30	503/081/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
109	Kabupaten Belitung Timur	Teli Melinda (KTH Air Ketiau)	3,90	503/074/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
110	Kabupaten Belitung Timur	Darsono	0,36	503/013/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
111	Kabupaten Belitung Timur	Satia Raharja	4,11	503/001/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
112	Kabupaten Belitung Timur	Aridi (KTH Karya Luhur Lestari)	1,00	503/ 029/IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013 tanggal 3 April 2013
113	Kabupaten Belitung Timur	Rahmadani Saputra	3,42	503/005/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
114	Kabupaten Belitung Timur	Buhri	3,95	503/007/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
115	Kabupaten Belitung Timur	Rohani	3,81	503/008/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
116	Kabupaten Belitung Timur	Zulkarnaen	3,23	503/010/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
117	Kabupaten Belitung Timur	Irwandi	3,64	503/009/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
118	Kabupaten Belitung Timur	Leo Sulastrio	2,59	503/018/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
119	Kabupaten Belitung Timur	Basri	0,80	503/019/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
120	Kabupaten Belitung Timur	Hasnuri	1,69	503/017/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
121	Kabupaten Belitung Timur	Rustadi	0,33	503/020/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
122	Kabupaten Belitung Timur	Narjo	7,11	503/022/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
123	Kabupaten Belitung Timur	Suyudi (KTH Aik Kubing)	3,00	503/023/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
124	Kabupaten Belitung Timur	Karyadi (KTH Aik Kubing)	6,70	503/005/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
125	Kabupaten Belitung Timur	Marzuli (KTH Aik Kubing)	3,70	503/006/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
126	Kabupaten Belitung Timur	Rosdianto (KTH Aik Kubing)	2,70	503/008/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
127	Kabupaten Belitung Timur	Juriandi (KTH Aik Kubing)	0,30	503/009/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
128	Kabupaten Belitung Timur	Anto	2,13	503/025/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
129	Kabupaten Belitung Timur	Juherman (KTH Aik Kubing)	2,20	503/011/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
130	Kabupaten Belitung Timur	Sobli Sapa (KTH Aik Kubing)	1,20	503/018/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
131	Kabupaten Belitung Timur	Yaman (KTH Aik Kubing)	3,60	503/019/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
132	Kabupaten Belitung Timur	Supardi (KTH Aik Kubing)	1,70	503/014/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
133	Kabupaten Belitung Timur	Hamija (KTH Aik Kubing)	7,20	503/020/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
134	Kabupaten Belitung Timur	Sarwandi (KTH Anugrah Alam)	0,80	503/047/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
135	Kabupaten Belitung Timur	Muslin (KTH Aik Kubing)	5,10	503/021/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
136	Kabupaten Belitung Timur	Syurman (Senyubuk II)	0,70	503/018/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
137	Kabupaten Belitung Timur	Zulkarnaen (KTH Anugrah Alam)	2,10	503/057/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
138	Kabupaten Belitung Timur	Ahidin Said (KTH Aik Kubing)	2,30	503/022/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
139	Kabupaten Belitung Timur	Herwanto (KTH Karya Luhur Lestari)	5,00	503/024/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
140	Kabupaten Belitung Timur	Hikardi (KTH Karya Luhur Lestari)	1,50	503/025/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
141	Kabupaten Belitung Timur	Syahriandi Ali (KTH Karya Luhur Lestari)	2,20	503/030/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
142	Kabupaten Belitung Timur	KTH Pemuda Jaya II	12,86	503/012/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 20 Juni 2014
143	Kabupaten Belitung Timur	Atrisno (KTH Karya Luhur Lestari)	2,20	503/032/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
144	Kabupaten Belitung Timur	KTH Lingkup Ulu	55,70	503/006/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 21 Februari 2014
145	Kabupaten Belitung Timur	Ahrozi (KTH Karya Luhur Lestari)	1,70	503/033/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
146	Kabupaten Belitung Timur	KTH Lembah Menggarun	66,06	503/009/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 21 Februari 2014
147	Kabupaten Belitung Timur	Mulyadi (Maju Makmur Lestari)	1,10	503/139/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
148	Kabupaten Belitung Timur	Darmawan (KTH Karya Luhur Lestari)	0,50	503/ 034/IUPHHK-HTR/ BPMPT-BELTIM/ IV/ 2013 tanggal 3 April 2013
149	Kabupaten Belitung Timur	Sanusi	4,00	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
150	Kabupaten Belitung Timur	Asnawi (KTH Karya Luhur Lestari)	1,70	503/036/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
151	Kabupaten Belitung Timur	Edi Sopyan	4,40	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
152	Kabupaten Belitung Timur	Yandi (Maju Makmur Lestari)	0,90	503/145/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
153	Kabupaten Belitung Timur	Hartoni (KTH Karya Luhur Lestari)	1,20	503/039/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
154	Kabupaten Belitung Timur	Yusman (KTH Karya Luhur Lestari)	1,90	503/040/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
155	Kabupaten Belitung Timur	Sutrisno (KTH Karya Luhur Lestari)	2,00	503/041/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
156	Kabupaten Belitung Timur	Wasri (KTH Karya Luhur Lestari)	1,60	503/042/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
157	Kabupaten Belitung Timur	Agung Budi Laksono (KTH Karya Luhur Lestari)	0,90	503/045/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
158	Kabupaten Belitung Timur	Rohandi	3,98	503/002/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
159	Kabupaten Belitung Timur	Tami	0,26	503/003/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
160	Kabupaten Belitung Timur	Arpendi	0,71	503/004/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
161	Kabupaten Belitung Timur	Musliadi	1,49	503/006/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
162	Kabupaten Belitung Timur	Jahatim	3,43	503/011/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
163	Kabupaten Belitung Timur	Timan	2,83	503/012/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
164	Kabupaten Belitung Timur	Sanan (KTH Anugrah Alam)	5,70	503/048/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
165	Kabupaten Belitung Timur	Indratno	1,05	503/014/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
166	Kabupaten Belitung Timur	Agus Setiawan	0,09	503/015/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
167	Kabupaten Belitung Timur	Rosmidi	2,13	503/016/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
168	Kabupaten Belitung Timur	Tri Sutrisno	2,01	503/021/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
169	Kabupaten Belitung Timur	Jemahi	5,73	503/023/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
170	Kabupaten Belitung Timur	Amran	1,76	503/024/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
171	Kabupaten Belitung Timur	Supardi (KTH Anugrah Alam)	0,60	503/051/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
172	Kabupaten Belitung Timur	Suriyalan	2,30	503/026/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
173	Kabupaten Belitung Timur	Herman Sawiran	2,49	503/027/IUPHHK-HTR/BPPTBELTIM/IX/2012 tanggal 7 September 2012
174	Kabupaten Belitung Timur	Hariadi (KTH Aik Kubing)	1,60	503/001/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
175	Kabupaten Belitung Timur	Sudarjo (KTH Aik Kubing)	1,40	503/002/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
176	Kabupaten Belitung Timur	Hartanto (KTH Aik Kubing)	3,20	503/003/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
177	Kabupaten Belitung Timur	Dewi (KTH Aik Kubing)	0,60	503/004/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
178	Kabupaten Belitung Timur	Jemaer Jahan (KTH Aik Kubing)	2,60	503/007/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
179	Kabupaten Belitung Timur	Johandi (KTH Anugrah Alam)	1,20	503/053/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
180	Kabupaten Belitung Timur	Junaidi Jenamin (KTH Aik Kubing)	1,20	503/010/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
181	Kabupaten Belitung Timur	Ridwan (KTH Aik Kubing)	3,20	503/012/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
182	Kabupaten Belitung Timur	Karyandi (KTH Aik Kubing)	0,60	503/013/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
183	Kabupaten Belitung Timur	Sumadi (KTH Aik Kubing)	0,80	503/015/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
184	Kabupaten Belitung Timur	Ardia Yansah (KTH Aik Kubing)	1,00	503/016/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
185	Kabupaten Belitung Timur	Suparjo (KTH Aik Kubing)	0,80	503/017/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
186	Kabupaten Belitung Timur	Samsuli (KTH Anugrah Alam)	4,20	503/054/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
187	Kabupaten Belitung Timur	Hisno (KTH Karya Luhur Lestari)	3,30	503/026/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
188	Kabupaten Belitung Timur	Espandi (KTH Karya Luhur Lestari)	1,70	503/027/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
189	Kabupaten Belitung Timur	Arjani (KTH Karya Luhur Lestari)	2,60	503/028/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
190	Kabupaten Belitung Timur	Zuhirman (KTH Karya Luhur Lestari)	2,80	503/031/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
191	Kabupaten Belitung Timur	Hendri Gunawan (KTH Karya Luhur Lestari)	0,60	503/035/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
192	Kabupaten Belitung Timur	Belihan (KTH Karya Luhur Lestari)	3,70	503/037/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
193	Kabupaten Belitung Timur	Elwita (KTH Anugrah Alam)	3,00	503/055/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
194	Kabupaten Belitung Timur	Donny (KTH Karya Luhur Lestari)	1,40	503/043/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
195	Kabupaten Belitung Timur	Saharoni (KTH Karya Luhur Lestari)	1,50	503/044/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
196	Kabupaten Belitung Timur	Hardiyanto (KTH Karya Luhur Lestari	1,60	503/046/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
197	Kabupaten Belitung Timur	Bahara (KTH Anugrah Alam)	5,30	503/049/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
198	Kabupaten Belitung Timur	Bahasa (KTH Anugrah Alam)	1,40	503/050/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
199	Kabupaten Belitung Timur	Juriadi (KTH Anugrah Alam)	2,50	503/052/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
200	Kabupaten Belitung Timur	Yayat (KTH Anugrah Alam)	4,60	503/056/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
201	Kabupaten Belitung Timur	Muhammad DS (KTH Aik Kayu Kubor)	5,00	503/058/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
202	Kabupaten Belitung Timur	Siswadi (KTH Aik Kayu Kubor)	5,00	503/059/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
203	Kabupaten Belitung Timur	Jupri (KTH Aik Kayu Kubor)	7,70	503/062/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
204	Kabupaten Belitung Timur	Kadri Umar (KTH Aik Kayu Kubor)	5,10	503/064/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
205	Kabupaten Belitung Timur	Junaidi S (KTH Aik Kayu Kubor)	7,80	503/065/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
206	Kabupaten Belitung Timur	Susino (KTH Aik Kayu Kubor)	5,00	503/066/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
207	Kabupaten Belitung Timur	Zulliadi (KTH Aik Kubor)	5,00	503/067/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
208	Kabupaten Belitung Timur	Samsani (KTH Aik Kayu Kubor)	5,10	503/060/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
209	Kabupaten Belitung Timur	Sadri Sani (KTH Air Ketiau)	4,90	503/070/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
210	Kabupaten Belitung Timur	Sumini (KTH Air Ketiau)	1,10	503/071/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
211	Kabupaten Belitung Timur	Muhaizir (KTH Air Ketiau)	0,90	503/072/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
212	Kabupaten Belitung Timur	Sadikin (KTH Air Ketiau)	2,90	503/076/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
213	Kabupaten Belitung Timur	Dalima Dulhamat (KTH Air Ketiau)	0,90	503/079/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
214	Kabupaten Belitung Timur	Asri (Segantang Lestari)	1,60	503/080/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
215	Kabupaten Belitung Timur	Marzono (KTH Aik Kayu Kubor)	5,00	503/061/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
216	Kabupaten Belitung Timur	Poniman (Segantang Lestari)	1,90	503/084/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
217	Kabupaten Belitung Timur	Edy Pratama (Senyubuk I)	1,10	503/089/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
218	Kabupaten Belitung Timur	Fatimah (Senyubuk I)	1,80	503/090/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
219	Kabupaten Belitung Timur	Rusman (Senyubuk I)	1,60	503/095/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
220	Kabupaten Belitung Timur	Sugianur (Senyubuk I)	0,80	503/097/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
221	Kabupaten Belitung Timur	Sumardi M (Senyubuk I)	0,30	503/098/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
222	Kabupaten Belitung Timur	Pirdaus YZ (KTH Aik Kayu Kubor)	5,00	503/063/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
223	Kabupaten Belitung Timur	Suryadin (Senyubuk II)	3,00	503/103/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
224	Kabupaten Belitung Timur	Rizani (Senyubuk II)	1,20	503/104/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
225	Kabupaten Belitung Timur	Idwar (Senyubuk II)	0,10	503/105/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
226	Kabupaten Belitung Timur	Firman Saputra (Senyubuk II)	1,70	503/107/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
227	Kabupaten Belitung Timur	Haidir (Senyubuk II)	0,20	503/108/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
228	Kabupaten Belitung Timur	Darmawan (Senyubuk II)	0,70	503/110/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
229	Kabupaten Belitung Timur	Suherman Salam (KTH Aik Kayu Kubor)	5,00	503/069/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
230	Kabupaten Belitung Timur	Dedy (Jangkar Mandiri)	2,00	503/113/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
231	Kabupaten Belitung Timur	Haryono (Jangkar Mandiri)	2,10	503/115/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
232	Kabupaten Belitung Timur	Iryanto (Jangkar Mandiri)	2,30	503/117/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
233	Kabupaten Belitung Timur	Maryadi (Jangkar Mandiri)	2,10	503/118/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
234	Kabupaten Belitung Timur	Harni (Rimba Lestari)	3,00	503/122/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
235	Kabupaten Belitung Timur	Marhazan (Rimba Lestari)	3,00	503/123/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
236	Kabupaten Belitung Timur	Maryadi (Rimba Lestari)	3,00	503/124/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
237	Kabupaten Belitung Timur	Maryono (KTH Air Ketiau)	3,50	503/073/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
238	Kabupaten Belitung Timur	Solihin (Rimba Lestari)	3,00	503/127/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 3 April 2013
239	Kabupaten Belitung Timur	Karidi (Maju Makmur Lestari)	2,90	503/134/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 3 April 2013
240	Kabupaten Belitung Timur	Megiyarto (Maju Makmur Lestari)	0,50	503/137/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
241	Kabupaten Belitung Timur	Salman (Maju Makmur Lestari)	1,70	503/141/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
242	Kabupaten Belitung Timur	Wedi Darsono (Maju Makmur Lestari)	1,50	503/143/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
243	Kabupaten Belitung Timur	Yulianto (Maju Makmur Lestari)	1,90	503/144/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
244	Kabupaten Belitung Timur	Alek (KTH Air Ketiau)	3,20	503/075/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
245	Kabupaten Belitung Timur	Subandi (Bersatu)	1,30	503/148/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
246	Kabupaten Belitung Timur	Irmanto	5,20	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
247	Kabupaten Belitung Timur	Rianto	6,10	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
248	Kabupaten Belitung Timur	Adi	3,10	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
249	Kabupaten Belitung Timur	Salmiati	3,10	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
250	Kabupaten Belitung Timur	Erwan	3,80	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
251	Kabupaten Belitung Timur	Malori (KTH Air Ketiau)	2,10	503/077/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/IV/2013 tanggal 3 April 2013
252	Kabupaten Belitung Timur	Saparudin	6,40	503/153/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
253	Kabupaten Belitung Timur	KTH Aik Tukal	33,80	503/004/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 6 Februari 2014
254	Kabupaten Belitung Timur	KTH Kurun Jaya	33,10	503/005/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 6 Februari 2014
255	Kabupaten Belitung Timur	KTH Geresik Jaya	64,10	503/008/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 20 Juni 2014
256	Kabupaten Belitung Timur	KTH Jawa I	15,17	503/014/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 20 Juni 2014
257	Kabupaten Belitung Timur	KTH Jawa II	17,05	503/013/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 20 Juni 2014

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
258	Kabupaten Belitung Timur	Sobri (Rimba Lestari)	2,90	503/125/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
259	Kabupaten Belitung Timur	KTH Stoven Muda	32,08	503/010/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/2014 tanggal 20 Juni 2014
260	Kabupaten Belitung Timur	Maidi (KTH Air Ketiau)	2,10	503/078/IUPHHK-HTR/BPMPT-BELTIM IV/2013 tanggal 3 April 2013
261	Kabupaten Belitung Timur	Edy Saputra (Segantang Lestari)	1,70	503/082/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
262	Kabupaten Belitung Timur	Kadarusmadi (Segantang Lestari)	2,70	503/083/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
263	Kabupaten Belitung Timur	Ramli (Segantang Lestari)	2,30	503/085/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
264	Kabupaten Belitung Timur	Suwandi (Segantang Lestari)	1,90	503/086/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
265	Kabupaten Belitung Timur	Yetno (Segantang Lestari)	2,00	503/087/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
266	Kabupaten Belitung Timur	Asrin (Senyubuk I)	0,30	503/088/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
267	Kabupaten Belitung Timur	Kuncoro Gairudin (Senyubuk I)	2,00	503/092/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
268	Kabupaten Belitung Timur	Lupito (Senyubuk I)	0,40	503/093IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
269	Kabupaten Belitung Timur	Maswan (Senyubuk I)	0,70	503/094/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
270	Kabupaten Belitung Timur	Selani (Senyubuk I)	0,80	503/096/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
271	Kabupaten Belitung Timur	Yeyensi (Senyubuk I)	0,50	503/099/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
272	Kabupaten Belitung Timur	Sukardi HJ (Senyubuk II)	1,20	503/100/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
273	Kabupaten Belitung Timur	Yuli Supratno (Senyubuk II)	2,10	503/101/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
274	Kabupaten Belitung Timur	Edi Sopian (Senyubuk II)	1,20	503/109/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
275	Kabupaten Belitung Timur	Abidin Duahid (Senyubuk II)	0,60	503/111/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
276	Kabupaten Belitung Timur	Farto (Jangkar Mandiri)	1,80	503/114/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
277	Kabupaten Belitung Timur	Irfandi (Jangkar Mandiri)	1,90	503/116/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
278	Kabupaten Belitung Timur	Sukri Tutok (Jangkar Mandiri)	1,70	503/119/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
279	Kabupaten Belitung Timur	Yusri (Jangkar Mandiri)	2,30	503/120/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
280	Kabupaten Belitung Timur	Andri (Rimba Lestari)	2,80	503/121/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
281	Kabupaten Belitung Timur	Sandri (Rimba Lestari)	2,90	503/126/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
282	Kabupaten Belitung Timur	Surmiwati (Rimba Lestari)	2,90	503/128/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
283	Kabupaten Belitung Timur	Abdul Hasyim (Maju Makmur Lestari)	1,00	503/129/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
284	Kabupaten Belitung Timur	Arie (Jangkar Mandiri)	2,50	503/112/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
285	Kabupaten Belitung Timur	Aris Dinata (Maju Makmur Lestari)	1,10	503/130/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
286	Kabupaten Belitung Timur	Darwin (Maju Makmur Lestari0	0,40	503/131/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
287	Kabupaten Belitung Timur	Fredy Utoyo (Maju Makmur Lestari)	3,00	503/132/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
288	Kabupaten Belitung Timur	Hanitun (Maju Makmur Lestari)	1,30	503/133/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
289	Kabupaten Belitung Timur	Kusmawan (Maju Makmur Lestari)	0,90	503/135/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
290	Kabupaten Belitung Timur	Kerli (Maju Makmur Lestari)	1,30	503/136/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

No.	Provinsi/Kab/Kota	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
291	Kabupaten Belitung Timur	Muhari (Maju Makmur Lestari)	1,30	503/138/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
292	Kabupaten Belitung Timur	Mislam (Maju Makmur Lestari)	1,30	503/140/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
293	Kabupaten Belitung Timur	Haryanto Supendi (Senyubuk II)	0,70	503/106/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
294	Kabupaten Belitung Timur	Suriono (Maju Makmur Lestari)	0,50	503/142/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
295	Kabupaten Belitung Timur	Yukasiwi (Maju Makmur Lestari)	1,20	503/146/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
296	Kabupaten Belitung Timur	Ardawi (Bersatu)	2,74	503/147/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013
297	Kabupaten Belitung Timur	Surian (Bersatu)	2,00	503/149/IUPHHK-HTR/BPMPTBELTIM/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

Sumber :
1. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020
2. Buku Basis Data Geospasial 2019

Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2019

No.	Kab/Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	Bangka	NA	NA	NA
2	Bangka Tengah	NA	NA	NA
3	Bangka Selatan	NA	NA	NA
4	Bangka Barat	NA	NA	NA
5	Belitung	NA	NA	NA
6	Belitung Timur	NA	NA	NA
7	Pangkalpinang	NA	NA	NA

Sumber : DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Keterangan : NA = Tidak ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2020

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
1	2	3	4
1	Labi-labi/Bulus	Seluruh bagian	Apendix II
2	Kura Kura Ambon	Seluruh bagian	Apendix II
3	Ular Gendang Merah	Kulit	Apendix II
4	Ular Sanca Kembang	Kulit	Apendix II
5	Biawak Air	Kulit	Apendix II

Sumber : Balai Konservasi Sumbar Daya Alam Resort Bangka, 2020

Tabel 21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Keterangan: Tidak ada data Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Sumber: -

Tabel-22 Kualitas Air Sumur

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Temperatur (ºC)	pH	Kekeruhan	Warna (TCU)	Rasa	Bau
1	Kabupaten Belitung Timur	20/02/2020	-2,96905	108,1621	29,7	5,73	0,6	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau
2	Kabupaten Belitung	20/02/2020	-2,73246	107,6288	28,8	6,44	0,4	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau
3	Kabupaten Bangka	11/3/2020	-2,05381	106,1001	28,6	5,83	0,75	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau
4	Kabupaten Bangka Barat	12/3/2020	-2,05456	105,1759	28,9	4,23	0,36	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau
5	Kabupaten Bangka Tengah	12/3/2020	-2,48992	106,4124	27,2	6,07	1,64	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau
6	Kota Pangkalpinang	13/03/2020	-2,13793	106,1548	30,7	4,86	0,58	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau
7	Kabupaten Bangka Selatan	17/03/2020	-3,01258	106,4506	27,4	5,87	0,34	< 25.0	Tidak Berasa	Tidak Berbau

Keterangan: tanda - menunjukkan bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

Tabel-22 Kualitas Air Sumur

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO 3 sebagai N (mg/L)	NH3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)
1	Kabupaten Belitung Timur	20/02/2020	68,6	1,71	3,69	4,03	< 0.0316	0,735	< 0.0172	0	0	-	-
2	Kabupaten Belitung	20/02/2020	229	1,91	4,18	4,13	0,15	0,665	< 0.0172	0	0	-	-
3	Kabupaten Bangka	11/3/2020	108	2,01	4,33	4,23	< 0.0316	1,02	0,0322	0	0	-	-
4	Kabupaten Bangka Barat	12/3/2020	197	2,11	5,48	4,23	< 0.0316	0,655	0,815	0	0	-	-
5	Kabupaten Bangka Tengah	12/3/2020	184	1,91	3,9	4,23	< 0.0316	0,78	0,128	0	0	-	-
6	Kota Pangkalpinang	13/03/2020	110	2,32	3,11	4,13	< 0.0316	0,66	0,71	0	0	-	-

Tabel-22 Kualitas Air Sumur

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Khlorida (mg/l)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belerang sebagai H2S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq /L)	Gross-B (Bq /L)
1	Kabupaten Belitung Timur	20/02/2020	0,75	< 0.002	-	0,0101	<3.18	< 0.02	-	< 1.80	18,9	-	-
2	Kabupaten Belitung	20/02/2020	17,5	0,003	-	0,122	< 3.18	0,02	-	11	430	-	-
3	Kabupaten Bangka	11/3/2020	0,5	0,0075	-	0,0124	15	< 0.02	-	22	24	-	-
4	Kabupaten Bangka Barat	12/3/2020	31,2	0,002	-	0,0213	35,9	< 0.02	-	< 1.80	2	-	-
5	Kabupaten Bangka Tengah	12/3/2020	41	0,0035	-	0,00786	52	< 0.02	-	14	17	-	-
6	Kota Pangkalpinang	13/03/2020	55,7	< 0.002	-	0,00537	20,4	< 0.02	-	< 1.8	< 1.8	-	-
7	Kabupaten Bangka Selatan	17/03/2020	16,5	< 0.002	-	0,0178	31,3	< 0.02	-	15	22	-	-

Keterangan: tanda - menunjukkan bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

Tabel-22 Kualitas Air Sumur

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)
1	Kabupaten Belitung Timur	20/02/2020	-	< 0.00456	-	< 0.0164	0,166	< 0.0250	0,0352	-	0,0275
2	Kabupaten Belitung	20/02/2020	-	< 0.00456	-	< 0.0164	0,136	< 0.0250	0,0331	-	< 0.00676
3	Kabupaten Bangka	11/3/2020	-	< 0.00456	-	< 0.0164	< 0.0113	< 0.0250	0,0522	-	< 0.00676
4	Kabupaten Bangka Barat	12/3/2020	-	< 0.00456	-	< 0.0164	0,166	< 0.0250	< 0.0197	-	< 0.00676
5	Kabupaten Bangka Tengah	12/3/2020	-	< 0.00456	-	< 0.0164	0,0894	< 0.0250	< 0.0197	-	0,0087
6	Kota Pangkalpinang	13/03/2020	-	< 0.00456	-	0,0174	0,0518	< 0.0250	< 0.0197	-	< 0.00676
7	Kabupaten Bangka Selatan	17/03/2020	-	< 0.00457	-	< 0.0164	0,0165	< 0.0250	< 0.0197	-	< 0.00676

Keterangan: tanda - menunjukkan bahwa tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

Tabel-23. Kualitas Air Laut
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No	Nama Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)
			Lintang	Bujur						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,9118	106,2079	Pantai Rebo	N/A	N/A	N/A	N/A	70,4
2	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,8468	106,1506	Batu Bedon	N/A	N/A	N/A	N/A	75,1
3	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,8045	106,1385	Pantai Parai	N/A	N/A	N/A	N/A	73,1
4	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,7472	106,0817	Bedukang	N/A	N/A	N/A	N/A	73,8
5	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,6681	106,0423	Pantai Tuing	N/A	N/A	N/A	N/A	75,9
6	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,5435	105,6546	Romodong	N/A	N/A	N/A	N/A	76,1
7	Perairan Pulau Bangka	N/A	-1,6122	105,6837	Pelabuhan Belinyu	N/A	N/A	N/A	N/A	74,4
8	Perairan Pulau Bangka	N/A	-2,1406	106,2045	Muara Pasir Padi	N/A	N/A	N/A	N/A	77,8
9	Perairan Pulau Bangka	N/A	-2,0925	106,1893	Tanjung Bunga	N/A	N/A	N/A	N/A	78,7
10	Perairan Pulau Bangka	N/A	-2,0748	106,2100	Air Anyer	N/A	N/A	N/A	N/A	74,1

Keterangan : -

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)	pH	Salinitas (‰)	DO(mg/l)	BOD5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)	PO4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l	PCB (mg/l)
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,6	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,3	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,4	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,1	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,9	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,3	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,014	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9,1	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,6	N/A	N/A	0,009	N/A	N/A	0,05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan :
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2019

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Stasiun Meteorologi Depati Amir (Pangkalpinang)	160,8	600,8	205,4	257,7	180,6	101,2	68,9	15,4	20	52,5	43,9	366,3
2	Stasiun Klimatologi Koba (Bangka Tengah)	170,7	310,1	160,6	240,6	305,0	185,6	89,4	105,0	44,1	18,5	18,5	140,7
3	Stasiun Meteorologi H.A.S Hanandjoeddin (Belitung)	589	504	93	810	651	540	124	0	150	341	420	465

Keterangan :

Sumber : UPT BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang, 2020

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Provinsi/Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2018

No.	Kabupaten/Kota	Mata air*	Ledeng/PAM	Sumur**	Sungai***	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten Bangka	508	2.088	21.955	77	0	48.776	0
2	Kabupaten Bangka Tengah	417	68	11.361	197	755	29.470	0
3	Kabupaten Bangka Barat	951	374	23.133	276	0	24.427	0
4	Kabupaten Bangka Selatan	1.223	862	13.627	431	728	31.243	0
5	Kabupaten Belitung	560	0	7.369	0	0	41.831	0
6	Kabupaten Belitung Timur	497	341	4.372	263	460	29.024	0
7	Kota Pangkalpinang	0	0	4.304	0	0	47.820	0

Keterangan: *mata air terlindung; **sumur terlindung; ***sebagai air permukaan

Berdasarkan survey terhadap responden dengan pertanyaan kuesioner: apakah sumber air minum utama

Sumber : BPS dan hasil pengolahan data, 2020

Tabel-26. Kualitas Air Hujan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO4	NO3	Cr	NH4	Na	Ca2+	Mg2+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan									
Feb									
Mar									
Apr	5,43	25,7	8,45	0,570		0,102			
Mei									
Jun									
Jul									
Ags									
Sep									
Okt									
Nop	5,79	82,0	3,18	1,03		0,111			
Des	6,22	54,4	19,4	1,77		0,238			

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-26. A Kualitas Air Hujan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO4	NO3	Cr	NH4	Na	Ca2+	Mg2+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Jan	5,42	29,8	16,3	0,770		0,0613			
Feb	4,82	22,3	3,18	0,655		0,0539			
Mar	5,87	19,6	15,3	0,665		0,0449			
Apr									
Mei									
Jun									
Jul									

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-27 Kondisi Sungai
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
	Kab. Bangka Barat						
1	Sungai Sekip	2000	2	2	-	-	-
2	Sungai Kampung Ulu	2000	5	5	-	-	-
3	Sungai Air Kemang	4200	5	5	-	-	-
4	Sungai Kampak	12000	34	15	15	163.2	108.8
5	Sungai Kerenah	6000	10	10	-	-	-
6	Sungai Kayu Arang	1000	50	50	-	-	-
7	Sungai Suntai	8000	6	6	-	-	-
8	Sungai Peradong	9000	8	8	-	-	-
9	Sungai Jering	8000	10	10	-	-	-
10	Sungai Sukal	6000	10	10	-	-	-
11	Sungai Menduyung	7000	8	8	-	-	-
12	Sungai PLN	3000	5	5	-	-	-
13	Sungai Muntok	-	5	-	1.5	-	-
	Kab. Bangka Selatan	-	-	-		-	-
1	Sungai Gusung	-	6.5	-	7.5	-	-
2	Sungai Nyirih	-	4	-	6	-	-
3	Sungai Kepoh	-	30	-	7.5	-	-
4	Sungai Pinang	-	5	-	1	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
5	Sungai Air Timur	-	6	-	1	-	-
6	Sungai Acau	-	5	-	2	-	-
7	Sungai Melanau	-	2	-	2	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Sungai Selan)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Tanjung	7228	-	-	-	-	-
2	Sungai Tawar	1507	-	-	-	-	-
3	Sungai Pelabur	16253	-	-	-	-	-
4	Sungai Bedengung	13372	-	-	-	-	-
5	Sungai jirak	3921	-	-	-	-	-
6	Sungai Sisil	9978	-	-	-	-	-
7	SungaiPetaling	2832	-	-	-	-	-
8	Sungai Kabung	14189	-	-	-	-	-
9	Sungai Selan	129082	-	-	-	-	-
10	Sungai Tiangtara	5250	-	-	-	-	-
11	Sungai Kambu	4482	-	-	-	-	-
12	Sungai Kurau	37027	-	-	-	-	-
13	Sungai Puput	3747	-	-	-	-	-
14	Sungai Seruk	17644	-	-	-	-	-
15	Sungai Buah	22318	-	-	-	-	-
16	Sungai Tjelau	15327	-	-	-	-	-
17	Sungai gelang	14347	-	-	-	-	-
18	Sungai Kambuk	15176	-	-	-	-	-
19	Sungai Mengkuang	3855	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
20	Sungai Parak	7683	-	-	-	-	-
21	Sungai Kepuh	14048	-	-	-	-	-
22	Sungai Bangkakota	70076	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Simpangkatis)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Puput	5217	-	-	-	-	-
2	Sungai Jirak	6430	-	-	-	-	-
3	Sungai Kabung	10883	-	-	-	-	-
4	Sungai Liba	3842	-	-	-	-	-
5	Sungai Kambu	10894	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Pangkalan Baru)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Lantai	3538	-	-	-	-	-
2	Sungai Pelawan	5952	-	-	-	-	-
3	Sungai Mesu	3441	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Namang)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Benuang	1181	-	-	-	-	-
2	Sungai Pelawan	19619	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Koba)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Tempurung	1929	-	-	-	-	-
2	Sungai Duren	3546	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
3	Sungai Kengkanang	2280	-	-	-	-	-
4	Sungai Risi	11759	-	-	-	-	-
5	Sungai Menyarut	5654	-	-	-	-	-
6	Sungai Melansat	7960	-	-	-	-	-
7	Sungai Tamiang	10279	-	-	-	-	-
8	Sungai Lubuk	4157	-	-	-	-	-
9	Sungai Jering	1549	-	-	-	-	-
10	Sungai Kabung	3306	-	-	-	-	-
11	Sungai Gemuru	2121	-	-	-	-	-
12	Sungai Bakung	2888	-	-	-	-	-
13	Sungai Sabut	12201	-	-	-	-	-
14	Sungai Cambai	5660	-	-	-	-	-
15	Sungai Mesirak	3495	-	-	-	-	-
16	Sungai Manggis	6157	-	-	-	-	-
17	Sungai Bedaru	5131	-	-	-	-	-
18	Sungai Kurau	37027	-	-	-	-	-
19	Sungai ketera	3282	-	-	-	-	-
20	Sungai Binjaimasem	2492	-	-	-	-	-
21	Sunga Lemateng	5100	-	-	-	-	-
22	Sungai bara	13809	-	-	-	-	-
23	Sungai Palas	7822	-	-	-	-	-
24	Sungai bansir	2551	-	-	-	-	-
25	Sungai Bunsir	3194	-	-	-	-	-
26	Sungai Paku	3385	-	-	-	-	-
27	Sungai Katel	2406	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
28	Sungai Bemban	16406	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka Tengah (Kec. Lubuk Besar)	-	-	-	-	-	-
1	Sungai Titimalu	7514	-	-	-	-	-
2	Sungai Tubur	5724	-	-	-	-	-
3	Sungai Talau	1568	-	-	-	-	-
4	Sungai Terentang	2155	-	-	-	-	-
5	Sungai Pelekat	3835	-	-	-	-	-
6	Sungai Pasir	1840	-	-	-	-	-
7	Sungai Merbak	2828	-	-	-	-	-
8	Sungai Mempatang	4197	-	-	-	-	-
9	Sungai Bakong	5320	-	-	-	-	-
10	Sungai malang	5550	-	-	-	-	-
11	Sungai Tempilang	3120	-	-	-	-	-
12	Sungai Lambar	7569	-	-	-	-	-
13	Sungai Kayuara	11773	-	-	-	-	-
14	Sungai Liat	8363	-	-	-	-	-
15	Sungai Murem	3246	-	-	-	-	-
16	Sungai Rangkero	1603	-	-	-	-	-
17	Sungai Bunut	1330	-	-	-	-	-
18	Sungai Gelam	3269	-	-	-	-	-
19	Sungai Kulit	2133	-	-	-	-	-
20	Sungai Palas	13896	-	-	-	-	-
21	Sungai Macan	1796	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
22	Sungai lobang	5824	-	-	-	-	-
23	Sungai Hijau	1815	-	-	-	-	-
24	Sungai Makie	1462	-	-	-	-	-
25	Sungai Putih	2393	-	-	-	-	-
26	Sungai Menggin	2434	-	-	-	-	-
27	Sungai Paya adep	4817	-	-	-	-	-
28	Sungai karusuk	2182	-	-	-	-	-
29	Sungai Tilang	2080	-	-	-	-	-
30	Sungai Sabu	1351	-	-	-	-	-
31	Sungai Sadap	5238	-	-	-	-	-
32	Sungai Perlang Kecil	5650	-	-	-	-	-
33	Sungai Cingkaro	1275	-	-	-	-	-
34	Sungai Malik ecil	3550	-	-	-	-	-
35	Sungai Meringau	5755	-	-	-	-	-
36	Sungai Batangraya	8997	-	-	-	-	-
37	Sungai Papan	2444	-	-	-	-	-
38	Sungai Kayuasanggar	1756	-	-	-	-	-
39	Sungai Trubus	5407	-	-	-	-	-
40	Sungai Payamalu	5089	-	-	-	-	-
41	Sungai Payakuku	2071	-	-	-	-	-
42	Sungai Lubang	2176	-	-	-	-	-
43	Sungai Lengko	5563	-	-	-	-	-
44	Sungai Tekung	1757	-	-	-	-	-
45	Sungai Bakas	4154	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
46	Sungai Sampur	2170	-	-	-	-	-
47	Sungai bumbun	2020	-	-	-	-	-
48	Sungai Rangau	18333	-	-	-	-	-
49	Sungai Payalutung	3241	-	-	-	-	-
50	Sungai Lekang	5917	-	-	-	-	-
51	Sungai Perlang	8128	-	-	-	-	-
52	Sungai ketiak	1991	-	-	-	-	-
53	Sungai Goang	2023	-	-	-	-	-
54	Sungai Risi	9867	-	-	-	-	-
55	Sungai Nadi	11479	-	-	-	-	-
56	Sungai Lingkuk	3506	-	-	-	-	-
57	Sungai Merapin	8194	-	-	-	-	-
58	Sungai Payalangka	1672	-	-	-	-	-
59	Sungai Binjai	4107	-	-	-	-	-
60	Sungai Mendulang	2429	-	-	-	-	-
61	Sungai Batang	3932	-	-	-	-	-
62	Sungai Raya	7900	-	-	-	-	-
63	Sungai Malik	8351	-	-	-	-	-
64	Sungai beringin	3773	-	-	-	-	-
65	Sungai kekuru	2670	-	-	-	-	-
66	Sungai Telang	2228	-	-	-	-	-
67	Sungai Belimbing	6387	-	-	-	-	-
68	Sungai Kulur	12584	-	-	-	-	-
69	Sungai Ketiak	40772	-	-	-	-	-
70	Sungai Kelup	2078	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
	Kab. Bangka (Kec. Belinyu)		-	-	-	-	-
1	Sungai Panji	10000	-	-	-	-	-
2	Sungai Pasir	4724	-	-	-	-	-
3	Sungai Pejem	4500	-	-	-	-	-
4	Sungai Tengkalak	2000	-	-	-	-	-
5	Sungai Jeliti	3000	-	-	-	-	-
6	Sungai Bayat	9000	-	-	-	-	-
7	Sungai Layang	12000	-	-	-	-	-
8	Sungai Jelutung	12000	-	-	-	-	-
9	Sungai Belinyu	6000	-	-	-	-	-
10	Sungai Berok	6000	-	-	-	-	-
11	Sungai Romodong	3000	-	-	-	-	-
12	Sungai Bubus	4000	-	-	-	-	-
13	Sungai Sembuang	5000	-	-	-	-	-
14	Sungai Sekak	5000	-	-	-	-	-
15	Sungai Buntang	1500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Riau Silip)		-	-	-	-	-
1	Sungai Tengkalak	5000	-	-	-	-	-
2	Sungai Bedukang	900	-	-	-	-	-
3	Sungai Deniang Laut	1300	-	-	-	-	-
4	Sungai Mapur	21250	-	-	-	-	-
5	Sungai Semubur	3000	-	-	-	-	-
6	Sungai Perimping	2750	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
7	Sungai Layang	32500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Bakam)		-	-	-	-	-
1	Sungai Telang	5000	-	-	-	-	-
2	Sungai Mabat	15000	-	-	-	-	-
3	Sungai Layang	32500	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Merawang)		-	-	-	-	-
1	Sungai Baturusa	31250	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Puding Besar)		-	-	-	-	-
1	Sungai Perai	10000	-	-	-	-	-
2	Sungai Kerang	800	-	-	-	-	-
3	Sungai Kotawaringin	20000	-	-	-	-	-
4	Sungai Air Pandan	20000	-	-	-	-	-
5	Sungai Kayubesi	500	-	-	-	-	-
6	Sungai Jeruk	15000	-	-	-	-	-
7	Sungai Lubang	6000	-	-	-	-	-
	Kab. Bangka (Kec. Mendo Barat)		-	-	-	-	-
1	Sungai Menduk	26500	-	-	-	-	-
2	Sungai Rukan	20000	-	-	-	-	-
3	Sungai Sembilang	2000	-	-	-	-	-
4	Sungai Penagan	2500	-	-	-	-	-
5	Sungai Penjirang	5000	-	-	-	-	-

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/dtk)
6	Sungai Kelapbingil	3000	-	-	-	-	-
	Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur		-	-	-	-	-
1	Sungai Buding	10400	-	-	-	-	-
2	Sungai Cerucuk	16720	-	-	-	-	-
3	Sungai Pela	14440	-	-	-	-	-
4	Sungai Bepang	10620	-	-	-	-	-
5	Sungai Cerucuk	16720	-	-	-	-	-
6	Sungai Air Raya	5030	-	-	-	-	-
7	Sungai Dendang	7930	-	-	-	-	-
8	Sungai Kampit	12780	-	-	-	-	-
9	Sungai Manggar	26190	-	-	-	-	-
10	Sungai Membalong	11410	-	-	-	-	-
11	Sungai Padang	2270	-	-	-	-	-
12	Sungai Purang	9950	-	-	-	-	-
13	Sungai Samak	23170	-	-	-	-	-
14	Sungai Sembuluh	11640	-	-	-	-	-
15	Sungai Sijuk	1690	-	-	-	-	-

Keterangan : Sebagian belum dilakukan pendataan

Sumber: Dat DIKPLHD Kabupaten/Kota

Tabel- 28 Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
1	Embung Air Baku Gunung Mentas	9,34	720.000
2	Embung Bhay Park Kolong Polda	2,40	0
3	Kolam Retensi Pasar Ikan, Sungai Pedindang	3,63	20.000
4	Kolong Air Besar	2,60	90.000
5	Kolong Air Kelubi	10,44	480.000
6	Kolong Babi	2,00	50.000
7	Kolong Bacang	6,00	240.000
8	Kolong Bahar	6,00	240.000
9	Kolong Bakam	1,07	15.000
10	Kolong Beguruh	7,50	80.000
11	Kolong Bikang	0,10	150.000
12	Kolong Celuak	2,18	70.000
13	Kolong Dam Jepang	6,44	188.000
14	Kolong Dendang	4,12	102.500
15	Kolong Dukong	8,49	240.000
16	Kolong Enam Sungai Mayang	5,77	50.000
17	Kolong Gantung	0,00	600.000
18	Kolong Genangan Mentukul	12,00	2.592.000
19	Kolong Gudang Padi	4,36	120.000
20	Kolong Juru Seberang	14,00	240.000
21	Kolong Kacang Pedang	39,09	1.104.000
22	Kolong Kace Kab. Bangka	2,68	60.000
23	Kolong Kampit	3,12	480.000
24	Kolong Kebintik	1,85	62.000
25	Kolong Kepoh	1,80	55.000
26	Kolong Kerang	0	60.000
27	Kolong Kerasak	2,23	59.750
28	Kolong Lalang	4,22	320.000
29	Kolong Manggar 1	21,06	1.250.000
30	Kolong Manggar 2/Pancur	0	900.000
31	Kolong Mempadin	4,86	137.500
32	Kolong Mempayak	4,12	960.000
33	Kolong Menjelang	1,80	320.000
34	Kolong Mentabak	0	20.000
35	Kolong Merawang	5,89	600.000
36	Kolong Mingki	0	100.000
37	Kolong Muis	2,41	180.000

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)
38	Kolong Namang	2,07	60.000
39	Kolong Nangka	0,30	30.000
40	Kolong Nibung	34,06	60.000
41	Kolong Nona	10,54	125.000
42	Kolong Pasar ikan	0	120.000
43	Kolong Pasir Merah	19,95	262.500
44	Kolong Pedindang	4,69	120.000
45	Kolong Pemali Dam 3	55,90	1.200.000
46	Kolong Penganak	2,54	61.000
47	Kolong Perawas	4,15	0
48	Kolong Pice Besar	2128,19	77.192.000
49	Kolong PLN	8,42	15.000
50	Kolong Pumpung	5,56	267.000
51	Kolong Ramadon	0,00	25.000
52	Kolong Rindik	2,55	70.000
53	Kolong Sekar Biru	4,22	62.500
54	Kolong Sekuk 1 & 2	4,39	250.000
55	Kolong Selumar	0,23	7.500
56	Kolong Senyubuk	34,71	450.000
57	Kolong Simpur	18,65	495.000
58	Kolong Sinar jaya	6,06	150.000
59	Kolong Sinar Surya	2,89	52.500
60	Kolong Spritus	2,60	85.000
61	Kolong Sungai Selan	0	150.000
62	Kolong Tebat Gadung	23,14	320.000
63	Kolong Teluk Dalam	4,12	75.000
64	Kolong Terabek	0,56	75.000
65	Kolong Teru	2,83	37.500
66	Kolong Tujuh Sungai Mayang	5,77	85.000
67	Kolong Tukak Sadai	2,06	53.000
68	Kolong Yamin	9,60	331.000
69	T.O. Pemali	18,6	120.000

Sumber: BBWS Sumatera VIII dan hasil pengelolaan data spasial, 2020

Tabel 29- Kualitas Air Sungai
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2019

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
1	Sungai Lenggang	-2,90689	108,07108	10/3/2019	27,1	4,43	22,5	8,93	5,00	5,20
		-2,90689	108,07108	10 April 2019	31,8	4,48	18,3	6,65	29,0	4,80
		-2,90689	108,07108	3 Mei 2019	26,4	4,72	35,2	14,6	13,0	4,20
		-2,95936	108,16486	Maret 2019	28,6	3,32	25,7	10,6	34,0	5,00
		-2,95936	108,16486	10 April 2019	33,6	3,44	39,5	17,8	31,0	5,10
		-2,9593	108,16486	3 Mei 2019	28,7	3,62	28,2	12,4	26,0	5,10
		-2,965	108,16908	Maret 2019	29,9	3,98	26,7	11,4	40,5	5,10
		-2,966	108,16908	10 April 2019	32,0	3,84	35,4	15,8	47,0	5,00
		-2,967	108,16908	3 Mei 2019	29,3	3,57	31,4	14,1	3,00	5,00
2	Sungai Cerucuk	-2,83753	107,79414	Maret 2019	30,8	4,40	13,9	4,36	123	3,50
		-2,83753	107,79414	10 April 2019	34,7	4,84	14,0	4,42	73,0	3,90
		-2,83753	107,79414	3 Mei 2019	25,8	3,40	26,2	10,7	95,0	2,00
		-2,81561	107,72039	Maret 2019	28,7	4,03	15,6	5,32	85,0	5,10
		-2,81561	107,72039	10 April 2019	32,9	4,69	23,6	9,30	32,0	4,00
		-2,81561	107,72039	3 Mei 2019	25,8	3,52	29,5	12,6	6,00	2,90
		-2,78267	107,63772	Maret 2019	29,4	5,82	1.585	828	30,0	4,00

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
		-2,78267	107,63772	10 April 2019	30,0	6,17	2.517	1.025	4,00	3,20
		-2,78267	107,63772	3 Mei 2019	25,9	4,34	92,8	45,4	37,0	2,50
3	Sungai Selan	-2,3025	106,04556	11 Maret 2019	26,9	4,91	16,3	5,61	575	2,20
		-2,3025	106,04556	1 April 2019	28,9	4,82	22,5	6,17	279	2,00
		-2,3025	106,04556	2 Mei 2019	26,9	5,12	15,5	6,17	3,38	1,40
		-2,38111	106,05111	11 Maret 2019	24,9	4,82	69,4	33,2	104	3,10
		-2,38111	106,05111	1 April 2019	29,9	3,83	54,0	25,7	74,4	3,30
		-2,38111	106,05111	2 Mei 2019	26,9	4,32	52,4	28,7	172	1,70
		-2,38583	105,97972	11 Maret 2019	29,7	4,82	73,6	35,4	302	2,90
		-2,38583	105,97972	1 April 2019	28,3	3,81	59,5	28,6	167	2,20
		-2,38583	105,97972	2 Mei 2019	26,9	4,21	48,7	26,5	78,0	2,00
4	Sungai Rangkui	-2,13561	106,07694	11 Maret 2019	30,7	5,44	15,7	5,37	6,00	5,10
		-2,13561	106,07694	1 April 2019	28,9	4,79	18,2	6,69	5,00	5,00
		-2,13561	106,07694	2 Mei 2019	25,9	5,28	17,1	7,13	13,0	2,70
		-2,13139	106,10528	11 Maret 2019	29,7	6,02	24,4	9,83	20,0	4,80
		-2,13139	106,10528	1 April 2019	29,6	5,48	32,3	13,8	11,0	4,70
		-2,13139	106,10528	2 Mei 2019	27,8	5,62	36,2	15,7	14,0	3,00
		-2,12722	106,11861	11 Maret 2019	31,6	5,80	30,2	12,8	26,0	3,40

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
		-2,12722	106,11861	1 April 2019	29,1	5,46	37,4	16,6	25,5	4,90
		-2,12722	106,11861	2 Mei 2019	28,8	5,46	35,1	18,2	10,0	3,30
5	Sungai Kepoh	-2,66067	106,37828	12 Maret 2019	28,8	4,42	14,1	4,42	1.260	2,00
		-2,66067	106,37828	22 April 2019	31,1	5,40	19,0	7,02	20,0	3,50
		-2,66067	106,37828	Periode 3	29,7	4,74	17,1	6,22	64,0	2,90
		-2,80061	106,47569	12 Maret 2019	27,8	4,52	16,0	5,42	338	2,90
		-2,80061	106,47569	22 April 2019	30,0	5,50	16,8	5,58	169	3,20
		-2,80061	106,47569	Periode 3	27,8	5,83	34,8	15,8	54,5	2,50
		-2,92375	106,54989	12 Maret 2019	25,9	3,81	26,0	10,6	22,0	3,00
		-2,92375	106,54989	22 April 2019	28,6	4,52	29,7	12,6	32,5	3,00
		-2,92375	106,54989	Periode 3	29,2	4,62	25,6	10,7	21,0	1,70
6	Sungai Kurau	-2,60467	106,23883	13 Maret 2019	28,0	4,82	16,6	5,64	373	2,40
		-2,60467	106,23883	4 April 2019	27,3	4,67	18,8	6,65	488	2,00
		-2,60467	106,23883	6 Mei 2019	31,9	4,77	18,5	6,49	495	2,10
		-2,433	106,28922	13 Maret 2019	29,4	3,11	51,4	24,2	68,5	1,90
		-2,433	106,28922	4 April 2019	28,0	3,82	41,5	18,5	250	2,30
		-2,433	106,28922	6 Mei 2019	30,4	3,47	53,4	24,1	140	2,40
		-2,33261	106,23328	13 Maret 2019	29,3	3,41	63,4	30,6	61,0	2,80

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
		-2,33261	106,23328	4 April 2019	28,4	3,79	63,4	30,1	161	2,70
		-2,33261	106,23328	6 Mei 2019	30,4	3,43	79,0	37,7	78,0	2,30
7	Sungai Semenduk	-2,15903	105,94694	14 Maret 2019	28,0	5,02	18,2	6,59	76,0	3,80
		-2,15903	105,94694	5 April 2019	27,8	4,66	16,3	4,99	42,0	4,10
		-2,15903	105,94694	6 Mei 2019	26,1	4,62	21,6	10,2	52,0	3,40
		-2,16358	105,88067	14 Maret 2019	28,4	6,52	23,4	9,30	171	2,00
		-2,16358	105,88067	5 April 2019	27,8	5,04	22,8	9,03	88,0	3,80
		-2,16358	105,88067	6 Mei 2019	28,8	4,32	30,7	19,2	130	1,60
		-2,21981	105,82631	14 Maret 2019	30,5	5,02	113	56,1	67,0	2,10
		-2,21981	105,82631	5 April 2019	25,9	5,37	327	173	73,0	3,40
		-2,21981	105,82631	6 Mei 2019	25,9	4,67	113	85,7	55,0	2,10
8	Sungai Bangka Kota	-2,42772	106,13122	18 Maret 2019	25,9	4,32	18,6	6,75	13,0	5,20
		-2,42772	106,13122	2 April 2019	26,2	4,42	25,0	10,7	5,00	5,10
		-2,42772	106,13122	7 Mei 2019	27,0	4,50	27,1	11,4	3,00	3,80
		-2,51081	106,01931	18 Maret 2019	29,2	3,11	20,5	11,4	15,5	5,00
		-2,51081	106,01931	2 April 2019	28,6	3,51	105	50,2	9,00	4,40
		-2,51081	106,01931	7 Mei 2019	31,8	3,66	172	86,5	13,0	3,70
		-2,49953	106,01739	18 Maret 2019	29,4	3,21	33,2	17,3	86,0	4,20

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
		-2,49953	106,01739	2 April 2019	28,6	3,31	99,6	44,5	10,0	4,00
		-2,49953	106,01739	7 Mei 2019	29,4	3,55	164	83,5	80,0	3,20
9	Sungai Mancung	-1,92886	105,68133	19 Maret 2019	27,9	4,82	16,6	5,95	13,0	4,90
		-1,92886	105,68133	11 April 2019	28,8	4,02	25,6	10,5	9,00	4,20
		-1,92886	105,68133	8 Mei 2019	26,9	4,25	16,7	5,90	5,00	3,20
		-1,92114	105,63133	19 Maret 2019	27,6	3,21	12,0	3,18	13,0	4,50
		-1,92114	105,63133	11 April 2019	29,7	4,29	28,2	12,1	8,00	3,60
		-1,92114	105,63133	8 Mei 2019	28,0	3,63	29,7	12,9	5,50	2,80
		-1,98356	105,60158	19 Maret 2019	29,4	6,52	15,9	4,28	48,5	4,20
		-1,98356	105,60158	11 April 2019	32,6	6,20	2.087	1.125	37,0	3,20
		-1,98356	105,60158	8 Mei 2019	29,3	6,17	35,3	11,8	17,0	2,50
10	Sungai Mabet	-1,91606	105,93067	2 April 2019	29,3	4,37	41,7	21,7	4,00	5,00
		-1,91606	105,93067	26 Juni 2019	27,9	4,42	59,4	36,3	10,5	4,83
		-1,91606	105,93067	24 September 2019	28,6	6,85	318	199	51,0	4,23
11	Sungai Kayu Besi	-1,98856	105,98956	2 April 2019	30,2	5,64	71,2	39,9	17,0	5,40
		-1,98856	105,98956	26 Juni 2019	29,8	5,72	84,1	52,7	9,00	4,43

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
		-1,98856	105,98956	24 September 2019	30,0	6,56	3.738	2.382	40,0	4,03
12	Sungai Limbung	-2,01289	106,03550	2 April 2019	29,0	5,82	73,6	40,1	15,5	4,90
		-2,01289	106,03550	26 Juni 2019	30,1	5,72	72,1	43,5	15,0	4,23
		-2,01289	106,03550	24 September 2019	30,6	6,62	4584	2.827	10,0	4,13
13	Sungai Baturusa	-2,02889	106,11192	2 April 2019	30,7	6,10	2426	1.455	7,00	4,90
		-2,02889	106,11192	26 Juni 2019	31,2	5,92	5216	3.217	10,0	4,73
		-2,02889	106,11192	24 September 2019	30,7	7,39	4740	2.923	19,0	4,13
14	Sungai Muara Selindung	-2,06339	106,05539	2 April 2019	29,3	6,17	2977	1.785	11,0	4,20
		-2,06339	106,05539	26 Juni 2019	31,3	6,22	13719	8.461	13,5	5,23
		-2,06339	106,05539	24 September 2019	28,7	7,87	6004	3.703	9,00	4,03
15	Sungai Pangkalbalam	-2,09372	106,13981	2 April 2019	29,8	6,44	3138	1.875	7,00	4,60
		-2,09372	106,13981	26 Juni 2019	30,9	6,58	28506	17.581	7,00	5,43
		-2,09372	106,13981	24 September 2019	28,7	8,01	6423	3.961	26,0	3,93

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
16	Sungai Selindung	-2,06581	106,11761	2 April 2019	29,9	5,97	2085	1.245	8,00	4,00
		-2,06581	106,11761	26 Juni 2019	31,7	5,97	11219	6.919	10,0	5,33
		-2,06581	106,11761	24 September 2019	30,0	7,58	5168	3.187	10,0	3,93
17	Sungai Rangkui	-2,10056	106,13861	2 April 2019	29,7	6,06	2336	1.395	23,0	4,10
		-2,10056	106,13861	26 Juni 2019	31,0	6,32	24712	15.241	7,00	5,13
		-2,10056	106,13861	24 September 2019	28,9	7,97	6121	3.775	30,0	4,03
18	Sungai Aik Batu Buding	-2,74097	107,92300	5 April 2019	30,3	5,50	23,5	14,1	4,50	5,10
		-2,74097	107,92300	20 Mei 2019	25,3	4,12	21,7	8,40	26,0	3,90
		-2,74097	107,92300	26 Juni 2019	26,3	5,31	21,8	13,2	15,5	4,23
		-2,74097	107,92300	24 September 2019	26,3	5,23	35,9	20,7	9,00	5,13
19	Sungai Aik Buding	-2,71508	107,98869	5 April 2019	29,7	5,76	25,1	15,3	110	3,80
		-2,71508	107,98869	20 Mei 2019	27,7	3,41	49,9	23,1	102	3,90
		-2,71508	107,98869	26 Juni 2019	28,7	5,05	49,5	26,6	87,0	3,93
		-2,71508	107,98869	24 September 2019	27,8	6,63	12960	8.035	4,00	4,93

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
20	Sungai Aik Buding	-2,69619	107,98803	5 April 2019	30,7	5,95	44,5	27,1	33,5	4,90
		-2,69561	107,98836	20 Mei 2019	25,5	4,31	34,5	16,1	6,00	3,90
		-2,69619	107,98803	26 Juni 2019	29,2	5,59	163	88,6	94,0	4,23
		-2,69619	107,98803	24 September 2019	28,3	6,84	13700	8.357	4,00	4,83
21	Sungai Aik Buding	-2,68489	108,00183	5 April 2019	30,7	5,97	60,5	36,3	38,0	4,00
		-2,71603	108,00497	20 Mei 2019	26,5	5,85	1766	919	18,0	3,90
		-2,68489	108,00183	26 Juni 2019	30,3	5,71	2045	1.101	56,5	4,13
		-2,68489	108,00183	24 September 2019	28,4	6,98	14970	9.132	7,00	4,83
22	Sungai Aik Buding	-2,68472	108,00183	5 April 2019	30,7	6,00	293	179	50,0	4,70
		-2,66003	108,02653	20 Mei 2019	27,0	6,39	5377	2.825	15,0	4,40
		-2,68472	108,00183	26 Juni 2019	29,2	6,52	12180	6.801	8,00	4,73
		-2,68472	108,00183	24 September 2019	31,4	7,14	15040	9.325	6,00	4,73
23	Sungai Aik Buding	-2,64906	108,03072	5 April 2019	29,7	6,38	6384	3.894	24,5	4,50
		-2,64819	108,02672	20 Mei 2019	27,1	6,26	9521	5.035	2,00	4,80
		-2,64906	108,03072	26 Juni 2019	29,2	6,40	12470	6.881	7,00	5,43

No.	Nama Sungai	Titik Koordinat		Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (^{O}C)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)
		Lintang	Bujur							
		-2,64906	108,03072	24 September 2019	30,4	7,69	15380	9.382	9,00	4,53
24	Sungai Muara Aik Jangkat	-2,6895	107,99072	5 April 2019	30,7	5,88	33,2	19,9	44,0	4,00
		-2,6895	107,99061	20 Mei 2019	26,2	5,02	165	82,6	22,0	4,40
		-2,6895	107,99072	26 Juni 2019	30,3	5,88	1208	660	31,0	4,13
		-2,6895	107,99072	24 September 2019	28,6	6,83	13400	7.010	6,00	4,13
25	Sungai Muara Aik Rengas	-2,71572	107,98869	5 April 2019	30,6	5,88	37,3	22,4	10,0	5,00
		-2,71572	107,98869	20 Mei 2019	27,4	4,47	28,4	14,8	15,5	3,90
		-2,71572	107,98869	26 Juni 2019	30,1	5,89	31,9	18,9	31,5	4,23
		-2,71572	107,98869	24 September 2019	27,8	6,61	12560	7.787	8,00	4,03
26	Sungai Aik Gumbak	-	-	20 Mei 2019	26,7	6,29	8027	4.215	9,00	4,20
27	Sungai Purun	-	-	20 Mei 2019	27,2	6,69	11587	6.135	8,00	4,20

Keterangan :

Sumber : DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2019

Tabel-30 Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2020

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Temperatur (ºC)	Residu Terlarut (mg/ L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	32,7	126	3,5	6,91	225	126	3,5
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	31,6	8,5	2	4,19	15,9	8,5	2
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	29,8	9,83	40	4,29	18,2	9,83	40

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	4,13	2,52	17,6	< 0.00495	0,59	0,0461	< 0.02	0,104
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	4,13	2,72	14,2	< 0.00495	0,675	0,0449	< 0.02	< 0.0316
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	4,43	2,52	16,3	0,014	0,7	0,0636	< 0.02	< 0.0316

No.	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Lintang	Bujur	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh / 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
1	Kolong Bangka	11/3/2020	-1,93294	106,1564	0	< 943	0	10	24	0,005	0
2	Kolong Biru	12/3/2020	-2,54894	106,3524	0	< 943	0	< 1,80	< 1.80	0,004	0
3	Kolong PDAM	17/03/2020	-3,03009	106,6946	0	< 943	0	2	7,8	0,016	0

Keterangan: tanda - menunjukkan tidak dilakukan pengujian terhadap parameter dimaksud
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, 2020

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota/Kec.	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kabupaten Bangka	98.697	90.554	2.833	1.609	-
2	Kabupaten Bangka Tengah	58.502	53.968	2.217	1.398	-
3	Kabupaten Bangka Barat	63.082	54.515	2.624	1.098	-
4	Kabupaten Bangka Selatan	61.277	49.046	3.481	631	-
5	Kabupaten Belitung	58.830	51.259	812	882	-
6	Kabupaten Belitung Timur	42.290	34.263	1.421	2.186	-
7	Kota Pangkalpinang	69.980	68.846	616	392	-

Keterangan :

Sumber : BPS Prov. Kep. Bangka Belitung dan pengolahan data, 2020

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2018

No.	Kabupaten	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2 & S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Bangka	19,14	21,32	26,64	21,4	21,99	23,59	24,49	26,28	3,01	2,05	4,24	5,33	0,49	0,12		
2	Belitung	18,45	19,82	26,11	28,42	20,05	19,94	25,36	24,17	4,57	2,59	5,12	4,87	0,34	0,19		
3	Bangka Barat	21,85	26,06	29,35	25,87	19,28	21,15	22,57	19,7	2,15	2,86	4,8	4,14	0	0,22		
4	Bangka Tengah	30,39	31,7	27,6	24,65	18,01	17,29	19,26	20,24	2,26	2,2	2,42	3,83	0,06	0,09		
5	Bangka Selatan	28,45	29,6	31,57	34,07	15,25	15,95	20,06	16,18	0,91	1,12	3,63	3,08	0,13	0		
6	Belitung Timur	15,65	19,42	26,57	28,5	24,78	20,84	26,84	22,42	2,63	3,47	3,44	5,24	0,09	0,11		
7	Pangkalpinang	12,26	14,05	14,26	17,91	19,64	18,1	41,06	36,15	2,73	3,9	9,42	9,27	0,63	0,62		
	Kepulauan Bangka Belitung	20,91	23,01	26	25,22	19,81	19,86	25,59	24,03	2,63	2,5	4,78	5,18	0,28	0,2		

Sumber Data : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan : Data jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan S3 menjadi satu dengan tingkat pendidikan S2

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)
1.	Diare	38.988
2.	Infeksi Saluran Pernasafan Akut	8.284
3.	Tuberkulosis (TBC)	6.452
4.	Demam Berdarah *Dengue* (DBD)	764
5.	Malaria	221
6.	HIV/ AIDS	205
7.	Campak	51
8.	Kusta	46
9.	*Filariasis*	4

Keterangan :

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2020

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019 (Semester II)

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga*	Jumlah Rumah Tangga Miskin**	Prosentase Rumah Tangga miskin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Kabupaten Bangka	98.697	17.998	18,2
2.	Kabupaten Bangka Barat	63.082	11.884	18,8
3.	Kabupaten Bangka Tengah	58.502	12.034	20,6
4.	Kabupaten Bangka Selatan	61.277	8.179	13,3
5.	Kabupaten Belitung	58.830	10.662	18,1
6.	Kabupaten Belitung Timur	42.290	9.288	22,0
7.	Kota Pangkalpinang	69.980	10.614	15,2

Keterangan: Jumlah Rumah Tangga diambil dari jumlah KK

Sumber : -*Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber pencemaran

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2019

No	Sumber Pencemaran	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m^3/hari)	Volume Limbah Cair (m^3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m^3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m^3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	**Bergerak**			1.61			
	KABUPATEB BANGKA TENGAH						
1	Terminal Angkutan Umum	C	0.5	0.01	0*	0*	0*
2	Pelabuhan Sungai Selan	Jasa Bongkar Muat Barang dan Penumpang	5	0.5	0*	0*	0*
3	Pelabuhan Perikanan Kurau	Tangkap Perikanan		0.5	0*	0*	0*
4	Bandara Depati Amir	II Penerbangan domestik	152.8	0.6	0*	0*	0*
B.	**Tidak Bergerak**				0*	0*	0*
	KABUPATEB BANGKA TENGAH						
1	Sekolah Adiwiyata	Sekolah	2.5	2:24	0*	0*	0*
2	Sekolah Non Adiwiyata	Sekolah	14	0.35	0*	0*	0*
3	Pondok Pesantren	Sekolah	3	0.4	0*	0*	0*
4	Perkantoran	Perkantoran	8.75	7.7	0*	0*	0*
5	pasar	pasar	1	12	0*	0*	0*

No	Sumber Pencemaran	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m^3/hari)	Volume Limbah Cair (m^3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m^3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m^3/hari)
6	RSUD Koba	rumah sakit	2	7.15	0*	0*	0*
7	Swalayan/Mini Market	Swalayan/Mini Market	0.75	5.15	0*	0*	0*
8	Pertokoan/Kios/Warung	Pertokoan/Kios/Warung	0.5	1.3	0*	0*	0*
9	Rumah makan	Rumah makan	0.5	0.45	0*	0*	0*
10	Industri	Industri	2	0.25	0*	0*	0*
11	Tempat Ibadah	Tempat Ibadah	2	9	0*	0*	0*
12	Tempat Wisata	Tempat Wisata	3	0.04	0*	0*	0*
13	Hotel Navotel/ Bintang 5	Perhotelan	3	-	0		130
14	Hotel Santika/ Bintang 3	Perhotelan	1.1	-	0	0.1	120
15	Hotel soll Marina/ Bintang 3	Perhotelan	1	-	0	0.15	100
16	Grand Vella Hotel/ Bintang 2	Perhotelan	0.35	-	0		120

Sumber : Data DIKPLHD Kabupaten Kota 2019

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)											
1	Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang	26,6	23,7	27,0	27,1	27,8	27,5	27,7	27,5	27,6	28,0	27,8	26,4
2	Stasiun Klimatologi Koba Bangka Tengah	26,7	26,4	26,7	26,5	27,1	26,8	26,6	26,1	26,5	27,2	27,2	26,4
3	Stasiun Meteorologi H.AS Hanandjoeddin Tanjung Pandan	26,4	26,5	26,2	26,2	27,1	26,0	27,0	26,9	27,0	26,9	26,4	26,5

Keterangan :

Sumber : UPT BMKG Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang, 2020

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data: 2019

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)	HC (µg/Nm3)	PM10 (µg/Nm3)	PM2,5 (µg/Nm3)	TSP (µg/Nm3)	Pb (µg/Nm3)	Dustfall (µg/Nm3)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm3)	Fluor Index (µg/Nm3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm3)	Sulphat Index (µg/Nm3)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
Kawasan Jalan Kabupaten Bangka	24 jam	17,2	1150	35,4	74,6	-	-	50,9	69,4	0,00540	-	-	-	-	-
Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka	24 jam	5,73	1150	18,1	55,9	-	-	46,8	62,8	0,00520	-	-	-	-	-
Kawasan Industri Kabupaten Bangka	24 jam	10,8	1150	23,0	48,2	-	-	15,0	33,5	0,00540	-	-	-	-	-
Kawasan Perumahan Kota Pangkalpinang	24 jam	18,1	1150	5,07	43,6	-	-	7,30	22,7	0,0225	-	-	-	-	-
Kawasan Jalan Raya Kota Pangkalpinang	24 jam	16,1	1150	8,12	52,1	-	-	57,9	76,9	0,0225	-	-	-	-	-
Kawasan Industri Kota Pangkalpinang	24 jam	20,1	1150	8,71	229	-	-	72,6	91,6	0,0234	-	-	-	-	-
Kawasan Perumahan Kabupaten Bangka Selatan	24 jam	2,89	1150	8,88	21,1	-	-	35,0	57,5	0,00520	-	-	-	-	-
Kawasan Industri Kabupaten Bangka Selatan	24 jam	3,40	1150	9,22	26,6	-	-	33,3	55,8	0,00520	-	-	-	-	-

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)	HC (µg/Nm3)	PM10 (µg/Nm3)	PM2,5 (µg/Nm3)	TSP (µg/Nm3)	Pb (µg/Nm3)	Dustfall (µg/Nm3)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm3)	Fluor Index (µg/Nm3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm3)	Sulphat Index (µg/Nm3)
Kawasan Jalan Kabupaten Bangka Selatan	24 jam	3,75	1150	15,0	28,1	-	-	38,4	60,9	0,00500	-	-	-	-	-
Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Tengah	24 jam	5,13	1150	8,42	25,3	-	-	30,4	52,7	0,00500	-	-	-	-	-
Kawasan Jalan Kabupaten Bangka Tengah	24 jam	7,23	1150	11,9	31,6	-	-	35,0	57,3	0,00520	-	-	-	-	-
Kawasan Industri Kabupaten Bangka Tengah	24 jam	7,17	1150	12,2	48,2	-	-	33,3	55,6	0,00540	-	-	-	-	-
Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung	24 jam	8,42	1150	4,60	48,6	-	-	33,3	52,3	0,00520	-	-	-	-	-
Kawasan Jalan Raya Kabupaten Belitung	24 jam	19,7	1150	23,2	75,7	-	-	53,2	72,3	0,00510	-	-	-	-	-
Kawasan Industri Kabupaten Belitung	24 jam	6,12	1150	10,6	111	-	-	36,5	55,5	0,00530	-	-	-	-	-
Kawasan Jalan Kabupaten Belitung Timur	24 jam	11,9	1150	36,8	83,1	-	-	68,6	86,6	0,00510	-	-	-	-	-
Kawasan Pemukiman Kabupaten Belitung Timur	24 jam	6,13	1150	28,8	61,6	-	-	17,6	35,6	0,00520	-	-	-	-	-

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	CO (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)	O3 (µg/Nm3)	HC (µg/Nm3)	PM10 (µg/Nm3)	PM2,5 (µg/Nm3)	TSP (µg/Nm3)	Pb (µg/Nm3)	Dustfall (µg/Nm3)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm3)	Fluor Index (µg/Nm3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm3)	Sulphat Index (µg/Nm3)
Kawasan Industri Kabupaten Belitung Timur	24 jam	6,04	1150	30,2	54,5	-	-	23,6	41,6	0,00520	-	-	-	-	-
Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangka Barat	25 jam	6,02	1150	16,4	11,3	-	-	36,3	59,6	0,00530	-	-	-	-	-
Kawasan Industri Kabupaten Bangka Barat	26 jam	4,00	1150	66,7	20,8	-	-	66,7	90,0	0,00520	-	-	-	-	-
Kawasan Jalan Kabupaten Bangka Barat	27 jam	3,65	1150	17,0	16,9	-	-	57,5	80,8	0,00520	-	-	-	-	-

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-38.aPenggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2018

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
1	Kimia Dasar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Mesin dan logam dasar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Industri kecil	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Aneka Industri	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Keterangan: -
Sumber: ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-38.aPenggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2018

Wilayah	JAN 2018	FEB 2018	MAR 2018	APR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AUG 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DEC 2018	Realisasi (pcs)	Realisasi (MT)	KUOTA
BANGKA BARAT	132.160	130.480	146.720	128.240	151.760	132.720	130.480	141.680	131.040	138.320	143.360	142.240	1.649.200	4.948	4.875
BANGKA INDUK	211.120	221.760	229.600	215.040	245.840	224.000	208.880	233.520	215.600	226.800	224.000	226.800	2.682.960	8.049	8.241
BANGKA SELATAN	138.320	134.400	142.800	124.320	155.680	133.840	134.960	147.840	135.520	143.360	144.480	146.720	1.682.240	5.047	5.037
BANGKA TENGAH	130.480	130.480	141.680	124.880	147.840	140.560	136.080	146.720	129.360	140.000	142.240	142.800	1.653.120	4.959	4.771
PANGKPINANG	171.360	174.160	184.240	171.920	193.760	172.480	182.560	183.680	175.840	183.120	187.600	187.600	2.168.320	6.505	5.997
Grand Total	**783.440**	**791.280**	**845.040**	**764.400**	**894.880**	**803.600**	**792.960**	**853.440**	**787.360**	**831.600**	**842.800**	**852.320**	**9.835.840**	**29.508**	**28.921**

Keterangan: -
Sumber: ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 39 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2018

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Mobil Beban	17.397	14.157	3.240	-
2	Penumpang pribadi	54.886	51.890	2.996	-
3	Penumpang umum	320	283	37	-
4	Bus besar pribadi	6	-	6	-
5	Bus besar umum	27	-	27	-
6	Bus kecil pribadi	265	24	241	-
7	Bus kecil umum	265	9	256	-
8	Truk besar	1.136	-	1.136	-
9	Truk kecil	7.321	183	7.138	-
10	Roda tiga	449	449	-	-
11	Roda dua	330.003	330.003	-	-
	TOTAL	**412.075**	**396.998**	**15.077**	-

*) Data diolah dari database samsat online
Keterangan :-
Sumber : Database Samsat Online

Tabel 39.A Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang di gunakan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun : 2017

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Mobil Beban	18.726	15.136	3.590	-
2	Penumpang pribadi	52.589	49.320	3.269	-
3	Penumpang umum	395	346	49	-
4	Bus besar pribadi	11	-	11	-
5	Bus besar umum	28	-	28	-
6	Bus kecil pribadi	254	25	229	-
7	Bus kecil umum	308	12	296	-
8	Truk besar	1.311	-	1.311	-
9	Truk kecil	7.789	193	7.596	-
10	Roda tiga	480	480	-	-
11	Roda dua	337.994	337.994	-	-
	TOTAL	**419.885**	**403.506**	**16.379**	**-**

*) Data diolah dari database samsat online
Keterangan :-
Sumber : Database Samsat Online

Tabel 40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2020

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua Tahun terakhir (Km)	
		Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan	-	-
2	Jalan Raya	-	-
3	Jalan Sedang	850,99	850,99
4	Jalan Kecil	-	-

Keterangan: - Data berdasarkan SK Jalan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

Sumber: PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sahabat Mewah dan Makmur
2	AMDAL	Pembangunan Komplek Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Air Itam, Kecamatan Pangkalan Baru dan Bukit Intan, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Steelindo Wahana Perkasa
4	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Parit Sembada
5	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV PLTU Air Anyir, Gardu Induk Pangkalpinang – Gardu Induk Sungailiat	PT. PLN (Persero) Wilayah BABEL
6	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan di Kecamatan Membalong dan Badau Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Palmindo Billiton Berjaya

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
7	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sijuk dan Badau, Kabupaten Belitung	PT. Agro Makmur Abadi
8	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Membalong dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Forestalestari Dwikarya
9	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Riau Silip dan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Gunung Pelawan Lestari
10	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai *(offshore)* di Laut Tanjung Penyusuk, Simping, S. Belinyu, Danta, Kabupaten Bangka dan Laut Rambat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sarana Marindo
11	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan dan Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat	PT. Swarna Nusa Sentosa
12	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Desa Pugul, Riau dan Silip, Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka	PT. Tata Hamparan Eka Persada
13	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Putra Bangka Mandiri

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
14	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa di Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Bangka Inti Besaoh
15	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Payung dan Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Plasma Besaoh
16	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Badau, Sijuk dan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung serta di Kecamatan Gantung dan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Rebinmas Jaya
17	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah serta Kecamatan Air Gegas dan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Nesia
18	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK – HTI) di Kecamatan Belinyu, Sungailiat dan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Inhutani V SPHK-BABEL
19	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
20	DPPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelabuhan Pangkalbalam di Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pangkalbalam
21	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) di Kecamatan Belinyu dan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Istana Kawi Kencana
22	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peningkatan Jalan Toboali – Sadai ± 44.55 Km di Kecamatan Toboali dan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung - Satuan Kerja SNVT P2JJ BABEL
23	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Berbasis Kompetensi Inti Industri Daerah di Kelurahan Bacang dan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pangkalpinang
24	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Prov. Kep. Babel.	PT. Mitra Stania Prima
25	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Perairan Laut Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat dan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Aega Prima
26	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
27	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit ± 10.101 Ha di Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Hasil Sawit Bina Sejahtera
28	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah di Kawasan Industri Ketapang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Stanindo Inti Perkasa
29	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kec. Simpang Rimba, Payung, Air Gegas dan Pulau Besar, Kabupaten Basel dan di Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa dan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangun Rimba Sejahtera
30	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Halaban Primavestama
31	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kec. Kelapa Kampit, Kab. Belitung Timur, Prov. Kep. Bangka Belitung	PT. Kampit Tin Utama

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
32	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut di Desa Air Kelik dan Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billiton Jaya Utama
33	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kompleks Olahraga *(Sport Center)* dan Fasilitasnya di Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kep. Babel
34	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Puncak Hall (Pembangunan Hotel dan Parkir) di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	PT. Puncak Prima Lestari
35	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kab. Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	PT. Babel Tinindo
36	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Cirindo Mining Utama
37	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka Barat, Bangka dan Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Abadi Berkatindo
38	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, dan Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Mitra Sukses Globalindo

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
39	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI) di Kecamatan Puding Besar dan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dan di Kecamatan Sijuk dan Membalong, Kabupaten Belitung	PT. Agro Pratama Sejahtera
40	DPLH	Usaha dan/atau Kegiatan PLTD di Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;di Kelurahan koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah; di Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung; di Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	PT. PLN (PERSERO) Wilayah Bangka Belitung
41	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Operasi Produksi Penambangan Bahan Galian Timah di Kecamatan Payung, Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Serumpun
42	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Wilayah Laut Pasir Padi, Kota Pangkalpinang	PT. Stanindo Inti Perkasa
43	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Kelambui, Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bangka Prima Tin
44	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Bijih Timah *(Smelter)* di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tommy Utama

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
45	AMDAL	Rencana usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (offshore) di Desa Rajik dan Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Synergy Maju Bersama
46	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK – HTI di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Indosukses Lestari Makmur
47	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pembangunan T/L 70 kV Dukong-Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II
48	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus di Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	CV. Sejahtera Utama
49	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Bumi Makmur Sejahtera Jaya
50	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di Laut Rambat dan Keranji, di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sentra Tinindo
51	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi di Kecamtan Koba, Namang, Simpang Katis dan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah	PT. Agrindo Persada Lestari

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
52	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Eksploitasi Bahan Galian Timah Lepas Pantai di Tanjung Pemuja Desa Tayu Ketap, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Sinar Mutiara Sejahtera
53	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Kelapa-Mentok dan Gardu Induk Terkait	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II
54	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pemanfaatan Oli Bekas sebagai Bahan Bakar Tanur untuk Peleburan Timah di Unit Metalurgi di Desa Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	PT. Timah (Persero) Tbk
55	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Desa Air Gantang dan Desa Kelabat, Kabupaten Bangka Barat	PT. Sumber Jaya Indah
56	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan T/L 150 kV Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II
57	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. United Smelting
58	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kecamatan Dendang dan Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur seluas ±9.485 Ha	PT. Greenland Diorama

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
59	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu yang menghubungkan Tanjung Gudang Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dengan Tanjung Ru Kelurahan Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat	Dinas PU Provinsi Kep. Bangka Belitung
60	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri di Tanjung Ular, di Desa Air Putih, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat	PT. Timah (Persero) Tbk
61	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka	PT. Goshen Bangka Mulia
62	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kabupaten Bangka Selatan	PT. Goshen Bangka Mulia
63	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan UPHHK-HTI di Kec. Kelapa Kampit, Gantung, Simpang Pesak, Dendang dan Simpang Renggiang, Kab. Belitung Timur seluas ± 29.418 Ha	PT. Andalan Karya Pertiwi
64	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. Tiga Sekawan
65	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Gedung Perkantoran di Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
66	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Swiss-Bel Hotel di Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang	PT. Bangun Mega Lestari
67	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Desa Air Mesu Timur, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah	PT. Bangka Prima Tin
68	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Sarana Penunjang Tambang di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Silika Tiga Mas
69	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat	PT. Babel Sumber Pratama Mineral
70	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)*di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	PT. Cipta Mineral Bumi Selaras
71	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	PT. Hasil Alam Sukses Pratama
72	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat	PT. Arsed Indonesia
73	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandar Udara H.A.S Hanandjoeddin di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
74	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Mutiara Prima Sejahtera
75	AMDAL	Rencana kegiatan pembangunan bendung pice besar Daerah Irigasi Selingsing dengan luas tampungan 3.182,40 Ha di Desa Lenggang dan Desa Selingsing, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VIII, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
76	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah dengan kapasitas produksi tambahan 10 ton/hari di Dusun Bangek, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Billitin Makmur Lestari
77	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah dengan Tambahan Kegiatan Ponton Isap Produksi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Timah (Persero) Tbk
78	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	rencana usaha pembangunan mill-plant pengolahan mineral logam timah (relokasi) dengan kapasitas pengolahan 100 ton ore (bongkah)/hari pada lahan seluas 3,3, Ha di Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Menara Cipta Mulia
79	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* dengan Tambahan Kapasitas Produksi 7.000 ton/tahun di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.	PT. Mitra Stania Prima

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
80	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Penambanagan Timah Lepas Pantai *(Offshore*) di Perairan Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu dan Kabupaten Bangka	PT. Hasil Alam Gemilang Pratama
81	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Kepelabuhan Pangkalbalam di Jl. Yos Sudarso No. 1 Kel. Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Pangkalbalam
82	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (*mill plant* dan *smelter*) dengan kapasitas terpasang 100 ton ore/hari untuk *mill plant* dan kapasitas tanur terpasang 2 x 20 ton/heat/hari untuk *smelter* dalam areal seluas 3,3 Ha di Dusun Gumbak, Desa Mentawak, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur	PT. Menara Cipta mulia
83	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanus terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan	PT. Synergy Maju Bersama
84	AMDAL	Rencana perubahan usaha pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan kapasitas tanur terpasang 4 x 6 ton konsentrat/heat pada lahan seluas 15.721 m² di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan kepemilikan dari PT. Synergy Maju Bersama menjadi PT. Lautan Harmonis Sejahtera	PT. Lautan Harmonis Sejahtera
85	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Prima Timah Utama

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
86	AMDAL	Perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas HGU 11.337,582 Ha dan kapasitas pabrik 60 ton TBS/jam di Kecamatan Membalong, Badau dan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	PT. Forestalestari Dwikarya
87	DELH	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. Dua Sekawan
88	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana usaha peleburan dan pemurnian bijih timah (smelter) dengan perubahan kapasitas produksi sebesar 38,4 ton/hari di Kawasan Industri Ketapang, Jl. TPI Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Tinindo Inter Nusa
89	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah	CV. Bangka Timah Makmur
90	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan dermaga dengan panjang ± 102 m dan lapangan penumpukan seluas ± 5.265 m² di Desa Air Jukung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka	PT. Pelindo II (Persero)
91	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah *(smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan mengganti teknologi produksi dari tanur pendam menjadi tanur listrik dengan kapasitas produksi 30 ton/hari dan perubahan nama perusahaan dari CV. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Donna Kembara Jaya	PT. Donna Kembara Jaya

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
92	AMDAL	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Donna Kembara Jaya menjadi PT. Bangka Serumpun	PT. Bangka Serumpun
93	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Perubahan usaha dan/atau kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Desa Pelempang, Desa Air Bulu, Desa Rukam, Desa Cengkong Abang, Desa Kota Kapur, Desa Petaling, dan Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kapasitas produksi dari 60 ton/hari menjadi 120 ton/hari dan penambahan unit pengolahan kernel	PT. Putra Bangka Mandiri
94	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Air Baku dengan luas 12,6 Ha, kedalaman 6 m dan daya tampung 720.000.000 m^3 di Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung	Dinas PU Kab. Belitung Timur
95	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Muntok-Padang dengan kapasitas 25.285 KW dan 31.040 KW berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 94 PAL II, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan di Jalan Simpang Renggiang-Manggar, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	PT. PLN (Persero) Wilayah Babel
96	UKL -UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembnagunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Pkp-Kelapa-Mentok dan SUTT Pangkalpinang-Koba-Toboali dan Gardu Induk Terkait di Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Basel	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
97	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah berupa perubahan kepemilikan dari CV. Serumpun Sebalai menjadi PT. Premium Tin Indonesia	PT. Premium Tin Indonesia

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
98	AMDAL	Rencana Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (UPHHK-HTI) seluas ± 33,494 Ha di Desa Pergam, Kec. Air Gegas, di Desa Bedengung, Irat, Kecamatan Payung, di Desa Jelutung II, Gudang, Kecamatan Simpang Rimba, dan di Desa Batu Betumpang, Panca Tunggal, Fajar Indah, Suka Jaya, Sumber Jaya Permai, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	PT. Hutan Lestari Raya
99	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* dengan luas areal ± 4.482 m² dan kapasitas tanur terpasang 3.600 Ton Ore/Tahun di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera
100	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Jln. Ketapang, Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 2 x 15 ton/hari menjadi 2 x 20 ton/hari dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik.	PT. DS Jaya Abadi
101	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengerukan Alur Sungai Manggar dengan volume kerukan 279.308,48 m³ dan dumping area 2051’18,65’’S 108028’1,74’’E serta dengan kedalaman 20 m oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur di Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Dinas Perhubungan Kab. Beltim
102	AMDAL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa perubahan pengelolaan lingkungan hidup dengan bertambahnya kerjasama kemitraan dengan BUMD, BUMDes, CV. Koperasi dan bentuk kemitraan lainnya	PT. Timah (Persero) Tbk Perubahan Pengelolaan

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
103	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pengamanan Maksimum Pulau Naduk seluas ± 206,23 Ha di Desa Petaling, Kecamatan Selat Nasik, Kab. Belitung	Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian
104	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Embung Jernang dengan daya tampung embung sebesar 510.383,59 m^3 di Desa Batu Betumpang, Kecamatan Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Prov. Bangka Belitung Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
105	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Jalan Angkut Produksi dan Peningkatan Dermaga Terminal Khusus Tanjung Resing untuk Menunjang Kegiatan Operasional Kebun dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dengan luas areal jalan 4,5 Ha (Kawasan Hutan : 3,92 Ha dan areal peruntukan lain : 0,58 Ha) dan luas areal terminal khusus (APL) : 14,96 Ha di Desa Dendang, Kec. Dendang, Kab. Beltim	PT. Sahabat Mewah Makmur
106	DPLH	kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 529,93 ha di Desa Berang-Ibul dan Pelangas, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dan Desa Balunijuk dan Merawang, Kecamatan Merawang serta Desa Air Duren-Bukit Tabir, Kecamatan Pemali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Tata Hamparan Eka Persada
107	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambahan Kapasitas Produksi Pembangkit PLTD Koba dari 8.836 KW menjadi 13.854 KW dan PLTD Selat Nasik dari 400 KW menjadi 2.670 KW di Jalan Listrik Nomor 1, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dan Kelurahan Selat Nasik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sektor Pembangkitan Bangka Belitung

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
108	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai di di Laut Pasir Padi, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan penggunaan kapal isap dengan metode Bore Hole Mining (BHM) (2 Unit) yang operasinya mampu mencapai target solid sebesar 60.000 m3/bulan dan tidak melakukan cut and fill pada dasar laut dengan luas 238,84 Ha	PT. Stanindo Inti Perkasa
109	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Jl. Raya Pangkalpinang-Sungailiat Km 18,5, Desa Merawang No. 449, Kec. Merawang, Kab. Bangka berupa rencana perubahan status badan usaha CV. Keranji Jaya Mandiri PT. Kijang Jaya Mandiri, pembangunan dan peningkatan tanur terpasang dari 6.000 ton/tahun menjadi 11.700 ton/tahun, peningkatan luas areal dari 2,3 ha menjadi 12,4 Ha dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	PT. Kijang Jaya Mandiri
110	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 3.500 ton/tahun menjadi 6.900 ton/tahun dan perubahan jenis tanur bakar menjadi tanur listrik	CV. Tiga Sekawan
111	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 143 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Sentosa	PT. Sentra Tin Indo Sentosa

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
112	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 57 ha di Laut Penyusuk, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Sentra Tin Indo menjadi PT Sentra Tin Indo Makmur	PT. Sentra Tin Indo Makmur
113	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Laut dengan luas 118,61 ha di Laut Bubus, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Sentra Tin Indo menjadi PT. Sentra Tin Indo Cemerlang	PT. Sentra Tin Indo Cemerlang
114	DELH	Usaha dan/atau Kegiatan Normalisasi Alur, Muara dan Kolam Pelabuhan Nusantara Sungailiat dengan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur muara sungai dan perairan laut sungailiat sebesar 34.299,040 m^3 dan jumlah estimasi volume yang dikeruk pada alur dan kolam pelabuhan perikanan nusantara sungailiat sebesar 900.000 m^3	PT Pulomas Sentosa
115	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah Jl. Air Mawar Dalam RT. 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh CV Tiga Sekawan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Tiga Sekawan menjadi PT. Rajehan Ariq	PT. Rajehan Ariq
116	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Bandara Depati Amir di Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka dan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT. Angkasa Pura II

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
117	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Peleburan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Ketapang, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	CV. Venus Inti Perkasa
118	UKL - UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Khusus seluas 0,3 Ha di Desa Gantong, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur	PT. Hero Progres Internasional
119	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai *(Offshore)* dengan luas 247 Hektar di Laut Rambat, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat berupa perubahan kepemilikan dari PT. Sarana Marindo menjadi PT. Jelajah Marindo Persada	PT. Jelajah Marindo Persada
120	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah di laut dengan metode Bore Hole dengan luas area 108.753 Ha di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan	PT. Timah (Persero) Tbk
121	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 778 Hektar di Laut Penganak, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Agung Persada	PT. Agung Persada Sejahtera
122	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai *(Offshore)* dengan luas 3.295 Hektar di Laut Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Rencana perubahan kepemilikan dari PT Goshen Bangka Mulia menjadi PT. Permata Indah Menumbing	PT. Permata Indah Menumbing

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
123	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai dengan luas 200 Hektar di Laut Pasir Padi, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Tinindo Inter Nusa menjadi PT. Tin Industri Nasional	PT. Tin Industri Nasional
124	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bijih Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 2.099 Hektar di Laut Sebagin, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT Tinindo Inter Nusa menjadi PT Tin Industri Abadi	PT. Tin Industri Abadi
125	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) d Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kapasitas tanur terpasang dari 4 x 6 ton/heat menjadi 20 ton/hari (1 x 20 ton/hari) dan perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	PT. Lautan Harmonis Sejahtera
126	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah *(Smelter)* di Jl. TPA Kenanga RT 01 Lingkungan Air Kenanga, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV. Dua Sekawan menjadi PT Masbro Alam Stania dan perubahan jenis tanur dari tanur bakar menjadi tanur listrik dengan kapasitas	PT. Masbro Alam Stania

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		produksi tetap 3.500 ton/tahun serta perubahan unit genset dari 2 unit genset kapasitas @ 150 kVA menjadi 2 unit genset kapasitas @ 1.100 kVA	
127	AMDAL	Rencana usaha dan/atau kegiatan Pembangunan Pabrik Peleburan Bijih Timah *(Smelter)* Di Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT Alam Lestari Kencana menjadi PT Mitra Sukses Globalindo	PT. Mitra Sukses Globalindo
128	UKL - UPL	Rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV Dukong – Manggar dan Gardu Induk Terkait di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
129	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (Smelter) di Desa Pasir Putih, Kec. Tukak Sadai, Kab. Bangka Selatan berupa rencana perubahan kepemilikan dari CV Sabang Tin Industries menjadi PT Rajawali Rimba Perkasa dan perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang 28 ton/hari menjadi 43 ton/hari serta perubahan teknologi tanur bakar menjadi tanur listrik	PT. Rajawali Rimba Perkasa
130	AMDAL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengerukan pasir laut seluas 1.800 Ha di Perairan Selat Lepar, Kecamatan Lepar Pongok dan Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan berupa perubahan judul dokumen lingkungan hidup dari pendalaman alur pelayaran pelabuhan sadai menjadi pengerukan pasir laut serta	PT. Mitra Bangka Resources

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	
131	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pabrik Peleburan Timah di Dusun Kelekak Datuk, Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung berupa rencana perubahan penggunaan alat-alat produksi	PT. Babel Surya Alam Lestari
132	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Bukan Logam (Zirkon dan Kuarsa) di Jl. Ketapang Kawasan Industri RT/RW. 01/01, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang	PT. Megah Mineral Sejahtera
133	DELH	Usaha dan/atau kegiatan Ruas – Ruas Jalan yang telah beroperasi (Eksisting), sepanjang 570,56 Km di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
134	UKL-UPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Air Anyir - Pangkalpinang 2 dan GI 150 kV Pangkalpinang 2, di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka	PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel
135	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan teknologi dari 5 tanur pantul menjadi 2 tanur pantul dan 3 tanur listrik, perubahan peningkatan sistem pengelolaan limbah domestik dan sirkulasi air proses serta pemisahan kajian	PT. Refined Bangka Tin

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		smelter dan tambang dari dokumen AMDAL sebelumnya (terpadu) menjadi tersendiri/terpisah	
136	Amdal	Rencana Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	PT. Putera Sarana Shakti
137	Amdal	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Timah Lepas Pantai dengan luas 258 Hektar di Laut Bubus, Kelurahan Bukit Ketok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka,berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Putera Sarana Shakti	PT Putera Sarana Shakti
138	Amdal	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai *(Offshore)* dengan luas 108 Hektar di Laut Sungai Belinyu, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Lautan Sarana Mandiri	PT Lautan Sarana Mandiri
139	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) di Jalan Raya Ketapang, RT.001/001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kawasan Industri Ketapang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan peningkatan kapasitas tanur terpasang yang semula 15.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar menjadi 20.000 ton/tahun dengan menggunakan 6 unit tanur bakar dan dengan menambah 2 unit tanur listrik, peningkatan luas areal yang	PT. Sariwiguna Bina Sentosa

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		semula 5.740 m2 menjadi 58.825 m2 dan peningkatan luas bangunan yang semula 3.312 m2 menjadi 8.526 m2	
140	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah (smelter) yang berada di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, berupa rencana perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Timah Utama Sejahtera menjadi PT Mitra Sukses Globalindo dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu perubahan kapasitas tanur bakar terpasang sebesar 3.000 Ton/Tahun dan penambahan tanur listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 12.000 Ton/Tahun	T. Mitra Sukses Globalindo

141	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pertambangan timah di Prov. Kep. Bangka Belitung berupa perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yaitu:1. Penambangan Timah di darat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, yang kegiatannya berupa:a) Tambang Kecil Terintegrasi (TKT) menggunakan bore hole mining b) Pengoperasian gudang bijih timah sementara yang selanjutnya disebut stasiun pengumpulc) Pengoperasian gudang biji timah2. Penambangan timah di perairan laut di Pulau Bangka, meliputi:a) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya menjadi satu dengan peralatan penambanganb) Kapal produksi yang peralatan pencuciannya terpisah dengan peralatan penambangan3. Pengolahan bijih timah dengan sistem mekanik di tambang darat Pulau Bangka dan Belitung4. Pengolahan bijih timah dengan sistem basah dan kering di PPBT Pulau Bangka dan Pulau Belitung meliputi:a) PPBT di Muntok, di Jebus dan Tanjung Ular Kabupaten Bangka Barat b) PPBT di Pemali, di Batu Rusa dan Belinyu Kabupaten Bangkac) PPBT di Kabupaten Bangka Tengah d) PPBT di Toboali Kabupaten Bangka Selatan e) PPBT di Selingsing Kabupaten Belitung Timur5. Pembangunan dan pengoperasian Fuming dan Ausmelt di Unmet Muntok Kabupaten Bangka Barat, berupa:a) Pembangunan dan pengoperasian Fumingb) Pembangunan dan pengoperasian Ausmelt6. Pembangunan dan pengoperasian PPBT dan peleburan di Kabupaten Belitung Timur, yang kegiatannya meliputi:a) Pembangunan dan pengoperasian PPBT (Pusat Pencucian Bijih Timah)b) Pembangunan dan pengoperasian peleburan bijih timahc) Laboratorium	PT Timah, Tbk

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
142	Amdal	Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Timah Lepas Pantai (Offshore) dengan luas 30 Hektar di Laut Danta, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka berupa perubahan kepemilikan dari PT Sarana Marindo menjadi PT Marindo Sukses Samudera	PT. Marindo Sukses Samudera
143	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah *(smelter)* di Jalan Ketapang Raya, Kawasan Industri Ketapang, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berupa perubahan kepemilikan dari PT. Bangka Putra Karya menjadi CV Venus Inti Perkasa dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi peningkatan kapasitas tanur terpasang (total) : 25.000 ton/tahun, penggunaan tanur tetap (tanur bakar) kapasitas terpasang : 11.000 ton/tahun dan penambahan tanur listrik (kapasitas terpasang) : 14.000 ton/tahun	CV. Venus Inti Perkasa
144	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan pengolahan dan pemurnian bijih timah *(smelter*) di Jl. TPA Kenanga Permai, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi rencana perubahan penggantian 2 unit tanur bakar menjadi 2 unit tanur listrik, peningkatan kapasitas tanur terpasang dari 3.000 ton/tahun menjadi 12.000 ton/tahun dan durasi operasi 1 x 18 jam/hari menjadi 2 x 12 jam/hari	PT. Artha Cipta Langgeng
145	Adendum ANDAL dan RKL-RPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Timah *(Smelter)* di Kawasan Industri Jelitik, Kelurahan Jelitik, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang meliputi perubahan penggantian 2 unit tanur pantul menjadi 2 unit tanur listrik.	PT. Refined Bangka Tin

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
146	UKL-UPL	Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan Tambak Udang Vannamei di Jalan Raya Koba, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka	PT. SHRIMPI

Keterangan:
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	PT. Tata Hamparan Eka Persada	Agroindustri	Penyimpanan Sementara	188.4/04/PY-LB3/DINPMP2KUKM/V/2018
2	PT. Forestalestari Dwikarya (Tanjung Kembiri Mill)	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.46/002/KEP/LB3/DMPPTSPP/2017
3	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka Selatan	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/311/BLH/2016
4	PT. Timah, Tbk UPDB-Bidang Pengawasan Tambang dan Pengangkutan Bangka Barat	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/269/2.12.1.1/2018
5	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II - DPPU Depati Amir Pangkalpinang	Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran BBM Jenis Jet A-1 (Migas)	Penyimpanan Sementara	188.45/4042/KLH/2014
6	PT. Timah Tbk - Unit Produksi Belitung	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.45/254 Tahun 2016

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
7	PT. Astika Murni Utama	Jasa	Penyimpanan Sementara	188.46/004/KEP/LB3/DPMPTSPP/2018
8	PT. PLN (Persero) PLTD Merawang	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.4/48/TPS-B3/LH/VII/2016
9	PT. Prima Timah Utama	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	322/KEP/BLH/VII/2015
10	PT. Bukit Timah	Peleburan dan Pemurnian Timah	Penyimpanan Sementara	172 Tahun 2014
11	PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung (DAK) - Unit Galangan Selindung	Galangan Kapal	Penyimpanan Sementara	210/Kep.DLH/V/2017
12	PT. Tinindo Inter Nusa	Pengolahan dan Pemurnian Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	219/Kep/BLH/IV/2015
13	PT. Refined Bangka Tin	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.4/02/PY-LB3/DINPMP2KUKM/IV/2018

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
14	PT. Timah Tbk - Unit Metalurgi	Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian)	Penyimpanan Sementara	188.45/255/2.12.1.1/2018
15	PT. Belitung Energy	Ketenagalistrikan	Penyimpanan Sementara	503/04/IPSLB3/DPMPTSPP/II/2018
16	PT. PLN (Persero) - Unit PLTD Mentok	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/602/1.08.02/2013
17	PT. Pahala Harapan Lestari	MPJ (Dockyard Kapal/Galangan Kapal)	Penyimpanan Sementara	380/KEP/BLH/IX/2015
18	PT. Timah Tbk - UPDB Pengawasan Produksi dan Pengangkutan Bangka	Pertambangan	Penyimpanan Sementara	188.4/36/PY-LB3/DINLH/VII/2017
19	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Agroindustri (Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit)	Penyimpanan Sementara	188.45.608 Tahun 2014
20	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/344/1.08.02/2014

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
21	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Perkebunan, Pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan CPO, dan Pengolahan Inti Sawit	Penyimpanan Sementara	503/02/IPSLB3/DPMPTSPP/I/2018
22	PT. Sawindo Kencana	Agroindustri Pabrik Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/20.A/2.5.1.1/2017
23	PT. Gunung Pelawan Lestari	Agroindustri (Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit)	Penyimpanan Sementara	188.4/58/TPS-LB3/LH/IX/2016, 188.4/59/TPS-LB3/LH/IX/2016, 188.4/60/TPS-LB3/LH/IX/2016
24	PT. PLN (Persero) PLTD Pilang	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/003/KEP/BLHD/I/2014
25	PT. PLN (Persero) PLTD Padang	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45-151 Tahun 2014
26	PT. Belitung Industri Sejahtera	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.46/001/Kep/LB3/DPMPTSPP/2018
27	PT. PLN (Persero) PLTD Koba	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/4282/KLH/2013

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
28	PT. PLN (Persero) PLTD Toboali	Pembangkit Listrik	Penyimpanan Sementara	188.45/384/BLH tahun 2013
29	PT. Mitra Stania Prima	Pengolahan Bijih Timah (smelter)	Penyimpanan Sementara	188.4/29/TPS-LB3/LH/VI/2014
30	PT. Bumi Permai Lestari - PKS Bukit Perak	Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/287/2.12.1.1/2017
31	PT. Putra Bangka Mandiri	Agroindustri (Perkebunan, Pabrik Kelapa Sawit dan KCP)	Penyimpanan Sementara	188.4/15.1/TPS-B3/LH/II/2015
32	PT. Parit Sembada	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45-667 Tahun 2015
33	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.4/32/PY-LB3/DINLH/VI/2017
34	PT. Rebinmas Jaya	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/185.A/KEP/BLHD/2016

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
35	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama - Palm Oil Mill	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Penyimpanan Sementara	188.45/219/DPKPLH/2017
36	PT. Valten Cahaya Anugrah	Pengelolaan Limbah B3 Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	188.4/22/DINLH/2018

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-43 Pengawasan Izin Lingkungan(AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2019

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT. Bangka Serumpun	11 Februari 2019	Tidak Operasional
2	PT. DS Jaya Abadi	11 Februari 2019	TAAT
3	PT. Stanindo Inti Perkasa	11 Februari 2019	TAAT
4	PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Pangkalbalam	12 Februari 2019	TIDAK TAAT (Rapor Merah dan dikenakan sanksi administrasi)
5	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	12 Februari 2019	TAAT (Rapor biru)
6	PT. Rajehan Ariq	13 Februari 2019	Tidak Operasional
7	CV. Venus Inti Perkasa	13 Februari 2019	TAAT
8	CV. United Smelting	13 Februari 2019	Tidak Operasional
9	PT. Bangka Belitung Timah Sejahtera	14 Februari 2019	Tidak Operasional
10	CV. Dua Sekawan	14 Februari 2019	Tidak Operasional
11	PT. Dewa Putra Bangka	18 Februari 2019	TIDAK TAAT
12	PT. Devina Mardi Permata	18 Februari 2019	TAAT
13	PT. Puncak Prima Lestari	20 Februari 2019	TAAT
14	PT. Bangka Inti Besaoh	20 Februari 2019	TAAT
15	PT. Angkasa Pura II - Bandar Udara Depati Amir	20 Februari 2019	TAAT

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
16	PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel	21 Februari 2019	TAAT
17	PT. Plasma Bangka Besaoh	21 Februari 2019	TAAT
18	PT. Aries Kencana Sejahtera	21 Februari 2019	Tidak Operasional
19	PT. Inti Stania Prima	25 Februari 2019	Tidak Operasional
20	CV. Ayi Jaya	25 Februari 2019	Tidak Operasional
21	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung (Unit Distribusi)	26 Februari 2019	TAAT
22	PT. Inhutani V SPHK-Bangka Belitung	27 Februari 2019	TIDAK TAAT (dikenakan sanksi administrasi)
23	PT. PLN (Persero) PLTU Air Anyir	27 Februari 2019	TAAT (Rapor biru)
24	PT. Pelindo II Cabang Belinyu	28 Februari 2019	TAAT
25	PT. Bangka Tin Industry	28 Februari 2019	TIDAK TAAT
26	PT. Bangkanesia	4 Maret 2019	TIDAK TAAT
27	PT. Istana Kawi Kencana	5 Maret 2019	TIDAK TAAT
28	PT. Hutan Lestari Karya	5 Maret 2019	TIDAK TAAT
29	PT. Agrindo Persada Lestari	6 Maret 2019	TIDAK TAAT
30	PT. Bangun Rimba Sejahtera	6 Maret 2019	TIDAK TAAT
31	PT. Sinar Mutiara Sejahtera	13 Maret 2019	TIDAK TAAT
32	PT. Grand Cirindo/Novotel Hotel	18 Maret 2019	TAAT
33	PT. Bangun Mega Lestari/Swissbell Hotel	18 Maret 2019	TAAT
34	Hotel Soll Marina	20 Maret 2019	TAAT
35	Hotel Santika	20 Maret 2019	TAAT
36	RS. Bhakti Wara	21 Maret 2019	TIDAK TAAT

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
37	RS. Bhakti Timah	21 Maret 2019	TAAT
38	PT. Agro Makmur Abadi	26 Maret 2019	TAAT
39	PT. Andalan Karya Pertiwi	26 Maret 2019	TIDAK TAAT (dikenakan sanksi administrasi)
40	PT. Indo Sukses Lestari Makmur	26 Maret 2019	TIDAK TAAT (dikenakan sanksi administrasi)
41	RSUD Kota Pangkalpinang	2 April 2019	TIDAK TAAT
42	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumbagsel	2 April 2019	TAAT
43	Grand Sahid Hotel	4 April 2019	TAAT
44	RS. Siloam	4 April 2019	TAAT
45	PT. Agro Pratama Sejahtera	15 April 2019	TIDAK TAAT (dikenakan sanksi administrasi)
46	PT. Palmindo Billiton Berjaya	15 April 2019	TAAT
47	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	28 Juni 2019	TAAT
48	PT. Kijang Jaya Mandiri	24 Juni 2019	Tidak Operasional
49	PT. ATD Makmur Mandiri	25 Juni 2019	TAAT
50	PT. Artha Cipta Langgeng	27 Juni 2019	TAAT
51	PT. Panca Mega Persada	26 Juni 2019	Tidak Operasional
52	PT. Aega Prima	12 Juli 2019	Tidak Operasional
53	PT. Sarana Marindo	15 Juli 2019	Tidak Operasional
54	PT. Kampit Tin Utama	30 Juli 2019	Tidak Operasional
55	PT. Babel Surya Alam Lestari	30 Juli 2019	Tidak Operasional
56	PT. Tommy Utama	30 Juli 2019	Tidak Operasional
57	PT. Cirindo Minning Utama	29 Agustus 2019	Tidak Operasional

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
58	PT. Bangka Prima Tin	29 Agustus 2019	Tidak Operasional
59	PT. Mitra Sukses Globalindo	29 Agustus 2019	TAAT
60	PT. Sentra Tin Indo Makmur	28 Agustus 2019	Tidak Operasional
61	PT. Arsed Indonesia	28 September 2019	Tidak Operasional
62	PT. Semesta Surya Persada	28 Agustus 2019	TAAT
63	PT. Hasil Alam Gemilang Pratama	2 Desember 2019	Tidak Operasional
64	PT. Mitra Stania Prima	2 Desember 2019	Tidak Operasional
65	PT. Sumber Jaya Indah	3 Desember 2019	Tidak Operasional
66	PT. PLN MPP-Batam	3 Desember 2019	TAAT (Rapor biru)
67	PT. Permata Indah Menumbing afiliasi PT. Ghosen Bangka Mulia	4 Desember 2019	Tidak Operasional
68	UPDB PT. Timah-Bateng	3 Desember 2019	TAAT
69	PT. Bumi Hero Perkasa	7 Oktober 2019	TAAT
70	PT. Swarna Nusa Sentosa	4 Oktober 2019	TAAT
71	PT. Sejahtera Indah Perkasa (Kabupaten Bangka Selatan)	28 Oktober 2019	TIDAK TAAT
72	PT. Sumber Alam Segara	28 Oktober 2019	TIDAK TAAT
73	PT. Lotus Mandiri Sukses	28 Oktober 2019	TIDAK TAAT
74	KSU Mitra Albajo	28 Oktober 2019	TIDAK TAAT
75	PT. Indah Makmur Mandiri	29 Oktober 2019	TIDAK TAAT
76	PT. Tambak Sukses Pratama	30 Oktober 2019	TIDAK TAAT
77	PT. Garaya Makmur Sentosa	30 Oktober 2019	TIDAK TAAT
78	CV. Panorama Lintas Timur	30 Oktober 2019	TIDAK TAAT

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
79	PT. Bahari Bio Makmur (Kabupaten Bangka)	30 Oktober 2019	TIDAK TAAT
80	PT. Bahari Bio Makmur (Kabupaten Bangka Barat)	31 Oktober 2019	TIDAK TAAT
81	PT. Sejahtera Indah Perkasa (Kabupaten Bangka)	31 Oktober 2019	TIDAK TAAT
82	PT. Budi Agri Sejahtera	31 Oktober 2019	TIDAK TAAT
83	CV. Tjahaya Makmur Fajar	31 Oktober 2019	TIDAK TAAT
84	PT. Prayasa Mina Tirta	18 November 2019	TIDAK TAAT
85	PT. Pelangi Argo Sentosa	22 November 2019	TIDAK TAAT

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-44. Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No	Kabupaten/ Kota	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Pangkalpinang	15 lokasi banjir	3	0	-
2	Kabupaten Bangka	6 lokasi banjir	0	0	-
3	Kabupaten Belitung	4 lokasi banjir	0	0	-
4	Kabupaten Belitung Timur	0	0	0	-
5	Kabupaten Bangka Tengah	1 lokasi kejadian	0	0	-
6	Kabupaten Bangka Barat	0	0	0	-
7	Kabupaten Bangka Selatan	1 lokasi kejadian	0	0	-

Keterangan : Tidak ada data terkait luasan area terdampak dan perkiraan kerugian
Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel -45 Bencana Kekeringan, Luas Dan Kerugian

Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten/Kota	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Kota Pangkalpinang	0	0
2	Kabupaten Bangka	0	0
3	Kabupaten Bangka Tengah	0	0
4	Kabupaten Bangka Barat	0	0
5	Kabupaten Bangka Selatan	0	0
6	Kabupaten Belitung	0	0
7	Kabupaten Belitung Timur	0	0

Keterangan: Tidak ada laporan kejadian bencana kekeringan tahun 2019

Sumber: BPBD Prov. Kep. Bangka Belitung, tahun 2020

Tabel-46. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No	Kabupaten/Kota	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Pangkalpinang	170,43	-
2	Kabupaten Bangka	172,8	-
3.	Kabupaten Belitung	154	-
4.	Kabupaten Bangka Tengah	427,12	-
5.	Kabupaten Bangka Barat	6	-
6.	Kabupaten Belitung Timur	0	-
7.	Kabupaten Bangka Selatan	70,317	-

Keterangan : Tidak ada data perkiraan kerugian terhadap bencana Karhutla
Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-47. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Pangkalpinang	Puting Beliung	0	-
2	Kabupaten Bangka	Puting Beliung	0	-
3	Kabupaten Bangka Tengah	Tanah Longsor	5	-
4	Kabupaten Bangka Tengah	Puting Beliung	0	-
5	Kabupaten Bangka Barat	Tanah Longsor	7	-
6	Kabupaten Bangka Barat	Puting Beliung	0	-
7	Kabupaten Bangka Selatan	Tanah Longsor	1	-
8	Kabupaten Bangka Selatan	Puting Beliung	0	-
9	Kabupaten Belitung	Puting Beliung	0	-
10	Kabupaten Belitung Timur	Tanah Longsor	4	-
11	Kabupaten Belitung Timur	Puting Beliung	0	-

Keterangan : Tidak ada data terkait perkiraan kerugian
Sumber : BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-48 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)*	Kepadatan Penduduk/Km2	Kepadatan Penduduk (%)
1	Kabupaten Bangka	2950.69	337300	21.7	114	5.03
2	Kabupaten Bangka Tengah	2126.36	196200	21.7	92	4.06
3	Kabupaten Bangka Barat	2820.61	213200	21.7	76	3.35
4	Kabupaten Bangka Selatan	3607.08	210000	21.7	58	2.61
5	Kabupaten Belitung	2293.69	189800	21.7	83	3.7
6	Kabupaten Belitung Timur	2507.00	129600	21.7	52	2.3
7	Kota Pangkalpinang	118.8	212700	21.7	1.791	79.03

Keterangan : *Laju pertumbuhan penduduk per tahun pada tahun 2010-2019
Sumber : Bangka Belitung Dalam Angka, 2020

Tabel 49. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun : 2019

No.	Kabupaten/Kota	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m3)	Volume Eksisting (m3)
1	Kabupaten Bangka	Kenanga	Sanitary Landfill	5	135.000	40.077,00
2	Kabupaten Bangka	Belinyu	Sanitary Landfill	15	50.000	2.956,50
3	Bangka Selatan	Junjung Besaoh	Sanitary Landfill	15	160.000	40.000,00
4	Bangka Tengah	Simpang Jongkong	Sanitary Landfill	45	70.000	10.000,00
5	Pangkalpinang	Parit Enam	Control Landfill	4,8	125.000	95.000
6	Bangka Barat	Air Belo	Sanitary Landfill	4,2	115.875	84.290,95
7	Belitung Timur	Trafo Mayang	Sanitary Landfill	12	120.000	-
8	Belitung	Gunung Sadai	Sanitary Landfill	8,5	-	-

Sumber : Data DLH Kab/kota, 2019

Tabel-50 : Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m^3/hari)
1	2	3	4
1	Bangka	327.259	396,68
2	Bangka Selatan	210.019	254,57
3	Bangka Tengah	196.607	238,31
4	Bangka Barat	208.955	253,28
5	Belitung	182.293	220,96
6	Belitung Timur	125.771	152,45
7	Pangkalpinang	208.868	316,47

Sumber : Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung, 2019

Tabel. 51 Jumlah Bank Sampah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten Belitung Timur								
1	Bank Sampah Induk Pelangi Nusa	SK No. 188.4/005.a/KEP/BLHD/I/2013	4,39	Aktif	Kabupaten Belitung Timur	12 orang	17 orang	Rp 5,113,000.-
2	Bank Sampah Pelangi Nusa Unit DLH	SK No. 188.4/24/KEP/DLH/VII/2018	385	Aktif	Komplek Perkantoran Pemkab Beltim	32 orang	8 orang	Rp 455,000.-
3	Bank Sampah Pelangi	SK No. 422/169/SK/SMP6MANGGAR/2017	431	Aktif	SMPN 6 Manggar	130 orang	8 orang	Rp 613,000.-
4	Bank Sampah Desa Lalang	SK Nomor 43 Tahun 2019	267	Aktif	Desa Lalang (Dusun Sekip, Dusun Terang Bulan, Dusun Sawah)	23 orang	9 orang	Rp 305,000.-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
Kabupaten Bangka Barat								
5	Bank Sampah Sepakat Desa Air Limau	SK No. : 660.1/23/19.05.01.2007/2019	408,3	Aktif	Desa Air Limau	80 orang	12 orang	Rp. 3,323,000.-
Kabupaten Bangka Tengah								
6	Bank Sampah Kel. Simpang Perlang (Teratai)	SK No. 188.5/50/19.04.01.1005/2018 tanggal 1 Februari 2018	960	Aktif	Kelurahan Simpang Perlang	6 orang	3 orang	Rp. 500,000.-
7	Bank Sampah Kelurahan Arung Dalam	SK No.188.5/043/19.04.01.1002/2019 tanggal 7 Januari 2019	2.400	Aktif	Kelurahan Arung Dalam	30 orang	2 orang	-
8	Bank Sampah Guntung (Temiang Jaya)	SK No. 188.5/15/19.04.01.2006/2019 tanggal 1 Januari 2019	43.734	Aktif	Desa Guntung (Temiang Jaya)	15 orang	5 orang	Rp. 800,000.-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
9	Bank Sampah Terentang III (Berpanen)	SK No. 188.5/57/19.04.01.2008/2019 tanggal 2 Januari 2019	52.470	Aktif	Desa Terentang III	26 orang	8 orang	Rp. 1,000,000.-
10	Bank Sampah Penyak (Bejebeu Lilai)	SK No. 188.5/007.sk/19.04.01.07/2016 tanggal 4 Januari 2016	177.114	Aktif	Desa Penyak	85 orang	2 orang	-
11	Bank Sampah Desa Kurau Timur	SK. No. 141/54/19.04.01.2003/2019 tanggal 12 Februari 2019	900	Aktif	Desa Kurau Timur	5 orang	4 orang	-
12	Bank Sampah Desa Kulur Ilir (Kulur Berseri)	-	13.344	Aktif	Desa Kulur Ilir	20 orang	5 orang	Rp. 500,000.-
13	Bank Sampah Desa Lubuk Besar (KSM Berkah Mandiri)	-	18	Aktif	Desa Lubuk Besar	89 orang	4 orang	Rp. 2,500,000.-
14	Bank Sampah Desa Belilik	-	6.276	Aktif	Desa Belilik	38 orang	2 orang	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
15	Bank Sampah Kayu Besi (Bahagia Lestari)	-	1.356	Aktif	Desa Kayu Besi	6 orang	2 orang	-
16	Bank Sampah Bukit Kijang (Butterlfy Sped Bank)	SK No. 188.45/6a/19.04.05.2007/ 2018 tanggal 31 Januari 2019	12.525,60	Aktif	Desa Kijang	53 orang	2 orang	-
17	Bank Sampah Desa Cambai (Bernila)	SK No. 188.45/021/19.04.05.2009 /2018	45.408	Aktif	Desa Cambai Selatan	135 orang	12 orang	-
18	Bank Sampah Desa Padang Baru	SK No. 188.45/45/19.04.02.2010/ 2019 tanggal 3 Januari 2019	69.732	Aktif	Desa Padang Baru	20 orang	4 orang	-
19	Bank Sampah Desa Benteng (Jaya Lestari)	SK No. 188.45/45/19.04.02.2010/ 2019 tanggal 3 Januari 2019	6.936	Aktif	Desa Benteng	13 orang	7 orang	-
Kota Pangkalpinang								
20	Bank Sampah Papin	SK No. 188.4 / 18 / DLH / I / 2017	1.935	Aktif	Kota Pangkalpinang	1.324 Orang	5 orang	Rp. 1,300,000.-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
21	Bank Sampah Kawa Begawe	SK No. 07 / SK05 / Kel-sld /XII/ 2017	300	Aktif	Selindung Lama, Kec. Gabek	200 Orang	6 orang	Rp. 300,000.-
22	Bank Sampah Berkah	14 Tahun 2019	-	Aktif	Kel. Semabung Lama, Kec. Bukit Intan	-	9 orang	-

Keterangan Tabel: Tanda - menunjukkan tidak tersedianya data dimaksud
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kep. Bangka Belitung, tahun 2020

Tabel-52. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengolahan sampah menjadi pelet sebagai bahan bakar energi listrik	KSM Kawa Begawi (Pangkalpinang); KSM Sri Menanti (Sungailiat) dan Kelompok Rumah Aspirasi Pangkalpinang	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung kerjasama dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung
2	Pembibitan tanaman asam	Kab. Belitung Timur; Kab. Bangka dan Kota Pangkalpinang	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung kerjasama dengan perusahaan dan sekolah
3	Pilot project bank sampah dan pembuatan kompos	Kel. Bukit Sari Kec. Gerunggang Pangkalpinang	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung kerjasama dengan DLH Kota Pangkalpinang
4	Penyerahan bibit Gerakan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pantai Takari Kab. Bangka	Dinas Kehutanan Prov. Kep Bangka Belitung
5	Penanaman bibit mangrove	Pantai Terentang Kab. Bangka Tengah	Pemprov. Kep Bangka Belitung kerjasama dengan Pemkab Bangka Tengah
6	Penanaman bibit pohon endemik	Bukit Mangkol	BPBD Prov. Kepulauan Bangka Belitung
7	Penyerahan sekaligus penanaman bibit kayu putih di lahan kritis	Desa Batu Penyu Kab. Belitung Timur	Dinas Kehutanan Prov. Kep Bangka Belitung
8	Kerja bakti Pemprov Kep. Bangka Belitung	Seluruh OPD di lingkungan Pemprov Kep. Bangka Belitung	Pemprov Kep. Bangka Belitung

Keterangan : -

Sumber : DLH Prov. Kep. Babel dan website babelprov.go.id, 2020

Tabel-53. Status Pengaduan Masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2019

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK Nomor S-123/PPSA/PP/GKM/2019 Perihal Bantuan Staf /PPLHD (berdasarkan pengaduan masyarakat) pada tanggal 23 Januari 2019	Terkait dugaan ketidaktaatan/pelanggaran kegiatan PT. Vitrama Property yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan bangunan (rumah warga retak)	Tim DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DLH Kabupaten Bangka Tengah mendampingi Tim Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK. Diberikan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1767/MenlHK-PHLHK/GKM.0/3/2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Vitrama Properti
2	Disposisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atas surat dari Bupati Bangka Selatan Nomor: 660/2459.a/DPKPLH/2018 tanggal 17 Desember 2018 Perihal Sanksi Administrasi kepada PT. Timah, Tbk pada tanggal 26 Februari 2019	Hasil pengawasan bersama bahwa di pusat pencucian bijih timah (PPBT) Toboali tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup terutama pada kegiatan pengelolaan limbah B3. Aktifitas yang ada tidak seperti biasanya dan mobilitas transportasi angkut sangat tinggi sehingga kondisi jalan masuk ke PPBT yang berada di tengah kawasan permukiman padat penduduk menjadi tidak kondusif/rawan lakalantas; kegiatan tambang PT. Timah, Tbk di desa Paku (IUP 1536) Kec. Payung berlokasi di Bukit Baji yang dikerjakan/dimitrakan	Diterbitkan surat kepada PT. Timah terkait penghentian kegiatan penambangan timah di lokasi Bukit Baji sampai selesainya proses addendum ANDAL dan RKP-RPL dengan surat nomor: 660/570/DLH tanggal 22 April 2019 hal Tindaklanjut Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan; diterbitkan surat kepada Bupati Bangka Selatan terkait hasil verifikasi serta wajib melakukan penghentian kegiatan penambangan dengan surat nomor: 660/0391/DLH tanggal 29 April 2019 hal Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Lapangan atas Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Pusat Pencucian Bijih Timah (PPBT) dan Operasional CV. Persada Tambang Intitama.

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
		kepada CV.Persada Tambang Intitama belum mengantongi izin lingkungan hidup/sedang dalam proses addendum ANDAL dan RKL-RPL.	
3	Sdr.M.Aris (anggota Pol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) pada tanggal 29 April 2019	Dugaan pencemaran air Sungai Jeruk oleh CPO dari Pabrik PT. Palmindo (sekarang PT. THEP)	Melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel air sungai terhadap surat pengaduan terkait adanya dugaan pencemaran Sungai Jeruk oleh CPO dari pabrik perkebunan sawit milik PT. Palmindo di Desa Labu, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka; dibuat surat tindaklnjut hasil verifikasi pengaduan kepada PT. THEP dengan nomor: 660/652/DLH tanggal 9 Mei 2019 agar PT. THEP melakukan pengelolaan terhadap janjang kosong, cangkang dan abu janjang kosong pengelolaan air lindinya, mengoptimalkan fungsi bak sedimentasi yang berfungsi sebagai oil trap.
4	Media Online Berita Sungailiat pada tanggal 4 Mei 2019	Beroperasinya PIP PT.Timah,Tbk dipesisir Pantai Laut Romodong Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka	Melakukan verifikasi lapangan terkait adanya keresahan masyarakat nelayan Kecamatan Belinyu terhadap beroperasinya Ponton Isap Ponton (PIP) PT.Timah,Tbk dipesisir Pantai Laut Romodong Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka; diselenggarakan audiensi masyarakat nelayan ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait menolak keberadaaan Ponton Isap Produksi (PIP) illegal tersebut; menyerankan kepada PT. Timah, Tbk untuk Ponton Isap Produksi (PIP) hanya beroperasi pada zonasi kawasan peruntukan pertambangan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, agar tidak menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) lebih dari 6 Ponton Isap Produksi (PIP) untuk DU 1561 sesuai kajian Adendum ANDAL, RKL-RPL Pertambangan Timah PT. Timah, Tbk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta melakukan pengelolaan dampak sosial sesuai dokumen Adendum ANDAL, RKL-RPL Pertambangan Timah PT. Timah, Tbk di

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
			Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan Ponton Isap Produksi (PIP) sampai kondusif dan tidak menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat
5	Pengaduan masyarakat (Sdr. Badarudin) via WA pada tanggal 10 Mei 2019	terkait aktifitas tambang ilegal, wilayah masuk KP.PT.Timah. Limbah merusak karena berada di DAS dan perumahan penduduk, pemandian rusak	Melakukan verifikasi lapangan terkait aktifitas tambang ilegal yang limbahnya di duga merusak lingkungan berada di Daerah Aliran Sungai dan perumahan penduduk, pemandian rusak di Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka; Pada tanggal 13 Juli 2019 Sdr. Badarudin memberikan informasi bahwa masalah tambang yang dilaporkan selesai dengan cara dimusyawarahkan oleh warga, aparat setempat dan pemilik tambang.
6	Perintah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung lewat media WA terkait uji coba tambang dari CV. Bangun Jaya Bersama pada area Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Timah, Tbk di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 1 Juli 2019	Dalam rangka melakukan pengumpulan data dan keterangan serta verifikasi lapangan terkait kegiatan uji coba Tambang Skala Kecil (TSK) CV. Bangun Jaya Bersama pada area Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Timah, Tbk di Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah.	Memerintahkan kepada PT. Timah, Tbk melalui surat Kepala DLH Provinsi Kep. Bangka Belitung nomor: 660/1058/DLH tanggal 12 Agustus 2019 hal penghentian kegiatan uji coba tambang CV.Bangun Jaya Bersama selaku Mitra PT.Timah, Tbk untuk menghentikan kegiatan uji coba tambang dan melakukan pengurugan (pemulihan) terhadap lahan yang sudah dibuka tersebut; berdasarkan Surat dari Dinas PUPRT Kabupaten Bangka Tengah tanggal 31 Juli 2019 yang menjelaskan status titik-titik koordinat kegiatan tersebut berada pada pola ruang Zona Budidaya dan Zona Lindung dengan arahan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan/dilarang; Melakukan pengambilan sampel air di 3 titik pada lokasi; menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung perihal telah dilakukan verifikasi lapangan dan melakukan langkah-langkah: (1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUTRP) Kabupaten Bangka Tengah, (2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat/warga disekitar lokasi kegiatan sebelum melakukan kegiatan penambangan, (3) Menjaga kualitas air permukaan dengan tidak membuang tailing dan air proses produksi ke media

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
			lingkungan dengan menerapkan sistem sirkulasi tertutup sehingga tidak ada tailing dan air prosesproduksi masuk media lingkungan, (4) Menjaga kondisi sosial masyarakat sekitar lokasi kegiatan,
7	Surat Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK nomor: S.681/PPSA/PP/GKM.0/5/2019 tanggal 15 Mei 2019 hal : Permohonan Penanganan Pengaduan diterima pada tanggal 10 Juni 2019	Dugaan tambang timah yang menimbulkan pencemaran pantai dan laut di Pantai Takari Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.	Sudah dilakukan verifikasi lapangan dan melaporkan hasil verifikasi tersebut kepada Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2019 via Pos serta ke TIM PETI Gubernur untuk dilakukan tindaklanjut.
8	Perintah Langsung dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 15 Juli 2019	Adanya bau yang menyengat di sekitar area SMKK 5 Pangkalpinang	Melakukan verifikasi lapangan terkait pengaduan dugaan pencemaran bebauan oleh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang di Kota Pangkalpinang; menyarankan kepada pihak RSUD Depati Hamzah agar melakukan kajian lanjutan akibat tidak optimalnya kinerja IPAL dengan uji coba penambahan bakteri pengurai air limbah ke dalam IPAL untuk 1 bulan yang di pantau kembali dan kepada pihak SMKN V untuk menambah pepohoan yang berdaun jarum sebagai sarana peredam bau.
9	Berita dari media sosial Forum Jual Beli Bangka Belitung (FJBBB) tanggal 14 Juli 2019	Dugaan ulah TI Rajuk yang dominan dilakukan oleh masayarakat pendatang yang sudah merusak terumbu karang	Melakukan verifikasi lapangan atas dugaan pengaduan terkait aktifitas TI Rajuk di Pantai Jerangkat Desa Ketap Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat; dan melakukan pengawasan secara ketat bersama dengan PT. Timah, Tbk
10	Berita dalam media Koran Bangka Pos tanggal 9 Agustus 2019	Dugaan pencemaran pada air Sungai Jeruk Kabupaten Bangka terindikasi dari matinya ikan yang hidup di sungai tersebut	Melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel air Sungai Jeruk

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
11	Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terhadap pengaduan melalui media sosial WA tanggal 26 September 2019	Adanya aktivitas tambang timah menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) di daerah aliran Sungai Berok, Kecamatan Bellinyu	Melakukan verifikasi lapangan atas pengaduan dari nelayan Teluk Kelabat terkait aktifitas tambang timah yang menggunakan Ponton Isap Produksi (PIP) yang mengakibatkan pendangkalan alur sungai ke muara serta limbah tambang mencemari daerah tangkapan nelayan di daerah Sungai Berok, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka; Pengambilan sampel air Sungai Berok.
12	Berita melalui media Bangka Pos Online dan informasi dari Direktur Eksekutif WALHI Bangka Belitung (Jessik Amundian) tanggal 1 Oktober 2019	Terjadinya bentrok fisik ratusan nelayan melawan penambang terkait terkait adanya aktivitas tambang illegal yang diduga merusak habitat atau populasi laut dan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan di pantai Matras Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	Melakukan verifikasi lapangan dan menjadi mediator dalam perselisihan yang terjadi dengan hasil yaitu: penambang telah melakukan pembongkaran alat tambang serta menyampaikan surat ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIII dengan nomor: 660/258/DLH tanggal 3 Oktober 2019 hal: Permohonan Informasi Status Kawasan Hutan.
13	Instruksi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 19 Oktober 2019 dan Undangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/3423./DISHUB/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal Undangan	Masalah pembangunan dermaga oleh PT. Swarna Nusa Sentosa (SNS) yang diduga illegal di Pulau Lepar, Kabupaten Bangka Selatan	Melaksanakan pembahasan adanya pembangunan dermaga illegal oleh PT. Swarna Nusa Sentosa di Dinas PUPR dan Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan dan melakukan verifikasi lapangan di Pulau Lepar; telah diterapkan sanksi administratif paksaan pemerintah dengan nomor SK. 188.4/ 1402/DLH/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT.Swarna Nusa Sentosa di Kabupaten Bangka Selatan untuk menghentikan kegiatan pembangunan dermaga di Pulau Lepar Desa Kumbung Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan dan agar melaporkan pelaksanaan RKP dan RPL secara

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
			berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta tembusan kepada DPKPLH Kabupaten Bangka Selatan
14	Surat dari Manager Parai Beach Resort & Spa, Sungailiat nomor: 010/HRD-PBRS/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Pemberitahuan Temuan Limbah di pinggir Pantai Parai, Sungailiat.	Temuan limbah kegiatan penambangan di pesisir Pantai Parai, yang diduga menimbulkan pencemaran air laut dan merusak lingkungan Pantai Parai di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka	Pada tanggal 17 Oktober 2019, Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka telah melakukan peninjauan ke lokasi yang di duga adanya limbah di pesisir pantai Parai, dengan kondisi air laut saat verifikasi lapangan sudah terlihat jernih alami serta tidak tercium bau yang tidak sedap, selanjutnya jika masih menemukan adanya limbah sebagaimana dimaksud di sekitar pesisir pantai parai dan merekomendasikan kepada pihak management Parai, sesuai kewenangan untuk melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15	Laporan dari Pokmaswas Tanjung Ketapang (Sdr Joni Zuhri) tanggal 4 November 2019	Adanya pembukaan lahan mangrove di Pesisir Merbau Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan oleh Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Batam.	Melakukan Koordinasi dengan Polres Kabupaten Bangka Selatan, Dinas PUPR Kabupaten Bangka Selatan, pelapor a.n Sdr Joni Zuhri dan rekan, serta pihak PT. Mina Bahari Merbau a.n Bapak Salim selaku Penanggung Jawab perusahaan terkat rencana pemasangan tanda larangan/plang himbauan kegiatan di lokasi Mangrove terkait pelaporan dari POKMASWAS Tanjung Ketapang (Bpk.Sdr. Joni Zuhri) terhadap kegiatan pembukaan lahan magrove di Pesisir Merbau Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Progres Pengaduan
16	Berita dari Media online Bangkapos.com tanggal 16 November 2019 dan Posbelitung.com tanggal 22 Nopember 2019	Dugaan adanya sebuah rumah kosong yang menyimpan limbah medis sehingga menimbulkan bau busuk dan menyengat	Melakukan Verifikasi lapangan, pengumpulan data dan informasi serta keterangan terhadap dugaan terjadi Pencemaran Limbah B3 Medis di Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung; dilakukan proses penyidikan dan sedang di koordinasikan dengan Dirjen PSLB3 KLHK oleh pihak Kepolisian Polres Belitung dan rumah kosong tempat penumpukan/penyimpanan Limbah B3 Medis sudah dilakukan penyegelan dan dipasang garis polisi (police line) oleh Polres Belitung; dibuatkan Berita Acara Serah Terima Titip Rawat Barang Bukti dari Polre Belitung ke DLH Kabupaten Belitung pada tanggal 16 November 2019; melakukan koordiasi dengan Dirjen PSLB3 KLHK terkait ditemukannya tumpukan Limbah B3 Medis di Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung, bahwa CV.Nur Annisa harus bertanggung jawab terhadap Tumpukan Limbah B3 di rumah kosong tersebut untuk segera di angkut dibawa ke pemusnah akhir yang berizin, karena Limbah B3 tersebut berbahaya dan bersifat inspeksius dikhawatirkan dapat meyebabkan pencemaran lingkungan dan menggangu kesehatan.

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-54. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup Provinsi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	LSM Aliansi Lingkungan Hidup (ALIH) Bangka	-	Jln. Kacang Pedang no. 77A Pangkalpinang
2	Yayasan Lembaga Penelitian, Pengkajian Pembangunan dan Lingkungan Hidup (YP3LH)	-	Jln. Depati Bahrin no. 75 Pangkalpinang
3	Team Operasional Penyelamatan Lingkungan Kep. Bangka Belitung (TOPEL)	-	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
4	Himpunan Pelestari Hutan Andalan (HPMA) Prov. Kep Bangka Belitung	601/BKBPPM/2004	Jalan Irian No. 10 Kel. Asam Pangkalpinang
5	Forum Lingkungan Hidup (FOLHI)	628/BKBPPM/2004	Jln. Pasar Mambo no. 95 Pangkalpinang
6	Yayasan Babel Hijau	677/BKBPPM/2007	Jln. Belibis I no. 167 RT 05 RW 02 Pangkalpinang
7	LSM Garda Lingkungan Hidup (GALIH)	388/BKBPPM/2010	Jl. Belinjo No. 195 Bukit Merapin Gerunggang Pangkalpinang Telp. 0717 434834
8	Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Prov. Kep. Bangka Belitung	408/BKBPPM/2010	Jl. Kapt. Munzir Thalib No. 23 Kec. Taman sari Pangkalpinang
9	Yayasan Bangka Belitung Lestari	19/BKBPPM/2011	Jl. Lumba-Lumba I No.21 A Kel. Gabek I Kec. Gabek Pangkalpinang Telp. (0717) 424570

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
10	Lembaga Peduli Lingkungan Hidup (LPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	220/13/BKBPPM/II/2013	Jl. Kampung Melayu Dalam Rt.07 Rw.03 Kel. Tuatunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang
11	Yayasan Cinta Lestari Lingkungan Hidup	220/23/BKBPPM/2013	Jl. RE. Martadinata Kel. Opas Indah Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
12	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GEMPA)	SKT BATENG 200/120/130/0003/VIII/2014	Jln. Soekarno Hatta II Gg. Sukma Rt. 09/12 Kel. Arung Dalam Kec. Koba Kab. Bangka Tengah
13	Organisasi Pelestarian Flora dan Fauna (Alobi) [1]	Nomor 3 Tanggal 28 September 2017	Jl. Sumedang Gg. H.Sani Rt.001/004 Kel.Kejaksaan Kec.Taman Sari Pangkalpinang
14	Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung [2]	-	Jl. Belanak Raya No. 64 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Air Salemba Kecamatan Pangkalbalam, Kota pangkalpinang 33118
15	Yayasan Terumbu Karang Soubad [3]	Nomor 2 Tanggal 05 Februari 2020	Jl. Slamet Tikung Yaden RT. 008 RW. 005 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
16	Perhimpunan Pencinta dan Pelestari Tanaman Bangka (Bangka Flora Society) [4]	Nomor 6 Tanggal 9 November 2011	Jl. Diponegoro No. 59 RT.07 Kel. Bukit Betung, Kec. Sungailiat Kabupaten Bangka
17	Yayasan Sayang Babel Kite	AHU - 8265.AH.01.04.Tahun 2012	Jl. Sudirman, RT. 02, Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kabupaten Bangka

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kep Bangka Belitung, 2020

[1] Alobi, 2020
[2] Walhi Kepulauan Bangka Belitung, 2020
[3] Soubad, 2020
[4] Bangka Flora Society, 2020

Tabel-55. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)	-	-	0
2.	Master (S2)	13	9	22
3.	Sarjana (S1)	12	23	35
4.	Diploma (D3/D4)	7	6	13
5.	SLTA	14	9	23
	Jumlah	46	47	93

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-56. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah mengikuti Diklat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2020

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan	1	6	1	6
		Pengawas Lingkungan Hidup	1	0	1	-
2	Dinas Kehutanan	Penyuluh Kehutanan	1	0	1	-
		Polisi Kehutanan	2	1	2	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	-	-	-	-
3	UPTD KPHP Rambat Menduyung	Penyuluh Kehutanan	1	1	1	1
		Polisi Kehutanan	2	-	1	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
4	UPTD KPHP Jebu Membang Antan	Penyuluh Kehutanan	3	-	3	-
		Polisi Kehutanan	1	1	1	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	-
5	UPTD KPHP Bubus Panca	Penyuluh Kehutanan	3	-	3	-
		Polisi Kehutanan	2	-	1	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki – laki	Perempuan
6	UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Penyuluh Kehutanan	2	1	2	1
		Polisi Kehutanan	1	-	1	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
7	UPTD KPHP Sungai Sembulan	Penyuluh Kehutanan	3	2	3	1
		Polisi Kehutanan	2	-	1	2
		Pengendali Ekosistem Hutan	2	-	2	-
8	UPTD KPHP Sungai Palas	Penyuluh Kehutanan	3	-	3	-
		Polisi Kehutanan	2	-	1	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	1	-	1	-
9	UPTD KPHP Belantu Mendanau	Penyuluh Kehutanan	2	3	2	3
		Polisi Kehutanan	9	1	8	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	-	1	-	1
10	UPTD KPHP Gunung Duren	Penyuluh Kehutanan	4	3	4	3
		Polisi Kehutanan	8	-	7	-
		Pengendali Ekosistem Hutan	1	-	1	-

Keterangan :
Sumber :
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020
- Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-57. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka Tengah	Nirwasita Tantra *(Green Leadership Award)* Kategori Kabupaten Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
2	Yasir	Kalpataru Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
3	SMP Negeri 2 Tanjungpandan	Adiwiyata Nasional Tahun 2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
4	Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
5	Kota Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
6	Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
7	Kota Kota, Kabupaten Bangka Tengah	Piala Adipura sebagai Kota Kecil Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
8	Mentok, Kabupaten Bangka Barat	Sertifikat Adipura Tahun 2018	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
9	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
10	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Metalurgi Muntok	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
11	PT. Dok Air Kantung (Kabupaten Bangka)	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
12	PT. Dok dan Perkapalan Air Kantung Unit Galangan Selindung (Kota Pangkalpinang)	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
13	PT. Pahala Harapan Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
14	PT. Timah (Persero), Tbk. - Keteknikan dan Sarana (Balaikarya)	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
15	PT. Karini Utama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
16	PT. Astika Murni Utama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
17	PT. Medco E&P Indonesia - Terminal Khusus FSO Bangka Marine Terminal	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
18	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II - Depot Pengisian Pesawat Udara Depati Amir	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
19	PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II - Terminal BBM Pangkal Balam	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
20	PT. Indonesia Power Unit Pembangkitan dan Jasa Pembangkitan Perak Grati	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
21	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung Sub Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Padang	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
22	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Merawang	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
23	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Koba	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
24	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Pilang	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
25	PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Babel - PLTD Toboali	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
26	PT. PLN (Persero) Batam - PLTG MPP Air Anyir Bangka	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
27	PT. PLN (Persero) PLTU Suge	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
28	PT. PLN (Persero) Wilayah Bangka Bangka Belitung Sektor Pembangkitan PLTU 3 Babel	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
29	CV. Mutiara Alam Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
30	PT. Bumi Permai Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
31	PT. Bumi Sawit Sukses Pratama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
32	PT. Foresta Lestari Dwikarya	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
33	PT. Gemilang Cahaya Mentari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
34	PT. Gunung Maras Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
35	PT. Gunung Sawit Bina Lestari	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
36	PT. MP Ledong West Indonesia	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
37	PT. Parit Sembada	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
38	PT. Pratama Unggul Sejahtera	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
39	PT. Putra Bangka Mandiri	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
40	PT. Rebinmas Jaya	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
41	PT. Sawindo Kencana	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
42	PT. Steelindo Wahana Perkasa	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
43	PT. Tata Hamparan Eka Persada	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
44	PT. Timah (Persero), Tbk. - Wilasi II Bangka Selatan	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
45	PT. Timah (Persero), Tbk. - Unit Tambang Darat Sungailiat	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
46	PT. Timah (Persero), Tbk. - UPDB BPP Bangka Barat	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
47	PT. Timah (Persero), Tbk. - Wilayah Operasi Belitung	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
48	PT. Babel Inti Perkasa	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
49	PT. Bukit Timah	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
50	PT. Prima Timah Utama	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
51	PT. Refined Bangka Tin	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
52	PT. Sariwiguna Bina Sentosa	Peringkat Hijau Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2019	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2019
53	SD Negeri 9 Mendo Barat Kabupaten Bangka	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
54	SD Negeri 19 Manggar Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
55	SD Negeri 5 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
56	SD Negeri 6 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
57	SD Negeri 23 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
58	SD Negeri 33 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
59	SD Negeri 30 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
60	SD Negeri 37 Pangkalpinang	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
61	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangka	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
62	SD Muhammadiyah Muntok Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
63	SMP Negeri 1 Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
64	SMP Negeri 3 Tanjungpandan Kabupaten Belitung	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
65	SMP Negeri 2 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur	Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
66	PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung	Perusahaan yang Berkontribusi dalam Pengembangan Energi Listrik dan Sampah sebagai Bahan Bakar PLTBg Gasifier Sampah Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
67	PT. Sahabat Mewah dan Makmur	Perusahaan yang Berkontribusi dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Persemaian Bibit Asam Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
68	PT. Refined Bangka Tin	Perusahaan yang Berkontribusi Persemaian Bibit Asam Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
69	Yasir, A.Md	Individu Perintis Lingkungan (Mangrove Munjang Kurau) Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
70	Abriandika Pratama	Individu Perintis Lingkungan Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019
71	M. Toha	Individu Perintis Lingkungan (Mangrove Batu Dinding Belinyu) Tahun 2019	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	2019

Keterangan :
Sumber :
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020;
- SK. 1049/MenLHK/Setjen/PKL.4/12/2019;
- dihimpun dari situs online: https://bangka.tribunnews.com/2019/01/11/empat-kabupaten-di-babel-raih-piala-adipura-2018 diakses pada tanggal 20 Maret 2020;
- https://belitung.tribunnews.com/2019/12/14/smp-negeri-2-tanjungpandan-wakili-babel-raih-adiwiyata diakses pada tanggal 20 Maret 2020;
- https://dlh.babelprov.go.id/content/yasir-penerima-kalpataru-2019 diakses pada tanggal 20 Maret 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-58. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data: 2019

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung	Kelompok masyarakat di 7 kabupaten/ kota	2019
2	Sosialisasi dan Pelatihan Bank Sampah	DLH Prov. Kep. Bangka Belitung	Kelompok masyarakat di 7 kabupaten/ kota	2019

Sumber: Laporan Kegiatan Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi, DLH Prov. Kep. Bangka Belitung

Tabel-59. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya, 2017	Satu Tahun Sebelumnya, 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.135,7	13.159,6
2.	Pertambangan dan Penggalian	8.182,0	7.741,5
3.	Industri Pengolahan	14.238,0	15.078,7
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	79,4	86,8
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,0	14,8
6.	Konstruksi	6.371,9	7.110,4
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	10.840,5	11.471,2
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.900,1	3.104,7
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.734,1	1.896,8
10.	Informasi dan Komunikasi	1.135,4	1.254,8
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.280,6	1.408,2
12.	Real Estate	2.281,2	2.517,5
13.	Jasa Perusahaan	196,8	217,3
14.	Administrasi Pemerintahan	4.116,3	4.372,1
15.	Jasa Pendidikan	1.960,4	2.128,7
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	845,3	905,8
17.	Jasa Lainnya	548,6	600,4
PRODUK DOMESTIK BRUTO		69.861,3	73.069,3
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		69.316,4	72.487,1

Keterangan : dinyatakan dalam satuan milyar rupiah

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-60 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9090	9588,9
2.	Pertambangan dan Penggalian	6634,8	6563
3.	Industri Pengolahan	11345,1	11803,2
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	45,9	49,3
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,4	8,9
6.	Konstruksi	4228,4	4493,1
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	7253,3	7445,1
8.	Transportasi dan Pergudangan	1892,2	2021,3
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1136,5	1207,2
10.	Informasi dan Komunikasi	1002,8	1110,3
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	881,3	936,3
12.	Real estate	1572,1	1702,5
13.	Jasa Perusahaan	127,5	136
14.	Administrasi Pemerintahan	2604,2	2843,2
15.	Jasa Pendidikan	1183,2	1289,8
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	605,2	632,8
17.	Jasa Lainnya	354,9	381,2
PRODUK DOMESTIK BRUTO		49986,8	52212,1
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		48824,521	50051828

Keterangan : dinyatakan dalam satuan milyar rupiah

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-61. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Provinsi : Kepulauan Bangka Belitung

Tahun Data : 2019

No.	Jenis Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	Peraturan Gubernur	Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 29 Januari 2018	Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
2.	Peraturan Daerah	-	Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 30 oktober 2018	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Peraturan Gubernur	-	Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019	Pengendalian Pencemaran Air Permukaan Bagi Usaha Tambak Udang
4.	Peraturan Gubernur	-	Pergub Nomor 48 Tahun 2019 Tanggal 22 Juli 2019	Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keterangan :

Sumber : Biro Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel-62. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	APBD	Belanja Pegawai	9.215.791.365,00	7.518.639.074,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.517.101.200,00	1.726.055.000,00
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.242.280.000,00	879.355.000,00
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000,00	147.500.000,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	70.965.000,00	281.482.160,00
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000,00	63.100.000,00
		Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup	8.675.000,00	78.700.000,00
		Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	519.150.000,00	911.913.000,00
		Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup	53.666.300,00	167.283.500,00
		Layanan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1.790.000,00	54.725.000,00
		Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	19.275.000,00	95.830.000,00
		Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	76.550.000,00	106.345.000,00
		Pengendalian Beban Pencemaran Air	93.950.000,00	185.461.000,00
		Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	23.310.000,00	216.008.000,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Identifikasi Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46.214.000,00	56.124.000,00
		Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	136.650.000,00	274.681.000,00
		Penerimaan, Penelaahan dan Verifikasi Pengaduan Masyarakat	11.450.000,00	68.176.000,00
		Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja	101.005.000,00	81.088.000,00
		Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Terpadu Regional	565.950.000,00	179.978.000,00
		Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	23.500.000,00	81.592.000,00
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	359.100.000,00	682.840.000,00
		Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	26.555.000,00	283.164.000,00
		Peningkatan Aksi Peduli Lingkungan	0,00	273.965.964,00
		Pengelolaan Sampah Laut	0,00	196.946.000,00
		Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	1.082.824.000,00	1.469.618.000,00
		Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	146.149.000,00	257.008.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	189.700.000,00	468.385.000,00
		Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang terlayani	0,00	56.810.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium Lingkungan	101.027.000,00	89.525.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup	300.000.000,00	0,00
		Pemanfaatan Kawasan Hutan	54.889.150,00	137.796.000,00
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	145.280.000,00	191.534.000,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	100.625.000,00	103.630.000,00
		Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	47.312.000,00	250.503.000,00
		Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	331.529.946,00	109.574.000,00
		Pembangunan Sumber Benih dan Konservasi Exsitu Gaharu dan Pelawan	212.315.000,00	303.164.000,00
		Pengadaan Kendaraan R-2 UPTD KPH (DAK Kehutanan)	200.000.000,00	0,00
		Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	987.684.000,00	0,00
		Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	23.560.000,00	189.700.000,00
		Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	156.032.000,00	260.018.000,00
		Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	307.160.000,00	0,00
		Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	186.740.000,00	1.553.072.000,00
		Tenaga Pendukung Polisi Hutan	500.980.000,00	0,00
		Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	30.755.000,00	214.628.560,00
		Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan)	429.893.000,00	0,00
		Pembinaan Pengelolaan DAS	68.644.000,00	210.455.800,00
		Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	2.555.000,00	0,00
		Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	82.830.000,00	0,00
		Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	158.492.000,00	218.120.000,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan	415.906.000,00	463.216.000,00
		Pengembangan Perhutanan Sosial	422.562.000,00	298.273.000,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Pecinta Alam/Pramuka/Siswa Sekolah	0,00	142.985.200,00
		Pengambangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi (DAK)	2.225.000.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR Kehutanan)	299.165.750,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR Kehutanan)	103.355.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawariningin (DBH-DR Kehutanan)	55.895.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR Kehutanan)	342.000.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR Kehutanan)	193.670.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR Kehutanan)	122.745.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antan (DBH-DR Kehutanan)	237.245.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR Kehutanan)	430.195.000,00	0,00
		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR Kehutanan)	415.275.000,00	0,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	0,00	74.100.000,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	0,00	72.965.000,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	0,00	74.350.000,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	0,00	73.524.700,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	0,00	74.100.000,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	0,00	73.125.000,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Belantu Mendanau	0,00	74.500.000,00
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	0,00	71.850.000,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Rambat Menduyung	0,00	208.110.000,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	0,00	199.252.000,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Bubus Panca	0,00	200.006.520,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	0,00	199.170.000,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Sungai Sembulan	0,00	226.350.000,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Muntai Palas	0,00	220.231.200,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Belantu Mendanau	0,00	245.000.000,00
		Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD KPHP Gunung Duren	0,00	238.931.600,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	691.295.000,00	1.693.478.750,00
		Peningkatan/perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	984.702.784,00	2.797.968.750,00
		Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	1.206.240.000,00	934.550.000,00
		Pembangunan/peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	0,00	1.642.500.000,00
		Pembangunan/peningkatan Drainase/Gorong-gorong di Kawasan Kumuh	0,00	955.660.000,00
		Pembangunan/peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh	291.786.879,00	0,00
		Peningkatan/penyediaan Sarana Air Limbah di Kawasan Kumuh	0,00	1.033.370.000,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Survey dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	0,00	94.075.000,00
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4.972.681.000,00	11.629.269.804,00
		Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	4.081.640.000,00	0,00
		Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	28.328.000,00	0,00
		Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	67.784.000,00	75.161.000,00
		Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	0,00	54.600.000,00
		Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali Banjir	9.013.932.200,00	6.561.108.500,00
		Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	3.420.295.000,00	2.125.255.000,00
		Pembangunan Peningkatan Drainase	0,00	376.770.000,00
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air	476.965.000,00	1.116.143.800,00
		Perencanaan Turap/Talud/Bronjong	300.875.000,00	0,00
		Konservasi Sumber Air	1.047.165.000,00	0,00
		Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Sumber Air Lainnya	0,00	12.695.976.500,00
		Pembersihan/rehabilitasi/normalisasi Sungai/kali	2.782.925.000,00	4.540.360.000,00
		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa	821.750.000,00	0,00
		Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang SDA	300.875.000,00	3.803.806.800,00
		Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	0,00	6.382.800.000,00
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	2.380.449.000,00	0,00
		Kajian Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	466.642.000,00	0,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	110.200.000,00	0,00
		Penyusunan regulasi RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP)		899.380.300,00
		Survey Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	216.550.000,00	133.712.000,00
		Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	212.528.000,00	219.285.334,00
		Peningkatan Kesehatan Masyarakat	0,00	520.682.840,00
		Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga	928.566.000,00	0,00
		Peningkatan Penyehatan Lingkungan	364.069.000,00	189.506.560,00
		Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, Zoonosis)	377.765.000,00	75.337.500,00
		Upaya Kesehatan Masyarakat	12.910.200.000,00	0,00
		Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	379.050.000,00	296.396.400,00
		Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	131.542.000,00	151.465.000,00
		Pembekalan tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan dan Masyarakat	213.775.000,00	198.578.000,00
		Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	267.932.000,00	153.080.000,00
		Pengurangan Risiko Bencana dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penanggulangan Bencana Daerah	1.290.150.000,00	228.226.300,00
		Kajian Daerah Rawan Bencana di 7 Kabupaten/Kota	103.300.000,00	0,00
		Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana	2.465.200.000,00	1.931.817.500,00
		Pengerahan dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	170.235.000,00	270.898.800,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	108.000.000,00	122.600.000,00
		Pengadaan/Penyediaan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana	95.000.000,00	143.600.000,00
		Pemeliharaan/Perawatan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	161.200.000,00	1.010.420.960,00
		Pengambilan serta Pendistribusian Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	39.520.000,00	93.650.500,00
		Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	113.565.000,00	0,00
		Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	502.400.000,00	682.000.000,00
		Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1.050.000,00	468.027.008,00
		Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	0,00	64.419.824,00
		Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraan Umum Teladan	84.607.000,00	67.826.410,00
		Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Anggkutan Jalan	118.744.000,00	373.894.330,00
		Pengoperasian Bus Sekolah	0,00	252.182.850,00
		Pengadaan Bus Sekolah	0,00	741.181.400,00
		Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	203.100.000,00	173.679.000,00
		Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan	0,00	77.478.000,00
		Kajian Tradisi Bangka Belitung	105.733.000,00	209.450.000,00
		Penulisan Sejarah Bangka Belitung	372.693.000,00	276.000.000,00
		Pengelolaan Cagar Budaya	115.700.000,00	425.278.000,00

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2020 (Rp)
		Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung	32.558.000,00	0,00
		Peningkatan Fungsi BOOST Center	90.595.000,00	152.765.000,00
		Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	16.820.000,00	204.969.440,00
		Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	318.775.000,00	309.299.000,00
		Peningkatan Kualitas SDM Perikanan Tangkap	57.570.500,00	0,00
		Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Sarana dengan Aktivitas Nelayan	0,00	72.983.000,00
		Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	144.938.000,00	195.282.760,00
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan	949.935.000,00	912.177.490,00
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan	22.000.000,00	204.745.500,00
		Pengawasan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	65.189.000,00	230.455.240,00
		Peningkatan Kesehjahteraan Nelayan	45.443.000,00	66.101.800,00
		Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	188.904.000,00	139.674.405,00
2	APBN	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	425.000.000,00	0,00

Keterangan :

Sumber :

- Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, 2020
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Tabel-63. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	760.997.424.482,42
2	Retribusi	8.729.460.053,00
3	Laba BUMD	5.442.309.381,71
4	Pendapatan lainnya yang Sah	51.557.935.414,94
5	Jumlah	826.727.129.332,07

Keterangan :

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tahun 2020

Tabel-64. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2019

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	2	3	4	5
1	Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang	Pengolahan sampah menjadi pelet sebagai bahan bakar energi listrik	Sampah diolah menjadi bahan bakar energi listrik dengan proses Peuyeumisasi. Peuyeumisasi sampah dilakukan dengan persiapan cara Probiotik, fermentasi dan pemrosesan secara komposting serta peragian. Pelet sampah yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian mengalami proses gasifikasi menghasilkan gas bahan bakar untuk generator engine	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Bangka Belitung NOMOR: 671.11/13/DLH/2019 NOMOR: 002.MOU/HKM.00.01/UIW.BABEL/2019 tentang Pengembangan Energi Listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Kabupaten Belitung Timur	Pelestarian Tanaman Asam	Pembibitan tanaman asam oleh siswa SMK N. 1 Dendang, SMA N. 1 Simpang Pesak dan SMA N. 1 Damar. Bibit asam dibeli oleh PT. Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) dan ditanam pada beberapa lokasi.	Perjanjian Kerjasama antara PT. SMM dengan SMK N. 1 Dendang, PT SMM dengan SMA N. 1 Simpang Pesak dan PT SMM dengan SMA N. 1 Damar

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
3	Kabupaten Bangka	Pelestarian Tanaman Asam	Pembibitan tanaman asam oleh siswa SMA N.1 Pemali, SMA N. 1 Sungailiat, SMK Yapensu Sungailiat dan SMK N. 1 Sungailiat. Bibit asam dibeli oleh PT. Refined Bangka Tin (RBT) dan ditanam pada beberapa lokasi.	Perjanjian Kerjasama antara PT. RBT dengan SMA N.1 Pemali, PT. RBT dengan SMA N. 1 Sungailiat, PT. RBT dengan SMK Yapensu Sungailiat dan PT. RBT dengan SMK N. 1 Sungailiat
4	Kota Pangkalpinang	Pelestarian Tanaman Asam	Pembibitan tanaman asam melibatkan oleh siswa SMA N. 2 Pangkalpinang, SMA N. 3 Pangkalpinang. Bibit asam dibeli oleh Komunitas Peduli Hijau (KOPHI) Botanical Group dan ditanam pada beberapa lokasi.	Perjanjian Kerjasama antara Botanical Group dengan siswa SMA N. 2 Pangkalpinang, dan Botanical Group dengan SMA N. 3 Pangkalpinang

Sumber: Laporan Sinergi Literasi Lingkungan DLH Prov. Kep. Bangka Belitung,2020

Tabel 65. Pelestarian Kearifan Lokal Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Data : 2020

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Kabupaten Bangka	Pengaturan lahan untuk tambang sebagai upaya penyelamatan lingkungan dari eksploitasi pasir timah agar dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam serta pertimbangan keberlanjutan lingkungan untuk masa mendatang.	Timah ampak[1]	Kepercayaan terhadap suatu daerah/lahan bahwa sudah diampak/diasal/dijampi oleh orang terdahulu yang jika dilanggar atau tetap dilakukan penambangan maka kualitas pasir timah yang rendah dan kondisi timbangan timah sangat ringan seperti pasir biasa dan tidak laku dijual dikenal dengan timah ampak atau timah kopong.
2	Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	Sebagai bentuk konservasi tumbuhan; berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau dan pengatur iklim mikro; sebagai bukti para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi (konsep keberlanjutan); memiliki manfaat ekologi, sosial dan ekonomi.	Kelekak[2 4 5]	Sebidang tanah yang ditanami secara sengaja oleh orangtua zaman dahulu dengan beragam pohon penghasil buah biasanya tumbuhan khas daerah baik dimiliki secara pribadi/garis keturunan maupun dimiliki secara bersama (milik orang banyak dalam satu kampung atau gabungan dari beberapa kampung yang sekarang menjadi hutan tanaman buah. Bagi orang Bangka kelekak berkonotasi makna *kelak kek ikak* artinya nanti untuk kalian.

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
3	Kabupaten Belitung	Mengatur pembukaan lahan dan hutan termasuk hutan mangrove untuk mencegah degradasi kerusakan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati	Dukun Kampung[2]	Sosok yang dapat dikategorikan sebagai pemimpin informaal, mempunyai keahlian supranatural yang bermukim di tengah-tengah warga kampung, mempunyai wilayah teritori yang tidak melewati batas kampung. Berperan selain mengobati penyakit juga untuk menyeimbangkan kehidupan lainnya seperti izin pemanfaatan lahan untuk huma. Eksistensi dukun kampung di Kabupaten Belitung dibuktikan dengan membentuk Forum Dukun Kampung yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dengan membentuk Lembaga Adat untuk mengayomi.
4	Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	1. Pelestarian kawasan hutan (hutan pemalian, hutan lareng); 2. Hutan sebagai pembatas antar huma (pemanfaatan hutan dan lahan) merupakan tempat perlintasan hewan agar tidak melewati huma dan merusak tanaman sehingga merupakan bentuk pengendalian hama secara alami (hutan riding).	Hutan Pemalian dan Hutan Riding di wilayah Belitung [2], Hutan Rimbek di Kabupaten Bangka dan Hutan Lareng di Kabupaten Bangka Selatan [4]	Hutan pemalian, hutan lareng dan hutan rimbek didefinisikan sebagai hutan yang tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan apapun karena merupakan hutan pertemuan antar dukunkampung dalam dunia gaib dan secara adat dilarang untuk memanfaatkan hutan pemalian karena kawasan ini merupakan tempat bersemayamnya para roh halus dan roh nenek moyang; Hutan riding berfungsi sebagai pembatas antar kampung sekaligus merupakan batas perdukunan. Batas lebar hutan riding diasumsikan seluas sekelaluan pelanduk. Jika pelanduk tidak lagi terganggu ketika melintas di hutan riding oleh aktivitas manusia yang ada di huma, maka seluas itulah tingkat ketebalan hutan riding. Sebaliknya, jika pelanduk masih takut melintas di hutan riding karena terganggu oleh aktivitas manusia, itu berarti hutan riding belum aman sebagai perlintasan pelanduk sehingga hutan riding harus diperlebar lagi.

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
5	Masyarakat Belantu, Desa Kembiri, Membalong, bagian selatan Pulau Belitung	1. Penetapan sebagian daerah aliran sungai sebagai daerah larangan untuk waktu tertentu merupakan bentuk penyelamatan dan pelestarian lingkungan perairan untuk mencegah, menanggulangi serta memulihkan sungai beserta ekosistemnya. 2. Peralatan tangkap ramah lingkungan, karena hanya ikan cukup umur dan berukuran besar yang terjaring. 3. Upaya pelestarian menjaga sumber daya genetik ikan-ikan lokal. 4. Pemeliharaan lubuk sungai menjaga keanekaragaman hayati karena merupakan tempat berkumpulnya ikan dan aneka organisme perairan.	Nirok nanggok [3] [6]	Tradisi mengambil ikan di lembong (lubuk sungai) yang dilakukan secara berkelompok menggunakan tirok (tombak bermata besi yang runcing) dan tanggok (jala kecil bergagang kayu) ketika musim kemarau panjang setiap tahun antara Bulan Agustus-Oktober dan sudah menjadi agenda pariwisata Pulau Belitung. Pengambilan ikan dilakukan beramai-ramai pada saat yang telah ditentukan melalui prosesi panjang dipimpin oleh dukun air dan disaksikan pemuka kampung.
6	Masyarakat Lom, Kabupaten Bangka	Mengatur tiga cara pengelolaan hutan untuk berladang, yaitu: aturan membuka ladang, aturan memelihara ladang beserta tanamannya, dan aturan memelihara hewan dan memburunya.	Hukum Adat Orang Lom [4]	Aturan pantangan dan larangan dalam hukum adat orang Lom bagaimana caranya mengelola hutan dengan baik, serta menghitung dampak ekologisnya baik terhadap manusia, tumbuhan, dan juga hewan di sekitarnya.

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
7	Wilayah Bangka Belitung	Refleksi keinginan hidup harmonis dengan alam, melindungi lingkungan serta kerangka perahu miniatur yang tenggelam selanjutnya dapat menjadi rumah ikan.	Sedekah laut/ Tradisi Muang Jong [7]	Pada waktu tertentu setiap tahunnya masyarakat beramai-ramai membuat miniatur perahu yang diisi dengan sesajian seperti beragam kue, ketupat dan makanan yang dibungkus daun kemudian menyelenggarakan pesta adat semalam suntuk mengelilingi miniatur perahu tersebut dan membaca syair yang mengandung magis, kemudian melarungnya kelaut pada pagi hari.
8	Kabupaten Bangka Tengah	Menimbulkan upaya konservasi Hutan Pelawan berupa pohon pelawan yang merupakan inang tumbuh jamur pelawan dan sumber nektar lebah madu liar.	Tradisi Musung Madu dan Mitos Jamur Pelawan [8]	Tradisi musung madu: kegiatan mencari dan mengumpulkan madu menggunakan sunggau yang dipasang pada ranting dan pengasapan untuk mengusir madu dari sarangnya. Mitos jamur pelawan: muncul setelah musim kemarau yang diawali dengan hujan disertai petir, jamur pelawan mempunyai nilai ekonomi tinggi hingga mencapai 2 juta rupiah per kilogram karena faktor belum dapat dibudidayakan hanya mengandalkan pertumbuhan alami pada pohon pelawan sebagai inang.

Sumber :
- [1] Rahayu, 2016;
- [2] Siburian dan Haba, 2016;
- [3] Alghadari, 2017;
- [4] Cholillah, 2017;
- [5] Hajati, dkk., 2017;
- [6] Irwandi dan Dulkiah, 2017
- [7] Anggara, 2018
- [8] Henri, dkk, 2018

LAMPIRAN II

SK GUBERNUR
POKJA
DIKPLHD

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/123 F /DLH/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH, DAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa guna menyusun informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terkoordinasi untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam rangka mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup, perlu membentuk Tim Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa Tim yang tersebut namanya dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

6. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

7. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, dan Tim Kelompok Kerja Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Tim selesai dalam melaksanakan tugasnya segera melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 25 Februari 2020

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/123-F/DLH/2020
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

I. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II. Anggota :
1. Kepala Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Sri Rezeki, SP, M.M. (Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
7. Lala Lazuardina, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Muda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
8. Lia Sevtiani, S.Si (Analis Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
9. Yudistira, A.Md. (Pranata Komputer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
10. Apriatama Annur Meza, S.ST (Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
11. Dimas Ardiyanto (Penyelidik Bumi Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
12. Ade Purnama Sari, S.E. (Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
13. M. Zukri, S.T. (Analis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

14. Apriliyah Sastrawati Boru Napitupulu, S.E. (Analis Penataan Kawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
15. Arief Febrianto (Analis Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
16. Filga, A.Md. (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
17. Hotma Parulian Tambunan, SKM, M.Epid (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
18. Lukmantara, S.T. (Kepala Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
19. Nades Triyani, S.Si, M.Si (Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
20. Firman, S.ST (Kepala Seksi Statistik Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
21. Suhardi, S.Hut, M.I.L. (Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII);
22. Kurniaji, S.Si, M.Si (Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang);
23. Ajie Romanaputra, S. Hut. (Calon Pengendali Ekosistem Hutan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Baturusa-Cerucuk);
24. Zulvan Setiawan (Manager G.I.S, Riset dan Database WALHI Kepulauan Bangka Belitung);
25. Kurniawan, S.Pi, M.Si (Dosen FPPB Universitas Bangka Belitung).

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/ 123.7/DLH/2020
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

I. Pembina	:	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
II. Pengarah	:	Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
III. Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
IV. Ketua	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
V. Sekretaris	:	Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
VI. Penulis	:	1. Fianda Revina Widyastuti, SKM, M.Si (Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 2. Elza Rizkiawalia, ST, M.Si (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 3. Lorri Prahara, S.Si, M.T. (Analis Laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung); 4. Ningsih Tassri, S.T.,M.Sc. (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATAH

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/123.F/DLH/2020
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN BUKU INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

I. Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan

II. Anggota :
1. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Seksi Pengujian UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Lia Sevtiani, S.Si (Analis Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
5. Suhardi, S.Hut, M.IL (Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII);
6. Deni Subagja, S.AP (Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
7. Martina, S.T. (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
8. Danny Reinhard Y.M, S.T., M.T. (Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
9. Maini Wahyuni, SKM (Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
10. Elza Rizkiawalia, ST, M.Si (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
11. Lorri Prahara, S.Si, M.T. (Analis Laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
12. Ningsih Tassri, S.T.,M.Sc. (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
13. Erpandi, A.Md. (Pengelola Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

14. Melinda, S.Si (Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
15. Eviria Ananda, S.T. (Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATAH

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/1237/DLH/2020
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

TUGAS TIM

I. Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020:
   a. Ketua, bertugas memimpin tahapan proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   b. Anggota, bertugas melaksanakan proses dan tahapan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
      1) menetapkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu prioritas yang menjadi isu utama dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah menggunakan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response*;
      2) menginventarisasi data terbaru dari *stakeholder* terkait yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2020;
      3) melakukan analisis data dengan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response* di dalam sebuah *focus group discussion*;
      4) merangkum inovasi yang telah dilakukan daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

II. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020:
   a. Pembina, bertugas membina Tim Penyusun dalam melaksanakan seluruh tugasnya;
   b. Pengarah, bertugas mengarahkan Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan tujuan;
   c. Penanggung Jawab, bertanggungjawab terhadap keseluruhan jalannya penyusunan dan isi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   d. Ketua, bertugas memimpin jalannya penyusunan, penulisan serta bertanggung jawab terhadap kualitas Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
   e. Sekretaris, bertugas menyediakan kebutuhan peralatan kerja dan mengatur jadwal pelaksanaan dan proses penyusunan serta penulisan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

f. Penulis, bertugas menyusun dan menulis Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui tahapan:

1) menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan pendekatan *Driving Force, Pressure, State, Impact and Response analysis*;
2) menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
3) berkoordinasi dan menyampaikan hasil penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 kepada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera untuk memperoleh rekomendasi penilaian;
4) mengikuti dan berkoordinasi pada setiap tahapan kegiatan Tim Kelompok Kerja Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
5) mengidentifikasi data, mengevaluasi serta memverifikasi dan memberikan Rekomendasi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

III. Tim Kelompok Kerja Penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020:

a. Ketua, bertugas memimpin jalannya penyusunan, penulisan serta bertanggung jawab terhadap Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
b. Anggota, bertugas menyusun dan menulis Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui tahapan:

1) mengumpulkan dan mengidentifikasi data-data untuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari data untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan serta data-data lain yang relevan;
2) melakukan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melakukan input data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ke dalam sistem aplikasi, dan melakukan analisis terhadap perhitungan yang dilakukan.

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ABDUL FATAH

LAMPIRAN III

TAHAPAN PENYUSUNAN DIKPLHD

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975
website : dlh.babelprov.go.id email : blhdbabel@yahoo.co.id

Pangkalpinang, 07 Februari 2020

Nomor : 660 / 209 /DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rapat Internal persiapan worhshop kegiatan Analisis Data dan Informasi Lingkungan Tahun 2020

Kepada
Yth. (Terlampir)

di -
Tempat

Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar data dan informasi mengenai kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup serta bentuk perwujudan akuntabilitas kepada publik untuk menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai semangat Reformasi Birokrasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan penyusunan Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020)

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu Tim Pokja kegiatan Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 untuk dapat hadir pada pertemuan rapat Internal tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 10 Februari 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Acara : Rapat Internal Persiapan Worhshop Kegiatan Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup (Penyusunan DIKPLHD dan IKLH Tahun 2020)

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN

H.SARDIYONO, SKM.,MKM
PEMBINA TK.I
NIP.196305101988031010

Lampiran 1
Surat Nomor : 660 / 297 /DLH
Tanggal : 07 Februari 2020

Kepada Yth. :

Tim Kelompok Kerja Kegiatan Analisis Data dan Informasi Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kepala Sub.Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Kepala Seksi Pengujian UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Danny Reinhard Y.M.,ST.,MT
    Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Martina, ST
    Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Elza Rizkiawalia, ST.,Msi
    Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Maini Wahyuni, SKM
    Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Erpandi, A.Md
    Pengelola Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Lorri Prahara, S.Si.,Msi
    Analis Laboratorium UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19. Fenti Halida, ST
    Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20. Ningsih Tassri, ST.,M.Sc
    Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

21. Eviria Ananda. ST
    Pengendali Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
22. Melinda. S.Si
    Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
23. Lala Lazuardina. ST
    Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
24. Mahendra, Amd
    Pengelola Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
25. Sonia Fatiani, SH
26. Yurzam Abdillah, ST

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kel. Air Itam Pangkalpinang – 33418 Telp. (0717) 439325-27 Fax. (0717) 438865

Pangkalpinang, 06 Februari 2020

Nomor : 005 /0481/DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Workshop Kegiatan Penyusunan DIKPLHD Tahun 2020

Kepada
Yth. Daftar Terlampir

di -
Tempat

Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar data dan informasi mengenai kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup serta bentuk perwujudan akuntabilitas kepada publik untuk menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu anggota Tim Kelompok Kerja Penyusunan DIKPLHD, Tim Penyusun DIKPLHD, dan Penyusun DIKPLHD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat hadir pada *workshop* bersama narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Februari 2020
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Acara : Terlampir

Mengingat pentingnya acara tersebut diatas, mohon kesediaan hadir tepat waktu, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Elza Rizkiawalia, Hp. 0813 6719 6665.

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

DARLAN, S.Pd, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 005 / 0481 /DLH
Tanggal : 6 Februari 2020

Kepada Yth. :

A. Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala sub Bagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Lala Lazuardina, ST
   Pengendali Dampak Lingkungan Tingkat Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Sri Rezeki, SP, MM
   Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Lia Sevtiani, S.Si
   Analis Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Yudistira, A.Md
    Pranata Komputer pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Apriatama Annur Meza, S.ST
    Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Dimas Ardiyanto
    Penyelidik Bumi Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Ade Purnama Sari, SE
    Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. M. Zukri, ST
    Analis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Apriliyah Sastrawati Boru Napitupulu, SE
    Analis Penataan Kawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

16. Arief Febrianto
    Analis Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

17. Filga, A.Md
    Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

18. Hotma Parulian Tambunan, SKM, M.Epid
    Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

19. Lukmantara, ST
    Kepala Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

20. Nades Triyani, S.Si, M.Si
    Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

21. Firman, SST
    Kepala Seksi Statistik Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

22. Suhardi, S.Hut, M.I.L
    Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII;

23. Kurniaji, S.Si, M.Si
    Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang;

24. Ajie Romanaputra, S. Hut
    Calon Pengendali Ekosistem Hutan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Baturusa-Cerucuk;

25. Zulvan Setiawan
    Manager G.I.S, Riset dan Database WALHI Kepulauan Bangka Belitung;

26. Kurniawan, S.Pi, M.Si
    Dosen Tetap FPPB Universitas Bangka Belitung.

B. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Fianda Revina Widyastuti, SKM, M.Si
   Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Elza Rizkiawalia, ST, M.Si
   Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Lorri Prahara, S.Si, MT
   Analis Laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Ningsih Tassri, ST, M.Sc
   Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. **Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat;
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan

Lampiran II Surat Sekretaris Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 005 / 0481 /DLH
Tanggal : 6 Februari 2020

AGENDA *WORKSHOP (Tentative)*
PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pangkalpinang, 11 Februari 2020

No.	Waktu	Materi	Pengisi Acara
1.	08.30 – 08.45	Registrasi Peserta	Panitia
2.	08.45 – 09.00	Pembukaan : Sambutan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Panitia
3.	09.00 – 12.00	Teknis Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	KLHK
4.	12.00 – 13.00	Ishoma	Peserta
5.	13.00 – 16.00	Teknis Penginputan Data ke Aplikasi dataalam.menlhk.go.id	KLHK
6.	16.00	Penutupan	

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975
website : dlh.babelprov.go.id email : blhdbabel@yahoo.co.id

Pangkalpinang, 5 Maret 2020

Nomor : 660 / 460 /DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Rapat Internal persiapan *FGD* 1 Penyusunan dokumen IKPLHD

Yth. Kepada
(Terlampir)

di -
Tempat

Dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar data dan informasi mengenai kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup serta bentuk perwujudan akuntabilitas kepada publik untuk menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai semangat Reformasi Birokrasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020 akan melaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melaksanakan FGD 1 Perumusan Isu prioritas Daerah pada tanggal 11 Maret 2020, untuk persiapan FGD 1 tersebut kami mengundang Bapak/Ibu Tim Pokja dan Tim Penyusun dokumen IKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk hadir pada :

Hari, tanggal : Jumat, 6 Maret 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

EKO KURNIAWAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197009261997031007

Lampiran 1
Surat Nomor : 660/ 460 /DLH
Tanggal : 5 Maret 2020

Kepada Yth. :

Tim Pokja dan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD Dinas Lingkungan Hidup provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

1. Eko Kurniawan, S.Sos.,M.Si (Penanggung Jawab)
2. Dora Wardani, S.T
3. H.Sardiyono,S.KM.,M.KM (Ketua)
4. Mega Oktarian, S.Si.,M.Eg
5. Hutriadi, S.Si.,M,Sc.
6. Femi Sutia Tirharani, S.E
7. Arry Imam Sulistiyo, S.E,MM
8. Edwin Setiady. S.T.,M.T
9. Fianda Revina Widyastuti, S.KM.,M.Si
10. Harfiyanto, S.Si
11. Erpandi, A.Md
12. Elza Rizkiawalia, S.T.,M.Si
13. Ningsih Tassri, S.T.,M.Sc
14. Lorri Prahara, S.Si.,MT
15. Lala Lazuardina, S.T

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang Telp. (0717) 439325 - 27

Pangkalpinang, 6 Maret 2020

Nomor : 005 /0913/DLH
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Undangan FGD 1 Penyusunan Dokumen IKPLHD 2020

Yth. Kepada
(Terlampir)

di -
TEMPAT

Dalam rangka meningkatkan status lingkungan hidup sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada kepala daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 Ayat 2 (o) bahwa "*Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah provinsi bertugas dan berwenang mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi*". Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kembali Kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/ibu yang tergabung dalam Tim Pokja dan Tim Penyusun dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 untuk hadir pada :

Hari, tanggal	:	Rabu, 11 Maret 2020
Waktu	:	Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Acara	:	*Focus Group Discussion* (FGD) 1 Perumusan Isu Prioritas Daerah Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Tahun 2020, (Materi *FGD* 1 IKPLHD dapat di download melalui http://bit.ly/IKPLHD_Babel.)

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH
u.b
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Tingkat I
NIP 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. *Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai laporan*
2. *Kepala Pusat Data dan Infromasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*

Lampiran
Surat Nomor : 005 / 0913/ DLH
Tanggal : 6 Maret 2020

Kepada Yth. :

A. Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen IKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Bidang Pengendalian dan Penaatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Kepala Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Sri Rezeki, SP,M.M (Kepala Bidang Ketersediaan Pangan, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Limbah B3 dan Pengaduan Lingkungan Hidup
13. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Kepala Subbag. Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Kepala Seksi Pengujian UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kepulauan Bangka Belitung
17. Lia Sevtiani, S.Si
    Analis Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
18. Lala Lazuardina, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19. Yudistira, A.Md (Pranata Komputer pada Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
20. Apriatama Annur Meza, S.ST (Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
21. Dimas Adiyanto (Penyelidik Bumi Pertama pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
22. Ade Purnama Sari, S.E. (Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
23. .M. Zukri, S.T. (Analis Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);

24. Apriliyah Sastrawati Boru Napitupulu, S.E. (Analis Penataan Kawasan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
25. Erpandi, A.Md Pengelola pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
26. Maini Wahyuni, SKM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27. Elza Rizkiawalia, S.T.,M.Si (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
28. Lorri Prahara, S.Si.,M.T (Analis Laboratorium pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
29. Ningsih Tassri S.T.,M.Sc (Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
30. Melinda, ST (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31. Arief Febrianto (Analis Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
32. Filga, A.Md. (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
33. Hotma Parulian Tambunan, SKM, M.Epid (Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
34. Lukmantara, S.T. (Kepala Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana LLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
35. Nades Triyani, S.Si, M.Si (Analis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
36. Firman, S.ST (Kepala Seksi Statistik Ketahanan Nasional Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
37. Suhardi, S.Hut, M.I.L. (Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII);
38. Kurniaji, S.Si, M.Si (Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang);
39. Ajie Romanaputra, S. Hut. (Calon Pengendali Ekosistem Hutan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Baturusa-Cerucuk);
40. Zulvan Setiawan (Manager G.I.S, Riset dan Database WALHI Kepulauan Bangka Belitung);
41. Kurniawan, S.Pi, M.Si (Dosen FPPB Universitas Bangka Belitung)
42. Moris Purnama, S.IP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
43. Fenti Halida, ST Analis Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
44. Danny Reinhard Y.M ST.,MT (Penelaah Dampak Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
45. Martina, ST (Pengelola Dokumen Mengenai Analisis dampak Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
46. Eviria Ananda, ST Pengendali Dampak Lingkungan DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
47. Feranita, S.Si.,M.Sc Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
48. Mahendra, AMd Pengelola Informasi Lingkungan
49. Ratna Kusuma Dewi, S.Ikom pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
50. Sonia Fatiani, SH

LAMPIRAN IV

BERITA ACARA ISU PRIORITAS DIKPLHD 2019

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam, Bukit Intan, Pangkalpinang Telp/Fax. (0717) 436975

website : dlh.babelprov.go.id email : blhdbabel@yahoo.co.id

BERITA ACARA
Nomor : 01 / IKPLHD / DLH / 2020

Tentang
Perumusan Isu Prioritas

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas, bulan maret, tahun dua ribu dua puluh (11-03-2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Kurniawan,S.Sos.,M.Si
Nip : 197009261997031007
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

menyatakan telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 untuk merumuskan isu prioritas yang akan diangkat dan dijadikan tema utama pembahasan dalam dokumen. Hasil perumusan isu prioritas dan tanda tangan peserta FGD Perumusan Isu Prioritas tersebut terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

EKO KURNIAWAN, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP.197009261997031007

LAMPIRAN BERITA ACARA
NOMOR : 01/IKPLHD/DLH/2020
TANGGAL : 12 Maret 2020

DAFTAR USULAN ISU
TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD

ISU TATA KELOLA

No.	Isu
1	Kurangnya kualitas dan pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan seperti lamanya proses pelayanan publik dan rekaman data yang tidak terorganisir dengan baik
2	Regulasi dilarang merokok perda/pergub tidak dijalankan dan pengawasan yang sangat kurang
3	Regulasi terkait pola tata ruang bagi industri perumahan
4	Kaji ulang pemetaan daerah yang menjadi daerah rawan bencana dan penggunaan daerah rawan banjir menjadi pemukiman
5	Belum ada lembaga/wadah koordinasi terkait lingkungan hidup, organisasi kemitraan masyarakat bidang LH
6	Belum adanya regulasi yang konkrit dilaksanakan pemda terkait penataan pasar dan pengelolaan sampah misalnya daur ulang sampah plastik
7	Stunting belum tertangani secara optimal
8	Belum adanya regulasi dan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat terkait penggunaan lahan dan hutan
9	Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah pada kawasan kumuh
10	Buruknya pengaturan tata kelola drainase diperkotaan yang menyebabkan banjir diwilayah tersebut jika hujan lebat lebih dari 2 jam
11	Penegakan hukum lingkungan serta keterbatasan dalam pengawasan belum maksimal
12	Kurangnya keterpaduan dalam penanganan keg ilegal pemanfaatan SDA

ISU EKONOMI

No.	Isu
1	Penurunan indeks ekonomi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi
2	Upaya pemprov terkait masalah harga komoditas pertanian dan perkebunan seperti lada, karet, sawit yang tidak stabil, rendah dan tak kunjung selesai
3	Budaya masayarakat bangka yang bersifat konsumtif dan biaya hidup tinggi
4	Kurangnya pendapatan masyarakat, minimnya alternatif pekerjaan dan meningkatnya pengangguran

No.	Isu
5	Pengembangan wisata belum maksimal
6	Daya saing produk rendah ekspor terbatas dan akreditasi C
7	Inflasi meningkat akibat kekeringan dan cuaca ekstrim
8	Perekonomian bertumpu dari tambang timah bahkan illegal
9	Belum terlaksana ekonomi padat karya dan industri kreatif di babel
10	Peningkatan penyerapan tenaga asing dan kesenjangan pekerjaan antara masyarakat setempat dengan pendatang
11	Konflik kepentingan antara pelaku tambang, nelayan, pelaku pariwisata, pendatang dan pemerintah

ISU LINGKUNGAN

No.	Isu
1	Ilegal mining yang menyebabkan pencemaran air permukaan dan kerusakan DAS
2	Illegal logging
3	Pengelolaan limbah pabrik dan limbah b3 yang tidak optimal
4	Pengelolaan sampah khususnya sampah plastik rumah tangga yang masih rendah termasuk kesadaran masyarakat meminimalkan hasil sampah plastik masih rendah
5	Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan (lahan kritis)
6	Banjir yang perlu ditangani
7	Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar
8	Minimnya ketersediaan air tanah yang berimbas pada kekeringan atau sulit air pada musim kemarau
9	Trend kejadian cuaca ekstrim salah satunya musim kemarau yang meningkat
10	Belum ada pendataan terkait data biota flora dan fauna khas babel
11	Pencemaran air laut dan kerusakan mangrove karena aktivitas tambang dan tambak udang serta sampah plastik
12	Perubahan tutupan lahan khususnya degradasi tutupan hutan menjadi tutupan lahan lainnya seperti pertambangan dan pemukiman (perumahan subsidi)
13	Kebakaran hutan dan lahan

ISU SOSIAL

No.	Isu
1	Permasalahan sosial secara ekonomi yakni kemiskinan membuat upaya bertahan hidup dengan menangani tambang Timah secara Ilegal membuat rusak lingkungan
2	Pemerataan sarana pendidikan yang kurang
3	Efek dari ekonomi yang menurun menimbulkan adanya kriminalitas seperti mencuri dan lain-lain serta budaya ngereman
4	Konflik sosial perebutan lahan
5	Penambangan illegal dan karhutla dapat menimbulkan konflik sosial
6	Daampak dari banjir yaitu pada penangganan rumah masyarakat atau renovasi rumah akibat banjir berdampak sosial

No.	Isu
7	Gadget dan Game membuat masyarakat yang tidak peduli dan individualis solusi dari hal tersebut belum ada
8	Harga bahan pokok naik akibat gagal panen karena perubahan iklim
9	Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan pemanfaatan Sumber Daya Alam

PENGELOMPOKAN ISU

No	Isu
ISU 1	Regulasi terkait pola/tata ruang wilayah yang belum optimal
ISU 2	Kebijakan hukum terkait pengawasan terhadap pemanfaatan SDA belum maksimal
ISU 3	Penurunan pertumbuhan ekonomi karena melemahnya sektor penambangan
ISU 4	Harga komoditas pertanian dan perkebunan tidak stabil
ISU 5	Alih Fungsi Lahan
ISU 6	Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal
ISU 7	Banjir
ISU 8	Degradasi kualitas air
ISU 9	Kebakaran hutan dan lahan
ISU 10	Residu logam berat dan pestisida pada pangan segar
ISU 11	Paparan bahan radioaktif penambangan timah
ISU 12	Konflik sosial perebutan lahan

LAMPIRAN V

PETA-PETA TEMATIK

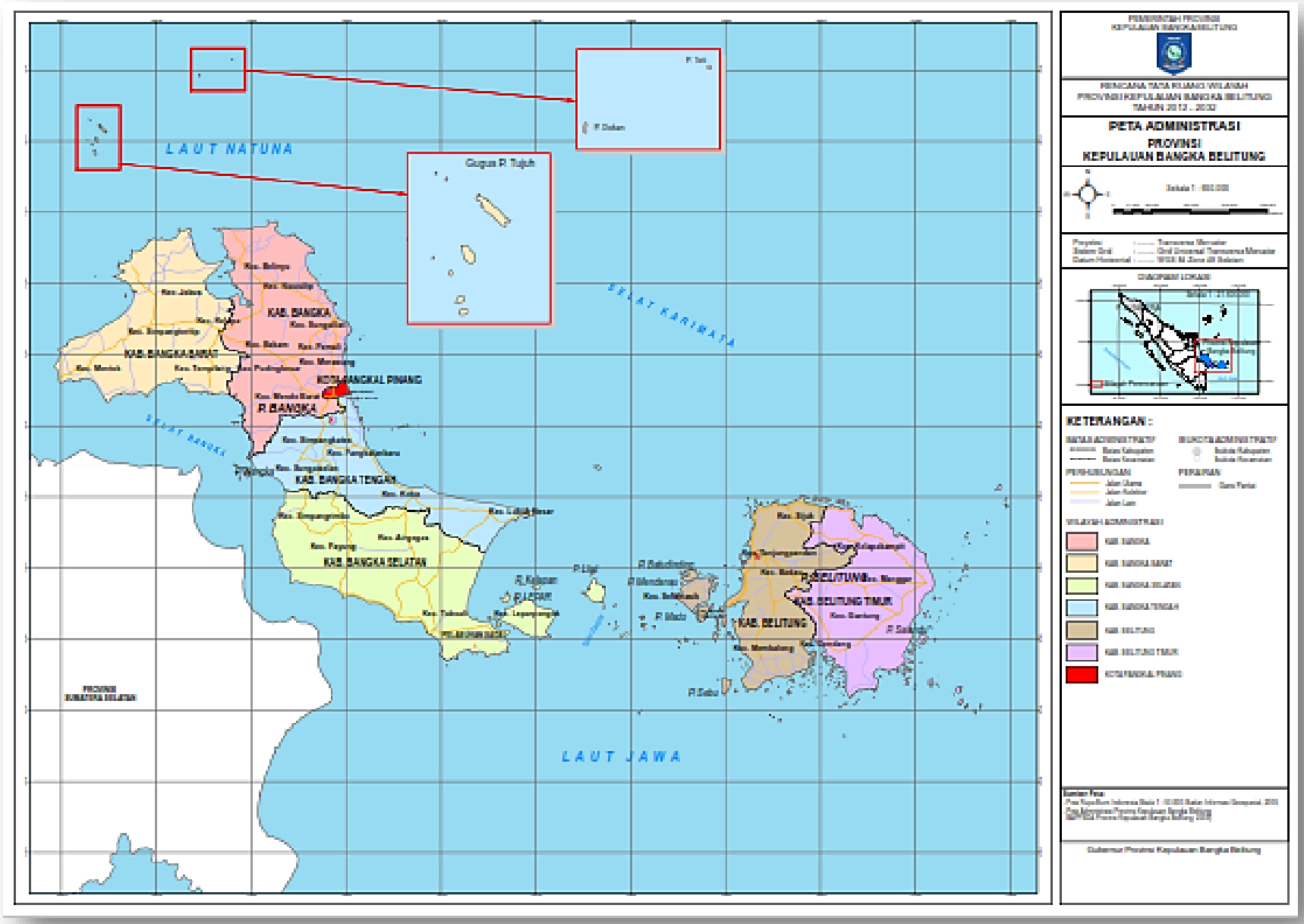

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2013 - 2033

PETA ADMINISTRASI
PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skala 1 : 800.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 48 Selatan

KETERANGAN :

BATAS ADMINISTRATIF
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan

IBUKOTA ADMINISTRATIF
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan

PERHUBUNGAN
- Jalan Utama
- Jalan Kolektor
- Jalan Lain

PERAIRAN
- Garis Pantai

WILAYAH ADMINISTRASI
- KAB. BANGKA
- KAB. BANGKA BARAT
- KAB. BANGKA SELATAN
- KAB. BANGKA TENGAH
- KAB. BELITUNG
- KAB. BELITUNG TIMUR
- KOTA PANGKAL PINANG

Sumber Peta
Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Badan Informasi Geospasial, 2013
Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
RBI 2013 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2013

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

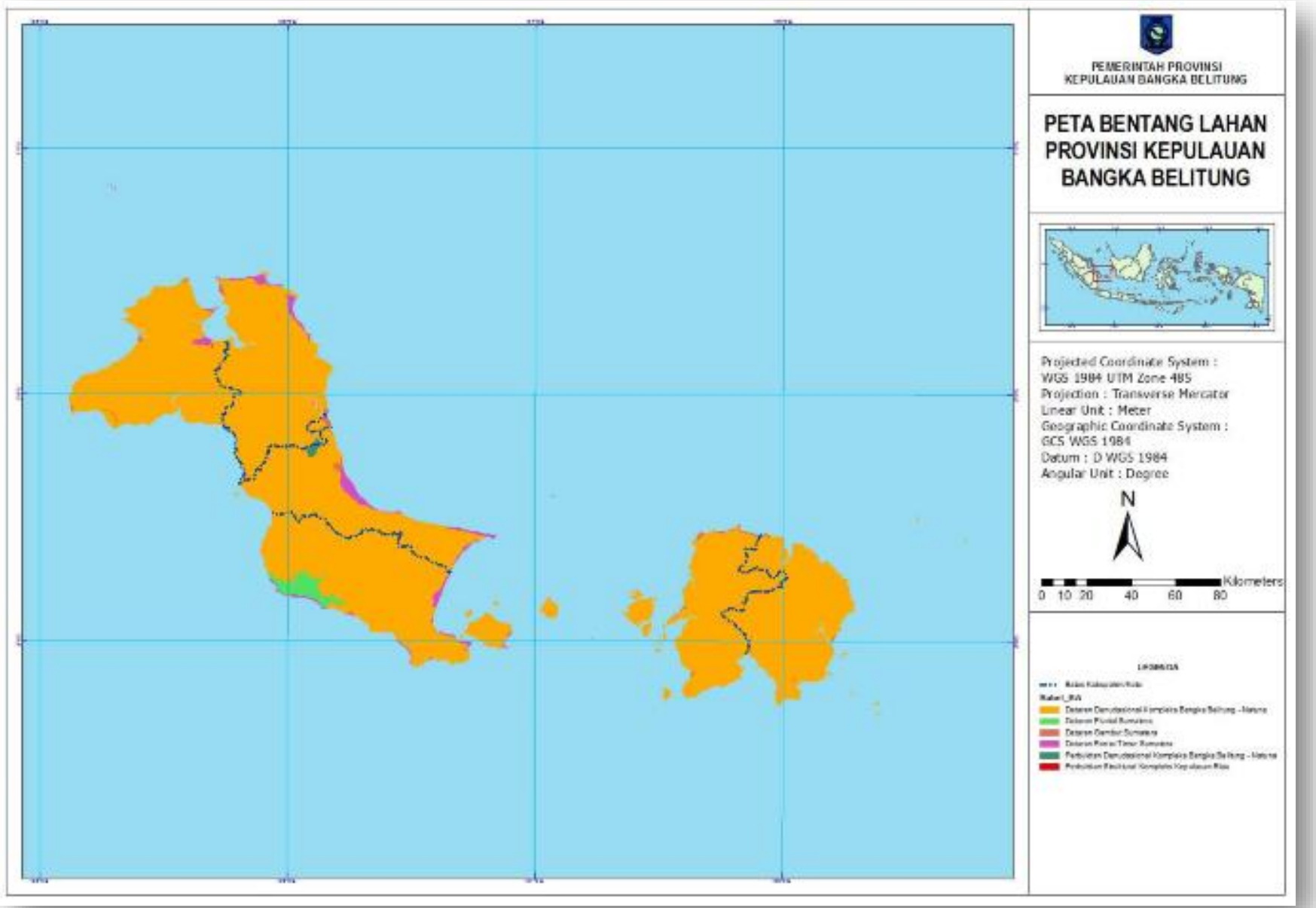
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA BENTANG LAHAN
PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
Projected Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection : Transverse Mercator
Linear Unit : Meter
Geographic Coordinate System :
GCS WGS 1984
Datum : D WGS 1984
Angular Unit : Degree
N
0 10 20 40 60 80
Kilometers

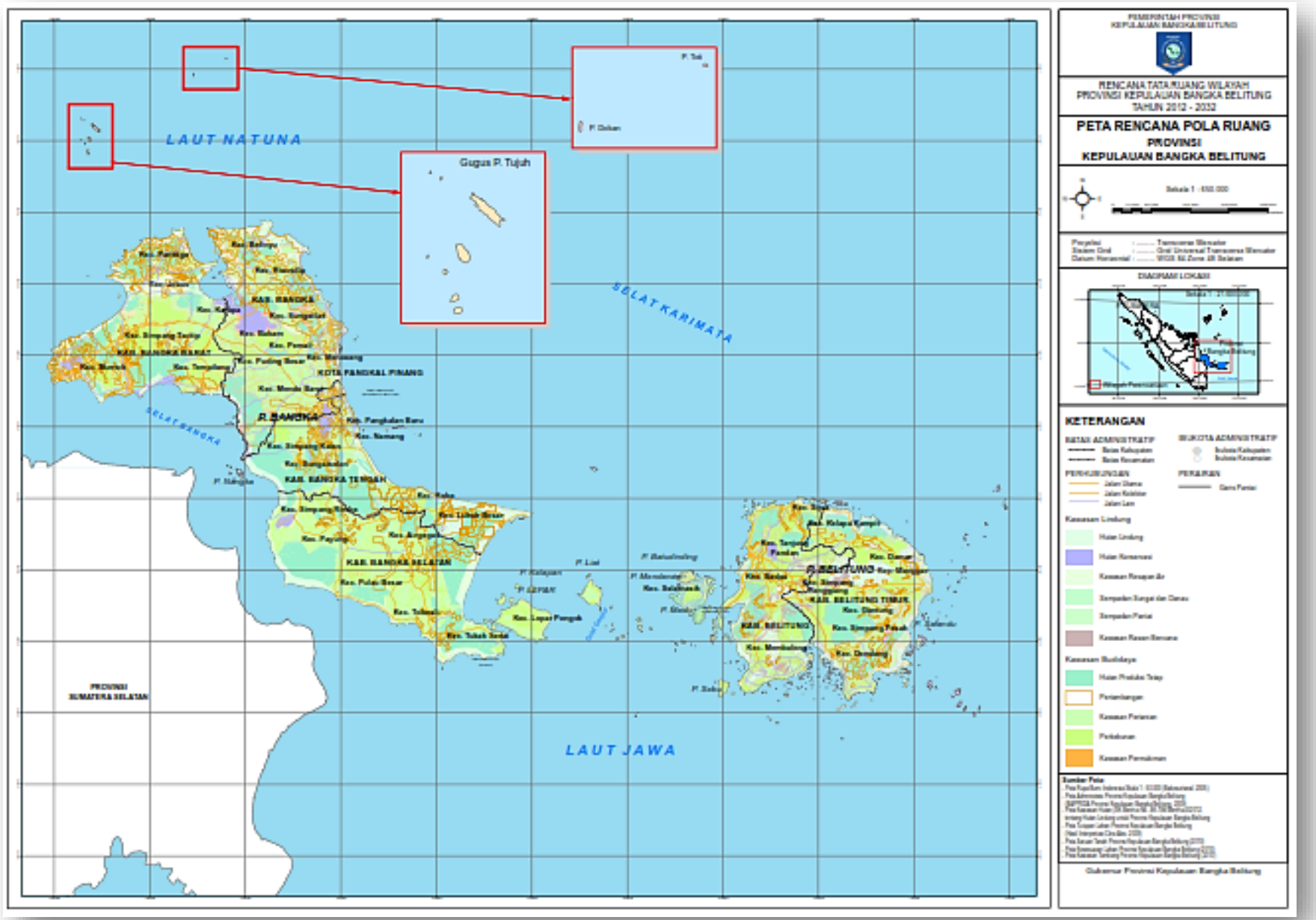
LAUT NATUNA
Gugus P. Tujuh
P. Tok
P. Dekan
SELAT KARIMATA
KAB. BANGKA
KAB. BANGKA BARAT
KOTA PANGKAL PINANG
P. BANGKA
SELAT BANGKA
KAB. BANGKA TENGAH
KAB. BANGKA SELATAN
P. Mangkol
P. Kelapan
P. Lepar
P. Pongok
P. Ketawai
P. Lisa
P. Batualing
P. Mendanau
P. Gelasa
P. Selindu
P. BELITUNG
KAB. BELITUNG
KAB. BELITUNG TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAUT JAWA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2032
PETA RENCANA POLA RUANG
PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN
WILAYAH ADMINISTRATIF
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
IBUKOTA ADMINISTRATIF
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
PERHUBUNGAN
Jalan Utama
Jalan Kolektor
Jalan Lain
PERAIRAN
Garis Pantai
Kawasan Lindung
Hutan Lindung
Hutan Konservasi
Kawasan Resapan Air
Sempadan Sungai dan Danau
Sempadan Pantai
Kawasan Rawan Bencana
Kawasan Budidaya
Hutan Produksi Tetap
Pertambangan
Kawasan Pertanian
Perkebunan
Kawasan Permukiman
Sumber Peta
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

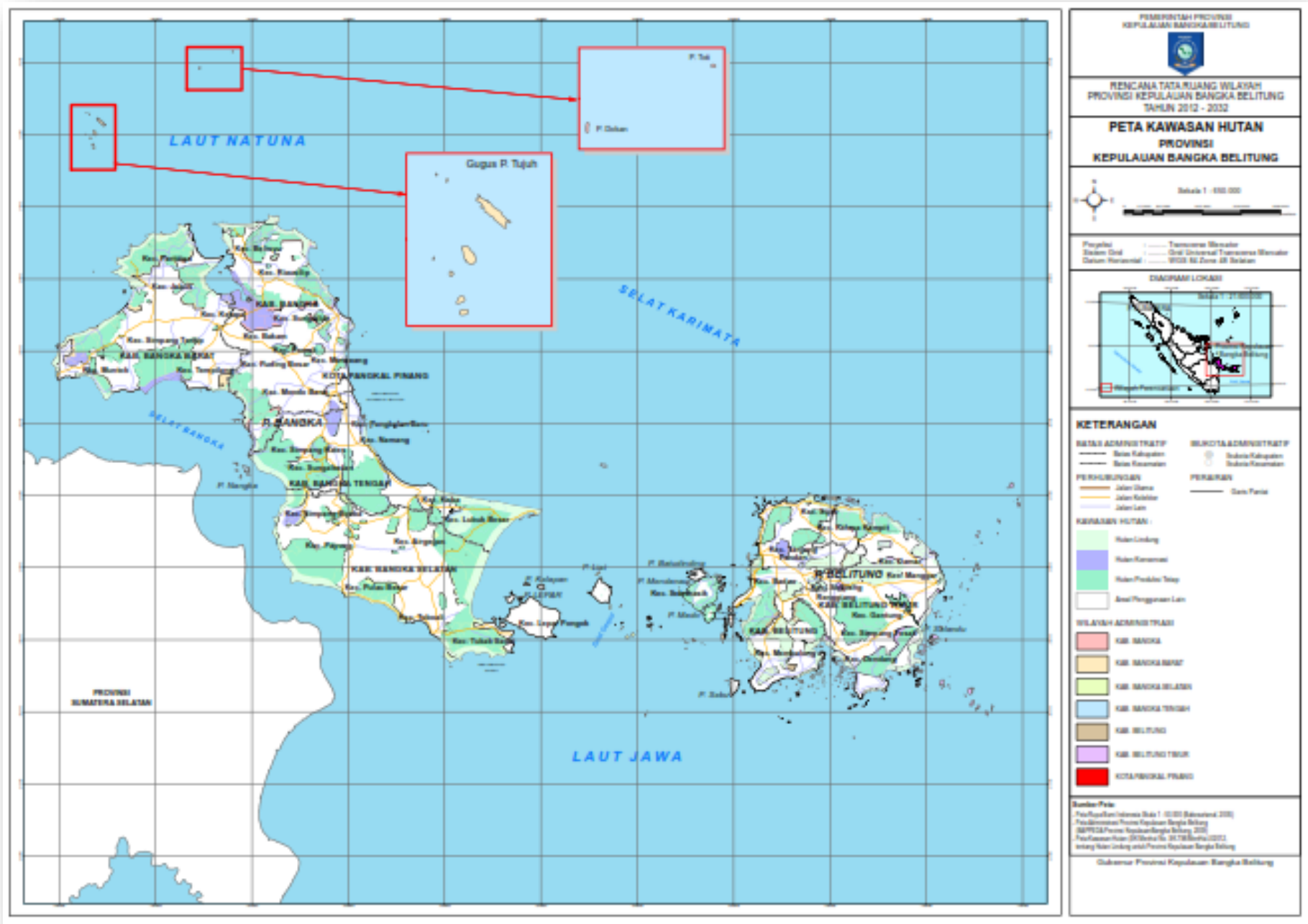
LAUT NATUNA
Gugus P. Tujuh
P. Tok
P. Dekan
SELAT KARIMATA
SELAT BANGKA
P. BANGKA
P. BELITUNG
KOTA PANGKAL PINANG
KAB. BANGKA
KAB. BANGKA BARAT
KAB. BANGKA TENGAH
KAB. BANGKA SELATAN
KAB. BELITUNG
KAB. BELITUNG TIMUR
P. Lepar
P. Pongok
P. Liat
P. Mendanau
P. Selat
P. Nangka
PROVINSI SUMATERA SELATAN
LAUT JAWA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2012 - 2032
PETA KAWASAN HUTAN
PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIAGRAM LOKASI
KETERANGAN
BATAS ADMINISTRATIF
Batas Kabupaten
Batas Kecamatan
IBUKOTA ADMINISTRATIF
Ibukota Kabupaten
Ibukota Kecamatan
PERHUBUNGAN
Jalan Utama
Jalan Kolektor
Jalan Lain
PERAIRAN
Garis Pantai
KAWASAN HUTAN :
Hutan Lindung
Hutan Konservasi
Hutan Produksi Tetap
Areal Penggunaan Lain
WILAYAH ADMINISTRASI
KAB. BANGKA
KAB. BANGKA BARAT
KAB. BANGKA SELATAN
KAB. BANGKA TENGAH
KAB. BELITUNG
KAB. BELITUNG TIMUR
KOTA PANGKAL PINANG
Sumber Peta:
Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

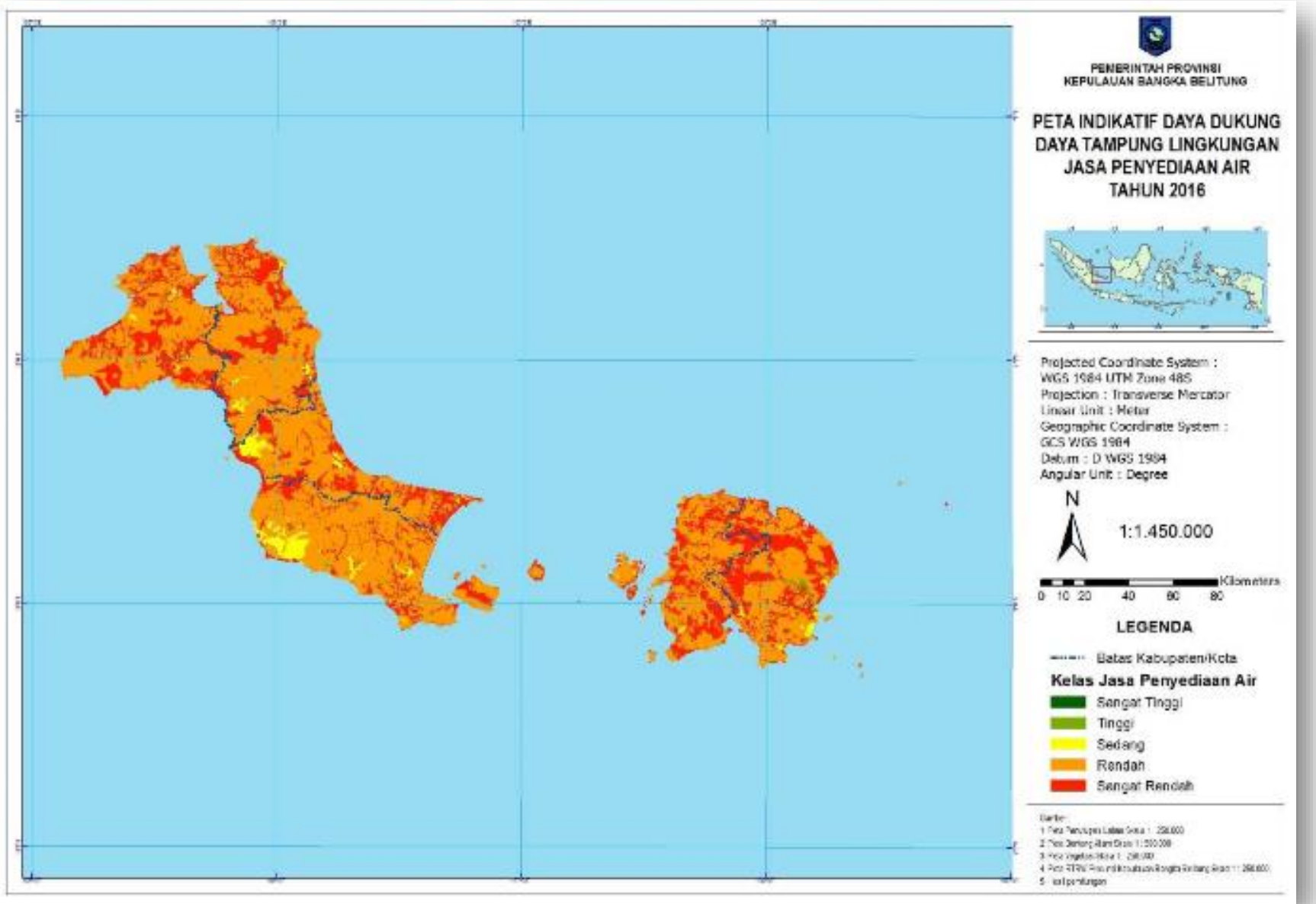
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENYEDIAAN AIR
TAHUN 2016
Projected Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection : Transverse Mercator
Linear Unit : Meter
Geographic Coordinate System :
GCS WGS 1984
Datum : D WGS 1984
Angular Unit : Degree
N
1:1.450.000
0 10 20 40 60 80
Kilometers
LEGENDA
Batas Kabupaten/Kota
Kelas Jasa Penyediaan Air
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

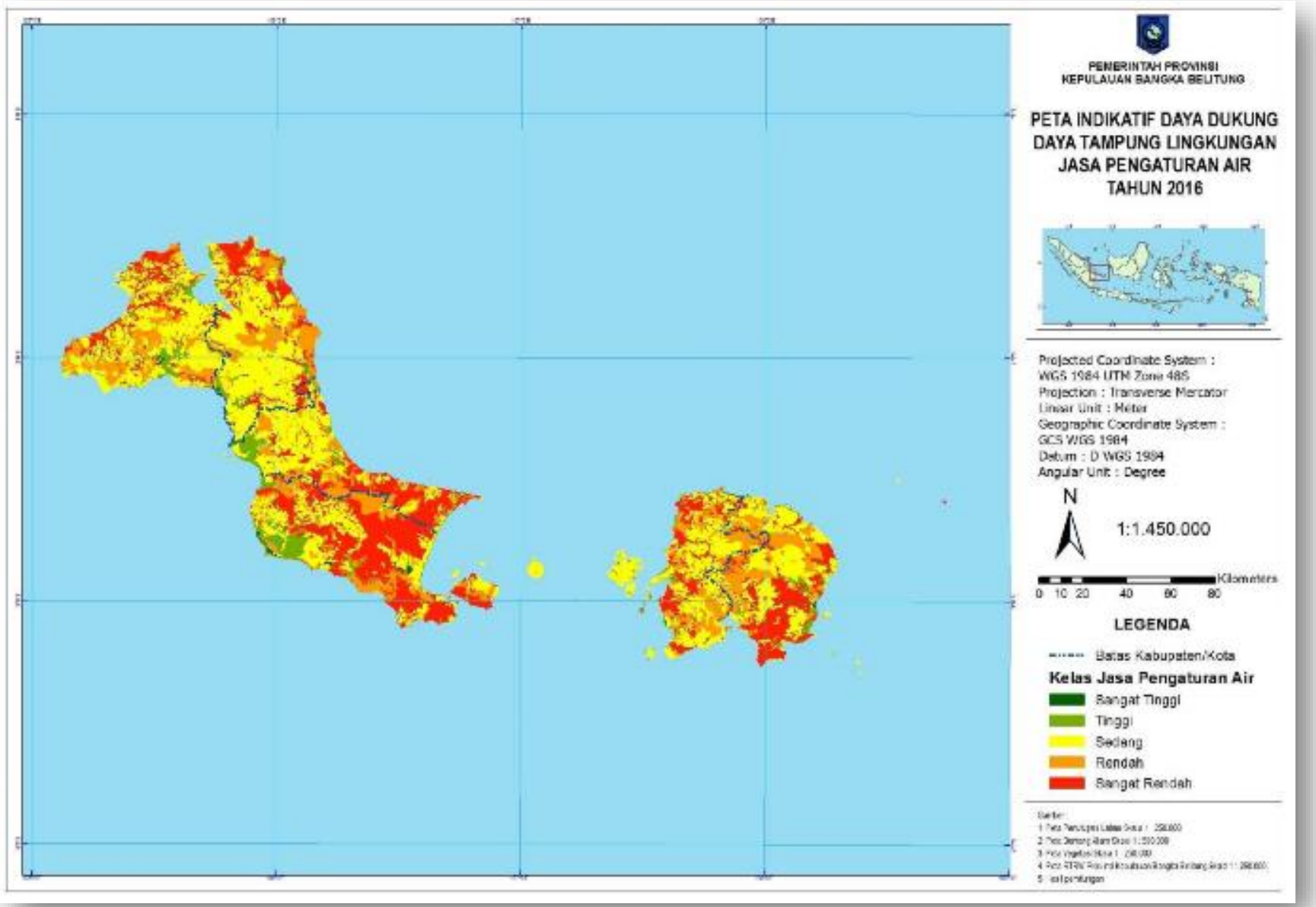
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENGATURAN AIR
TAHUN 2016
Projected Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection : Transverse Mercator
Linear Unit : Meter
Geographic Coordinate System :
GCS WGS 1984
Datum : D WGS 1984
Angular Unit : Degree
N
1:1.450.000
0 10 20 40 60 80
Kilometers
LEGENDA
Batas Kabupaten/Kota
Kelas Jasa Pengaturan Air
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

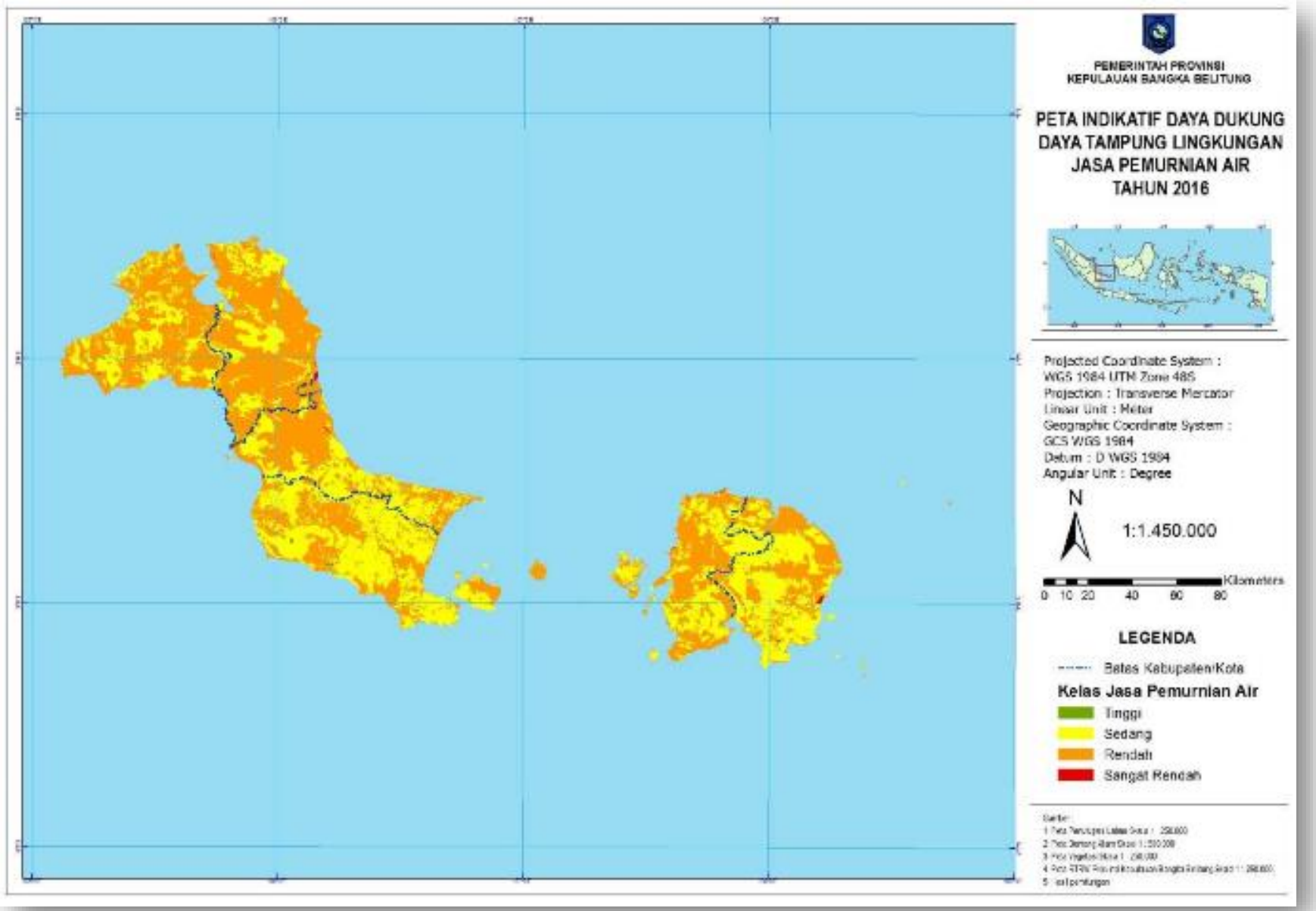
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PEMURNIAN AIR
TAHUN 2016
Projected Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection : Transverse Mercator
Linear Unit : Meter
Geographic Coordinate System :
GCS WGS 1984
Datum : D WGS 1984
Angular Unit : Degree
N
1:1.450.000
Kilometers
0 10 20 40 60 80
LEGENDA
Batas Kabupaten/Kota
Kelas Jasa Pemurnian Air
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

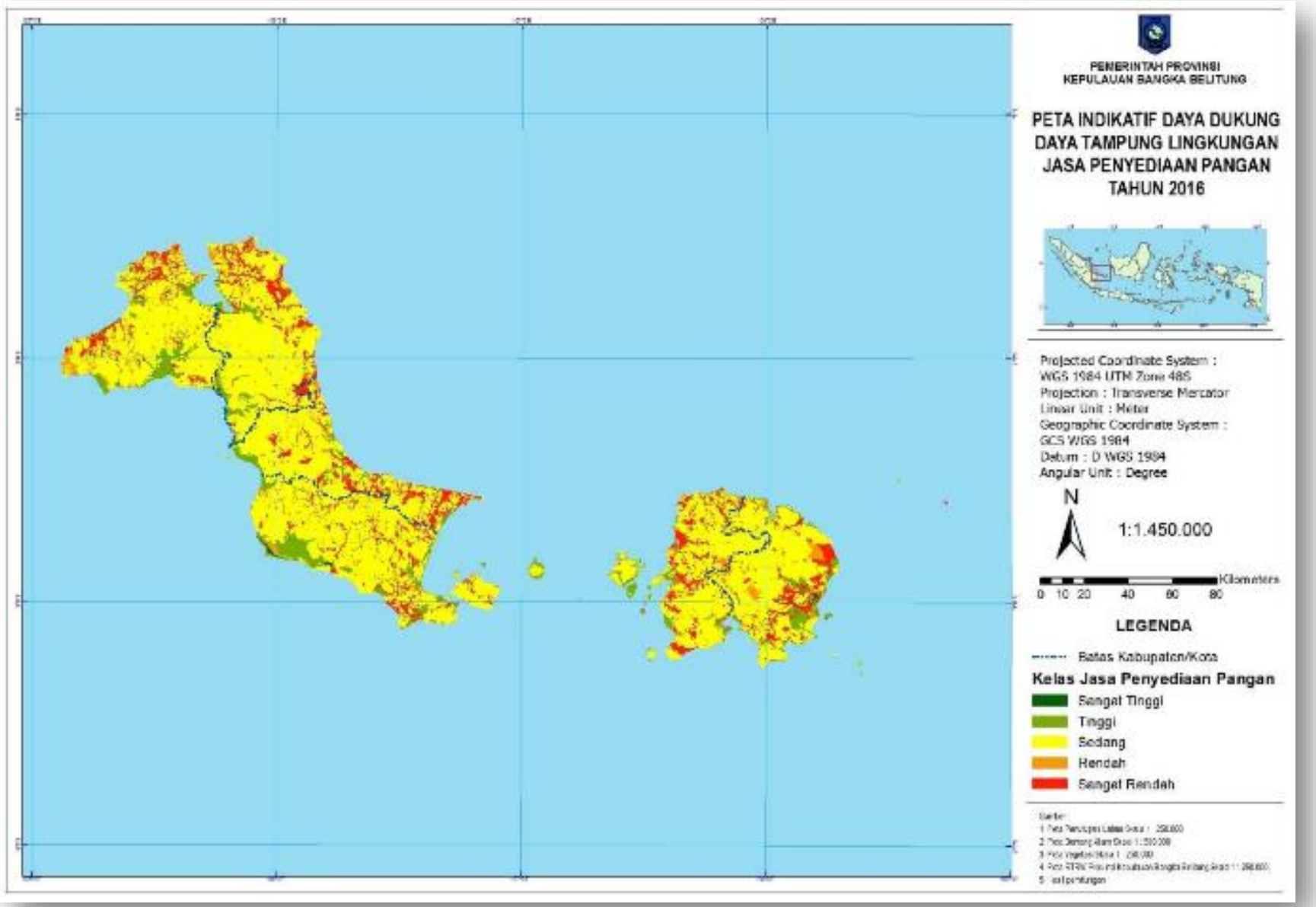
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENYEDIAAN PANGAN
TAHUN 2016
Projected Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection : Transverse Mercator
Linear Unit : Meter
Geographic Coordinate System :
GCS WGS 1984
Datum : D WGS 1984
Angular Unit : Degree
N
1:1.450.000
0 10 20 40 60 80
Kilometers
LEGENDA
Batas Kabupaten/Kota
Kelas Jasa Penyediaan Pangan
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

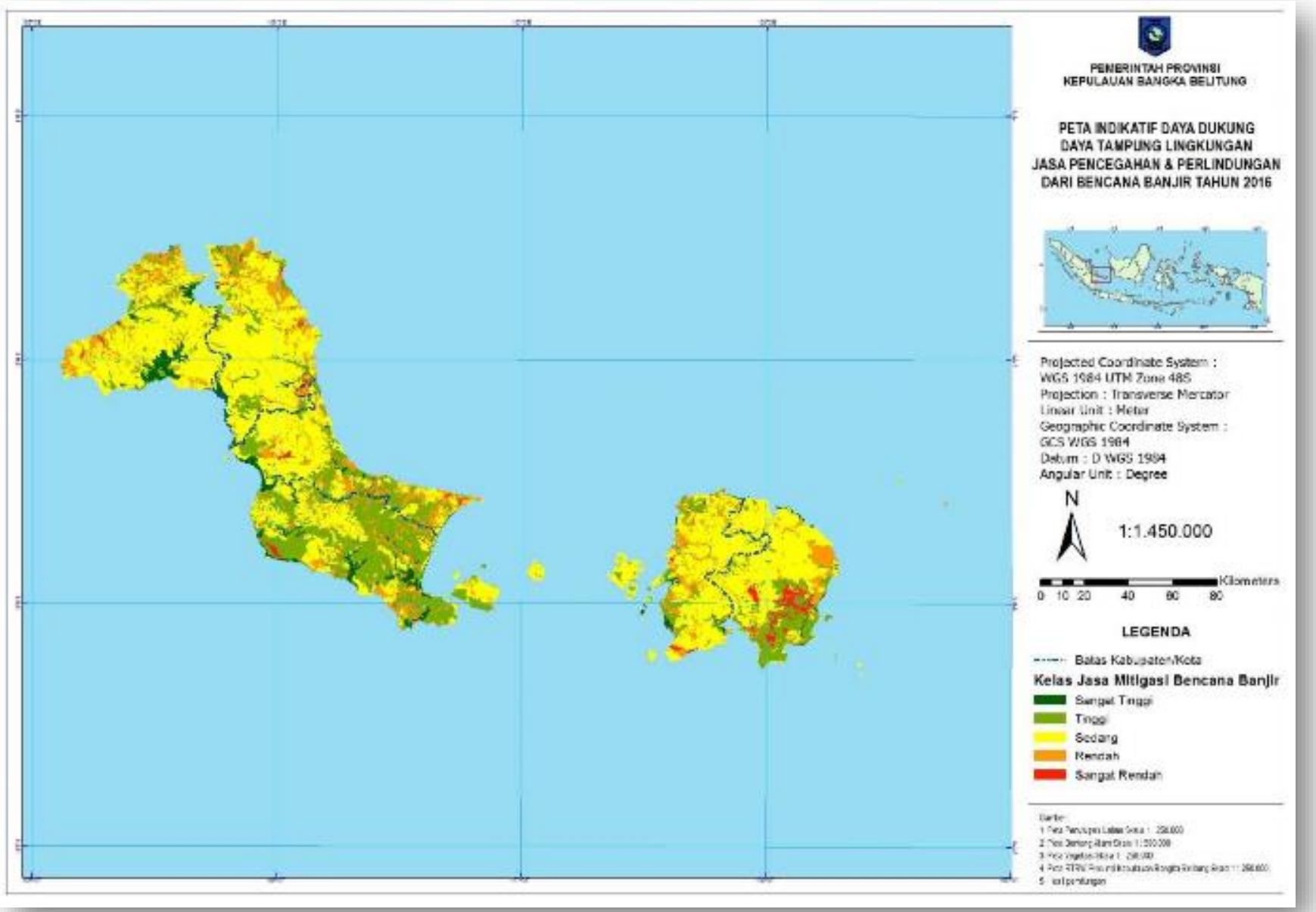
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA INDIKATIF DAYA DUKUNG
DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN
JASA PENCEGAHAN & PERLINDUNGAN
DARI BENCANA BANJIR TAHUN 2016
Projected Coordinate System :
WGS 1984 UTM Zone 48S
Projection : Transverse Mercator
Linear Unit : Meter
Geographic Coordinate System :
GCS WGS 1984
Datum : D WGS 1984
Angular Unit : Degree
N
1:1.450.000
0 10 20 40 60 80
Kilometers
LEGENDA
Batas Kabupaten/Kota
Kelas Jasa Mitigasi Bencana Banjir
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah

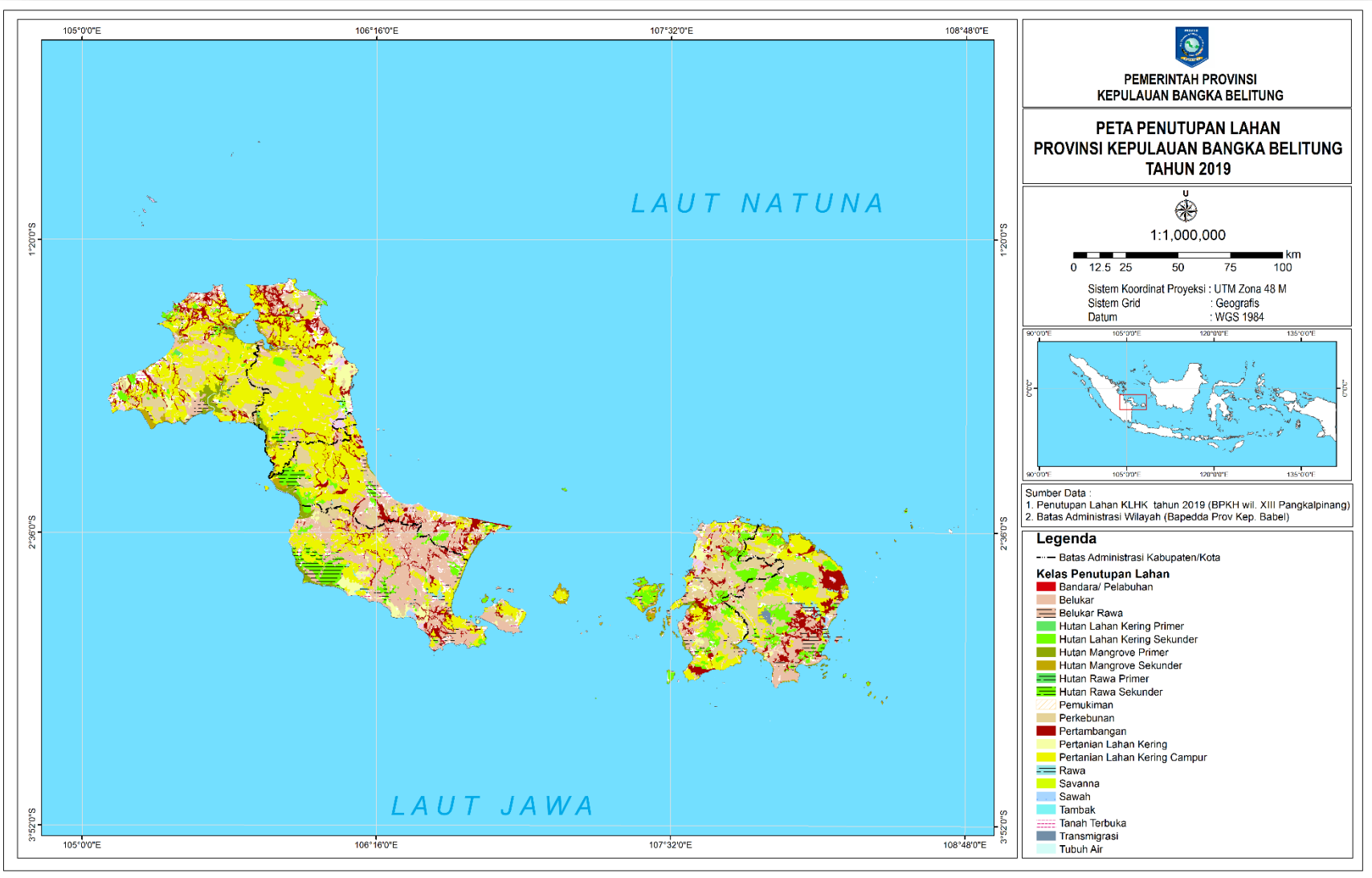
105°0'0"E
106°16'0"E
107°32'0"E
108°48'0"E
1°20'0"S
2°36'0"S
3°52'0"S
LAUT NATUNA
LAUT JAWA
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PETA PENUTUPAN LAHAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019
U
1:1,000,000
0 12.5 25 50 75 100 km
Sistem Koordinat Proyeksi : UTM Zona 48 M
Sistem Grid : Geografis
Datum : WGS 1984
Sumber Data :
1. Penutupan Lahan KLHK tahun 2019 (BPKH wil. XIII Pangkalpinang)
2. Batas Administrasi Wilayah (Bapedda Prov Kep. Babel)
Legenda
Batas Administrasi Kabupaten/Kota
Kelas Penutupan Lahan
Bandara/ Pelabuhan
Belukar
Belukar Rawa
Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder
Hutan Rawa Primer
Hutan Rawa Sekunder
Pemukiman
Perkebunan
Pertambangan
Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Campur
Rawa
Savanna
Sawah
Tambak
Tanah Terbuka
Transmigrasi
Tubuh Air

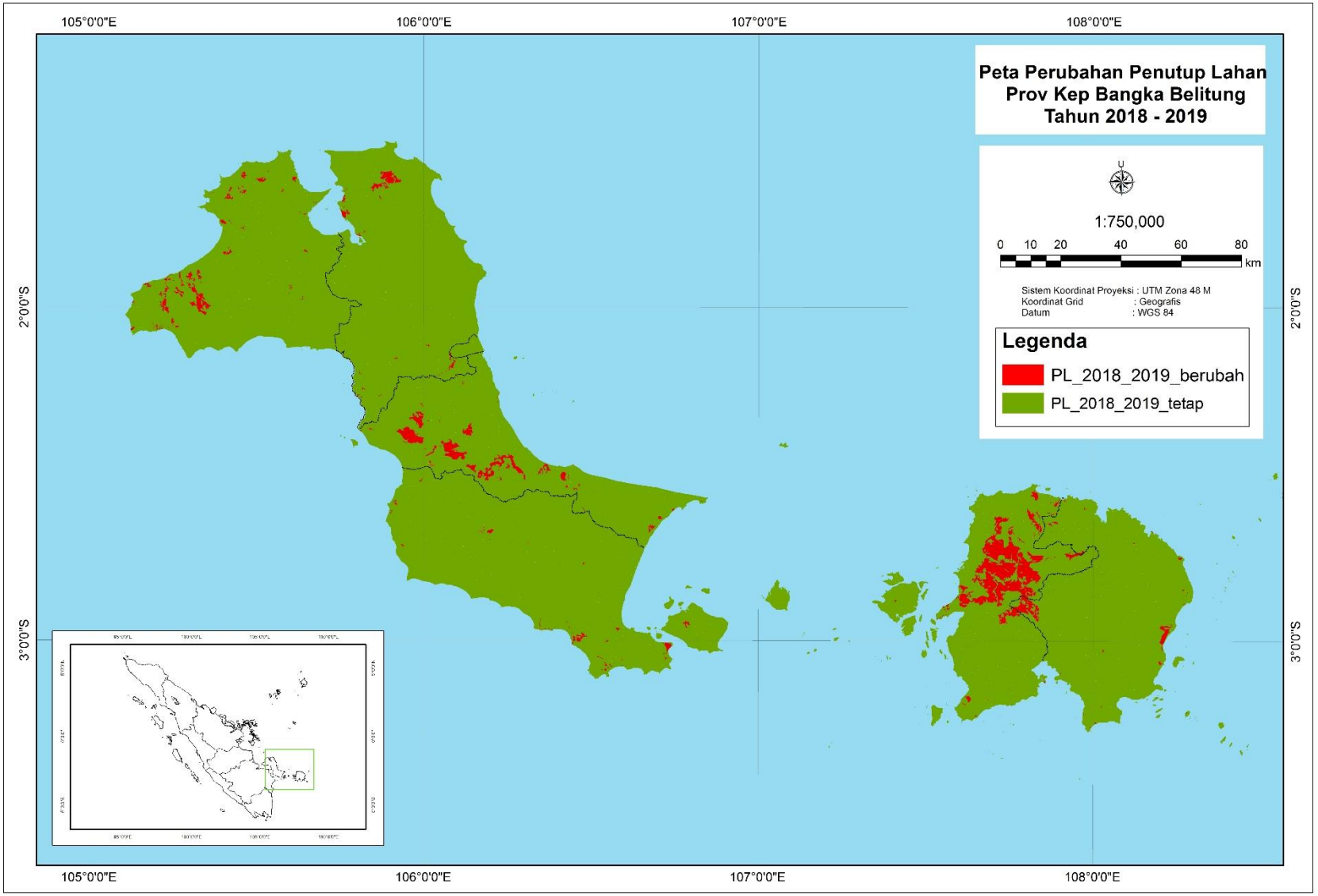
Peta Perubahan Penutup Lahan
Prov Kep Bangka Belitung
Tahun 2018 - 2019
U
1:750,000
0 10 20 40 60 80
km
Sistem Koordinat Proyeksi : UTM Zona 48 M
Koordinat Grid : Geografis
Datum : WGS 84
Legenda
PL_2018_2019_berubah
PL_2018_2019_tetap
105°0'0"E
106°0'0"E
107°0'0"E
108°0'0"E
2°0'0"S
3°0'0"S

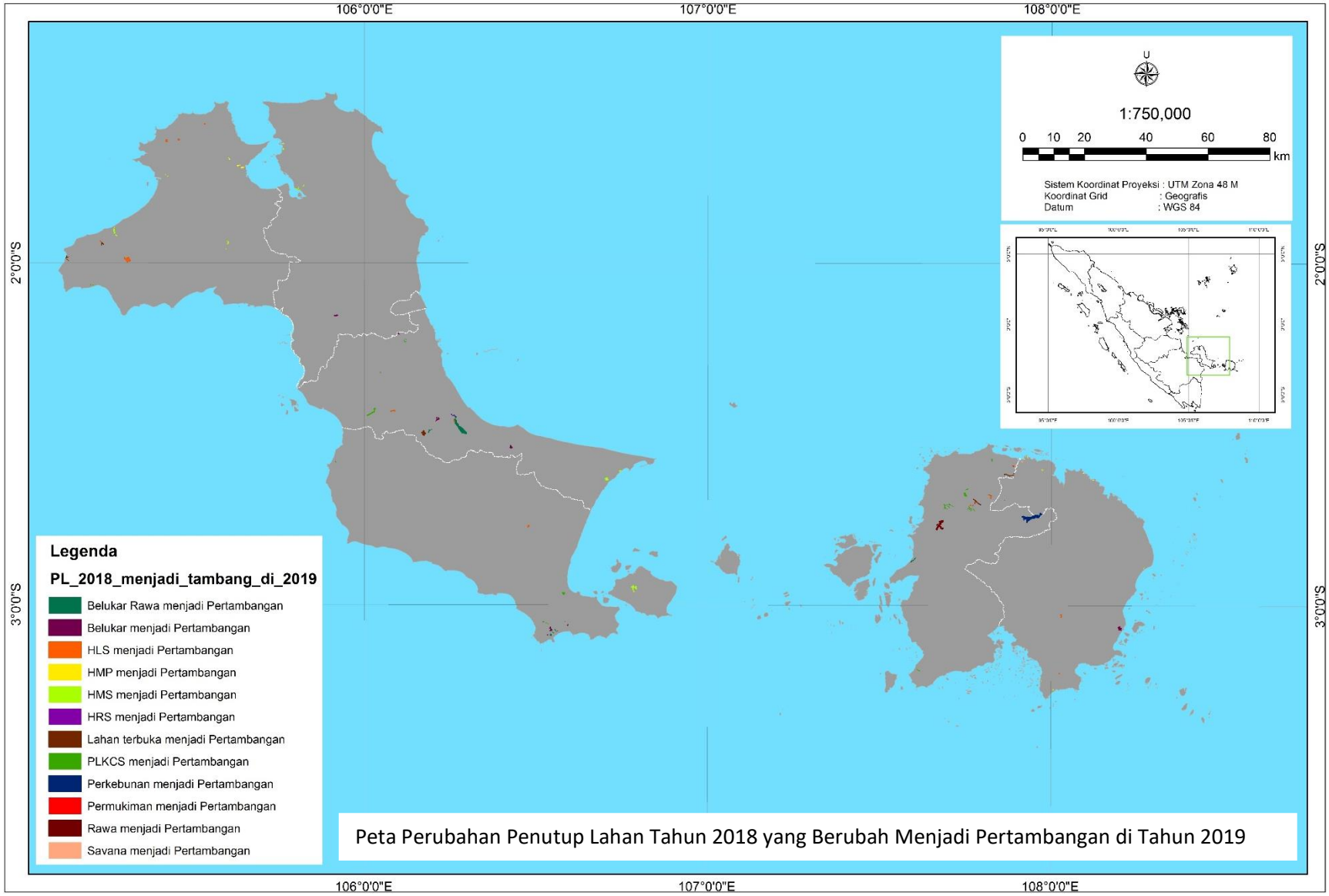
106°0'0"E
107°0'0"E
108°0'0"E
2°0'0"S
3°0'0"S
U
1:750,000
0 10 20 40 60 80
km
Sistem Koordinat Proyeksi : UTM Zona 48 M
Koordinat Grid : Geografis
Datum : WGS 84
Legenda
PL_2018_menjadi_tambang_di_2019
Belukar Rawa menjadi Pertambangan
Belukar menjadi Pertambangan
HLS menjadi Pertambangan
HMP menjadi Pertambangan
HMS menjadi Pertambangan
HRS menjadi Pertambangan
Lahan terbuka menjadi Pertambangan
PLKCS menjadi Pertambangan
Perkebunan menjadi Pertambangan
Permukiman menjadi Pertambangan
Rawa menjadi Pertambangan
Savana menjadi Pertambangan
Peta Perubahan Penutup Lahan Tahun 2018 yang Berubah Menjadi Pertambangan di Tahun 2019

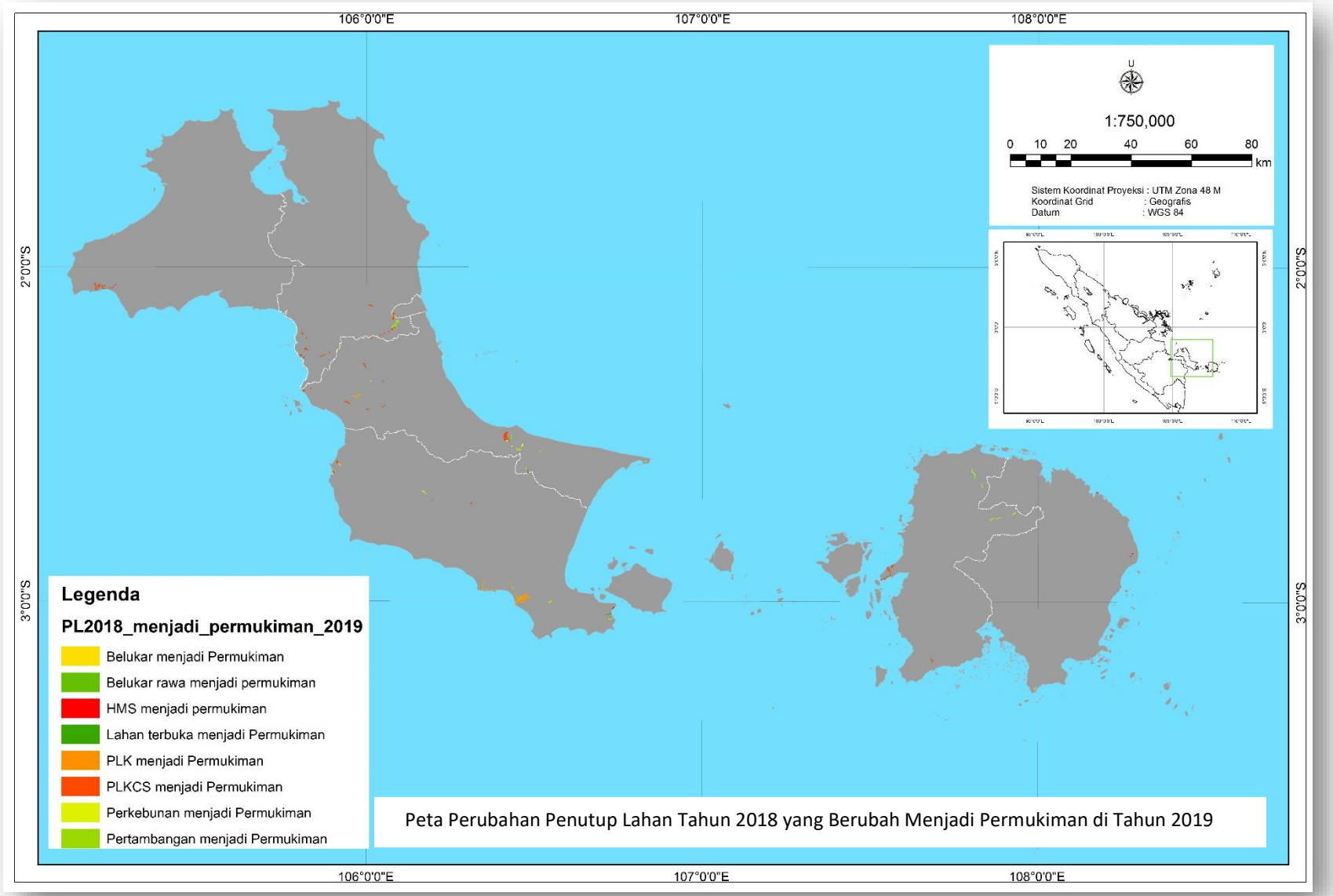
106°0'0"E
107°0'0"E
108°0'0"E
2°0'0"S
3°0'0"S
U
1:750,000
0 10 20 40 60 80
km
Sistem Koordinat Proyeksi : UTM Zona 48 M
Koordinat Grid : Geografis
Datum : WGS 84
Legenda
PL2018_menjadi_permukiman_2019
Belukar menjadi Permukiman
Belukar rawa menjadi permukiman
HMS menjadi permukiman
Lahan terbuka menjadi Permukiman
PLK menjadi Permukiman
PLKCS menjadi Permukiman
Perkebunan menjadi Permukiman
Pertambangan menjadi Permukiman
Peta Perubahan Penutup Lahan Tahun 2018 yang Berubah Menjadi Permukiman di Tahun 2019

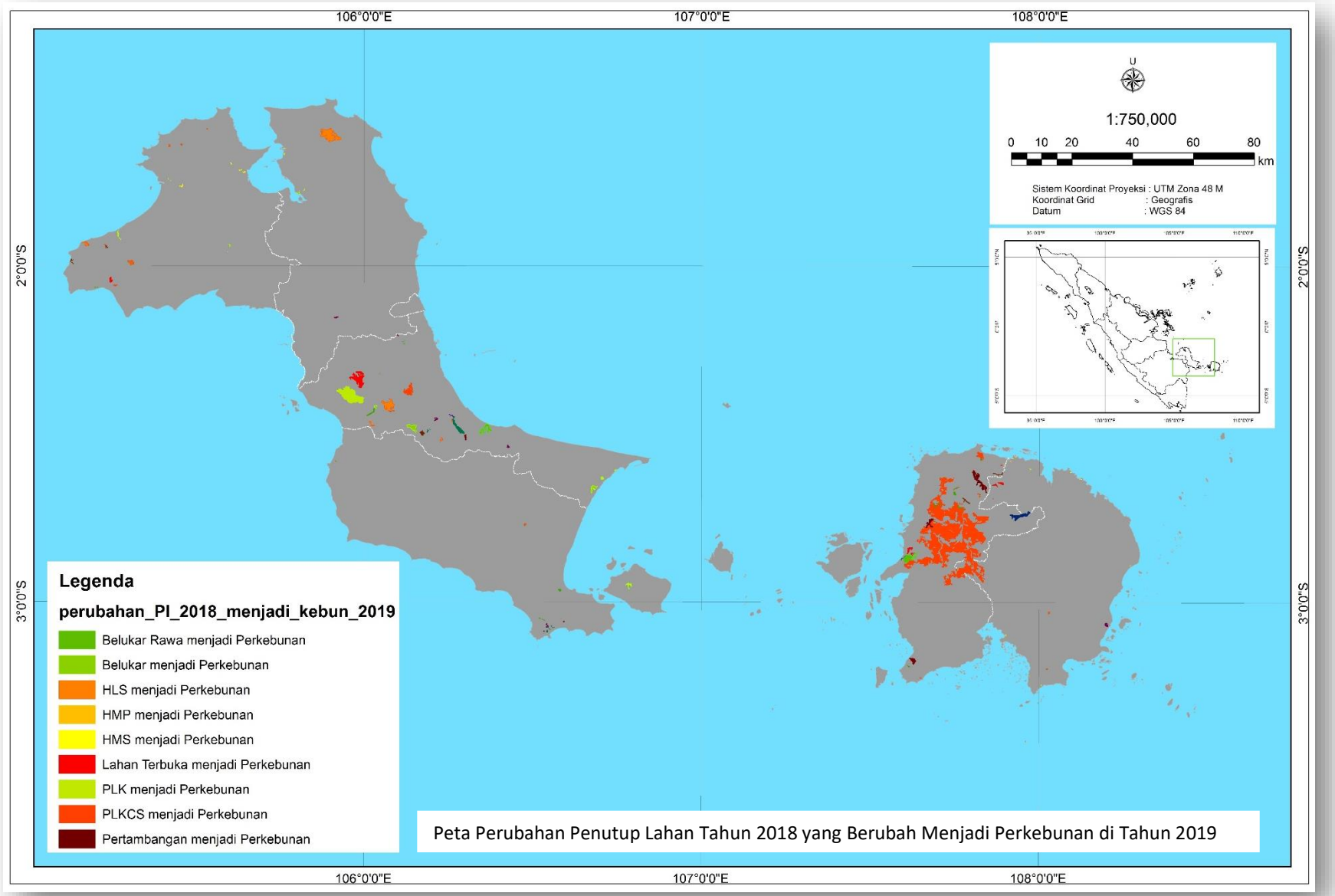

Peta Perubahan Penutup Lahan Tahun 2018 yang Berubah Menjadi Perkebunan di Tahun 2019

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI DIKPLHD 2019

ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLH) DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) RI
DI JAKARTA, TANGGAL 17 – 19 JANUARI 2020

Rapat Tim Internal Persiapan Workshop Kebijakan dan Sosialisasi Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Tanggal 10 Februari 2020,
di Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Workshop Penyusunan
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
Tahun 2019 Tanggal 11 Februari 2020,
di Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

WORKSHOP KEBIJAKAN DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
TANGGAL 11 FEBRUARI 2020
DI RUANG RAPAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

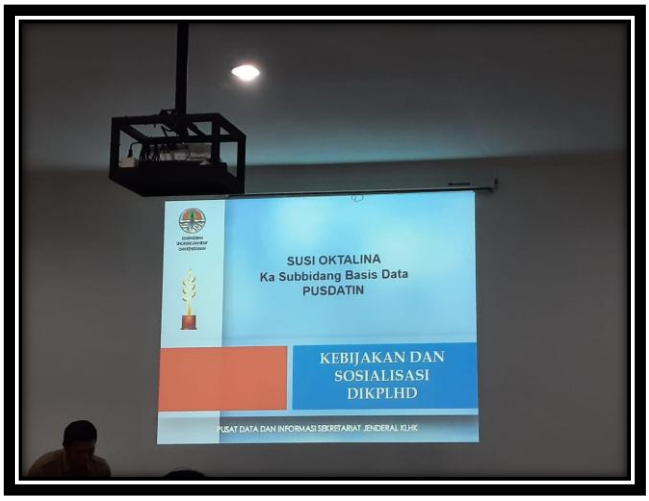

Rapat Internal Persiapan FGD-1
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tanggal 06 Maret 2020
di Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Rapat FGD I Perumusan Isu Prioritas Daerah Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Tanggal 11 Maret 2020, di Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PROSES PENARIKAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2019

Tanggal 11 Maret 2020, di Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

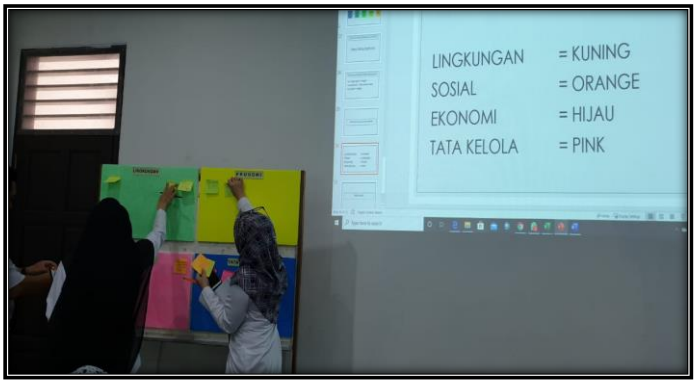

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA BARAT, IDENTIFIKASI DAN PENGAMBILAN DATA DIKPLHD DAN IKLH, SERTA PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR DI KABUPATEN BANGKA BARAT

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)
KE DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA
IDENTIFIKASI DAN PENGAMBILAN DATA DIKPLHD DAN IKLH , SERTA PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR DI KABUPATEN BANGKA

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD) DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DI KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN LINGKUNGAN HIDUP (DPKPLH) KABUPATEN BANGKA SELATAN DAN IDENTIFIKASI, PENGAMBILAN DATA SERTA PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pengambilan Sampel Air Sumur Warga di Toboali jl. Simpang Lima Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan

Pengambilan Sampel Air Kolong di Desa Telek Kec. Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD) DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN BANGKA TENGAH DAN IDENTIFIKASI, PENGAMBILAN DATA SERTA PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

PENGAMBILAN SAMPLING AIR SUMUR WARGA DI KECAMATAN KOBA KABUPATEN BANGKA TENGAH

PENGAMBILAN SAMPEL AIR KOLONG DI DESA AIR BARA KECAMATAN AIR GEGAS KABUPATEN BANGKA TENGAH

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD) DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN BELITUNG DAN IDENTIFIKASI, PENGAMBILAN DATA SERTA PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR DI KABUPATEN BELITUNG

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DIKPLHD DAN IKLH, IDENTIFIKASI DAN PENGAMBILAN DATA DIKPLHD DAN IKLH, DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG

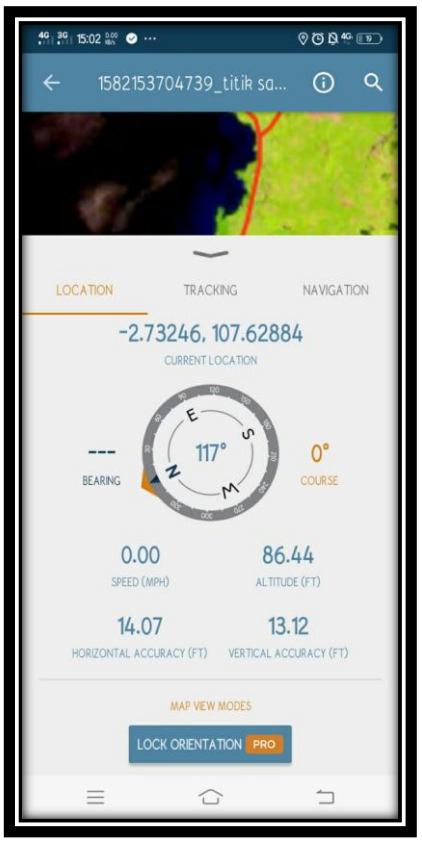

Pengambilan Sampel Air Sumur Rumah Makan Dapoer RR di Tanjung Pandan Kabupaten Belitung

SOSIALISASI KEWAJIBAN PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DIKPLHD) DAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN BELITUNG TIMUR DAN IDENTIFIKASI, PENGAMBILAN DATA SERTA PENGAMBILAN SAMPEL AIR SUMUR DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pengambilan Sampel Air di Desa Gantung Kec. Gantung Kab. Belitung Timur

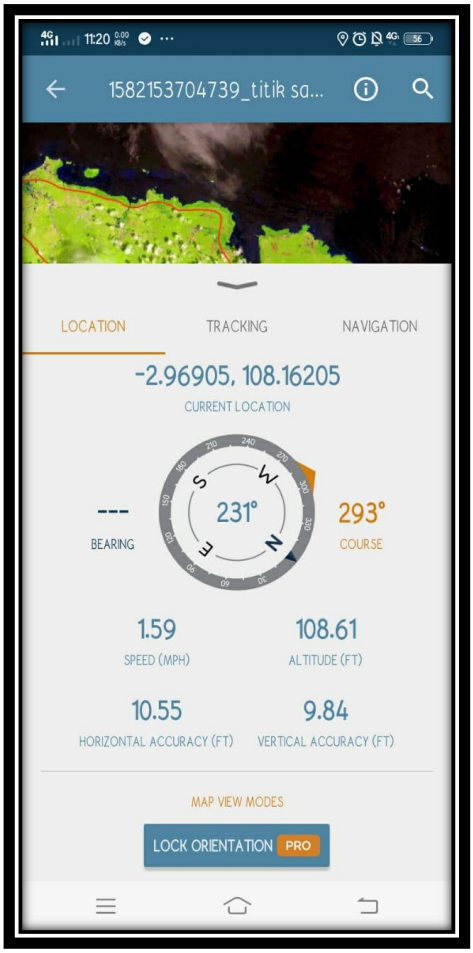

Titik Koordinat Pengambilan Sampel Air Sumur

LAMPIRAN VII

BIODATA PENYUSUN

Jl. Basuki Rachmat
No.288 Pangkalpinang

08176443446

edwinblhd@gmail.com

Edwin
Edwin Setiady,S.T.,M.T.

PENGALAMAN KERJA

2005-2007
Indo Keramik Intiwidya -Division Head Indokeramik Inti Widya

2007-2010

Petrochemical P T. Gajah Tunggal,Tbk Div. Styrene Butadiene Rubber – Suppervisor Produksi

2010 -2013

PNS BLHD Kota Pangkalpinang

2013-2018
PNS DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pengendali Dampak Lingkungan

2018-Sekarang
PNS DLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Institut Teknologi Bandung
- 2016-2018 – Studi Pembangunan- SAPPK (S2)

INstitus Teknologi Nasional Bandung
- 2005 - Bidang Studi Teknik Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2007 - Waste Water Treatment Plant- Nalco Indonesia
- 2007 Healt Saefty Envirobment. Polymerization, Utility,RO, Coagulation
- *2010* – Pelatihan Pencemaran Udara-KLHK
- 2011- Pelatihan pemantauan kerusakan tanah untuk produksi biomassa

- 2011- Pelatihan Dasar - Dasar Pengawas 2011 Lingkungan Hidup- Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup Angkatan VII
- 2013 Pelatihan Penentuan Daya Tampung Sungai PPE Sumatra Peningkatan kapasita Inv.GRK Kegiatan pengelolaan limbah,Inventori IKLH
- 2014 -Iso 17025 tingkat lanjut-2 pusarpedal
- 2020 – Penyusunan KLHS-ITB

PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2018 – Lulusan Terbaik Studi pembangunan ITB- 2018
- Beasiswa Bappenas 2016-2018

PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2018- Analisis Revitalisasi Lada Putih Sebagai Program Penggerak Perekonomian Pasca Tambang Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Menggunakan Sistem Dynamics- Jurnal SAPPK ITB
- 2007 – *Perancangan Heatexchanger 501 PT.Gajah Tunggal TBK*

Jl. Melati No.494B, Bukit Merapin Pangkalpinang

08111906507

lorriprahara@gmail.com

LORRI
Lorri Prahara,S.Si.,M.T

PENGALAMAN KERJA

2010–Sekarang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Indonesia, Depok
- 2018 - Bidang Studi Teknik Sipil – Lingkungan (S2)

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- 2004 - Bidang Studi Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2015 - Penentuan Daya Tampung Sungai - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2014 - Pengendalian Pencemaran Udara - KLH
- 2013 - *Laboratory Proficiency Testing* - SPIN
- 2013 - Pelatihan Analisis Air - UGM
- 2012 - Bimtek Teknik Laboratorium Lingkungan - PUSARPEDAL KLH
- 2011 - SNI/IEC 17025 : 2008 - BSN
- 2008 - OHSAS 18001 : 2007 dan SMK3 - IKRCS

PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2019 - Tetra Pak Indonesia
- 2018 - Beasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGALAMAN PENELITIAN/KARYA TULIS ILMIAH

- 2019 - UBC *Recycling Value Chain Project*
- 2018 - *Utilization of non-woven geotextile as insulation on bio-drying reactor*

ELZA
Elza Rizkiawalia,S.T.,M.S.i

Jl. Stania Gg. Masjid 202
Kel. Taman Bunga
Kec. Gerunggang
Pangkalpinang 33122

081367196665

elza.rizkiawalia@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

2010–Sekarang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Diponegoro, Semarang
- 2017 - Prodi Magister Ilmu Lingkungan (S2)

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran", Yogyakarta
- 2003 - Jurusan Teknik Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2020 - Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar - Technogis Indonesia
- 2019 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) - PSLH ITB
- 2018 - Dokumentasi sesuai ISO/IEC 17025:2017 - SPIN
- 2016 - Dasar-dasar AMDAL - PPLH Undip

PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2018 - Beasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENGALAMAN PENELITIAN/KARYA TULIS ILMIAH

- 2017 - Kajian Peluang dan Kelayakan Penerapan Produksi Bersih di Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

NINGSIH
Ningsih Tassri,S.T.,M.Sc

Jl. Gang Nasir RT 09 RW 002 Kel. Sinar Bulan, Kec Bukit Intan Pangkalpinang 33149

0812-7300040

ningsihtassri10@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

Februari 2020 - Sekarang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Analis Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

2010 - Januari 2020
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Pengelola Laboratorium - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

2006 - 2009
Quality Control Analyst - PT Surya Hutama Sawit - Prov Sumatera Selatan

PENDIDIKAN

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- 2019 - Bidang Studi Penginderaan Jauh (S2)

Universitas Sriwijaya, Palembang
- 2005 - Bidang Studi Teknik Kimia (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2020 - Penentuan Titik *Ground Control Point* (GCP) - PUPR Prov Kep. Bangka Belitung
- 2018 - Penulisan Artikel Ilmiah – Fakultas Geografi UGM
- 2017 - ESA *Sentinel Application Platform Introduction n Processing* - *Institut of Applied Geosciences*, Berlin - UGM
- 2017 - Bimtek Penyusunan Peta Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup – Pusat Pengelola Ekoregion Sumatera - DLH Prov Kep. Bangka Belitung
- 2016 - Prosedur Pengecekan Antara dan Verifikasi Spektrofotometer - PT Akurasi Prima
- 2014 - Shimadzu AAS *Operational Training* - PT Ditek Jaya
- 2013 - Pengambilan Contoh Uji Air - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2013 - *Laboratory Proficiency Training* - Sinergi Prima Inti
- 2013 - Analisis Kualitas Air Parameter Lingkungan - Fak MIPA UGM
- 2013 - Diklat Pengelolaan Laboratorium Lingkungan - Pusdiklat KLHK

- 2011 - Metode Pengujian dan Validasi/Verifikasi Metode Sesuai Dengan ISO 17025 : 2008 - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2011 - Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Sesuai ISO 17025 : 2008 - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung
- 2010 - Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota Tingkat Menengah I - BLHD Prov Kep. Bangka Belitung

PENGHARGAAN/BEASISWA

- 2013 - Peserta Terbaik Diklat Pengelolaan Laboratorium - Pusdiklat KLHK
- 2017 – Beasiswa APBD Prov Kep Bangka Belitung

PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2019 - Proyeksi Serapan Emisi Karbondioksida Berdasarkan Analisis Citra Landsat dalam Perubahan Penutup Lahan Bervegetasi Terkait Aktivitas Penambangan di Sebagian Wilayah Kabupaten Bangka – Program Tubel - APBD Prov Kep. Bangka Belitung (Tesis)
- 2019 - *Changes in Carbon Dioxide Sequestration as an Impact of Tin Mining Based on Remote Sensing Imagery* - RTA - Universitas Gadjah Mada
- 2019 - *Multitemporal Analysis of Vegetated Land Cover Changes Related to Tin Mining Activities in Bangka Regency Using Multitemporal Landsat Imagery* - RTA Universitas Gadjah Mada

FIANDA
Fianda Revina Widyastuti, SKM., M.Si

Jl. Melati Gg. Dahlia VII No.470 RT 03 RW 01 Bukit Merapin, Kec. Gerunggang Pangkalpinang

08122573163

fiandarevina@gmail.com

PENGALAMAN KERJA

Maret 2020 - Sekarang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Kasi. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

Juli 2018 - Maret 2020
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Kasi. Kajian Dampak Lingkungan - Dinas Lingkungan Hidup Prov Kep. Bangka Belitung

2015 - 2018
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Penyuluh KB Ahli Pertama - DP3ACSKB Prov Kep. Bangka Belitung

2009 - 2015
Pegawai Negeri Sipil (PNS) - Penyuluh KB - BPPKBPA Prov Kep. Bangka Belitung

PENDIDIKAN

Universitas Diponegoro, Semarang
- 2014 - Bidang Studi Ilmu Lingkungan (S2)

Universitas Dian Nuswantoro, Semarang
- 2007 - Bidang Studi Kesehatan Masyarakat/Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Industri (S1)

PELATIHAN PROFESIONAL

- 2018 - Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL (AMDAL A) - PPM UNDIP Semarang
- 2017 - Pelatihan Manajemen Waktu dan Motivasi Diri - Balitbang BKKBN Prov Kep. Bangka Belitung
- 2017 - Seminar Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga - Sekjen DPD dan STAIN Syekh Abdurahman Sidik
- 2017 - Pelatihan Teknis Penyegaran Program KKPBK bagi PLKB -

Balitbang BKKBN Prov Kep. Bangka Belitung

- 2013 - Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Saya Alam dan Lingkungan - Himpunan Mahasiswa Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan Hidup
- 2010 - Pelatihan Dasar Umum Bagi Petgas Lapangan KB Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Balitbang BKKBN Prov Kep. Bangka Belitung

PENGALAMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- 2013 - Penerapan Produksi Bersih pada Peternakan Sapi Perah PT *Bangka Botanical Garden* Pangkalpinang
- 2013 - Upaya Pengelolaan Lingkungan Usaha Peternakan Sapi di Kawasan Usahatani Terpadu *Bangka Botanical Garden* Pangkalpinang
- 2007 - Riset Kesehatan Dasar
- 2006 - Faktor-faktr yang Berhubungan Dengan Sikap Pengetahuan, Sikap dan Praktek dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) pada Departemen Pengemasan PT. Ulam Tiba Halim Semarang (PT Marimas)

PENGALAMAN PUBLIKASI

- 2014 - *Biogas Potential from the Treatment of Solid Waste of Dairy Cattle* : *Case Study at Bangka Botanical Garden* Pangkalpinang. *International Journal Waste Resources* 3:128.doi : 10.4172/2252-5211.1000128